

BERSINERGI

MENGAWAL STABILITAS,
MEWUJUDKAN
REFORMASI STRUKTURAL





Keterangan gambar:

Tari Saman (*Dance of Thousand Hands*) adalah sebuah tarian dari Suku Gayo yang melambangkan tingginya sopan santun, pendidikan, kebersamaan, kekompakan dari kepahlawanan masyarakat Aceh. Para penari juga dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan melakukan latihan intensif karena keseragaman formasi, kecepatan, dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini. Tari Saman mengilustrasikan pentingnya sinergi, kecepatan, dan ketepatan tindak dari para pemangku kebijakan dalam mewujudkan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan reformasi struktural.



**LAPORAN
PEREKONOMIAN
INDONESIA
2015**

ISSN 0522-2572



VISI

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

MISI

Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas ***Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.***

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Diagram dan Gambar	xvii
Dewan Gubernur Bank Indonesia	xviii
Prakata	xxii
Tinjauan Umum	xxvi
Boks. Akuntabilitas Pencapaian Sasaran Inflasi 2015	xl



BAGIAN 1 PEREKONOMIAN GLOBAL ¹

BAB 1 Dinamika Perekonomian Global	7
1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Negara Maju	9
1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Negara Berkembang	12
1.3. Harga Komoditas Global	13
1.4. Pasar Keuangan Global	14
Boks 1.1. Kinerja Negara <i>Emerging Markets</i> (EM) Menghadapi Pelemahan Ekonomi Tiongkok serta Penurunan Harga Komoditas Dunia	17

BAB 2 Respons Kebijakan Ekonomi Global	21
2.1. Kebijakan Negara Maju	22
2.2. Kebijakan Negara <i>Emerging Markets</i>	25
2.3. Kerja Sama Internasional	27
Boks 2.1. Implementasi MEA 2015 dan Visi ASEAN 2025	31



BAB 3		BAB 6	
Pertumbuhan Ekonomi	41	Inflasi	91
3.1. PDB Penggunaan	43	6.1. Inflasi Inti	93
3.2. PDB Penawaran	47	6.2. Inflasi <i>Volatile Food</i> (VF)	96
3.3. Kinerja Korporasi dan Rumah Tangga	49	6.3. Inflasi <i>Administered Prices</i> (AP)	98
3.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	52		
		BAB 7	
BAB 4		Fiskal	103
Neraca Pembayaran Indonesia	57	7.1. Pendapatan Negara	105
4.1. Transaksi Berjalan	60	7.2. Belanja Negara	107
4.2. Transaksi Modal dan Finansial	69	7.3. Pembiayaan	108
4.3. Ketahanan Eksternal	74		
Boks 4.1. Evaluasi Ketentuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank	77	BAB 8	
		Sistem Keuangan	113
BAB 5		8.1. Kinerja Perbankan	114
Nilai Tukar	81	8.2. Kinerja Sektor Korporasi dan Rumah Tangga	122
5.1. Dinamika Nilai Tukar	83	8.3. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Kinerja Pasar Keuangan	124
5.2. Struktur Pasar Valas Domestik	86	Boks 8.1. Penguatan Sektor Keuangan Melalui Penerapan Regulasi Berstandar Internasional	131

DAFTAR ISI

BAGIAN 3

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN 179

BAB 9 Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 135

9.1. Kinerja Sistem Pembayaran 137

9.2. Kinerja Pengelolaan Uang Rupiah 143

Boks 9.1. Penguatan Infrastruktur Sistem Pembayaran 151

BAB 10 Ekonomi Regional 155

10.1. Pertumbuhan Ekonomi Regional 157

10.2. Inflasi Regional 164

10.3. Fiskal Daerah 168

10.4. Stabilitas Keuangan Regional 171

10.5. Sistem Pembayaran dan Peredaran Uang 173

Boks 10.1. Penguatan *Advisory* Perekonomian Daerah 176

BAB 11 Kebijakan Moneter 187

11.1. Kebijakan Suku Bunga dan Giro Wajib Minimum 189

11.2. Kebijakan Nilai Tukar 190

11.3. Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 194

11.4. Transmisi Kebijakan Moneter 198

BAB 12 Kebijakan Makroprudensial 205

12.1. Pelonggaran Ketentuan *Loan/Financing to Value Ratio* (LTV/FTV) 206

12.2. Perluasan Sumber Pendanaan Intermediasi melalui Aturan *Loan to Funding Ratio* (LFR) 208

12.3. Kebijakan Mendorong Pengembangan UMKM 209

12.4. Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* 211

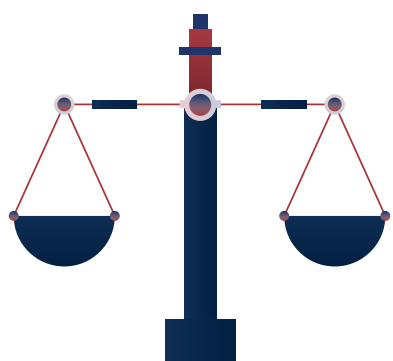
12.5. *Surveillance* dan Pemeriksaan Makroprudensial 213

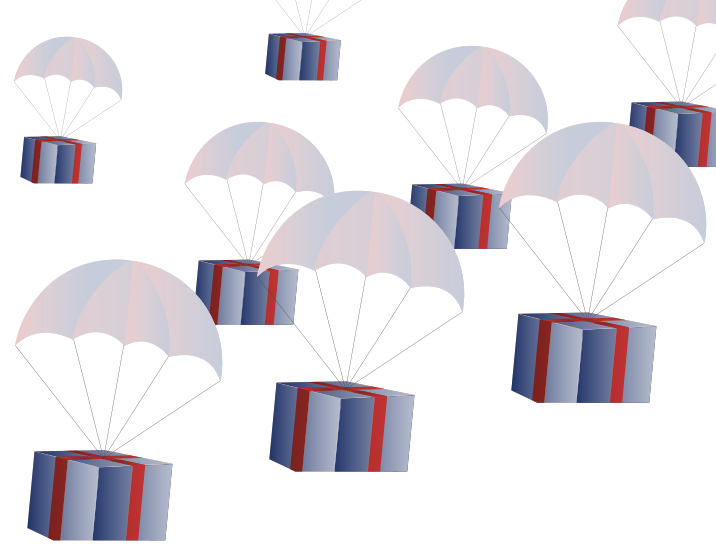
BAB 13 Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 215

13.1. Kebijakan Sistem Pembayaran 216

13.2. Kinerja Pengelolaan Uang Rupiah 226

Boks 13.1. *Best Practices* Distribusi Uang dan Layanan Kas 231





BAB 14
Koordinasi Kebijakan 235

14.1. Koordinasi dalam Rangka Menjaga Stabilitas Makroekonomi	236
14.2. Koordinasi dalam Rangka Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi	239
14.3. Koordinasi dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Struktural	245

BAB 16
Prospek Perekonomian 289

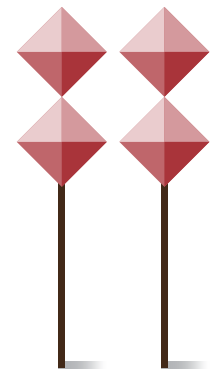
16.1. Prospek Perekonomian Jangka Pendek	290
16.2. Prospek Perekonomian Jangka Menengah	295
Boks 16.1. Ekonomi Digital Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi	298

BAGIAN 4
**TANTANGAN,
ARAH KEBIJAKAN
DAN PROSPEK
PEREKONOMIAN
INDONESIA** 251

LAMPIRAN 303

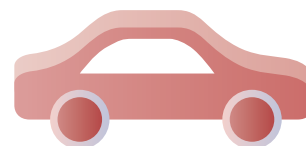
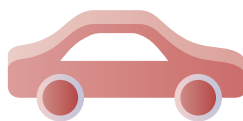
BAB 15
**Tantangan Perekonomian
dan Arah Kebijakan** 257

15.1. Tantangan Perekonomian	258
15.2. Arah Kebijakan	268
Boks 15.1. Analisis Daya Saing dan Strategi Industri Nasional di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Perdagangan Bebas	278
Boks 15.2. Strategi Pertumbuhan untuk Mendukung Reformasi Struktural di Indonesia	284

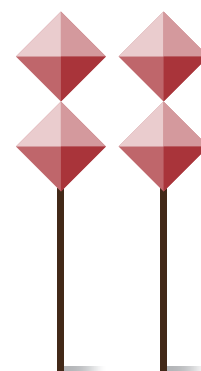


DAFTAR TABEL

1. Dinamika Perekonomian Global	7	Tabel 4.10. Ekspor Produk Kimia Organik Indonesia ke Beberapa Negara Tujuan Utama	67
Tabel 1.1. Tabel Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global	9	Tabel 4.11. Pangsa Pasar Beberapa Negara Eksportir Produk Kimia Organik di Tiongkok	67
3. Pertumbuhan Ekonomi	41	Tabel 4.12. Impor Nonmigas Menurut Kelompok Barang	68
Tabel 3.1. Pertumbuhan PDB Penggunaan	43	Tabel 4.13. Rasio Solvabilitas Sektor Eksternal	75
Tabel 3.2. Perkembangan Ekspor Nonmigas	44	Tabel 4.14. Rasio Likuiditas Sektor Eksternal	76
Tabel 3.3. Indikator Kemudahan Bisnis Indonesia	46	6. Inflasi	91
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha	47	Tabel 6.1. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti Pangan (<i>Core Food</i>)	93
Tabel 3.5. Angkatan Kerja dan Pengangguran	52	Tabel 6.2. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti Non Pangan (<i>Core Non-food</i>)	94
4. Neraca Pembayaran Indonesia	57	Tabel 6.3. Sumbangan Inflasi/Deflasi 9 Komoditas Pangan Strategis	97
Tabel 4.1. Neraca Pembayaran Indonesia	59	Tabel 6.4. Perubahan Beberapa <i>Administered Prices</i> Tahun 2015	99
Tabel 4.2. Posisi Investasi Internasional Indonesia	60	7. Fiskal	103
Tabel 4.3. Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan Utama	62	Tabel 7.1. Asumsi Makro	104
Tabel 4.4. Ekspor 10 Komoditas Utama Nonmigas	63	Tabel 7.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2014-2015	105
Tabel 4.5. Ekspor Nonmigas Menurut Kelompok Barang (Berdasarkan SITC)	64	Tabel 7.3. Perkiraan <i>Shortfall</i> Pajak	106
Tabel 4.6. Ekspor Produk Karet Indonesia ke Beberapa Negara Tujuan Utama	65	Tabel 7.4. <i>Net Claims on Government (NCG)</i> 2013-2015	110
Tabel 4.7. Pangsa Pasar Beberapa Negara Eksportir Karet di Jepang, Australia, dan AS	65		
Tabel 4.8. Ekspor Produk Pakaian Indonesia ke Beberapa Negara Tujuan Utama	66		
Tabel 4.9. Pangsa Pasar Beberapa Negara Eksportir Produk Pakaian Jadi di AS	66		



8. Sistem Keuangan	113	Tabel 13.3. Bank Pengelola dan Bank Anggota Kas Titipan	228
Tabel 8.1. Skema KUR 2015	121		
Tabel 8.2. Total Pembiayaan Nonbank	128	14. Koordinasi Kebijakan	235
Tabel 8.3. Pembiayaan IPO dan <i>Right Issue</i>	129	Tabel 14.1. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	241
Tabel 8.4. Pembiayaan Obligasi dan Sukuk Korporasi	130	Tabel 14.2. Bentuk Koordinasi Antarlembaga	243
		Tabel 14.3. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Rangka Reformasi Sektor Riil	248
10. Ekonomi Regional	155	15. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan	257
Tabel 10.1. Estimasi Realisasi APBD tahun 2015	169	Tabel 15.1. Pangsa Investasi Berdasarkan Sektor	265
		Tabel 15.2. Nilai PISA Beberapa Negara di Asia	267
11. Kebijakan Moneter	187	16. Prospek Perekonomian	289
Tabel 11.1. Paket Kebijakan 9 September dan 30 September	191	Tabel 16.1. Proyeksi PDB Sisi Permintaan	291
Tabel 11.2. Kerja Sama <i>Swap Arrangement</i>	195	Tabel 16.2. Proyeksi PDB Sisi Lapangan Usaha	293
12. Kebijakan Makroprudensial	205		
Tabel 12.1. Besaran Rasio LTV Kredit Properti dan FTV Pembiayaan Properti Syariah	207		
Tabel 12.2. Besaran Rasio Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	207		
13. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	215		
Tabel 13.1. Tarif Transaksi Sistem BI-RTGS Generasi II	224		
Tabel 13.2. Tahapan Pengembangan Penggunaan CeBM untuk Setelmen Transaksi Efek di Pasar Modal	225		



DAFTAR GRAFIK

1. Dinamika Perekonomian Global 7

Grafik 1.1.	Lanskap Ekonomi Global	8
Grafik 1.2.	Lanskap Inflasi Global	8
Grafik 1.3.	Dekomposisi Pertumbuhan AS	10
Grafik 1.4.	Sektor Manufaktur AS	10
Grafik 1.5.	Sektor Tenaga Kerja AS	10
Grafik 1.6.	Sektor Perumahan AS	11
Grafik 1.7.	Pertumbuhan Ekonomi Eropa	11
Grafik 1.8.	Sektor Manufaktur Eropa	11
Grafik 1.9.	Pertumbuhan Ekonomi Jepang	11
Grafik 1.10.	Sektor Manufaktur Jepang	12
Grafik 1.11.	Historis Perkembangan IHKEI	13
Grafik 1.12.	PDB Tiongkok dan Harga Komoditas <i>Non-Fuel</i>	14
Grafik 1.13.	Perkembangan <i>Capital Flows</i> EM	15
Grafik 1.14.	Perkembangan Pasar Saham Global	15
Grafik 1.15.	Perkembangan <i>Yield</i> Obligasi Pemerintah	15
Grafik 1.16.	Indeks Komposit Shanghai <i>Stock Exchange</i>	16

2. Respons Kebijakan Ekonomi Global 21

Grafik 2.1.	Suku Bunga Acuan The Fed, ECB, dan BOJ	22
Grafik 2.2.	Total Aset The Fed, ECB, dan BOJ	23
Grafik 2.3.	<i>Dependency Ratio</i> Negara Maju	24
Grafik 2.4.	<i>Fiscal Space</i> Negara-Negara Maju	25

Grafik 2.5.	Suku Bunga Kebijakan EM	25
Grafik 2.6.	Indeks Situasi Bisnis India	27

3. Pertumbuhan Ekonomi 41

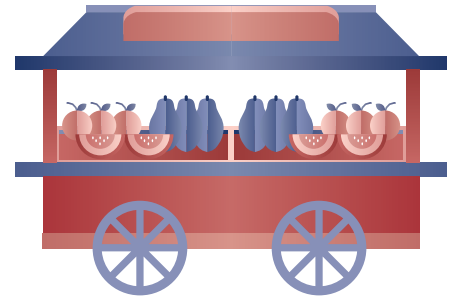
Grafik 3.1.	<i>Terms of Trade</i> dan Ekspor SDA	43
Grafik 3.2.	Pendapatan per Kapita	44
Grafik 3.3.	Konsumsi Swasta dan UMP Riil	44
Grafik 3.4.	Konsumsi RT dan Tabungan	45
Grafik 3.5.	Belanja Infrastruktur dan Modal	45
Grafik 3.6.	Indeks Kepercayaan Konsumen	45
Grafik 3.7.	Investasi Berdasar Sektor	46
Grafik 3.8.	Perkembangan Investasi Riil	46
Grafik 3.9.	Perkembangan Impor Nonmigas Riil	46
Grafik 3.10.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	48
Grafik 3.11.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan	48
Grafik 3.12.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Manufaktur	48
Grafik 3.13.	Kapasitas Utilisasi dan Indeks Produksi	49
Grafik 3.14.	Kinerja Pendapatan Perusahaan Publik	49
Grafik 3.15.	<i>Gross Profit Margin</i> dan <i>Net Profit Margin</i>	49
Grafik 3.16.	<i>Retained Earning</i> Perusahaan Publik	50
Grafik 3.17.	Laba Bersih dan Belanja Modal	50
Grafik 3.18.	Sentimen Bisnis dan Inventori	50
Grafik 3.19.	Impor Mesin dan Investasi Nonbangunan	50



Grafik 3.20. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga	51	Grafik 4.9. Investasi Langsung Bukan Penduduk menurut Negara Investor Utama	70
Grafik 3.21. Porsi Konsumsi, Tabungan, dan Cicilan Rumah Tangga	51	Grafik 4.10. Investasi Langsung Bukan Penduduk menurut Sektor Ekonomi	71
Grafik 3.22. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Indeks Ekspektasi Ekonomi	51	Grafik 4.11. Investasi Portofolio Bukan Penduduk di Indonesia	71
Grafik 3.23. Pendapatan Vs Biaya Operasional RT	52	Grafik 4.12. Perkembangan Investasi Lainnya	72
Grafik 3.24. PDB, Konsumsi RT, dan Bantuan Sosial	52	Grafik 4.13. Rasio ULN terhadap PDB Indonesia	73
Grafik 3.25. Ketersediaan Lapangan Kerja dan PDB	53	Grafik 4.14. Rasio ULN terhadap PDB untuk negara <i>peer group</i>	73
Grafik 3.26. Perubahan Jumlah dan Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi	53	Grafik 4.15. Perkembangan Posisi ULN Indonesia Menurut Kelompok Peminjam	73
Grafik 3.27. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin	53	Grafik 4.16. Perkembangan ULN Indonesia Menurut Jangka Waktu Sisa (<i>Remaining Maturity</i>)	74
Grafik 3.28. Indeks Kedalaman Kemiskinan	54	Grafik 4.17. Komposisi ULN Indonesia	74
Grafik 3.29. Indeks Keparahan Kemiskinan	54	Grafik 4.18. Perkembangan <i>Basic Balance</i> NPI	75
4. Neraca Pembayaran Indonesia	57	Grafik 4.19. Perkembangan Cadangan Devisa	76
Grafik 4.1. Perkembangan Transaksi Berjalan	61	Grafik 4.20. Perkembangan DSR Indonesia	76
Grafik 4.2. Perkembangan Neraca Perdagangan Nonmigas	61	5. Nilai Tukar	81
Grafik 4.3. Komposisi Ekspor Manufaktur Indonesia	64	Grafik 5.1. Perkembangan Indeks Dolar	82
Grafik 4.4. Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Harga Minyak	67	Grafik 5.2. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	82
Grafik 4.5. Perkembangan Neraca Jasa	68	Grafik 5.3. <i>Event Analysis</i> Nilai Tukar Rupiah 2015	84
Grafik 4.6. Rasio <i>Freight</i> Jasa Transportasi	69	Grafik 5.4. Imbal Hasil Investasi Obligasi Negara Triwulan IV 2015	85
Grafik 4.7. Perkembangan Neraca Pendapatan Primer	69	Grafik 5.5. Perkembangan Nilai Tukar <i>Peers</i> Pasca Kenaikan FFR Desember 2015	85
Grafik 4.8. Perkembangan Jumlah dan Remitansi TKI	69		

DAFTAR GRAFIK

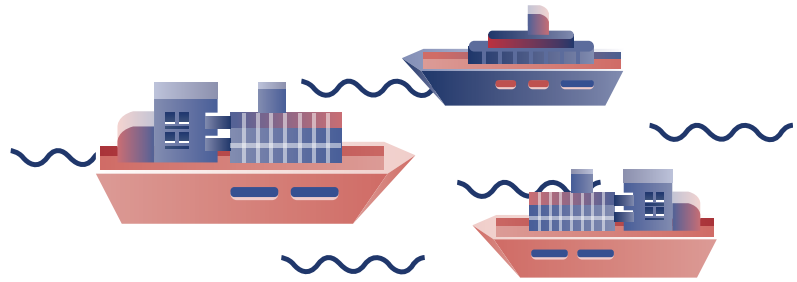
Grafik 5.6.	Perubahan Nilai Tukar Rupiah dan <i>Peers</i> Tahun 2015	86	Grafik 6.8.	Margin Per Unit dan Harga Jual	95
Grafik 5.7.	Volatilitas Nilai Tukar Rupiah dan <i>Peers</i>	86	Grafik 6.9.	Inflasi IHPB Impor dan Inflasi Inti <i>Traded</i>	95
Grafik 5.8.	Aliran Dana Nonresiden	86	Grafik 6.10.	Inflasi IHPB dan IHK Peralatan Rumah Tangga	95
Grafik 5.9.	Proporsi Kepemilikan Nonresiden pada Obligasi Negara	86	Grafik 6.11.	Ekspektasi Inflasi Konsumen	95
Grafik 5.10.	Perkembangan Transaksi Valas Domestik	87	Grafik 6.12.	Ekspektasi Pedagang Eceran	96
Grafik 5.11.	Perkembangan Transaksi Valas Relatif terhadap PDB	87	Grafik 6.13.	Ekspektasi Inflasi 24 Bulan	96
Grafik 5.12.	Komposisi FX <i>Spot</i> vs FX Derivatif	87	Grafik 6.14.	Pola Historis Inflasi VF	97
Grafik 5.13.	Rasio Volume Beli Valas Korporasi di Derivatif terhadap PDB	87	Grafik 6.15.	Perkembangan Inflasi AP	98
Grafik 5.14.	Proporsi Sebaran <i>Demand</i> Valas Korporasi	88	Grafik 6.16.	Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Inflasi Bensin	100
Grafik 5.15.	<i>Supply-Demand</i> Valas	88	Grafik 6.17.	Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Inflasi Listrik	100
Grafik 5.16.	Perkembangan <i>Effective Supply</i> Valas dari DHE	88	7. Fiskal		103
Grafik 5.17.	Perkembangan Transaksi Valas Antar Penduduk	89	Grafik 7.1.	Capaian Komponen Penerimaan Pajak terhadap Target APBN-P	106
6. Inflasi		91	Grafik 7.2.	Perbandingan Pertumbuhan Tahunan Komponen Penerimaan Pajak	106
Grafik 6.1.	<i>Event Analysis</i> Inflasi	92	Grafik 7.3.	Perbandingan Komposisi Pajak Dalam Negeri	106
Grafik 6.2.	Pola Historis Inflasi Bulanan	92	Grafik 7.4.	Perkembangan <i>Tax Ratio</i>	107
Grafik 6.3.	Inflasi Inti <i>Traded</i> dan <i>Non-traded</i>	93	Grafik 7.5.	Capaian Realisasi APBN-P 2015	107
Grafik 6.4.	Pola Historis Inflasi Inti	93	Grafik 7.6.	Pencapaian Belanja Negara	107
Grafik 6.5.	Pertumbuhan Penjualan Riil	94	Grafik 7.7.	Serapan Belanja K/L dan Non K/L	108
Grafik 6.6.	Inflasi Inti <i>Non-traded</i>	94	Grafik 7.8.	Tren Defisit Fiskal di Beberapa Negara	109
Grafik 6.7.	Ekspektasi <i>Consensus Forecast</i>	94	Grafik 7.9.	Perkiraan Defisit Agregat Pemerintah	109



Grafik 7.10. Komposisi Denominasi SBN	109	Grafik 8.17. Trend Penyaluran Kredit UMKM	121
Grafik 7.11. Imbal Hasil SBN	109	Grafik 8.18. Trend Rasio NPL Kredit UMKM	122
Grafik 7.12. Porsi Utang Pemerintah terhadap PDB	110	Grafik 8.19. Rasio Profitabilitas Korporasi Publik	122
8. Sistem Keuangan	113	Grafik 8.20. Perkembangan Hutang Korporasi Publik	123
Grafik 8.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	114	Grafik 8.21. <i>Debt Service Ratio</i> Korporasi Publik	123
Grafik 8.2. Jumlah Kantor Bank dan Rasio Densitas Tahun 2010-2015	115	Grafik 8.22. <i>Interest Coverage Ratio</i> Korporasi Publik	123
Grafik 8.3. Sebaran Spasial Rasio Densitas	116	Grafik 8.23. Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga	123
Grafik 8.4. Perkembangan Indeks <i>Lending Standard</i>	116	Grafik 8.24. Perkembangan DPK Berdasarkan Kepemilikan	124
Grafik 8.5. Rasio Kredit terhadap PDB	116	Grafik 8.25. Imbal Hasil SBN 10 Tahun dan Faktor Sentimen Selama 2015	125
Grafik 8.6. Pertumbuhan Kredit Total dan Per Jenis Penggunaan	117	Grafik 8.26. Imbal Hasil SBN dan Net Beli/Jual Asing	126
Grafik 8.7. Pertumbuhan Kredit Lima Sektor Ekonomi Terbesar	117	Grafik 8.27. Pangsa Kepemilikan Investor Nonresiden di Pasar SBN	126
Grafik 8.8. Perkembangan NPL Bank Umum	117	Grafik 8.28. IHSG dan Faktor Sentimen Selama 2015	127
Grafik 8.9. Pertumbuhan DPK	118	Grafik 8.29. IHSG dan Net Beli/Jual Asing	128
Grafik 8.10. Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiah dan BI Rate	118	Grafik 8.30. Tambahan Kredit dan Pembiayaan Net Nonbank	130
Grafik 8.11. LDR dan Rasio AL/DPK	118	9. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	135
Grafik 8.12. <i>Return on Asset (ROA)</i>	119	Grafik 9.1. Indeks Sistem Pembayaran Nontunai	137
Grafik 8.13. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	119	Grafik 9.2. Transaksi Ritel terhadap PDB	138
Grafik 8.14. Perkembangan CAR Perbankan	119	Grafik 9.3. Rasio Transaksi Ritel terhadap Konsumsi Masyarakat	138
Grafik 8.15. Perkembangan Intermediasi Bank Syariah	120	Grafik 9.4. Indeks Penjualan Eceran dan Transaksi Ritel	138
Grafik 8.16. Perkembangan NPF Bank Syariah	120		

DAFTAR GRAFIK

Grafik 9.5.	Perkembangan Transaksi Sistem BI-RTGS	139	Grafik 9.25.	Pola Pergerakan Pertumbuhan UYD dan PDB Riil	146
Grafik 9.6.	<i>Turn Over Ratio</i> Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	139	Grafik 9.26.	Pola Pergerakan Pertumbuhan <i>Outflow</i> Uang Kartal Bank Persero dan BPD, dan Konsumsi Pemerintah Riil	146
Grafik 9.7.	Perkembangan Transaksi BI-SSSS	139	Grafik 9.27.	Pola Pergerakan Pertumbuhan <i>Cash in Vault</i> dan Dana Pihak Ketiga Perbankan	146
Grafik 9.8.	Perkembangan Transaksi SKNBI	140	Grafik 9.28.	Pola Pergerakan Pertumbuhan <i>Cash in Vault</i> dan Transaksi Uang Kartal Antar Bank	147
Grafik 9.9.	Perkembangan Transaksi APMK	140	Grafik 9.29.	Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata <i>Outflow</i> Bulanan	147
Grafik 9.10.	Perkembangan Transaksi ATM dan ATM/Debet	141	Grafik 9.30.	Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata <i>Outflow</i> Bulanan Menurut Wilayah	147
Grafik 9.11.	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	141	Grafik 9.31.	Perkembangan TUKAB di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya	148
Grafik 9.12.	Rasio dan Proporsi NPL Kartu Kredit	142	Grafik 9.32.	Pola Pergerakan TUKAB di Wilayah Jakarta dan Dana Pihak Ketiga Perbankan	148
Grafik 9.13.	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	142	Grafik 9.33.	Jumlah Kas Titipan dan Penarikan Uang Rupiah	148
Grafik 9.14.	Pangsa Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana	143	Grafik 9.34.	Penarikan Uang Kartal dalam Rangka Kas Keliling	149
Grafik 9.15.	Pangsa Penyelenggara Bukan Bank 2015	143	Grafik 9.35.	Pemusnahan Uang Rupiah Tidak Layak Edar	149
Grafik 9.16.	Posisi Uang Kartal yang Diedarkan Akhir Tahun	143	Grafik 9.36.	Rasio Pemusnahan Uang Rupiah terhadap <i>Inflow</i> Berdasarkan Pecahan	150
Grafik 9.17.	Perkembangan UYD secara Harian	144	Grafik 9.38.	Temuan Uang Rupiah Palsu oleh Kepolisian dan Laporan Perbankan	150
Grafik 9.18.	Pangsa UYD Berdasarkan Denominasi	144	Grafik 9.37.	Temuan Uang Rupiah Palsu dan Rasionalnya terhadap Uang yang Diedarkan	150
Grafik 9.19.	Pertumbuhan UYD Berdasarkan Denominasi	144			
Grafik 9.20.	Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia	144			
Grafik 9.21.	Pola Siklikal Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia	145			
Grafik 9.22.	Rasio UYD terhadap PDB dan Konsumsi Rumah Tangga	145			
Grafik 9.23.	Pola Pertumbuhan UYD dan IPE	145			
Grafik 9.24.	Proyeksi dan Realisasi UYD	146			

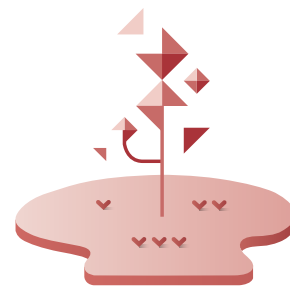


10. Ekonomi Regional	155		
<hr/>			
Grafik 10.1. Pertumbuhan Ekonomi Regional Tahun 2015	158	Grafik 10.21. Perkembangan NPL UMKM	173
Grafik 10.2. Pangsa PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Utama Wilayah	160	Grafik 10.22. Pola Penarikan Uang Kartal Melalui Kas Titipan	174
Grafik 10.3. Pertumbuhan Tambang Kalimantan dan KTI	160	Grafik 10.23. Pola Penukaran Uang Kartal Melalui Kas Keliling	174
Grafik 10.4. Pertumbuhan Industri Pengolahan Regional	160		
Grafik 10.5. Ekspor Industri Jawa	161	11. Kebijakan Moneter	187
Grafik 10.6. Ekspor Industri Sumatera & Kalimantan	161	<hr/>	
Grafik 10.7. Pertumbuhan Angkatan Kerja Regional	162	Grafik 11.1. Posisi Operasi Moneter	192
Grafik 10.8. Tingkat Pengangguran Regional	162	Grafik 11.2. Durasi OM berdasarkan Tenor	192
Grafik 10.9. Disparitas Tingkat Pengangguran Regional	163	Grafik 11.3. Durasi OM berdasarkan Sisa Jatuh Waktu	192
Grafik 10.10. Tingkat Kemiskinan Regional	163	Grafik 11.4. Kecukupan Pemenuhan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	194
Grafik 10.11. Rasio Gini	163	Grafik 11.5. Suku Bunga PUAB O/N	198
Grafik 10.12. Disparitas Tingkat Kemiskinan Regional	164	Grafik 11.6. Suku Bunga PUAB O/N dan Non-O/N	199
Grafik 10.13. Pola Inflasi Regional	165	Grafik 11.7. Porsi PUAB O/N terhadap total PUAB	199
Grafik 10.14. Perkembangan Inflasi Regional 2012 – 2015	165	Grafik 11.8. Suku Bunga Deposito dan Kredit	199
Grafik 10.15. Inflasi Kelompok Bahan Pangan	166	Grafik 11.9. Kontribusi Komponen M0	200
Grafik 10.16. Inflasi SubKelompok Padi-padian	167	Grafik 11.10. Kontribusi Komponen M2	200
Grafik 10.17. Konvergensi Inflasi Regional	168	Grafik 11.11. Komponen M1	201
Grafik 10.18. Perkembangan Kredit Regional	171	Grafik 11.12. Kontribusi Komponen Giro Rupiah	201
Grafik 10.19. Perkembangan DPK dan LDR	172	Grafik 11.13. Kontribusi Komponen Kuasi Terhadap M2	201
Grafik 10.20. Perkembangan <i>Non Performing Loan</i>	172	Grafik 11.14. Kontribusi Faktor M2	201
		Grafik 11.15. Velocitas M2	202
		Grafik 11.16. <i>Money Multiplier</i> M2 dan Kewajiban Pemenuhan GWM	202

DAFTAR GRAFIK

12. Kebijakan Makroprudensial	205	Grafik 15.4. Neraca Pembayaran Indonesia	261
Grafik 12.1. Pertumbuhan Kredit Properti	208	Grafik 15.5. Perbandingan Upah Riil dan Produktivitas Industri Pengolahan (Indeks 2000=100)	262
Grafik 12.2. Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor	208	Grafik 15.6. Perbandingan Daya Saing Pariwisata dan Perjalanan	264
Grafik 12.3. GWM LFR dan SSB Diterbitkan Bank	209	Grafik 15.7. Kepemilikan Asing di Obligasi Pemerintah	264
Grafik 12.4. LDR dan LFR Perbankan	209	Grafik 15.8. <i>Market Capitalization</i>	265
Grafik 12.5. Ilustrasi Pembentukan dan Pelepasan <i>Buffer</i> CCB	212	Grafik 15.9. Rasio FDI terhadap PDB	265
Grafik 12.6. Prosiklikalitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Kredit di Indonesia	213	Grafik 15.10. Tingkat Urbanisasi Negara Asia	266
13. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	215	Grafik 15.11. Peringkat Infrastruktur ASEAN	266
Grafik 13.1. Perkembangan LKD	220	Grafik 15.12. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Umur	267
Grafik 13.2. Rata-rata Transaksi	220	Grafik 15.13. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan	267
Grafik 13.3. Porsi Jenis Pengaduan Sistem Pembayaran	223	Grafik 15.14. Perbandingan Subsidi Energi, Anggaran Pendidikan, Infrastruktur, dan Kesehatan	272
Grafik 13.4. Permintaan Informasi Sistem Pembayaran	223	Grafik 15.15. Perkembangan Subsidi Pemerintah	272
15. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan	257	Grafik 15.16. Pangsa Tenaga Kerja Sektor Manufaktur dan Pendapatan Perkapita	275
Grafik 15.1. Indeks Gini Negara ASEAN	259	16. Prospek Perekonomian	289
Grafik 15.2. Tingkat Kemiskinan Negara-negara ASEAN	260	Grafik 16.1. Proyeksi PDB 2016-2020	295
Grafik 15.3. Emisi CO2 Negara ASEAN	261	Grafik 16.2. Proyeksi Inflasi 2016 – 2020	295
		Grafik 16.3. <i>Dependency Ratio</i> Indonesia dan Beberapa Negara Kawasan	296
		Grafik 16.4. Pertumbuhan Kelas Menengah	296

DAFTAR DIAGRAM DAN GAMBAR



6. Inflasi	91		
Gambar 6.1. Reformasi Subsidi di Bidang Energi	98		
10. Ekonomi Regional	155		
Gambar 10.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional 2015 (PDRB Tahun Dasar 2010)	159		
Gambar 10.2. Peta Inflasi Daerah 2015	164		
11. Kebijakan Moneter	187		
Diagram 11.1. Tantangan Perekonomian pada Periode Pelemahan Rupiah	189		
Diagram 11.2. <i>Framework</i> Pendalaman Pasar Keuangan	196		
13. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	215		
Gambar 13.1. Fragmentasi Layanan Sistem Pembayaran Ritel di Indonesia	218		
Gambar 13.2. Tingkat Inklusi Keuangan di Indonesia	219		
Gambar 13.3. Peta Penyebaran Kas Titipan	229		
14. Koordinasi Kebijakan	235		
Gambar 14.1. Pemetaan Permasalahan Inflasi berdasarkan Kewilayahan	237	Gambar 14.3. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	245
Gambar 14.2. Koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Makroekonomi	238	Gambar 14.4. Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas Nasional	248
		15. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan	257
		Gambar 15.1. Empat Pilar Tantangan Struktural	260
		Diagram 15.1. <i>Framework</i> Bauran Kebijakan Pengelolaan Makroekonomi	268
		Gambar 15.2. Dual Kebijakan	270
		Gambar 15.3. Rencana Jangkauan Layanan Kas Bank Indonesia Tahun 2019	272
		Gambar 15.4. Pemetaan Paket Kebijakan Pemerintah Tahun 2015	273
		Gambar 15.5. Rencana Pengembangan 24 Pelabuhan Strategis	275
		Gambar 15.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur 2016 dan Target 2019	277
		16. Prospek Perekonomian	289
		Diagram 16.1. Proyek Strategis Nasional	291
		Diagram 16.2. Perkembangan Proyek Prioritas	292

DEWAN GUBERNUR

Hendar

Deputi Gubernur

Ronald Waas

Deputi Gubernur

**Agus D. W.
Martowardojo**

Gubernur



**Mirza
Adityaswara**

Deputi Gubernur Senior

Perry Warjiyo

Deputi Gubernur

Erwin Rijanto

Deputi Gubernur



DEWAN GUBERNUR



Halim Alamsyah

*Deputi Gubernur
Menjabat s.d. Juni 2015*



“Dengan bauran kebijakan yang dijalankan secara disiplin, konsisten, dan terukur dalam sebuah kerangka koordinasi yang tersinergi, perekonomian Indonesia ke depan akan lebih kuat, berimbang, dan berkesinambungan.”

Agus D. W. Martowardojo
Gubernur

PRAKATA

Perubahan konstelasi ekonomi global sejak krisis 2008 lalu, yang terasa begitu luas dan mendalam, telah memunculkan berbagai tantangan baru yang semakin kompleks dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di tengah berbagai upaya yang terus ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural di dalam negeri, perekonomian Indonesia selama tahun 2015 dihadapkan pada rangkaian kejutan eksternal dalam perekonomian global, yang berdampak ke Indonesia baik melalui jalur keuangan maupun perdagangan. Pemulihan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan, berjalan lambat, tidak berimbang, dan masih penuh ketidakpastian. Negara maju, terutama perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan pemulihan yang lebih solid. Sedangkan perekonomian negara berkembang, terutama Tiongkok, mengalami perlambatan struktural sehingga memicu kemerosotan harga komoditas, yang pada gilirannya terus menekan kinerja ekspor Indonesia. Ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global tersebut mengakibatkan terjadinya divergensi siklus kebijakan moneter antara berbagai negara. Kebijakan moneter di Amerika Serikat mulai memasuki periode normalisasi, setelah dalam kurun waktu enam tahun suku bunga dipertahankan sekitar nol persen. Sedangkan, kebijakan moneter di Eropa, Jepang, dan negara berkembang semakin diperlonggar untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak semakin melambat. Kemerosotan harga komoditas yang semakin berdampak terhadap memburuknya kinerja ekonomi negara berkembang dan ketidakpastian mengenai kecepatan dan besarnya kenaikan suku bunga di Amerika Serikat menjadi dua kekuatan utama yang mewarnai rangkaian gejala di pasar keuangan global selama tahun 2015, yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya arus modal ke negara berkembang termasuk ke Indonesia.

Dinamika dalam perekonomian dan pasar keuangan global tersebut berdampak signifikan terhadap Indonesia karena kurang terdiversifikasinya struktur ekspor dan tingginya ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal. Struktur ekspor Indonesia lebih berbasis sumber daya alam sehingga merosotnya harga komoditas berdampak signifikan pada kinerja ekspor, yang pada gilirannya memengaruhi perlambatan kinerja di berbagai sektor perekonomian. Di samping itu, ketergantungan impor yang cukup besar dalam komoditas ekspor menjadikan tidak optimalnya sektor industri berorientasi ekspor dalam memanfaatkan depresiasi rupiah untuk meningkatkan kinerja ekspor. Di pihak lain, kurang berkembangnya sumber-sumber pembiayaan di pasar keuangan domestik, menyebabkan tingginya ketergantungan pada sumber pembiayaan dari luar negeri terutama dalam bentuk arus modal portofolio -yang sangat dipengaruhi dinamika global- dan utang luar negeri swasta yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Kombinasi

tantangan eksternal dan domestik tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menyikapi tantangan eksternal dan domestik tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah memperkuat sinergi kebijakan, yang ditujukan untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Upaya mengawal stabilitas makroekonomi ditempuh dengan mengarahkan inflasi ke kisaran sasaran tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya. Untuk itu, Bank Indonesia secara konsisten dan berhati-hati melanjutkan kebijakan moneter yang bias ketat yang telah ditempuh sejak pertengahan tahun 2013 hingga Oktober 2015. Kebijakan ini juga diperkuat oleh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah guna meredam tekanan berlebihan terhadap rupiah yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Penerapan kebijakan dalam pengelolaan utang luar negeri swasta terus diperkuat agar kemampuan dunia usaha semakin baik dalam mengelola risiko, terutama yang ditimbulkan oleh risiko fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, dalam upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan makroprudensial secara selektif dan melonggarkan Giro Wajib Minimum Primer dalam Rupiah. Kebijakan tersebut bersinergi dengan meningkatnya stimulus ekonomi pemerintah, seiring dengan ruang fiskal yang semakin terbuka sebagai dampak positif dari reformasi subsidi energi. Selain itu, di sektor riil, upaya mempercepat implementasi reformasi struktural juga terus dilakukan, melalui peluncuran rangkaian paket kebijakan pemerintah, yang didukung oleh beberapa langkah kebijakan Bank Indonesia dalam memperdalam pasar keuangan.

Dengan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang terkoordinasi dan bersinergi sangat baik, tekanan terhadap stabilitas makroekonomi mereda dan momentum pertumbuhan ekonomi menguat. Terciptanya stabilitas makroekonomi tercermin pada inflasi tahun 2015 yang terkendali sesuai sasaran yang ditetapkan, defisit neraca transaksi berjalan yang menurun pada tingkat yang sehat, kembalinya arus modal ke pasar keuangan domestik, serta nilai tukar rupiah yang lebih bergerak stabil. Tingkat inflasi dapat dikendalikan ke kisaran sasaran $4\pm 1\%$. Pencapaian itu didukung oleh terkelolanya permintaan domestik, terjangkarnya ekspektasi inflasi, serta terjaganya kecukupan pasokan bahan pangan. Defisit transaksi berjalan juga menurun menjadi sekitar 2,1% dari PDB karena semakin terkelolanya permintaan domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial membaik pada triwulan IV 2015 ditopang oleh mulai meredanya gejala di pasar keuangan global serta membaiknya persepsi pelaku pasar terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, nilai tukar rupiah juga mulai terkendali, bahkan mengalami apresiasi pada triwulan IV 2015. Di sisi pertumbuhan ekonomi, stimulus fiskal yang ditempuh

Pemerintah dan mulai kembalinya kepercayaan pelaku pasar mampu menciptakan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi sejak paruh kedua tahun 2015. Pada tahun 2015, Indonesia merupakan salah satu negara *emerging markets* yang perekonomiannya tetap stabil dan retail tumbuh tinggi dibandingkan negara *emerging markets* lainnya.

Dinamika perekonomian selama tahun 2015 memberikan beberapa pelajaran penting, yang dapat memperkuat prinsip-prinsip penerapan kebijakan dalam mengelola perekonomian Indonesia ke depan. *Pertama*, kebijakan makroekonomi yang diterapkan secara disiplin, konsisten, dan tepat waktu, baik fiskal maupun moneter, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Kedua*, disiplin kebijakan makroekonomi tersebut juga perlu didukung oleh sinergi kebijakan yang kuat antarpemangku kebijakan, baik Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta otoritas terkait lainnya. Kebijakan yang tepat dengan sinergi yang kuat, tidak hanya membawa perekonomian Indonesia dapat melewati terpaan guncangan, tetapi juga menempatkan perekonomian pada posisi yang tepat untuk mendapatkan momentum pertumbuhan. *Ketiga*, siklus perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir mengajarkan tentang pentingnya implementasi reformasi struktural dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat fondasi perekonomian, sehingga perekonomian menjadi lebih berdaya tahan (resilien) dan tumbuh secara berkelanjutan. Berbagai pelajaran ini menjadi bekal penting dalam mengarungi dinamika perekonomian dunia ke depan yang diperkirakan masih akan sarat dengan risiko dan ketidakpastian yang semakin menantang.

Ke depan, berbagai tantangan dan risiko perlu terus diantisipasi dan direspons dengan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik. Di sisi eksternal, kemungkinan berlanjutnya pemulihan ekonomi global yang masih lemah dan tidak berimbang, terus melambatnya ekonomi Tiongkok dan implikasi kebijakan yang ditimbulkannya terhadap kondisi pasar keuangan dunia, serta merosotnya harga komoditas, merupakan tiga risiko besar yang perlu dimitigasi, agar dampak negatifnya terhadap stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi dapat terkelola dengan baik. Di dalam negeri, kebijakan reformasi struktural perlu terus diimplementasikan secara konsisten dan terarah untuk mendorong pertumbuhan potensial (*potential output*) serta meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian. Untuk itu, jalinan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menerapkan kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural yang saling bersinergi dan menguatkan akan dilanjutkan. Bank Indonesia akan menerapkan bauran kebijakan yang tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sementara itu secara berhati-hati dan terukur akan memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial, bila berbagai parameter dalam perekonomian memungkinkan.

Dengan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural yang dijalankan secara disiplin, konsisten, dan terukur, dalam sebuah kerangka koordinasi yang bersinergi, perekonomian Indonesia ke depan akan tumbuh lebih kuat, berimbang, dan berkesinambungan. Pada tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,2-5,6% dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah, sejalan dengan meningkatnya kapasitas perekonomian tersebut, inflasi diperkirakan dapat terjaga sesuai dengan kisaran sasaran $4\pm 1\%$ untuk tahun 2016-2017 dan $3,5\pm 1\%$ dalam jangka menengah. Dengan struktur perekonomian yang lebih baik dan sumber pertumbuhan yang lebih terdiversifikasi, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan terkendali pada tingkat yang aman dengan struktur yang lebih sehat.

Diskusi dan uraian lebih lanjut tentang dinamika perekonomian tahun 2015, berbagai respons kebijakan yang ditempuh, arah kebijakan, dan prospek perekonomian ke depan telah kami rangkum dalam buku Laporan Perekonomian Indonesia 2015. Buku ini menyajikan keterkaitan antara dinamika ekonomi global dengan perekonomian domestik dan dasar-dasar pemikiran dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia maupun Pemerintah, selama tahun 2015. Dengan membaca buku ini, pembaca juga diharapkan akan memiliki gambaran utuh tentang peran Bank Indonesia, Pemerintah, dan berbagai otoritas terkait dalam mengemudikan perekonomian Indonesia melewati terpaan guncangan selama tahun 2015. Di samping itu, pembaca juga diharapkan dapat memetik pelajaran yang berharga dari perjalanan ekonomi tahun 2015 yang kami yakini sangat relevan bagi upaya memperbaiki perekonomian ke depan. Kami meyakini tidak ada yang kebetulan dari perjalanan ekonomi sebuah bangsa. Kemampuan kita dalam menarik pelajaran dari masa lalu akan menentukan masa depan ekonomi yang mampu kita bentuk.

Akhir kata, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, kami mempersembahkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015 kepada masyarakat Indonesia. Kami berharap buku ini mampu meneruskan tradisi LPI sebagai salah satu rujukan utama yang berkualitas dan terpercaya dalam menyusun langkah kita ke depan untuk mencapai perekonomian yang lebih baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi langkah dan upaya kita untuk mempersembahkan karya yang terbaik bagi negeri kita tercinta.

Jakarta, Maret 2016
Gubernur Bank Indonesia



Agus D. W. Martowardjo



Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

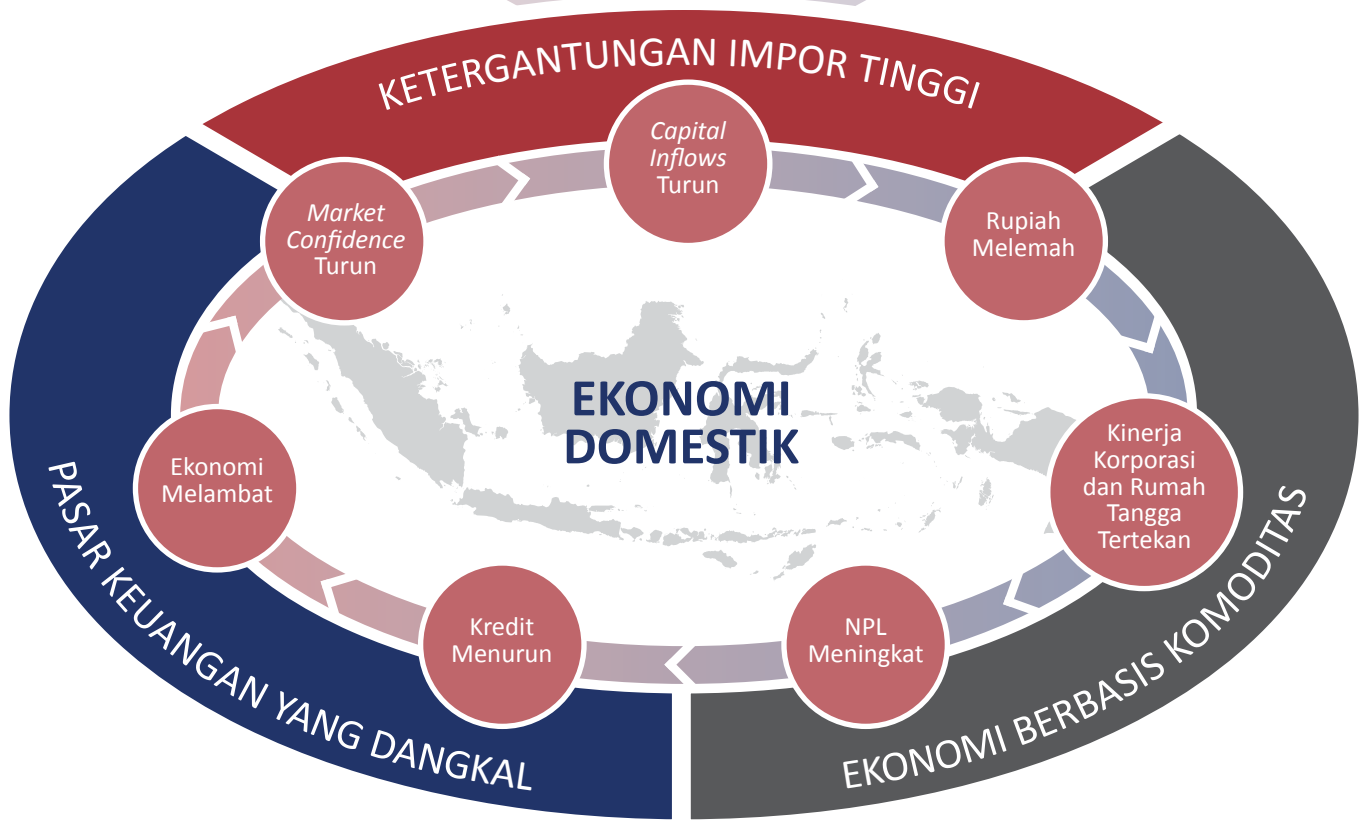
- Divergensi Kebijakan Moneter dan Normalisasi Kebijakan Moneter The Fed
- Krisis Yunani
- Devaluasi Yuan

Perlambatan Ekonomi Global

- Negara Maju Tumbuh Moderat; ditopang AS
- Negara Berkembang Melemah

Penurunan Harga Komoditas

- Didorong oleh Perlambatan Tiongkok
- Harga Minyak juga Turun



SINERGI KEBIJAKAN



Mengawal Stabilitas Makroekonomi & SSK

Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Mempercepat Reformasi Struktural

TINJAUAN UMUM

Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural

Perekonomian Indonesia 2015 mencatat perkembangan yang positif. Kinerja stabilitas makroekonomi semakin baik, sementara momentum pertumbuhan ekonomi mulai bergulir. Stabilitas makroekonomi yang semakin membaik tercermin dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, menurunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya tekanan rupiah sejak triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Mulai berlangsungnya momentum pertumbuhan ekonomi ditandai oleh mulai meningkatnya pertumbuhan ekonomi sejak semester II 2015.

Perkembangan positif tersebut tidak dicapai dengan mudah. Berbagai tantangan eksternal dan domestik menerpa perekonomian Indonesia pada 2015. Pertumbuhan ekonomi dunia lebih rendah dari perkiraan semula. Pada saat yang sama, ketidakpastian di pasar keuangan global semakin meningkat yang bersumber dari meningkatnya peluang kenaikan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, dan diperburuk dengan adanya devaluasi yuan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Perkembangan global yang kurang menguntungkan tersebut memberikan dampak negatif pada perekonomian domestik, baik melalui jalur perdagangan maupun keuangan. Tekanan terhadap perekonomian domestik diperberat oleh permasalahan struktural domestik yang masih ada. Berbagai tantangan tersebut memicu meningkatnya beberapa risiko, seperti tingginya tekanan terhadap nilai tukar rupiah, menurunnya keyakinan pelaku ekonomi, dan meningkatnya risiko di sektor korporasi. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat berakibat pada meningkatnya ketidakstabilan makroekonomi dan terus melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah memperkuat sinergi kebijakan guna mengawal stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural. Kebijakan moneter yang cenderung bias ketat hingga Oktober 2015 serta paket stabilisasi nilai tukar berhasil menjaga stabilitas makroekonomi. Sementara itu, dalam upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan makprudensial secara selektif dan melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah. Dari sisi kebijakan fiskal,

ruang fiskal yang semakin terbuka, akibat reformasi subsidi energi, dimanfaatkan untuk meningkatkan stimulus ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Di sektor riil, upaya untuk mempercepat implementasi reformasi struktural terus dilakukan, melalui berbagai paket kebijakan pemerintah. Koordinasi kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil tersebut berhasil mengelola ekonomi dengan baik. Tekanan terhadap stabilitas makroekonomi mereda dan momentum pertumbuhan ekonomi mulai tercipta.

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin baik dengan fundamental yang lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Terus meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, akibat menyempitnya divergensi kebijakan moneter negara maju, diperkirakan akan mengurangi tekanan stabilitas makroekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, didorong oleh upaya pemerintah untuk mengakselerasi stimulus fiskal dan implementasi reformasi struktural. Berlanjutnya momentum penguatan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan optimisme terhadap prospek ekonomi dan mendorong aliran arus masuk modal asing, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan stabilitas makroekonomi.

Berbagai tantangan ke depan perlu terus diwaspadai, antara lain, berlanjutnya pelemahan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan Tiongkok, dan penurunan harga komoditas yang lebih dalam, termasuk harga minyak. Selain itu, beberapa permasalahan struktural domestik yang masih belum terselesaikan juga perlu terus dibenahi. Untuk itu, koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat. Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makprudensial secara berhati-hati. Di sisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang bersamaan terus mempercepat reformasi struktural. Dengan sinergi yang baik tersebut, ke depan, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta momentum pertumbuhan dapat terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah panjang dapat dicapai.

Tantangan dan Kinerja Perekonomian Indonesia 2015

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, perekonomian Indonesia tahun 2015 mencatat kinerja yang positif. Hal tersebut ditandai oleh stabilitas makroekonomi yang semakin baik dan momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai bergulir. Stabilitas makroekonomi yang semakin membaik tercermin dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, menurunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya tekanan rupiah sejak triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, setelah sebelumnya berada dalam tren melambat, pertumbuhan ekonomi pada semester II 2015 mulai menunjukkan peningkatan. Pencapaian kinerja positif tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upaya mengawal stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Dari sisi global, tantangan bersumber dari melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, melebarnya divergensi kebijakan di antara negara maju, dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global mendorong berlanjutnya penurunan harga minyak dunia dan harga komoditas nonmigas. Sementara itu, perbedaan fase pemulihan ekonomi di berbagai negara besar mendorong ekspektasi melebarnya divergensi kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan terus membaik mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga. Sementara, negara lain, seperti Jepang, EU, dan negara-negara *emerging*, dengan pertumbuhan yang melemah diperkirakan masih menempuh kebijakan moneter yang longgar. Divergensi kebijakan moneter diperparah oleh tingginya ketidakpastian mengenai kapan dan seberapa besar kenaikan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, serta ketidakpastian pasar keuangan Tiongkok, termasuk devaluasi yuan. Namun, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda sejak triwulan IV 2015, seiring dengan sentimen positif pada Oktober 2015 terkait kemungkinan penundaan kenaikan FFR (*Fed Fund Rate*) dan proses normalisasi yang akan dilakukan secara gradual.

Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi tidak terlepas dari berbagai permasalahan struktural yang masih belum terselesaikan. Di sektor riil, permasalahan struktural pertama bersumber dari struktur perekonomian yang masih bertumpu pada komoditas. Dengan terbatasnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi domestik,

penurunan harga komoditas global tidak hanya berpengaruh negatif pada sektor komoditas namun dapat merambat ke sektor non komoditas. Kedua, kandungan impor dalam produk ekspor Indonesia yang tinggi menyebabkan berkurangnya fleksibilitas penyesuaian kinerja ekspor terhadap perubahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut mengurangi dampak positif dari depresiasi rupiah terhadap perbaikan kinerja ekspor Indonesia. Di sektor keuangan, permasalahan struktural terutama bersumber dari pasar keuangan domestik yang dangkal. Guncangan di pasar keuangan global, yang berdampak pada melambatnya aliran masuk modal asing ke Indonesia, tidak dapat diredam secara optimal oleh pasar keuangan domestik yang masih dangkal. Hal berakibat pada relatif tingginya volatilitas pasar keuangan domestik. Di samping itu, dangkalnya pasar keuangan Indonesia juga menyebabkan relatif tingginya ketergantungan korporasi pada pembiayaan eksternal. Ketergantungan tersebut mengakibatkan kinerja korporasi rentan terhadap perubahan lingkungan global.

Ketidakpastian di pasar keuangan global mengakibatkan nilai tukar rupiah selama 2015 mengalami depresiasi. Tekanan terhadap rupiah berlangsung sejak triwulan I dan mencapai puncaknya pada triwulan III 2015. Hal ini didorong oleh masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, terkait dengan ketidakpastian kenaikan suku bunga FFR, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, serta devaluasi yuan. Dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah terkait dengan kekhawatiran semakin melemahnya prospek ekonomi domestik. Di sisi lain, kondisi pasar valas domestik yang belum dalam serta ketergantungan korporasi pada pembiayaan eksternal turut mengamplifikasi dampak tekanan eksternal pada rupiah. Namun, tekanan depresiasi mulai berkurang dan rupiah cenderung menguat pada triwulan IV 2015. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya aliran masuk modal asing, seiring dengan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global. Dari sisi domestik, berkurangnya tekanan terhadap rupiah, terutama ditopang oleh langkah-langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia (BI) serta persepsi positif investor atas prospek ekonomi domestik. Untuk keseluruhan 2015, rupiah mencatat depresiasi 10,2% (yoy), lebih rendah dari depresiasi beberapa mata uang negara *peers*.

Neraca Pembayaran Indonesia pada 2015 mencatat defisit, walaupun defisit transaksi berjalan mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Defisit transaksi berjalan selama 2015 mengalami penurunan dari 3,1% PDB pada 2014 menjadi 2,1% dari PDB. Perbaikan defisit transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, menurunnya harga minyak mendorong perbaikan di

neraca migas. Kedua, menurunnya impor nonmigas sejalan dengan melemahnya permintaan domestik dan ekspor nonmigas. Ketiga, penyesuaian impor terhadap depresiasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, di neraca transaksi modal dan finansial (TMF), menurunnya aliran modal sebagai dampak dari ketidakpastian global menyebabkan terjadinya defisit di NPI untuk keseluruhan tahun 2015. Namun, meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global dan membaiknya keyakinan terhadap prospek perekonomian domestik sejak awal triwulan IV 2015 mendorong peningkatan arus modal secara signifikan, terutama didukung oleh meningkatnya arus masuk investasi portofolio pada obligasi pemerintah dan investasi langsung asing (FDI). Sejalan dengan peningkatan surplus TMF tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2015 mencatat surplus yang cukup tinggi.

Inflasi pada tahun 2015 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2015, yaitu 4±1%. Terkendalnya inflasi pada 2015 dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Di sisi global, menurunnya harga minyak dunia memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk menurunkan harga BBM domestik, harga LPG 12 kg, serta penyesuaian tarif listrik. Kedua, menurunnya komoditas global termasuk harga pangan, menyebabkan inflasi *volatile food* juga relatif terjaga. Dari sisi domestik, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, *passthrough* pelemahan nilai tukar terhadap inflasi relatif terbatas. Hal ini tidak terlepas dari permintaan domestik yang dapat dikelola dan pada saat yang bersamaan inflasi barang impor yang relatif rendah. Kedua, inflasi *volatile food* selama 2015 relatif terjaga, di tengah terjadinya gejala El Nino. Perkembangan ini sejalan dengan semakin kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan produksi, memperbaiki distribusi, serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Sejalan dengan perkembangan ini, pada tahun 2015 inflasi inti tercatat hanya sebesar 3,95%(yoy), inflasi *administered prices* 0,39% (yoy), sementara itu, inflasi *volatile food* mencapai 4,84% (yoy).

Di sisi perekonomian riil, perekonomian Indonesia telah menemukan kembali momentum perbaikan sejak semester II 2015. Setelah melanjutkan tren perlambatan ekonomi sejak tahun 2012 sejalan dengan melemahnya ekonomi global, pertumbuhan ekonomi mulai berbalik arah pada semester II 2015 didorong oleh perbaikan permintaan domestik. Konsumsi pemerintah meningkat cukup signifikan sejalan dengan tingginya penyerapan anggaran. Investasi juga mengalami perbaikan terutama didorong oleh peningkatan belanja modal pemerintah dan membaiknya pertumbuhan investasi di beberapa sektor yang tumbuh tinggi, seperti sektor otomotif dan

konstruksi. Sementara itu, di sisi rumah tangga, tetap tingginya tingkat keyakinan konsumen mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih relatif stabil dan resilien. Untuk keseluruhan 2015, pertumbuhan ekonomi masih mengalami perlambatan dari 5,02% pada 2014 menjadi 4,79%. Namun, yang dapat dicatat adalah dibandingkan dengan negara-negara lain dengan basis komoditas, pertumbuhan tersebut masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas ekonomi domestik masih cukup tinggi dalam menghadapi pelemahan perekonomian global, seperti halnya yang terjadi pada tahun 2009 pada saat terjadi krisis keuangan global. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terdiversifikasi. Jawa dengan sektor manufaktur dengan nilai tambah yang tinggi cenderung masih tumbuh tinggi, sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang terkena dampak pelemahan harga komoditas.

Di sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya risiko yang bersumber dari ketidakpastian keuangan global. Ketahanan industri perbankan masih tetap terjaga, tercermin pada risiko kredit dan risiko likuiditas yang terjaga, profitabilitas yang masih tinggi, serta kecukupan modal yang kuat. Risiko kredit relatif rendah, meski cenderung meningkat seiring dengan penurunan kemampuan membayar utang korporasi akibat penurunan pendapatan korporasi. Hal ini tercermin pada *Non Performing Loan* (NPL) yang naik, meski masih dalam batas aman. Penurunan pendapatan korporasi dan rumah tangga juga mendorong melemahnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang berakibat pada meningkatnya risiko likuiditas. Meskipun meningkat, risiko likuiditas masih aman tercermin pada rasio alat likuid terhadap DPK yang jauh di atas batas amannya. Di sisi intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit masih dalam tren menurun, yaitu tumbuh hanya 10,4%, sebagai akibat penurunan baik di sisi permintaan maupun penawaran sejalan dengan peningkatan *lending standard* sebagai respons bank atas peningkatan NPL. Untuk itu, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan makroprudensial guna memberikan ruang bagi perbaikan di sisi suplai bagi pembiayaan kredit. Dengan fungsi intermediasi yang belum pulih dan risiko kredit yang meningkat, tingkat profitabilitas bank menurun. Namun demikian, dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, dibandingkan negara kawasan, dan kecukupan modal bank yang kuat, penurunan tingkat profitabilitas bank yang terjadi tidak berdampak signifikan terhadap resiliensi bank. Hasil *stress test* ketahanan modal terhadap risiko kredit dan risiko pasar menunjukkan bahwa perbankan Indonesia memiliki tingkat ketahanan permodalan yang tinggi dalam menghadapi skenario terburuk.

Sistem pembayaran selama tahun 2015 mencatat kinerja yang semakin baik. Di sisi Bank Indonesia, kinerja yang semakin baik ini tercermin pada keandalan dan ketersediaan (*availability*) sistem serta pelaksanaan *contingency plan* yang efektif. Sementara itu, pada sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri tidak terdapat gangguan yang signifikan dalam penyelenggaraannya. Dari sisi volume transaksi, terjadi peningkatan pertumbuhan dari 18% menjadi 19% pada tahun 2015. Peningkatan terjadi terutama pada sistem pembayaran yang diselenggarakan industri berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) maupun Uang Elektronik (UE). Hal ini sejalan dengan program elektronifikasi alat pembayaran melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta kebijakan Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dengan menggunakan uang elektronik. Keberhasilan program elektronifikasi alat pembayaran ini terlihat pada meningkatnya rasio APMK terhadap PDB, yang mengindikasikan perbaikan preferensi masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran nontunai. Dari sisi sistem pembayaran tunai, pengelolaan uang rupiah juga menunjukkan kinerja yang semakin andal, ditopang oleh kebijakan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan pengelolaan uang rupiah tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan jaringan distribusi uang dan layanan kas melalui Kas Titipan, posisi kas Bank Indonesia yang memadai, serta peningkatan kualitas uang melalui *clean money policy*.

Respons Bauran Kebijakan 2015

Perekonomian selama tahun 2015 dihadapkan pada tiga tantangan utama yang harus dikelola dengan baik. Tantangan pertama adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan domestik di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi. Ketidakpastian tersebut terutama bersumber dari ketidakpastian normalisasi kebijakan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, dan devaluasi yuan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, tekanan depresiasi rupiah meningkat, sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi. Tantangan kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Potensi berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik perlu dimitigasi guna menjaga sentimen positif terhadap prospek ekonomi domestik. Dengan masih melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan domestik menjadi kunci bagi proses pemulihan perekonomian dalam

jangka pendek. Tantangan ketiga adalah mempercepat implementasi reformasi struktural. Berbagai permasalahan struktural domestik yang ada telah mengekskalasi dampak negatif guncangan eksternal baik terhadap stabilitas makroekonomi maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, implementasi reformasi struktural perlu dipercepat untuk memperkuat fondasi perekonomian Indonesia sebagai landasan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menghadapi berbagai tantangan perekonomian tersebut, sinergi kebijakan pengelolaan makroekonomi terus diperkuat. Bauran kebijakan Bank Indonesia difokuskan pada upaya mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut juga diperkuat oleh koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pemangku kebijakan lainnya. Bank Indonesia juga berupaya untuk mendorong momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi dengan menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kebijakan ini disinergikan dengan peningkatan stimulus fiskal yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat implementasi reformasi struktural. Dalam konteks ini, Pemerintah pada tahun 2015 menerbitkan rangkaian paket kebijakan ekonomi Pemerintah jilid I-VIII untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi domestik. Upaya percepatan reformasi struktural Pemerintah juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan pada peningkatan resiliensi dan efisiensi perekonomian domestik.

Dari sisi Bank Indonesia, upaya menjaga stabilitas makroekonomi difokuskan untuk mengembalikan inflasi ke kisaran sasarannya, menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, serta mengelola stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konteks ini, sepanjang tahun 2015 Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar, operasi moneter, lalu lintas devisa, dan penguatan *buffer* cadangan devisa. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, guna mendorong momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan makroprudensial secara selektif untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan dan kebijakan moneter melalui penurunan GWM untuk memberi ruang likuiditas yang memadai bagi bank untuk menyalurkan kredit. Kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter via GWM yang akomodatif ini ditempuh secara terukur dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam upaya

mendukung reformasi struktural, Bank Indonesia terus melakukan pendalaman pasar keuangan, peningkatan keuangan inklusi, serta penguatan sistem pembayaran. Pendalaman pasar keuangan ditujukan untuk menciptakan pasar keuangan yang resilien dan efisien. Sementara itu, kebijakan keuangan inklusi diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses pembiayaan ekonomi. Lebih lanjut, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan infrastruktur sistem pembayaran untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien yang berdaya dukung terhadap efisiensi perekonomian.

Kebijakan suku bunga tetap diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran inflasi, menurunkan defisit transaksi berjalan, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terkait dengan inflasi, kebijakan suku bunga bias ketat ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi dan permintaan domestik agar inflasi segera kembali pada kisaran sasaran $4\pm 1\%$. Dengan ekspektasi inflasi yang masih tinggi pada awal tahun 2015, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 7,75% pada Januari 2015. Pada Februari 2015, BI melakukan normalisasi kembali BI Rate pasca kenaikan BI Rate yang dilakukan pada November 2014. Normalisasi ini dilakukan dengan menurunkan BI Rate sebesar 25bps setelah mempertimbangkan keyakinan bahwa proyeksi inflasi akhir tahun 2015 kembali berada dalam sasaran BI. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% sampai akhir tahun 2015. Di satu sisi, BI memandang bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan masih sesuai dengan upaya mengendalikan permintaan domestik dan impor untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Turunnya defisit transaksi berjalan ini pada gilirannya mengurangi permintaan valas domestik. Di sisi lain, BI juga memandang bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan cukup kompetitif untuk menarik pasokan valas terutama dari aliran masuk modal asing. Kombinasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan depresiasi rupiah yang berlebihan, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan suku bunga yang diambil terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan baik, tercermin pada tercapainya inflasi pada kisaran target inflasi tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, penurunan defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 2% dari PDB, dan penguatan rupiah pada triwulan IV 2015.

Kebijakan nilai tukar difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang konsisten dengan fundamentalnya. Meningkatnya faktor risiko, baik dari eksternal maupun domestik, yang diikuti pemburukan sentimen pasar memicu tekanan depresiasi rupiah yang signifikan terutama pada triwulan II dan III 2015. Peningkatan depresiasi rupiah tersebut mendorong kenaikan ekspektasi depresiasi,

yang kemudian berdampak pada depresiasi rupiah yang berlebihan, bahkan sempat mencapai Rp14.700 per dolar AS. Merespons kondisi tersebut, BI menempuh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar guna memitigasi guliran pelemahan rupiah lebih lanjut. Untuk itu, pada 9 September 2015 BI meluncurkan paket stabilisasi nilai tukar rupiah jangka pendek yang bertumpu pada tiga pilar strategi. Pertama, menjaga stabilitas nilai tukar, kedua, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, termasuk *term structure* OM, dan ketiga, memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas. Guna memperkuat efektivitas kebijakan stabilisasi nilai tukar dalam mengelola ekspektasi depresiasi yang masih masih buruk, Bank Indonesia kembali menerbitkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pada 30 September 2015. Paket kebijakan tersebut, antara lain, termasuk penguatan pasar *forward* baik melalui implementasi intervensi *forward* maupun pelonggaran *threshold* transaksi jual *forward* nasabah dan penerbitan instrumen operasi moneter yang baru untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas rupiah. Paket stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia yang ditopang oleh kebijakan kewajiban penggunaan rupiah dan rangkaian paket-paket kebijakan ekonomi Pemerintah mampu meredam gejolak rupiah yang berlebihan, tercermin pada menguatnya rupiah pada triwulan IV 2015.

Kebijakan penguatan operasi moneter diarahkan untuk meningkatkan efektivitas operasi moneter dalam mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebagai bagian dari paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menempuh berbagai langkah untuk memperkuat operasi moneter baik rupiah maupun valas. Di sisi operasi moneter (OM) rupiah, strategi penguatan OM rupiah diimplementasikan melalui penyesuaian *pricing* lelang operasi pasar terbuka (OPT) dan perpanjangan tenor instrumen OM. Penyesuaian *pricing* lelang OPT diwujudkan melalui perubahan mekanisme lelang OPT dari *variable rate tender* ke *fixed rate tender*. Sementara itu, perpanjangan tenor instrumen OM dilakukan melalui penerbitan instrumen OM baru dengan tenor lebih panjang, yakni *Reverse Repo* SBN (RR SBN) tenor 2 minggu, SDBI tenor 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dan penerbitan kembali SBI tenor 9 sampai dengan 12 bulan. Di sisi penguatan OM valas, Bank Indonesia melakukan penyesuaian *pricing*, perpanjangan tenor instrumen OM valas sampai dengan 3 bulan, optimalisasi FX *Swap*, penerbitan ketentuan transaksi lelang *forward* oleh Bank Indonesia, dan penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. Keberhasilan dari konsistensi penguatan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia sepanjang tahun 2015 tercermin pada durasi operasi moneter yang meningkat dan stabilitas rupiah yang terjaga.

Upaya stabilisasi rupiah juga ditopang oleh kebijakan pengelolaan lalu lintas devisa yang diarahkan pada penguatan pengelolaan permintaan dan penawaran valas domestik. Karakteristik pasar valas domestik yang cenderung *net demand* diperberat oleh turunnya penawaran valas pada tahun 2015 akibat dari belum pulihnya ekspor dan penurunan konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kondisi tersebut menyebabkan rupiah semakin rentan terhadap guncangan dari eksternal. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan yang ditujukan terutama untuk memperkuat penawaran valas dan informasi lalu lintas devisa (LLD). Di sisi pasokan valas, Bank Indonesia memperpendek *minimum holding period* (MHP) SBI 1 bulan menjadi 1 minggu untuk mendorong peningkatan pasokan valas dari nonresiden. Perpendekan MHP akan meningkatkan fleksibilitas bagi investor SBI sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat nonresiden untuk menanamkan modal asing di Indonesia. Terkait dengan DHE, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito secara progresif kepada eksportir yang menyimpan DHE di perbankan Indonesia atau mengkoversionya ke dalam rupiah. Dengan kebijakan ini, tingkat imbal hasil deposito di Indonesia menjadi cukup kompetitif, yang diharapkan akan mendorong aliran masuk modal residen, yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Di sisi informasi lalu lintas devisa, Bank Indonesia melakukan penguatan informasi pada laporan LLD, yang antara lain mewajibkan pelaku LLD melaporkan penggunaan devisa yang dilengkapi dengan dokumen tertentu jika transaksi yang dilakukan melebihi nilai tertentu.

Di samping itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat resiliensi perekonomian domestik dengan memperkuat *second line of defense* cadangan devisa melalui kerja sama dengan bank sentral lain. Berbagai episode turbulensi nilai tukar menunjukkan perlunya upaya untuk terus memperkuat cadangan devisa, meski rata-rata sepanjang tahun 2015 berada di atas batas aman. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia bersama Gubernur Bank Sentral ASEAN pada tahun 2015 telah memperpanjang perjanjian *ASEAN Swap Arrangement* (ASA) senilai 2 miliar dolar AS. ASA dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami tekanan neraca pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama BCSA dengan *Reserve Bank of Australia* (RBA) senilai 10 miliar dolar Australia untuk mendorong perdagangan bilateral dan menjamin penyelesaian transaksi perdagangan dalam mata uang lokal kedua negara tersebut. Implementasi kerja sama *bilateral currency* akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sehingga mendukung stabilitas rupiah.

Kondisi makroekonomi yang semakin stabil sejak triwulan IV 2015 membuka peluang pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan GWM Primer dalam rupiah. Di satu sisi, pelonggaran kebijakan moneter yang terukur masih sesuai dengan perkembangan inflasi yang terus menurun ke arah kisaran targetnya. Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter akan dapat menahan pemburukan pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut yang berpotensi meningkatkan risiko dan instabilitas makroekonomi Indonesia. Meski ruang pelonggaran kebijakan moneter menjadi terbuka, masih tingginya risiko nilai tukar terkait kemungkinan kenaikan FFR mengharuskan Bank Indonesia untuk berhati-hati dalam memilih instrumen pelonggaran kebijakan moneter. Bank Indonesia memandang bahwa ruang pelonggaran kebijakan moneter dapat dimanfaatkan dengan menggunakan instrumen kebijakan selain suku bunga kebijakan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank Indonesia bulan November 2015 menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah sebesar 0,5% menjadi 7,50% berlaku efektif sejak 1 Desember 2015. Pelonggaran GWM ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang mulai meningkat sejak triwulan III 2015.

Bank Indonesia menyinergikan kebijakan stabilisasi makroekonomi dengan relaksasi kebijakan makroprudensial untuk menciptakan momentum positif pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebagai langkah antisipatif prospek pertumbuhan ekonomi yang melambat, Bank Indonesia pada akhir tahun 2014 mendesain kebijakan makroprudensial yang lebih akomodatif untuk tahun 2015. Desain kebijakan makroprudensial yang akomodatif tersebut diimplementasikan dengan melakukan pelonggaran ketentuan *Loan/Financing to Value Ratio* (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Bank Indonesia juga mendorong penerbitan surat-surat berharga oleh bank yang diperhitungkan dalam perhitungan *Loan to Funding Ratio* (LFR) menggantikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Relaksasi kebijakan makroprudensial ini diharapkan dapat menambah kapasitas pembiayaan perbankan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, Bank Indonesia menerbitkan mekanisme insentif UMKM yang ditujukan untuk mendorong pemberian kredit UMKM dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian. Upaya Bank Indonesia mendorong sektor UMKM juga didukung oleh strategi Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM melalui perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan serta peningkatan kapasitas UMKM. Dalam konteks stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan

pemeriksaan terhadap beberapa bank serta melakukan *stress test* untuk mengkaji ketahanan modal dan likuiditas bank terhadap depresiasi rupiah.

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada penguatan infrastruktur sistem pembayaran serta perluasan penggunaan instrumen nontunai dalam rangka menjamin kelancaran sistem pembayaran. Menyikapi kecenderungan peningkatan kebutuhan transaksi melalui sistem pembayaran dan perkembangan teknologi, Bank Indonesia secara konsisten terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran baik untuk nilai besar maupun retail. Penguatan infrastruktur ini ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien. Di sisi sistem pembayaran nilai besar, pada tahun 2015 Bank Indonesia meluncurkan penggunaan BI-RTGS generasi II, BI-SSSS, dan BI-ETP, yang memungkinkan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dan aman. Di sisi sistem pembayaran retail, Bank Indonesia juga mulai mengimplementasikan SKNBI generasi II yang mampu memproses transaksi yang lebih cepat dan memperkuat perlindungan terhadap konsumen. Terkait dengan pengembangan instrumen nontunai, Bank Indonesia melanjutkan inisiasi pengembangan *National Payment Gateway* (NPG), yang akan menjadi penghubung berbagai penyelenggara ritel elektronis yang ada di Indonesia sehingga menjadi lebih efisien. Berbagai kebijakan tersebut juga didukung oleh upaya peningkatan literasi keuangan melalui program Layanan Keuangan Digital (LKD) dan penyusunan *roadmap* elektronifikasi untuk mendukung keberhasilan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia mengimplementasikan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara kesatuan Indonesia untuk mengelola permintaan valas domestik.

Di bidang pengelolaan ruang rupiah, Bank Indonesia melakukan reformasi distribusi uang dan layanan kas guna memenuhi kebutuhan uang rupiah untuk mendukung kelancaran transaksi ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia menempuh lima kebijakan pengelolaan uang rupiah guna menjamin tersedianya uang rupiah dalam jumlah yang cukup, berkualitas, pecahan yang sesuai, dan tepat waktu. Kebijakan pertama adalah menjaga kecukupan kas di seluruh kantor Bank Indonesia dengan menjaga *Iron Stock* Nasional (ISN) sebesar 20% dari jumlah uang yang diedarkan serta menjaga kas minimum sebesar 1,5 bulan penarikan bank (*outflow*). Kedua, meningkatkan kualitas uang rupiah melalui *clean money policy* dengan menaikkan standar tingkat kelusuan uang yang dibarengi dan pemusnahan uang tidak layak edar yang lebih besar. Ketiga, mereformasi jaringan distribusi uang

dan layanan kas dengan membuka kantor Bank Indonesia baru yang melakukan fungsi pengelolaan uang rupiah dan menambah jumlah kas titipan di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, memperkuat komunikasi mengenai ciri keaslian uang rupiah secara berkelanjutan, baik melalui komunikasi langsung kepada berbagai kelompok masyarakat maupun melalui media elektronik. Kelima, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan pemberantasan uang palsu dengan memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Kerja sama tersebut didukung oleh penyediaan laboratorium uang rupiah yang diduga palsu dan penyediaan sistem informasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC) yang andal.

Untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya di berbagai aspek perekonomian. Penguatan koordinasi ditempuh dalam rangka pengelolaan stabilitas makroekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat implementasi reformasi struktural. Dalam konteks mengawal stabilitas ekonomi, koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi melalui penguatan peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya pengelolaan inflasi secara lebih struktural diwujudkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dengan menyusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2015-2018. *Roadmap* ini mencakup identifikasi pemetaan permasalahan inflasi, rekomendasi pengendalian inflasi jangka menengah dan panjang, serta penegasan peran dari Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. *Roadmap* Pengendalian Inflasi ini diperkuat dengan adanya penegasan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga di daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur dan pewujudan kedaulatan pangan di daerah. Koordinasi yang kuat dengan Pemerintah juga ditempuh dalam menghadapi tekanan depresiasi rupiah yang berlebihan akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Hasil dari koordinasi tersebut diwujudkan dalam paket kebijakan ekonomi I dan II yang antara lain mengatur penguatan pengelolaan permintaan dan penawaran valas dan pemberian insentif untuk mendorong DHE. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU-JPSK) yang akan menjadi payung hukum utama pencegahan dan penanganan krisis. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan berbagai lembaga terkait untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan sistem

pembayaran serta pengelolaan uang rupiah yang lancar, aman, dan andal.

Koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi juga diperkuat. Pada tataran nasional, Bank Indonesia menyinergikan kebijakan stimulus fiskal yang ditempuh Pemerintah dengan melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Di samping itu, Bank Indonesia juga berperan aktif sebagai *counterpart* dari Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), antara lain dengan mengajukan rekomendasi penyusunan pedoman pelaksanaan dan pencapaian target penyaluran KUR skema tahun 2015. Bank Indonesia dan Pemerintah juga bekerja sama dalam rangka mengoptimalkan pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan, antara lain melalui peningkatan akses dan jangkauan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tataran daerah, kerja sama ditempuh untuk mendorong harmonisasi sektor-sektor unggulan yang telah dipetakan ke dalam perencanaan pengembangan sektor prioritas pemerintah. Dalam konteks tersebut, berdasarkan hasil asesmen *growth diagnostic* yang dilakukan, Bank Indonesia merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah tentang sektor-sektor tertentu yang mempunyai potensi dan nilai tambah besar yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendorong reformasi struktural ditujukan pada upaya memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia. Kebijakan reformasi struktural yang ditempuh difokuskan pada upaya mengatasi berbagai sendi permasalahan mendasar ekonomi Indonesia melalui penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing, pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air, pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, dan penguatan ekonomi inklusif. Di sisi Pemerintah, guna memperbaiki iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, telah diterbitkan rangkaian paket kebijakan ekonomi jilid I–VIII selama tahun 2015. Untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan, Pemerintah melakukan pengembangan dan perbaikan infrastruktur pertanian, penguatan sisi produksi dan pasca panen, dan penatausahaan pasar. Untuk menopang ketahanan di bidang energi, Pemerintah melakukan pembenahan kebijakan energi berupa energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, pengelolaan minyak dan gas bumi, pemenuhan ketenagalistrikan, serta melanjutkan upaya peningkatan nilai tambah produk tambang. Sementara itu, di bidang ketahanan air, Pemerintah mendorong penyediaan air untuk masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui rangkaian paket kebijakan ekonomi di atas, pemerintah juga terus memperkuat ekonomi inklusif antara lain dengan

mendorong perluasan kewirausahaan penerima KUR, pembiayaan usaha kecil dan menengah, dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Guna mempercepat implementasi kebijakan reformasi struktural tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah telah memadukan visi pengembangan sektor-sektor unggulan melalui berbagai forum koordinasi nasional. Selama tahun 2015, forum koordinasi nasional difokuskan pada pengembangan empat bidang unggulan yang menjadi prioritas utama, yakni kemaritiman, pangan, infrastruktur energi, serta industri dan pariwisata.

Bank Indonesia secara konsisten mendukung implementasi reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah dengan terus mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif. Disamping untuk menciptakan pasar keuangan yang mampu menyerap guncangan perekonomian yang muncul, pendalaman pasar keuangan juga ditujukan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kemudahan akses pembiayaan. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat upaya pendalaman pasar keuangan dengan memperluas cakupan pelaku pasar, memperbanyak variasi instrumen pasar keuangan, dan mendorong terbentuknya harga yang efisien. Dalam konteks ini, Bank Indonesia telah menerbitkan *blueprint* pendalaman pasar keuangan yang mencakup lima strategi, yakni pengembangan instrumen dan basis investor, penguatan regulasi dan standarisasi, pengembangan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta edukasi dan sosialisasi yang efektif. Dengan strategi tersebut, *blueprint* pasar keuangan akan berfungsi sebagai *guidance* bagi pengembangan pasar uang rupiah dan valas, pasar keuangan syariah, dan pasar obligasi. Sementara itu, untuk meningkatkan akses masyarakat terutama lapisan bawah pada layanan jasa keuangan, Bank Indonesia terus berperan aktif mendorong inisiatif keuangan inklusif. Kebijakan keuangan inklusif Bank Indonesia tersebut difokuskan pada pengembangan inovasi berbasis teknologi digital untuk meminimalkan hambatan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan jasa keuangan, sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat.

Bauran kebijakan Bank Indonesia yang ditempuh secara konsisten dapat menjaga kinerja perekonomian Indonesia di tengah perkembangan global yang kurang kondusif. Hal ini tercermin pada terkelolanya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mulai bergulirnya momentum pertumbuhan ekonomi. Semakin membaiknya stabilitas makroekonomi tercermin pada tercapainya sasaran inflasi 2015 sebesar 4±1%, menurunnya defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 2% dari PDB, dan terkendalinya stabilitas rupiah sejak triwulan IV 2015. Di sisi stabilitas sistem keuangan, berbagai kebijakan yang diambil

mampu menjaga resiliensi sistem keuangan yang diterpa guncangan baik dari eksternal maupun internal. Sementara itu, momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi terus bergulir sejak pertengahan tahun 2015.

Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan

Dinamika perekonomian Indonesia selama tahun 2015 menyiratkan beberapa pelajaran berharga bagi upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depan. Pelajaran pertama yang mengemuka ialah pentingnya kebijakan makroekonomi, baik fiskal maupun moneter, yang disiplin dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perjalanan ekonomi tahun 2015 menunjukkan bahwa bauran kebijakan moneter bias ketat dan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, yang disertai kebijakan stimulus fiskal yang berhati-hati, terbukti mampu mengawal stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Kedua, di tengah melemahnya perekonomian global dan meningkatnya ketidakpastian keuangan global, upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik menjadi sangat penting. Pertumbuhan ekonomi yang terus melambat akan memicu berbagai risiko perekonomian, termasuk risiko nilai tukar, risiko korporasi, dan risiko perbankan, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Untuk itu, kebijakan pengelolaan makroekonomi perlu diformulasikan secara berhati-hati untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Ketiga, bauran kebijakan seyogyanya diimplementasikan secara tepat waktu untuk memaksimalkan efektifitasnya terhadap perekonomian domestik. Oleh karena itu, konsistensi perencanaan dengan waktu implementasi kebijakan merupakan elemen kunci bagi terjaganya kinerja perekonomian dalam menghadapi tantangan global. Keempat, kompleksitas permasalahan ekonomi yang dihadapi mengisyaratkan perlunya sinergi kebijakan yang kuat antar pemangku kebijakan, baik Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta otoritas yang lain. Pelajaran terakhir, dinamika perekonomian global yang sarat dengan ketidakpastian mengingatkan pada pentingnya percepatan reformasi struktural dalam memperkuat fondasi perekonomian dan diversifikasi ekonomi agar perekonomian menjadi resilien dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Tantangan Perekonomian ke Depan

Perekonomian Indonesia ke depan masih akan dihadapkan pada tantangan yang cukup berat dan semakin kompleks,

baik dari perkembangan ekonomi global maupun domestik. Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dalam jangka pendek diprakirakan masih belum kuat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprakirakan masih melambat sehingga berdampak negatif bagi prospek pemulihan perekonomian Indonesia. Di satu sisi, belum pulihnya perekonomian global tersebut akan berdampak pada masih melemahnya harga komoditas global yang pada gilirannya menekan kinerja neraca transaksi berjalan. Di sisi lain, belum kuatnya pertumbuhan ekonomi, terutama di negara maju, mengakibatkan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju. Kondisi tersebut akan mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan global dan berdampak positif pada neraca transaksi modal dan finansial. Meski demikian, masih lemahnya perekonomian Tiongkok berpotensi menjadi sumber ketidakpastian di pasar keuangan global. Masih rentannya kinerja eksternal Indonesia perlu tetap diwaspadai, mengingat hal ini dapat menimbulkan tekanan depresiasi rupiah yang signifikan dan mengganggu stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang bergulir.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berpotensi menjadi tantangan yang cukup berat apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Semakin terintegrasinya perekonomian kawasan baik dari sisi perdagangan, keuangan, dan investasi menjadikan Asia sebagai salah satu tujuan utama investasi sistem produksi global. Namun demikian, berkurangnya hambatan arus perdagangan kawasan akan mendorong melimpahnya produk asing ke perekonomian domestik, yang berpotensi mengungguli produk domestik terutama yang tidak berdaya saing tinggi. Hal yang serupa juga dapat terjadi di sektor jasa yang menjadi sangat kompetif seiring dengan pemberlakuan MEA. Oleh karena itu, kesiapan pelaku ekonomi domestik perlu diperkuat untuk dapat memetik manfaat dari implementasi MEA. Dalam konteks ini, posisi Indonesia yang relatif tertinggal dalam rantai nilai global dibanding negara kawasan harus diperbaiki, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk dan jasa dari negara-negara kawasan lainnya.

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Tantangan struktural yang menjadi prioritas untuk dibenahi terdiri dari empat pilar fundamental ekonomi yaitu: i) Ketahanan pangan, energi, dan air; ii) Daya saing industri, maritim, dan pariwisata; iii) Pembiayaan pembangunan yang

berkesinambungan; dan iv) Ekonomi inklusif. Ketahanan pangan relatif masih rendah, terutama dilihat dari sisi produktivitas pertanian dan diversifikasi pangan yang terbatas. Ketahanan energi masih cukup rentan, meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang besar. Ketahanan air juga masih belum kuat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi pangan, dan sumber energi dengan baik. Sementara itu, meski potensi sektor maritim cukup kuat, sektor ini masih menghadapi tantangan kedaulatan wilayah, optimalisasi pengelolaan SDA, dan konektivitas. Berbeda dengan sektor maritim, daya saing sektor industri masih lemah, disebabkan oleh teknologi yang terbatas dan ketergantungan industri domestik pada sumber daya alam. Sektor pariwisata menghadapi kendala yaitu kurangnya dukungan infrastruktur konektivitas terhadap akses ke lokasi obyek wisata. Permasalahan pembiayaan terkait dengan masih terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan formal dan masih kurangnya dukungan *Foreign Direct Investment* (FDI). Dari sisi ekonomi inklusif, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada kondisi ketimpangan pembangunan yang tinggi dan ketidakmerataan masyarakat dalam menikmati akses dan hasil pertumbuhan ekonomi. Empat tantangan struktural tersebut tidak terlepas dari tantangan untuk memperkuat modal dasar pembangunan, terutama infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, dan IPTEK. Pendekatan *growth diagnostic* menunjukkan bahwa hambatan utama dalam perekonomian Indonesia terutama bersumber pada terbatasnya infrastruktur listrik, permasalahan konektivitas, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kombinasi dari permasalahan global, regional, dan permasalahan struktural domestik yang ada menimbulkan tantangan yang kompleks bagi pengelolaan makroekonomi. Perlambatan ekonomi dunia, terutama Tiongkok, yang mendorong penurunan harga komoditas lebih lanjut berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia. Struktur perekonomian Indonesia yang tergantung pada komoditas serta kandungan impor pada ekspor Indonesia yang tinggi akan semakin memperberat tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Risiko tertekannya pertumbuhan ekonomi ke depan juga muncul dari meningkatnya risiko likuiditas sejalan dengan mulai membaiknya pertumbuhan kredit. Di samping itu, risiko semakin terbatasnya ruang fiskal dalam mendorong belanja modal juga patut diwaspadai mengingat perannya yang vital dalam proses pemulihan perekonomian. Oleh karena itu, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut perlu dikelola dengan baik agar tidak memicu risiko-risiko lain yang dapat semakin menekan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas makroekonomi

dan sistem keuangan. Selanjutnya, perlu diupayakan diversifikasi perekonomian agar ekonomi Indonesia lebih kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan ke Depan

Berkaca pada pengalaman tahun 2015 serta mempertimbangkan risiko dan permasalahan perekonomian yang ada, bauran kebijakan makroekonomi tahun 2016 perlu difokuskan untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang bergulir. Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati. Di sisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Dalam konteks ini, upaya mendorong permintaan domestik yang sesuai dengan kapasitas perekonomian menjadi sangat penting mengingat kondisi perekonomian global yang belum cukup kuat. Upaya peningkatan permintaan domestik yang sesuai dengan kapasitas perekonomian juga merupakan kunci bagi tetap terpeliharanya stabilitas makroekonomi yang tercermin pada tercapainya sasaran inflasi yang ditetapkan, terkelolanya defisit transaksi berjalan, dan terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mempercepat reformasi struktural agar segera tercipta fondasi perekonomian yang kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati. Di sisi moneter, Bank Indonesia (BI) secara berhati-hati mengarahkan kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), dan nilai tukar untuk menjaga inflasi agar sesuai dengan sasarannya, mengelola defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat, dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang telah tercipta. Dalam kerangka ini, *stance* kebijakan suku bunga ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi dan permintaan domestik, serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kebijakan GWM diarahkan untuk mendukung kecukupan likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan nilai tukar tetap difokuskan untuk

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamental. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, BI akan melakukan penguatan operasi moneter baik rupiah maupun valas. Berbagai kebijakan tersebut didukung dengan pengelolaan lalu lintas devisa yang berhati-hati dan penguatan jaring pengaman keuangan internasional untuk meningkatkan resiliensi perekonomian domestik. Di sisi kebijakan makroprudensial, BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan berhati-hati guna mendorong fungsi intermediasi perbankan dan mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Di sisi sistem pembayaran, kebijakan BI tetap diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran agar semakin aman, lancar, dan efisien. Penguatan sistem pembayaran akan ditopang oleh kebijakan BI di bidang pengelolaan uang rupiah yang fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan uang tunai yang berkualitas secara tepat waktu dan dengan jumlah dan pecahan yang sesuai di seluruh wilayah Indonesia.

Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2016 juga disinergikan dengan kebijakan fiskal yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan makroekonomi secara keseluruhan. Koordinasi dengan Pemerintah akan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, melalui pengelolaan inflasi terutama *volatile food* dan defisit transaksi berjalan yang sehat, stabilitas sistem keuangan yang kuat, dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang andal, aman, dan lancar. Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang akomodatif secara berhati-hati akan disinergikan dengan stimulus fiskal yang ditempuh Pemerintah. Di samping itu, Bank Indonesia akan memperkuat peran Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) sebagai forum koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terkait kebijakan fiskal, Pemerintah diharapkan akan terus mendorong stimulus fiskal untuk mempercepat momentum pemulihan ekonomi dengan tetap memelihara defisit APBN pada level yang aman dan berkesinambungan. Bauran kebijakan yang terukur pada berbagai level tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan ekonomi jangka pendek, yakni mempercepat guliran momentum pertumbuhan ekonomi domestik sambil tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

Asesmen atas berbagai paket kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah dan pemetaan permasalahan struktural domestik mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan terutama pada upaya pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air, peningkatan daya saing maritim dan pariwisata, pembiayaan jangka panjang yang

berkelanjutan, ekonomi yang inklusif, penguatan sumber daya manusia, serta penguasaan IPTEK. Dari sisi pangan, kebijakan perlu diarahkan untuk menjawab tantangan relatif rendahnya produktivitas antara lain melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, pemulihan kesuburan lahan, serta pengembangan bank pertanian dan UMKM. Dari sisi energi, kebijakan perlu diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan efisiensi dengan fokus pada empat prioritas kebijakan energi. Keempat prioritas kebijakan tersebut meliputi peningkatan produksi dan cadangan energi primer, peningkatan bauran energi, peningkatan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan energi dan listrik, serta pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran. Sementara dari sisi pengelolaan air, kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi, produksi pangan, dan sumber energi perlu dipadukan dengan konservasi sumber daya air antara lain melalui pembangunan waduk, peningkatan akses air minum dan sanitasi, pengembangan infrastruktur konservasi air, perlindungan sumber air alami, serta pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Terkait industri, penyusunan kebijakan diarahkan pada upaya peningkatan daya saing, produktivitas, dan muatan teknologi. Untuk itu, fokus kebijakan ditujukan pada upaya mengembangkan perwilayahan industri di luar Jawa, mendorong peningkatan populasi industri, memperkuat integrasi dalam rantai nilai dunia, serta mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas. Pada sektor maritim, arah kebijakan ditujukan pada penguatan kedaulatan wilayah, pengelolaan SDA, konektivitas, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Sementara itu, kebijakan di sektor pariwisata diarahkan pada penguatan infrastruktur dan fasilitas wisata serta kapasitas SDM. Perlunya dukungan pembiayaan yang berkesinambungan perlu direspons dengan kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber dana berbasis jangka panjang yang bersumber baik dari domestik maupun luar negeri. Dalam kaitan tersebut, BI terus mengupayakan pendalaman pasar keuangan, antara lain dengan mendorong penggunaan *General Master Repurchase Agreement* (GMRA) dan melanjutkan pengembangan instrumen pasar uang rupiah dan valas. Terkait ekonomi inklusif, kebijakan perlu diarahkan pada pemerataan pembangunan dan akses keuangan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia mendorong keuangan inklusif melalui perluasan transaksi nontunai yang didukung oleh infrastruktur pembayaran yang terintegrasi melalui *National Payment Gateway* (NPG).

Penguatan empat pilar kebijakan struktural tersebut didukung oleh berbagai kebijakan penguatan modal dasar pembangunan yang meliputi infrastruktur, iklim usaha, sumber daya manusia, dan IPTEK. Terkait penguatan

infrastruktur, Pemerintah telah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah telah menyusun 225 Proyek Strategis Nasional dan 30 Proyek Prioritas sebagai fokus pembangunan infrastruktur berdasarkan RPJMN 2014-2019. Pemerintah juga akan memperkuat konektivitas nasional dan konektivitas digital, antara lain melalui penetapan lokasi 24 pelabuhan strategis dan pembangunan jalan tol, serta membangun tulang punggung serat optik nasional di berbagai wilayah. Terkait dengan iklim usaha, Pemerintah akan terus melakukan pembenahan dan penyederhanaan perizinan, perbaikan pelayanan dengan menambah jumlah dan kualitas Program Terpadu Satu Pintu (PTSP), penegakan hukum dan kepastian usaha melalui harmonisasi peraturan pusat dan daerah, insentif pajak, serta fasilitasi kawasan industri. Terkait dengan IPTEK, Pemerintah akan mendorong penggunaan IPTEK untuk memperkuat daya saing sektor produksi dan jasa, pengelolaan sumber daya alam, sosial kemasyarakatan, SDM, sarana dan prasarana, kelembagaan, jaringan, serta pembangunan taman sains dan taman tekno. Terkait SDM, Bank Indonesia memandang perlunya peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai lokasi investasi dengan tujuan ekspor, guna memanfaatkan integrasi dalam rantai nilai global dan mendiversifikasi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia juga memandang bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam memperkuat modal dasar pembangunan tersebut sangat penting untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Untuk turut meningkatkan efisiensi perekonomian, Bank Indonesia akan mengakselerasi pengembangan infrastruktur sistem pembayaran nasional yang lebih efisien melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran dan peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran ritel elektronik.

Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Menengah

Dengan semakin terjaganya stabilitas perekonomian, berlanjutnya kebijakan stimulus fiskal, dan implementasi kebijakan reformasi struktural yang konsisten, perekonomian Indonesia ke depan diperkirakan akan membaik. Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,2-5,6%. Pertumbuhan ekonomi domestik jangka pendek tersebut diperkirakan masih akan bersumber dari permintaan domestik terutama realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Sementara itu, investasi swasta diharapkan akan meningkat seiring dengan dampak paket kebijakan pemerintah yang terus digulirkan dan

pemanfaatan ruang pelonggaraan kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perbaikan permintaan domestik tersebut juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mulai membaik. Sementara itu, kontribusi sektor eksternal masih akan terbatas sejalan dengan belum solidnya pertumbuhan ekonomi global terutama Tiongkok. Inflasi tahun 2016 diperkirakan masih terkendali sesuai dengan kisaran sasarannya sebesar $4\pm 1\%$ ditopang oleh terkelolanya ekspektasi inflasi, koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, serta penurunan harga komoditas internasional termasuk minyak. Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik yang ditopang oleh proyek infrastruktur serta masih terbatasnya perbaikan kinerja ekspor akan mendorong sedikit peningkatan defisit transaksi berjalan. Namun, defisit transaksi berjalan 2016 masih akan tetap dalam batas aman di bawah 3% dari PDB serta mempunyai struktur yang lebih sehat. Dengan berbagai perkembangan tersebut, kredit diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 12-14% pada tahun 2016 sementara dana pihak ketiga tumbuh 13-15% pada tahun yang sama.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan terus meningkat sejalan dengan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan reformasi struktural secara konsisten dan tersinergi antar sektor serta bauran kebijakan yang baik antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan pemangku kebijakan yang lain. Perkiraan ini didukung oleh semakin solidnya perbaikan ekonomi global ke depan dan mulai berdampak berbagai kebijakan reformasi struktural yang secara konsisten ditempuh oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas terkait yang lain. Dengan kondisi tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 akan dapat tumbuh tinggi pada kisaran 6,3-6,8%. Di samping tumbuh lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi juga akan lebih inklusif dan disertai dengan struktur yang lebih sehat. Konsumsi rumah tangga akan tumbuh stabil seiring dengan bertambahnya porsi masyarakat kelas menengah dan perluasan perlindungan sosial. Peran swasta dalam investasi akan terus meningkat ditopang oleh pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang terus berlanjut, iklim usaha yang membaik, serta reformasi birokrasi yang lebih efisien. Di samping itu, kualitas pengeluaran pemerintah akan terus meningkat, yang tercermin pada naiknya porsi belanja modal sejalan dengan penurunan porsi pengeluaran pemerintah untuk subsidi. Di sisi eksternal, kinerja NPI dalam jangka menengah akan membaik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali pada tingkat yang aman. Hal ini ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan

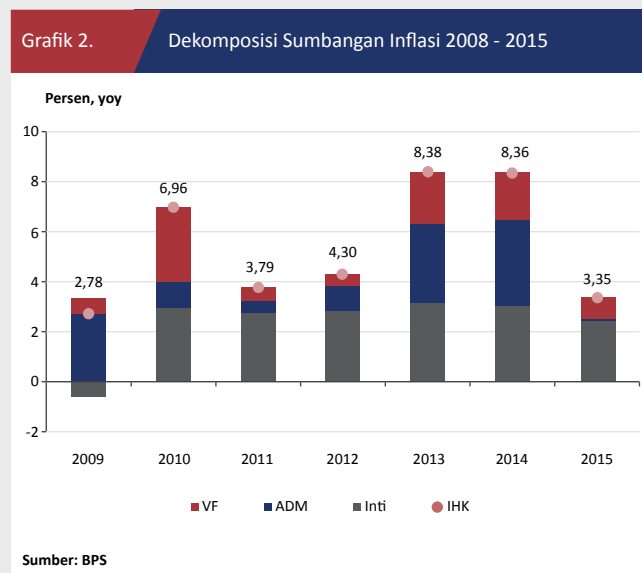
ekonomi global, membaiknya harga komoditas, dan menguatnya daya saing produk ekspor Indonesia. Di sisi inflasi, peningkatan kapasitas perekonomian domestik, sebagai dampak dari konsistensi reformasi struktural yang ditempuh, dan konsistensi Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas makroekonomi akan dapat mengelola inflasi untuk tetap berada dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$ dalam jangka menengah.

Konsistensi implementasi reformasi struktural merupakan kunci bagi tercapainya prospek perekonomian domestik jangka menengah tersebut. Proyeksi jangka menengah yang meningkat yang disertai kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik hanya dimungkinkan jika implementasi reformasi struktural berjalan optimal. Hal ini mengingat bahwa dua faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka menengah, yakni pembangunan infrastruktur dan keterlibatan yang lebih dari sektor swasta, sangat tergantung dari konsistensi

implementasi reformasi struktural. Namun demikian, kompleksitas permasalahan struktural perekonomian domestik mengisyaratkan terdapatnya berbagai kendala yang berpotensi menghambat implementasi reformasi struktural. Apabila hal ini terjadi, terkendalanya reformasi struktural akan berdampak pada tidak maksimalnya realisasi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi tulang punggung bagi pemecahan berbagai permasalahan di sisi penawaran. Kondisi ini dapat menghambat upaya peningkatan kapasitas perekonomian dan produktivitas yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah namun juga tekanan inflasi dari sisi permintaan dan defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi. Untuk itu, upaya untuk mengawal implementasi reformasi struktural melalui sinergi pengelolaan makroekonomi yang komprehensif harus terus diperkuat agar perekonomian Indonesia dapat melaju dengan cepat, berkelanjutan, inklusif, dan mendukung terjaganya stabilitas perekonomian secara menyeluruh.

Inflasi IHK tahun 2015 terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi (4±1%). Inflasi 2015 tercatat sebesar 3,35% (yoy), lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya (8,36%, yoy) (Grafik 1). Semua komponen inflasi, yaitu kelompok inti, kelompok *volatile food* (VF), dan kelompok *administered prices* (AP) tercatat rendah (Grafik 2). Rendahnya inflasi inti tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengarahkan ekspektasi inflasi, dan mengelola permintaan domestik. Inflasi VF yang dapat dijaga di bawah 5%, di tengah terjadinya gejala *El Nino*, merupakan hasil upaya serius Pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi, memperbaiki distribusi, dan meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Sementara itu, rendahnya inflasi AP terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak dan gas global serta kebijakan Pemerintah melakukan reformasi subsidi energi. Pasca reformasi energi, penentuan harga BBM, gas, dan tarif listrik mengikuti perkembangan harga minyak, gas, dan nilai tukar (Diagram 1).

Inflasi inti cukup terkendali sepanjang 2015 seiring lemahnya tekanan permintaan, minimalnya tekanan *cost push*, serta terkendalnya ekspektasi inflasi. Inflasi inti tercatat sebesar 3,95% (yoy), lebih rendah dari



tahun 2014 (4,93%, yoy). Pada awal tahun, inflasi inti masih cukup tinggi, berkisar 5% (yoy), bersumber dari dampak lanjutan kenaikan harga BBM tahun sebelumnya. Ekspektasi inflasi yang tetap terkendali di tengah tekanan kenaikan harga akibat depresiasi nilai tukar rupiah, yang mencapai puncaknya pada bulan September, berandil pada terjadinya dinamika inflasi inti sepanjang 2015. Adapun

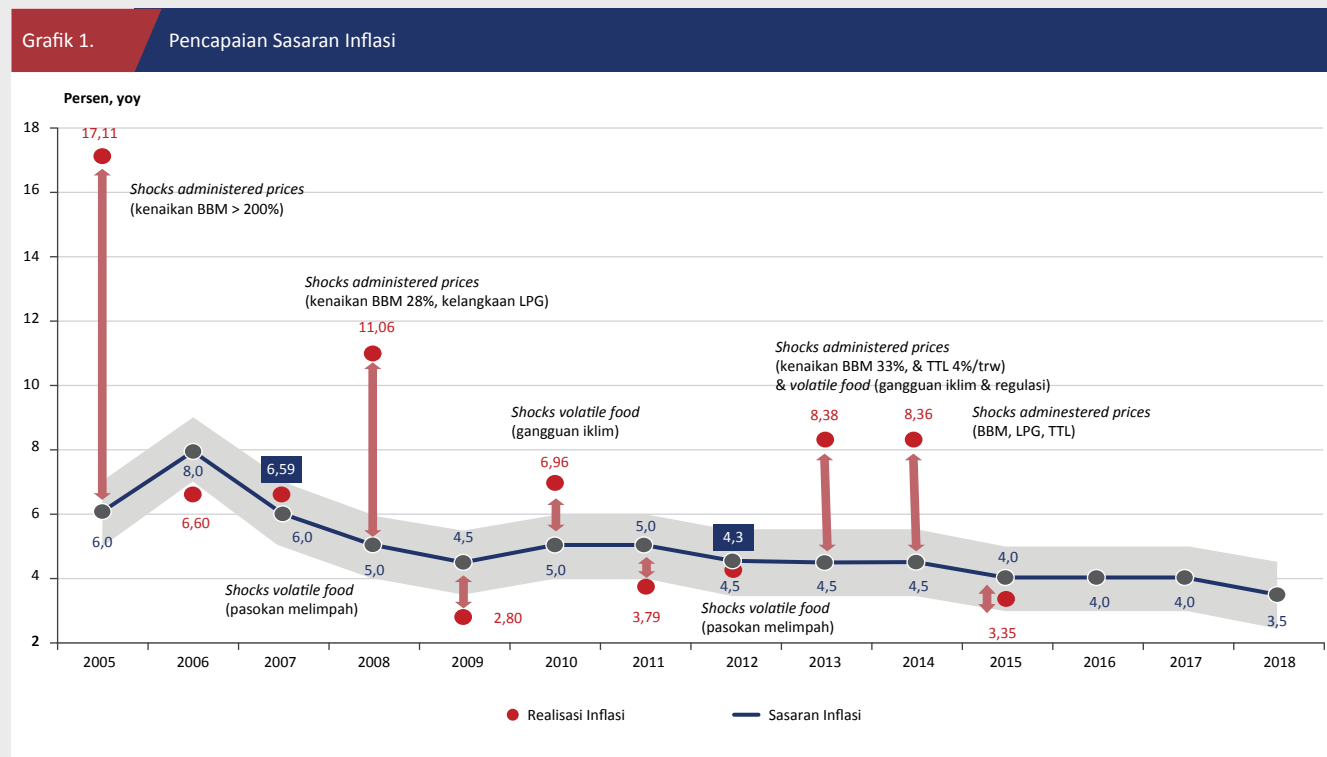
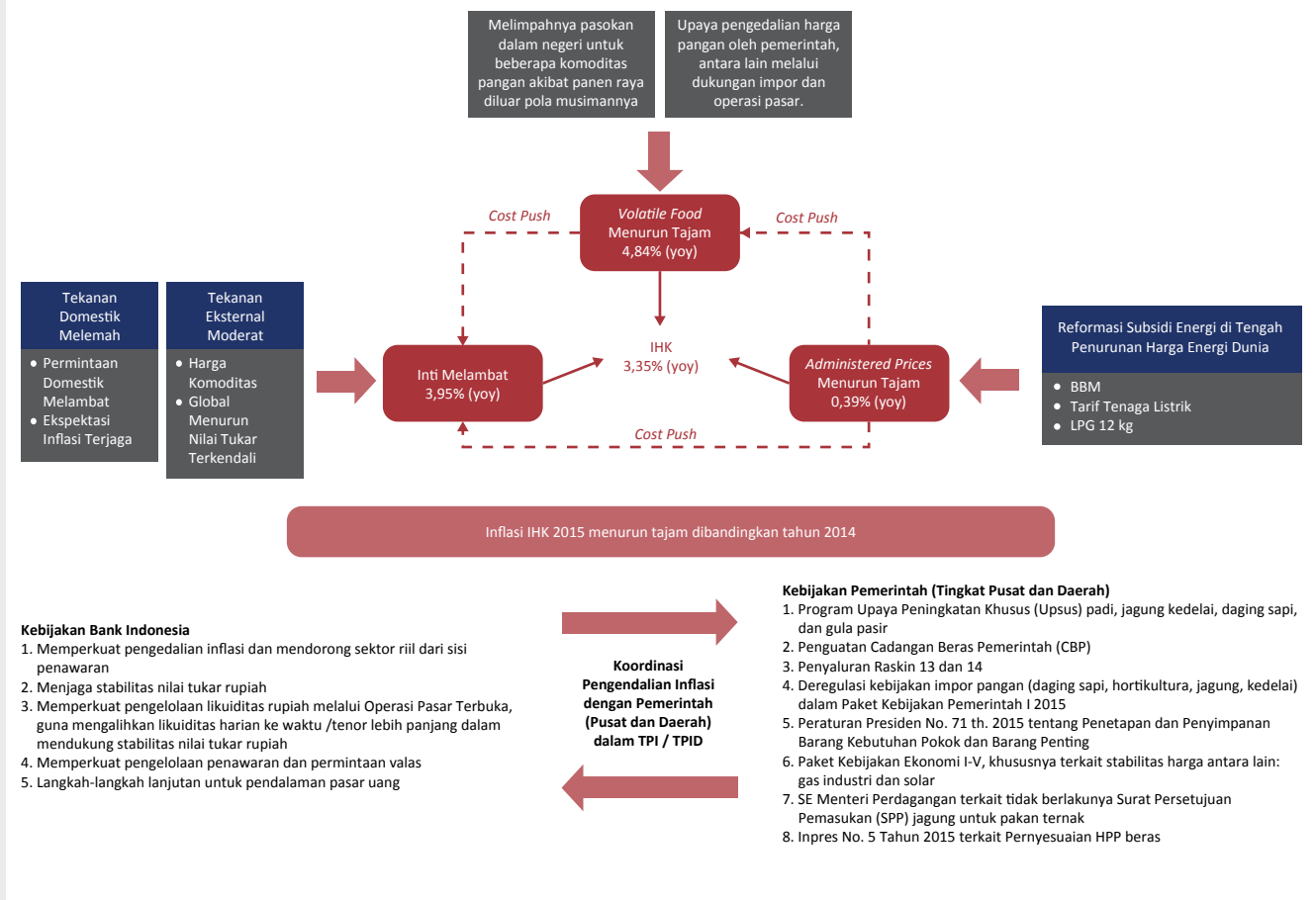


Diagram 1. Inflasi 2015 dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi



pada akhir tahun, ditopang oleh stabilnya nilai tukar, inflasi inti melambat. Perlambatan inflasi inti akhir tahun merupakan refleksi belum kuatnya tekanan permintaan dan terbatasnya tekanan *cost-push* yang antara lain terlihat dari rendahnya realisasi inflasi kelompok AP dan VF.

Dalam rangka mengendalikan inflasi, kebijakan moneter cenderung ketat diimplementasikan Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari kebijakan suku bunga BI Rate yang tetap sebesar 7,5% sejak akhir triwulan I 2015. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh berbagai upaya stabilisasi nilai tukar untuk menjaga ekspektasi inflasi. Upaya tersebut mampu menjaga ekspektasi inflasi pelaku usaha sehingga tidak terlalu bergejolak. Ekspektasi inflasi tetap terkendali di tengah depresiasi rupiah yang lebih besar dibandingkan tahun lalu. Terjaganya ekspektasi inflasi tercermin dari transmisi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap inflasi (*exchange rate pass-through*) yang terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha memandang pelemahan nilai tukar yang terjadi bersifat temporer. Selain itu, terbatasnya *exchange rate pass-through* juga dipengaruhi oleh pelemahan permintaan

domestik. Dalam situasi ini, para pelaku usaha cenderung tidak mentransmisikan sepenuhnya pelemahan nilai tukar yang terjadi dengan mengurangi margin usahanya, agar penurunan permintaan lebih lanjut dapat dihindari.

Minimalnya tekanan inflasi AP disebabkan oleh implementasi kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sesuai harga keekonomiannya di tengah tren penurunan harga energi dunia.¹ Realisasi inflasi AP tercatat 0,39% (yoy), menurun tajam dibandingkan tahun lalu (17,57%, yoy) dan lebih rendah dibandingkan historis lima tahun terakhir (9,01%, yoy).

1 Pemerintah mengimplementasikan kebijakan reformasi subsidi energi sejak akhir tahun 2014, harga BBM dan TTL akan disesuaikan berdasarkan harga energi pembentuknya. Berdasarkan Permen ESDM No.4 Tahun 2015 yang diperbarui melalui Permen ESDM No.39 Tahun 2015, harga BBM antara lain didasarkan pada pergerakan harga minyak olahan dunia, nilai tukar rupiah, serta biaya distribusi. Pemerintah tidak memberikan subsidi terhadap Premium RON 88, sementara Solar masih diberikan subsidi tetap sebesar Rp1.000/liter. Berdasarkan Permen ESDM No.31 Tahun 2014, tarif listrik didasarkan pada pergerakan harga minyak ICP, nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi bulanan.

Penurunan harga minyak dunia mendorong Pemerintah mengoreksi harga BBM yang cukup dalam di awal tahun 2015 sehingga mendorong rendahnya tekanan pada kelompok AP.² Meskipun harga BBM sempat mengalami kenaikan pada bulan Maret, kebijakan Pemerintah dalam mengelola tarif angkutan mampu menekan gejala dampak lanjutan kenaikan harga BBM.³ Implementasi penyesuaian TTL sesuai harga keekonomiannya turut menurunkan inflasi tarif listrik tahun 2015 seiring rendahnya harga minyak ICP dan terjaganya tingkat inflasi bulanan.⁴ Terus berlanjutnya reformasi subsidi energi pada saat harga energi dunia rendah dan menurun merupakan elemen penting yang mendorong minimalnya tekanan inflasi kelompok AP.

Kecukupan pasokan dan turunnya harga pangan global mendorong rendahnya inflasi VF. Kelompok VF tercatat mengalami inflasi sebesar 4,84% (yoy), menurun tajam dibandingkan tahun lalu (10,88%, yoy), dan historisnya lima tahun terakhir (9,90%, yoy). Melambatnya inflasi VF terutama didorong oleh deflasi aneka cabai dan bawang merah yang cukup besar tahun ini, serta penurunan harga komoditas pangan global, terutama CPO, yang berdampak pada harga minyak goreng. Disamping itu, terbatasnya inflasi beras di tengah gangguan cuaca *El Nino* dengan intensitas kuat juga turut menahan inflasi VF. Rendahnya inflasi VF juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait bahan pangan strategis. Pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam rangka mendukung kecukupan pasokan pangan domestik dan menempuh berbagai kebijakan lain. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui, pertama, Program Upaya Peningkatan Khusus (Upsus)

2 Pada 1 Januari 2015, Pemerintah menurunkan harga Premium RON 88 dan Solar sebesar Rp900/liter dan Rp250/liter. Selanjutnya, Pemerintah kembali menurunkan harga Premium RON 88 dan Solar dan Solar pada 14 Januari 2015 sebesar Rp1.000/liter dan Rp850/liter.

3 Pada 1 Maret 2015, Pemerintah menaikkan harga Premium RON 88 sebesar Rp500/liter. Selanjutnya Pemerintah kembali menaikkan harga Premium RON 88 dan Solar masing-masing sebesar Rp500/liter pada 28 Maret 2015. Dalam rangka menjaga dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap tarif angkutan, Pemerintah mengesahkan Permenhub No.31 Tahun 2015 pada 10 Februari 2015; yang antara lain menyebutkan bahwa penyesuaian tarif angkutan diperbolehkan ketika penyesuaian harga energi menyebabkan perubahan biaya pokok angkutan sebesar 20%.

4 Berdasarkan Permen ESDM No.31 Tahun 2014, TTL disesuaikan berdasarkan pergerakan harga minyak *Indonesia Crude Price* (ICP), nilai tukar, dan tingkat inflasi IHK bulanan. Ada pun golongan pelanggan listrik yang mengikuti formula tersebut adalah pelanggan rumah tangga (1.300VA, 2.200VA, 3.500VA-6.600VA), bisnis (6.600VA-200kVA, >200kVA), industri (>200kVA dan >30.000kVA), kantor pemerintah (6.600VA-200kVA, >200kVA), penerangan jalan, dan layanan khusus. Khusus untuk golongan 1.300VA dan 2.200VA, implementasi *tariff adjustment* mundur dari rencana pada April 2015 menjadi Desember 2015.

untuk komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula pasir. Kedua, penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan kepastian impor 1,5 juta ton sampai dengan Maret 2016. Ketiga, untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai upaya pengendalian harga ditempuh melalui: (i) Gerakan Tanam Cabai di Musim Kemarau (GTCK) dengan bantuan sarana produksi dan irigasi hemat air, (ii) pengaturan pola produksi di daerah sentra produksi, (iii) pengembangan kawasan bawang merah dan cabai di daerah sentra dan di luar sentra produksi serta pengembangan klaster cabai terintegrasi bekerja sama dengan Bank Indonesia di delapan provinsi (Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara), serta (iv) deregulasi kebijakan impor pangan.⁵ Pemerintah telah mulai menjalankan program gerai maritim dan tol laut pada tahun 2015 untuk mengatasi hambatan distribusi.⁶

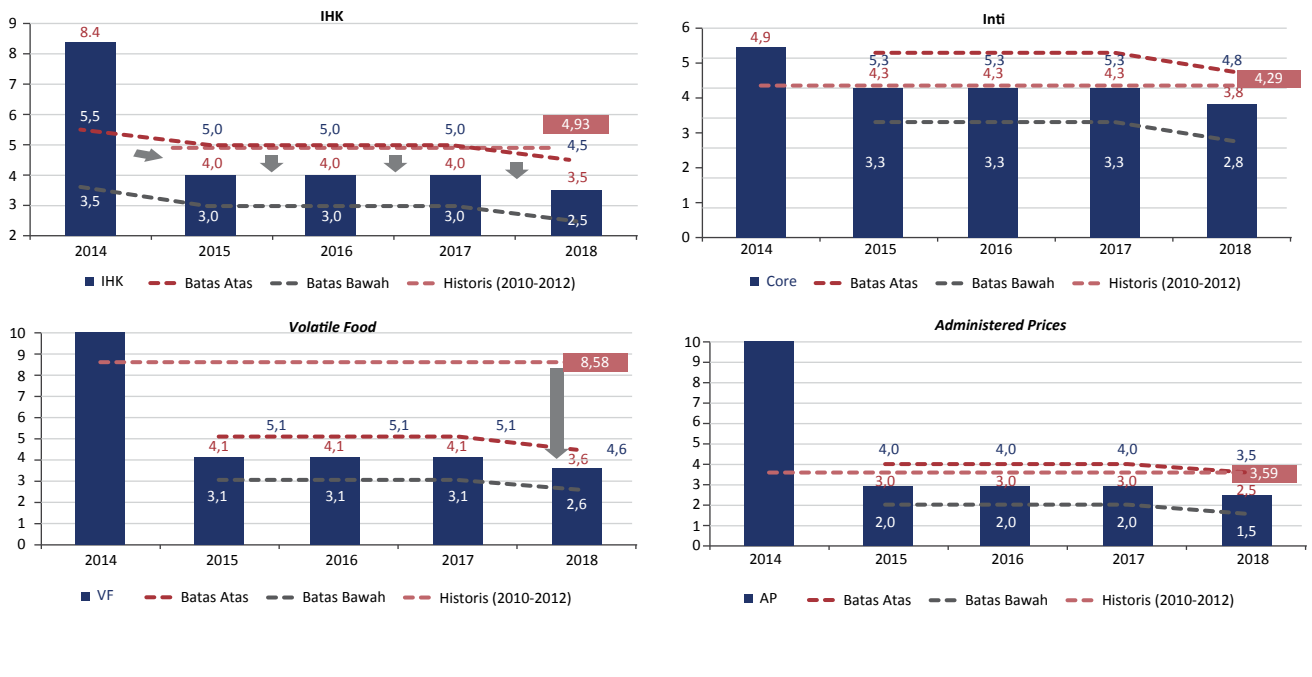
Pencapaian sasaran inflasi tahun 2015 juga didukung oleh semakin solidnya koordinasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah melalui TPI dan TPID. Pelaksanaan tugas TPI dan Pokjanas TPID tahun 2015 difokuskan pada penguatan operasionalisasi sekretariat dan koordinasi melalui pelaksanaan Rakornas dan Rakorpusda, serta penguatan peran TPI dan TPID dalam stabilisasi harga. Di samping itu, TPI dan Pokjanas TPID juga telah menyampaikan berbagai rekomendasi kepada Pemerintah, termasuk penyusunan dan penyampaian *roadmap* pengendalian inflasi 2015-2018 dan penguatan informasi data harga pangan. *Roadmap* Pengendalian Inflasi ditujukan sebagai acuan pelaksanaan tugas TPI dan TPID. *Roadmap* tersebut telah melalui pembahasan di tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga anggota TPI dan Pokjanas TPID pada Desember 2015 serta telah disampaikan ke seluruh pemimpin daerah. Selanjutnya, untuk dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas TPI dan TPID, program kerja dalam *roadmap* tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik pusat maupun daerah.

Ke depan, *Roadmap* Pengendalian Inflasi ini diperlukan sebagai pedoman dalam program pengendalian inflasi

5 Deregulasi kebijakan impor diterapkan untuk komoditas daging sapi, hortikultura, jagung, dan kedelai.

6 Gerai Maritim merupakan program kerja sama Kemendag-Kemendag-Pelni-Aprindo untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, khususnya barang kebutuhan pokok. Program dilaksanakan melalui penyediaan transportasi pengiriman bahan kebutuhan pokok dan subsidi biaya angkut ke wilayah Indonesia Timur dimana barang-barang tersebut akan dijual melalui Pemda/ Perusahaan lokal yang ditunjuk dengan harga produsen.

Grafik 3. Path Inflasi



yang terstruktur dan terintegrasi agar upaya pencapaian target inflasi jangka menengah, 3,5%±1% pada 2018 dapat tercapai.⁷ Di tengah masih banyaknya permasalahan struktural inflasi yang mengemuka, perlu “extra effort” dari semua pihak agar sasaran inflasi ke depan dapat dicapai secara berkesinambungan. Secara historis (di luar periode kebijakan harga BBM), rata-rata inflasi IHK sebesar 4,9%, inflasi inti 4,3%, VF 8,6%, dan inflasi AP 3,6%. Agar sasaran inflasi jangka menengah dapat dicapai, masing-masing komponen penyumbang inflasi perlu dijaga agar bergerak dalam tren yang menurun (*disinflation path*) (Grafik 3). Di tahun 2018, inflasi inti harus diupayakan bergerak di sekitar 3,8%, inflasi VF 3,6%, dan inflasi AP 2,5%. Bank Indonesia maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerja lebih keras dan berkoordinasi lebih intens, mengingat waktu yang tersedia cukup singkat.

Roadmap Pengendalian Inflasi meliputi tingkat nasional dan daerah yang disusun berdasarkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik inflasi masing-masing. Masing-masing *roadmap*, baik nasional dan daerah, memuat identifikasi permasalahan yang disertai dengan solusi jangka pendek (2015-2016) dan jangka menengah (2017-2018). Di dalam *Roadmap* Pengendalian Inflasi nasional disampaikan

Kementerian atau Lembaga yang mengampu masing-masing program atau kegiatan pengendalian inflasi yang telah ditetapkan serta peran daerah yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program pengendalian inflasi. Adapun di dalam *Roadmap* Pengendalian Inflasi daerah juga dicantumkan dukungan dari pemerintah pusat yang diperlukan untuk menunjang pencapaian pengendalian inflasi daerah, karena terdapat beberapa kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Roadmap pengendalian inflasi inti mencakup pengelolaan permintaan domestik, peningkatan kapasitas ekonomi, pengelolaan stabilitas nilai tukar rupiah dan pengelolaan ekspektasi inflasi. *Roadmap* pengendalian inflasi VF mencakup peningkatan produksi dan stok pangan, perbaikan struktur pasar dan perbaikan mekanisme penetapan harga. Adapun *roadmap* pengendalian inflasi AP mencakup implementasi reformasi kebijakan subsidi energi secara konsisten, diversifikasi konsumsi energi dan *demand management*. Selanjutnya, agar dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas TPI dan TPID, program kerja dalam *roadmap* tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik pusat maupun daerah.

⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018, sasaran inflasi berada pada angka 4%±1% (2016 dan 2017) dan 3,5%±1% (2018).



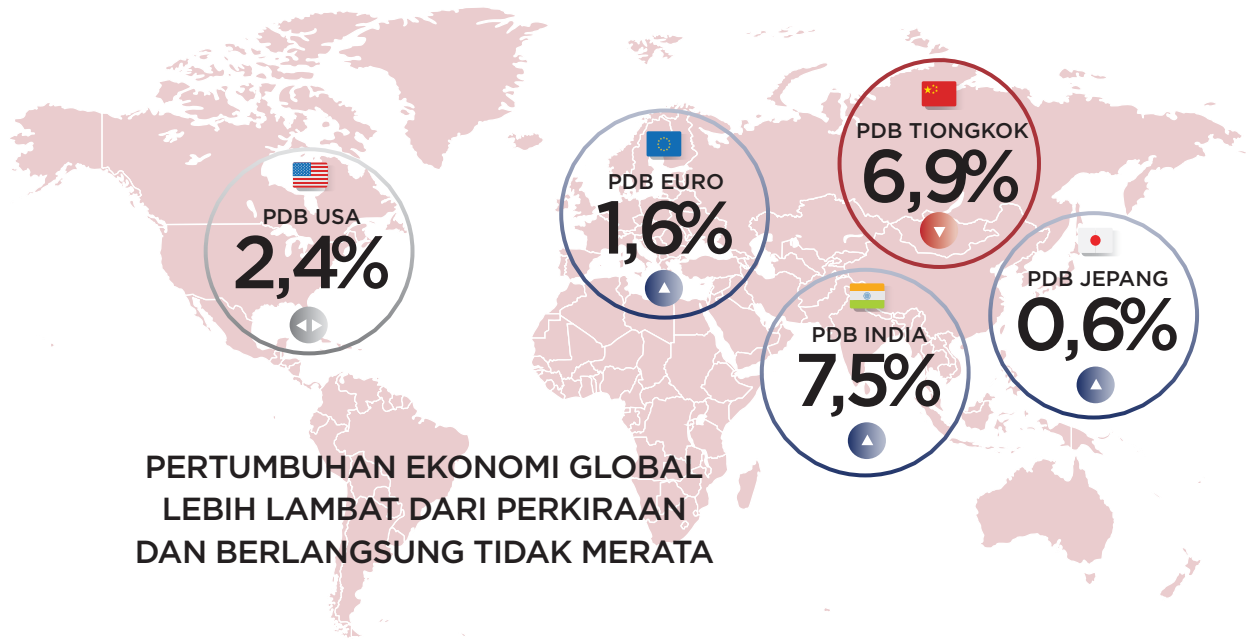
Keterangan gambar:

Seperti dua barong, perekonomian global pada tahun 2015 diwarnai oleh perubahan lanskap berupa pergerakan ekonomi negara berkembang yang masih melambat sedangkan ekonomi negara maju menunjukkan pemulihan yang terbatas. Di sisi lain, pasar keuangan global pada tahun 2015 diwarnai oleh meningkatnya volatilitas sebagai cermin masih tingginya ketidakpastian.



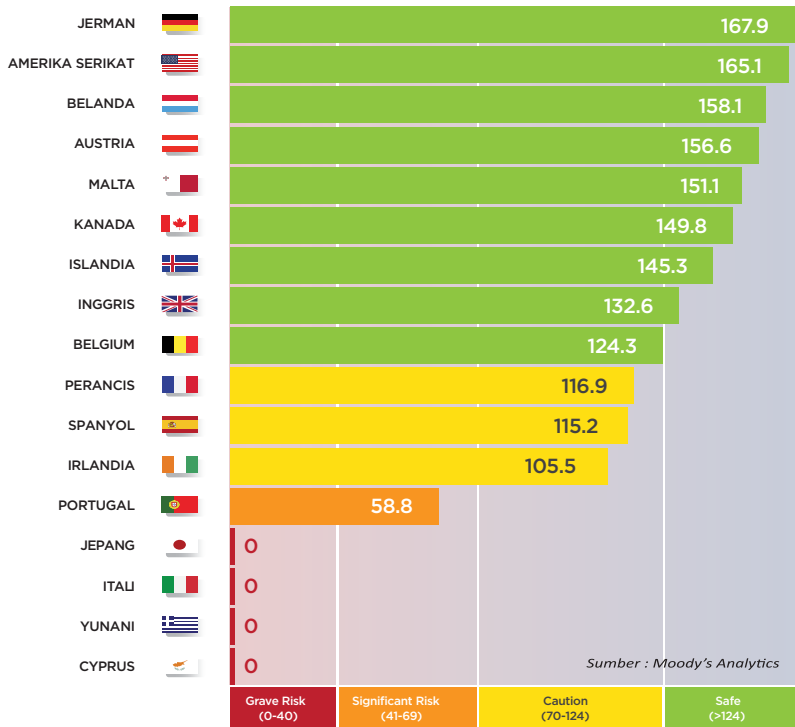
BAGIAN I

PEREKONOMIAN GLOBAL

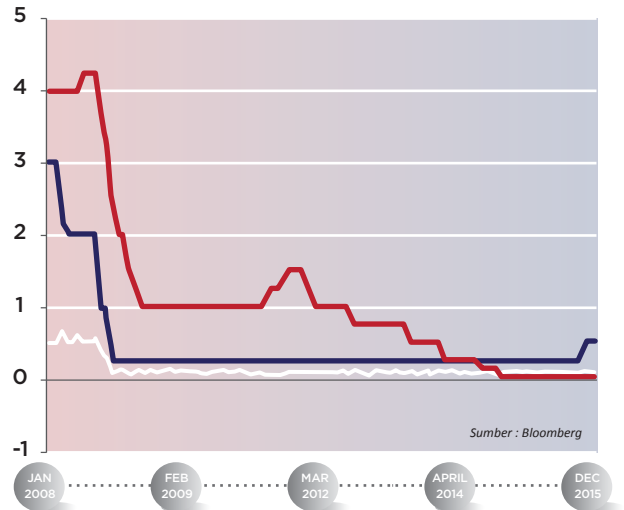


**PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
LEBIH LAMBAT DARI PERKIRAAN
DAN BERLANGSUNG TIDAK MERATA**

Fiscal Space Negara-negara Maju Terbatas



Divergensi Kebijakan Moneter di Negara Maju



— Fed Funds Target Rate
— BOJ O/N Call Rate
— ECB Refinance Rate

HARGA KOMODITAS INTERNASIONAL MASIH DALAM TREN MENURUN



BAGIAN I

PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemulihan perekonomian global pada 2015 berjalan lebih lambat dari perkiraan. Ekonomi dunia pada 2015 hanya tumbuh 3,1%, lebih rendah dari perkiraan di awal tahun sebesar 3,5% dan pertumbuhan 2014 sebesar 3,4%. Realisasi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju lebih rendah dari perkiraan semula, sehingga pertumbuhan ekonomi negara maju, secara keseluruhan, belum mampu menjadi motor pemulihan ekonomi global. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi belum optimal, karena pelonggaran kebijakan moneter (*quantitative easing*, QE) di negara maju belum sepenuhnya didukung oleh stimulus fiskal dan implementasi reformasi struktural. Di samping itu, kecepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda telah memicu terjadinya divergensi kebijakan moneter di antara negara maju. Bank Sentral AS telah mulai menormalisasi kebijakan moneternya, sementara European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BoJ) masih melanjutkan kebijakan moneter akomodatif.

Pemulihan perekonomian global pada 2015 juga diwarnai perubahan lanskap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang (*emerging markets*) melambat, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju menunjukkan tren pemulihan secara gradual. Meskipun tumbuh lebih rendah dari perkiraan awal, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju mengalami peningkatan dari 1,8% pada 2014 menjadi 1,9% pada 2015. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang turun dari 4,6% pada 2014 menjadi 4,0% pada 2015. Walaupun mengalami perlambatan yang cukup signifikan, kontribusi pertumbuhan negara berkembang masih dominan dan mencapai 58%. Sementara, pertumbuhan negara maju memberikan kontribusi sebesar 42% terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Perlambatan ekonomi global pada 2015 dipengaruhi oleh faktor siklikal maupun struktural. Faktor siklikal terutama bersumber dari perlambatan ekonomi Tiongkok, berlanjutnya penurunan harga komoditas, dan ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter AS. Sementara itu, faktor struktural terutama terjadi di negara maju, yang bersumber dari menurunnya *potential output* akibat faktor demografi (*ageing population*) dan penurunan tingkat

investasi pascakrisis keuangan global. Penurunan *potential output* dan respons kebijakan yang ditempuh negara maju memberikan dampak *spillover* yang cukup signifikan pada negara berkembang, baik melalui jalur perdagangan maupun keuangan.

Ekonomi Tiongkok masih mengalami perlambatan, sejalan dengan kebijakan *rebalancing* ekonomi yang belum berhasil mendorong konsumsi. Ekonomi Tiongkok pada 2015 hanya tumbuh sebesar 6,9%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2014 sebesar 7,3%. Perlambatan ini didorong oleh kebijakan *rebalancing* ekonomi untuk beralih dari *investment-driven* menjadi *consumption-driven* agar pertumbuhan ekonominya lebih berkualitas dan berkelanjutan. Namun, akselerasi peningkatan konsumsi masih relatif terbatas sehingga belum dapat mengimbangi perlambatan investasi yang lebih besar. Kondisi ini berdampak pada penurunan permintaan impor Tiongkok, yang memberikan dampak rambatan kepada negara berkembang melalui jalur perdagangan.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, khususnya Tiongkok, mendorong berlanjutnya penurunan harga komoditas pada 2015. Negara-negara pengekspor komoditas, termasuk Indonesia, terkena dampak ganda yang bersumber dari penurunan volume permintaan maupun harga komoditas sehingga menekan kinerja ekspor. Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI) pada 2015 terkontraksi sebesar 14,9%, lebih besar dari kontraksi indeks harga 2014 sebesar 4,2%. Penurunan harga komoditas, sebagai dampak melambatnya ekonomi Tiongkok, diperberat oleh menurunnya harga minyak dunia, yang memiliki hubungan cukup kuat dengan harga komoditas tertentu. Pelemahan harga minyak dunia dipengaruhi oleh tingginya suplai, baik dari negara anggota OPEC maupun non-OPEC, di tengah menurunnya permintaan akibat perlambatan ekonomi global. Berlimpahnya suplai minyak dunia ditopang oleh kebijakan negara-negara produsen minyak yang tetap mempertahankan produksinya, walaupun harga minyak turun, guna menjaga pangsa pasarnya di pasar minyak dunia.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya harga komoditas berdampak pada penurunan laju inflasi global. Laju inflasi global pada 2015 tercatat sebesar 3,3%, turun

dari tahun sebelumnya sebesar 3,5%. Penurunan tekanan inflasi terutama terjadi pada negara maju. Inflasi negara maju pada 2015 tercatat hanya sebesar 0,4%, jauh di bawah laju inflasi 2014 sebesar 1,4%. Laju inflasi di beberapa negara maju utama, seperti AS, Eropa, dan Jepang, berada jauh di bawah target yang ditetapkan. Sebaliknya, laju inflasi negara-negara berkembang pada 2015 justru meningkat menjadi 5,6% dari tahun sebelumnya sebesar 5,1%. Peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak *pass-through* pelemahan nilai tukar.

Di sektor keuangan, pasar keuangan global pada 2015 diwarnai oleh meningkatnya volatilitas sebagai cerminan masih tingginya ketidakpastian. Meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global pada 2015 terutama dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni: (i) sentimen terhadap normalisasi kebijakan moneter AS yang memengaruhi pasar keuangan global sejak awal 2015; (ii) sentimen dari kekhawatiran penyelesaian krisis Yunani pada triwulan I 2015; dan (iii) devaluasi yuan yang dilakukan oleh otoritas moneter Tiongkok pada Agustus 2015. Ketidakpastian kenaikan suku bunga AS (*Federal Funds Rate*, FFR) mendorong perilaku investor global cenderung *risk-off* sehingga mengakibatkan penurunan *inflows* ke pasar keuangan negara berkembang yang selanjutnya menekan nilai tukar.

Sebagai respons atas dinamika ekonomi dan keuangan global, beberapa negara berkembang menempuh bauran kebijakan yang memadukan kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural. Belajar dari pengalaman negara maju yang terlalu mengandalkan kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, beberapa negara berkembang memilih menerapkan bauran kebijakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang melambat. Bauran kebijakan tersebut memadukan pelonggaran kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. Tiongkok, India, dan Indonesia merupakan contoh negara berkembang yang secara konsisten menerapkan bauran kebijakan pengelolaan makroekonomi yang sehat dan menyertakan agenda reformasi struktural. Reformasi struktural sangat dibutuhkan oleh negara berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sehingga perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Penguatan kerja sama internasional juga dilakukan untuk mengantisipasi tantangan ekonomi global di sepanjang tahun 2015. Fora G20 menitikberatkan pada upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Sementara itu, IMF mendorong negara anggotanya untuk memperkuat sisi permintaan, melalui bauran kebijakan makroekonomi dan mempercepat implementasi reformasi struktural. Sejalan dengan IMF, IDB juga meningkatkan perannya dalam membantu pembiayaan proyek infrastruktur negara anggota, diantaranya melalui pembentukan *World Islamic Investment Bank* (WIIB). Kerja sama internasional juga difokuskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap resilien tatkala menghadapi guncangan, seperti agenda reformasi keuangan berstandar internasional. Sementara untuk menjaga resiliensi di kawasan, negara-negara ASEAN+3 melakukan penguatan kerja sama *Regional Financial Arrangement* (RFA) melalui implementasi *the Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), serta meningkatkan peran ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO).

Ke depan, kondisi ekonomi global akan lebih kondusif dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Dimulainya episode normalisasi kebijakan moneter AS akan mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan global. Di sisi lain, pemulihan pertumbuhan ekonomi AS yang belum cukup solid menyiratkan kenaikan FFR yang bersifat gradual. Kondisi ini akan menurunkan derajat divergensi kebijakan moneter global sehingga mengurangi tekanan pada pasar keuangan *emerging markets*. Perbaikan ekonomi negara maju yang terus berlangsung dan mulai terlihatnya dampak implementasi bauran kebijakan, khususnya reformasi struktural, di negara berkembang akan mendorong pertumbuhan ekonomi global lebih tinggi pada tahun 2016 hingga mencapai 3,4%. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi global tersebut diperkirakan belum mampu mendorong perbaikan harga komoditas, sehingga masih akan sedikit terkoreksi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi negara pengekspor komoditas, termasuk Indonesia, untuk secara konsisten mengimplementasikan reformasi struktural guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar komoditas, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dan resilien terhadap gejolak global.



Keterangan gambar:

Perkembangan perekonomian global pada tahun 2015 berjalan lebih lambat dari perkiraan semula. Perbedaan fase *recovery* perekonomian mendorong terjadinya divergensi kebijakan moneter: AS menaikkan suku bunga sementara Eropa dan Jepang justru menambah intensitas pelonggaran.



Bab 1

Dinamika Perekonomian Global

Perbaikan ekonomi global pada tahun 2015 tidak sebaik prakiraan semula. Dinamika perekonomian global diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan tidak merata serta ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara maju, terutama AS, di tengah pertumbuhan ekonomi Eropa dan Jepang yang masih lemah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang cenderung melambat, terutama didorong oleh tren pelambatan ekonomi Tiongkok. Sejalan dengan melemahnya ekonomi global, harga komoditas dunia, termasuk minyak, juga mengalami penurunan yang cukup dalam.

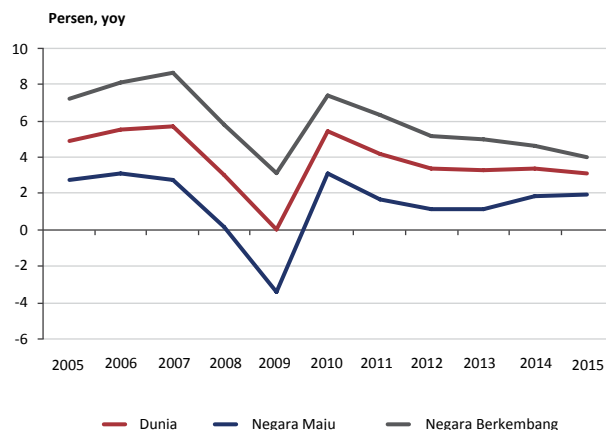
Pemulihan perekonomian global pada 2015 berjalan lebih lambat dari prakiraan sebelumnya. Proses *rebalancing* setelah episode *global financial crisis* (GFC) terus berlangsung diinisiasi oleh negara maju dan mulai berdampak pada negara *emerging markets* (EM). Pascakrisis, *output gap* yang negatif, baik secara global maupun individual, menyebabkan inflasi yang rendah di berbagai negara, terutama di negara maju. Fenomena ini memberikan ruang bagi pelanggaran kebijakan moneter di negara maju untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan masih belum tercapai akibat lambatnya implementasi reformasi struktural dan terbatasnya dukungan kebijakan fiskal di banyak negara maju.

Perbedaan fase pemulihan ekonomi di beberapa negara maju utama memicu terjadinya divergensi kebijakan moneter global.¹ Di satu sisi, Amerika Serikat (AS) mulai melakukan normalisasi kebijakannya pada Desember 2015, yang rencana implementasinya telah dikomunikasikan sejak akhir tahun 2014. Di sisi lain, Eropa dan Jepang justru bersiap untuk menambah kebijakan pelonggarannya. Ketidakpastian kenaikan suku bunga kebijakan AS dan divergensi kebijakan moneter global menyebabkan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global yang memicu perilaku *risk-off* para investor. Kondisi ini, dibarengi dengan proses *deleveraging* negara maju dan pergeseran komposisi likuiditas global menyusul normalisasi kebijakan AS, telah memicu penurunan *inflows* ke negara EM dan bahkan mulai memasuki negatif *netflows*. Selain itu, pelemahan harga komoditas global, yang utamanya dipicu oleh melemahnya permintaan dari Tiongkok, juga memberikan tekanan pada sisi eksternal negara-negara EM, terutama yang bergantung pada ekspor komoditas.

Dengan perkembangan tersebut, ekonomi dunia pada tahun 2015 tumbuh sebesar 3,1%, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 3,4% (Grafik 1.1). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan Bank Indonesia pada awal tahun dan juga International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015 akan mencapai 3,5%, meningkat dibandingkan tahun 2014. Pelemahan ekonomi global ini dipengaruhi baik oleh faktor siklikal maupun faktor struktural. Faktor siklikal yang berpengaruh utamanya bersumber dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang pada gilirannya juga berdampak pada berlanjutnya penurunan harga komoditas. Di samping itu, *spillover* kebijakan negara

1 Seperti yang juga diungkapkan oleh IMF dan European Central Bank (ECB).

Grafik 1.1. Lanskap Ekonomi Global

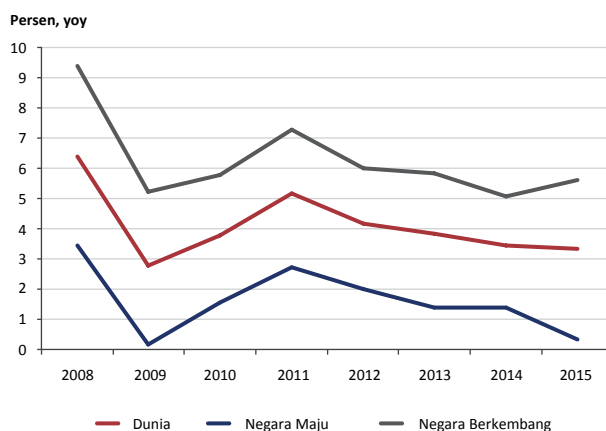


Sumber: WEO IMF, diolah

maju juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global. Terkait faktor struktural, menurunnya *potential output* akibat faktor demografi *aging population*, terutama di negara maju, dan rendahnya tingkat investasi setelah *global financial crisis* merupakan faktor utama yang mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Di sisi inflasi, inflasi global menurun didorong oleh pertumbuhan ekonomi global yang masih lambat, pelemahan harga minyak dunia, dan harga komoditas global yang terus turun (Grafik 1.2). Tingkat inflasi global pada 2015 mencapai 3,3%, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 3,5%.

Ekonomi global yang melemah dibandingkan tahun 2014 menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia selama tahun 2015. Selain itu, struktur perdagangan

Grafik 1.2. Lanskap Inflasi Global



Sumber: WEO IMF, diolah

dunia yang mengalami beberapa perubahan yang semakin signifikan seiring dengan berjalannya waktu juga berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini ditandai dengan menurunnya elastisitas perdagangan terhadap perekonomian yang antara lain disebabkan oleh menurunnya laju *global supply chains*, terutama pada proses rekonsentrasi domestik di Tiongkok dan AS.^{2,3} Perkembangan tersebut mengamplifikasi dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja sektor eksternal Indonesia. Di samping itu, tantangan juga bersumber pada menurunnya arus dana masuk ke Indonesia selama 2015 sejalan dengan pergeseran komposisi likuiditas global dan proses *deleveraging* negara maju.

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI NEGARA MAJU

Perkembangan ekonomi negara maju ditandai oleh pertumbuhan yang moderat dan tingkat inflasi yang masih sangat rendah. Ekonomi negara maju tumbuh sebesar 1,9% pada tahun 2015, meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,8%. Sementara itu, tingkat inflasi negara maju hanya mencapai 0,4% pada 2015, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahun 2014 sebesar 1,4%. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak dan harga komoditas global. Secara umum, tingkat inflasi beberapa negara maju utama seperti AS, Eropa, dan Jepang masih jauh berada di bawah targetnya. Perkembangan harga secara umum di Eropa dan Jepang bahkan sempat mengalami deflasi. Menurunnya tekanan inflasi di negara maju ini berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara EM seperti Rusia, Brazil, dan negara Amerika Latin lainnya. Inflasi tahun 2015 di berbagai negara tersebut justru meningkat antara lain dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar di negara terkait.

Sebagai respons dari rendahnya tingkat inflasi dan pemulihan ekonomi negara maju yang belum optimal, negara maju mengambil beberapa kebijakan pelonggaran moneter untuk mendorong sisi permintaan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemulihan ekonomi negara maju terus berlangsung, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi AS, meski lebih rendah dibandingkan perkiraan semula. Pemulihan ekonomi Eropa yang berlangsung secara gradual dan perbaikan ekonomi Jepang, meski berjalan lambat, juga berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Namun dalam perkembangannya, pelonggaran moneter yang diandalkan tidak dibarengi dengan stimulus fiskal yang memadai dan percepatan implementasi reformasi struktural. Akibatnya, efektivitas kebijakan pelonggaran moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Meski tumbuh membaik dibandingkan tahun 2014, kontribusi ekonomi negara maju (42%) terhadap pertumbuhan ekonomi global masih lebih rendah dibandingkan kontribusi ekonomi negara EM (58%) (Tabel 1.1).

Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2015 lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Ekonomi AS tumbuh sebesar 2,4%, sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014. Realisasi pertumbuhan ekonomi AS tahun 2015 ini lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya sekitar 3,6%. Lebih rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2015 antara lain dipengaruhi oleh terjadinya cuaca dingin ekstrim yang dibarengi dengan aksi mogok kerja di Pelabuhan West Coast, AS pada triwulan I 2015. Hal ini menyebabkan menurunnya belanja masyarakat selama triwulan I 2015 yang pada gilirannya menimbulkan penumpukan persediaan pada triwulan II dan III 2015. Penumpukan persediaan tersebut kemudian berdampak pada penurunan output produksi (Grafik 1.3). Di samping itu, rendahnya pertumbuhan ekonomi AS juga didorong oleh penurunan kinerja sektor manufaktur AS yang mengalami tekanan akibat kontraksi permintaan ekspor dari eksternal sejalan dengan pelemahan ekonomi global dan tren penguatan dolar AS (Grafik 1.4).

Tabel 1.1. Tabel Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global

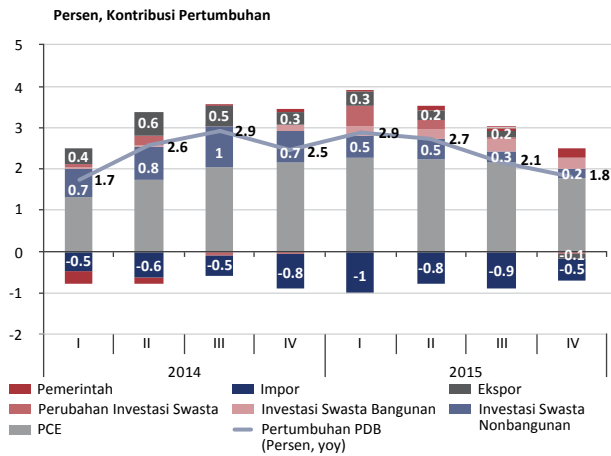
PDB (%yoy)	2014		2015*	
	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
Dunia	3,4	3,1	3,1	100
Negara Maju	1,8	1,9	1,9	42
Jepang	-0,03	0,6	0,6	4
Amerika Serikat	2,4	2,4	2,4	16
Kawasan Eropa	0,9	1,6	1,6	11
Perancis	0,2	1,4	1,4	2
Jerman	1,6	1,3	1,3	3
Italia	-0,4	1,0	1,0	2
Spanyol	1,4	3,5	3,5	1
Negara Berkembang	4,6	4,0	4,0	58
Tiongkok	7,3	6,9	6,9	17
India	7,3	7,5	7,5	7

Sumber: update WEO IMF Jan-16, Bloomberg
*angka sementara

2 Rantai produksi global, perdagangan barang mentah atau barang setengah jadi antarnegara untuk memproduksi barang jadi.

3 Berbagai studi dari beberapa lembaga seperti IMF, World Bank, ECB, dan OECD menyatakan hal yang sama.

Grafik 1.3. Dekomposisi Pertumbuhan AS



Sumber: BEA, diolah

Meskipun masih cukup baik, dampak perbaikan ekonomi AS terhadap perekonomian global relatif minimal mengingat sumber pertumbuhan ekonomi AS terutama disumbang sektor *non-tradeable*. Berdasarkan data tahun 2013-2015, sekitar 76% pertumbuhan ekonomi AS disumbang oleh sektor *non-tradable*, terutama sektor *Professional and Business Services* dan sektor *Real Estate*. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan AS diperkirakan tidak memberi dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara lain.

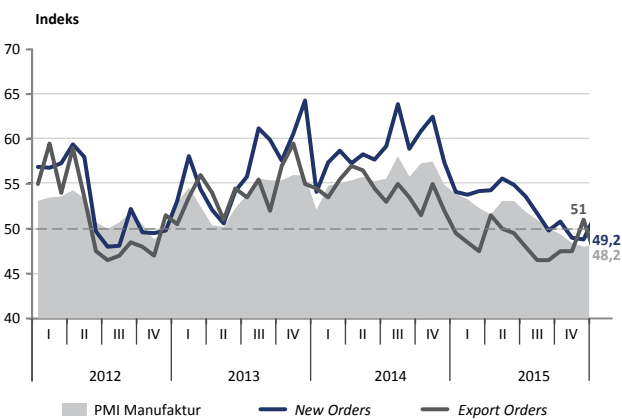
Perbaikan ekonomi AS ini terutama didukung oleh sektor konsumsi. Belanja masyarakat berada dalam tren meningkat meskipun sempat melambat pada triwulan I 2015. Peningkatan konsumsi masyarakat yang cukup solid ini sejalan dengan penurunan harga BBM di AS yang memberikan ruang tambahan daya beli bagi masyarakat.

Di samping itu, sektor tenaga kerja yang terus membaik selama tahun 2015 juga turut mendukung peningkatan konsumsi masyarakat. Harga BBM yang rendah dan kondisi tenaga kerja yang semakin kondusif turut mendukung perbaikan tingkat keyakinan konsumen, yang pada gilirannya berdampak pada konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.

Sektor tenaga kerja AS selama tahun 2015 membaik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Perbaikan sektor tenaga kerja AS ini tercermin pada tren penurunan tingkat pengangguran (Grafik 1.5). Rasio *Job openings/Unemployed*, sebagai cerminan permintaan di sektor tenaga kerja, berada dalam tren meningkat dan mencapai level sebelum krisis. Perbaikan terjadi pada hampir semua sektor industri. Hal ini terlihat baik pada pola siklikal maupun tren jangka panjangnya. Di samping itu, indikator *nonfarm payrolls* dan pertumbuhan gaji juga mengalami perbaikan, terutama dari sektor jasa. Jumlah pegawai *part-time for economic reasons* yang mencerminkan suplai tenaga kerja juga terus menurun.

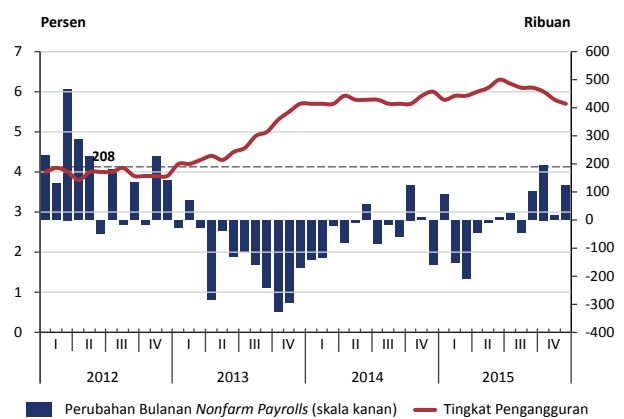
Sektor perumahan AS turut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi AS pada tahun 2015. Sektor perumahan AS yang terus membaik tercermin pada pertumbuhan penjualan rumah yang meningkat sejalan dengan tren suku bunga KPR yang rendah. Sejalan dengan hal tersebut, indeks sektor perumahan AS juga terus meningkat (Grafik 1.6). Selain itu, indikasi adanya perilaku *front loading* pembelian properti sebelum kenaikan suku bunga The Fed juga turut mendorong penjualan rumah. Perkembangan sektor perumahan ke depan yang cukup solid juga ditopang oleh *Building Permits* dan *Housing Starts*, sebagai indikator dini sektor perumahan AS, yang juga meningkat.

Grafik 1.4. Sektor Manufaktur AS



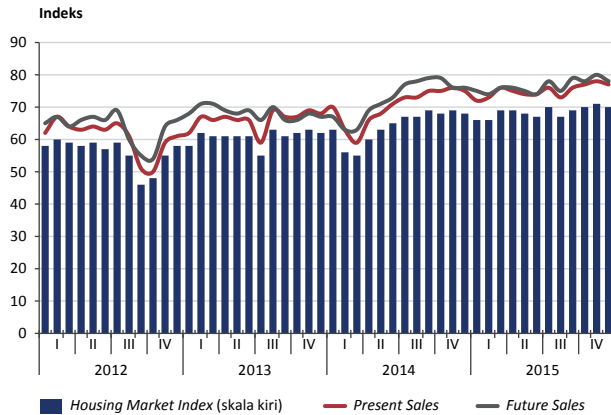
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.5. Sektor Tenaga Kerja AS



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.6. Sektor Perumahan AS

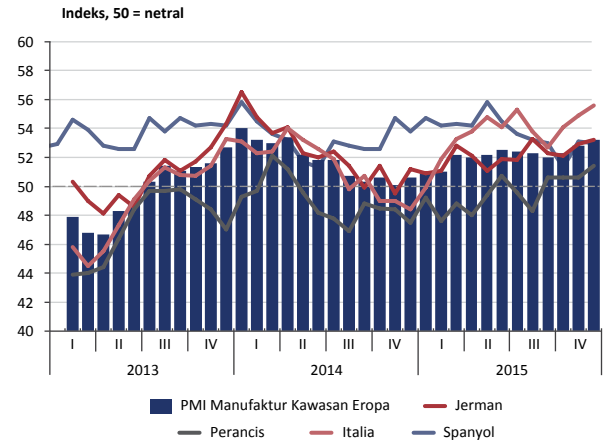


Sumber: Bloomberg, diolah

Sementara itu, ekonomi Eropa tumbuh 1,6% pada tahun 2015, membaik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang tumbuh 0,9% (Grafik 1.7). Pemulihan ekonomi Eropa terutama ditopang oleh peningkatan permintaan domestik. Konsumsi Eropa yang mencapai 75% dari PDB cenderung meningkat tercermin pada tren peningkatan penjualan ritel dan registrasi mobil baru. Selain itu, perbaikan konsumsi juga didukung oleh perbaikan sektor tenaga kerja yang tercermin pada tingkat pengangguran di negara-negara Eropa yang berada dalam tren menurun meski masih gradual.

Aktivitas manufaktur di Eropa terus ekspansif dan terjadi secara merata di seluruh negara utama (Grafik 1.8). Ekspansi manufaktur di Eropa terutama didorong oleh meningkatnya permintaan domestik di tengah perlambatan pertumbuhan ekspor. Tren perbaikan

Grafik 1.8. Sektor Manufaktur Eropa

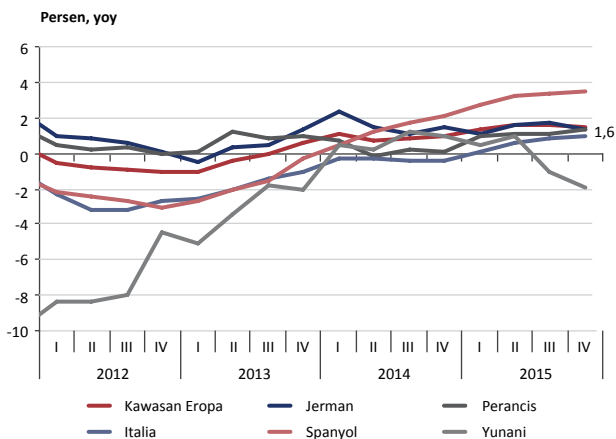


Sumber: Bloomberg, diolah

permintaan yang cukup solid mampu menopang kinerja sektor manufaktur Eropa sehingga *output* sektor manufaktur juga meningkat. Perkembangan ini pada gilirannya akan berdampak positif terhadap prospek PDB Eropa sejalan dengan historis hubungan positif antara PMI dan PDB Eropa. Namun demikian, pertumbuhan ekspor masih menurun sejalan dengan perkembangan ekonomi global yang masih melemah, terutama akibat penurunan permintaan dari Tiongkok dan negara EM lainnya.

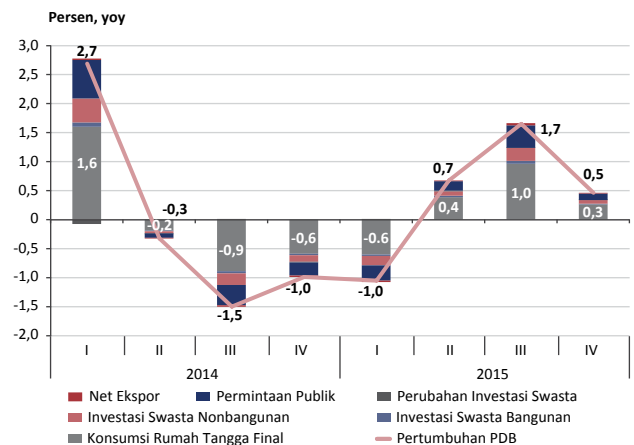
Ekonomi Jepang juga membaik dengan tumbuh 0,6% pada tahun 2015, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang masih berkontraksi 0,03%. Meski demikian, pemulihan ekonomi Jepang masih berjalan lambat dan relatif lemah. Hal ini terlihat dari perbaikan sektor konsumsi Jepang selama tahun 2015 juga masih terbatas (Grafik 1.9). Masih lemahnya konsumsi

Grafik 1.7. Pertumbuhan Ekonomi Eropa



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.9. Pertumbuhan Ekonomi Jepang



Sumber: Bloomberg, diolah

terutama setelah kenaikan pajak penjualan pada April 2014 antara lain dipengaruhi oleh perbaikan tenaga kerja yang terbatas, kondisi demografi masyarakat yang menua, serta kebijakan *austerity* Pemerintah Jepang. Dukungan sektor tenaga kerja Jepang untuk meningkatkan konsumsi juga belum optimal seiring dengan perbaikan tingkat pengangguran yang belum stabil dan pertumbuhan gaji yang masih sangat terbatas. Terbatasnya dukungan sektor tenaga kerja tersebut juga disebabkan oleh tidak diteruskannya keuntungan perusahaan yang meningkat kepada karyawan. Seiring dengan perkembangan tersebut, tingkat keyakinan konsumen melemah dan menahan konsumsi masyarakat.

Perbaikan sektor manufaktur mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang. Indikator manufaktur Jepang berada pada fase ekspansi sejak semester II 2015 (Grafik 1.10). Meskipun sektor manufaktur Jepang terkena dampak rambatan pelemahan ekonomi Tiongkok, hal ini dapat diimbangi oleh permintaan ekspor dari negara-negara maju yang mengalami perbaikan ekonomi. Di samping itu, permintaan domestik yang meningkat terkait pola musiman persiapan menjelang liburan akhir tahun turut mendukung kinerja sektor manufaktur Jepang pada akhir tahun 2015.

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI NEGARA BERKEMBANG

Berbeda dengan perkembangan negara maju, ekonomi negara EM masih berada dalam tren melambat dengan kecenderungan tingkat inflasi yang meningkat. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok dan dampak rambatannya baik dari jalur

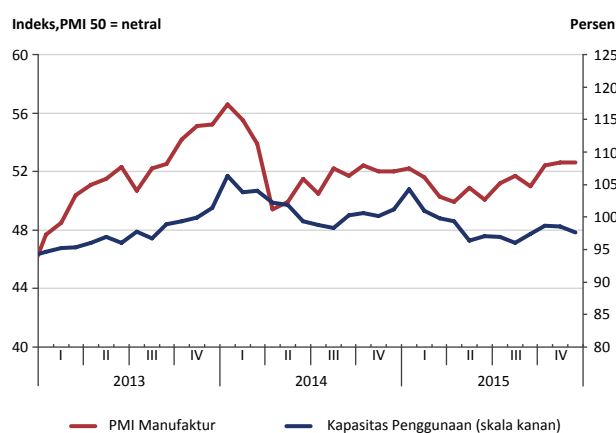
pelemahan harga komoditas, jalur perdagangan, maupun melalui *confidence channel* mengingat besarnya peran Tiongkok dalam perekonomian negara EM lainnya. Di sisi lain, aliran modal ke negara EM turun sejalan dengan perkembangan divergensi kebijakan moneter global yang menyebabkan tingginya volatilitas di pasar keuangan dan proses *deleveraging* negara maju. Kondisi ini berdampak pada melemahnya nilai tukar domestik dan meningkatnya risiko keuangan. Selain itu, permasalahan struktural dan kebijakan domestik juga memengaruhi perbedaan kinerja perekonomian di masing-masing negara.

Ekonomi negara EM tumbuh 4,0% pada 2015, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 4,6%. Meski melambat, ekonomi negara EM masih merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan besarnya sumbangan ekonomi negara EM terhadap perekonomian dunia yang mencapai 58% dan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi (4,0%) dibandingkan pertumbuhan negara maju (1,9%). Sementara itu, tingkat inflasi negara EM pada 2015 meningkat menjadi 5,6% dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2014 sebesar 5,1%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh negara-negara yang mengalami pelemahan nilai tukar secara signifikan seperti Rusia, Brazil, dan negara Amerika Latin. Di sisi lain, negara-negara seperti Tiongkok dan Indonesia mencatat penurunan inflasi pada tahun 2015 yang terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas termasuk harga minyak.

Pelemahan ekonomi Tiongkok sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi perekonomian global merupakan konsekuensi kebijakan *rebalancing* ekonomi oleh otoritas Tiongkok. Kebijakan *rebalancing* ekonomi tersebut ditempuh dalam rangka transformasi ekonomi Tiongkok dari *investment-driven* menjadi *consumption-driven*. Dalam konteks ini, transformasi ekonomi Tiongkok ditempuh demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang merupakan tujuan jangka panjang ekonomi Tiongkok.⁴ Dalam implementasinya, selama tahun 2015 perlambatan investasi terus terjadi, sementara akselerasi peningkatan konsumsi belum cukup untuk menopang pertumbuhan secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit Tiongkok sejak semester II 2015 berada dalam tren yang menurun. Di samping itu, sektor manufaktur Tiongkok terus mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh kinerja eksternal yang masih menurun. Penurunan sektor manufaktur terutama disebabkan oleh penurunan permintaan ekspor yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global di tengah

Grafik 1.10. Sektor Manufaktur Jepang



Sumber: Bloomberg, diolah

⁴ Tiongkok *Third Plenum*, 2013.

permintaan domestik yang belum kuat. Ekonomi Tiongkok juga menghadapi tekanan eksternal terkait besarnya arus modal asing keluar yang dipengaruhi oleh tren divergensi kebijakan moneter global. Kondisi tersebut direspons otoritas Tiongkok dengan menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan perlambatan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Tiongkok pada tahun 2015 tumbuh 6,9%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 7,3%.

Pada akhir tahun 2015, berbagai kebijakan yang diambil oleh otoritas Tiongkok mulai memberikan perkembangan positif. Pertumbuhan penjualan ritel berada dalam tren meningkat selama tahun 2015. Pada akhir tahun 2015 penjualan ritel tumbuh 11,1% (yoy) atau sebesar 17,2% dibandingkan triwulan sebelumnya. Angka pertumbuhan ini merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi di Tiongkok selama 4 tahun terakhir. Sementara itu, *disposable income* rumah tangga tumbuh 8,1%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Tiongkok di tengah pasar saham yang bergejolak. Di sisi lain, sektor properti pada akhir 2015 juga menunjukkan perbaikan pertumbuhan pada konstruksi properti yang baru dimulai, meskipun masih tumbuh negatif.

Pelemahan ekonomi Tiongkok secara umum dan kebijakan industrinya yang memberikan penekanan pada nilai tambah domestik berdampak pada tertekannya kinerja perdagangan negara EM mitra dagang Tiongkok. Strategi ini juga tercermin dan penurunan peran Tiongkok dalam *global value chains*. Sebagai konsekuensinya, defisit neraca transaksi berjalan Tiongkok meningkat sementara kinerja sektor eksternal negara EM mitra dagang terkait menurun. Negara ASEAN dan Korea Selatan merupakan contoh beberapa negara EM yang terkena dampak rambatan dari pelemahan ekonomi Tiongkok melalui jalur perdagangan.

Pertumbuhan negara EM penghasil komoditas melemah sejalan harga komoditas global yang terus berkontraksi pada tahun 2015. Kontraksi harga komoditas berdampak pada penurunan pendapatan negara EM pengekspor komoditas melalui peningkatan defisit neraca transaksi berjalan. Di samping itu, permasalahan struktural domestik dan politik di masing-masing negara tersebut semakin memperburuk kinerja ekonomi negara terkait. Brazil, Meksiko, Nigeria, Rusia, dan Arab Saudi merupakan contoh beberapa negara EM yang mengalami pelemahan ekonomi akibat pelemahan harga komoditas serta permasalahan struktural domestik dan politik.

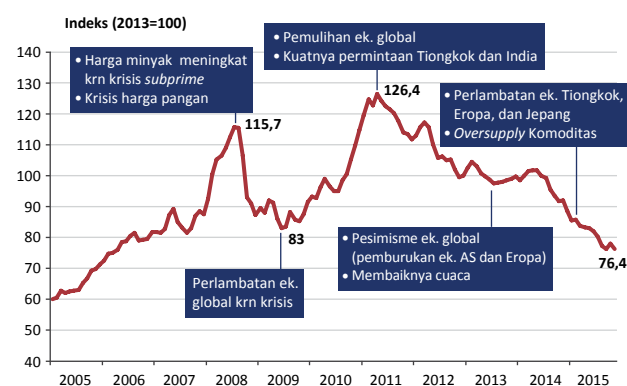
Perekonomian India, sebagai salah satu negara EM, tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi India tahun

2015 tercatat sebesar 7,5%, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2014. Namun demikian, tingginya angka pertumbuhan ekonomi ini juga disebabkan oleh revisi ke atas akibat terjadinya perubahan metode penghitungan PDB sejak awal tahun 2015.⁵ Permintaan domestik di India yang tetap kuat didukung oleh berjalannya proyek infrastruktur pemerintah. Meskipun ekonomi India juga mendapatkan tekanan dari penurunan permintaan ekspor dari Tiongkok, kinerja sektor manufaktur masih tetap ekspansif ditopang oleh permintaan domestik. Permintaan domestik yang tetap kuat tersebut tercermin pada tren membaiknya sentimen ekonomi, penjualan mobil, output produksi, dan membaiknya indeks infrastruktur.

1.3. HARGA KOMODITAS GLOBAL

Selama tahun 2015 harga komoditas global masih terus mengalami koreksi. Pertumbuhan tahunan indeks harga komoditas ekspor Indonesia (IHKEI) pada tahun 2015 berkontraksi 15%.⁶ Pertumbuhan IHKEI pada tahun 2015 semakin negatif bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2014 yang mengalami kontraksi 4,2% (Grafik 1.11). Kontraksi IHKEI yang semakin dalam dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global terutama perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai negara konsumen utama dari produk ekspor Indonesia. Hubungan erat antara harga komoditas dengan perekonomian Tiongkok ini tercermin

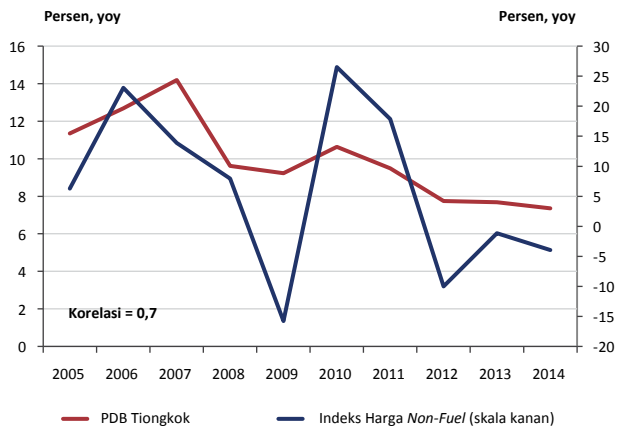
Grafik 1.11. Historis Perkembangan IHKEI



Sumber: Bloomberg, diolah

- 5 Dengan metode lama, PDB India pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing tercatat sebesar 4,7% dan 5,6%. Perubahan metode perhitungan PDB India terkait perubahan tahun dasar dan perubahan metode penghitungan dari *factor cost* menjadi *market price* yang mengacu pada *System of National Accounts* (SNA) 2008.
- 6 Indeks komposit dari harga komoditas ekspor utama Indonesia antara lain terdiri dari batubara, minyak kelapa sawit, karet, tembaga, nikel, timah, aluminium, dan kopi.

Grafik 1.12. PDB Tiongkok dan Harga Komoditas Non-Fuel



Sumber: CEIC, diolah

pada kuatnya korelasi antara indeks harga komoditas dunia *non-fuel* dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 0,7 (Grafik 1.12).

Penurunan harga komoditas ekspor Indonesia tahun 2015 terutama bersumber pada penurunan harga batubara, minyak kelapa sawit, dan karet. Harga batubara turun hingga 24,5% pada tahun 2015 yang disebabkan oleh penurunan impor Tiongkok sejalan dengan kebijakan pemerintah Tiongkok untuk melindungi industri dalam negeri dan kebijakan pengurangan emisi karbon dalam pembangkit listrik. Sementara itu, harga minyak kelapa sawit turun 8,2% dipicu oleh *oversupply* minyak kelapa sawit di Malaysia. Selain itu, rendahnya harga kacang kedelai dan minyak dunia sebagai barang substitusi turut menurunkan harga minyak kelapa sawit. Harga karet melemah 18,6% selama tahun 2015 disebabkan oleh turunnya permintaan Tiongkok terhadap karet alam. Penurunan harga karet ini juga sejalan dengan bergesernya permintaan karet alam ke karet sintetis yang harganya menurun sejalan dengan turunnya harga minyak dunia. Di samping itu, tertekannya harga karet juga didorong oleh pelemahan industri otomotif.

Di sisi minyak, harga minyak dunia selama tahun 2015 berada dalam tren yang menurun. Pelemahan harga minyak dunia dipengaruhi oleh tingginya penawaran minyak dari negara anggota OPEC maupun non-OPEC di tengah penurunan permintaan minyak akibat tren pelemahan ekonomi global. Selain itu, tren penguatan mata uang dolar AS yang terjadi selama tahun 2015 membuat harga minyak secara relatif menjadi lebih mahal bagi sebagian besar negara yang tidak menggunakan mata uang dolar AS. Hal ini juga berkontribusi terhadap penurunan permintaan terhadap minyak dunia. Pada akhir 2015, harga minyak

tetap mengalami koreksi meskipun jumlah produksi minyak dan jumlah pengebor minyak (*rig counts*) di AS telah menurun. Koreksi harga yang terjadi disebabkan oleh masih tingginya tingkat persediaan minyak AS sehingga menimbulkan sentimen negatif yang kemudian kembali menekan harga minyak ke bawah.

Walaupun harga minyak turun hingga hampir mencapai level harga tahun 2008, produksi minyak dunia masih meningkat pada 2015, yang bersumber baik dari negara-negara OPEC maupun non-OPEC. Tingginya produksi minyak negara anggota OPEC pada tahun 2015 merupakan strategi negara produsen minyak tersebut untuk mempertahankan pangsa pasarnya di pasar minyak dunia. Strategi tersebut dipimpin oleh Arab Saudi yang memiliki biaya produksi minyak sangat murah hingga 5 dolar AS per barel. Di sisi lain, produsen dari negara non-OPEC yang utamanya berasal dari AS juga terus meningkatkan efisiensi produksinya. Dengan demikian, penurunan jumlah pengeboran minyak tidak segera menurunkan jumlah produksi secara signifikan.

Ke depan, risiko pelemahan harga minyak masih cukup besar. Risiko penurunan harga minyak lebih lanjut antara lain bersumber dari kebijakan pelonggaran restriksi ekspor AS, penambahan suplai minyak dari Iran, setelah tercapainya *nuclear deal*, dan masih terbatasnya potensi penurunan produksi minyak negara OPEC akibat sempitnya ruang fiskal maupun faktor ketidakstabilan geopolitik.⁷ Namun demikian, terdapat juga risiko peningkatan harga minyak ke depan secara gradual yang berasal dari potensi penurunan suplai minyak dari AS akibat berkurangnya investasi di sektor perminyakan AS. Hal ini dimungkinkan meski secara total minyak dunia masih mengalami *net-supply*.

1.4. PASAR KEUANGAN GLOBAL

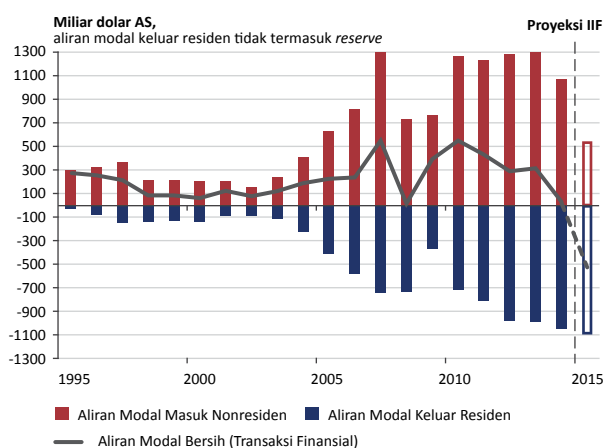
Perkembangan pasar keuangan global pada 2015 diwarnai oleh meningkatnya volatilitas sebagai cerminan ketidakpastian yang semakin tinggi. Peningkatan volatilitas ini utamanya dipicu oleh ketidakpastian kenaikan suku bunga *the Fed* (FFR) yang sudah dimulai pada akhir 2014, diikuti oleh krisis utang Yunani pada Maret 2015, devaluasi mata uang yuan pada Agustus 2015, dan koreksi yang

⁷ Dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ekspor minyak dari AS baru mencapai 5% dari total produksi, dimana produsen minyak membutuhkan izin dari pemerintah AS untuk melakukan ekspor minyak mentah, kecuali ekspor ke Kanada dan ekspor minyak kondensasi. Dengan batasan ekspor tersebut, kondisi pasar minyak di AS menjadi sangat *oversupply* sehingga harga minyak di AS menjadi lebih murah dibandingkan harga minyak dunia. Bila restriksi ekspor AS dicabut, selisih harga minyak akan berkurang.

dalam pada pasar saham Tiongkok pada bulan yang sama.⁸ Pada awalnya, kenaikan FFR diperkirakan akan terjadi pada pertengahan 2015. Meski demikian, perkiraan kenaikan tersebut kemudian terus bergeser mundur bahkan menjadi Maret 2016 pascarilis *minutes* FOMC September 2015 (8 Oktober 2015) sehingga volatilitas akibat ketidakpastian sempat mereda. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya indikator ekonomi AS dan pernyataan The Fed pada FOMC Oktober 2015, perkiraan kenaikan FFR akan terjadi pada akhir 2015 menguat dan kembali meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan. Pada akhirnya, *The Fed* menaikkan FFR pada FOMC Desember 2015 sebesar 25 bps. Mengingat bahwa kenaikan ini sudah diantisipasi oleh pasar maka tidak terjadi gejolak yang berlebihan di pasar global. Di sisi lain, European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BOJ) menerapkan kebijakan *quantitative easing* dalam jumlah besar selama 2015 sehingga menimbulkan divergensi kebijakan moneter global. Berbagai kondisi tersebut, dibarengi dengan proses *deleveraging* negara maju dan pergeseran komposisi likuiditas global menyusul normalisasi kebijakan AS, memicu penurunan *inflows* ke negara EM sehingga mulai memasuki negatif *netflows* (Grafik 1.13).

Sejalan dengan perkembangan pasar keuangan global, indeks komposit harga saham global sedikit menurun. Indeks turun menjadi 142,3 pada akhir 2015 dibandingkan dengan akhir 2014 yang sebesar 146,3. Kondisi yang serupa

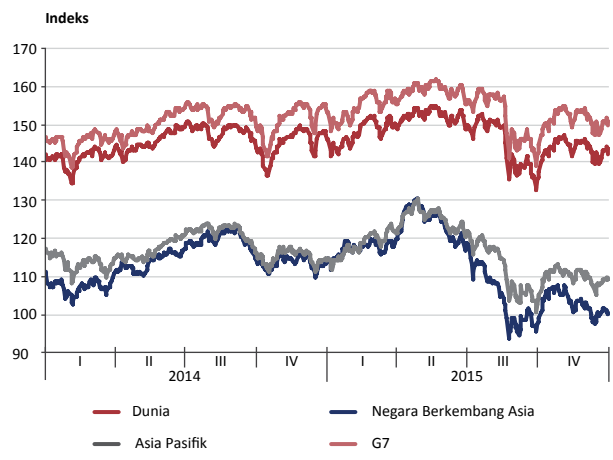
Grafik 1.13. Perkembangan Capital Flows EM



Sumber: *Capital Flows for Emerging Markets – IIF, January 2016*

⁸ Pada Maret 2015 krisis utang Yunani mengemuka saat Pemerintah Yunani mendapatkan perpanjangan waktu pembayaran utang luar negerinya selama empat bulan. Pada akhir Juni 2015, kondisi krisis memuncak saat Pemerintah Yunani kehabisan uang kas untuk keperluan publik. Ketidakpastian kemampuan Yunani dalam menyelesaikan masalah utang pemerintahnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan dunia.

Grafik 1.14. Perkembangan Pasar Saham Global

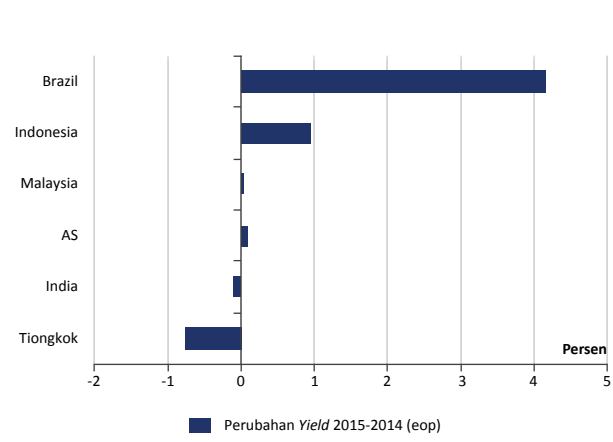


Sumber: Bloomberg, diolah

juga terjadi pada indeks komposit harga saham di negara EM Asia, negara Asia Pasifik, dan negara G7. Secara rata-rata, pergerakan indeks komposit harga saham global, negara EM Asia, negara Asia Pasifik dan negara G7 relatif stabil. *Yield* obligasi pemerintah, khususnya di negara EM pengekspor komoditas seperti Brazil dan negara Amerika Latin lainnya, mengalami peningkatan sejalan dengan pelemahan prospek ekonomi akibat penurunan harga komoditas (Grafik 1.14 dan 1.15).

Dinamika perkembangan harga saham global selama tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap ketidakpastian kenaikan FFR dan perkembangan ekonomi Tiongkok. Pada semester I 2015, perkembangan harga saham global masih positif sejalan dengan perbaikan ekonomi negara maju. Namun demikian, kinerja bursa saham global pada semester II 2015 menurun seiring

Grafik 1.15. Perkembangan Yield Obligasi Pemerintah



Sumber: Bloomberg, diolah

dengan ketidakpastian *timing* kenaikan suku bunga *the Fed* serta pemburuan pasar saham Tiongkok yang memiliki dampak rambatan terhadap bursa saham global lainnya. Pada pertengahan 2015, bursa saham Tiongkok sempat mengalami penurunan signifikan yang dipicu oleh kekhawatiran perlambatan ekonomi Tiongkok. Hal ini tercermin pada penurunan secara drastis indeks harga saham di *Shanghai Stock Exchange* sebesar 75% pada bulan Juli dan Agustus 2015 (Grafik 1.16). Di samping itu, keputusan otoritas Tiongkok untuk melakukan devaluasi yuan secara tiba-tiba pada Agustus 2015 semakin meningkatkan tekanan pada pasar keuangan Tiongkok dan negara EM lainnya.⁹ Meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan Tiongkok akibat devaluasi yuan tersebut tercermin pada peningkatan *credit default swap* (CDS) dan pada besarnya penurunan cadangan devisa Tiongkok sebesar 512 miliar dolar AS selama tahun 2015. Terkait dengan perkembangan tersebut, risiko juga mengemuka dari sisi utang luar negeri korporasi Tiongkok. Depresiasi nilai tukar yuan yang terjadi telah meningkatkan posisi utang luar negeri korporasi Tiongkok menjadi lebih dari dua kali lipat. Peningkatan risiko dan ketidakpastian tersebut pada gilirannya memicu dampak rambatan ke pasar saham global terkait kekhawatiran pelemahan ekonomi Tiongkok yang lebih dalam.

Grafik 1.16. Indeks Komposit Shanghai Stock Exchange



Sumber: Bloomberg, diolah

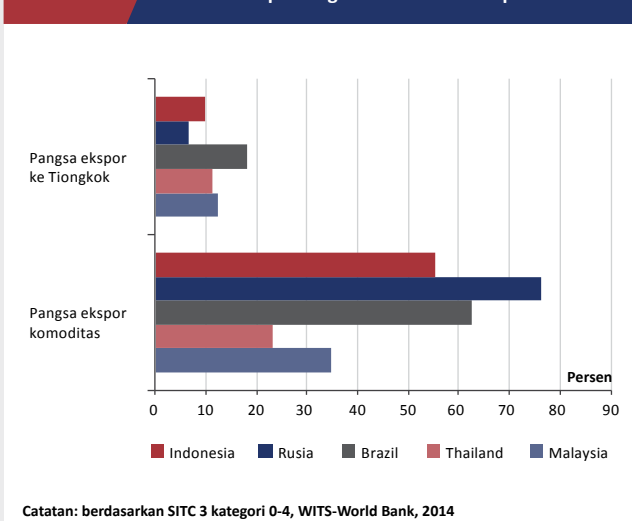
⁹ Devaluasi yuan pada 11 Agustus 2015 adalah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan dilatarbelakangi oleh perubahan rezim nilai tukar menjadi lebih *market driven* sejalan dengan persyaratan masuknya CNY ke dalam basket SDR. Penentuan nilai tukar didasarkan atas beberapa hal: (i) level USD/CNY hari sebelumnya, (ii) faktor *demand/supply*, dan (iii) pergerakan pasar dari mata uang lain.

Pelemahan ekonomi Tiongkok, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, secara langsung maupun tidak langsung, telah memengaruhi kinerja ekspor negara EM mitra dagangnya. Lebih lanjut, pelemahan ekonomi Tiongkok juga memicu pelemahan permintaan terhadap barang komoditas sejalan dengan peran Tiongkok sebagai salah satu konsumen komoditas terbesar di dunia. Hal tersebut mendorong penurunan harga komoditas dunia dan memperburuk kinerja ekspor negara EM pengekspor komoditas.¹ Boks ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dan respons kebijakan beberapa negara EM, yaitu Malaysia, Thailand, Brazil, dan Rusia selain Indonesia sendiri, dalam menghadapi berbagai kondisi tersebut.

Dampak pelemahan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas dunia terhadap negara EM dipengaruhi oleh struktur perdagangan negara terkait. Semakin tinggi ketergantungan suatu negara terhadap sektor primer atau industri komoditas, semakin besar dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja sektor eksternal yang pada gilirannya terhadap perekonomian negara tersebut. Dari kelima negara EM dalam sampel pengamatan, Rusia memiliki pangsa ekspor komoditas terbesar (76,4%) diikuti oleh Brazil (62,4%), Indonesia (55,4%), Malaysia (34,8%), dan Thailand (23,3%) (Grafik 1). Di samping menghadapi penurunan harga komoditas, kelima negara tersebut juga mengalami tekanan *capital outflows*, dengan intensitas tekanan yang beragam. Untuk mengatasi dampak berbagai tekanan sektor eksternal tersebut, berbagai respons bauran kebijakan telah dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik masing-masing negara.

Dalam perumusan respons bauran kebijakan, keterbatasan ruang kebijakan moneter maupun fiskal dapat menghambat perumusan kebijakan yang optimal dalam upaya pemulihan ekonomi dari tekanan eksternal yang dialami. Dari Tabel 1 terlihat bahwa sejalan dengan besarnya ketergantungan terhadap ekspor komoditas, Rusia mengalami penurunan pertumbuhan terdalam selama 2015 dibandingkan dengan negara-negara EM lainnya. Penurunan ini selain terutama dipengaruhi oleh penurunan harga minyak dan harga komoditas, juga terkait dengan latar belakang sanksi ekonomi akibat krisis Ukraina. Prospek ekonomi yang terus melambat dan pergeseran

Grafik 1. Struktur Ekspor Negara EM dalam Sampel



Catatan: berdasarkan SITC 3 kategori 0-4, WITS-World Bank, 2014

likuiditas global telah memicu *capital outflows* dari Rusia. Kondisi tersebut direspons dengan melepas peg mata uang rubel Rusia, terhadap dolar AS dan mata uang euro. Selanjutnya, depresiasi nilai tukar yang terjadi mendorong peningkatan tekanan inflasi sehingga membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut.² Di sisi fiskal, Pemerintah Rusia tetap berupaya mempertahankan defisit yang rendah di tengah besarnya penurunan penerimaan dari ekspor migas yang mencapai 52% total penerimaan pemerintah Rusia pada tahun sebelumnya.

Tabel 1. Indikator Ekonomi Berbagai Negara EM

Indikator Ekonomi	Tahun	Malaysia	Thailand	Brazil	Rusia	Indonesia
Pertumbuhan PDB (%)	2014	6,0	0,9	0,1	0,6	5,0
	2015	5,0	2,8	-3,0	-3,7	4,8
Inflasi (%)	2014	3,1	1,9	6,4	7,8	6,4
	2015	2,7	-0,9	11,3	12,9	3,3
Suku bunga kebijakan (%)*	2015	3,25	1,5	14,25	11	7,25
Depresiasi nilai tukar (%)	2015	19,3	5,5	41,6	17,8	10,2
Fiskal defisit (% PDB)	2015	6,5	2,5	10,3	2,6	2,5

Catatan:
*Pada akhir tahun 2015
Sumber: CEIC, diolah

1 Berdasarkan data IMF selama tahun 2015 harga komoditas dan energi berkontraksi sebesar 35,3%, sementara harga komoditas *non-fuel* berkontraksi sebesar 17,5%.

2 Namun demikian, bank sentral Rusia telah menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 600 bps secara bertahap dari awal tahun sampai dengan Agustus 2015.

Demi mempertahankan defisitnya, Pemerintah Rusia tidak memberikan stimulus fiskal yang dibutuhkan untuk menahan kontraksi perekonomian yang lebih dalam.

Hal yang serupa juga terjadi di Brazil sebagai negara dengan pangsa ekspor komoditas terbesar kedua dan sebagai negara dengan pangsa ekspor ke Tiongkok tertinggi dalam sampel. Sektor eksternal Brazil juga mengalami tekanan yang cukup kuat pada tahun 2015. Namun demikian, ruang kebijakan fiskal Pemerintah Brazil terbatas mengingat tingginya defisit pemerintah akibat berbagai permasalahan ekonomi beberapa tahun terakhir dan permasalahan politik dalam negeri. Di sisi moneter, ruang kebijakan pelonggaran relatif tidak tersedia akibat tingginya inflasi dan besarnya *capital outflows* yang mengakibatkan mata uang Brazil terdepresiasi cukup dalam (Tabel 2). Sebagai dampak dari berbagai keterbatasan tersebut, perekonomian Brazil mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2015.

Sementara itu, perekonomian Indonesia dan Malaysia tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif meski melambat dibanding dengan tahun sebelumnya. Kedua negara ini memiliki beberapa perbedaan, baik dalam struktur perdagangannya maupun respons kebijakan yang ditempuh. Indonesia memiliki pangsa ekspor komoditas yang cukup tinggi terhadap total ekspor, sehingga memiliki potensi penurunan kinerja sektor eksternal yang lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Untuk menahan dampak pelemahan eksternal, Indonesia menempuh bauran kebijakan moneter yang *prudent*, kebijakan makroprudensial yang akomodatif, dan kebijakan fiskal yang mendorong stimulus ekonomi. Sebagai upaya mendorong permintaan domestik dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang, Pemerintah Indonesia meningkatkan belanja modal untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis. Ruang stimulus fiskal yang dimiliki pemerintah tersebut tidak terlepas dari reformasi struktural fiskal yang telah dilakukan terutama melalui pengurangan subsidi energi secara signifikan. Namun, sisi

fiskal Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan akibat penurunan pendapatan pemerintah dari sektor migas, yang pada tahun 2014 pangsa mencapai 20% dari total pendapatan pemerintah.

Di sisi lain, Malaysia memiliki diversifikasi produk ekspor yang lebih luas dibandingkan dengan Indonesia sehingga dampak penurunan harga komoditas menjadi lebih terbatas. Meski demikian, pelemahan ekonomi global secara umum tetap memberikan tekanan terhadap ekspor Malaysia, diantaranya karena cukup tingginya pangsa ekspor Malaysia ke Tiongkok. Tekanan dari global yang terjadi bersamaan dengan permasalahan politik Malaysia mendorong aliran modal asing keluar sehingga ringgit Malaysia terdepresiasi signifikan. Di samping itu, Pemerintah Malaysia juga mengalami penurunan pendapatan dari sektor migas. Dampak dari penurunan pendapatan tersebut cukup signifikan mengingat 30% pendapatan pemerintah berasal dari sektor migas pada tahun 2014. Untuk itu, Pemerintah Malaysia mengurangi subsidi, efisiensi pengeluaran operasional dan reformasi perpajakan sehingga defisit fiskal tetap terjaga.³ Berbagai kebijakan tersebut berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang masih relatif tinggi meski turun 1% dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Thailand yang memiliki pangsa ekspor komoditas terendah, tetap berhasil meningkatkan pertumbuhannya. Hal ini, selain dipengaruhi oleh tingginya diversifikasi produk ekspor Thailand yang juga mencakup produk manufaktur dengan teknologi tinggi, juga tidak terlepas dari dukungan bauran kebijakan moneter maupun fiskal Pemerintah Thailand. Tingkat inflasi yang terkendali memberikan ruang yang cukup untuk pelonggaran moneter. Di samping itu, Pemerintah Thailand juga menempuh ekspansi fiskal, diantaranya melalui percepatan pencairan belanja pemerintah untuk transportasi dan irigasi, serta berbagai paket stimulus pemerintah senilai total 11 miliar dolar AS yang antara lain ditujukan untuk membantu UMKM dalam pelunasan kredit dan pembayaran pajak. Stimulus fiskal pemerintah juga disalurkan ke pedesaan melalui skema "*Village Fund*" dalam bentuk pinjaman lunak dan proyek investasi pemerintah di pedesaan. Kebijakan fiskal tersebut berperan dalam mendorong pertumbuhan permintaan domestik dan memelihara kepercayaan publik terhadap prospek ekonomi Thailand.

Tabel 2. Indikator Respons Kebijakan berbagai Negara EM

Indikator Respons Kebijakan	Malaysia	Thailand	Brazil	Rusia	Indonesia
Perubahan suku bunga kebijakan*	0 bps	-50 bps	200 bps	-600 bps	-25 bps
Pertambahan defisit fiskal*	0,0	0,3	3,6	2,0	0,2

Catatan:
*Dibandingkan akhir tahun 2014
Sumber: CEIC, diolah

³ Mulai 1 April 2015 pemerintah Malaysia mengimplementasikan pajak barang dan jasa untuk perusahaan (*Goods and Services Tax*) untuk menggantikan pajak atas penjualan dan jasa (*Government Sales and Services Tax*).



Keterangan gambar:

Sebagai bentuk kerja sama internasional, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 secara rutin melakukan pertemuan. Pada 4-5 September 2015, pertemuan tersebut berlangsung di Ankara Turki dan menyepakati beberapa hal seperti perlunya upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi.



FINANCE MINISTERS AND CENTRAL BANK GOVERNORS MEETING

4 - 5 SEPTEMBER 2015

ANKARA



Bab 2

Respons Kebijakan Ekonomi Global

Respons bauran kebijakan di negara maju untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat terutama bergantung pada kebijakan moneter yang akomodatif. Kurangnya dukungan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang memadai menyebabkan perbedaan fase *recovery* perekonomian dan divergensi kebijakan moneter antarnegara maju. Sementara itu, respons bauran kebijakan di beberapa negara berkembang cenderung lebih menyeluruh. Untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan menjaga stabilitas sistem keuangan, kerja sama internasional juga terus diperkuat. Namun, berbagai kebijakan tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global secara signifikan.

Kebijakan moneter masih digunakan sebagai kebijakan utama secara global pada tahun 2015 khususnya di negara-negara maju atau *advanced economies* (AE). AE menerapkan kebijakan moneter menggunakan instrumen suku bunga maupun kebijakan *Quantitative Easing* (QE). The Federal Reserve System (The Fed) sebagai otoritas moneter di Amerika Serikat telah melakukan normalisasi kebijakan moneternya dan menaikkan suku bunga acuan. Di sisi lain, European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BoJ) masih menerapkan kebijakan suku bunga acuan yang sangat rendah. Selain itu, kedua otoritas moneter tersebut juga masih melanjutkan QE. Arah kebijakan yang berbeda tersebut merefleksikan perbedaan fase pemulihan ekonomi di negara masing-masing. Di satu sisi, kebijakan yang ditempuh The Fed sejalan dengan perbaikan fundamental ekonomi terutama di pasar tenaga kerja. Sementara di sisi lain, kebijakan ECB dan BoJ dilakukan untuk merespons meningkatnya ancaman melambatnya ekonomi dan deflasi.

Sementara itu respons kebijakan di negara-negara berkembang atau *emerging markets* (EM) cenderung lebih menyeluruh dibandingkan dengan kebijakan di AE. Respons kebijakan yang lebih menyeluruh tersebut ditempuh negara-negara berkembang untuk menjawab kompleksnya permasalahan yang dihadapinya. Pelaksanaan kebijakan moneter di negara EM secara umum juga diikuti dengan kebijakan fiskal dan struktural. Sebagian besar negara menerapkan kebijakan moneter longgar dengan diikuti oleh stimulus kebijakan fiskal berupa peningkatan belanja pemerintah. Negara-negara berkembang juga menerapkan reformasi struktural untuk mengatasi permasalahan struktural di negara masing-masing. Kebijakan struktural tersebut terutama ditujukan dalam rangka penyediaan infrastruktur yang memadai, perbaikan iklim investasi, dan penanganan masalah kependudukan. Respons kebijakan negara-negara EM juga diarahkan untuk memitigasi gejolak pasar keuangan sebagai dampak dari pelemahan ekonomi dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).

Dampak respons kebijakan global pada pertumbuhan ekonomi dunia masih terbatas. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dibandingkan dengan tahun 2014 maupun perkiraan sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh terlalu bertumpunya bauran kebijakan yang ditempuh pada kebijakan moneter. Dengan masih terbatasnya dukungan fiskal dan permasalahan struktural yang ada, pemulihan ekonomi AE hanya terjadi secara moderat. Di sisi lain, kebijakan moneter di negara-negara EM juga belum mampu menahan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Hal ini antara lain terkait dengan implementasi stimulus fiskal di negara-negara EM dan reformasi struktural yang masih membutuhkan waktu

sebelum memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian.

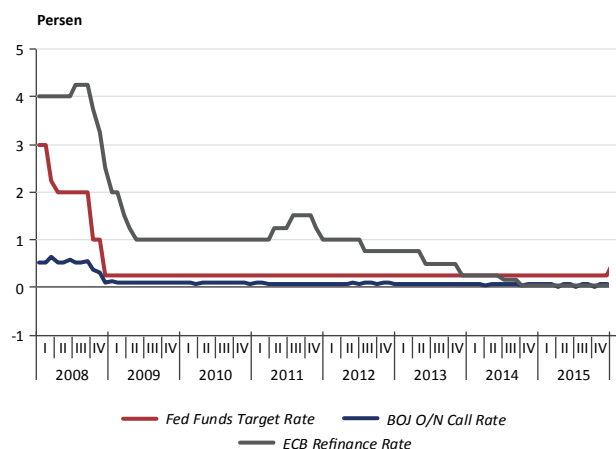
Melambatnya ekonomi global dan munculnya gejolak di pasar keuangan menjadi perhatian utama forum kerja sama internasional. Upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kestabilan pasar keuangan menjadi fokus diskusi dan kerja sama hampir di seluruh fora internasional. Dengan penguatan kerja sama tersebut, diharapkan diperoleh solusi yang dapat ditempuh untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, berkelanjutan dan lebih berkualitas, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan, dan membangun resiliensi kawasan.

2.1. KEBIJAKAN NEGARA MAJU

Kebijakan yang ditempuh oleh Amerika Serikat merupakan respons atas membaiknya kondisi perekonomian negara tersebut. Membaiknya kondisi perekonomian tersebut terutama terjadi di pasar tenaga kerja. Perbaikan tersebut diyakini oleh otoritas akan membawa laju inflasi menuju level 2% dalam jangka menengah. Mengantisipasi hal ini, The Fed telah melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga pada pertemuan *Federal Open Market Committee* (FOMC) Desember 2015 (Grafik 2.1).

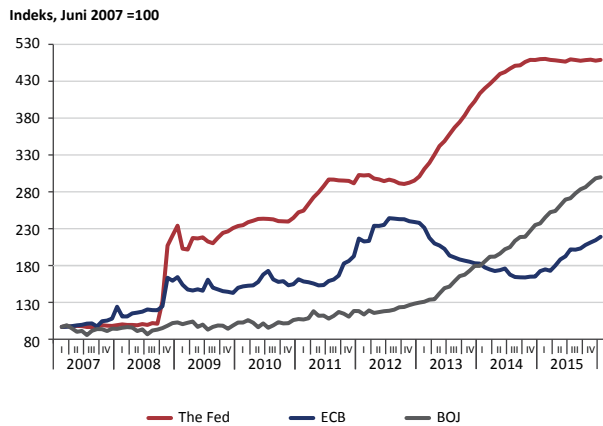
The Fed telah melakukan sejumlah persiapan sebelum melakukan normalisasi kebijakan moneternya. Persiapan tersebut dilakukan dalam tiga kebijakan utama. Pertama, melakukan *roll over* atas surat berharga untuk menjaga besaran neraca otoritas moneter sejalan dengan kebijakan moneter yang akomodatif (Grafik 2.2). Kedua, menyiapkan instrumen pengelolaan likuiditas agar dapat mengarahkan

Grafik 2.1. Suku Bunga Acuan The Fed, ECB, dan BOJ



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.2. Total Aset The Fed, ECB, dan BOJ



Sumber: Bloomberg, diolah

sasaran suku bunga pasar menuju sasaran yang ditetapkan. Dalam hal ini, The Fed menggunakan instrumen berupa suku bunga atas *banks reserve* dan transaksi *reverse repo* dalam skala yang besar. Ketiga, melakukan strategi komunikasi yang efektif untuk memberikan *forward guidance*. *Forward guidance* tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai arah kebijakan moneter kepada pelaku pasar. Melalui strategi kebijakan tersebut, The Fed memberikan indikasi akan mempertahankan suku bunga rendah hampir sepanjang tahun 2015. Sinyal kenaikan suku bunga menjadi jelas dalam pernyataan FOMC bulan pada Oktober dan baru dilakukan pada akhir tahun 2015.

Kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) ke level 0.25% sampai dengan 0.5% pada FOMC bulan Desember 2015 tidak dipandang sebagai langkah pengetatan moneter. The Fed menyatakan bahwa *stance* kebijakan bank sentral tetap akomodatif. Kenaikan suku bunga dilakukan dalam kerangka normalisasi kebijakan moneter untuk tetap menjaga stabilitas harga. The Fed meyakini bahwa perbaikan pada pasar tenaga kerja akan menyebabkan laju inflasi mengarah ke level 2% dalam jangka menengah. Terkait arah kebijakan suku bunga kedepan, The Fed mengisyaratkan bahwa laju kenaikan suku bunga akan terjadi secara gradual. Strategi tersebut ditempuh untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi dan mengantisipasi risiko dari melambatnya ekonomi global.

Di kawasan Eropa, kebijakan ditempuh untuk merespons ancaman deflasi dan lambannya pertumbuhan ekonomi Eropa. Oleh karena itu, ECB pada Januari 2015 memutuskan untuk melakukan kebijakan *QE* yang lebih agresif melalui *Expanded Asset Purchase Programme* (AEPP). Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung

peningkatan permintaan domestik Eropa melalui jalur sektor keuangan dan jalur kredit. Dalam program ini ECB melakukan pembelian aset sebesar 60 miliar euro termasuk surat utang pemerintah di kawasan Euro (*Eurozone*). Pembelian aset ini dilakukan sejak Maret 2015 sampai dengan September 2016. Kebijakan *QE* tersebut merupakan kelanjutan kebijakan pelonggaran sejak tahun 2008 sampai akhir tahun 2014 yang bersifat lebih pasif.¹

Dari sisi kebijakan moneter konvensional, ECB tetap menahan suku bunga acuannya pada level yang sangat rendah yakni di level 0,05%. Selain itu, ECB juga melakukan pemotongan suku bunga fasilitas deposit (*deposit facility*) sebesar 10 bps menjadi -0,3% pada Desember 2015. Kebijakan *negative interest rate* ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan di kawasan Eropa. Hal ini ditempuh mengingat bahwa pertumbuhan kredit, sebagai sumber pembiayaan utama dari aktivitas ekonomi Eropa, masih cukup rendah.

Dengan perkembangan inflasi yang masih jauh dibawah targetnya, ECB diperkirakan akan melakukan kebijakan tambahan. ECB diperkirakan akan meningkatkan intensitas penggunaan kebijakan moneter nonkonvensional. Kebijakan yang ditempuh antara lain berupa pelaksanaan *QE* tanpa batas waktu (*open ended*) maupun penambahan jumlah pembelian surat berharga. Di sisi lain, opsi penurunan suku bunga lanjutan diperkirakan relatif sulit dilakukan karena dikhawatirkan memberikan efek negatif pada perbankan.

Sementara itu, respons kebijakan di Jepang juga ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ancaman deflasi. Bauran kebijakan di Jepang bertumpu pada kombinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di sisi kebijakan moneter, BoJ tetap menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif. Selama tahun 2015, BoJ menahan suku bunga acuannya tetap pada level yang sangat rendah, yakni 0,1%. Selain itu, BoJ juga melanjutkan program *QE* dengan melakukan pembelian aset sebesar 80 triliun yen per tahun. Di sisi kebijakan fiskal, Pemerintah Jepang mengalokasikan tambahan stimulus fiskal sebesar 3,5 triliun yen dan memberikan insentif penurunan pajak bagi perusahaan yang menaikkan gaji karyawan pada Februari 2015. Pada April 2015, otoritas fiskal juga menunda rencana penerapan kenaikan pajak penjualan tahap II dari 8% menjadi 10% pada Oktober 2015 menjadi Oktober 2017.

1 LTRO (*Long-Term Refinancing Operation*), CBPP (*Covered Bond Purchase Programme*), dan ABSPP (*Asset-Backed Securities Purchase Programme*).

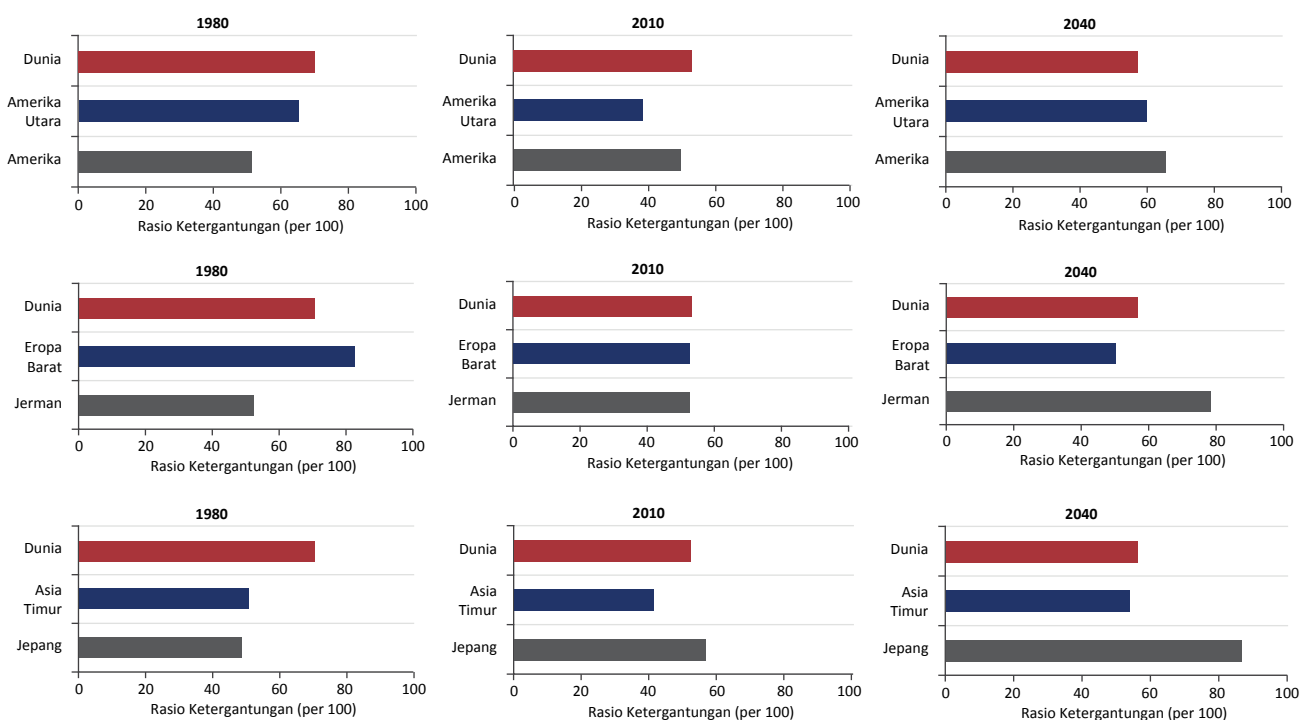
Namun demikian, bauran kebijakan moneter dan fiskal Jepang yang ditempuh belum berdampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi Jepang masih tetap rendah. Peningkatan konsumsi tidak terjadi secara signifikan sebagaimana yang ditargetkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh terhambatnya pemberian insentif pajak, yang ditujukan untuk meningkatkan gaji karyawan, karena rigiditas UU Tenaga Kerja. Sementara itu, penundaan kenaikan pajak penjualan juga tidak dapat mengangkat tingkat konsumsi. Penerapan kebijakan fiskal tersebut justru memicu lembaga pemeringkat Fitch dan Moody's untuk menurunkan *credit rating* Jepang sebesar 1 *notch* menjadi A. Lembaga pemeringkat tersebut menilai bahwa kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah Jepang justru akan menyebabkan peningkatan risiko dari sisi fiskal.

Terbatasnya dampak penerapan bauran kebijakan moneter dan fiskal diperkirakan akan mendorong kebijakan stimulus tambahan. Penambahan kuantitas QE diperkirakan akan ditempuh oleh otoritas moneter. Penerapan kebijakan suku bunga negatif juga merupakan opsi kebijakan yang mungkin ditempuh oleh BoJ. Di sisi fiskal, tidak terdapat banyak pilihan selain melanjutkan kebijakan sebelumnya. Terbatasnya opsi kebijakan fiskal disebabkan oleh terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah.

Salah satu permasalahan struktural utama yang dihadapi oleh Jepang, dan negara maju lainnya, adalah penuaan populasi (*ageing population*). Dengan struktur penduduk yang semakin menua, tingkat *saving* akan cenderung tinggi sehingga konsumsi masyarakat sulit ditingkatkan. Tingginya *dependency ratio* juga berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas akibat semakin besarnya jumlah penduduk yang tidak bekerja. Selain itu komposisi penduduk yang semakin menua juga menimbulkan hambatan fiskal (*fiscal drag*) yakni menurunkan pendapatan dari pajak dan semakin meningkatkan pengeluaran untuk biaya kesehatan dan pensiun. Median usia penduduk Jepang pada tahun 2014 tercatat 46 tahun dengan tingkat harapan hidup (*life expectancy*) mencapai 84 tahun, tertinggi di dunia. Berdasarkan komposisinya, persentase jumlah penduduk usia muda (0-14), usia kerja (15-64), dan usia lanjut (>65) masing-masing tercatat sebesar 13%, 61%, dan 26%. Dengan struktur tersebut *dependency ratio* di Jepang mencapai 63% atau lebih tinggi dari rata-rata dunia maupun dibandingkan dengan negara maju lainnya (Grafik 2.3).

Kondisi demografi Jepang tersebut merupakan faktor utama yang menghambat pencapaian program reformasi Jepang dalam upaya meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemerintah Jepang sejak tahun 1985 telah melakukan

Grafik 2.3. *Dependency Ratio Negara Maju*



Sumber: BBC Capital, UN World Population Projection

upaya untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya dengan menghimbau penduduk yang mendekati usia dan telah pensiun untuk tetap bekerja dan menaikkan batas usia pensiun dari 55 tahun menjadi 60 tahun. Namun demikian, dengan tingkat kesuburan (*fertility rate*) yang termasuk terendah di dunia (hanya 1,4 anak per penduduk perempuan) dan pelayanan kesehatan yang baik, ke depan struktur demografi di Jepang diperkirakan akan semakin timpang.² Solusi kebijakan untuk mengatasi masalah struktural yang bersumber dari kondisi demografis tidak dapat diselesaikan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Pengalaman sejumlah negara maju yang mencoba memacu tingkat fertilitas untuk memperbaiki struktur demografi sulit untuk diterapkan. Hal ini terjadi mengingat perbedaan gaya hidup dan preferensi individu di masing-masing negara. Di sisi lain, penerapan solusi jangka pendek dengan mendatangkan imigran juga sulit dilaksanakan karena hambatan politis dan potensi gejolak sosial.

Negara-negara maju khususnya di kawasan Eropa dan Jepang juga memiliki hambatan struktural lainnya berupa terbatasnya ruang fiskal (*fiscal space*).³ Kondisi ini disebabkan oleh tingkat utang publik yang telah tinggi. Studi yang dilakukan oleh Moody's menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan sebagian kecil negara di Eropa masih memiliki ruang fiskal. Namun di sisi lain, sebagian besar negara di Eropa seperti Portugal, Irlandia, Spanyol, Perancis, dan Belgia memiliki keterbatasan ruang fiskal. Sementara itu, Jepang, Italia, Yunani, dan Siprus memiliki ruang fiskal yang sangat terbatas sehingga penambahan utang publik sangat berisiko terhadap stabilitas makroekonomi (Grafik 2.4).

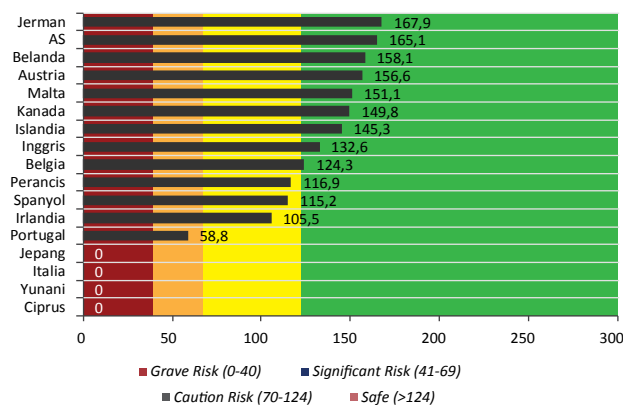
2.2. KEBIJAKAN NEGARA EMERGING MARKETS

Pada tahun 2015, kebijakan moneter di negara EM secara umum bersifat akomodatif sebagai respons atas pelemahan perekonomian domestik. Namun demikian, tidak seluruh negara EM melakukan kebijakan moneter yang akomodatif. Beberapa negara EM di kawasan Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, dan Chili justru menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengelola tekanan inflasi akibat depresiasi nilai tukar (Grafik 2.5).

2 Data kependudukan Jepang berdasarkan data WorldBank, 2015.

3 IMF mendefinisikan *fiscal space* sebagai ruang dalam anggaran belanja dan pendapatan pemerintah yang masih dapat dimanfaatkan tanpa melampaui batasan jumlah utang yang ditetapkan dan atau dapat membahayakan stabilitas makroekonomi negara tersebut.

Grafik 2.4. Fiscal Space Negara-Negara Maju

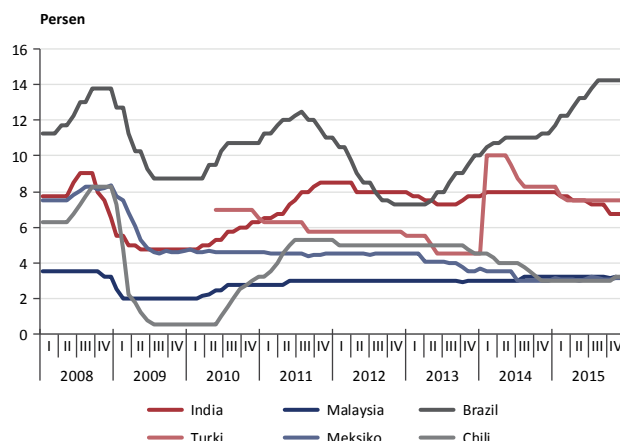


Sumber: Moody's Analytics, 2015

Disamping kebijakan moneter yang akomodatif, negara-negara EM juga menerapkan kebijakan reformasi struktural. Kebijakan tersebut antara lain berupa reformasi pasar keuangan, peningkatan kapasitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan lain yang ditempuh berupa deregulasi ketentuan untuk mendorong investasi dan kemudahan kegiatan usaha. Selain itu, kebijakan struktural juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor eksternal dan mendorong peningkatan konsumsi domestik.

Tiongkok merupakan negara EM yang sangat produktif dalam meluncurkan berbagai kebijakan dengan spektrum yang luas. Kebijakan yang dilakukan meliputi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta kebijakan struktural di bidang keuangan, fiskal, industri, perdagangan, serta kependudukan. Di sisi jangka waktu,

Grafik 2.5. Suku Bunga Kebijakan EM



Sumber: Bloomberg

target kebijakan Pemerintah Tiongkok memiliki dimensi yang beragam meliputi target jangka pendek, menengah, maupun panjang. Akan tetapi, beragamnya target yang hendak dicapai secara bersamaan pada praktiknya juga menimbulkan kompleksitas permasalahan implementasi.

Melambatnya ekonomi Tiongkok mendorong otoritas Tiongkok melakukan kebijakan pelonggaran baik melalui kebijakan moneter maupun makroprudensial. Selama tahun 2015, People Bank of China (PBoC) melakukan pemotongan tingkat suku bunga sebanyak 5 kali, dengan total sebesar sebanyak 125 bps hingga mencapai level 4,35%. Selain itu, PBoC juga mengeluarkan kebijakan makroprudensial berupa penurunan GWM, baik yang bersifat *targeted* maupun menyeluruh, dan pelonggaran *Loan to Value* (LTV). PBoC juga melakukan injeksi likuiditas pada beberapa bank tertentu untuk meningkatkan penyaluran kredit. Otoritas juga menerapkan kebijakan makroprudensial untuk memitigasi risiko dari kegiatan *shadow banking*. Kebijakan ini mengatur konversi utang lembaga pembiayaan pemerintah daerah (*local government financing vehicles*) kepada bank menjadi surat utang pemerintah daerah (*municipal bond*). *Municipal bond* tersebut dapat digunakan sebagai kolateral dalam kegiatan operasi moneter.

Di pasar keuangan, Tiongkok mengubah kebijakan nilai tukar dan meliberalisasi pasar keuangannya. Perubahan kebijakan nilai tukar dilakukan dengan memperlebar *band* pergerakan nilai tukar harian dari 1% menjadi 2% pada bulan Maret 2015. Otoritas juga berusaha mengubah rezim nilai tukar dari *fixed exchange rate* menjadi lebih fleksibel dan *market driven* sejak Agustus 2015.⁴ Sementara itu, liberalisasi pasar keuangan di pasar keuangan dilakukan dengan membuka akses yang lebih luas pada investor asing di pasar *onshore* di Tiongkok. Internasionalisasi mata uang juga dilakukan dengan mengembangkan transaksi renminbi (RMB) secara *offshore* di pusat-pusat pasar keuangan dunia, seperti Singapura dan London, selain di Hong Kong. Liberalisasi di pasar keuangan dan internasionalisasi tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Tiongkok terkait inklusi RMB dalam keranjang (*basket*) *Special Drawing Rights* (SDR) yang disetujui IMF pada November 2015.⁵ Selain memiliki tujuan ekonomi, inklusi RMB dalam SDR juga merupakan langkah strategis untuk menguatkan peran Tiongkok dalam percaturan geopolitik.

4 *Fixing* mengacu atas nilai tukar terhadap dolar AS hari sebelumnya, kondisi *demand* dan *supply* valuta asing dan pergerakan pasar dari mata uang lain.

5 RMB mulai efektif menjadi mata uang dalam *basket* SDR IMF pada 1 Oktober 2016.

Untuk mencapai target peningkatan PDB dan pendapatan per kapita 2 kali lipat sebelum tahun 2020, Pemerintah Tiongkok melakukan kebijakan reformasi struktural. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik, stabilisasi investasi dan ekspor. Untuk itu, Tiongkok mencanangkan sejumlah strategi jangka panjang seperti "*Made in China 2025*" dan "*One Belt One Road*". "*Made in China 2025*" merupakan program peningkatan kualitas (*upgrading*) produk industri manufaktur. Sementara itu, "*One Belt One Road*" merupakan inisiatif untuk mendorong investasi di luar negeri dan perluasan pasar ekspor. Kebijakan struktural lain yang memiliki dimensi jangka panjang adalah menghapus *1-child policy*, yang telah diterapkan sejak tahun 1978, dan menggantinya dengan *2-child policy* pada Oktober 2015. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi *ageing population* yang diperkirakan mengancam Tiongkok mulai pertengahan abad ke 21. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga agar *dependency ratio* Tiongkok sejalan dengan tujuan *rebalancing* perekonomian.

Upaya Pemerintah Tiongkok untuk mencapai seluruh tujuan kebijakan secara simultan menimbulkan komplikasi permasalahan. Kebijakan *rebalancing* perekonomian domestik di tengah melambatnya ekonomi global menurunkan pertumbuhan ekonomi dibawah perkiraan. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya proses *deleveraging* yang cepat sehingga menimbulkan gejala di pasar keuangan, khususnya di pasar saham. Gejala di pasar keuangan menyebabkan terjadinya *capital outflows*, pelemahan nilai tukar, dan penurunan cadangan devisa yang tajam. Di samping itu, inklusi RMB dalam SDR IMF, yang menuntut komitmen Tiongkok melakukan liberalisasi pasar keuangannya, justru membebani upaya stabilisasi pasar keuangan.

Gejolak di pasar keuangan menimbulkan potensi yang mengancam pencapaian tujuan jangka panjang Tiongkok. Pemerintah Tiongkok merespons gejala di pasar keuangan dengan menempuh kebijakan stabilisasi yang lebih ketat. Otoritas memperkuat kontrol atas penetapan *currency fixing* dan melakukan intervensi secara konsisten, baik di pasar *onshore* dan *offshore*. Pada September 2015, otoritas mengenakan tambahan giro wajib minimum (GWM) tanpa remunerasi sebesar 20% dari *outstanding* transaksi *forward*. Selain itu, Otoritas pada Desember 2015 mempublikasikan *Trade Weighted Index* (TWI) RMB untuk memberikan *guidance* agar pasar tidak hanya tertuju pada pergerakan nilai tukar terhadap dolar AS.

Kebijakan stabilisasi juga dilakukan untuk menahan pelemahan di pasar saham. Mulai bulan Juli 2015, otoritas menerapkan larangan penjualan oleh *shareholder* yang

kepemilikannya di atas 5% selama 6 bulan sejak pembelian. Otoritas juga mendorong BUMN dan perusahaan publik untuk melakukan pembelian saham dan melarang kegiatan *short selling* di pasar saham. Selain itu, otoritas juga memperbolehkan penggunaan saham sebagai kolateral pinjaman dari bank.

India merupakan salah contoh negara yang menerapkan respons bauran kebijakan yang konsisten dan terfokus. Dalam beberapa waktu terakhir, India telah secara konsisten menerapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan. Dalam konteks ini, otoritas moneter menerapkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang signifikan. Di sisi Pemerintah, kebijakan difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas perekonomian melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim usaha. Selain itu, Pemerintah juga secara bertahap menghapus kebijakan subsidi bahan bakar untuk membuka *fiscal space* yang lebih luas.

Reserve Bank of India (RBI) menempuh kebijakan moneter yang longgar. Otoritas moneter menurunkan suku bunga acuan sebanyak 4 kali selama tahun 2015, dengan total sebesar 125 bps menjadi 6,75%. Berkurangnya tekanan inflasi, sejalan dengan turunnya harga komoditas global, telah membuka ruang bagi RBI untuk menurunkan suku bunga secara cukup agresif. Sementara itu, untuk mendorong pembiayaan sektor sektor prioritas di daerah, RBI menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit. Dalam hal ini, otoritas menaikkan batas minimum penyaluran kredit oleh *rural regional banks* ke sektor-sektor prioritas (pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan, infrastruktur, dan energi terbarukan) dari 60% menjadi 75% pada Desember 2015.

Pemerintah India melakukan deregulasi di bidang investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut antara lain berupa penghapusan larangan bagi FDI dalam proyek konstruksi infrastruktur. Batas kepemilikan investor asing atas perusahaan asuransi dan industri pertahanan dinaikkan hingga mencapai 50%, sementara pada usaha pertambangan batubara dinaikkan hingga mencapai 100%. Pemerintah India juga menginisiasi reformasi UU Agraria guna mempermudah akuisisi lahan untuk pembangunan proyek industri dan infrastruktur. Selain itu, Pemerintah India juga membuka layanan satu atap dalam perijinan, dengan target pengurusan maksimum 10 hari. Selanjutnya, Pemerintah juga menghapus penetapan harga minimum produk pertanian guna mendorong investasi di sektor pertanian dan perkebunan.

Grafik 2.6. Indeks Situasi Bisnis India



Sumber: Bloomberg, diolah

Untuk menyediakan ruang fiskal yang lebih luas, Pemerintah India melakukan reformasi perpajakan dan subsidi. Pemerintah telah memulai revisi atas UU Pajak dalam rangka merampingkan struktur pajak pusat dan daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudahan dalam perpajakan juga diberikan dengan mengurangi pengenaan pajak berganda. Di samping itu, Pemerintah juga menginisiasi pengurangan subsidi harga minyak tanah serta melanjutkan penurunan subsidi bahan bakar jenis solar.

Bauran kebijakan yang konsisten dan terfokus mampu mendorong perkembangan ekonomi di India selama tahun 2015. Ekonomi tumbuh cepat dengan laju inflasi yang tetap terjaga. Hal ini tidak terlepas dari konsistensi Pemerintah dan berbagai otoritas di India dalam menempuh reformasi struktural. Kondisi tersebut mendorong peningkatan tingkat keyakinan usaha di India (Grafik 2.6). Perbaikan sentimen yang terjadi turut menopang perekonomian India sehingga tetap resilien di tengah meningkatnya tekanan dari sektor eksternal.

2.3. KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat, belum merata, dan disertai dengan perbedaan arah kebijakan moneter di negara maju menjadi fokus perhatian fora kerja sama internasional. Fora juga mencermati sejumlah tantangan, antara lain tren penguatan dolar AS, normalisasi kebijakan moneter AS, pelemahan ekonomi Tiongkok, dan penurunan harga komoditas global. Kondisi tersebut direspons dengan penguatan kerja sama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan membangun resiliensi kawasan.

Kerja Sama Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan

Forum G20 menitikberatkan kerja sama pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Upaya tersebut kemudian diformulasikan dalam “3 I” yang meliputi Implementasi, Investasi, dan Inklusif. Formulasi tersebut merupakan inti dari upaya implementasi seluruh komitmen, mendorong investasi sebagai motor pertumbuhan, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif, serta memperkuat dialog antara G20 dengan negara *low income developing countries*.

G20 menetapkan tiga agenda prioritas untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang kuat dan inklusif. Pertama, penguatan pemulihan ekonomi global dan mendorong pertumbuhan potensial. Upaya tersebut dilakukan dengan koordinasi kebijakan makroekonomi, menyusun *country specific* strategi investasi dan infrastruktur, mendorong pasar tenaga kerja menjadi lebih inklusif, serta memperkuat perdagangan dan investasi. Dalam konteks perdagangan, G20 akan mendukung kebijakan setiap negara yang mendorong dunia usaha, khususnya *small and medium-sized enterprises* (SMEs), agar dapat masuk dan terlibat dalam *Global Value Chains* (GVCs).

Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi global. Sasaran tersebut akan didukung oleh agenda regulasi di sektor keuangan, mereformasi arsitektur keuangan internasional, memperbaiki sistem perpajakan internasional, dan membangun budaya anti korupsi. Terkait reformasi arsitektur keuangan internasional, prioritas ditekankan pada komposisi SDR yang dapat mencerminkan peran mata uang dalam perdagangan dan sistem keuangan global. Dalam konteks perpajakan, G20 mendukung G20/OECD *Base Erosion and Profit Shifting Action Plan* untuk mengatasi masalah penghindaran pajak dan mendorong implementasinya.

Ketiga, memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan tersebut akan dicapai dengan melaksanakan beberapa aspek yaitu: (i) Pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dengan mengimplementasikan hasil dari *The 2030 Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Addis Ababa Action Agenda*, (ii) Keuangan inklusif, dengan mengembangkan *National Remittance Plans* untuk menurunkan biaya remitansi global menjadi maksimal 5% dari nilai transfer, dan mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan lainnya dalam kerangka *Global Partnership for Financial Inclusion* (GPII), dan (iii) Memastikan sustainabilitas energi, dengan menyetujui dokumen G20 *Energy Access Action Plan* khususnya upaya peningkatan akses listrik, yang pada tahap awal akan dilakukan untuk wilayah Sub Sahara

Afrika. G20 juga berupaya meningkatkan efisiensi energi, investasi teknologi energi bersih, serta mendorong riset dan pengembangan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. G20 telah menyetujui dokumen *G20 Toolkit of Voluntary Options for Renewable Energy Deployment* mengenai langkah untuk menciptakan dan mengembangkan energi terbarukan. Negara anggota menegaskan kembali komitmen untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil.

Negara G20 terus memperkuat komitmen untuk mengimplementasikan *growth strategy* yang telah disepakati pada KTT Brisbane 2014 (*Brisbane Growth Strategy*). *Growth strategy* merupakan komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan PDB negara G20 setidaknya sebesar 2% di atas *baseline* level PDB negara G20 dalam *World Economic Outlook* IMF Oktober 2013. G20 menyetujui untuk mencapai target pertumbuhan tersebut pada 2018. Jika target tersebut tercapai, akan terdapat tambahan PDB dunia sebesar 2,1% (sekitar 2 triliun dolar AS) dan jutaan lapangan pekerjaan baru.

Investasi publik dan swasta dalam bidang infrastruktur penting untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan. Dalam kaitan ini, G20 telah menyetujui pembentukan *Global Infrastructure Hub* (GIH).⁶ G20 akan melanjutkan upaya penguatan *capacity building*, menjalankan model *Public Private Partnership* (PPP), serta meningkatkan peran lembaga multinasional dan bank pembangunan nasional dalam menyediakan pembiayaan. Dalam upaya memenuhi pembiayaan investasi, G20 akan memusatkan perhatian pada pengembangan pembiayaan alternatif yang berasal dari pasar modal.

Implementasi *Brisbane Growth Strategy* menunjukkan kemajuan dalam melaksanakan komitmen secara bervariasi di masing-masing negara. Secara umum, hasil asesmen menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga komitmen dalam *Brisbane Growth Strategies* telah diimplementasikan. Semua negara anggota akan terus melakukan upaya untuk mencapai sisa komitmen lainnya. Anggota G20 melakukan kaji ulang terhadap *Country Specific Growth Strategy* dan melakukan *peer review*, guna memastikan implementasinya masih tetap konsisten dengan target pertumbuhan kolektif. Negara anggota diperkenankan melakukan penyesuaian komitmen, yang dituangkan dalam *Adjusted Growth Strategy*. Peluang melakukan penyesuaian

⁶ GIH memiliki mandat untuk mengembangkan *platform knowledge-sharing* dan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah, swasta, bank pembangunan, dan organisasi internasional lainnya guna meningkatkan pembiayaan infrastruktur.

dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan di masing-masing negara seperti terjadi tekanan eksternal, pergantian kepemimpinan, perubahan arah kebijakan, serta perbedaan arah perkembangan ekonomi dari perkiraan awal.

IMF juga berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan memperluas lapangan kerja. IMF mendorong negara anggota untuk meningkatkan kepercayaan dan memperkuat permintaan melalui bauran kebijakan makroekonomi serta mempercepat penyusunan kerangka dan implementasi reformasi struktural. Dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan resiliensi, IMF mencanangkan inisiatif *Global Policy Agenda* (GPA). Substansi GPA diantaranya (i) penerapan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan saat ini dan mendatang, dengan investasi infrastruktur menjadi prioritas di banyak negara, dan (ii) penerapan kebijakan moneter di negara maju yang tepat dan dikomunikasikan dengan baik.

Sementara itu, forum *Islamic Development Bank* berupaya untuk meningkatkan perannya dalam membantu proyek infrastruktur negara anggota. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah membentuk *World Islamic Investment Bank* (WIIB). WIIB diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai negara, yaitu menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi syariah, dan menjadi katalisator pengembangan instrumen keuangan syariah.

Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama perdagangan. Guna meningkatkan transaksi perdagangan bilateral dengan negara mitra serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, Bank Indonesia menjalin kerja sama *bilateral currency swap arrangement* (BCSA). Setelah sebelumnya memiliki kerja sama BCSA dengan PBoC senilai 100 miliar yuan dan Bank of Korea (BOK) senilai 10,7 triliun won Korea, BI menandatangani BCSA dengan Reserve Bank of Australia (RBA) sebesar 10 miliar dolar Australia pada 15 Desember 2015. Selain untuk mendorong kinerja perdagangan, BCSA juga ditujukan untuk meningkatkan investasi langsung, kerja sama keuangan, atau tujuan lain yang disepakati oleh kedua negara.

Di samping itu, Indonesia juga aktif terlibat dalam kerja sama perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan ASEAN dengan negara mitra dalam *platform Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) diyakini dapat memberikan implikasi positif pada pertumbuhan ekonomi. Perundingan yang melibatkan

10 negara ASEAN dan enam negara mitra tersebut telah berhasil menyepakati prinsip terkait modalitas di area kerja sama utama yaitu *trade in goods, trade in services, dan investment*.⁷ Para anggota telah menyepakati *threshold* pengurangan tarif untuk perdagangan barang, modalitas komitmen perdagangan jasa dan investasi, serta menyampaikan komitmen awal liberalisasi (*initial offers*).

Kerja Sama Meningkatkan Stabilitas Keuangan

G20 telah menyusun agenda reformasi keuangan berstandar internasional. Standar ini berupa penyiapan *total-loss-absorbing-capacity* (TLAC) bagi *global systemically important banks* (GSIBs) untuk menghindari hal yang disebut sebagai *too-big-to-fail*. Dalam pelaksanaannya, GSIBs telah memiliki *recovery plans* dan manajemen krisis lintas batas (*cross-border crisis management*). Kerangka TLAC juga dimaksudkan untuk menyiapkan kecukupan likuiditas pada lembaga keuangan global yang berdampak sistemik guna menyerap kerugian jika terjadi krisis. Dengan kesepakatan tersebut maka penggunaan dana publik melalui mekanisme *bailout* dapat dihindari.

G20 juga menempuh upaya untuk mereformasi transaksi *over the counter* (OTC) di pasar derivatif. Reformasi ditujukan untuk memperkuat infrastruktur, terutama aspek transparansi dan pengelolaan risiko kredit di pasar derivatif, dan membatasi risiko *spillover* yang berdampak negatif. G20 menyepakati bahwa kontrak derivatif yang terstandarisasi harus dikliringkan melalui *central clearing counterparties* dan dilaporkan kepada *trade repositories*. G20 juga menaruh perhatian besar pada upaya mengamankan risiko sistem keuangan dari praktik *shadow banking*. Untuk itu, G20 telah menyusun *Shadow Banking Roadmap* untuk mengurangi risiko pada stabilitas sistem keuangan akibat praktik *shadow banking* yang tidak *prudent* dan transparan. Aspek lain yang akan dilakukan adalah memperkuat pengawasan dan regulasi *shadow banking*.

IMF memasukkan mata uang RMB dalam *basket SDR* pada 30 November 2015. Keputusan tersebut akan diimplementasikan mulai 1 Oktober 2016. IMF menilai yuan telah memenuhi kriteria ekspor yang tinggi dan *freely usable*. Dengan masuknya mata uang yuan dalam basket SDR, negara anggota IMF dapat menggunakan RMB sebagai alternatif cadangan devisa dan mengurangi

⁷ Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan India.

ketergantungan terhadap dolar AS. Hal ini juga akan menciptakan stabilitas keuangan di negara *emerging markets* yang memiliki keterkaitan erat dalam transaksi perdagangan dengan Tiongkok.

Secara regional, negara-negara ASEAN+3 terus melakukan penguatan resiliensi di kawasan melalui kerja sama *Regional Financial Arrangement (RFA)*. Upaya tersebut ditempuh dengan mempersiapkan operasionalisasi dan implementasi *The Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)* serta meningkatkan peran ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office (AMRO)*.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyempurnakan *Operational Guideline*, sebagai panduan aktivasi CMIM, serta mengembangkan *Economic Review and Policy Dialogue (ERPD) Matrix*. Kerangka kerja CMIM saat ini diarahkan pada upaya penguatan koordinasi antara CMIM dengan *Global Financial Safety Net*, seperti fasilitas IMF dan peningkatan operasionalisasi hal-hal teknis yang mengacu pada standar internasional. Sementara itu, penguatan peran AMRO dilakukan antara lain melalui upaya peningkatan status AMRO menjadi organisasi internasional sehingga setara dengan institusi keuangan internasional lain seperti IMF dan ADB.

Forum kerja sama regional ASEAN memasuki babak sejarah baru dengan terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Desember 2015. Implementasi MEA diharapkan akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan yang merata serta terintegrasi dengan ekonomi global. Dalam upaya membentuk pasar tunggal dan basis produksi, langkah liberalisasi diarahkan untuk mewujudkan aliran bebas barang yang didukung oleh aliran bebas jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Hal ini akan memberikan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Indonesia agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dari terbentuknya MEA.

Terbentuknya pasar tunggal ASEAN bukan merupakan tujuan akhir dari MEA, tetapi justru menjadi batu lompatan untuk menuju langkah berikutnya, yaitu visi ASEAN 2025. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perlu dilihat proses integrasi yang telah dicapai negara-negara ASEAN hingga tahun 2015. Pengukuran pencapaian integrasi ekonomi ASEAN dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah dengan membandingkan antara komitmen integrasi yang ditetapkan oleh ASEAN *leaders* dengan pencapaian berbagai komitmen dimaksud. Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar komitmen telah dapat dipenuhi dan diimplementasikan.

Di pasar barang, proses integrasi sudah hampir seluruhnya tercapai. Capaian yang sangat signifikan adalah keberhasilan negara-negara ASEAN untuk menurunkan tarif impor hingga mendekati 0%. Selain itu, beberapa fasilitas untuk mendorong perdagangan intra ASEAN juga telah diwujudkan, termasuk ASEAN *Single Window* yang menyederhanakan proses ekspor-impor dan standarisasi produk.

Dalam hal mewujudkan aliran bebas jasa, beberapa pencapaian yang cukup signifikan adalah semakin banyaknya area di sektor jasa yang dapat dimasuki oleh penyedia jasa dari sesama negara ASEAN. Aliran tenaga kerja antar negara ASEAN juga diliberalisasi untuk mendukung *commercial presence*. Dalam perkembangannya, *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk beberapa area *skilled labor* telah disusun dan diikuti dengan MRA di area lainnya. Sektor jasa keuangan – yang merupakan bagian dari liberalisasi aliran modal – juga

telah menunjukkan kemajuan, tercermin pada tercapainya kesepakatan beberapa bank yang dapat beroperasi di berbagai negara ASEAN (*Qualified ASEAN Banks* atau QAB). Terkait dengan liberalisasi investasi, selain mendorong investasi intra ASEAN, kerja sama juga diarahkan untuk menarik investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dari luar ASEAN melalui promosi investasi ASEAN, perbaikan iklim bisnis, dan penyediaan infrastruktur. Dengan demikian, secara umum proses integrasi ASEAN telah terjadi secara gradual sebelum batas akhir tahun 2015.

Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup progresif dalam melakukan liberalisasi. Dalam upaya meliberalisasi pasar barang, Indonesia telah melakukan penurunan tarif secara signifikan dan aktif memanfaatkan tarif ATIGA (*ASEAN Trade in Goods Agreement*). Selain itu, Indonesia juga siap mengintegrasikan sistem perdagangan dengan ASEAN melalui *national trade repository* dan *national single window*. Dalam proses liberalisasi sektor jasa, Indonesia telah menyelesaikan penyusunan AFAS 9 dengan komitmen membuka 97 sub sektor.¹

Dalam liberalisasi jasa keuangan, Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati Paket 6 jasa keuangan ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) dan pedoman ASEAN *Banking Integration Framework* (ABIF) untuk integrasi perbankan. Selanjutnya terkait liberalisasi aliran investasi, Indonesia secara bertahap berhasil mengurangi atau menghapuskan hambatan investasi di beberapa sub sektor tertentu, serta secara kolektif memfasilitasi dan mempromosikan investasi melalui penyediaan data/informasi investasi. Dalam hal liberalisasi tenaga kerja terampil, Indonesia terus meningkatkan kualifikasi tenaga kerja domestik melalui harmonisasi regulasi dan mendorong sertifikasi agar siap bersaing dengan pekerja asing.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, integrasi ekonomi ASEAN merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan sehingga tidak dapat berhenti dengan telah terimplementasikannya MEA 2015. Untuk itu, dalam *Leaders Summit* ke-27 di Malaysia pada 22 November 2015, Pemimpin ASEAN telah mengadopsi ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint* 2025 yang menjadi panduan arah integrasi ekonomi periode 2016-

1 ASEAN *Integration Monitoring Report* 2015, ASEAN Secretariat, November 2015.

2025. *AEC Blueprint 2025*, yang diadopsi bersama dengan *ASEAN Community Vision 2025*, *ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025*, tersebut menjadi bagian dari deklarasi Kuala Lumpur dengan tema “ASEAN 2025: Forging Ahead Together”. Prioritas utama *AEC Blueprint 2025* adalah menyelesaikan implementasi kesepakatan dalam *AEC Blueprint 2015* yang tertunda dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2016. Selain itu, beberapa komitmen khusus dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada *AEC Blueprint 2015* ditargetkan selesai pada tahun 2018.

AEC Blueprint 2025 terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan memperkuat satu sama lainnya yaitu: (i) *Highly Integrated and Cohesive Economy*, (ii) *Competitive, Innovative and Dynamic ASEAN*, (iii) *Enhancing Economic Connectivity and Sectoral Integration*, (iv) *Resilient, Inclusive and People-Oriented, People-Centred ASEAN*, dan (v) *a Global ASEAN*. Khusus untuk sektor keuangan, Visi Integrasi Keuangan ASEAN 2025 terdiri dari tiga pilar yaitu *Financial Integration*, *Financial Inclusion*, dan *Financial Stability*. Ketiga pilar ini mencerminkan pendekatan integrasi secara holistic dalam artian menyeimbangkan inisiatif liberalisasi keuangan dengan stabilitas keuangan dan inklusi keuangan. Pendekatan holistik ini merupakan reorientasi dari pendekatan integrasi keuangan sebelumnya yang cenderung bersifat liberalisasi berbagai sub-sektor keuangan secara individual.

Financial Integration merupakan aspek penting yang perlu diprioritaskan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan peran perbankan negara-negara ASEAN (*indigenous bank*), asuransi dan pasar modal yang lebih terintegrasi. Integrasi keuangan perlu ditopang oleh infrastruktur pasar keuangan yang kuat, aman, efisien, dan terkoneksi. Peraturan atau ketentuan yang mengatur liberalisasi keuangan juga akan disusun agar lebih kohesif di antara negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan aspek prudensial. Pemimpin ASEAN telah menyepakati untuk memberikan *market access* dan fleksibilitas operasional yang lebih luas kepada QAB melalui kerangka kerja sama ASEAN *Banking Integration Framework* (ABIF) untuk meningkatkan peran *indigenous bank*.

Sementara itu, pilar *financial inclusion* dimaksudkan agar manfaat integrasi keuangan dapat dinikmati oleh lebih banyak lapisan masyarakat, terutama yang belum memiliki akses keuangan. Inklusi keuangan juga bertujuan memperluas penggunaan jasa keuangan digital dengan

biaya yang murah serta mengembangkan jasa keuangan bagi perusahaan kecil dan berpendapatan rendah. ASEAN juga mencermati pentingnya program pendidikan keuangan dan mekanisme perlindungan konsumen. Hal ini meliputi peningkatan kesadaran pribadi atas praktik penipuan serta penanggulangan ancaman penipuan digital.

Integrasi keuangan selain memiliki manfaat yang besar untuk mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi, juga berpotensi meningkatkan risiko. Untuk itu, ASEAN juga memandang penting aspek *financial stability* terutama untuk mengantisipasi terjadinya tekanan pada pasar keuangan regional. Upaya menjaga stabilitas keuangan ditempuh melalui beberapa langkah yaitu: (i) mengintensifkan *surveillance* makroekonomi dan keuangan dengan mengidentifikasi risiko dan vulnerabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertukaran informasi mengenai kondisi makroekonomi antara otoritas fiskal dan moneter, (ii) meningkatkan kerja sama antarnegara dalam mengimplementasikan ABIF, dan (iii) mewujudkan regulasi, terkait aspek prudensial yang lebih kohesif agar konsisten dengan *international best practices*, dan standar regulasi.

Visi integrasi keuangan 2025 juga menekankan bahwa upaya mewujudkan sektor keuangan yang terintegrasi, inklusi dan stabil harus ditunjang oleh *Capital Account Liberalisation, Payment and Settlement Systems*, dan *Capacity Building*. Liberalisasi pasar modal akan menciptakan aliran modal yang lebih bebas untuk memfasilitasi investasi dan perdagangan intra-ASEAN serta kemudahan penyaluran kredit. Menyadari adanya perbedaan tingkat kesiapan di masing-masing negara maka liberalisasi aliran modal dilakukan dengan memperhatikan agenda nasional dan mengizinkan penerapan *safeguard measure*. Sementara, *payment and settlement system* diarahkan untuk mendorong standarisasi dan pengembangan infrastruktur penyelesaian *settlement* yang akan bermanfaat bagi transaksi perdagangan lintas batas, remitansi, serta sistem pembayaran ritel dan pasar modal. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem pembayaran yang aman, efisien, dan kompetitif. Selanjutnya, *gap* yang terjadi pada sektor keuangan negara ASEAN akan dipersempit dengan melakukan *capacity building*.

Dalam mencapai tujuan dari *AEC Blueprint 2025* khususnya di sektor keuangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN telah memberikan mandat kepada berbagai ASEAN *Working Committee* untuk menyusun *Strategic Action Plan (SAP) for ASEAN Financial Integration Post-2015*. Penyusunan SAP bertujuan untuk memastikan tercapainya visi integrasi ekonomi ASEAN

2025. Sejalan dengan upaya memperkuat kepemimpinan di kawasan, Bank Indonesia berperan aktif merumuskan arah integrasi keuangan ASEAN 2025. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menyusun *Strategic Direction* sebagai pedoman bagi *Working Committee* dalam menentukan *Strategic Action Plan*. *Strategic Direction* tersebut disusun dengan memperhatikan relevansi dengan enam karakteristik utama (*key features*) integrasi keuangan ASEAN, yaitu: (i) *Ensuring the financial services and capital mobilization meet the need of the real sector*, (ii) *Balancing financial integration with financial*

stability to ensure that the benefit of integration will be sustainable, (iii) *Lowering transaction costs*, (iv) *Having greater consumer choices and protection*, (v) *Improving financial inclusion*, dan (vi) *Increasing risk diversification*. *Key features* tersebut dimaksudkan untuk memastikan tercapainya manfaat integrasi sektor keuangan bagi sektor riil, yaitu memfasilitasi aliran investasi dan modal di ASEAN yang memenuhi kebutuhan sektor riil, khususnya dalam mencapai visi AEC 2025 yaitu “*A Cohesive, Integrated, Competitive, Global and People-Centered ASEAN’s Economy*.”



Keterangan gambar:

Sebagaimana layaknya pemain kuda lumping, perekonomian domestik pada tahun 2015 berupaya menjaga stabilitas di tengah berbagai tantangan dan berhasil menemukan momentum pembalikan pada Semester II.

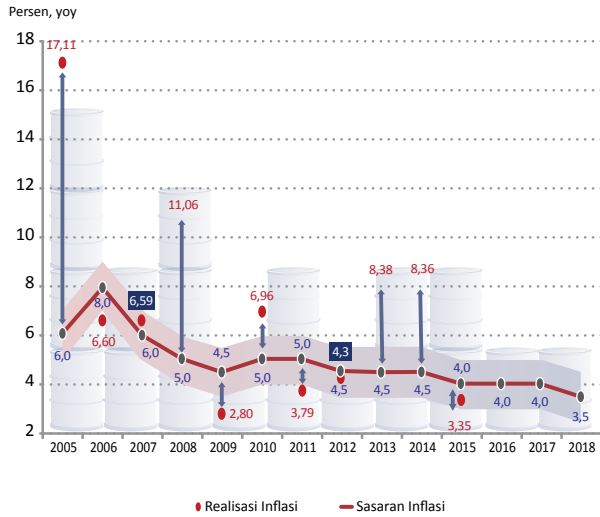


BAGIAN II

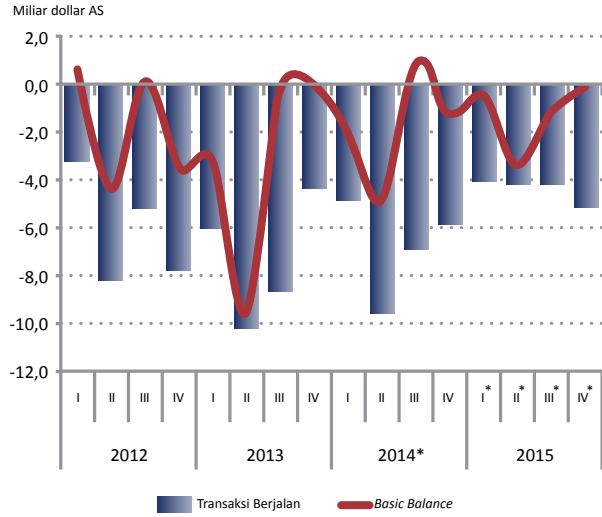
PEREKONOMIAN DOMESTIK

STABILITAS MAKROEKONOMI DAN SISTEM KEUANGAN TERJAGA

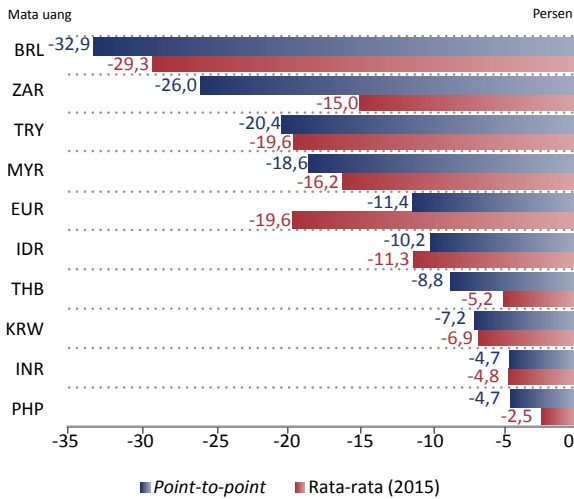
INFLASI SESUAI TARGET



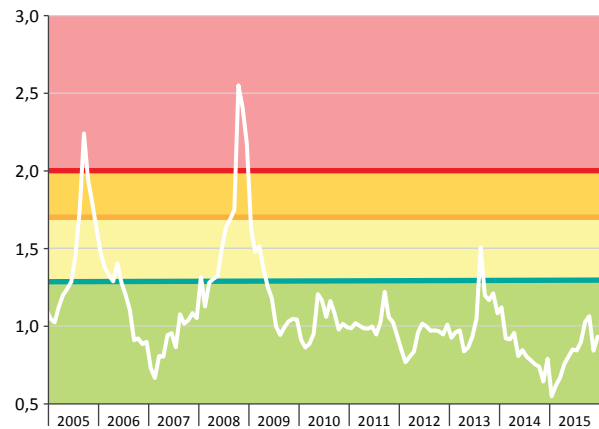
CAD TURUN KE LEVEL YANG LEBIH SEHAT



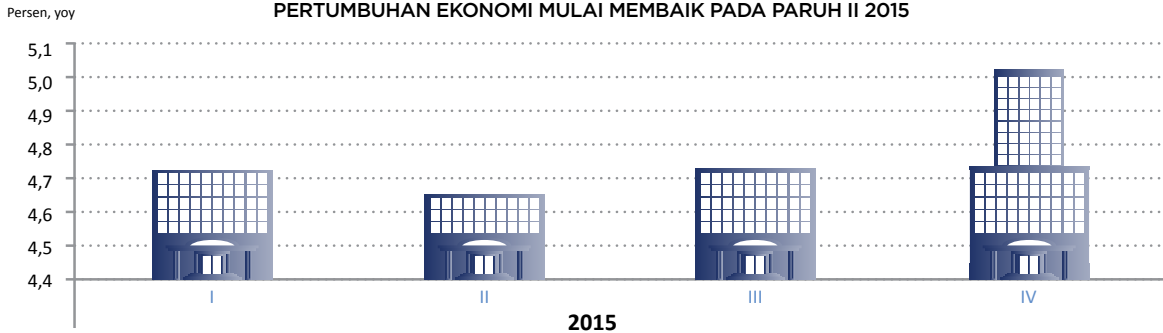
DEPRESIASI RUPIAH LEBIH TERBATAS



STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERJAGA



PERTUMBUHAN EKONOMI MULAI MEMBAIK PADA PARUH II 2015



BAGIAN II

PEREKONOMIAN DOMESTIK

Di tengah berbagai tantangan eksternal dan domestik, perekonomian Indonesia 2015 mencatat kinerja yang positif. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga sementara momentum pertumbuhan ekonomi mulai bergulir. Terjaganya stabilitas makroekonomi tercermin pada inflasi yang kembali pada kisaran sasarnya $4\pm 1\%$, defisit transaksi berjalan yang menurun ke sekitar 2% dari PDB, nilai tukar rupiah yang terkendali terutama sejak triwulan IV 2015, dan sistem keuangan yang resilien didukung oleh kecukupan modal yang kuat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang berada pada tren melemah mulai menemukan momentum pembalikan pada semester II 2015. Pencapaian kinerja ekonomi tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong proses pemulihan perekonomian.

Ketidakpastian pasar keuangan global berdampak pada meningkatnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah pada 2015. Dinamika triwulanan nilai tukar rupiah terutama dipengaruhi faktor eksternal yaitu ketidakpastian kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR), kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, dan devaluasi yuan. Tekanan depresiasi rupiah dari eksternal ini diperberat oleh kondisi domestik yang diwarnai oleh melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi domestik, belum dalamnya pasar keuangan, serta tingginya ketergantungan korporasi terhadap pembiayaan eksternal. Namun, tekanan depresiasi rupiah mulai berkurang, bahkan cenderung menguat pada triwulan IV 2015. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya aliran masuk modal asing, seiring dengan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat dari ekspektasi penundaan kenaikan FFR. Dari sisi domestik, berkurangnya tekanan terhadap rupiah terutama ditopang oleh langkah-langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia, persepsi positif investor atas prospek ekonomi domestik akibat rangkaian paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Pemerintah, dan imbal hasil aset domestik yang tinggi. Berbagai faktor positif domestik ini mendorong apresiasi rupiah yang lebih besar dibandingkan apresiasi mata uang negara lain. Untuk keseluruhan 2015, rupiah mencatat depresiasi 10,2% (yoy)

menjadi Rp13.785 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan depresiasi beberapa mata uang negara *peers*.

Neraca Pembayaran Indonesia pada 2015 mencatat defisit, walaupun defisit transaksi berjalan mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Defisit transaksi berjalan pada 2015 mengalami penurunan dari 3,1% dari PDB pada 2014 menjadi 2,1% dari PDB. Perbaikan defisit transaksi berjalan terutama terjadi di sisi neraca perdagangan migas dan neraca perdagangan nonmigas. Di sisi migas, penurunan harga minyak dan gas dunia serta menurunnya konsumsi BBM domestik mendorong penurunan impor migas yang cukup signifikan. Penurunan impor migas tersebut lebih besar dari penurunan ekspor migas, yang didorong oleh penurunan harga minyak dan gas di tengah kenaikan volume ekspor akibat meningkatnya *lifting* minyak domestik. Di sisi nonmigas, neraca perdagangan mencatat peningkatan surplus, terutama didukung oleh penurunan impor nonmigas sejalan dengan melemahnya permintaan domestik dan depresiasi rupiah. Penurunan impor nonmigas tersebut lebih besar dibandingkan penurunan ekspor nonmigas, yang dipicu oleh penurunan pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas dunia. Di sisi neraca transaksi modal dan finansial (TMF), ketidakpastian pasar keuangan global mendorong penurunan aliran modal yang cukup signifikan sampai triwulan III 2015. Namun, meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global dan membaiknya keyakinan terhadap prospek perekonomian domestik sejak awal triwulan IV 2015, mendorong peningkatan arus masuk modal asing secara signifikan, terutama arus masuk investasi portofolio pada obligasi pemerintah dan investasi langsung. Sejalan dengan peningkatan surplus TMF tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2015 mencatat surplus yang cukup tinggi. Untuk keseluruhan tahun 2015, NPI tercatat defisit sekitar 1,1 miliar dolar AS.

Meski rupiah terdepresiasi, inflasi pada 2015 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2015, yaitu $4\pm 1\%$. Terkendalinya inflasi pada 2015 dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Di sisi global, menurunnya harga minyak dunia memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk menurunkan harga BBM domestik dan harga LPG 12 kg serta menyesuaikan

tarif tenaga listrik. Penurunan tersebut dimungkinkan sejalan dengan reformasi energi yang mengatur penentuan harga energi berdasarkan harga keekonomiannya. Hal ini mendorong rendahnya inflasi *administered prices* pada tahun 2015. Kedua, penurunan harga komoditas global, termasuk harga pangan, menyebabkan inflasi *volatile food* yang relatif terkendali. Di sisi domestik, meski rupiah terdepresiasi, *passthrough* pelemahan nilai tukar terhadap inflasi relatif terbatas. Kondisi tersebut tidak terlepas dari permintaan domestik yang terkelola dan inflasi harga barang impor yang relatif rendah. Kedua, tingginya pasokan komoditas pangan strategis juga menopang terkendalinya inflasi *volatile food* di tengah gangguan *El Nino* yang kuat. Terjaganya inflasi *volatile food* tersebut juga tak lepas dari semakin kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan produksi, memperbaiki distribusi, serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Sejalan dengan perkembangan ini, pada 2015 inflasi inti tercatat hanya sebesar 3,95% (yoy), inflasi *administered prices* 0,39% (yoy), sementara, inflasi *volatile food* mencapai 4,84% (yoy).

Perekonomian Indonesia telah menemukan kembali momentum perbaikan sejak semester II 2015. Pertumbuhan ekonomi domestik terus melambat sampai semester I 2015, sejalan dengan pelemahan ekonomi global, penurunan harga komoditas, dan tersendatnya belanja pemerintah akibat permasalahan nomenklatur. Namun, pertumbuhan ekonomi mulai berbalik arah pada semester II 2015, didorong oleh perbaikan permintaan domestik. Belanja pemerintah meningkat signifikan, ditopang oleh peningkatan belanja modal pemerintah terutama terkait pembangunan infrastruktur. Stimulus fiskal pemerintah tersebut juga telah direspons oleh sektor swasta. Hal ini tercermin pada membaiknya pertumbuhan investasi di beberapa sektor, seperti sektor konstruksi. Sementara itu, di sisi rumah tangga, tetap tingginya tingkat keyakinan konsumen mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih relatif stabil dan resilien. Untuk keseluruhan 2015, pertumbuhan ekonomi masih mengalami perlambatan dari 5,02% pada 2014 menjadi 4,79%. Meski menurun, dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi negara-negara lain dengan basis komoditas, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif tinggi. Secara spasial, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga mulai terdiversifikasi mampu menahan penurunan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Perekonomian Jawa, dengan basis sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, cenderung masih tumbuh tinggi, sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang terkena dampak pelemahan harga komoditas.

Di sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga dengan baik, di tengah meningkatnya risiko yang bersumber dari perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif. Hal tersebut tercermin pada Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) tahun 2015 yang tercatat sebesar 0,89 dan masih berada di batas aman. Ketahanan industri perbankan masih tetap terjaga, tercermin pada risiko kredit dan risiko likuiditas yang terjaga, profitabilitas yang masih tinggi, serta kecukupan modal yang kuat. Risiko kredit relatif rendah, meski cenderung meningkat seiring dengan penurunan kemampuan membayar utang korporasi akibat penurunan pendapatan korporasi dan rumah tangga. Hal ini tercermin pada *Non Performing Loan* (NPL) yang naik menjadi 2,5%, masih lebih rendah dari batas aman sebesar 5%. Penurunan pendapatan korporasi dan rumah tangga juga mendorong melemahnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang hanya tumbuh 7,3%. Pertumbuhan DPK yang melambat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas, meski masih dalam batas aman. Rasio alat likuid terhadap DPK turun menjadi 19,4%, namun lebih tinggi dari batas amannya sebesar 8,5%. Di sisi intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit masih dalam tren menurun, tumbuh hanya 10,4%. Perlambatan tersebut didorong baik oleh penurunan permintaan, akibat dari pelemahan pertumbuhan ekonomi domestik, maupun oleh penurunan penawaran akibat peningkatan *lending standard* sebagai respons bank atas peningkatan NPL. Dengan fungsi intermediasi yang belum pulih dan risiko kredit yang meningkat, tingkat profitabilitas bank menurun. Meski menurun menjadi 2,27% pada 2015, tingkat profitabilitas ini masih lebih tinggi dibanding negara kawasan.

Penurunan tingkat profitabilitas tidak berdampak signifikan terhadap resiliensi perbankan Indonesia, karena tingkat kecukupan modal perbankan yang tinggi. Tingkat kecukupan modal perbankan Indonesia pada akhir 2015 tercatat 21,2%, meningkat dibandingkan dengan 2014 sebesar 19,4%. Resiliensi perbankan Indonesia juga terkonfirmasi oleh hasil *stress test* terhadap risiko kredit dan risiko pasar, yang menunjukkan bahwa perbankan Indonesia memiliki tingkat ketahanan permodalan yang tinggi dalam menghadapi skenario terburuk. Di sisi nonbank, peran pembiayaan nonbank meningkat, seiring dengan respons korporasi terhadap peningkatan *lending standard* perbankan. Korporasi terindikasi mencari alternatif sumber pendanaan melalui pasar obligasi, saham dan sukuk korporasi, serta *Medium Term Note* (MTN) dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Sistem pembayaran selama 2015 mencatat kinerja yang semakin baik. Di sisi Bank Indonesia, hal ini tercermin pada terpenuhinya keandalan dan ketersediaan sistem pembayaran, serta pelaksanaan *contingency plan* yang efektif. Di sisi sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri, tidak terjadi kegagalan sistem yang signifikan. Pertumbuhan nilai transaksi

sistem pembayaran yang dilayani Bank Indonesia dan industri turun menjadi 9,4%, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun dari sisi volume, terjadi peningkatan pertumbuhan dari 18% menjadi 19% pada tahun 2015. Peningkatan terjadi terutama pada sistem pembayaran yang diselenggarakan industri berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) maupun Uang Elektronik (UE). Hal ini sejalan dengan program elektronifikasi alat pembayaran melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta kebijakan Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial melalui penggunaan UE. Keberhasilan program elektronifikasi alat pembayaran ini juga terlihat pada meningkatnya rasio APMK terhadap PDB, yang mengindikasikan perbaikan preferensi masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran nontunai. Dari sisi sistem pembayaran tunai, pengelolaan uang rupiah juga menunjukkan kinerja yang semakin andal, antara lain tercermin pada semakin luasnya *coverage* layanan kas Bank Indonesia dan meningkatnya kualitas uang tunai. Kinerja yang andal tersebut ditopang oleh kebijakan pengelolaan uang rupiah, yang diantaranya berupa pengembangan jaringan distribusi uang dan layanan kas melalui Kas Titipan, posisi kas Bank Indonesia yang memadai, serta peningkatan kualitas uang melalui *clean money policy*.



Keterangan gambar:

Di tengah kondisi eksternal yang kurang menggembirakan, realisasi belanja infrastruktur pemerintah menjadi sumber pertumbuhan utama bagi ekonomi Indonesia pada tahun 2015. Penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi juga meningkat.



Bab 3

Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika ekonomi global yang ditandai dengan berlanjutnya pelemahan ekonomi dunia dan berkurangnya aliran modal ke *emerging markets* memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2015. Perlambatan pertumbuhan ekonomi telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pengangguran dan kesejahteraan. Merespons kondisi tersebut, BI dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makro dan mendorong pemulihan ekonomi lebih lanjut. Sejalan dengan respons kebijakan tersebut, risiko perekonomian mulai terjaga dan keyakinan pelaku ekonomi mulai membaik. Hal tersebut ditandai dengan mulai terlihatnya momentum pemulihan ekonomi pada paruh kedua 2015.

Pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya memberikan dampak kurang menguntungkan bagi perekonomian domestik. Pada tahun 2015, pemulihan ekonomi negara *advanced economies* cenderung terbatas. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging markets* (EM), yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi global, cenderung melambat. Salah satu motor ekonomi dunia yang juga mitra dagang utama Indonesia, yaitu Tiongkok, terus menunjukkan perlambatan ekonomi. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global tersebut mendorong berlanjutnya penurunan harga komoditas. Situasi global yang kurang kondusif ini berimbas negatif pada kinerja ekonomi domestik, tercermin dari kontraksi ekspor. Dengan perekonomian yang masih banyak mengandalkan komoditas Sumber Daya Alam (SDA), penurunan harga komoditas memicu penurunan *terms of trade* dan kegiatan ekonomi domestik secara keseluruhan.

Perlambatan ekonomi domestik ditengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi meningkatkan risiko perekonomian dan menurunkan keyakinan pelaku ekonomi. Risiko perekonomian yang sempat mengemuka adalah risiko nilai tukar yang diiringi dengan menurunnya keyakinan terhadap perekonomian. Hal ini berdampak pada berkurangnya aliran modal asing masuk dan meningkatnya tekanan nilai tukar rupiah. Perlambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah telah mendorong munculnya risiko korporasi berupa penurunan kinerja keuangan korporasi, yang pada gilirannya mendorong penurunan investasi. Penurunan kinerja korporasi juga berdampak pada kemampuan korporasi dalam membayar utang. Sejalan dengan hal tersebut, risiko perbankan meningkat, tercermin pada naiknya *Non Performing Loan* (NPL) meskipun masih dalam batas aman. Menyikapi peningkatan risiko ini, bank meningkatkan *lending standard* yang berdampak pada penurunan penyaluran kredit. Semakin terbatasnya penyaluran kredit selanjutnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi yang juga berimplikasi pada risiko fiskal terkait terbatasnya ruang stimulus akibat rendahnya penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tahun 2015 tumbuh sebesar 4,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 5,0% (yoy) maupun perkiraan Bank Indonesia di awal tahun sebesar 5,4-5,8%. Kinerja sektor eksternal menurun tajam sebagaimana tercermin dari penurunan pertumbuhan ekspor yang cukup signifikan. Dengan komposisi ekspor yang masih didominasi SDA, pelemahan nilai tukar rupiah belum dapat memperbaiki kinerja ekspor secara umum. Sementara itu, ekspor manufaktur juga masih menghadapi tantangan

terkait dengan melemahnya permintaan negara tujuan ekspor dan cukup besarnya kandungan impor ditengah pelemahan nilai tukar. Berkurangnya pendapatan dari ekspor telah berimbas pada menurunnya permintaan domestik, khususnya konsumsi swasta dan investasi nonbangunan. Sejalan dengan penurunan ekspor dan perlambatan permintaan domestik, impor juga berkontraksi cukup dalam. Dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan ekonomi yang semula dipicu LU berbasis komoditas (sektor primer) telah merambat pada kinerja LU lainnya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang kurang menggembirakan pada kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran sedikit meningkat yang disertai dengan menurunnya elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan penggunaan tenaga kerja terlihat di lapangan usaha pertambangan, pertanian, dan industri. Sebaliknya, penyerapan tambahan tenaga kerja terutama terjadi di LU konstruksi sebagai dampak dari meningkatnya realisasi berbagai proyek infrastruktur. Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga sedikit mengalami penurunan, tercermin dari angka kemiskinan yang relatif meningkat dan *gini ratio* yang belum membaik.

Meskipun ekonomi domestik melambat untuk keseluruhan 2015, momentum pemulihan ekonomi mulai terlihat di paruh kedua 2015 didorong oleh stimulus fiskal pemerintah. Di tengah rendahnya penerimaan pajak, kebijakan reformasi fiskal terutama berkurangnya subsidi telah membuka ruang stimulus bagi perekonomian. Stimulus fiskal tercermin dari peningkatan belanja pemerintah khususnya belanja modal terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Mulai membaiknya perekonomian domestik tersebut memberikan dampak positif pada persepsi risiko dan keyakinan pelaku ekonomi. Dampak positif tersebut juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten menjaga stabilitas makroekonomi. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, upaya Bank Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi ditempuh melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial. Berbagai kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada paruh kedua 2015.

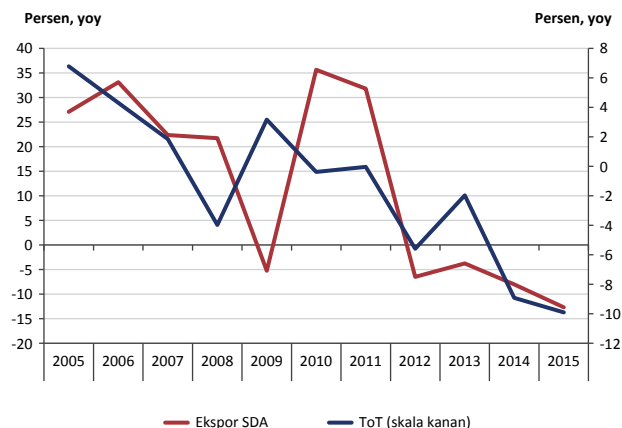
Ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi guna mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Mempertimbangkan dampak lanjutan stimulus fiskal ke sektor swasta yang masih relatif terbatas, kebijakan diarahkan untuk mendorong momentum

pertumbuhan ekonomi yang mulai bergulir. Dalam hal ini, Pemerintah akan terus melanjutkan dan mempercepat reformasi struktural yang sudah mulai berjalan. Sementara itu, Bank Indonesia akan memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter secara berhati-hati untuk memperkuat keyakinan pelaku ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan.

3.1. PDB PENGGUNAAN

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 tercatat 4,8%, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,0%. Namun indikasi pemulihan mulai terlihat di paruh kedua 2015. Perlambatan yang cukup dalam terjadi pada Semester I 2015, dan kemudian berangsur membaik pada Semester II 2015 (Tabel 3.1). Pada paruh pertama, permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi menurun cukup signifikan sejalan dengan penurunan ekspor. Penurunan konsumsi swasta pada periode tersebut turut dipengaruhi oleh *base-effect* Pemilu 2014 yang mendorong kontraksi konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR). Sementara itu, konsumsi dan investasi pemerintah juga menghadapi kendala administratif reorganisasi kementerian/lembaga (K/L). Pada paruh kedua, stimulus fiskal pemerintah mampu mendorong perbaikan ekonomi. Sejalan dengan konsumsi pemerintah yang meningkat, investasi bangunan juga naik cukup signifikan terkait realisasi belanja infrastruktur. Dampak rambatan stimulus fiskal ke sektor swasta mulai terlihat, meskipun masih terbatas. Sejalan dengan indeks kepercayaan konsumen yang mulai membaik, konsumsi rumah tangga khususnya konsumsi nonmakanan terlihat mulai sedikit meningkat pada penghujung tahun 2015. Selain itu, investasi nonbangunan juga mulai menunjukkan arah perbaikan seiring dengan perkembangan positif pada sentimen

Grafik 3.1. Terms of Trade dan Ekspor SDA



bisnis. Secara keseluruhan, permintaan domestik menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ditengah belum membaiknya kondisi eksternal.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan berlanjutnya penurunan harga komoditas pada tahun 2015 mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia. Dengan komposisi ekspor Indonesia yang masih didominasi SDA, penurunan harga komoditas global mendorong penurunan *terms of trade* (ToT) cukup dalam (Grafik 3.1). Turunnya harga komoditas mendorong kontraksi ekspor terutama yang berbasis komoditas seperti pertambangan, dengan penurunan paling tajam terjadi pada batubara. Meski demikian, kebijakan pemberian perpanjangan ijin ekspor konsentrat mineral (tembaga) sesuai dengan kemajuan pembangunan *smelter* dapat menahan penurunan ekspor lebih dalam. Sementara itu, ekspor manufaktur juga belum menunjukkan peningkatan ditengah pelemahan nilai tukar rupiah. Belum kuatnya ekspor manufaktur tidak terlepas dari rendahnya permintaan global, serta masih cukup besarnya kandungan impor dalam ekspor. Pelemahan

Tabel 3.1. Pertumbuhan PDB Penggunaan

Komponen PDB	2012	2013	2014*	2015**					Total
				I	II	III	IV	Total	
Konsumsi RT	5,49	5,43	5,16	5,01	4,97	4,95	4,92	4,96	
Konsumsi LNPR	6,68	8,18	12,19	-8,07	-7,99	6,56	8,32	-0,63	
Konsumsi Pemerintah	4,53	6,75	1,16	2,91	2,61	7,11	7,31	5,38	
PMTB	9,13	5,01	4,57	4,63	3,88	4,79	6,90	5,07	
Bangunan	8,13	6,74	5,52	5,47	4,82	6,25	8,21	6,23	
Nonbangunan	11,73	0,63	2,03	2,35	1,32	0,73	3,10	1,87	
Ekspor	1,61	4,17	1,00	-0,62	-0,01	-0,60	-6,44	-1,97	
Impor	8,00	1,86	2,19	-2,19	-6,97	-5,90	-8,05	-5,84	
PDB	6,03	5,56	5,02	4,73	4,66	4,74	5,04	4,79	

Sumber: BPS

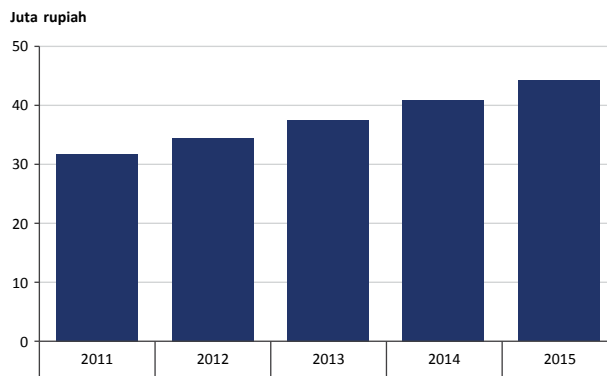
*angka sementara

**angka sangat sementara

ekspor terlihat dari penurunan ekspor ke salah satu mitra dagang utama, yakni Tiongkok, yang lebih rendah hampir 20% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama bersumber dari kontraksi ekspor berbasis komoditas yang dominan dalam struktur ekspor ke Tiongkok.¹ Namun demikian, kinerja positif ditunjukkan oleh ekspor otomotif Indonesia yang tetap menunjukkan pertumbuhan cukup baik dalam dua tahun terakhir (Tabel 3.2).

Sejalan dengan berkurangnya pendapatan yang dipicu dari penurunan ekspor, kinerja konsumsi rumah tangga (RT) juga melambat. Tren perlambatan terutama terjadi pada konsumsi yang bersifat barang sekunder dan tersier, yang tergolong dalam kelompok konsumsi nonmakanan, kendati pada akhir tahun 2015 sedikit membaik. Secara umum, konsumsi RT masih cukup solid dan lebih baik dibandingkan kondisi setelah krisis keuangan global yang hanya tumbuh sekitar 4% pada akhir 2009. Indikator makro yang mendukung cukup resiliennya kekuatan konsumsi antara lain adalah pendapatan per kapita yang berada dalam tren meningkat. Pendapatan per kapita tahun 2015 tercatat sebesar Rp45,2 juta (US\$3.377,1), meningkat dibanding pendapatan per kapita tahun sebelumnya sebesar Rp41,8 juta (Grafik 3.2). Selain itu, daya beli masyarakat yang masih cukup terjaga juga didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) riil. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP riil cukup besar yaitu mencapai di atas 7% dan pada tahun 2015 naik sekitar 8,9% (Grafik 3.3). Perkembangan kenaikan UMP tersebut menjadi referensi bagi kenaikan

Grafik 3.2. Pendapatan per Kapita



Sumber: BPS

upah di berbagai lapangan usaha, terutama untuk kategori pekerjaan formal.

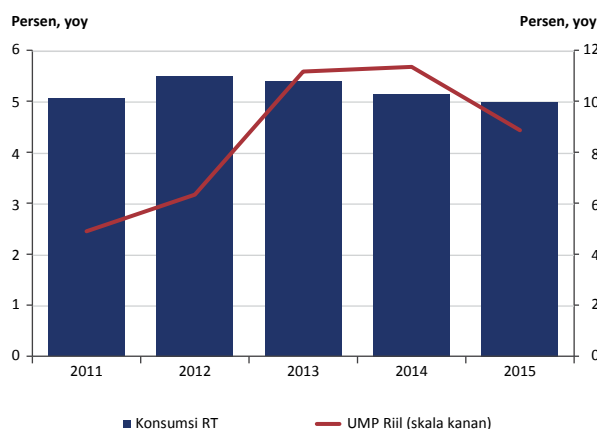
Untuk menahan perlambatan konsumsi yang lebih dalam akibat berkurangnya pendapatan yang bersumber dari SDA, konsumsi rumah tangga juga ditopang dengan pemanfaatan tabungan. Pertumbuhan simpanan oleh perseorangan dalam rupiah menunjukkan kecenderungan melambat (Grafik 3.4). Hal ini mengindikasikan upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi (*consumption smoothing*), setelah dalam beberapa periode sebelumnya individu cenderung mengakumulasi simpanan yang cukup akseleratif, terutama pada saat harga komoditas melonjak. Selain dari tabungan, penarikan uang tunai dari kartu kredit dalam satu tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan juga merupakan indikasi upaya menopang konsumsi.

Tabel 3.2. Perkembangan Ekspor Nonmigas

Komponen PDB	Jan-Des (Miliar Dollar AS)		Pertumbuhan (Persen, ytd)		Share 2014 ytd	Share 2015 ytd
	2014	2015	2014	2015		
Crude Palm Oil	20,0	17,8	8,6	-10,9	13,6	13,5
Batubara	20,8	16,0	-14,5	-23,4	14,2	12,1
Pakaian	7,7	7,6	-0,5	-1,3	5,2	5,7
Peralatan Elektronik	6,1	5,6	-1,5	-9,3	4,2	4,2
Tekstil	4,7	4,4	3,1	-7,3	3,3	3,4
Kendaraan	5,2	5,4	14,5	3,1	3,6	4,1
Karet Mentah	4,8	3,7	-30,9	-21,9	3,3	2,9
Biji Besi dan Baja	4,1	3,1	-4,0	-23,0	2,8	2,4
Suku Cadang	2,3	2,0	1,8	-13,3	1,5	1,5
Furnitur	1,8	1,7	2,4	-4,0	1,2	1,3
Plastik dan Sejenisnya	1,2	0,9	10,4	-23,1	0,8	0,7
Lainnya	68,0	63,9	-1,3	-5,3	-52,8	-50,7
TOTAL EKSPOR NONMIGAS	146,5	131,9	0,0	-8,1	1,0	1,0

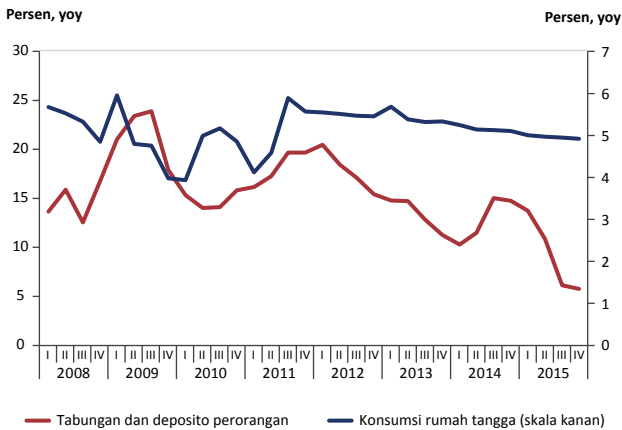
1 Pangsa ekspor komoditas Indonesia ke Tiongkok terhadap total ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 70% pada tahun 2015.

Grafik 3.3. Konsumsi Swasta dan UMP Riil



Sumber: Kemenakertrans, BPS, diolah

Grafik 3.4. Konsumsi RT dan Tabungan



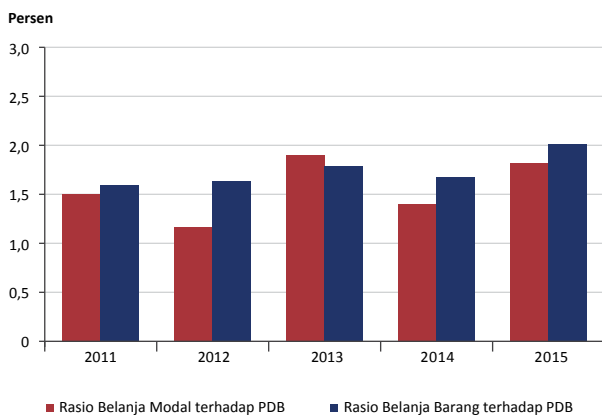
Sumber: BPS, diolah

Di tengah kecenderungan melambatnya konsumsi swasta, peran stimulus fiskal pada paruh kedua 2015 mampu menciptakan optimisme dan mendorong perbaikan ekonomi. Setelah tertahan pada paruh pertama akibat kendala perubahan beberapa nomenklatur K/L, belanja pemerintah meningkat signifikan pada semester II. Konsumsi pemerintah yang meningkat terindikasi dari belanja barang yang mencapai sekitar Rp170,5 triliun (40,9%, yoy) selama semester II, setelah di semester I hanya mencapai Rp60,1 triliun (8,1%, yoy). Selain itu, stimulus pemerintah melalui belanja modal yang naik signifikan di paruh kedua menjadi penopang kinerja investasi bangunan. Pertumbuhan belanja modal pemerintah pusat melonjak di semester II hingga mencapai Rp178,4 triliun (49,9%, yoy), setelah sebelumnya di semester I hanya mencapai Rp30,2 triliun (6,7%, yoy). Secara keseluruhan, realisasi belanja modal tahun 2015

mencapai 1,8% dari PDB (Grafik 3.5). Tingginya belanja modal tersebut terkait dengan akselerasi berbagai proyek infrastruktur pemerintah, yang merupakan salah satu agenda reformasi struktural. Di tengah lemahnya permintaan eksternal maupun swasta domestik, stimulus fiskal menjadi motor utama penggerak ekonomi yang mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi telah memberikan dampak positif pada membaiknya keyakinan pelaku ekonomi, terutama konsumen, sehingga mendorong mulai membaiknya konsumsi RT khususnya kelompok nonmakanan pada akhir 2015 (Grafik 3.6).

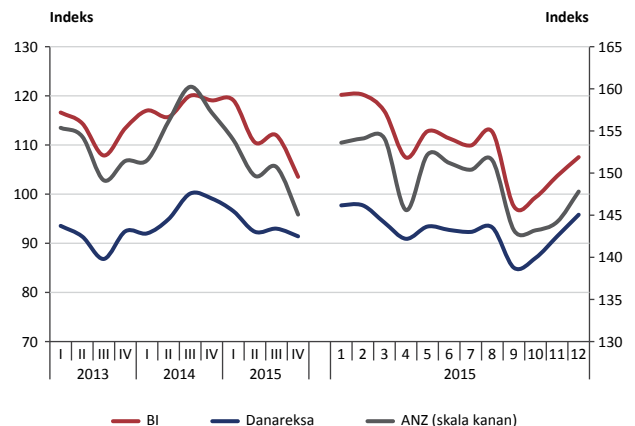
Meski minat investasi swasta pada 2015 masih lemah, pemulihan ekonomi di paruh kedua mampu mendorong optimisme terhadap perekonomian ke depan. Setelah mengalami tren perlambatan sampai dengan paruh pertama 2015, investasi mulai menunjukkan perbaikan terutama investasi bangunan yang bersumber dari pemerintah. Sementara itu, investasi nonbangunan yang dilakukan oleh sektor swasta masih tumbuh terbatas. Penurunan pendapatan terkait melemahnya permintaan baik dari ekspor maupun domestik, yang dibarengi dengan tekanan nilai tukar rupiah telah memicu potensi risiko korporasi melalui penurunan kinerja keuangan. Risiko yang meningkat terutama terjadi pada korporasi dengan kandungan impor tinggi namun berorientasi domestik dan korporasi dengan beban utang luar negeri yang tinggi. Kondisi tersebut pada gilirannya menurunkan keyakinan pelaku ekonomi dan mendorong perlambatan investasi sampai dengan triwulan III 2015. Penurunan investasi nonbangunan yang semula dipicu dari sektor primer mulai merambat pada lapangan usaha lainnya di sektor sekunder dan tersier (Grafik 3.7). Meski demikian, pada triwulan terakhir 2015, perbaikan ekonomi yang bersumber dari

Grafik 3.5. Belanja Infrastruktur dan Modal



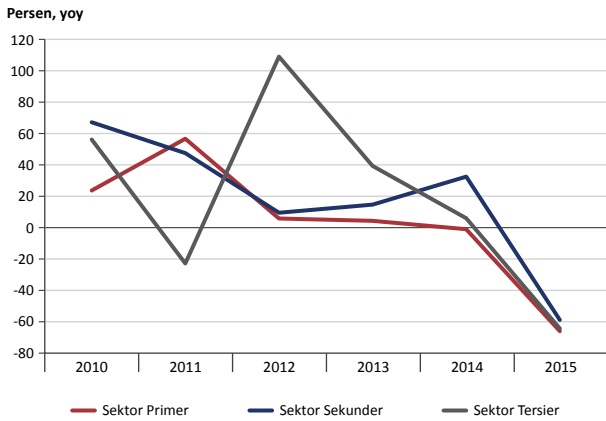
Sumber: Kemenkeu, diolah

Grafik 3.6. Indeks Kepercayaan Konsumen



Sumber: ANZ Roy Morgan, Danareksa, Bank Indonesia

Grafik 3.7. Investasi Berdasar Sektor

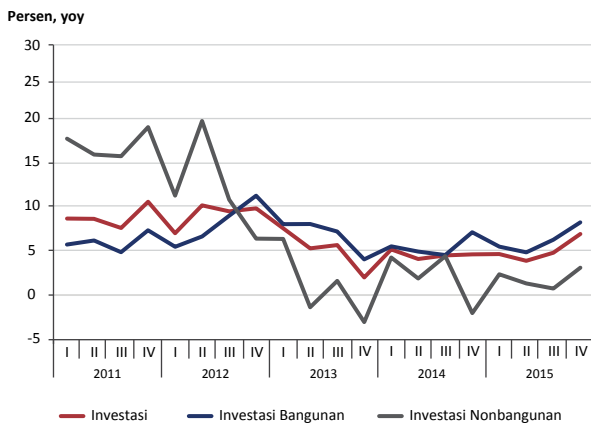


Sumber: BKPM

stimulus fiskal mampu mendorong optimisme pelaku usaha sebagaimana terlihat dari investasi nonbangunan yang mulai menunjukkan arah perbaikan (Grafik 3.8).

Tren iklim bisnis juga membaik yang ditandai dengan perbaikan peringkat Indonesia dalam *ease of doing business*, sehingga menopang prospek investasi ke depan. Peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia naik menjadi peringkat 109 pada tahun 2016 dari sebelumnya yang berada pada peringkat 120 (Tabel 3.3).² Membaiknya peringkat berinvestasi didukung oleh beberapa reformasi yang dilakukan dalam setahun terakhir. Untuk memfasilitasi kemudahan investasi, Pemerintah telah memperbaiki aspek kemudahan

Grafik 3.8. Perkembangan Investasi Riil



Sumber: BPS

2 Peringkat *Doing Business* (DB) Indonesia tahun 2015 di urutan 120 mengacu pada metodologi baru yang digunakan pada survei DB 2016. Sementara pada publikasi resmi tahun 2015 dengan metodologi lama, peringkat Indonesia adalah di urutan 114.

Tabel 3.3. Indikator Kemudahan Bisnis Indonesia

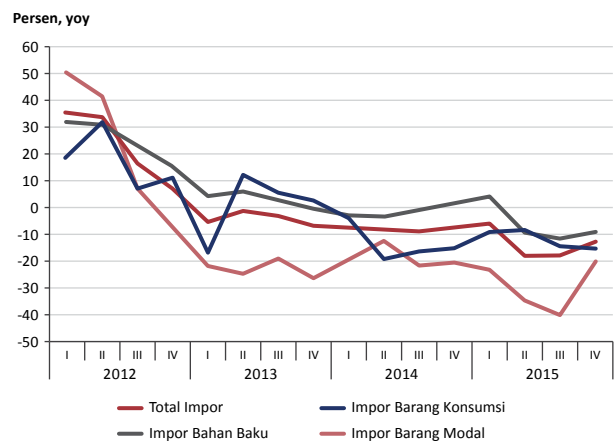
INDIKATOR	INDONESIA				
	2014	2015	2015*	2016	
Peringkat <i>Doing Business</i>	120	114	120	109	↑
Kemudahan Memulai Bisnis	175	155	163	173	↓
Pengurusan IMB	88	153	110	107	↑
Permohonan Sambungan Listrik	121	78	45	46	↓
Pendaftaran Paten dan Merek	101	117	131	131	→
Akses Kredit Perbankan	86	71	71	70	↑
Perlindungan Investor	52	43	87	88	↓
Pembayaran Pajak	137	160	160	148	↑
Perdagangan	54	62	104	105	↓
Kepatuhan terhadap Kontrak	147	172	170	170	→
Penyelesaian Kepailitan	144	75	73	77	↓

* revisi peringkat mengacu pada metodologi baru yang digunakan pada *Doing Business* 2016
Sumber: World Bank

ijin usaha, perpajakan, dan akses kredit perbankan. Perbaikan paling signifikan bersumber dari perpajakan dimana pemerintah Indonesia membuat skema pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan lebih murah. Dalam hal ini, Pemerintah memperkenalkan skema pembayaran secara *on line* untuk jaring pengaman sosial serta menurunkan batas atas pungutan pajak untuk tenaga kerja. Peringkat Indonesia dalam perpajakan naik cukup signifikan dari sebelumnya di peringkat 160 menjadi 148. Ke depan, prospek investasi Indonesia akan semakin baik sejalan dengan Paket Kebijakan Pemerintah I-VIII yang diluncurkan pada tahun 2015, dimana sebagian besar kebijakan difokuskan pada perbaikan iklim investasi disamping upaya mendorong pembangunan infrastruktur.

Kinerja impor berkontraksi sejalan dengan masih lemahnya ekspor dan melambatnya permintaan domestik. Secara

Grafik 3.9. Perkembangan Impor Nonmigas Riil



Tabel 3.4. Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha

Persen, yoy

Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**				
				I	II	III	IV	Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,59	4,20	4,24	4,01	6,86	3,34	1,57	4,02
Pertambangan dan Penggalian	3,02	2,53	0,72	-1,32	-5,20	-5,66	-7,91	-5,08
Industri Pengolahan	5,62	4,37	4,61	4,01	4,11	4,51	4,35	4,25
Pengadaan Listrik	10,06	5,23	5,57	1,73	0,76	0,56	1,81	1,21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,34	3,32	5,87	5,39	7,76	8,75	6,77	7,17
Konstruksi	6,56	6,11	6,97	6,03	5,35	6,82	8,24	6,65
Perdagangan Besar dan Eceran Serta Reparasi Mobil dan Motor	5,40	4,81	5,16	4,12	1,70	1,39	2,77	2,47
Transportasi dan Pergudangan	7,11	6,97	7,36	5,78	5,92	7,26	7,67	6,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,64	6,80	5,77	3,37	3,75	4,48	5,79	4,36
Informasi dan Komunikasi	12,28	10,39	10,10	10,09	9,66	10,74	9,74	10,06
Jasa Keuangan	9,54	8,76	4,68	8,57	2,63	10,36	12,52	8,53
Real Estat	7,41	6,54	5,00	5,26	5,03	4,78	4,25	4,82
Jasa Perusahaan	7,44	7,91	9,81	7,36	7,64	7,63	8,13	7,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,13	2,56	2,38	4,73	6,29	1,27	6,70	4,75
Jasa Pendidikan	8,22	7,44	5,55	5,03	11,71	8,08	5,32	7,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	7,97	7,96	7,96	7,14	7,48	6,33	7,44	7,10
Jasa Lainnya	5,76	6,40	8,93	7,98	8,06	8,11	8,15	8,08
Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk	15,05	21,80	5,13	16,64	27,30	36,01	46,55	31,98
Produk Domestik Bruto	6,03	5,56	5,02	4,73	4,66	4,74	5,04	4,79

Sumber: BPS

*angka sementara

**angka sangat sementara

riil, penurunan impor terjadi di semua jenis barang baik konsumsi, barang modal, dan bahan baku, dengan kontraksi terbesar pada barang modal (Grafik 3.9). Hal ini sejalan dengan rendahnya investasi khususnya investasi nonbangunan. Selain itu, dengan masih lemahnya keyakinan pelaku ekonomi maka sebagian permintaan dipenuhi dengan penggunaan stok (*inventory*), sehingga turut berkontribusi dalam penurunan impor. Namun demikian, perkembangan impor barang modal mulai membaik pada triwulan IV 2015 yang ditunjukkan oleh kontraksi yang semakin menurun.

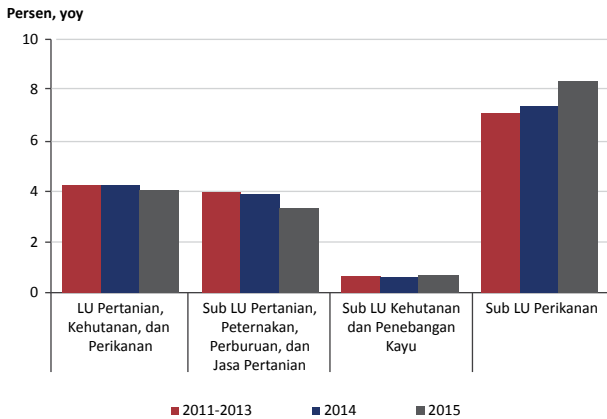
3.2. PDB PENAWARAN

Perlambatan ekonomi terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha (LU), kendati terdapat indikasi perbaikan beberapa LU pada paruh kedua 2015. Bermula dari penurunan harga komoditas global akibat pelemahan permintaan, kinerja LU berbasis komoditas yaitu: i) LU pertambangan dan penggalian dan ii) LU pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung menurun. Bahkan, LU Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi di sepanjang tahun 2015. Pada gilirannya, penurunan kinerja LU berbasis komoditas memberikan dampak rambatan pada penurunan kinerja LU lainnya. Selain akibat penurunan pendapatan, adanya keterkaitan (*backward-forward linkage*) antar LU memicu menyebarnya perlambatan. Perlambatan terlihat di sektor sekunder

terutama LU industri pengolahan. Penurunan permintaan alat berat, suku cadang, dan komponen lainnya guna mendukung sektor ekstraktif turut berkontribusi dalam perlambatan LU industri pengolahan. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja lapangan usaha pendukung seperti LU penyediaan listrik dan gas juga menurun akibat melemahnya aktivitas produksi. Perlambatan kemudian menyebar ke sektor tersier seperti LU perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor serta beberapa LU jasa. Pada Semester II 2015, stimulus fiskal melalui berbagai proyek infrastruktur mendorong perbaikan kinerja LU konstruksi. Perbaikan tersebut diikuti secara terbatas oleh membaiknya kinerja LU perdagangan, LU transportasi dan pergudangan dan beberapa LU jasa, namun masih belum merata ke seluruh LU.

Pertumbuhan LU pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan sejalan dengan lemahnya permintaan ditengah anomali cuaca *El Nino*. Penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO) berdampak negatif pada kinerja sub-LU tanaman perkebunan sehingga hanya mampu tumbuh 3,54%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Kebijakan domestik berupa pengaturan Pajak Ekspor (PE) progresif dan *mandatory* biodiesel B15 mencegah penurunan kinerja CPO lebih lanjut. Kebijakan pungutan CPO *Supporting Fund* yang dimulai pada Juli 2015 memberikan dampak positif jangka menengah terkait kegiatan penanaman ulang dan hilirisasi industri. Sementara itu, produksi tanaman pangan tumbuh

Grafik 3.10. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



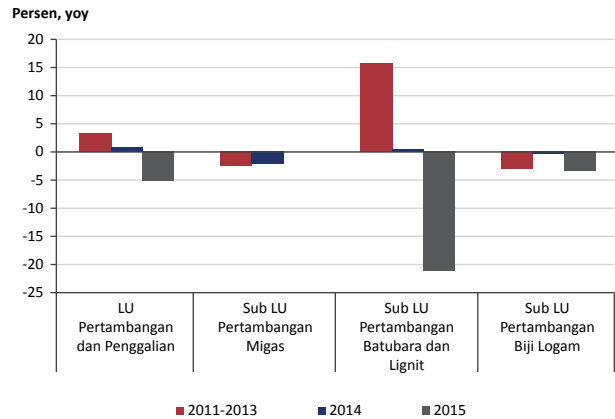
Sumber: BPS

cukup baik sehingga mencegah perlambatan lebih dalam pada sub-LU pertanian. Produksi padi, jagung, dan kedelai diperkirakan naik masing-masing 5,85%, 4,34%, dan 2,93% dibandingkan tahun sebelumnya (ARAM II). Anomali cuaca *El Nino* 2015 memberikan dampak yang relatif terbatas pada produksi tanaman pangan. Sub-LU perikanan juga membaik sejalan dengan meningkatnya hasil tangkapan ikan dan produksi ikan budidaya (Grafik 3.10).

Setelah berada dalam tren melambat sejak akhir tahun 2012, kinerja LU pertambangan berkontraksi cukup dalam pada tahun 2015. Hal ini merupakan imbas dari perlambatan ekonomi global yang menurunkan permintaan dan sekaligus mendorong turunnya harga komoditas. Kebijakan beberapa negara untuk mengurangi sumber energi dengan tingkat polutan tinggi semakin mendorong rendahnya permintaan. Harga komoditas, terutama batubara yang merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia turun sangat tajam sehingga memicu penutupan produksi pada perusahaan-perusahaan tambang kecil. Produksi batubara pada tahun 2015 hanya mencapai sekitar 380 juta ton, lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 425 juta ton maupun pencapaian tahun 2014 sebesar 458 juta ton. Hal ini terlihat pada kinerja sub-LU pertambangan batubara dan lignit yang tumbuh -20,9% (yoy) (Grafik 3.11).

Pertumbuhan sektor sekunder terutama LU industri pengolahan mengalami perlambatan. Kontraksi di LU pertambangan turut memicu penurunan kinerja industri yang mempunyai keterkaitan cukup kuat dengan pertambangan, seperti industri alat berat. Produksi alat berat turun sejalan dengan menurunnya penjualan yang hanya mencapai sepertiga dari tahun sebelumnya. Kinerja ekspor yang masih lemah dan permintaan domestik yang

Grafik 3.11. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan

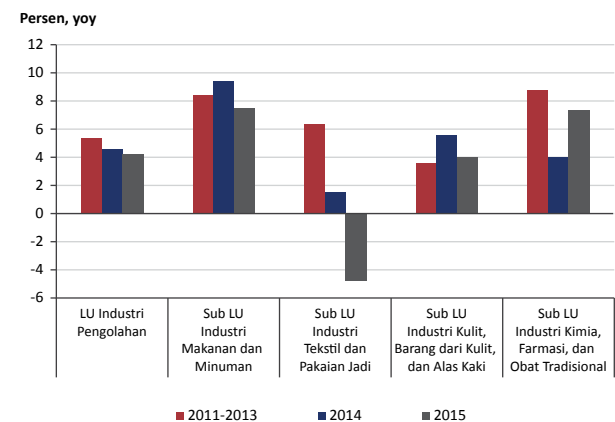


Sumber: BPS

melambat turut menekan industri pengolahan. Beberapa sub-LU yang mengalami tekanan cukup kuat adalah sub-LU tekstil dan pakaian jadi, sub-LU industri kayu dan barang dari kayu, barang kulit dan alas kaki dan sub-LU industri makanan dan minuman (Grafik 3.12).

Stimulus fiskal mendorong perbaikan kinerja terutama LU konstruksi, namun perbaikan belum merata pada lapangan usaha lainnya. Kendati secara tahunan kinerja LU konstruksi melambat, arah perbaikan terlihat pada paruh kedua 2015. Pertumbuhan LU konstruksi yang pada semester I berada di bawah 6% (yoy), selanjutnya terlihat cukup akseleratif sejak triwulan III dan IV yang masing-masing mencapai 6,8% (yoy) dan 8,2% (yoy). Namun, dampak lanjutan stimulus fiskal pada lapangan usaha lainnya masih terbatas. Perkembangan sepanjang tahun 2015 menunjukkan LU perdagangan besar dan eceran dan

Grafik 3.12. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Manufaktur



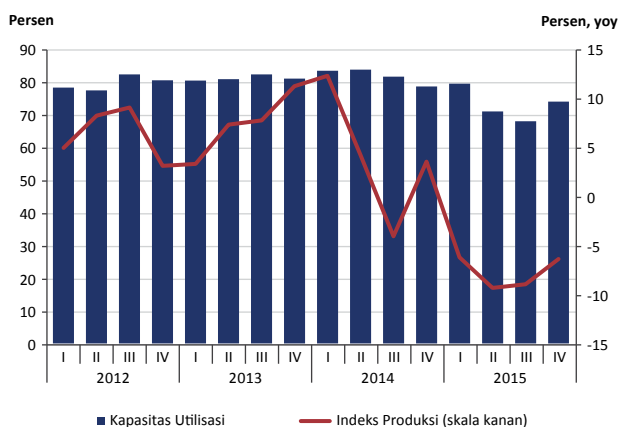
Sumber: BPS

reparasi mobil dan motor, LU penyediaan akomodasi dan makan minum, LU transportasi dan pergudangan, serta LU jasa perusahaan melambat signifikan sejalan dengan melambatnya aktivitas ekonomi. Namun demikian, pada penghujung tahun 2015 beberapa lapangan usaha mulai menunjukkan arah perbaikan yang dipicu oleh peningkatan LU konstruksi yakni LU perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor, LU transportasi dan pergudangan, dan beberapa LU jasa.

3.3. KINERJA KORPORASI DAN RUMAH TANGGA

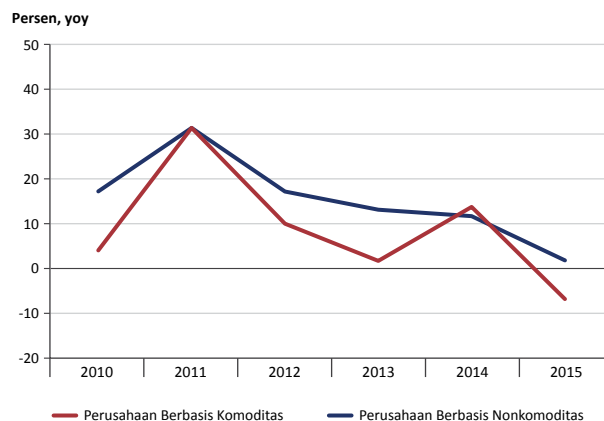
Kinerja korporasi menurun sejalan dengan perlambatan ekonomi. Melemahnya permintaan eksternal dan domestik telah mendorong berkurangnya produksi, sebagaimana tercermin pada penurunan indeks produksi dan penggunaan kapasitas utilisasi pada tahun 2015 (Grafik 3.13). Penurunan produksi tersebut berdampak pada penurunan pendapatan korporasi sebagaimana terlihat dari laporan keuangan emiten. Penurunan pendapatan terutama terlihat pada korporasi berbasis komoditas, yang juga didorong oleh berlanjutnya penurunan harga komoditas (Grafik 3.14).³ Dengan struktur ekonomi yang masih mengandalkan komoditas, menurunnya kinerja sektor komoditas mendorong pelemahan daya beli secara umum. Sebagai dampaknya, kinerja pendapatan sektor-sektor lainnya melambat, bahkan beberapa korporasi yang bergerak pada lapangan usaha industri mulai mencatat kontraksi pendapatan. Namun demikian, pendapatan korporasi terutama pada sektor konstruksi pada triwulan IV 2015 mulai meningkat.

Grafik 3.13. Kapasitas Utilisasi dan Indeks Produksi



3 Asesmen kinerja korporasi menggunakan data sebanyak 163 emiten yang terdaftar di BEI.

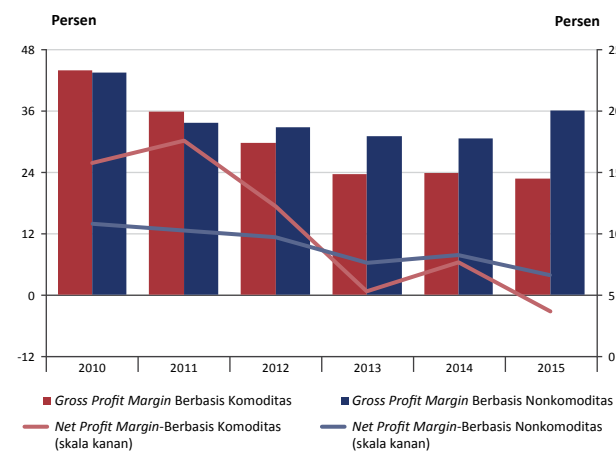
Grafik 3.14. Kinerja Pendapatan Perusahaan Publik



Sumber: Bloomberg, diolah

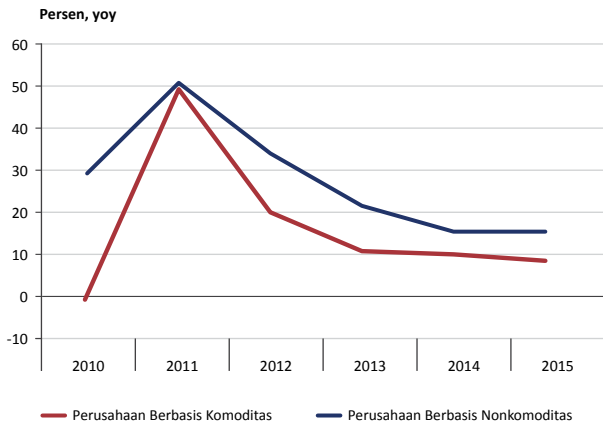
Penurunan pendapatan korporasi tidak dapat diimbangi dengan penurunan pengeluaran, sehingga mendorong turunnya laba. Penurunan pendapatan diikuti dengan penurunan biaya pokok penjualan dan biaya operasional dengan besaran yang terbatas. Selain karena penurunan volume penjualan, penurunan biaya pokok penjualan juga dipicu oleh kontraksi biaya input yakni biaya bahan baku dan energi. Untuk korporasi yang menggunakan input bahan baku impor, penurunan harga komoditas membantu mengurangi dampak tekanan biaya akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dengan penurunan biaya input, *gross profit margin* korporasi yang berbasis nonkomoditas relatif resilien. Sementara untuk korporasi berbasis komoditas, penurunan harga jual yang tajam mendorong turunnya pendapatan dan juga *gross profit margin* (Grafik 3.15). Di sisi lain, korporasi juga melakukan langkah-langkah penghematan (efisiensi) untuk menurunkan biaya

Grafik 3.15. Gross Profit Margin dan Net Profit Margin



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 3.16. Retained Earning Perusahaan Publik



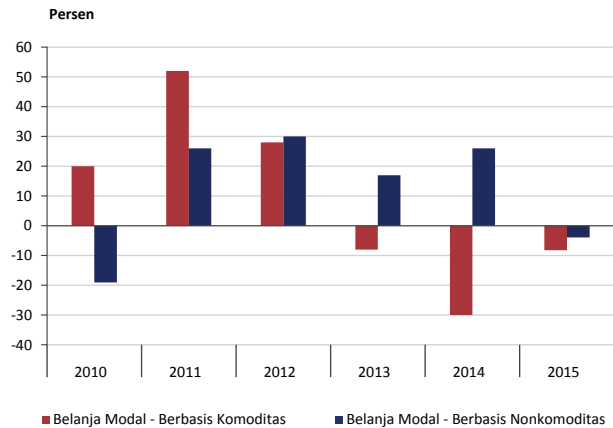
Sumber: Bloomberg, IDX, diolah

operasional. Namun, penurunan biaya operasional cenderung terbatas karena umumnya lebih bersifat tetap. Dengan kondisi tersebut, *net profit margin* melemah terutama untuk korporasi berbasis komoditas.

Penurunan laba korporasi berpotensi menahan ekspansi lebih lanjut. Penurunan laba korporasi terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi, dengan penurunan terbesar terlihat pada korporasi berbasis komoditas. Kondisi keuangan yang menurun membuat peluang investasi ke depan menjadi terbatas, sebagaimana tercermin pada posisi laba ditahan (*retained earning*) yang terus melambat sejak 2011 (Grafik 3.16). Data di level mikro juga menunjukkan proporsi *retained earning* sebagian besar korporasi pada 2015 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain kinerja keuangan yang menurun, keyakinan pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih membatasi kegiatan ekspansi usaha. Sebagian besar emiten menunjukkan realisasi belanja modal yang menurun sejalan dengan penurunan laba bersih. Laba bersih korporasi berbasis komoditas mencatat kontraksi cukup dalam, sehingga menjadi disinsentif dalam melakukan belanja modal. Sedangkan pada korporasi berbasis nonkomoditas, realisasi belanja modal secara umum juga menurun, kecuali kelompok industri dasar dan properti (Grafik 3.17). Kinerja keuangan yang menurun turut menyebabkan keyakinan pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi juga melemah. Hal ini tercermin pada perilaku korporasi dengan menurunkan posisi stok (*inventory*) dalam memenuhi permintaan (Grafik 3.18). Kendati demikian, perkembangan di penghujung tahun 2015 menunjukkan arah positif yang ditandai dengan mulai membaiknya indeks sentimen bisnis yang dibarengi dengan mulai

Grafik 3.17. Laba Bersih dan Belanja Modal

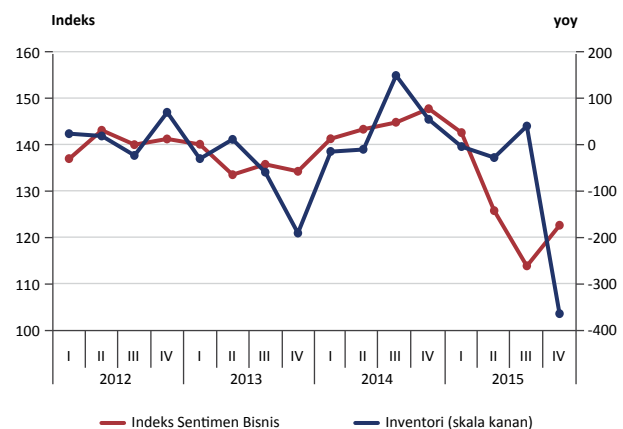


Sumber: Bloomberg, IDX, diolah

meningkatnya investasi swasta, khususnya pada mesin dan perlengkapan (Grafik 3.19).

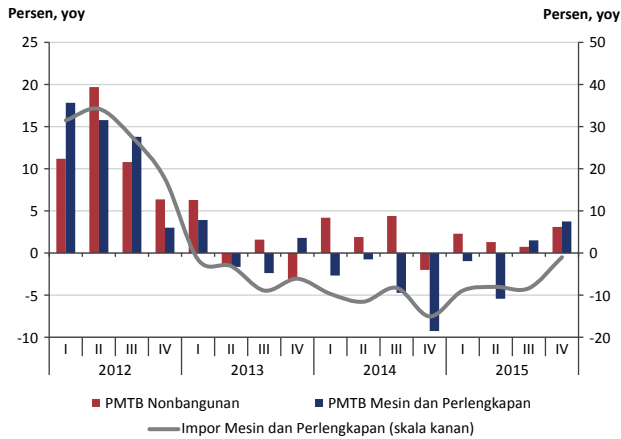
Melemahnya aktivitas produksi oleh korporasi mendorong penurunan pendapatan Rumah Tangga. Hal ini terindikasi dari indeks penghasilan konsumen yang menurun terutama pada tahun 2015 (Grafik 3.20). Penurunan pendapatan konsumen tersebut, pada gilirannya memicu rumah tangga untuk melakukan penyesuaian pada sisi konsumsi dan simpanannya. Hasil survei menunjukkan indeks konsumsi barang tahan lama turun, yang mengkonfirmasi perlambatan konsumsi RT khususnya kelompok bukan makanan. Pengeluaran konsumsi RT yang melambat signifikan terlihat pada jenis pengeluaran untuk pakaian serta perumahan dan perlengkapan RT. Sementara itu, konsumsi kelompok makanan yang merupakan kebutuhan pokok masih cukup tinggi.

Grafik 3.18. Sentimen Bisnis dan Inventori



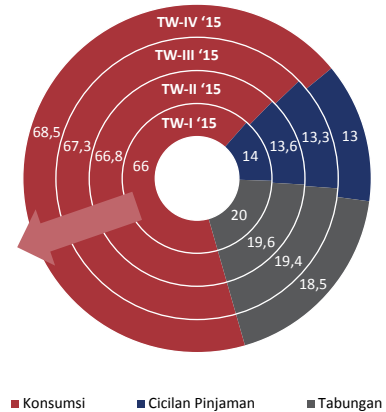
Sumber: Danareksa, BPS

Grafik 3.19. Impor Mesin dan Investasi Nonbangunan



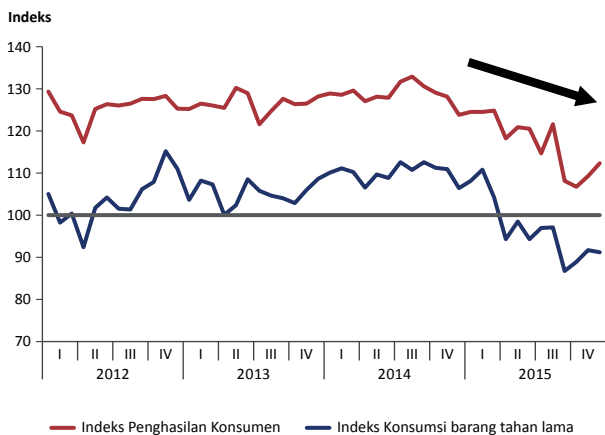
Kendati mengalami perlambatan, konsumsi RT masih cukup resilien. Perlambatan ekonomi yang berdampak pada tingkat pendapatan tidak langsung direspons RT dengan menurunkan tingkat konsumsinya. RT melakukan penyesuaian pada tabungannya untuk menjaga tingkat konsumsinya (*consumption smoothing*). Akumulasi simpanan yang sempat terakselerasi pada periode melonjaknya harga komoditas, berangsur melambat sejak tahun 2012. Pada tahun 2015, simpanan individu melambat signifikan, seiring dengan membesarnya porsi pendapatan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi (Grafik 3.21). Selain itu, keputusan rumah tangga yang cenderung mempertahankan tingkat konsumsinya tersebut juga didukung oleh optimisme terkait prospek ekspektasi ekonomi ke depan, yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi saat ini (Grafik 3.22).

Grafik 3.21. Porsi Konsumsi, Tabungan, dan Cicilan Rumah Tangga

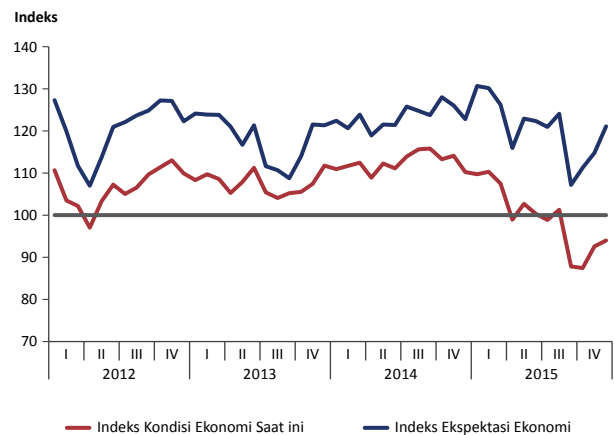


Penerimaan di luar pendapatan rumah tangga juga berkontribusi dalam menjaga ketahanan konsumsi. Hasil Survei Neraca Rumah Tangga (SNRT) Bank Indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga yang berasal dari kegiatan usaha baik produksi maupun jasa belum menutupi total kebutuhan biaya rumah tangga yang bersifat rutin maupun nonrutin (Grafik 3.23). Namun demikian, penerimaan lainnya dari pihak-pihak lain termasuk dalam hal ini transfer/bantuan dari Pemerintah membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Stimulus fiskal melalui Bantuan Sosial (Bansos) tercatat cukup tinggi sejak tahun 2013, dan pada tahun 2015 mencatatkan pertumbuhan 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 3.24). Transfer fiskal untuk perlindungan sosial tersebut antara lain berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga

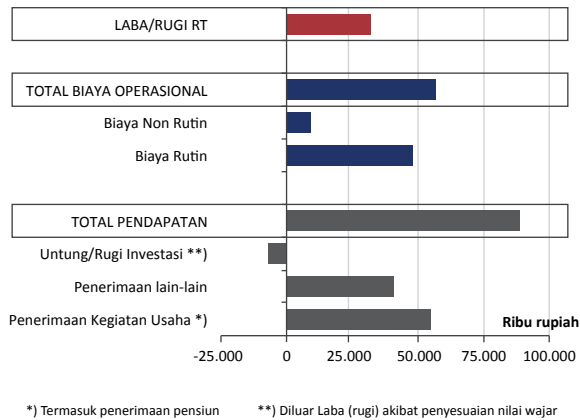
Grafik 3.20. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga



Grafik 3.22. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Indeks Ekspektasi Ekonomi



Grafik 3.23. Pendapatan Vs Biaya Operasional RT

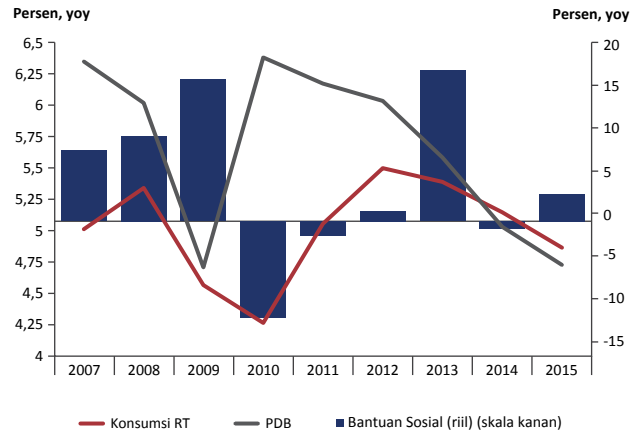


Harapan (PKH). Dengan mempertimbangkan pendapatan dari berbagai sumber, kondisi rumah tangga pada tahun 2015 secara keseluruhan masih mencatatkan surplus.

3.4. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Melambatnya perekonomian domestik telah memberikan dampak yang kurang baik pada kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2015 meningkat menjadi 6,2% dari 5,9% pada tahun sebelumnya (Tabel 3.5). Kenaikan tingkat pengangguran tercermin dari jumlah pengangguran yang meningkat menjadi 7,6 juta jiwa dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya yakni sebesar 7,5 juta jiwa. Meningkatnya pengangguran tersebut tidak terlepas dari rendahnya tambahan

Grafik 3.24. PDB, Konsumsi RT, dan Bantuan Sosial



Sumber: CEIC, diolah

penyerapan tenaga kerja dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai hampir 5%, perekonomian domestik dalam satu tahun terakhir (Agustus 2014-Agustus 2015) hanya mampu menambah serapan tenaga kerja sekitar 200 ribu orang.

Indikator perkembangan ketenagakerjaan sampai dengan akhir tahun 2015 juga menunjukkan masih cukup lemahnya penyerapan tenaga kerja. Indikator ketenagakerjaan memperlihatkan jumlah ketersediaan lapangan kerja (lowongan) berada dalam tren menurun pada tahun 2015 (Grafik 3.25).⁴ Perlambatan penyerapan tenaga kerja ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan juga menurunnya elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun waktu tahun 2010–2012, setiap 1 persen kenaikan PDB mampu

Tabel 3.5. Angkatan Kerja dan Pengangguran

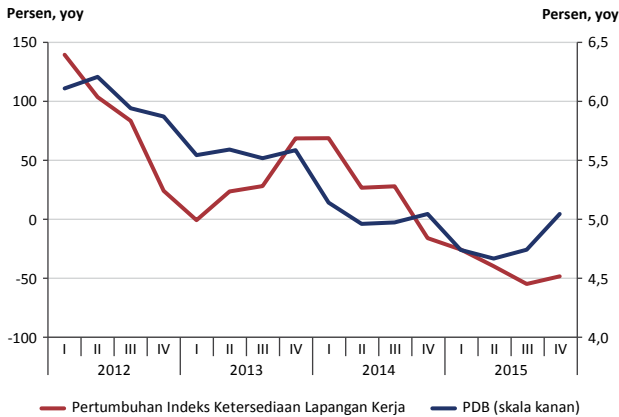
juta orang kecuali dinyatakan lain

No.	Kegiatan Utama	2013		2014		2015	
		Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
1	Penduduk Usia Produktif (15+)	178,1	180,0	181,2	183,0	184,6	186,1
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	69,2	66,8	69,2	66,6	69,5	65,8
2	Angkatan Kerja	123,2	120,2	125,3	121,9	128,3	122,4
	- Pekerja Penuh (%)	64,6	62,4	64,8	64,7	66,4	65,8
	- Pekerja Paruh Waktu (%)	18,4	22,3	21,1	21,4	20,0	20,1
	- Setengah Penganggur (%)	11,1	9,2	8,4	7,9	7,8	8,0
	- Penganggur Terbuka (%)	5,9	6,2	5,7	5,9	5,8	6,2

Sumber: BPS, diolah

⁴ Indeks ketersediaan lapangan kerja (*job vacancy*) merupakan hasil pemanfaatan Big Data oleh Bank Indonesia.

Grafik 3.25. Ketersediaan Lapangan Kerja dan PDB

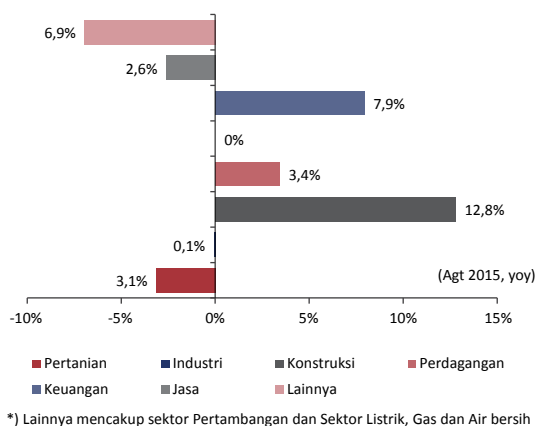


Sumber: BPS, diolah

menyerap tenaga kerja sekitar 500.000 ribu orang. Sementara dalam periode 2013-2015, setiap 1 persen kenaikan PDB hanya mampu menyerap tambahan tenaga kerja secara rata-rata di kisaran 250.000 orang.

Meski demikian, kebijakan stimulus fiskal pada tahun 2015 mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan ketenagakerjaan. Secara sektoral, tambahan penyerapan tenaga kerja terutama terjadi pada lapangan usaha (LU) konstruksi sejalan dengan kinerja investasi bangunan yang meningkat pada triwulan III-2015 terkait pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur pemerintah (Grafik 3.26). Kondisi ini dapat meredam peningkatan angka pengangguran yang lebih besar, mengingat beberapa LU terutama yang *tradable* cenderung mengalami pengurangan tenaga kerja.

Grafik 3.26. Perubahan Jumlah dan Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi

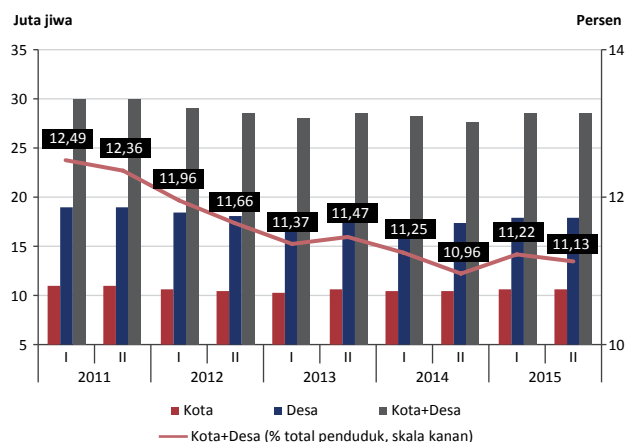


Sumber: BPS, diolah

Beberapa LU yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja, antara lain pertanian, pertambangan, dan industri sejalan dengan kinerja eksternal yang kurang kondusif. Pada LU pertambangan, penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan juga diakibatkan oleh penutupan sebagian usaha tambang terutama batubara yang berskala kecil akibat turunnya harga komoditas, sehingga tidak mampu menutupi biaya produksi. Hal yang patut dicatat adalah perkembangan positif ketenagakerjaan dari sisi kualitas. Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi tenaga kerja membaik yang ditandai dengan porsi pekerja berpendidikan SD dalam setahun terakhir menurun dari 47,1% menjadi 44,3% sebaliknya porsi pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi yakni diploma dan universitas meningkat dari 9,8% menjadi 11%.

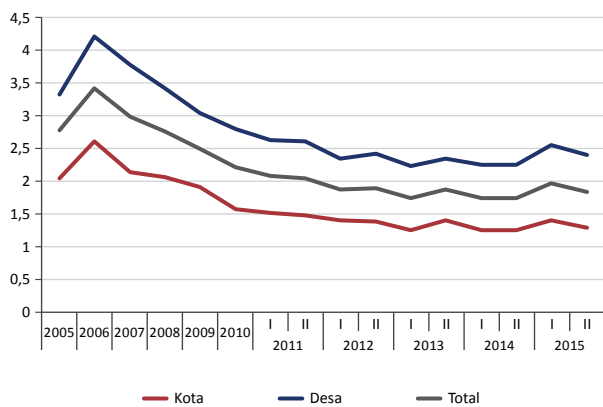
Sejalan dengan peningkatan tingkat pengangguran, kondisi kesejahteraan juga menurun. Hal ini tercermin dari jumlah dan prosentase penduduk miskin yang cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya (Grafik 3.27). Pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 28,5 juta orang (11,13%), meningkat dibandingkan September 2014 sebesar 27,7 juta orang (10,96%). Peningkatan persentase penduduk miskin tidak terlepas dari melambatnya perekonomian domestik dan tekanan kenaikan harga (inflasi). Sejalan dengan tekanan inflasi, garis kemiskinan pada September 2015 mencapai Rp344.809 per kapita per bulan atau naik 10,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada September 2014 sebesar 6,61% (yoy). Namun demikian, dinamika kesejahteraan pada tahun 2015 cenderung membaik di paruh kedua sebagaimana tercermin dari jumlah penduduk miskin pada September yang relatif menurun dibandingkan Maret. Hal ini sejalan dengan

Grafik 3.27. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS

Grafik 3.28. Indeks Kedalaman Kemiskinan

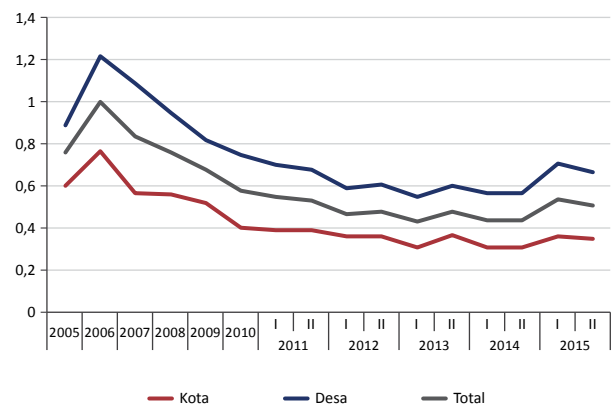


Sumber: BPS

mulai membaiknya kondisi ekonomi dan juga dukungan fiskal melalui berbagai program bantuan sosial.

Ketimpangan pendapatan juga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Indeks kedalaman kemiskinan yang mencerminkan kesenjangan antara penduduk miskin dari garis kemiskinan tahun 2015 meningkat dibandingkan rata-rata tahun 2014 (Grafik 3.28).⁵ Hal serupa juga terjadi

Grafik 3.29. Indeks Keparahan Kemiskinan



Sumber: BPS

pada indeks keparahan kemiskinan yang mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya (Grafik 3.29). Indeks tersebut mengindikasikan bahwa disparitas pengeluaran di antara penduduk miskin juga meningkat.⁶ Indikator ketimpangan lainnya yaitu koefisien *gini ratio* juga mengkonfirmasi belum membaiknya kesenjangan pendapatan yaitu masih bertahan di kisaran 0,41 dalam lima tahun terakhir.

5 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan.

6 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin tinggi ketimpangan antara penduduk miskin.



Keterangan gambar:

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan merupakan cermin kegiatan perdagangan dan merupakan salah satu komponen utama Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Meski NPI pada tahun 2015 mengalami defisit, defisit Transaksi Berjalan menurun sementara Transaksi Modal dan Finansial (TMF) juga mulai membaik sejak triwulan IV 2015.



Bab 4

Neraca Pembayaran Indonesia

Kondisi fundamental sektor eksternal Indonesia pada 2015 masih baik, didukung oleh defisit transaksi berjalan (TB) yang membaik dan transaksi modal dan finansial (TMF) yang masih surplus. Perbaikan TB tersebut didukung oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca pendapatan. Di sisi lain, TMF masih mampu mempertahankan surplus ditengah peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global. Secara keseluruhan, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2015 sedikit mengalami defisit terkait surplus TMF tidak bisa sepenuhnya membiayai defisit TB. Namun demikian, defisit NPI pada 2015 tidak terlalu besar sejalan dengan perbaikan TMF pada triwulan IV 2015 yang cukup signifikan.

Pada 2015, kinerja transaksi berjalan membaik ditengah perkembangan kondisi global yang kurang kondusif dan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara tuntas. Perbaikan transaksi berjalan tersebut terutama didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan akibat penurunan ekspor yang tidak sebesar penurunan impor. Ekspor nonmigas dan gas (nonmigas) riil Indonesia pada 2015 masih menunjukkan peningkatan yang terutama didorong oleh peningkatan volume ekspor produk pertanian. Namun, harga yang menurun tajam menyebabkan nilai ekspor nonmigas masih menurun. Pelemahan rupiah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut juga dibebani oleh harga komoditas dan harga minyak di pasar internasional yang terus turun. Akibatnya, kinerja ekspor Indonesia menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan kinerja ekspor tersebut juga sejalan dengan perkembangan *terms of trade* (ToT) Indonesia yang menunjukkan penurunan.¹

Di sisi impor, penurunan impor yang signifikan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi domestik, pelemahan nilai tukar, dan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Terkait nilai tukar, depresiasi rupiah menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga mendorong penurunan impor. Di samping itu, kebijakan pemerintah yang membatasi subsidi BBM menyebabkan kenaikan harga BBM dan berdampak terhadap penurunan konsumsi BBM domestik sehingga mengurangi kebutuhan impor minyak. Beberapa perkembangan tersebut mengakibatkan kegiatan impor barang turun lebih tajam dibandingkan dengan penurunan ekspor sehingga surplus neraca perdagangan barang pada 2015 meningkat. Penurunan impor mulai melambat pada triwulan IV 2015, seiring dengan mulai membaiknya kegiatan ekonomi domestik, sehingga mampu menahan penurunan pertumbuhan impor pada 2015.

Dari sisi jalur finansial, TMF pada 2015 masih mencatat surplus ditengah perlambatan ekonomi dunia dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kinerja TMF yang menurun signifikan sampai dengan triwulan III, mulai membaik sejak triwulan IV 2015 seiring dengan meredanya ketidakpastian global dan meningkatnya optimisme atas prospek ekonomi domestik. Hal tersebut mampu menjaga minat investor bukan penduduk untuk tetap berinvestasi jangka panjang di Indonesia dalam bentuk investasi langsung. Di samping

itu, membaiknya kondisi ekonomi pada triwulan IV dan masih menariknya imbal hasil surat berharga Indonesia mampu mendorong investor riil bukan penduduk untuk terus menanamkan modalnya pada investasi portofolio. Di sisi investasi lainnya, kombinasi berbagai kondisi yang kurang kondusif di luar negeri maupun dalam negeri mendorong arus modal keluar milik penduduk maupun bukan penduduk dan berkurangnya kebutuhan pendanaan korporasi melalui pinjaman luar negeri di semester I 2015. Pada semester II 2015, investasi lainnya berbalik menjadi surplus dan terus membaik sampai dengan akhir 2015. Dengan demikian, TMF masih mengalami surplus pada 2015 meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada 2014. Dengan penurunan surplus tersebut kemampuan pendanaan TMF menjadi berkurang sehingga tidak dapat sepenuhnya membiayai defisit transaksi berjalan. Akibatnya, NPI pada 2015 sedikit mengalami defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS (Tabel 4.1). Sejalan dengan hal tersebut, kewajiban neto Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada 2015 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 4.2).

Sejalan dengan defisit NPI pada 2015, posisi cadangan devisa menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun masih berada dalam level aman. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah, penurunan cadangan devisa juga didorong oleh penggunaan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Meski menurun, posisi cadangan devisa masih terjaga pada level 105,9 miliar dolar AS atau setara dengan 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Berkurangnya kebutuhan pendanaan dari luar negeri, yang sejalan dengan perlambatan perekonomian domestik, mendorong melambatnya pertumbuhan utang luar negeri (ULN) pada 2015. Secara level, posisi ULN pada 2015 meningkat disebabkan oleh kenaikan ULN jangka panjang, sedangkan ULN jangka pendek menurun. Jika dilihat berdasarkan profil risikonya, posisi ULN tersebut juga masih relatif aman akibat masih rendahnya pangsa ULN korporasi nonbank non-afiliasi jangka pendek sebagai ULN dengan profil risiko yang paling tinggi. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan mitigasi risiko

1 *Terms of trade* adalah rasio harga ekspor terhadap harga impor.

Tabel 4.1.

Neraca Pembayaran Indonesia

Juta dolar AS

Rincian	2014*				Total*	2015**				Total**
	I	II	III	IV		I*	II*	III*	IV**	
I. Transaksi Berjalan	-4.927	-9.585	-7.035	-5.953	-27.499	-4.159	-4.296	-4.190	-5.115	-17.761
A. Barang, neto	3.350	-375	1.560	2.448	6.983	3.063	4.125	4.141	1.953	13.281
- Ekspor	43.937	44.505	43.606	43.245	175.293	37.827	39.685	36.086	34.743	148.341
- Impor	-40.588	-44.880	-42.046	-40.797	-168.310	-34.764	-35.561	-31.945	-32.790	-135.060
1. Barang dagangan umum	2.832	-703	1.192	2.153	5.474	2.690	3.810	4.047	2.004	12.551
- Ekspor	43.414	44.171	43.232	42.944	173.760	37.450	39.366	35.728	34.397	146.941
- Impor	-40.581	-44.874	-42.039	-40.791	-168.286	-34.760	-35.557	-31.680	-32.392	-134.389
a. Nonmigas	5.581	2.475	4.326	4.922	17.304	3.947	5.932	6.158	2.987	19.024
- Ekspor	35.822	36.657	35.970	36.560	145.008	33.068	34.722	32.038	30.698	130.526
- Impor	-30.241	-34.182	-31.644	-31.638	-127.704	-29.122	-28.790	-25.880	-27.711	-111.502
b. Minyak	-6.056	-6.137	-6.037	-5.672	-23.903	-3.184	-3.658	-3.521	-2.753	-13.115
- Ekspor	3.500	3.885	3.590	2.831	13.806	1.927	2.611	1.786	1.500	7.823
- Impor	-9.556	-10.022	-9.627	-8.503	-37.709	-5.111	-6.268	-5.307	-4.253	-20.938
c. Gas	3.308	2.959	2.904	2.903	12.074	1.927	1.535	1.410	1.770	6.643
- Ekspor	4.092	3.629	3.672	3.553	14.946	2.455	2.034	1.904	2.198	8.592
- Impor	-785	-670	-768	-649	-2.873	-528	-498	-494	-429	-1.949
2. Barang Lainnya	518	328	368	295	1.509	372	315	94	-51	730
- Ekspor	524	333	374	302	1.533	376	319	358	346	1.400
- Impor	-6	-5	-6	-7	-24	-4	-4	-264	-398	-670
B. Jasa-Jasa, neto	-2.131	-2.831	-2.486	-2.561	-10.010	-1.845	-2.651	-2.151	-1.846	-8.493
C. Pendapatan Primer, neto	-7.230	-7.912	-7.313	-7.236	-29.692	-6.805	-7.195	-7.452	-6.576	-28.028
D. Pendapatan Sekunder, neto	1.085	1.534	1.204	1.397	5.220	1.428	1.426	1.272	1.354	5.479
II. Transaksi Modal dan Finansial	6.388	14.492	14.535	9.574	44.989	5.087	2.241	279	9.529	17.136
A. Transaksi Modal	1	7	3	15	27	1	0	2	14	17
B. Transaksi Finansial	6.387	14.484	14.532	9.559	44.962	5.086	2.241	277	9.516	17.120
- Aset	-5.393	-2.960	-3.786	1.353	-10.786	-8.302	-8.524	-3.787	340	-20.273
- Kewajiban	11.780	17.445	18.318	8.206	55.748	13.388	10.765	4.064	9.175	37.393
1. Investasi Langsung	2.023	4.353	5.752	2.661	14.788	1.695	3.467	1.782	2.315	9.259
a. Aset	-2.883	-2.407	-2.226	-2.871	-10.388	-3.451	-3.394	-1.345	-1.237	-9.427
b. Kewajiban	4.906	6.760	7.979	5.532	25.176	5.146	6.860	3.127	3.553	18.686
2. Investasi Portofolio	8.730	8.046	7.409	1.883	26.067	8.509	5.592	-2.218	4.825	16.707
a. Aset	465	-991	1.299	1.814	2.587	24	-737	-683	393	-1.003
b. Kewajiban	8.265	9.037	6.110	69	23.481	8.484	6.329	-1.535	4.431	17.709
3. Derivatif Finansial	-140	45	-20	-40	-156	93	-3	231	-301	20
a. Aset	239	64	11	128	441	205	229	196	37	667
b. Kewajiban	-379	-19	-32	-168	-597	-112	-232	35	-338	-647
4. Investasi Lainnya	-4.225	2.040	1.390	5.056	4.262	-5.210	-6.815	483	2.677	-8.866
a. Aset	-3.214	375	-2.871	2.283	-3.426	-5.080	-4.622	-1.955	1.148	-10.510
b. Kewajiban	-1.011	1.666	4.261	2.773	7.688	-130	-2.192	2.438	1.529	1.645
III. Total (I + II)	1.462	4.907	7.500	3.621	17.489	928	-2.055	-3.912	4.415	-624
III. Selisih Perhitungan Bersih	605	-610	-1.025	-1.211	-2.241	375	-870	-654	675	-474
IV. Neraca Keseluruhan (III + IV)	2.066	4.297	6.475	2.410	15.249	1.303	-2.925	-4.565	5.089	-1.098
VI. Cadangan Devisa dan yang Terkait	-2.066	-4.297	-6.475	-2.410	-15.249	-1.303	2.925	4.565	-5.089	1.098
Memorandum:										
- Posisi Cadangan Devisa	102.592	107.678	111.164	111.862	111.862	111.554	108.030	101.720	105.931	105.931
- Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	5,7	6,1	6,3	6,4	6,4	6,6	6,8	6,8	7,4	7,4
- Transaksi Berjalan/PDB (%)	-2,3	-4,3	-3,0	-2,7	-3,1	-2,0	-2,0	-1,9	-2,4	-2,1

* angka sementara

** angka sangat sementara

Rincian	2014*				Total*	2015**				Total**
	I	II	III	IV		I*	II*	III*	IV**	
Posisi Investasi Internasional Indonesia, neto	-367.160	-373.572	-392.390	-394.466	-394.466	-394.825	-380.044	-348.011	-380.672	-380.672
- Investasi langsung, neto	-187.974	-190.734	-203.339	-202.359	-202.359	-198.494	-196.562	-186.711	-194.672	-194.672
- Investasi portofolio, neto	-174.323	-179.939	-191.531	-192.656	-192.656	-202.455	-192.960	-163.295	-189.369	-189.369
- Derivatif finansial, neto	98	37	21	30	30	1	61	-13	91	91
- Investasi lainnya, neto	-107.554	-110.614	-108.704	-111.342	-111.342	-105.431	-98.613	-99.712	-102.653	-102.653
- Cadangan devisa	102.592	107.678	111.164	111.862	111.862	111.554	108.030	101.720	105.931	105.931

* angka sementara ** angka sangat sementara

ULN korporasi nonbank tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/21/PBI/2014 mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Perkembangan implementasi PBI ini sampai dengan akhir tahun 2015 menunjukkan terus meningkatnya upaya penerapan prinsip kehati-hatian oleh korporasi nonbank sehingga risiko ULN dapat dimitigasi dengan lebih baik.

Ke depan, defisit transaksi berjalan diperkirakan meningkat namun dalam batas aman, sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi. Kenaikan defisit transaksi berjalan terutama disebabkan oleh masih meningkatnya impor nonmigas ditengah kinerja ekspor nonmigas yang masih relatif lemah. Peningkatan permintaan dunia yang masih terbatas sejalan dengan lambatnya prospek perbaikan perekonomian global serta masih berlanjutnya koreksi harga komoditas dan minyak dunia mendorong masih relatif lemahnya kinerja ekspor. Di sisi lain, meningkatnya permintaan domestik seiring dengan membaiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia berdampak terhadap kenaikan impor nonmigas. Selain itu, upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang utamanya dilakukan pemerintah juga akan berdampak pada meningkatnya kegiatan impor, khususnya impor barang modal.

Kinerja TMF ke depan juga diperkirakan membaik dengan mencatat peningkatan surplus yang relatif signifikan, sehingga kinerja NPI secara keseluruhan diperkirakan surplus dan mendorong peningkatan cadangan devisa. Kondisi ekonomi global maupun domestik yang semakin baik dan reformasi struktural yang terus berlangsung serta dampak dari dikeluarkannya paket kebijakan pemerintah I-VIII pada 2015 diyakini mampu meningkatkan arus masuk dana investor bukan penduduk melalui investasi langsung. Aliran masuk modal asing melalui investasi portofolio juga diperkirakan masih besar seiring rencana kenaikan FFR yang diprakirakan cenderung gradual. Sejalan dengan hal

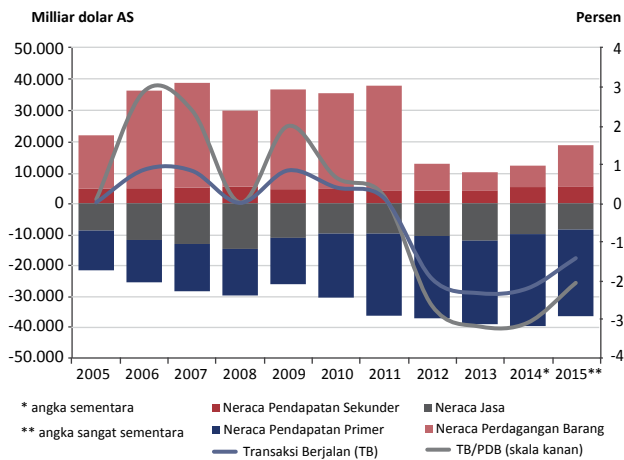
tersebut, defisit investasi lainnya diperkirakan membaik akibat meningkatnya penarikan ULN yang didorong oleh prospek perbaikan perekonomian domestik. Perbaikan surplus TMF diperkirakan melebihi defisit transaksi berjalan sehingga NPI kembali mampu mencatat surplus. Kinerja NPI diyakini akan semakin baik didukung bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah. Namun, dinamika perkembangan global akan terus diwaspadai, khususnya risiko terkait perlambatan ekonomi Tiongkok dan masih menurunnya harga komoditas, karena dapat memengaruhi kinerja NPI secara keseluruhan.

4.1. TRANSAKSI BERJALAN

Di tengah melambatnya perekonomian global, rendahnya harga komoditas, serta perlambatan perekonomian domestik, defisit transaksi berjalan pada 2015 membaik. Transaksi berjalan pada 2015 mengalami defisit 17,8 miliar dolar AS atau setara dengan 2,1% dari PDB, lebih baik dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya sebesar 27,5 miliar dolar AS atau setara dengan 3,1% dari PDB. Perbaikan kinerja transaksi berjalan tersebut ditopang oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan neraca pendapatan sekunder serta didukung pula oleh penurunan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer (Grafik 4.1).

Surplus neraca perdagangan barang pada 2015 meningkat, didukung kenaikan surplus neraca perdagangan barang nonmigas dan berkurangnya defisit neraca perdagangan barang minyak dan gas (migas). Peningkatan surplus neraca perdagangan barang nonmigas pada 2015 didorong oleh penurunan ekspor nonmigas yang tidak lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor nonmigas. Penurunan kegiatan impor nonmigas terjadi pada seluruh kelompok barang, baik barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal. Penurunan impor barang konsumsi

Grafik 4.1. Perkembangan Transaksi Berjalan



dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik sejalan dengan penurunan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya penurunan konsumsi tersebut diikuti pula oleh penurunan tingkat penjualan ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan turunnya permintaan investasi dan modal kerja. Penurunan permintaan investasi tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan impor, khususnya impor bahan baku dan barang modal. Penurunan impor nonmigas lebih lanjut didorong oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal. Sementara itu, penurunan ekspor nonmigas didorong oleh turunnya permintaan eksternal sejalan dengan perlambatan perekonomian global. Di samping itu, penurunan harga komoditas di pasar internasional yang terus berlanjut turut mendorong penurunan kinerja ekspor nonmigas. Struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam (SDA) terkena dampak yang cukup besar akibat rendahnya harga komoditas. Selain itu, tekanan terhadap ekspor juga berasal dari lebih rendahnya daya saing produk ekspor Indonesia dibandingkan dengan negara kompetitor meskipun nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi.

Defisit neraca perdagangan barang migas membaik, terutama didorong oleh penurunan impor minyak. Kebijakan reformasi energi pemerintah berhasil mengurangi kebutuhan impor minyak. Kebijakan penghapusan subsidi dan pemberian subsidi tetap BBM oleh Pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan harga BBM, berhasil menekan konsumsi BBM domestik. Penurunan konsumsi BBM juga didorong oleh berkurangnya permintaan atas kebutuhan energi sejalan dengan perlambatan perekonomian domestik. Selain itu,

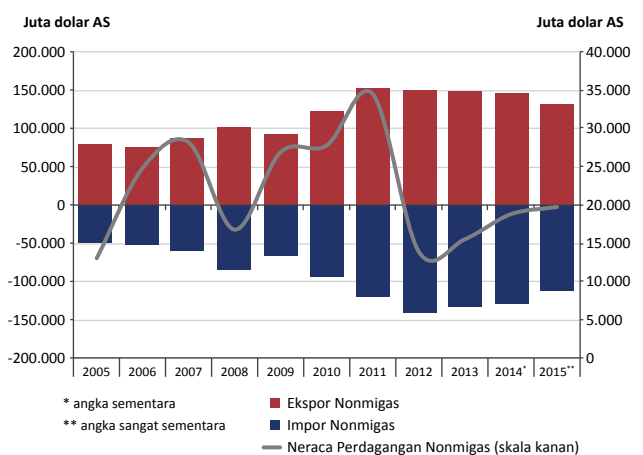
penurunan impor minyak juga disebabkan oleh harga minyak dunia yang turun signifikan sepanjang tahun 2015.

Perbaikan transaksi berjalan lebih lanjut didukung oleh perbaikan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan. Neraca jasa pada 2015 membaik dengan mencatat penurunan defisit yang didukung oleh pembayaran jasa transportasi barang yang lebih rendah serta surplus jasa perjalanan yang meningkat. Sementara itu, perbaikan neraca pendapatan bersumber dari berkurangnya defisit neraca pendapatan primer dan meningkatnya surplus neraca pendapatan sekunder. Perbaikan defisit neraca pendapatan primer terutama bersumber dari berkurangnya pembayaran dividen hasil investasi langsung, sedangkan kenaikan surplus neraca pendapatan sekunder terutama berasal dari bertambahnya remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Neraca Perdagangan Nonmigas

Neraca perdagangan nonmigas pada 2015 membaik dengan mencatat peningkatan surplus dan menjadi kontributor utama perbaikan defisit transaksi berjalan. Perbaikan tersebut melanjutkan tren peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas sejak 2013. Pada 2015, neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus sebesar 19,8 miliar dolar AS, lebih besar dibandingkan dengan surplus pada 2014 sebesar 18,8 miliar dolar AS. Peningkatan surplus tersebut didorong oleh penurunan kinerja ekspor sebesar 10,0% yang tidak lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor sebesar 12,4% (Grafik 4.2).

Grafik 4.2. Perkembangan Neraca Perdagangan Nonmigas



Pemulihan ekonomi negara maju yang belum solid serta pertumbuhan negara berkembang yang cenderung melambat mendorong penurunan permintaan eksternal terhadap produk ekspor Indonesia. Pelemahan permintaan dunia tercermin dari ekspor ke 10 negara mitra dagang utama yang mengalami penurunan, kecuali ekspor ke Filipina (Tabel 4.3). Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) berkontraksi sebesar 3,5%, meskipun perekonomian AS tumbuh moderat ditopang oleh konsumsi yang masih kuat. Ekspor produk manufaktur seperti alat listrik, makanan olahan, dan karet alam olahan yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke AS menurun. Kondisi tersebut mengindikasikan melemahnya daya saing produk ekspor Indonesia dibandingkan dengan negara kompetitor. Hal ini juga tercermin dari berkontraksinya ekspor tekstil ke AS, yang merupakan ekspor terbesar Indonesia ke AS, ditengah persaingan yang makin kompetitif dengan Vietnam dan Bangladesh.

Kinerja ekspor ke India, Jepang dan Tiongkok juga menurun. Ekspor ke India mengalami penurunan terutama pada komoditas batubara dan minyak kelapa sawit (*crude palm oil*, CPO). Meski demikian, ekspor biji tembaga dan produk barang dari logam tidak mulia masih meningkat sejalan dengan masih kuatnya pertumbuhan ekonomi India. Sementara itu, perekonomian Jepang dan Tiongkok yang masih lemah mendorong permintaan ekspor ke kedua negara tersebut juga menurun. Penurunan ekspor ke Jepang dan Tiongkok yang paling besar terjadi pada komoditas batubara. Penurunan ekspor ke Jepang juga terjadi pada produk tekstil, alat ukur, dan produk barang dari logam tidak mulia. Sedangkan penurunan ekspor ke Tiongkok juga didorong oleh penurunan ekspor kayu olahan. Namun di sisi lain, ekspor CPO dan tekstil ke Tiongkok masih meningkat.

Penurunan kinerja ekspor Indonesia terutama akibat menurunnya harga komoditas. Hal tersebut terlihat pada turunnya harga ekspor beberapa komoditas utama Indonesia di pasar internasional. Harga ekspor 10 komoditas utama Indonesia pada 2015 turun sebesar 7,1% (Tabel 4.4). Koreksi harga terbesar terjadi pada komoditas batubara dan minyak nabati (CPO). Harga ekspor batubara sepanjang 2015 turun sebesar 13,7% sehingga mendorong penurunan ekspor batubara sebesar 23,4%. Selain karena faktor harga, penurunan ekspor batubara juga didorong oleh turunnya volume sebesar 12,3%, terutama karena berkurangnya permintaan ekspor dari Tiongkok. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh melambatnya aktivitas produksi dan berkembangnya penggunaan sumber energi alternatif selain batubara untuk pembangkit tenaga listrik di Tiongkok. Selain itu, penurunan permintaan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Tiongkok untuk mengurangi penggunaan batubara dalam usaha untuk melawan polusi dan promosi penggunaan energi alternatif.

Permintaan ekspor CPO masih tinggi ditengah perlambatan perekonomian dunia dan penurunan harga di pasar internasional. Harga ekspor CPO Indonesia pada 2015 turun sebesar 18,1% sehingga mendorong ekspor CPO turun sebesar 10,7%. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan harga CPO dunia yang berdasarkan data Bank Dunia turun dari rata-rata 821 dolar AS per metrik ton pada 2014 menjadi rata-rata 623 dolar AS per metrik ton pada 2015. Namun demikian, permintaan akan minyak kelapa sawit tetap meningkat ditengah perekonomian dunia yang melambat sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan volume ekspor CPO pada 2015 sebesar 14,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan minyak nabati selalu meningkat setiap

Tabel 4.3. Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan Utama

Rincian	Pangsa (%)		Pertumbuhan Tahunan (% , yoy)									
	2014*	2015**	2014*					2015**				
			I	II	III	IV	Total	I*	II*	III*	IV**	Total**
Amerika Serikat	10,8	11,6	2,6	7,6	6,5	5,5	5,6	-1,1	-0,4	-4,8	-7,6	-3,5
Tiongkok	11,2	10,0	-2,7	-17,8	-24,8	-39,1	-22,2	-36,5	-13,1	-9,6	-13,8	-19,5
Jepang	10,0	9,9	-12,6	-11,4	-5,6	-4,8	-8,7	-5,4	-8,4	-12,9	-17,1	-11,1
India	8,3	8,8	-13,9	-16,9	19,8	-7,1	-5,6	7,3	18,1	-27,0	-14,2	-5,1
Singapura	6,7	6,5	2,3	23,4	8,1	12,5	11,6	1,7	-19,4	-9,2	-16,8	-11,4
Malaysia	4,4	4,7	-19,9	-6,8	-8,0	-7,2	-10,6	3,5	0,2	-7,3	-9,8	-3,4
Korea Selatan	3,9	4,1	-11,0	-6,5	2,9	-3,0	-4,6	0,1	0,4	-6,3	-16,8	-5,7
Thailand	3,4	3,5	-5,7	-10,4	2,8	-2,7	-4,2	-6,4	-4,0	-11,6	-10,2	-8,0
Filipina	2,7	3,0	-2,1	6,7	9,4	-0,1	3,4	-2,0	4,2	7,2	-7,2	0,8
Australia & Oceania	3,1	2,8	36,5	39,3	13,8	-15,6	15,2	-36,4	-17,0	7,4	-21,6	-17,5
Total 10 Negara	64,5	64,9	-5,1	-4,4	-1,2	-10,7	-5,5	-9,6	-4,4	-10,0	-13,5	-9,4

* angka sementara

** angka sangat sementara

Tabel 4.4.

Ekspor 10 Komoditas Utama Nonmigas

Rincian	Pangsa (%)		Pertumbuhan (% , yoy)																	
	2014*	2015**	Nominal						Riil					Indeks Harga						
			2014*	2015**				2014*	2015**				2014*	2015**						
				I*	II*	III*	IV**		Total**	I*	II*	III*		IV**	Total**	I*	II*	III*	IV**	Total**
Minyak Nabati	13,7	13,6	9,2	-12,6	6,0	-16,9	-17,9	-10,7	11,5	11,1	36,2	9,0	-1,0	14,6	-22,1	-21,2	-22,4	-23,7	-22,1	-18,1
Batubara	14,2	12,1	-14,5	-17,7	-24,9	-24,9	-26,5	-23,4	-14,3	-7,0	-12,6	-13,2	-19,9	-12,3	-12,6	-11,6	-14,1	-13,6	-12,6	-13,7
Tekstil dan Produk Tekstil	8,8	9,4	0,6	-2,6	-2,7	-5,8	-4,8	-4,0	2,1	2,0	2,9	-0,4	0,7	1,5	-5,4	-4,5	-5,5	-5,4	-5,4	-3,9
Alat Listrik, Ukur, Fotografi, dll	6,9	6,7	-5,7	-12,1	-11,8	-14,0	-14,7	-13,2	0,0	-5,9	-4,6	-7,8	-12,8	-7,5	-6,1	-6,5	-7,5	-6,9	-6,1	-2,6
Barang dari Logam tidak Mulia	6,2	5,8	5,5	-3,7	-16,1	-18,7	-24,9	-16,2	3,7	1,9	-8,5	-0,3	-5,8	-3,3	-13,4	-5,4	-8,2	-18,4	-13,4	-4,7
Makanan Olahan	4,3	4,8	17,8	3,5	-0,4	-6,9	1,4	-0,6	12,1	3,4	-0,4	4,2	13,4	5,1	-5,4	0,1	-0,1	-10,5	-5,4	0,4
Karet Olahan	4,8	4,4	-24,5	-31,7	-13,2	-6,6	-12,1	-16,8	-16,4	-23,8	-4,0	17,2	19,3	-0,2	-16,6	-10,4	-9,5	-19,8	-16,6	-9,8
Kendaraan dan Bagiannya	3,6	4,1	14,8	9,4	20,5	3,8	-16,4	3,3	12,3	3,0	14,1	1,1	-19,5	-1,4	4,8	6,2	5,5	2,7	4,8	5,9
Mesin-mesin/pesawat mekanik	4,1	3,9	6,0	-15,8	-13,4	-9,1	-23,1	-15,5	6,5	-14,8	-12,4	-8,5	-21,3	-14,3	-1,4	-1,3	-1,1	-0,6	-1,4	-0,5
Kayu Olahan	2,7	2,9	11,3	-2,2	0,4	-4,2	-3,5	-2,3	10,1	12,8	31,9	34,8	40,6	29,6	-24,6	-13,3	-23,9	-28,9	-24,6	-7,6
Total 10 Komoditas	69,3	67,6	-1,8	-11,0	-8,1	-13,6	-16,3	-12,2	-0,6	-2,6	2,9	1,4	-2,9	0,0	-12,3	-8,6	-10,6	-14,7	-12,3	-7,1

* angka sementara

** angka sangat sementara

tahun sejalan dengan bertambahnya populasi dan makin tingginya kesadaran penggunaan energi alternatif. Peningkatan volume ekspor CPO juga didorong oleh pengenaan Bea Keluar CPO sebesar nol persen. Harga rata-rata CPO global sepanjang tahun 2015 tidak pernah mencapai 700 dolar AS per metrik ton yang merupakan batas minimum pengenaan Bea Keluar. Akibatnya mayoritas produsen CPO lebih memilih mengekspor CPO secara langsung dibandingkan dengan mengekspor produk turunannya. Sejalan dengan tren penurunan harga komoditas di pasar internasional tersebut, *terms of trade* (ToT) Indonesia mengalami penurunan dari 81,6 pada Desember 2014 menjadi 73,6 pada Desember 2015.

Perlambatan perekonomian global lebih berdampak terhadap permintaan produk manufaktur dibandingkan dengan produk primer Indonesia yang lebih mengandalkan SDA. Adapun dampak perlambatan terhadap harga produk manufaktur masih lebih baik dibandingkan dengan harga produk primer. Pada 2015, volume ekspor produk manufaktur menurun sebesar

7,4%, namun volume ekspor produk primer masih tumbuh sebesar 17,5%. Pertumbuhan positif volume ekspor produk primer didukung oleh meningkatnya volume ekspor produk pertanian. CPO merupakan salah satu komoditas yang menunjang peningkatan volume ekspor tersebut. Selain itu, peningkatan volume ekspor produk pertanian juga didukung terutama oleh meningkatnya volume ekspor kopi, buah-buahan dan sayur-sayuran, serta bubur kertas. Namun demikian, penurunan harga komoditas yang terus berlangsung sepanjang 2015 menyebabkan harga ekspor produk primer turun sangat tajam dari -4,4% pada tahun 2014 menjadi -25,7%. Sementara itu, harga produk manufaktur masih tumbuh positif dari 1,9% pada tahun 2014 menjadi 0,5% (Tabel 4.5).

Harga ekspor manufaktur relatif tidak terlalu terkena dampak perlambatan ekonomi global, namun ekspor manufaktur masih diwarnai berbagai permasalahan struktural. Struktur produk manufaktur Indonesia yang masih didominasi oleh produk berbasis SDA (Grafik 4.3)

Tabel 4.5.

Ekspor Nonmigas Menurut Kelompok Barang (Berdasarkan SITC)

Rincian	Pertumbuhan Tahunan (% , yoy)									
	2014*					2015**				
	I	II	III	IV	Total	I	II*	III*	IV**	Total**
A. Produk Primer										
Nominal	-9,0	-9,4	0,8	-13,4	-8,0	-10,2	-5,7	-16,2	-18,4	-12,7
Riil	-3,4	-10,6	-0,4	0,4	-3,9	14,3	25,7	18,7	12,5	17,5
Indeks Harga	-5,8	1,4	1,2	-13,8	-4,4	-21,4	-25,0	-29,5	-27,4	-25,7
B. Produk Manufaktur										
Nominal	9,2	8,6	6,8	3,4	6,9	-4,9	-4,5	-4,9	-13,3	-6,9
Riil	10,3	8,2	3,2	-1,3	5,0	-8,0	-7,4	-4,2	-10,3	-7,4
Indeks Harga	-1,0	0,4	3,5	4,7	1,9	3,3	3,2	-0,7	-3,4	0,5
C. Lainnya										
Nominal	41,3	20,8	-24,3	-32,2	-4,9	-26,1	-17,8	-14,0	-6,8	-17,0
Riil	60,6	26,9	-23,4	-28,9	1,1	-22,2	-11,6	-2,1	1,7	-9,7
Indeks Harga	-12,0	-4,9	-1,2	-4,7	-5,9	-4,9	-6,9	-12,2	-8,4	-8,1
Total										
Nominal	-0,3	-0,9	3,0	-6,5	-1,3	-8,0	-5,3	-10,9	-15,8	-10,0
Riil	2,8	-2,6	-0,2	-2,2	-0,7	2,3	7,8	4,7	-3,4	2,8
Indeks Harga	-3,0	1,8	3,2	-4,4	-0,7	-10,0	-12,1	-14,9	-12,8	-12,4

* angka sementara

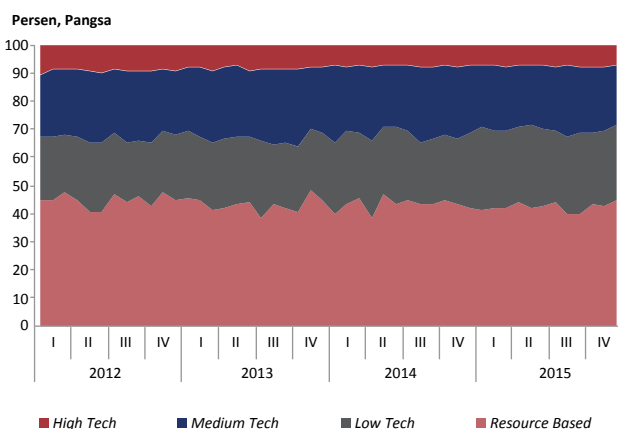
** angka sangat sementara

menyebabkan ekspor manufaktur rentan terhadap perubahan harga komoditas. Harga komoditas yang menurun, seperti yang terjadi pada 2015, memberikan tekanan terhadap ekspor manufaktur. Di samping itu, kandungan impor pada produk manufaktur Indonesia juga masih tinggi. Akibatnya, pelemahan nilai tukar tidak mampu dimanfaatkan secara optimal karena bahan baku impor harus diperoleh dengan harga yang lebih mahal. Produk manufaktur yang mengalami penurunan yang besar pada 2015 antara lain produk karet, produk pakaian jadi, dan produk kimia organik.

Ekspor produk karet Indonesia pada 2015 terkontraksi sebesar 7,0% karena penurunan harga maupun volume, namun mampu meningkatkan pangsa di beberapa negara tujuan ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut terutama terjadi untuk negara tujuan Jepang, Australia, dan Jerman. Sebaliknya, ekspor ke AS tumbuh positif pada 2015 (Tabel 4.6). Penurunan ekspor ke Jepang diawali pula dengan menurunnya pangsa pasar Indonesia selama lima tahun terakhir (2009 – 2014) ditengah meningkatnya pangsa negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. Sementara di pasar Australia, meskipun pertumbuhannya menurun di 2015, namun pangsa Indonesia masih meningkat selama tahun 2009 – 2014 (Tabel 4.7). Hal ini mengindikasikan penurunan pangsa negara pesaing seperti Jepang dan Korea Selatan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan meningkatkan pangsa. Namun, Tiongkok dan Thailand lebih optimal dalam merebut peluang untuk meningkatkan pangsa pasar tersebut. Adapun untuk pasar di AS, pangsa ekspor Indonesia meningkat dan mampu memanfaatkan penurunan pangsa Kanada dan Jepang, meskipun pangsa ekspor Tiongkok dan Thailand ke AS meningkat lebih tinggi selama tahun 2009 - 2014.

Penurunan ekspor pakaian jadi pada 2015 sebesar 1,3% disebabkan oleh turunnya volume ekspor, namun sejak triwulan III 2015 menunjukkan perbaikan (Tabel 4.8). Pangsa produk pakaian jadi Indonesia di pasar AS sebagai negara tujuan utama produk tersebut terus menurun dalam 5 tahun terakhir (Tabel 4.9). Sebaliknya, pangsa

Grafik 4.3. Komposisi Ekspor Manufaktur Indonesia



Sumber : United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Tabel 4.6. Ekspor Produk Karet Indonesia ke Beberapa Negara Tujuan Utama

Rincian	Pangsa 2015 (%)**	Pertumbuhan (% yoy)							
		2014*				2015**			
		I	II	III	IV	I*	II*	III*	IV**
Amerika Serikat	34,5	19,4	-6,6	-20,6	0,2	16,5	18,4	59,8	31,5
Jepang	9,3	-10,1	5,2	0,5	-18,7	-18,3	-24,3	-21,6	-9,8
Australia	4,3	-17,6	3,1	4,2	-12,3	21,7	-4,4	-26,6	-10,5
Jerman	4,2	-9,4	27,1	15,7	9,9	-1,6	-19,9	-6,6	-20,6
Malaysia	4,1	-35,4	-14,0	-23,1	-15,9	27,7	-16,3	-14,9	1,6

* angka sementara

** angka sangat sementara

produk sejenis dari Vietnam dan Bangladesh sebagai kompetitor utama semakin meningkat. Penurunan pangsa Indonesia tersebut dapat mengindikasikan lemahnya daya saing produk pakaian jadi Indonesia dibandingkan dengan negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Tiongkok. Persaingan produk tersebut semakin ketat untuk tujuan ekspor Eropa yang memberikan berbagai kemudahan khusus kepada eksportir dari negara-negara dengan PDB yang rendah seperti Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh. Meskipun demikian, sejak triwulan III 2015 pertumbuhan ekspor ke AS dan beberapa beberapa negara besar lainnya terlihat mulai membaik.

Ekspor produk kimia organik terus turun sejak Oktober 2014 dan berkontraksi sebesar 31,8% yang disebabkan oleh penurunan faktor harga dan volume pada tahun 2015. Penurunan yang pada awalnya terjadi untuk ekspor ke negara tujuan Tiongkok dan Jepang, saat ini telah diikuti oleh penurunan ekspor ke India dan AS (Tabel 4.10). Meskipun demikian, tren penurunan ke Tiongkok tersebut sudah semakin kecil. Selain itu,

dalam kurun waktu 2009-2014, posisi Indonesia sebagai pemasok kebutuhan kimia organik Tiongkok meningkat dari posisi ke-10 menjadi posisi ke-7 dengan peningkatan sebesar 0,9% (Tabel 4.11). Sementara pesaing terdekat, yaitu Malaysia yang pada 2009 berada di urutan ke-9 naik ke urutan ke-8 dengan pangsa yang meningkat sebesar 0,2%. Ke depan, Malaysia berpotensi semakin menggerus pangsa produk kimia Indonesia. Dari sisi harga, penurunan harga ekspor produk kimia organik sejalan dengan penurunan harga CPO sebagai salah satu bahan utama produk kimia organik. Harga minyak dunia yang terus turun hingga di bawah harga CPO menyebabkan harga bahan bakar yang berbahan baku CPO (biodiesel) menjadi tidak ekonomis. Di samping itu, pengenaan bea keluar CPO nol persen mendorong produsen CPO memilih mengeksportir CPO secara langsung sehingga industri hilir seperti produk kimia organik kesulitan bahan baku.

Di saat ekspor nonmigas mengalami kontraksi, impor nonmigas juga menurun. Impor nonmigas pada 2015 menurun sebesar 12,4%, lebih besar dibandingkan

Tabel 4.7. Pangsa Pasar Beberapa Negara Eksportir Karet di Jepang, Australia, dan AS

Pasar Jepang				Pasar Australia				Pasar Amerika Serikat			
Negara Asal	Pangsa (%)			Negara Asal	Pangsa (%)			Negara Asal	Pangsa (%)		
	2009	2014	Δ		2009	2014	Δ		2009	2014	Δ
Tiongkok	23,6	28,9	5,3 ↑	Tiongkok	17,3	22,9	5,5 ↑	Tiongkok	23,4	25,9	2,5 ↑
Thailand	16,3	15,7	-0,6 ↓	Jepang	23,3	19,2	-4,1 ↓	Kanada	18,4	12,9	-5,4 ↓
Indonesia	13,8	8,3	-5,5 ↓	Thailand	6,7	9,1	2,4 ↑	Jepang	13,8	9,9	-3,8 ↓
Korea Selatan	9,7	6,6	-3,1 ↓	Korea Selatan	5,9	3,7	-2,2 ↓	Meksiko	6,7	8,1	1,4 ↑
Amerika Serikat	7,9	6,4	-1,5 ↓	Jerman	4,0	3,6	-0,5 ↓	Korea Selatan	6,8	7,3	0,5 ↑
Vietnam	1,2	4,6	3,4 ↑	Spanyol	4,4	3,3	-1,1 ↓	Thailand	3,6	4,8	1,2 ↑
Jerman	4,6	4,5	-0,1 ↓	Indonesia	2,2	3,0	0,9 ↑	Jerman	4,5	4,5	0,0 ↑
Perancis	2,0	2,7	0,7 ↑	Malaysia	1,9	2,4	0,5 ↑	Indonesia	1,9	2,5	0,6 ↑
Filipina	1,7	2,4	0,7 ↑	India	1,5	1,7	0,2 ↑	Perancis	2,1	2,1	0,0 ↓
Spanyol	1,2	2,4	1,2 ↑	Perancis	2,2	1,5	-0,7 ↓	Chilli	0,0	1,8	1,8 ↑

Sumber: UNComtrade

Tabel 4.8.

Ekspor Produk Pakaian Indonesia ke Beberapa Negara Tujuan Utama

Rincian	Pangsa 2014 (%) [*]	Pangsa 2015 (%) ^{**}	Pertumbuhan (% , yoy)							
			2014 [*]				2015 ^{**}			
			I	II	III	IV	I [*]	II [*]	III [*]	IV ^{**}
Amerika Serikat	49,4	49,9	-6,3	-3,9	-3,1	1,6	-7,2	-0,7	5,6	1,6
Jepang	8,8	9,3	7,8	1,7	0,9	5,4	5,5	-3,3	5,5	10,1
Jerman	7,4	6,2	9,5	24,7	-5,3	-7,8	-14,5	-21,9	-15,3	-13,3
Korea Selatan	3,7	3,9	21,1	-3,5	-5,9	-4,2	-2,8	19,8	16,1	-12,0
Inggris	3,5	2,8	-3,0	10,3	-14,5	-21,7	-28,9	-25,5	-19,4	-6,8

* angka sementara

** angka sangat sementara

dengan penurunan pada 2014 sebesar 3,9%. Penurunan tersebut terjadi pada seluruh kelompok barang impor didorong baik oleh penurunan harga maupun volume. Penurunan impor barang konsumsi dipengaruhi oleh permintaan sejalan dengan penurunan konsumsi rumah tangga. Penurunan konsumsi tersebut diikuti pula oleh penurunan tingkat penjualan di tengah lemahnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap perekonomian Indonesia sehingga mendorong penurunan permintaan investasi dan modal kerja. Penurunan permintaan investasi tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan impor, khususnya impor barang modal dan bahan baku. Selain itu, pelemahan nilai tukar menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga mendorong penurunan impor nonmigas lebih lanjut.

Kontraksi impor barang konsumsi sebesar 9,9% (Tabel 4.12) dipengaruhi oleh penurunan volume impor sejalan dengan penurunan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, penurunan harga impor sejalan dengan perkembangan harga internasional yang mengalami penurunan. Penurunan impor barang konsumsi terutama

disebabkan oleh turunnya impor buah-buahan segar/dikeringkan (turun sebesar 15,7% dibandingkan dengan 2014), sayur-sayuran segar/dingin (13,6%), dan hasil olahan yang dapat dimakan (3,0%). Penurunan impor barang konsumsi lebih lanjut tertahan oleh impor obat-obatan (termasuk obat hewan) yang meningkat 5,8% dan impor senjata dan amunisi yang meningkat sebesar 9,7%.

Penurunan impor barang konsumsi dibarengi pula dengan kontraksi ekspor, sehingga mendorong penurunan permintaan impor bahan baku. Koreksi faktor harga kian mendorong pelemahan impor bahan baku hingga turun sebesar 12,3%. Kontraksi tersebut terutama berasal dari penurunan impor makanan ternak (17,0%), bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor (15,9%), hidrokarbon, halogenasi, dan sulfonasi (24,4%) serta impor bahan plastik lainnya dalam bentuk awal (17,5%). Namun demikian, impor alat penyambung atau pemutus arus listrik menahan penurunan impor bahan baku lebih lanjut dengan mencatat pertumbuhan sebesar 4,8%.

Penurunan impor barang modal sebesar 15,6% terutama disebabkan oleh turunnya permintaan seiring dengan penurunan kegiatan investasi. Faktor harga masih meningkat sebesar 12,5% sehingga menahan penurunan impor barang modal lebih lanjut. Kontributor utama penurunan impor barang modal tersebut diantaranya adalah impor pesawat telekomunikasi dan bagian-bagiannya (29,2%), mesin otomatis pengolah data dan satuannya (6,2%), dan mesin lainnya untuk industri tertentu (9,2%). Laju penurunan impor barang modal tertahan oleh naiknya impor pemanas dan pendingin dan alat-alatnya sebesar 13,2%.

Neraca Perdagangan Migas

Defisit neraca perdagangan migas pada 2015 tercatat sebesar 6,5 miliar dolar AS, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 11,8 miliar

Tabel 4.9.

Pangsa Pasar Beberapa Negara Eksportir Produk Pakaian Jadi di AS

Negara Asal	Pasar Amerika Serikat		
	Pangsa (%)		
	2009	2014	Δ
Tiongkok	39,1	38,1	-1,0 ↓
Vietnam	7,4	10,4	3,0 ↑
Indonesia	5,8	5,5	-0,2 ↓
Bangladesh	5,0	5,4	0,4 ↑
Meksiko	5,0	4,3	-0,7 ↓
India	4,3	4,1	-0,3 ↓
Honduras	3,0	2,9	-0,1 ↓
Kamboja	2,7	2,8	0,1 ↑
El Salvador	1,8	2,1	0,2 ↑
Sri Lanka	1,8	2,1	0,2 ↑

Sumber: UNComtrade

Tabel 4.10. Ekspor Produk Kimia Organik Indonesia ke Beberapa Negara Tujuan Utama

Rincian	Pangsa 2014 (%)*	Pangsa 2015 (%)**	Pertumbuhan (% yoy)							
			2014*				2015**			
			I	II	III	IV	I*	II*	III*	IV**
Tiongkok	25,4	18,7	107,9	26,7	-9,5	-48,9	-62,6	-50,4	-41,4	-35,2
Belanda	7,0	10,5	48,2	59,2	60,1	10,4	12,8	3,1	-20,8	19,3
Jepang	6,0	7,9	-28,8	-8,1	-47,8	7,0	0,4	-22,8	4,3	-18,0
India	7,2	7,9	99,4	139,1	31,2	4,2	-20,6	-18,2	-40,2	-18,0
Amerika Serikat	6,6	7,4	13,4	78,3	3,0	-10,5	-16,2	-35,7	-26,2	-12,1

* angka sementara

** angka sangat sementara

dolar AS. Perbaikan kinerja neraca migas tersebut terutama didukung oleh berkurangnya defisit neraca minyak. Kontraksi impor minyak yang lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi ekspor menyebabkan berkurangnya defisit neraca minyak sebesar 45,1%; dari defisit 23,9 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi defisit 13,1 miliar dolar AS. Harga minyak dunia yang turun sepanjang 2015 akibat melimpahnya pasokan baik dari negara OPEC maupun non-OPEC menjadi faktor utama penurunan ekspor minyak. Pada 2015, ekspor minyak berkontraksi dari 13,8 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 7,8 miliar dolar AS. Namun demikian, volume ekspor minyak justru meningkat dari 142,7 juta barel pada 2014 menjadi 155,7 juta barel. Peningkatan volume ekspor tersebut sejalan dengan peningkatan *lifting* minyak dari 788 ribu barel per hari pada 2014 menjadi 791 ribu barel per hari. Di samping itu, kebutuhan BBM domestik yang lebih rendah memberikan peluang untuk melakukan ekspor yang lebih besar.

Harga minyak dunia yang rendah menyebabkan harga impor minyak terkoreksi sebesar 42,1%. Akibat koreksi harga tersebut, impor minyak pada 2015 mengalami penurunan yang tajam dari 37,7 miliar dolar AS pada 2014 menjadi

20,9 miliar dolar AS. Selain karena koreksi harga, penurunan impor minyak juga disebabkan oleh turunnya volume impor minyak dari 356,7 juta barel pada 2014 menjadi 345,6 juta barel sejalan dengan turunnya konsumsi BBM domestik. Penurunan konsumsi BBM tersebut diakibatkan oleh perlambatan ekonomi dan reformasi energi oleh Pemerintah. Kebijakan reformasi energi pemerintah yang diterapkan sejak akhir 2014 tersebut mendorong naiknya harga BBM dan mengurangi konsumsi sehingga mendorong perbaikan defisit neraca perdagangan minyak (Grafik 4.4).

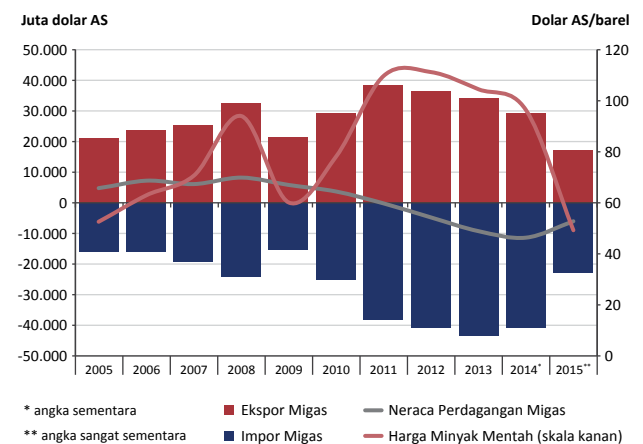
Kinerja neraca gas masih positif dengan mencatat surplus 6,6 miliar dolar AS meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada 2014 sebesar 12,1 miliar dolar AS. Surplus yang lebih rendah tersebut diakibatkan oleh kontraksi ekspor gas yang lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi impor gas. Penurunan kinerja ekspor gas sebesar 42,5% tersebut terutama bersumber dari penurunan harga ekspor gas sejalan dengan penurunan harga minyak dunia. Sementara itu, impor gas pada 2015 turun sebesar 32,2% terutama akibat turunnya faktor harga, sedangkan faktor

Tabel 4.11. Pangsa Pasar Beberapa Negara Eksportir Produk Kimia Organik di Tiongkok

Negara Asal	Pasar Amerika Serikat		
	Pangsa (%)		
	2009	2014	Δ
Korea Selatan	21,6	22,9	1,3 ↑
Jepang	17,4	13,7	-3,6 ↓
Saudi Arabia	7,5	9,7	2,2 ↑
Amerika Serikat	6,9	6,2	-0,7 ↓
Singapura	2,6	5,1	2,5 ↑
Thailand	3,3	4,1	0,8 ↑
Indonesia	1,8	2,7	0,9 ↑
Malaysia	2,1	2,3	0,2 ↑
Iran	2,3	2,3	0,0 ↓
Jerman	2,5	2,0	-0,5 ↓

Sumber: UNComtrade

Grafik 4.4. Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Harga Minyak



* angka sementara

** angka sangat sementara

Tabel 4.12. Impor Nonmigas Menurut Kelompok Barang

Rincian	Pertumbuhan Tahunan (% , yoy)									
	2014*					2015**				
	I	II	III	IV	Total	I*	II*	III*	IV**	Total**
A. Barang Konsumsi										
Nominal	4,8	-8,8	-7,6	-10,3	-6,1	-8,8	-9,3	-14,9	-6,3	-9,9
Riil	-2,6	-17,6	-14,5	-13,7	-13,1	-7,7	-7,1	-13,0	-6,1	-8,1
Indeks Harga	7,6	10,7	8,0	3,9	8,1	-1,2	-2,4	-2,2	-0,3	-1,9
B. Bahan Baku										
Nominal	-6,2	-4,8	-0,8	-1,7	-3,4	-1,7	-15,2	-17,7	-13,8	-12,3
Riil	-1,7	-2,2	0,3	2,9	-0,8	5,2	-8,0	-10,3	-6,4	-4,4
Indeks Harga	-4,7	-2,6	-1,0	-4,5	-2,7	-6,6	-7,9	-8,3	-8,0	-8,3
C. Barang Modal										
Nominal	-7,1	-0,8	-7,1	-4,0	-4,7	-8,7	-21,7	-20,6	-10,9	-15,6
Riil	-17,7	-11,0	-19,8	-19,0	-15,5	-21,5	-32,8	-29,2	-15,7	-26,3
Indeks Harga	12,8	11,6	15,8	18,5	12,8	16,3	16,5	12,2	5,7	14,5
Total										
Nominal	-5,6	-4,2	-2,9	-3,1	-3,9	-3,9	-16,3	-17,4	-11,4	-12,4
Riil	-6,1	-6,9	-7,6	-6,3	-6,6	-4,7	-16,4	-16,4	-9,1	-11,9
Indeks Harga	0,6	3,0	5,1	3,4	2,8	0,8	0,2	-1,1	-2,5	-0,5

* angka sementara

** angka sangat sementara

konsumsi gas domestik yang meningkat mampu diimbangi oleh peningkatan *lifting gas*.

Neraca Perdagangan Jasa, Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder

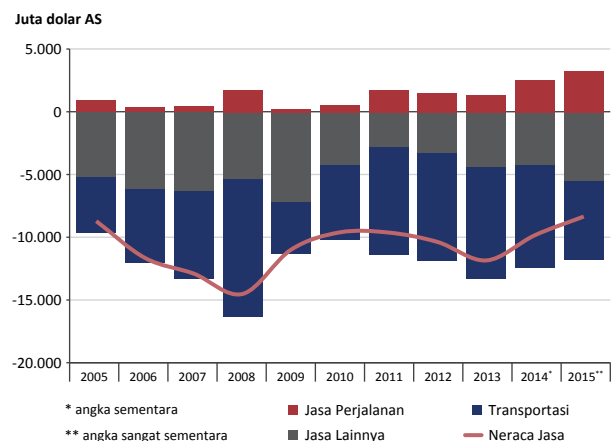
Pada 2015, kinerja neraca perdagangan jasa membaik dengan mencatat penurunan defisit sehingga mampu mendukung perbaikan transaksi berjalan. Defisit neraca perdagangan jasa menurun 15,1% dibandingkan dengan tahun 2014 terutama disebabkan oleh berkurangnya defisit jasa transportasi, khususnya *freight*, seiring dengan penurunan impor barang (Grafik 4.5). Selain itu, perbaikan neraca jasa juga ditopang oleh penerimaan jasa perjalanan yang mencatat peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Kebijakan reformasi struktural di bidang kelautan (maritim) yang telah dicanangkan pemerintah masih perlu didorong lebih jauh untuk mengatasi permasalahan persisten defisit di neraca jasa terutama jasa *freight*. Masih tinggi dan persistennya defisit mengindikasikan sangat rendahnya penggunaan jasa angkutan barang oleh kapal laut milik penduduk. Hal tersebut juga tercermin dari besarnya persentase biaya pengeluaran untuk pengangkutan barang-barang impor (*ratio freight import to import*) menggunakan moda transportasi laut yang masih berada pada kisaran 5%. Sementara itu, persentase

penerimaan untuk pengangkutan barang-barang ekspor (*ratio freight export to export*) hanya berada pada kisaran 1% (Grafik 4.6).

Dari sisi jasa, daerah tujuan wisata Indonesia masih menarik minat kunjungan wisman. Sepanjang 2015, jumlah kunjungan wisman mengalami kenaikan dari 9,5 juta orang pada 2014 menjadi 9,7 juta orang. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan pengeluaran wisman selama kunjungan di Indonesia terutama sebagai dampak dari penguatan dolar AS terhadap rupiah. Wisman asal Singapura, Australia,

Grafik 4.5. Perkembangan Neraca Jasa



* angka sementara

** angka sangat sementara

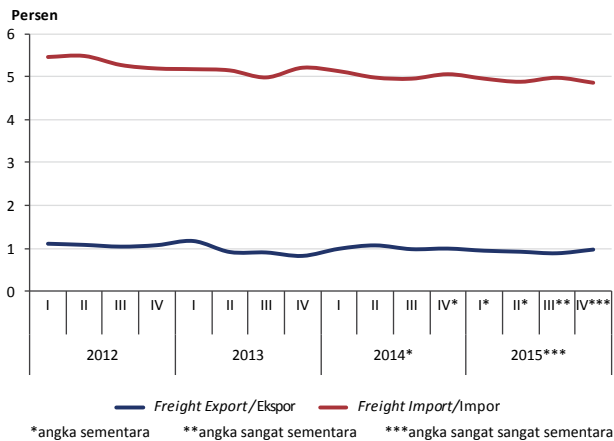
■ Jasa Perjalanan

■ Jasa Lainnya

■ Transportasi

— Neraca Jasa

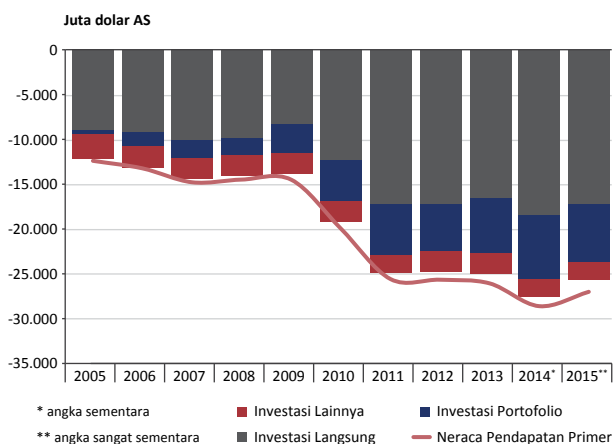
Grafik 4.6. Rasio Freight Jasa Transportasi



Malaysia, Jepang, dan Tiongkok merupakan kelompok wisman terbesar yang berkunjung ke Indonesia. Adapun tujuan favorit wisman ke Indonesia masih terkonsentrasi pada tiga daerah yaitu Bali, Jakarta, dan Batam. Dengan perkembangan tersebut, penerimaan jasa perjalanan dari wisman pada 2015 hanya naik dari 10,3 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 10,7 miliar dolar AS.

Di sisi lain, defisit neraca pendapatan primer juga membaik dari defisit 29,7 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi defisit 28,0 miliar dolar AS (Grafik 4.7). Penurunan defisit tersebut sejalan dengan berkurangnya posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) Indonesia sebagai imbas dari berkurangnya investasi bukan penduduk yang masuk ke Indonesia. Perbaikan defisit neraca pendapatan primer terutama disebabkan oleh menyusutnya pembayaran pendapatan

Grafik 4.7. Perkembangan Neraca Pendapatan Primer



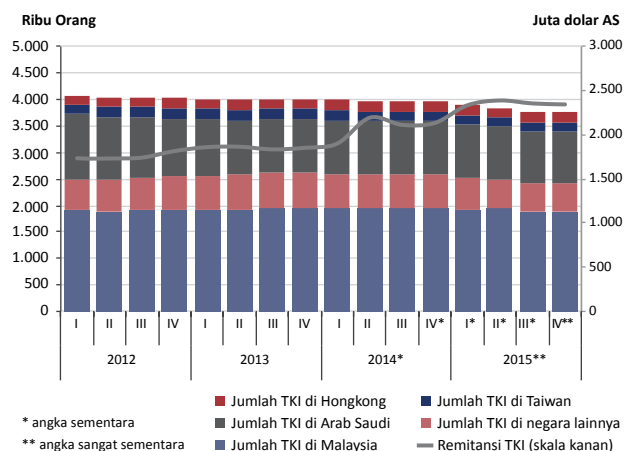
investasi langsung seiring dengan turunnya kegiatan investasi langsung pada 2015. Usaha perbaikan lebih lanjut tertahan oleh meningkatnya pembayaran bunga surat utang pemerintah seiring dengan meningkatnya posisi kewajiban investasi portofolio pemerintah.

Perbaikan kinerja transaksi berjalan juga ditopang oleh peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder. Pada 2015, surplus neraca pendapatan sekunder mengalami kenaikan dari 5,2 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 5,5 miliar dolar AS (Grafik 4.8). Peningkatan surplus tersebut terutama disumbang oleh meningkatnya penerimaan remitansi TKI di luar negeri. Meskipun jumlah TKI di 2015 menurun dari 3,9 juta orang pada 2014 menjadi 3,7 juta orang, nilai remitansi TKI meningkat dari 8,3 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi 9,4 miliar dolar AS. Kondisi tersebut ditopang oleh perbaikan rata-rata upah TKI di beberapa negara penempatan, antara lain di Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia.

4.2. TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL

Perekonomian dunia yang melambat, ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat, serta perlambatan perekonomian domestik pada 2015 menekan TMF. Namun demikian, membaiknya pertumbuhan ekonomi kembali mendorong peningkatan surplus TMF yang sangat signifikan pada triwulan IV 2015 sehingga TMF masih mencatat surplus di keseluruhan 2015. Upaya reformasi birokrasi dan iklim investasi yang mampu mendorong meningkatnya investasi domestik masih terus berlangsung. Perekonomian yang masih tumbuh positif dan bahkan mulai meningkat pada triwulan IV 2015 mampu menjaga kepercayaan investor bukan penduduk

Grafik 4.8. Perkembangan Jumlah dan Remitansi TKI



untuk tetap berinvestasi di Indonesia melalui investasi langsung. Ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat akibat belum jelasnya waktu dan besaran kenaikan FFR serta depresiasi yuan di tengah melambatnya perekonomian Tiongkok juga sempat menurunkan arus masuk modal bukan penduduk pada instrumen investasi portofolio sampai dengan triwulan III 2015. Namun demikian, menurunnya ketidakpastian kenaikan FFR, membaiknya kondisi ekonomi domestik pada akhir tahun 2015, serta imbal hasil investasi yang menarik mendorong meningkatnya kembali arus masuk modal bukan penduduk pada instrumen investasi portofolio pada triwulan IV 2015. Selain itu, investasi lainnya yang mengalami defisit akibat derasnya arus modal keluar dari sektor swasta pada semester I 2015 kembali surplus sejak triwulan III 2015 sehingga dapat menahan defisit lebih jauh di keseluruhan 2015. Kewajiban neto investasi bukan penduduk di Indonesia pada 2015 berkurang sejalan dengan surplus TMF yang lebih rendah. Kondisi tersebut tercermin pada PII Indonesia yang mengalami penurunan neto kewajiban.

Investasi Langsung

Investasi langsung bukan penduduk (sisi kewajiban) masih mencatat neto arus masuk sebesar 18,7 miliar dolar AS akibat masih terjaganya kepercayaan investor bukan penduduk terhadap prospek perekonomian Indonesia. Aliran masuk dana bukan penduduk pada investasi jangka panjang tersebut didukung oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia sepanjang 2015 yang mengindikasikan kegiatan usaha domestik masih ekspansif. Pencapaian tersebut juga sejalan dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilaporkan meningkat 17,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dampak yang relatif kuat dari perlambatan perekonomian dunia dan domestik menyebabkan arus masuk modal yang masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 26,0 miliar dolar AS.

Di sisi aset, ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat serta perekonomian dunia yang melambat mendorong penurunan investasi langsung penduduk di luar negeri. Pada 2015, investasi langsung sisi aset berkurang dari 10,4 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi 9,4 miliar dolar AS. Penurunan tersebut terutama terjadi dalam bentuk modal ekuitas, sementara investasi dalam bentuk instrumen utang masih meningkat. Dengan perkembangan tersebut, investasi langsung neto pada 2015 mencatat surplus sebesar 9,3 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan

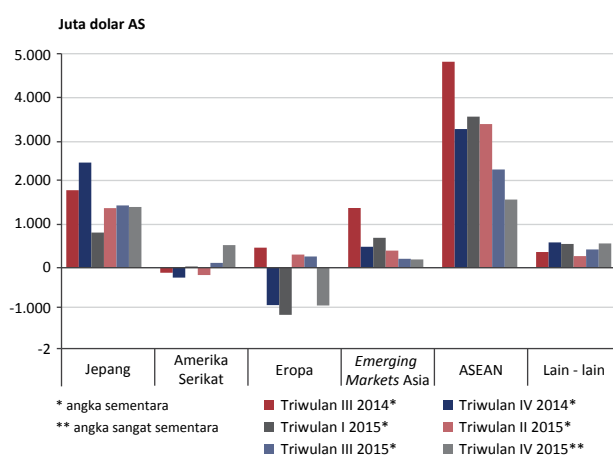
surplus pada 2014 sebesar 14,8 miliar dolar AS. Sejalan dengan pengurangan surplus investasi langsung tersebut, kewajiban neto investasi langsung pada PII Indonesia juga berkurang dari 202,4 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 194,7 miliar dolar AS.

Berdasarkan negara asal investasi, investor Penanaman Modal Asing (PMA) masih didominasi oleh Singapura, disusul investor asal Jepang (Grafik 4.9). Nilai investasi kedua negara tersebut pada 2015 mencapai 12,1 miliar dolar AS atau 84,2% dari total PMA Indonesia. Di sisi lain, negara-negara kawasan ASEAN juga masih menjadi investor utama bagi Indonesia. Hal ini tercermin dari nilai investasi negara-negara ASEAN yang mencapai 8,8 miliar dolar AS atau 61,3% dari total PMA.

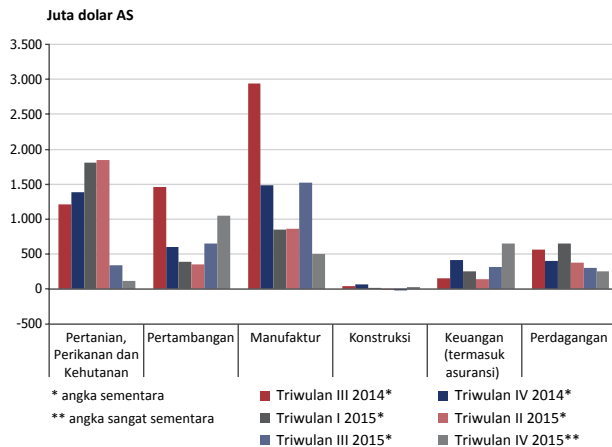
Secara sektoral, realisasi PMA pada 2015 terkonsentrasi pada lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur) serta pertanian, perikanan, dan kehutanan (Grafik 4.10). Nilai investasi pada lapangan usaha industri pengolahan mencapai 3,7 miliar dolar AS dengan investor utamanya adalah Singapura dan Jepang. Sementara lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selama ini bukan favorit para investor mulai sejak 2013 sampai 2015 menunjukkan tren peningkatan. Nilai investasi pada lapangan usaha tersebut pada 2015 sebesar 4,6 miliar dolar AS, dengan Singapura sebagai investor utamanya.

Berdasarkan sebarannya, data BKPM menunjukkan bahwa penyaluran PMA pada 2015 lebih merata di wilayah Indonesia. Pangsa realisasi investasi di luar pulau Jawa meningkat dari 43,1% pada 2014 menjadi 45,6%. PMA di luar pulau Jawa tersebut terutama terkonsentrasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara berdasarkan koridor

Grafik 4.9. Investasi Langsung Bukan Penduduk menurut Negara Investor Utama



Grafik 4.10. Investasi Langsung Bukan Penduduk menurut Sektor Ekonomi



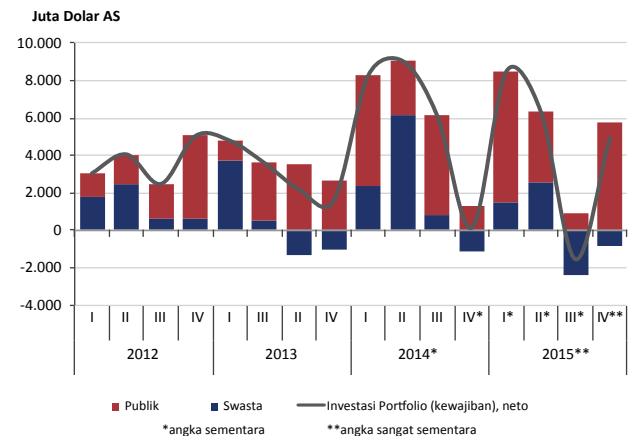
ekonominya, PMA terbesar di luar Jawa berada di koridor Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua serta Bali dan Nusa Tenggara.

Investasi Portofolio

Investasi portofolio bukan penduduk di Indonesia pada tahun 2015 masih mencatat surplus sebesar 17,7 miliar dolar AS, dengan kecenderungan yang semakin baik sejak triwulan IV 2015 (Grafik 4.11). Surplus tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya sebesar 23,5 miliar dolar AS. Perkembangan perekonomian global, seperti perlambatan ekonomi dunia dan potensi spekulasi dari ketidakpastian kenaikan FFR serta risiko keuangan global yang meningkat seiring kebijakan Bank Sentral Tiongkok yang melakukan devaluasi yuan sampai triwulan III 2015, mendorong investor untuk lebih berhati-hati ketika berinvestasi di negara berkembang. Namun demikian, imbal hasil yang menarik dan persepsi positif investor bukan penduduk terhadap perekonomian Indonesia serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2015 menyebabkan minat investor global untuk tetap berinvestasi di Indonesia masih terjaga dan bahkan meningkat di akhir 2015. Di sisi aset, investasi portofolio penduduk Indonesia ke luar negeri mencatat defisit 1,0 miliar dolar AS seiring dengan neto beli investor penduduk atas instrumen portofolio asing.

Instrumen portofolio berdenominasi rupiah masih menjadi kontributor utama aliran masuk investasi portofolio. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014, namun aliran dana bukan penduduk pada instrumen Surat

Grafik 4.11. Investasi Portofolio Bukan Penduduk di Indonesia



Utang Negara (SUN) rupiah masih mencatat neto aliran masuk sebesar 7,7 miliar dolar AS. Sementara itu, dana asing pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara neto mencatat aliran keluar sebesar 0,1 miliar dolar AS, relatif sama dengan arus keluar pada 2014. Sejalan dengan hal tersebut, posisi kepemilikan investor bukan penduduk pada SUN rupiah meningkat dari 41,6% pada akhir 2014 menjadi 42,9% pada akhir 2015, sementara posisi kepemilikan investor bukan penduduk atas SBI menurun dari 2,1% pada akhir 2014 menjadi 0,0% pada akhir 2015. Adapun di pasar saham, ketidakpastian yang meningkat di pasar keuangan global akibat isu kenaikan FFR, yang mencapai puncaknya pada triwulan III 2015, mendorong investor bukan penduduk untuk melakukan aksi jual saham. Namun demikian, net jual saham oleh asing pada triwulan IV 2015 mulai mereda sehingga transaksi saham oleh investor bukan penduduk sepanjang 2015 hanya mencatat net jual sebesar 1,5 miliar dolar AS.

Di sisi lain, investor bukan penduduk juga masih meningkatkan kepemilikannya atas surat utang pemerintah berjangka panjang, termasuk dari penerbitan obligasi dan sukuk global. Sepanjang 2015, pemerintah menerbitkan obligasi global dengan total penerbitan sebesar 8,9 miliar dolar AS yang terdiri atas penerbitan *global bond* sebesar 7,5 miliar dolar AS, *Euro Bond* sebesar 1,25 miliar euro pada Juli 2015, dan *Samurai Bond* sebesar 100 miliar yen di Agustus 2015. Di samping itu, pemerintah juga menerbitkan sukuk global senilai 2 miliar dolar AS pada Mei 2015. Dengan perkembangan tersebut, posisi neto kewajiban investasi portofolio pada PII Indonesia 2015 mencapai 189,4 miliar dolar AS, berkurang dibandingkan dengan posisinya pada 2014 sebesar 192,7 miliar dolar AS.

Investasi Lainnya

Transaksi investasi lainnya mengalami tekanan terutama pada semester I 2015 yang mencatat defisit cukup signifikan. Pada 2015, transaksi investasi lainnya mencatat defisit sebesar 8,9 miliar dolar AS, berkebalikan dengan surplus 4,3 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya (Grafik 4.12). Defisit tersebut terutama disebabkan oleh defisit investasi Indonesia lainnya ke luar negeri (sisi aset) yang meningkat dari 3,4 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 10,5 miliar dolar AS. Defisit tersebut juga didorong oleh penurunan surplus investasi lainnya milik bukan penduduk di Indonesia (sisi kewajiban) dari 7,7 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi 1,6 miliar dolar AS. Surplus investasi lainnya mulai meningkat sejak triwulan III 2015 dan terus melanjutkan tren peningkatan surplus baik di sisi aset maupun kewajiban pada triwulan IV 2015. Dengan perkembangan tersebut, transaksi investasi lainnya tidak mengalami defisit yang lebih dalam serta menurunnya posisi neto kewajiban investasi lainnya pada PII Indonesia dari 111,3 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 102,7 miliar dolar AS pada 2015.

Berdasarkan sektor institusinya, defisit investasi lainnya pada tahun 2015 terutama bersumber dari sektor swasta sebesar 8,4 miliar dolar AS, berkebalikan dengan kondisi pada tahun sebelumnya dimana sektor swasta mengalami surplus 8,5 miliar dolar AS. Defisit sektor swasta tersebut disebabkan oleh peningkatan penempatan aset penduduk di luar negeri dari defisit 3,4 miliar dolar AS pada 2014 menjadi defisit 10,5 miliar dolar AS. Peningkatan aset tersebut terutama dalam bentuk kenaikan simpanan sektor swasta di perbankan luar negeri. Selain karena peningkatan aset, defisit investasi lainnya sektor swasta juga disumbang oleh penurunan surplus di sisi kewajiban

dari 11,9 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi 2,1 miliar dolar AS. Penurunan surplus tersebut terutama bersumber dari penurunan penarikan ULN swasta non-afiliasi sejalan dengan perlambatan perekonomian domestik. Sumber lain penurunan surplus tersebut adalah berkurangnya simpanan bukan penduduk di perbankan domestik.

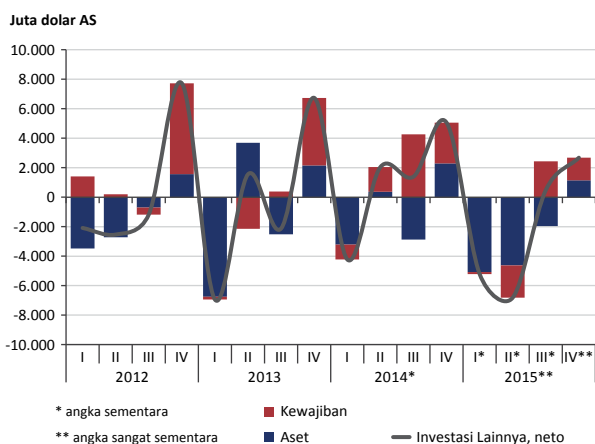
Defisit lebih lanjut dari investasi lainnya tertahan oleh perbaikan defisit investasi lainnya di sektor publik. Investasi lainnya sektor publik pada 2015 mengalami defisit 0,5 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya yang mencapai 4,2 miliar dolar AS. Perbaikan defisit tersebut didorong oleh peningkatan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah sebagai sumber pembiayaan defisit fiskal. Penarikan ULN pemerintah mengalami peningkatan dari 4,0 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 4,8 miliar dolar AS yang sebagian besar berupa pinjaman program. Sementara itu, pembayaran ULN pemerintah justru sedikit berkurang dari 5,3 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi 4,9 miliar dolar AS.

Utang Luar Negeri

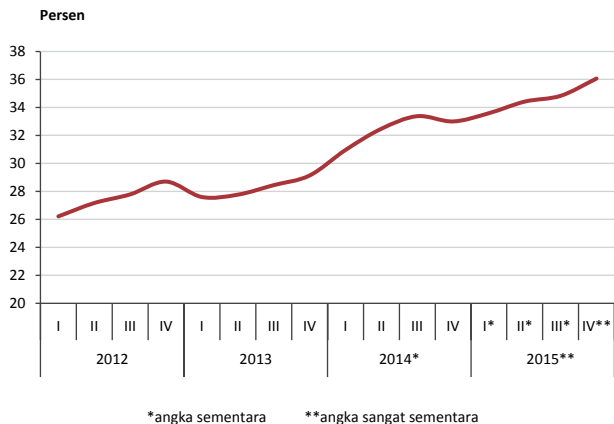
Berdasarkan jangka waktu, posisi ULN Indonesia pada 2015 meningkat akibat meningkatnya ULN jangka panjang, baik di sektor publik maupun swasta. Sementara itu, ULN jangka pendek di sektor publik maupun swasta mengalami penurunan ditengah perlambatan kegiatan ekonomi domestik. Struktur posisi ULN tersebut menunjukkan perkembangan yang sehat sebagaimana tercermin dari dominasi posisi ULN jangka panjang dibandingkan dengan posisi ULN jangka pendek baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN tersebut meningkat dari 293,8 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 310,7 miliar dolar AS. Sejalan dengan peningkatan posisi ULN yang disertai dengan perlambatan pertumbuhan PDB, rasio posisi ULN terhadap PDB pada 2015 meningkat dari 33,0% pada 2014 menjadi 36,1%. Rasio tersebut masih relatif aman dan berada dalam kisaran negara *peer group* (Grafik 4.13 dan Grafik 4.14). Selain itu, seiring dengan melambatnya perekonomian Indonesia, pertumbuhan ULN Indonesia pada 2015 melambat dari 10,4% pada tahun sebelumnya menjadi 5,8%.

Posisi ULN pada 2015 masih didominasi oleh sektor swasta dengan pangsa sebesar 54,0% dari total posisi ULN dan sebagian besar merupakan ULN jangka panjang (pangsa 72,5% dari total posisi ULN swasta). Posisi ULN sektor swasta sampai akhir 2015 mencapai 167,7 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada 2014

Grafik 4.12. Perkembangan Investasi Lainnya



Grafik 4.13. Rasio ULN terhadap PDB Indonesia



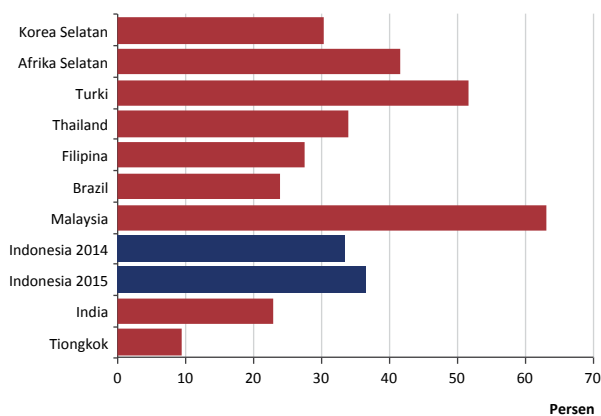
yang mencapai 164,0 miliar dolar AS akibat kenaikan ULN jangka panjang. Posisi tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan dari 15,1% pada tahun sebelumnya menjadi 2,2%. Pertumbuhan posisi ULN sektor swasta yang melambat terutama disebabkan oleh melambatnya perjanjian pinjaman (*loan agreement*) dan surat utang sejalan dengan berkurangnya kebutuhan pendanaan akibat melambatnya perekonomian domestik.

Posisi ULN sektor publik (pangsa 46,0% dari total posisi ULN) mencatat peningkatan pertumbuhan dari 5,0% pada 2014 menjadi 10,2% akibat meningkatnya ULN jangka panjang (pangsa 93,4% dari total posisi ULN publik) ditengah upaya percepatan pembangunan ekonomi oleh Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, posisi ULN sektor publik meningkat dari 129,7 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 143,0 miliar dolar AS (Grafik 4.15). Peningkatan

posisi tersebut terutama berasal dari kenaikan kepemilikan investor bukan penduduk atas surat berharga negara sejalan dengan masih derasnya arus masuk modal asing pada investasi portofolio serta penerbitan obligasi dan sukuk global yang lebih tinggi. Posisi ULN Pemerintah dalam bentuk surat berharga negara meningkat 19,5% dibandingkan dengan posisi pada 2014 Sementara itu, kebutuhan pemerintah dalam membiayai defisit APBN dan proyek-proyek pemerintah mendorong pemerintah melakukan penarikan pinjaman luar negeri yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2014. Akibatnya posisi ULN pemerintah dalam bentuk perjanjian pinjaman juga meningkat dari 53,9 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 54,2 miliar dolar AS atau hanya meningkat 0,6% dibandingkan posisi pada 2014.

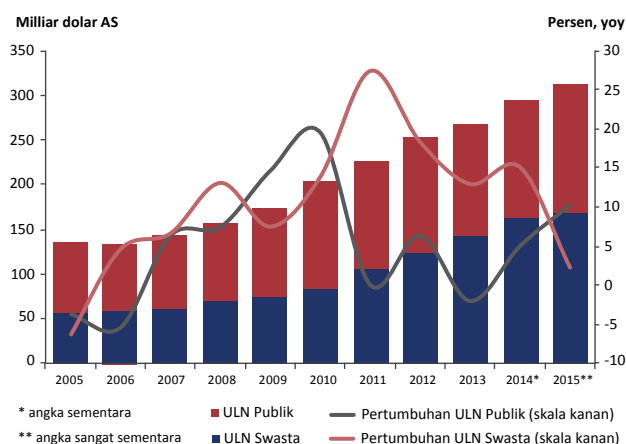
Berdasarkan jangka waktu sisa, perlambatan pertumbuhan posisi ULN bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN jangka panjang dan penurunan posisi ULN jangka pendek (Grafik 4.16). Posisi ULN jangka panjang pada akhir 2015 tumbuh 8,8%, melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 11,8%. Sementara itu, ULN jangka pendek turun sebesar 6,3%, berkebalikan dengan pertumbuhan positif pada akhir tahun 2014 sebesar 5,3%. Struktur posisi ULN Indonesia tersebut juga menunjukkan perkembangan yang lebih sehat sebagaimana tercermin dari dominasi posisi ULN jangka panjang dibandingkan dengan posisi ULN jangka pendek baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Rasio posisi ULN jangka pendek terhadap posisi ULN jangka panjang pada 2015 tercatat sebesar 21,8% lebih baik dibandingkan dengan rasio pada 2014 sebesar 25,3%. Berdasarkan kelompok meminjamnya, perbaikan rasio tersebut bersumber baik dari sektor publik maupun swasta. Untuk sektor publik, rasio posisi ULN jangka

Grafik 4.14. Rasio ULN terhadap PDB untuk negara *peer group*

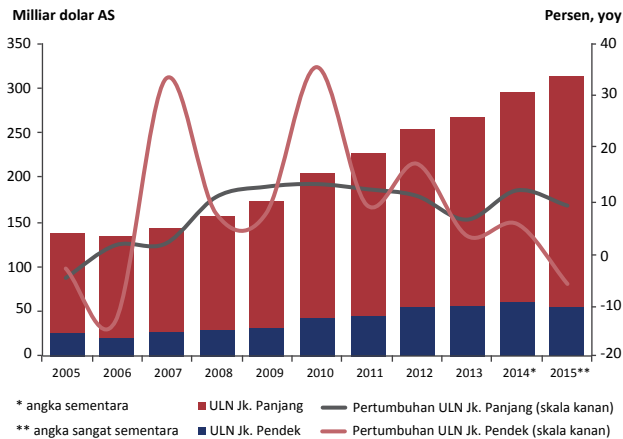


Sumber: Bank Dunia, data 2014

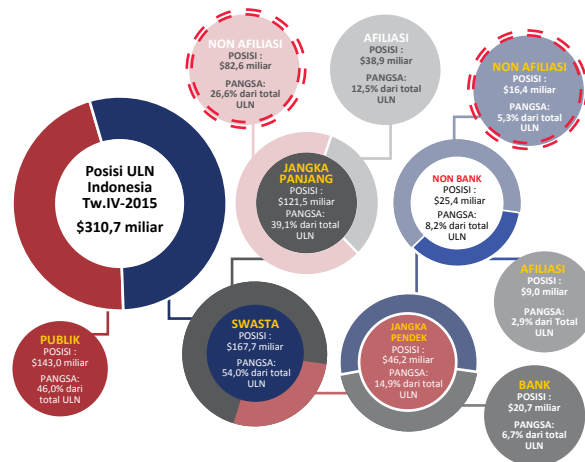
Grafik 4.15. Perkembangan Posisi ULN Indonesia Menurut Kelompok Peminjam



Grafik 4.16. Perkembangan ULN Indonesia Menurut Jangka Waktu Sisa (Remaining Maturity)



Grafik 4.17. Komposisi ULN Indonesia*



*Posisi ULN berdasarkan waktu sisa (remaining maturity)

pendek terhadap posisi ULN jangka panjang membaik dari 8,7% pada 2014 menjadi 7,0%. Sementara untuk sektor swasta, rasio yang sama membaik dari 42,5% pada 2014 menjadi 38,0%.

Berdasarkan profil risikonya, ULN swasta didominasi oleh ULN jangka panjang yang memiliki profil risiko yang relatif rendah. Selain itu, posisi ULN swasta yang berasal dari afiliasi juga cukup besar. Posisi ULN dari afiliasi tersebut relatif lebih aman karena utang yang ditarik biasanya diperoleh dari induk perusahaannya sehingga posisi utangnya lebih terjamin. Pada Desember 2015, posisi ULN swasta jangka panjang sebesar 77,7% dari total posisi ULN swasta. Adapun ULN swasta yang berasal dari afiliasi (baik jangka panjang maupun jangka pendek) tercatat sebesar 50,1 miliar dolar AS atau sebesar 33,7% dari total posisi ULN swasta.

Profil risiko ULN swasta paling besar berada pada utang nonbank non-afiliasi yang berjangka pendek yang porsinya pada akhir 2015 relatif kecil. Pada Desember 2015, posisi ULN korporasi nonbank non-afiliasi yang berjangka pendek tersebut sebesar 16,4 miliar dolar AS atau hanya 9,8% dari total ULN swasta atau hanya 5,3% dari total ULN (Grafik 4.17). Guna memitigasi berbagai risiko -seperti risiko nilai tukar, likuiditas dan beban utang yang berlebihan- yang timbul dari ULN, khususnya korporasi nonbank, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Lebih lanjut, guna memonitor pelaksanaannya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan lanjutan dengan No. 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Dalam hal ini, setiap korporasi di Indonesia yang memiliki ULN dalam valuta asing sesuai yang dipersyaratkan wajib melakukan transaksi lindung nilai dengan besaran tertentu. Selain itu, korporasi tersebut juga harus menyediakan aset valuta asing yang memadai terhadap kewajiban valuta asingnya yang jatuh tempo dengan rasio tertentu serta wajib memenuhi minimum peringkat utang sesuai ketentuan. Sampai dengan akhir 2015, implementasi PBI ini menunjukkan upaya penerapan prinsip kehati-hatian oleh korporasi nonbank terus meningkat sehingga risiko ULN dapat dimitigasi dengan lebih baik.²

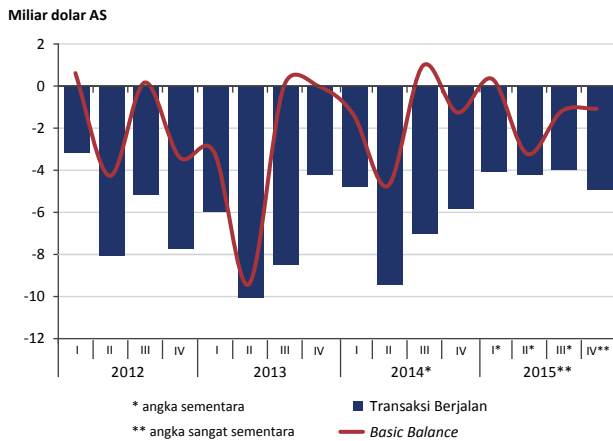
4.3. KETAHANAN EKSTERNAL

Secara keseluruhan, indikator ketahanan eksternal pada 2015 masih berada pada kondisi yang sehat. Pada 2015, kemampuan sumber pembiayaan jangka panjang dalam menopang defisit transaksi berjalan membaik seiring dengan pencapaian surplus TMF dan penurunan defisit transaksi berjalan. Hal tersebut tercermin dalam perkembangan *basic balance* pada 2015 (Grafik 4.18). Meskipun sempat memburuk pada triwulan II 2015, namun *basic balance* kembali berada dalam tren perbaikan pada triwulan III dan triwulan IV 2015.

Pada sisi solvabilitas, penurunan neto kewajiban PII Indonesia mendorong perbaikan indikator solvabilitas sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan pangsa neto kewajiban PII Indonesia terhadap PDB. Namun demikian, indikator solvabilitas yang lain masih menunjukkan peningkatan tekanan terhadap sektor eksternal

2 Diskusi lebih lanjut dapat dilihat di boks 4.1.

Grafik 4.18. Perkembangan Basic Balance NPI



perekonomian Indonesia dibandingkan dengan tahun sebelumnya meski masih berada pada level normal. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya perekonomian domestik dan disertai dengan penurunan sumber-sumber penerimaan valas dari transaksi berjalan NPI untuk membayar Utang Luar Negeri (ULN) sampai dengan triwulan III 2015. Tekanan terhadap sektor eksternal juga berasal dari menurunnya peran aliran modal asing dalam bentuk non utang (*non debt creating inflows*) sebagai sumber pembiayaan yang relatif lebih aman. Dengan

adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi sejak triwulan IV 2015, maka beberapa indikator solvabilitas membaik sejak akhir 2015.

Sementara di sisi likuiditas, tekanan terhadap perekonomian Indonesia dari sisi eksternal masih normal. Pada akhir 2015, posisi cadangan devisa berada pada level 105,9 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada akhir 2014 sebesar 111,9 miliar dolar AS. Meski demikian, sejak triwulan IV 2015, posisi cadangan devisa dalam tren peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Tabel 4.14). Selain itu, jumlah cadangan devisa pada 2015 masih cukup untuk membiayai 7,7 bulan kebutuhan pembayaran impor atau 7,4 bulan kebutuhan pembayaran impor dan ULN Pemerintah. Bahkan level kecukupan tersebut masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Grafik 4.19). Selain itu, kemampuan cadangan devisa dalam memenuhi kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik masih relatif baik, sebagaimana terindikasi dari stabilnya rasio cadangan devisa terhadap uang beredar. Dengan adanya peningkatan posisi cadangan devisa dan penurunan ULN jangka pendek sejak triwulan IV 2015, maka indikator likuiditas semakin baik sejak akhir 2015.

Indikator *debt service ratio* (DSR) *Tier-1* (sesuai metodologi Bank Dunia) pada 2015 masih normal meskipun meningkat dari 23,1% pada 2014 menjadi 29,1%.³ Peningkatan

Tabel 4.13. Rasio Solvabilitas Sektor Eksternal

Indikator	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
Rasio Solvabilitas							
1. <u>Netto PII Indonesia</u> PDB	Rasio yang digunakan untuk mengukur porsi PII dari keseluruhan perekonomian domestik.	38,2	35,3	36,4	35,9	44,3	44,2
2. <u>Utang Luar Negeri</u> PDB	Rasio peran ULN terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	26,5	25,0	27,4	29,1	33,0	36,1
3. <u>Utang Luar Negeri</u> Ekspor Barang dan Jasa	Rasio yg mengukur seberapa besar untuk mengukur kemampuan membayar ULN dari penerimaan ekspor barang dan jasa.	121,5	105,8	119,6	129,8	147,8	182,5
4. <u>Utang Luar Negeri Neto</u> ¹⁾ <u>Penerimaan Transaksi Berjalan</u> ²⁾	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar ULN neto dari penerimaan transaksi berjalan.	35,5	31,2	36,8	49,6	57,2	71,7
5. <u>Netto Kewajiban Investasi Langsung</u> PDB	Rasio yang digunakan untuk mengukur peran investasi langsung terhadap perekonomian domestik.	22,7	22,1	21,5	21,9	26,9	27,5
6. <u>Non-debt creating inflows</u> (Kewajiban Investasi Langsung + Ekuitas Investasi Portofolio) PDB	Rasio yang mengukur peran aliran modal masuk non-utang terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	34,4	32,0	32,5	30,4	38,4	37,3

¹⁾ Total penerimaan ekspor barang dan jasa serta pendapatan primer dan sekunder

²⁾ Selisih antara komponen utang di sisi KFLN dan sisi AFLN pada PII Indonesia

* angka sementara

** angka sangat sementara

³ DSR *Tier-1* merupakan metodologi penghitungan dari Bank Dunia. Pada metodologi ini, DSR *Tier-1* merupakan rasio pembayaran total ULN (pokok dan bunga) terhadap penerimaan transaksi berjalan, dimana total pembayaran ULN pada *Tier-1* meliputi pembayaran pokok ULN jangka panjang dan total pembayaran bunga ULN jangka panjang maupun pendek.

Tabel 4.14. Rasio Likuiditas Sektor Eksternal

Indikator	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
Rasio Solvabilitas							
1. $\frac{\text{Cadangan Devisa}}{\text{Impor Barang dan Jasa}}$	Indikator untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam memenuhi kebutuhan impor barang dan jasa.	66,2	58,3	53,0	47,0	55,4	64,0
2. $\frac{\text{Cadangan Devisa}}{\text{Broad Money (M2)}}$	Indikator untuk mengukur dampak potensial dari penurunan kepercayaan terhadap mata uang domestik.	35,4	33,3	31,9	27,8	31,8	31,2
3. $\frac{\text{Cadangan Devisa}}{\text{Utang Luar Negeri Jangka Pendek (sisa jangka waktu)}}$	Indikator untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam membayar ULN jangka pendek berdasarkan sisa jangka waktu.	224,2	235,5	206,4	176,6	188,8	190,7

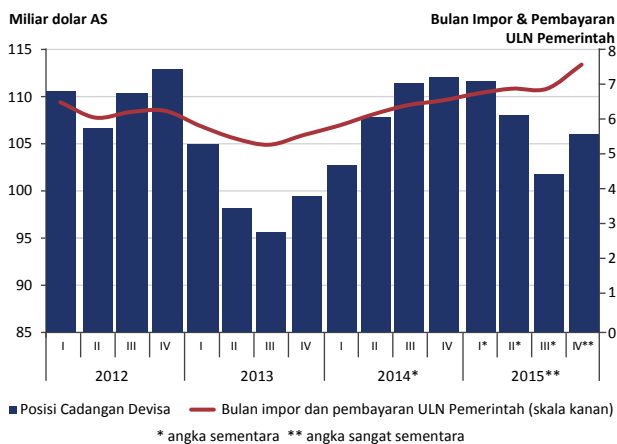
* angka sementara

** angka sangat sementara

tersebut terutama didorong oleh berkurangnya penerimaan transaksi berjalan pada 2015. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia juga melakukan perhitungan DSR (*Tier-2*) dengan menggunakan metodologi yang lebih konservatif seperti memasukkan utang dagang kepada bukan penduduk.⁴ Berdasarkan risikonya, utang dagang yang memiliki porsi yang relatif besar dalam perhitungan DSR *Tier-2* tersebut memiliki profil risiko yang relatif lebih rendah. Jika dihitung dengan menggunakan metodologi tersebut, DSR *Tier-2* pada 2015

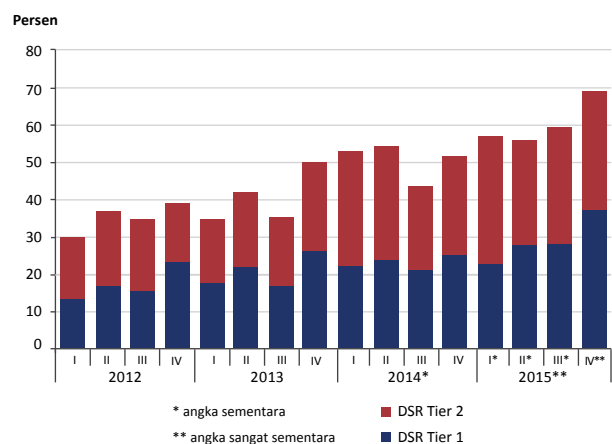
tercatat lebih tinggi daripada DSR *Tier-1*, yaitu sebesar 61,7%, meningkat dibandingkan dengan DSR *Tier-2* pada 2014 sebesar 51,7%. Peningkatan DSR tersebut terutama berasal dari sektor swasta (Grafik 4.20). Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini juga dibarengi dengan upaya mitigasi risiko *default* (gagal bayar) sektor swasta dengan terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PBI No 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehatihatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Dengan demikian, agar korporasi nonbank mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian tanpa menimbulkan gangguan pada kestabilan ekonomi domestik, mereka diharapkan agar: (i) dapat memitigasi risiko yang timbul dari kegiatan ULN dan (ii) tetap memperhatikan praktek umum pengelolaan usaha.

Grafik 4.19. Perkembangan Cadangan Devisa



4 DSR *Tier-2* merupakan modifikasi dari metodologi Bank Dunia dengan menambah cakupan pinjaman jangka pendek dan utang dagang, dengan tujuan pengelolaan ULN secara lebih berhati-hati. Pada metodologi ini DSR *Tier-2* didefinisikan sebagai merupakan rasio pembayaran total ULN (pokok dan bunga) terhadap penerimaan transaksi berjalan, dimana total pembayaran ULN pada *Tier-2* meliputi pembayaran pokok dan bunga atas ULN dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman (*loan*) dan utang dagang (*trade credit*) kepada non-afiliasi.

Grafik 4.20. Perkembangan DSR Indonesia



Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) adalah kegiatan korporasi nonbank yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan terhadap Utang Luar Negeri (ULN) yang dimiliki. Kegiatan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Dalam ketentuan ini korporasi nonbank diwajibkan untuk melakukan perhitungan atas aset dan kewajiban valas yang dimilikinya pada periode 0 sampai dengan 3 bulan dan 3 sampai dengan 6 bulan mendatang sejak akhir triwulan laporan. Pada tahun 2015, berdasarkan hasil perhitungan nilai aset dan kewajiban valas untuk kedua periode tersebut, korporasi nonbank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi pemenuhan:

1. Rasio lindung nilai minimum, dengan nilai minimum sebesar 20 persen dari selisih antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing yang akan jatuh waktu pada periode 0 sampai dengan 3 bulan maupun 3 sampai dengan 6 bulan setelah akhir triwulan. Rasio lindung nilai ini wajib dipenuhi oleh korporasi yang nilai aset valasnya lebih kecil dibandingkan kewajiban valas yang dimiliki untuk periode 0 sampai dengan 3 bulan maupun periode 3 sampai dengan 6 bulan setelah akhir triwulan; dan
2. Rasio likuiditas minimum, dengan nilai minimum sebesar 50 persen. Korporasi diwajibkan memiliki aset valas minimal sebesar 50% dari kewajiban valas yang akan jatuh waktu pada periode 0 sampai dengan 3 bulan setelah akhir triwulan.

Pelaporan KPPK kepada Bank Indonesia telah dimulai sejak posisi aset dan kewajiban valas korporasi nonbank triwulan I 2015 sebagai masa transisi. Selanjutnya, pelaporan KPPK mulai berlaku wajib, dengan pengenaan sanksi bagi korporasi nonbank yang tidak melapor, sejak posisi data keuangan triwulan III 2015. Sementara itu, pengenaan sanksi atas kewajiban pemenuhan terhadap ketentuan KPPK mulai diberlakukan untuk data aset dan kewajiban valas triwulan IV 2015.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat pengelolaan utang luar negeri agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional. Mulai tahun 2016, penerapan prinsip kehati-hatian ditingkatkan, yaitu korporasi nonbank yang memiliki ULN valas wajib memenuhi:

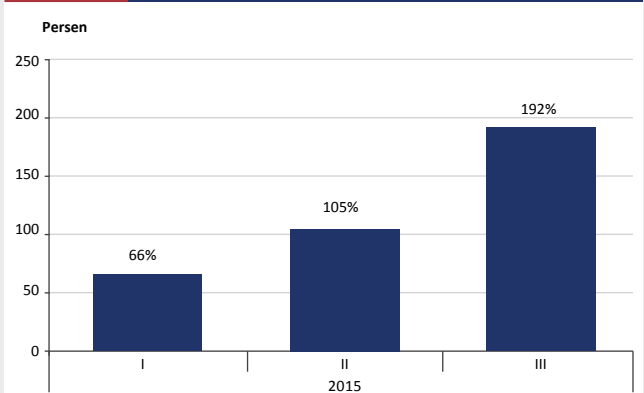
1. Rasio lindung nilai minimum, dengan nilai minimum sebesar 25 persen;
2. Rasio likuiditas minimum, dengan nilai minimum sebesar 70 persen; dan
3. Peringkat utang minimum. Korporasi nonbank yang akan melakukan ULN dalam valuta asing mulai tanggal 1 Januari 2016 diwajibkan untuk memenuhi peringkat utang minimum setara BB- yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya pada 1 Januari 2017, transaksi lindung nilai dalam rangka pemenuhan KPPK diwajibkan untuk dilakukan dengan perbankan di Indonesia. Kebijakan ini juga diarahkan sebagai upaya untuk pendalaman pasar valuta asing domestik.

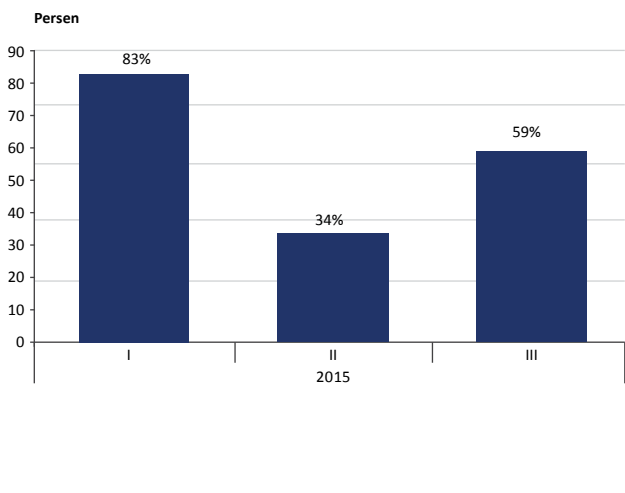
Evaluasi Implementasi KPPK sampai dengan Triwulan III 2015

Jumlah korporasi nonbank yang telah melakukan pelaporan KPPK terus meningkat pada setiap triwulan laporan. Berdasarkan data triwulan III 2015, jumlah korporasi nonbank yang memiliki ULN dalam valuta asing tercatat sebanyak 2.543 korporasi. Dari seluruh korporasi wajib lapor tersebut, sebanyak 85% di antaranya telah melakukan pelaporan KPPK. Jumlah laporan tersebut meningkat dibandingkan laporan pada triwulan II yaitu sebesar 70% dari korporasi wajib lapor.

Grafik 1. Nilai Hedging terhadap Kewajiban Hedging, periode 0-3 bulan

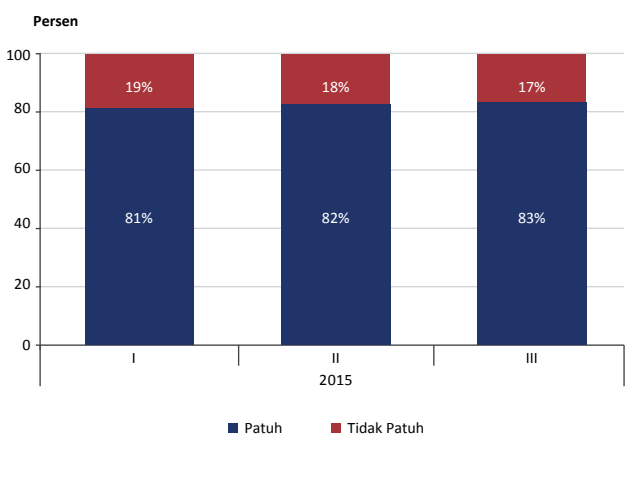


Grafik 2. Nilai Hedging terhadap Kewajiban Hedging, periode 3-6 bulan

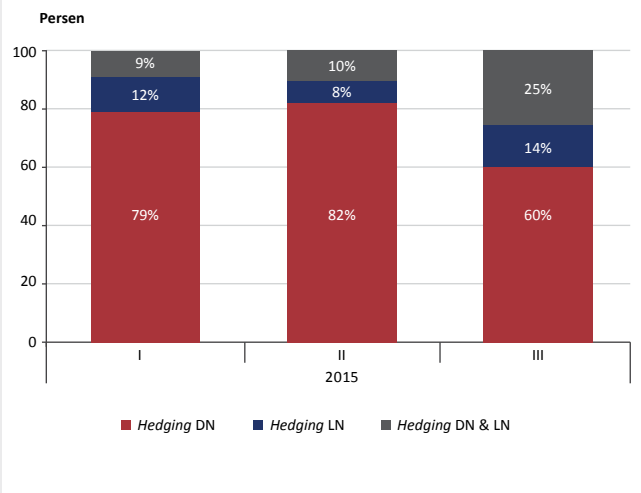


Tingkat kepatuhan pemenuhan ketentuan KPPK dari korporasi pelapor juga terus meningkat. Pada kewajiban rasio lindung nilai minimum, jumlah lindung nilai yang telah dilakukan oleh korporasi nonbank pada periode 0 sampai dengan 3 bulan mencapai 192% dari total lindung nilai yang wajib dilakukan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan triwulan II 2015 sebesar 105% (Grafik 1). Pada pemenuhan rasio lindung nilai periode 3 s.d. 6 bulan, korporasi nonbank telah melakukan transaksi lindung nilai sebesar 59% dari total lindung nilai yang diwajibkan, atau naik dari 34% pada triwulan II 2015 (Grafik 2). Sementara untuk rasio likuiditas minimum, sebanyak 83% perusahaan telah memenuhi rasio tersebut, meningkat dibandingkan posisi bulan Juni 2015 yaitu sebanyak 82% perusahaan (Grafik 3). Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan

Grafik 3. Pelapor KPPK menurut Kepatuhan Pemenuhan Rasio Likuiditas



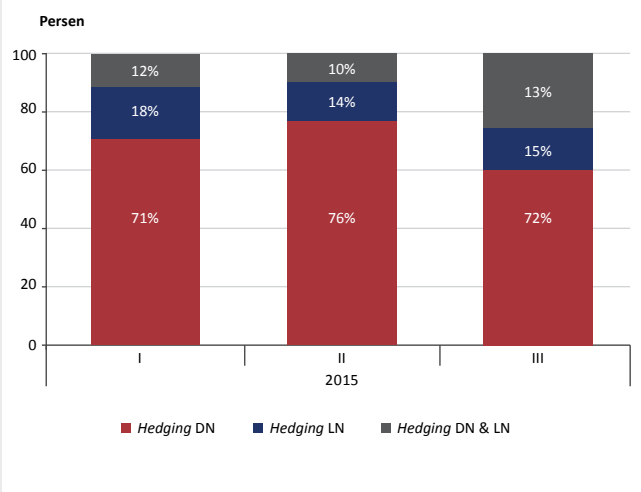
Grafik 4. Sebaran Lokasi Hedging, Periode 0-3 Bulan



KPPK tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah korporasi yang melakukan hedging (Grafik 4 dan 5) yang utamanya dilakukan dengan perbankan dalam negeri.

KPPK yang telah diterapkan pada tahun 2015 memberikan dampak positif dalam mengelola permintaan valuta asing dari korporasi nonbank sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat lebih terjaga. Di samping itu, penerapan KPPK telah meningkatkan proporsi transaksi derivatif menjadi 35% dari total transaksi valas korporasi dibandingkan dengan 33% pada tahun 2014. Ke depan, semakin aktifnya korporasi domestik dalam melakukan transaksi pada instrumen derivatif diharapkan dapat mendorong upaya pendalaman pasar valas dalam negeri.

Grafik 5. Sebaran Lokasi Hedging, periode 3-6 bulan





Keterangan gambar:

Salah satu fokus bauran kebijakan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah yang antara lain tercermin pada nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Pada tahun 2015, tugas ini mendapat tantangan berat seiring tingginya tekanan baik dari eksternal maupun domestik.



Bab 5

Nilai Tukar

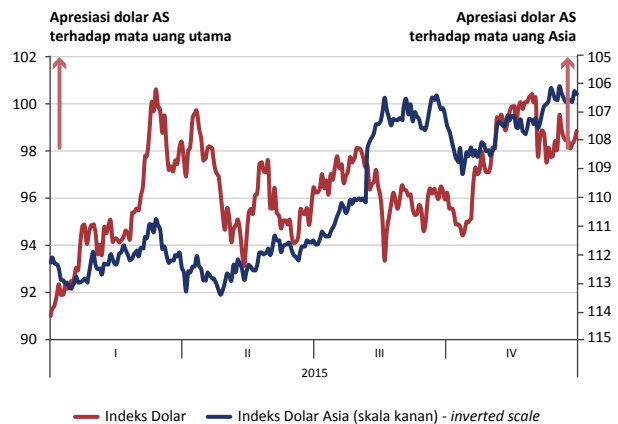
Pada 2015, rupiah mengalami tekanan depresiasi yang cukup tinggi terutama oleh faktor eksternal. Sumber utama dari eksternal terkait normalisasi kebijakan moneter AS, krisis utang Yunani, devaluasi yuan, serta divergensi kebijakan moneter global. Dari dalam negeri, tekanan depresiasi dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Tekanan depresiasi rupiah terutama terjadi pada triwulan I-III 2015, dengan puncaknya pada September 2015. Rupiah kemudian memasuki periode stabilisasi sejak Oktober 2015 didukung langkah stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan OJK, serta meredanya ketidakpastian eksternal terkait waktu kenaikan suku bunga di AS.

Stabilitas nilai tukar rupiah pada tahun 2015 menghadapi risiko yang meningkat, terutama yang berasal dari sisi eksternal. Ketidakpastian waktu kenaikan *Federal Fund Rate* (FFR) sebagai implementasi langkah normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, kekhawatiran atas krisis utang Yunani, kebijakan devaluasi mata uang yuan yang tidak diantisipasi sebelumnya, serta divergensi kebijakan moneter global merupakan faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan rupiah. Ketidakpastian tersebut menimbulkan volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan global dan mengoreksi aliran masuk dana nonresiden ke aset keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Di tengah tingginya ketidakpastian eksternal, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan dari perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang juga merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global. Selain itu, kinerja ekspor Indonesia yang menurun berdampak pada pasokan valuta asing yang menjadi lebih terbatas. Perkembangan tersebut turut memberatkan kinerja nilai tukar rupiah.

Meningkatnya faktor risiko di dalam dan luar negeri menyebabkan rupiah mengalami depresiasi yang lebih dalam pada tahun 2015 dibandingkan 2014. Pada keseluruhan tahun 2015, secara *point-to-point* nilai tukar rupiah melemah 10,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pelemahan tahun 2014 sebesar 1,7% (yoy). Selain itu, volatilitas rupiah meningkat ke level 11,1% dari 10,2% pada tahun 2014. Namun, sinergi kebijakan moneter dan reformasi struktural yang ditempuh oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan OJK terutama sejak September 2015 mampu menjaga stabilitas rupiah hingga akhir tahun. Pada triwulan IV 2015, nilai tukar rupiah berhasil menguat baik terhadap dolar AS maupun mata uang negara *peers*.

Tekanan depresiasi juga dialami oleh mata uang negara berkembang lainnya seiring meningkatnya faktor risiko eksternal. Tekanan pada mata uang negara berkembang juga disebabkan oleh divergensi kebijakan moneter di antara negara maju yang menopang penguatan indeks dolar AS. Di satu sisi, pelanggaran kebijakan yang ditempuh oleh European Central Bank (ECB), People's Bank of China (PBoC), dan Bank of Japan (BoJ) menyebabkan depresiasi nilai tukar euro, yuan, dan yen. Di sisi lain, The Fed melakukan normalisasi kebijakan moneternya. Divergensi kebijakan moneter tersebut mendorong penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang di dunia. Indeks dolar AS terapresiasi dari 90,3 pada tahun 2014 ke level 98,6 pada tahun 2015 (Grafik 5.1). Sebagai akibatnya, tekanan pelemahan mata uang negara berkembang terhadap dolar AS menjadi tidak terhindarkan.

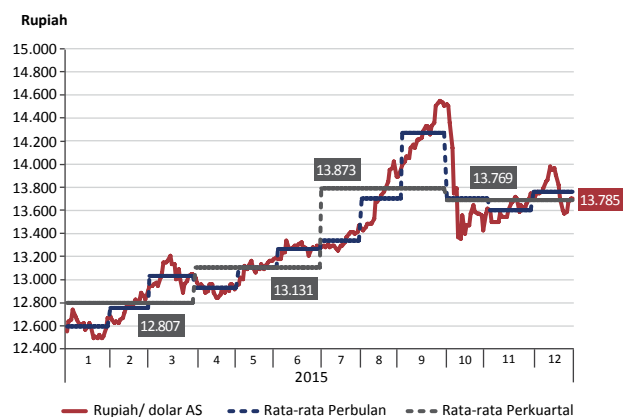
Grafik 5.1. Perkembangan Indeks Dolar



Sumber: Bloomberg, diolah

Tren depresiasi rupiah terjadi pada triwulan I-III 2015 sebelum kemudian memasuki periode stabilisasi pada triwulan IV 2015. Pada paruh pertama 2015, tekanan depresiasi rupiah telah dimulai sejak minggu ketiga Januari dengan volatilitas sebesar 10,5% pada triwulan I 2015 kemudian turun menjadi 5,7% pada triwulan II 2015. Gejala eksternal menguat pada triwulan III, terutama terkait devaluasi yuan oleh PBoC yang di luar ekspektasi pasar dan ketidakpastian kenaikan FFR oleh otoritas moneter AS, yang mendorong pelemahan rupiah ke level terendah yaitu Rp14.698 per dolar AS (Grafik 5.2). Devaluasi yuan dilakukan oleh PBoC dalam rangka liberalisasi kerangka nilai tukarnya menjadi lebih *market-driven*. Namun, implementasi yang dilakukan di tengah melemahnya perekonomian Tiongkok serta upaya *rebalancing* perekonomian untuk memperkuat konsumsi domestik menimbulkan ketidakpastian mengenai arah

Grafik 5.2. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah



kebijakan ekonomi Tiongkok. Perkembangan tersebut terjadi di tengah tingginya ketidakpastian mengenai waktu dan besaran dimulainya normalisasi kebijakan moneter di AS, sehingga memberikan tekanan pada pasar keuangan dan nilai tukar.

Meningkatnya tekanan depresiasi pada triwulan III 2015 tersebut, direspons oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan OJK dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi ditempuh dengan sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan reformasi struktural, melalui implementasi kebijakan moneter yang berhati-hati, berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, penguatan struktur pasar valas domestik, serta rangkaian paket kebijakan ekonomi¹. Berbagai langkah stabilisasi nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia bertumpu pada tiga pilar strategi. Dalam konteks ini, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas nilai tukar melalui pelaksanaan intervensi valas secara terukur dan memperhatikan kecukupan cadangan devisa, serta melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penguatan strategi operasi moneter dalam mengelola likuiditas di sistem perbankan guna mencapai sasaran operasional kebijakan moneter, serta mengelola ekspektasi pelaku pasar. Pengawasan terhadap kewajaran transaksi di pasar valas dalam negeri juga terus dilakukan untuk meminimalisasi tindakan spekulasi. Dari sisi pendalaman pasar keuangan, beberapa aturan disesuaikan untuk mendorong meningkatnya pasokan valas dan meminimalisasi spekulasi.

Pada triwulan IV, stabilitas nilai tukar mulai terjaga dan aliran dana nonresiden kembali meningkat sejalan dengan membaiknya faktor risiko eksternal. Perbaikan tersebut ditopang oleh semakin jelasnya arah kebijakan suku bunga di AS menjelang dan setelah FOMC Desember 2015. Nilai tukar rupiah bergerak stabil dan aliran masuk dana nonresiden kembali meningkat hingga akhir tahun. Investor nonresiden sudah melakukan antisipasi (*priced in*) bahwa kenaikan suku bunga acuan AS akan berlangsung secara gradual sehingga dampaknya terhadap volatilitas pasar keuangan domestik menjadi lebih terbatas. Selain itu, meningkatnya aliran masuk dana asing terutama pada obligasi negara juga ditopang oleh lebih menariknya imbal hasil investasi di Indonesia dibandingkan obligasi negara *peers*, langkah-langkah stabilisasi rupiah yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan OJK, serta persepsi pasar terhadap perbaikan prospek perekonomian Indonesia.

¹ Penjelasan lebih detail terkait kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar dapat dilihat dalam Bab 11.

Secara keseluruhan tahun 2015, sinergi kebijakan yang ditempuh menghasilkan volatilitas dan depresiasi rupiah yang lebih terkelola dibanding dengan mata uang negara *peers*. Nilai tukar rupiah kembali menguat sejak Oktober 2015 sejalan dengan aliran modal nonresiden yang kembali masuk ke Indonesia pada triwulan IV 2015. Faktor risiko domestik yang dicerminkan oleh *Credit Default Swap* (CDS) juga membaik ke level 230 setelah sebelumnya sempat mencapai level 282 pada akhir September 2015. Oleh karena itu, pelemahan rupiah menjadi lebih terbatas (-10,2%) hingga akhir tahun dibandingkan dengan mata uang real Brasil (-32,9%), rand Afrika Selatan (-26%), lira Turki (-20,4%), dan ringgit Malaysia (-18,6%). Sejalan dengan hal tersebut, penurunan level cadangan devisa Indonesia selama tahun 2015 sebesar 5,9 miliar dolar AS, atau turun 5,3%, juga lebih moderat dibandingkan beberapa negara lain seperti Malaysia, Turki, Meksiko, Afrika Selatan, dan Rusia yang turun masing-masing sebesar 19%, 10%, 9%, 8%, dan 6%.

5.1. DINAMIKA NILAI TUKAR

Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2015 menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Secara rata-rata, rupiah mengalami depresiasi sebesar 11,3% ke level Rp13.392 per dolar AS, dari Rp11.876 per dolar AS pada 2014. Pelemahan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 2014 yang tercatat sebesar 1,7%. Secara umum, rupiah berada dalam tren depresiasi selama tiga triwulan pertama 2015 dengan tekanan yang semakin meningkat pada triwulan III 2015. Namun pada triwulan IV 2015, rupiah memasuki fase stabilisasi seiring dengan menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Aliran dana nonresiden kembali meningkat sejalan dengan lebih menariknya imbal hasil investasi di dalam negeri dan terjaganya persepsi investor terhadap prospek perekonomian domestik setelah rilis paket stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh Bank Indonesia dan rangkaian paket kebijakan struktural oleh Pemerintah (Grafik 5.3).

Pada triwulan I-II 2015, depresiasi nilai tukar rupiah relatif lebih terkendali sejalan dengan berimbangnya faktor-faktor yang memengaruhi. Rupiah membukukan depresiasi secara terbatas sebesar 5,3% (qtq) pada triwulan I 2015 ke level Rp13.074 per dolar AS. Pada triwulan II 2015, depresiasi rupiah semakin tertahan sebesar 1,9% (qtq) ke level Rp13.333 per dolar AS. Tekanan pada triwulan I-II 2015 terutama berasal dari penguatan dolar AS secara umum terhadap mata uang dunia. Penguatan indeks dolar tersebut sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi AS yang menguatkan prakondisi dimulainya siklus kebijakan moneter ketat, stimulus tambahan oleh

Triwulan I 2015

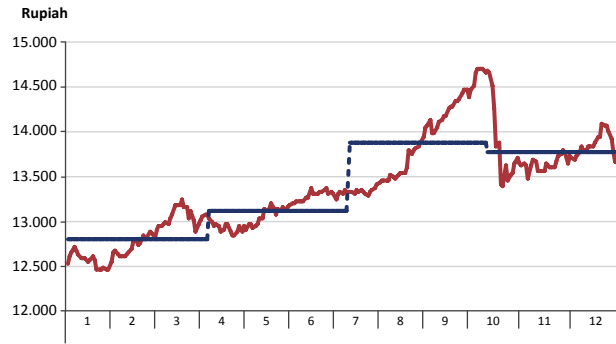
- Rata-rata Rp12.807/USD (depresiasi 4,4% qtq)
- End-of-Period Rp13.074/USD (depresiasi 5,3 qtq)
- Volatilitas 10,5%

Tekanan depresiasi rupiah meningkat sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global yang antara lain bersumber dari: kekhawatiran kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang memicu penguatan dolar AS serta kekhawatiran atas negosiasi utang Yunani yang mengoreksi *risk appetite* investor global terhadap aset domestik.

Triwulan II 2015

- Rata-rata Rp13.131/USD (depresiasi 2,5% qtq)
- End-of-Period Rp.13333/USD (depresiasi 1,9 qtq)
- Volatilitas 5,7%

Rupiah terdepresiasi dengan tekanan yang lebih *mild*, namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata historisnya. Sumber tekanan berasal dari perlambatan ekonomi domestik serta berlanjutnya penguatan indeks Dolar (DXY) yang ditopang oleh QE tambahan oleh ECB di tengah masih tingginya kekhawatiran terhadap rencana kenaikan FFR oleh AS.



2015

Triwulan III 2015

- Rata-rata Rp13.873/USD (depresiasi 5,3% qtq)
- End-of-Period Rp14.650/USD (depresiasi 9% qtq)
- Volatilitas 11,5%

Pada Tw.III-15 tekanan depresiasi semakin meningkat sejalan dengan depresiasi mata uang *peers*. Sumber tekanan terutama berasal dari eksternal terkait dinamika rencana kenaikan FFR oleh The Fed pasca membaiknya GDP AS Tw.II-15, serta implementasi devaluasi yuan yang menimbulkan volatilitas di pasar keuangan global. Dari internal, tekanan berasal dari prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat.

Triwulan IV 2015

- Rata-rata Rp13.769/USD (apresiasi 0,8% qtq)
- End-of-Period Rp13.785/USD (apresiasi 6,3% qtq)
- Volatilitas 16,9%

Rupiah berhasil menguat pada Tw.IV-15 dipicu oleh membaiknya sentimen terhadap negara berkembang pasca *dovish* FOMC Sept-15 dan rilis data tenaga kerja AS yang lebih rendah. Ketidakpastian *timing* kenaikan FFR juga sudah semakin mengerucut. Sementara dari dalam negeri, optimisme atas paket kebijakan Pemerintah memunculkan optimisme atas perekonomian domestik.

ECB, dan perkembangan negatif dari proses negosiasi fiskal Yunani yang sempat mengalami *deadlock*. Namun, faktor risiko tersebut kemudian diimbangi oleh beberapa perkembangan positif dari dalam dan luar negeri, sehingga dapat menahan laju depresiasi rupiah. Dari dalam negeri, perkembangan positif berasal dari peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia serta revisi ke atas *outlook rating* Indonesia oleh Standard & Poor's dari *stable* menjadi *positive* pada bulan Mei 2015. Sementara dari luar negeri, FOMC Juni 2015 yang lebih *dovish* mengoreksi kekhawatiran atas rencana kenaikan suku bunga oleh *The Fed*.

Pada triwulan III 2015, tekanan terhadap rupiah meningkat dan mendorong rupiah ke level terendah sepanjang tahun 2015. Tekanan terutama berasal dari faktor eksternal akibat implementasi devaluasi nilai tukar yuan oleh otoritas moneter Tiongkok yang di luar dugaan pasar dan semakin tingginya kekhawatiran atas rencana normalisasi kebijakan moneter di AS. Sementara dari dalam negeri, melambatnya ekspansi perekonomian domestik masih menjadi faktor risiko yang membebani pergerakan nilai tukar. Perkembangan tersebut kemudian menyebabkan koreksi

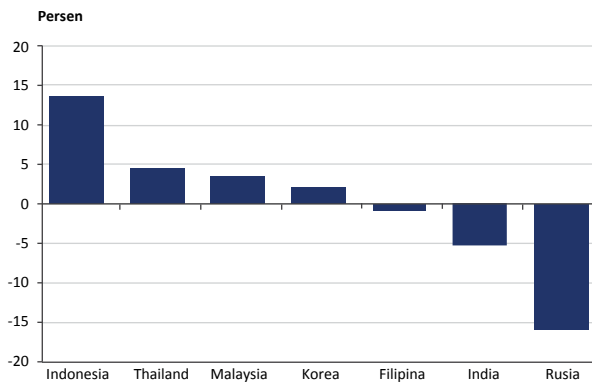
kepemilikan nonresiden pada aset keuangan domestik dan menekan nilai tukar rupiah. Pada triwulan III 2015, rupiah terdepresiasi 9% (qtq) ke level Rp14.650 per dolar AS, meningkat dibandingkan depresiasi pada triwulan II 2015 sebesar 1,9% (qtq). Selain itu, ekspektasi depresiasi turut meningkat pada triwulan III 2015 sebagaimana terlihat dari rata-rata selisih nilai tukar *Nondeliverable forward* (NDF) tenor satu bulan dengan nilai tukar *spot* yang naik ke level 168 poin dari 104 poin pada triwulan II 2015.²

Pada triwulan IV 2015, nilai tukar rupiah memasuki periode stabilisasi yang ditopang oleh meningkatnya aliran masuk dana nonresiden ke aset domestik. Meningkatnya aliran masuk asing terutama pada obligasi negara didorong oleh imbal hasil yang meningkat sehingga lebih kompetitif dibandingkan dengan imbal hasil obligasi negara *peers* (Grafik 5.4). Peningkatan aliran masuk asing tersebut juga didorong oleh positifnya tingkat keyakinan investor

2 NDF merupakan transaksi *forward* di pasar luar negeri (*offshore*) yang dilakukan tanpa penyerahan *notional amount* pada saat jatuh waktu. NDF dapat menggambarkan persepsi pelaku pasar *offshore* terhadap nilai tukar rupiah di masa yang akan datang.

Grafik 5.4.

Imbal Hasil Investasi Obligasi Negara Triwulan IV 2015



setelah pengumuman rangkaian kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan OJK. Aliran masuk dana nonresiden kembali meningkat pada triwulan IV 2015 menjadi 2,27 miliar dolar AS setelah mengalami net jual 1,85 miliar AS pada triwulan III 2015.

Di samping itu, penguatan nilai tukar juga sejalan dengan meredanya ketidakpastian eksternal terkait rencana kenaikan suku bunga The Fed. Membaiknya faktor risiko eksternal diawali oleh FOMC September 2015 yang lebih *dovish*. Ekspektasi waktu kenaikan FFR kemudian bergeser menjadi triwulan I 2016 dari perkiraan sebelumnya pada triwulan IV 2015. Hal ini berdampak terhadap penguatan nilai tukar rupiah pada Oktober 2015, yang sejalan dengan mayoritas mata uang *peers* lainnya namun pada level yang lebih apresiasi dibandingkan mata uang *peers*. Ekspektasi depresiasi ke depan juga lebih terkelola sebagaimana ditunjukkan oleh selisih antara nilai tukar NDF dengan nilai tukar *spot* yang turun ke level 143 poin.

Pasca FOMC tanggal 27-28 Oktober 2015, tekanan di pasar keuangan global kembali meningkat seiring ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS yang kembali bergeser ke triwulan IV 2015. Namun, dampak tekanan tersebut lebih terbatas, seiring komunikasi The Fed yang semakin pasti terkait waktu dimulainya kenaikan suku bunga dan *path* kenaikan yang akan dilakukan secara *gradual*. Pada beberapa forum, pejabat The Fed dengan lebih lugas mengutarakan bahwa perekonomian AS pada kondisi yang siap untuk memulai siklus normalisasi kebijakan moneter pada FOMC Desember 2015. Kepastian waktu tersebut direspons positif oleh pasar karena pelaku pasar dapat mengantisipasi kenaikan suku bunga AS dengan lebih baik. Sebagai implikasinya, kenaikan suku bunga AS pada Desember 2015 tidak menimbulkan gejolak di pasar

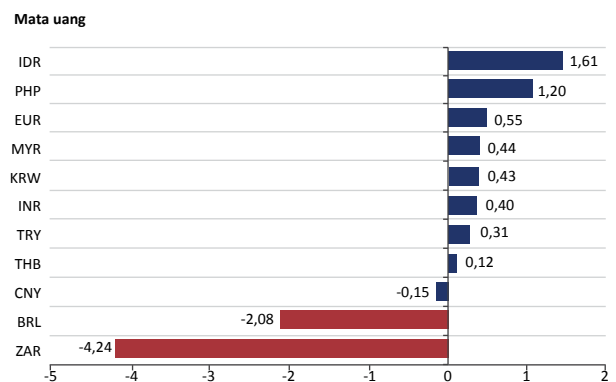
keuangan. Nilai tukar rupiah justru mengalami apresiasi sebesar 1,6% sejak kenaikan FFR pada 17 Desember 2015 hingga akhir tahun sejalan dengan terus mengalirnya dana nonresiden ke aset keuangan domestik (Grafik 5.5).

Besarnya dampak tekanan faktor eksternal selama tahun 2015 menyebabkan depresiasi nilai tukar juga dialami oleh mayoritas mata uang negara *peer*. Namun, fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dapat menjaga pelemahan rupiah lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi yang dialami oleh real Brazil, rand Afrika Selatan, lira Turki, dan ringgit Malaysia (Grafik 5.6). Selain itu, meningkatnya volatilitas yang menyertai pelemahan nilai tukar rupiah juga dialami oleh mayoritas mata uang *peers* tersebut. Pada tahun 2015, volatilitas rupiah mencapai level 11,1% meningkat dari 10,2% pada 2014. Namun, level tersebut masih lebih rendah dibandingkan volatilitas yang dialami oleh BRL, TRY, ZAR, MYR, dan KRW (Grafik 5.7).

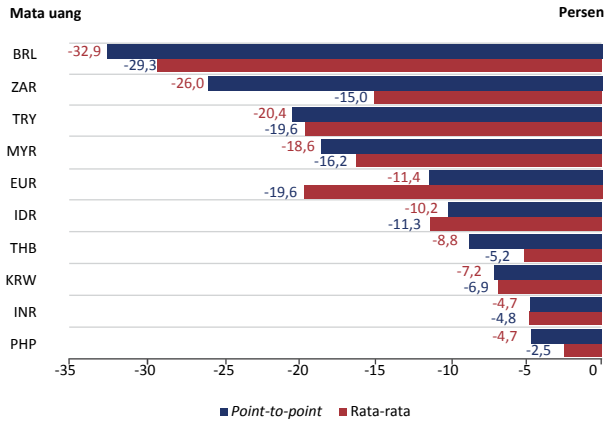
Pelemahan nilai tukar pada tahun 2015 sejalan dengan lebih terbatasnya *inflow* nonresiden pada aset rupiah. Selama tahun 2015, aliran dana masuk nonresiden tercatat sebesar 5,1 miliar dolar AS, turun dari 15,4 miliar dolar AS pada tahun 2014. *Inflow* terbatas terjadi pada SUN sebesar 7,6 miliar dolar AS, namun koreksi kepemilikan nonresiden terjadi pada saham dan SBI masing-masing sebesar 2,3 miliar dolar AS dan 135 juta dolar AS (Grafik 5.8). Koreksi kepemilikan nonresiden pada aset rupiah terutama dilakukan oleh *trader* akibat risiko normalisasi kebijakan moneter AS. Kepemilikan *trader* turun cukup signifikan dari 35% pada 2012 menjadi 13% pada 2015. Meskipun demikian, koreksi tersebut menyebabkan struktur kepemilikan asing pada obligasi negara menjadi lebih baik. Pada akhir 2015, kepemilikan obligasi negara didominasi

Grafik 5.5.

Perkembangan Nilai Tukar *Peers* Pasca Kenaikan FFR Desember 2015



Grafik 5.6. Perubahan Nilai Tukar Rupiah dan Peers Tahun 2015

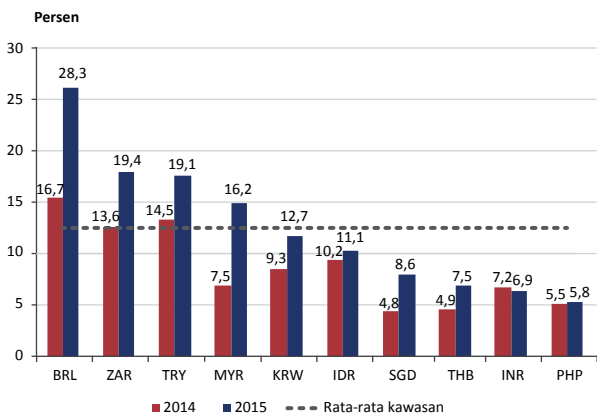


oleh *real money* sebesar 60%, meningkat dari 54% pada tahun 2012. Kepemilikan pelaku lainnya juga meningkat dari 11% pada 2012 menjadi 27% sejalan dengan semakin banyaknya investor baru yang masuk sejak tahun 2014 (Grafik 5.9).

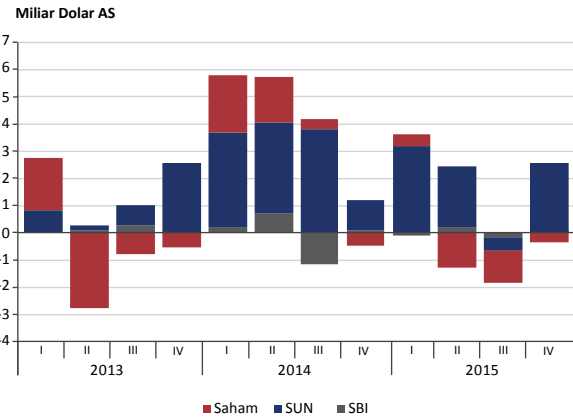
5.2. STRUKTUR PASAR VALAS DOMESTIK

Pasar keuangan domestik semakin dalam, tercermin dari volume dan rata-rata harian transaksi yang meningkat. Peningkatan volume transaksi valas terjadi baik pada instrumen *spot*, *forward*, dan *swap*. Rata-rata harian volume transaksi valas naik dari 4,3 miliar dolar AS pada tahun 2014 menjadi 4,5 miliar dolar AS pada 2015, atau meningkat sebesar 11,7% (Grafik 5.10). Peningkatan rata-rata harian volume transaksi valas ini juga tercermin dari

Grafik 5.7. Volatilitas Nilai Tukar Rupiah dan Peers



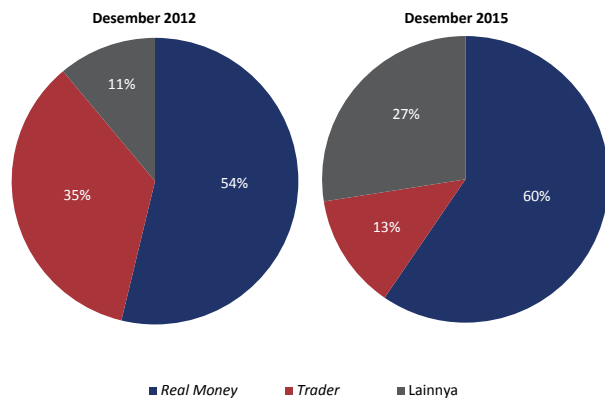
Grafik 5.8. Aliran Dana Nonresiden



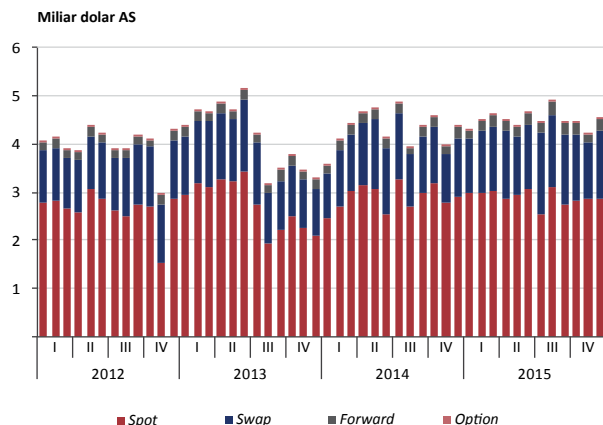
rasio terhadap Produk Domestik Bruto yang meningkat dari 0,48% pada tahun 2014 menjadi 0,52% terhadap PDB pada 2015 (Grafik 5.11).

Struktur pasar valas domestik juga membaik seiring dengan meningkatnya porsi transaksi derivatif dibandingkan dengan transaksi *spot*. Komposisi derivatif di pasar valas domestik meningkat dari 33% dari total transaksi pada tahun 2014 menjadi 35% pada 2015 (Grafik 5.12). Peningkatan komposisi derivatif ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan fleksibilitas pelaku pasar dalam melakukan transaksi lindung nilai. Hal ini dilakukan melalui relaksasi beberapa ketentuan serta pengaturan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank (PBI No. 16/21/PBI/2014) yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2015. Ketentuan tersebut mewajibkan seluruh korporasi

Grafik 5.9. Proporsi Kepemilikan Nonresiden pada Obligasi Negara



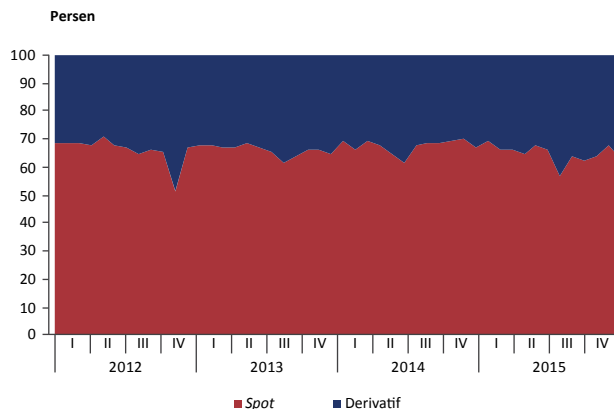
Grafik 5.10. Perkembangan Transaksi Valas Domestik



nonbank yang memiliki ULN valas untuk melakukan lindung nilai atas selisih dari aset valas dan kewajiban valasnya pada jangka waktu sampai dengan enam bulan ke depan. Di sisi lain, kenaikan transaksi derivatif sejalan dengan meningkatnya ekspektasi depresiasi rupiah pada tahun 2015.

Pemberlakuan ketentuan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank berkontribusi positif dalam perbaikan struktur permintaan valas pelaku korporasi. Volume pembelian valas korporasi pada instrumen derivatif naik menjadi 4,83% dari Produk Domestik Bruto pada 2015 dari 4,13% pada 2014 (Grafik 5.13). Porsi pembelian valas korporasi

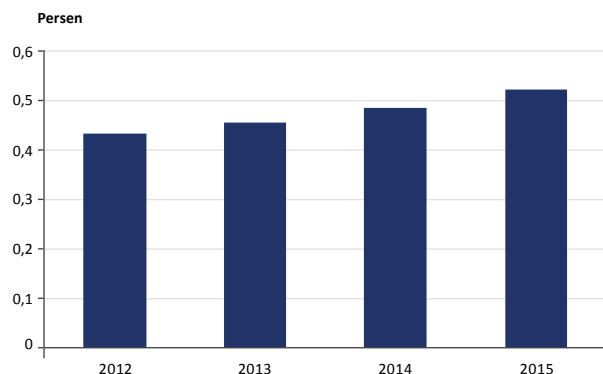
Grafik 5.12. Komposisi FX Spot vs FX Derivatif



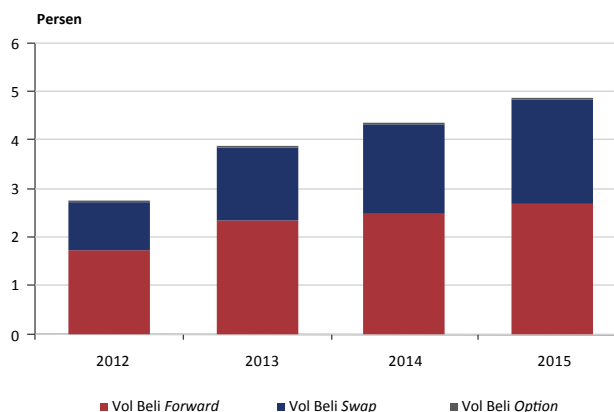
di instrumen derivatif juga naik menjadi 25% dari total pembelian valas pada 2015 dari 23% pada 2014 (Grafik 5.14). Dengan perkembangan tersebut, permintaan valas korporasi menjadi lebih terencana di tengah menurunnya pasokan valas dari nonresiden.³ Meningkatnya pembelian valas korporasi pada instrumen derivatif diikuti oleh lebih terbatasnya permintaan valas pada instrumen *spot*. Volume pembelian valas korporasi pada instrumen *spot* turun dari 10,4 miliar dolar AS per bulan pada 2014 menjadi 9,6 miliar dolar AS pada 2015.

Upaya pendalaman pasar valas domestik masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. Meningkatnya permintaan valas seiring semakin aktifnya

Grafik 5.11. Perkembangan Transaksi Valas Relatif terhadap PDB

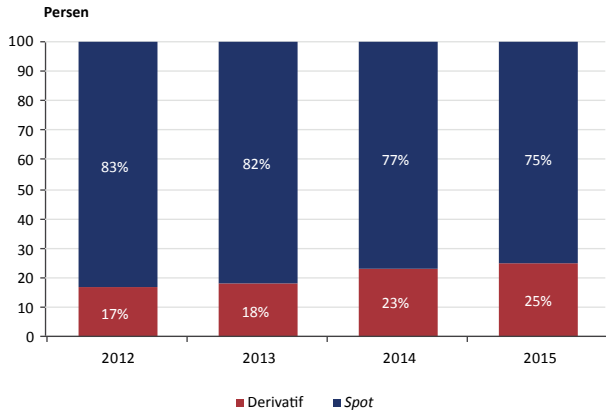


Grafik 5.13. Rasio Volume Beli Valas Korporasi di Derivatif terhadap PDB



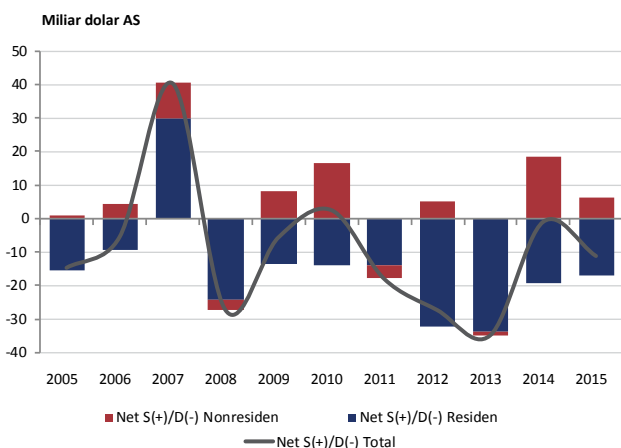
³ Penjelasan lebih rinci mengenai perkembangan transaksi lindung nilai korporasi nonbank terdapat dalam Boks 4.1. Evaluasi Ketentuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank.

Grafik 5.14. Proporsi Sebaran Demand Valas Korporasi

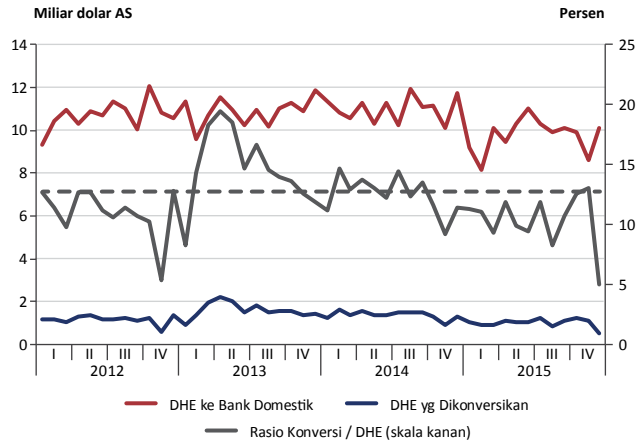


pasar valuta asing, baik pada instrumen *spot* maupun derivatif, belum diiringi dengan peningkatan pasokan valas yang memadai. Pasar valas domestik masih sangat tergantung pada pasokan valas dari pelaku nonresiden. Pada tahun 2015, pasar valas domestik mengalami *net demand* yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pasokan valas nonresiden sejalan dengan lebih terbatasnya aliran dana ke aset keuangan rupiah (Grafik 5.15). Sementara itu, pasokan valas dari pelaku dalam negeri juga menurun. Sejalan dengan melambatnya kinerja ekspor, Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditransfer ke bank domestik juga mengalami penurunan selama 2015 menjadi 117 miliar dollar AS, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 132 miliar dollar AS. Selain itu, proporsi DHE yang dikonversi

Grafik 5.15. Supply-Demand Valas



Grafik 5.16. Perkembangan Effective Supply Valas dari DHE



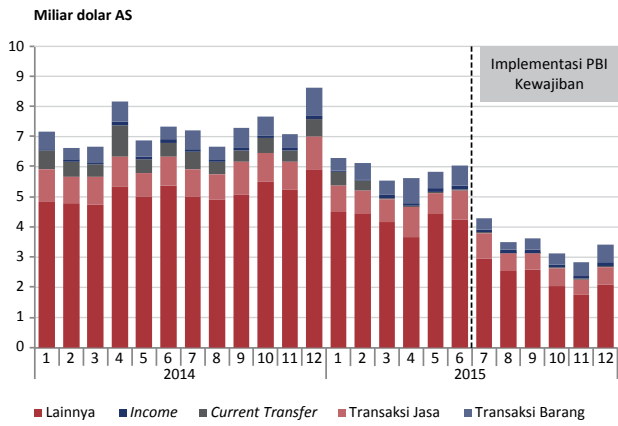
ke mata uang rupiah dan menjadi *effective supply* pada pasar valas domestik juga menurun menjadi 10% dari total DHE yang ditransfer ke bank domestik dari 13% pada tahun 2014.

Dalam rangka mengantisipasi timbulnya tekanan akibat kesenjangan antara permintaan dan pasokan valas tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk mendorong peningkatan pasokan valas di pasar domestik. Langkah tersebut dilakukan melalui amandemen terhadap ketentuan transaksi valas terhadap rupiah dengan menaikkan *threshold* penjualan *forward* tanpa *underlying*, memperluas cakupan jenis *underlying*, dan mengintroduksi transaksi intervensi *forward*.

Implementasi ketentuan mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar. Sejak diberlakukannya PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1 Juli 2015, rata-rata transaksi valuta asing yang dilakukan antar penduduk⁴ menurun ke 3,46 dolar AS per bulan dari 7,27 dolar AS per bulan pada tahun 2014 (Grafik 5.17). Berkurangnya penggunaan valas dalam transaksi antar penduduk menyebabkan turunnya permintaan terhadap valuta asing. Kondisi ini turut memberikan pengaruh positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

4 Pembayaran transaksi dilakukan melalui perbankan di dalam negeri. Tidak termasuk transaksi dengan bank sentral, perdagangan valas, simpanan, transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui *overbooking*, transaksi di bawah *threshold* (USD10.000), dan transaksi yang penerimaan dananya dari *Overseas Current Account* (OCA).

Grafik 5.17. Perkembangan Transaksi Valas Antar Penduduk





Keterangan gambar:

Pada tahun 2015, terkendalinya inflasi *volatile food* (VF), sejalan dengan pasokan yang cukup dan penurunan harga komoditas global, berkontribusi terhadap pencapaian sasaran inflasi. Inflasi VF menurun tajam dibandingkan tahun 2014 dan bahkan lebih rendah dibandingkan historisnya empat tahun terakhir. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh deflasi harga cabai dan bawang merah serta terbatasnya inflasi beras.



Bab 6

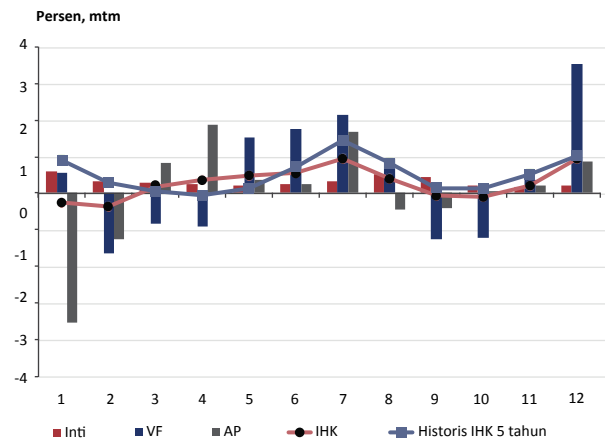
Inflasi

Konsistensi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi yang disertai koordinasi dengan Pemerintah berhasil mengendalikan inflasi 2015. Kondisi ekonomi, global dan domestik, turut mendukung rendahnya inflasi 2015 sebesar 3,35%. Menurunnya harga minyak dunia menjadi faktor utama rendahnya inflasi *administered prices* (AP) di tengah reformasi subsidi energi. Sementara, koreksi harga pangan global dan kebijakan Pemerintah terkait produksi pangan dan distribusi telah mendorong terkendalinya tekanan inflasi *volatile food* (VF). Ke depan, koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi melalui TPI dan TPID akan terus diperkokoh agar sasaran inflasi dapat dicapai secara konsisten pada periode mendatang.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2015 sebesar 3,35% (yoy) berada dalam sasaran target inflasi ($4\pm 1\%$, yoy) dan merupakan inflasi yang terendah dalam lima tahun terakhir (Grafik 6.1). Terkendalnya inflasi 2015 terlihat pada dinamika inflasi bulanan semester kedua yang sejalan dengan pola historis namun dengan level yang lebih rendah (Grafik 6.2). Adapun deflasi awal tahun di luar pola historis didorong oleh turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan melimpahnya hasil panen beberapa komoditas pangan strategis. Secara keseluruhan, tekanan *cost push* 2015 relatif minimal, berbeda dengan dua tahun sebelumnya dimana tekanan *cost push* cukup besar dan menjadi sumber tingginya inflasi tahun 2013 dan 2014.¹

Meskipun realisasi inflasi IHK 2015 berada di tingkat rendah, tantangan pengendalian inflasi ke depan masih cukup besar. Tantangan pengendalian inflasi inti terutama terletak pada pengelolaan ekspektasi inflasi agar lebih mengarah pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah. Dari kelompok *volatile food* (VF), terbatasnya infrastruktur sektor pertanian serta belum lengkapnya instrumen kebijakan stabilisasi harga dapat mendorong tingginya fluktuasi harga komoditas pangan strategis antar waktu. Sementara itu, konsistensi reformasi di bidang energi melalui realokasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran berpotensi meningkatkan tekanan *administered prices* (AP) apabila terjadi koreksi ke atas

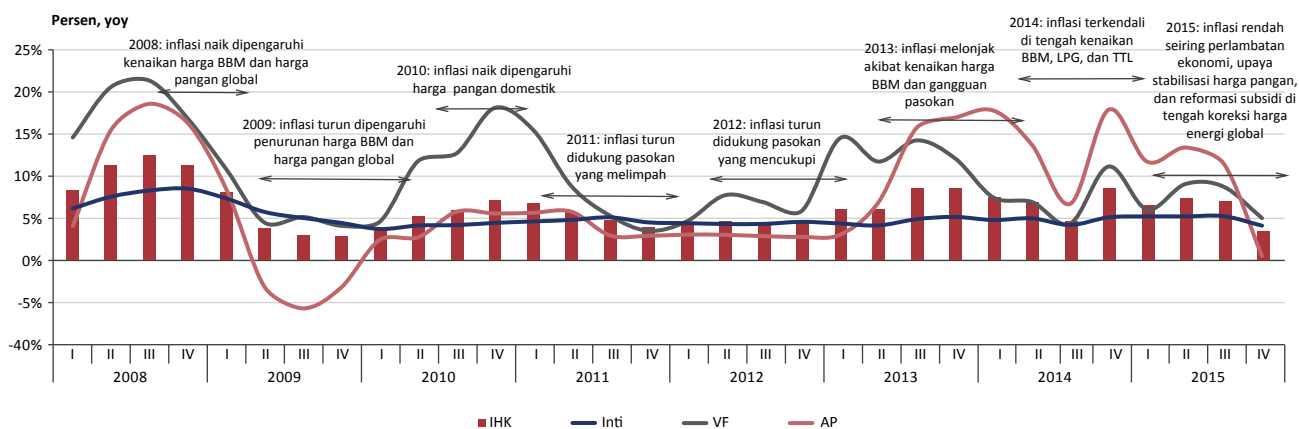
Grafik 6.2. Pola Historis Inflasi Bulanan



Sumber: BPS, diolah

harga energi dunia.² Mengingat masih tingginya tantangan pengendalian inflasi ke depan, koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah perlu diperkokoh untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi secara konsisten pada periode mendatang. Lebih lanjut, sebagai upaya untuk mengatasi tantangan struktural pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun daerah, TPI dan TPID menyusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2015-2018 untuk menjadi *guidelines* pengendalian inflasi agar sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat tercapai secara konsisten.³

Grafik 6.1. Event Analysis Inflasi



Sumber: BPS, diolah

1 Inflasi 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 8,38% dan 8,36% (yoy), terutama disumbang oleh tingginya inflasi komoditas energi (akibat kenaikan harga BBM) dan komoditas pangan.

2 Sampai saat ini, LPG 3 kg dan pelanggan listrik dengan daya 450 VA – 900 VA masih diberikan subsidi oleh Pemerintah. Lebih lanjut, komoditas solar juga masih diberikan subsidi tetap sebesar Rp1.000/liter.

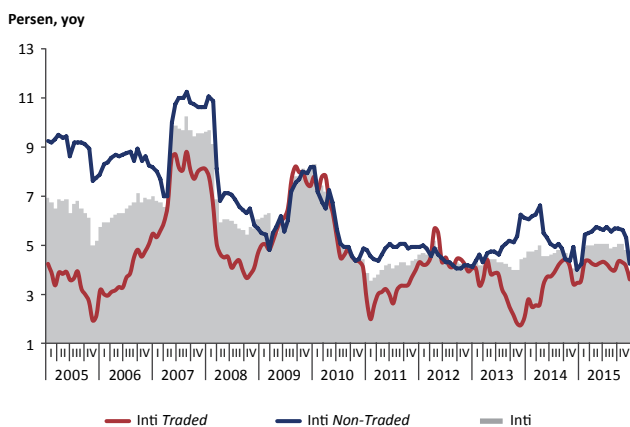
3 Lihat Boks Akuntabilitas Pencapaian Sasaran Inflasi 2015.

6.1. INFLASI INTI

Kenaikan harga kelompok inti sepanjang 2015 terkendali. Inflasi inti akhir tahun 2015 tercatat sebesar 3,95% (yoy) lebih rendah dari tahun sebelumnya 4,93% (yoy) dan terendah dalam satu dekade terakhir (Grafik 6.3). Perlambatan inflasi inti terutama terjadi pada paruh kedua (Grafik 6.4), baik pada komoditas inti *traded* maupun *non-traded* (Grafik 6.3).⁴ Perlambatan ini didorong oleh harga komoditas global yang rendah, permintaan domestik yang masih lemah, dan ekspektasi inflasi yang terjaga.

Melambatnya inflasi inti sejalan dengan tekanan kenaikan biaya input (*cost push*) yang tidak terlalu besar. Tekanan *cost push* yang bersumber dari kenaikan harga BBM dan gejala VF relatif terbatas. Harga minyak dunia yang rendah membuat tekanan AP minimal. Lebih lanjut, dukungan kebijakan Pemerintah dalam menjaga fluktuasi tarif angkutan turut berperan dalam mengendalikan dampak lanjutan ketika terjadi kenaikan harga BBM.⁵ Adapun harga komoditas pangan dunia yang masih terkoreksi dan pasokan dalam negeri yang mencukupi berdampak pada menurunnya inflasi komoditas pangan di kelompok inti (*core food*). Lebih lanjut, kontribusi

Grafik 6.3. Inflasi Inti *Traded* dan *Non-traded*

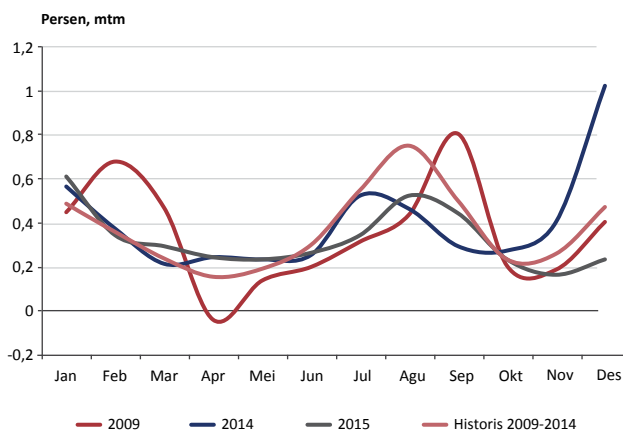


Sumber: BPS, diolah

4 Ditinjau dari komponen pembentuknya, inflasi inti terbentuk dari komponen *traded* dan *non-traded*. Komponen *traded* menggambarkan tekanan inflasi inti dari sisi eksternal. Sementara, inflasi *non-traded* menggambarkan tekanan inflasi dari sisi domestik. Adapun definisi inflasi *traded* adalah kelompok barang yang diperdagangkan baik secara ekspor maupun impor dan tercermin dalam neraca perdagangan.

5 Melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 2015, penyesuaian tarif angkutan diperbolehkan ketika penyesuaian harga energi menyebabkan perubahan biaya pokok angkutan sebesar 20%.

Grafik 6.4. Pola Historis Inflasi Inti



Sumber: BPS, diolah

komoditas inti yang merupakan turunan komoditas VF (seperti inflasi nasi dengan lauk) dan turunan komoditas pangan impor (seperti mi) berkurang (Tabel 6.1).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang belum kuat, bahkan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, tekanan permintaan masih minimal. Tren perlambatan ekonomi yang terjadi sejak 2011 masih berlanjut, sehingga pertumbuhan ekonomi 2015 (sebesar 4,8%) merupakan terendah kedua dalam 10 tahun terakhir, setelah tahun 2009 (sebesar 4,6%). Hal ini berimbas pada masih lemahnya tekanan inflasi dari sisi permintaan domestik. Daya beli masyarakat yang belum kuat antara lain terkonfirmasi dari pertumbuhan penjualan eceran

Tabel 6.1. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti Pangan (*Core Food*)

No.	Komoditas	2014	2015
Inflasi			
1	Nasi Dengan Lauk	0,18	0,14
2	Mi	0,11	0,07
3	Gula Pasir	-0,03	0,05
4	Air Kemasan	0,04	0,04
5	Kue Kering Berminyak	0,04	0,03
6	Ayam Goreng	0,03	0,03
7	Bubur	0,05	0,03
8	Soto	0,04	0,02
9	Kue Basah	0,03	0,02
10	Ayam Bakar	0,04	0,02
Deflasi			
11	Baung	0,00	-0,0006
12	Telur Ayam Kampung	0,00	-0,0004
13	Ikan Bulat	0,00	-0,0003

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.2. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti Non Pangan (Core Non-food)

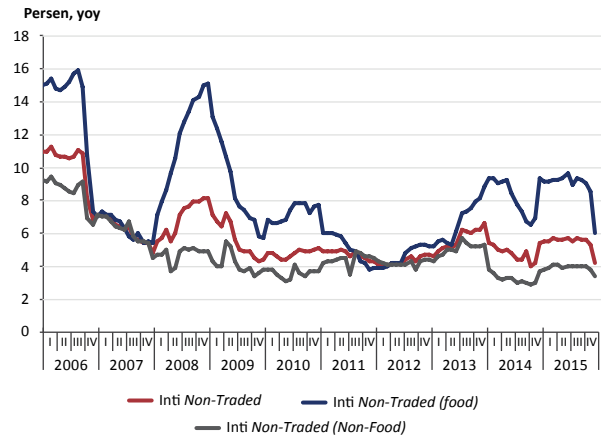
No.	Komoditas	2014	2015
Inflasi			
1	Sewa Rumah	0,12	0,13
2	Mobil	0,08	0,10
3	Kontrak Rumah	0,11	0,10
4	Tukang Bukan Mandor	0,07	0,08
5	Akademi/Perguruan Tinggi	0,04	0,06
6	Upah Pembantu RT	0,05	0,06
7	Sekolah Dasar	0,05	0,05
8	Sekolah Menengah Pertama	0,05	0,04
9	Sekolah Menengah Atas	0,03	0,04
10	Emas Perhiasan	-0,02	0,04
Deflasi			
11	Semen	0,06	-0,02
12	Besi Beton	0,01	-0,01
13	Batu Bata / Batu Tala	0,00	-0,01

Sumber: BPS, diolah

dan indeks keyakinan konsumen yang rendah (Grafik 6.5). Kenaikan harga komoditas barang yang permintaannya bersifat elastis cenderung menurun, seperti terlihat pada inflasi inti *non-traded non-food* (Grafik 6.6).

Pelemahan rupiah selama tahun 2015 cukup besar, namun dampaknya terhadap harga-harga domestik tertahan. Selama tahun 2015, rupiah terdepresiasi sebesar 11,33% (rata-rata, yoy), dengan depresiasi terbesar terjadi pada bulan September, yakni mencapai 4,4% (mtm). Secara tahunan, inflasi inti di awal tahun cukup tinggi, mencapai sekitar 5% (yoy), di atas level normal sebesar 4,9% (yoy), sebagai akibat dampak lanjutan (*2nd round effect*) kenaikan harga BBM November 2014. Namun demikian, inflasi inti rata-rata secara bulanan selama

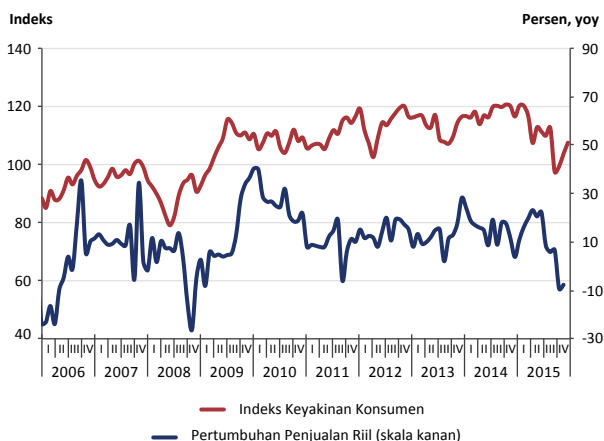
Grafik 6.6. Inflasi Inti Non-traded



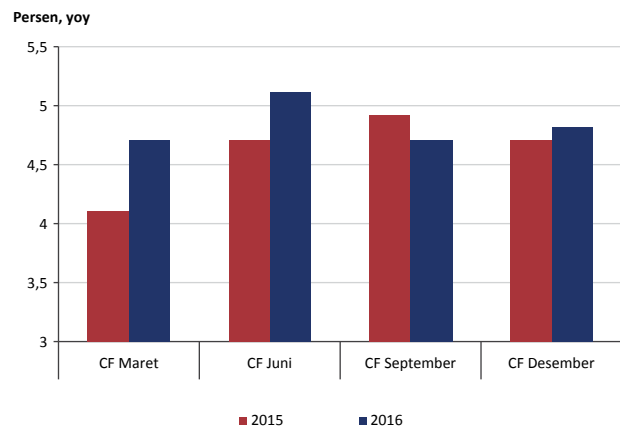
Sumber: BPS, diolah

tahun 2015 terendah dalam lima tahun terakhir, yakni sekitar 0,32% (mtm). Dampak pelemahan nilai tukar yang tidak sepenuhnya ditransmisikan menjadi kenaikan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ekspektasi inflasi pelaku ekonomi pada periode pelemahan nilai tukar (survei bulan September) relatif terjaga (Grafik 6.7). Sejalan dengan berbagai upaya stabilisasi nilai tukar yang dilakukan Bank Indonesia yang membuat nilai tukar lebih stabil dan menguat, ekspektasi inflasi bulan Desember menurun. Kedua, daya beli masyarakat yang masih lemah membuat dunia usaha lebih memilih mengurangi *margin* untuk sementara waktu daripada menaikkan harga namun menghadapi risiko kehilangan pangsa pasar (Grafik 6.8). Terkendalnya dampak pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan harga menjadi momentum inflasi inti untuk

Grafik 6.5. Pertumbuhan Penjualan Riil

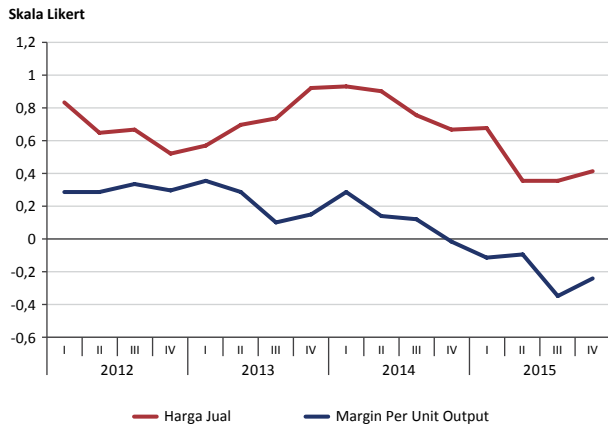


Grafik 6.7. Ekspektasi Consensus Forecast

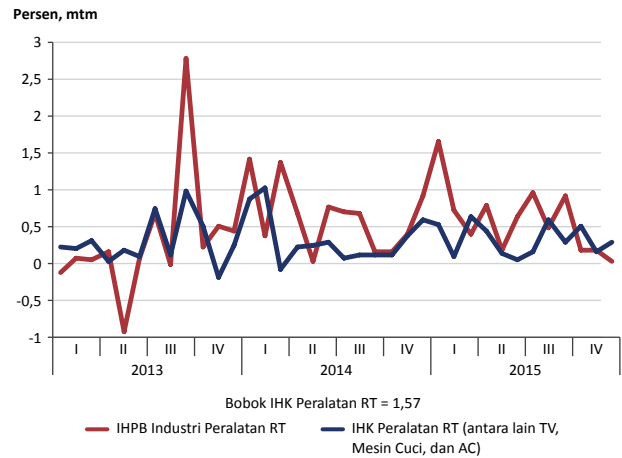


Sumber: Consensus Economics

Grafik 6.8. Margin Per Unit dan Harga Jual



Grafik 6.10. Inflasi IHPB dan IHK Peralatan Rumah Tangga

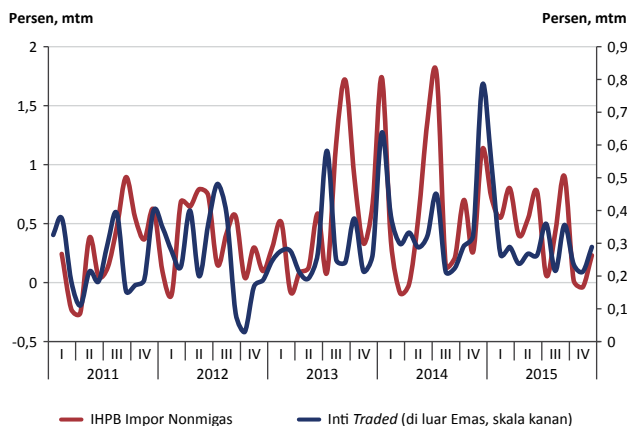


Sumber: BPS, diolah

kembali pada lintasan sesuai pola historis. Selanjutnya, apresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi pada bulan Oktober disertai dengan tekanan *demand pull* serta *cost push* yang rendah membawa lintasan inflasi inti akhir tahun di bawah rata-rata historisnya. Tertahannya dampak pelemahan rupiah terhadap harga-harga di tingkat konsumen dan mengakibatkan berkurangnya margin pelaku usaha di tingkat ritel terlihat dari disparitas antara inflasi IHPB Impor Nonmigas dan Inti *Traded* selama tahun 2015 (Grafik 6.9). Disparitas terutama terjadi di beberapa sektor, seperti sektor peralatan rumah tangga, sepeda motor dan komputer (Grafik 6.10). Konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjangkar ekspektasi inflasi di kisaran sasaran inflasi mampu menahan dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga-harga.

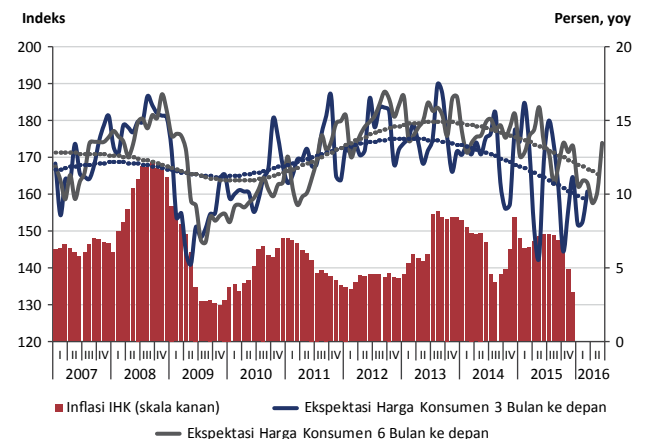
Ekspektasi inflasi yang terkendali berperan penting dalam mendorong terjaganya inflasi inti. Konsistensi bauran kebijakan Bank Indonesia sepanjang tahun 2015 mampu menahan dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga-harga dan mengendalikan ekspektasi inflasi. Terjaganya ekspektasi inflasi jangka pendek antara lain tercermin dari indeks ekspektasi inflasi pedagang eceran dan konsumen pada periode kenaikan harga BBM di akhir triwulan I 2015 yang lebih rendah dibandingkan ekspektasinya pada periode kenaikan BBM sebelumnya (Grafik 6.11 dan Grafik 6.12). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaku ekonomi semakin percaya bahwa dampak *shock* kenaikan BBM tidak akan berlebihan, antara lain mengingat adanya kebijakan Pemerintah untuk meminimalkan dampak lanjutan kenaikan BBM. Ekspektasi inflasi 2015 yang terkendali, didukung oleh kondisi perekonomian domestik

Grafik 6.9. Inflasi IHPB Impor dan Inflasi Inti Traded



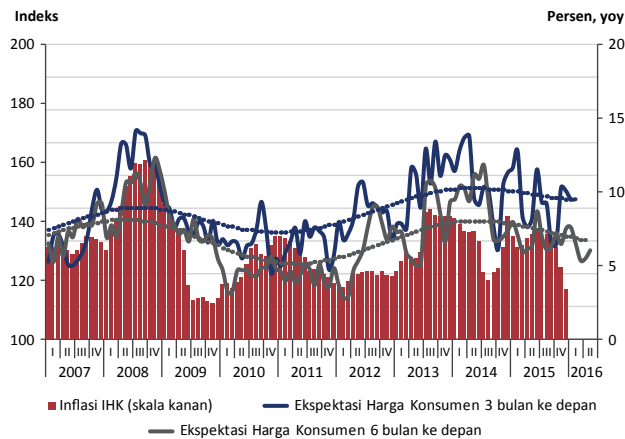
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.11. Ekspektasi Inflasi Konsumen



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.12. Ekspektasi Pedagang Eceran



Sumber: BPS, diolah

dan global, membuat inflasi inti tidak terlalu bergejolak dan ekonomi lebih berdaya tahan terhadap beberapa *shocks* yang terjadi, seperti depresiasi rupiah dan fluktuasi penyesuaian harga energi.

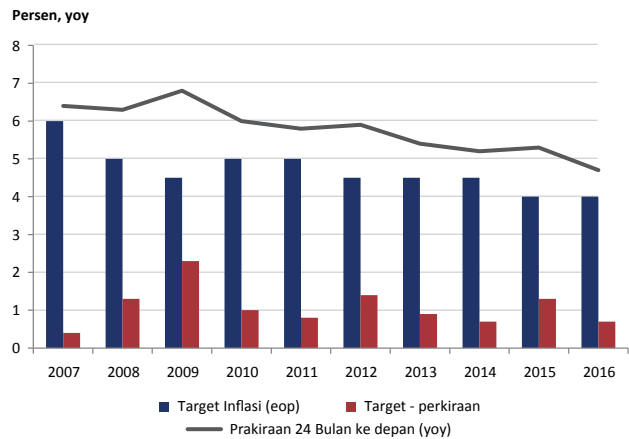
Lebih lanjut, ekspektasi inflasi dalam jangka menengah terindikasi semakin menurun. Ekspektasi inflasi 24 bulan ke depan hasil survei *Consensus Forecast* (CF) (Grafik 6.13) menunjukkan tren yang semakin menurun, dari 6,4% (rata-rata yoy) pada tahun 2007 menjadi 4,7% (rata-rata yoy) pada tahun 2016.⁶ Penurunan ekspektasi ini seiring dengan lintasan sasaran inflasi yang ditetapkan menurun secara *gradual*. Meskipun masih terdapat perbedaan antara ekspektasi dan sasaran inflasi, *co-movement* keduanya mengindikasikan bahwa sasaran inflasi yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali membuat ekspektasi inflasi lebih terjangkau. Tren penurunan ekspektasi inflasi juga ditemui di banyak negara. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa negara-negara yang mengadopsi *Inflation Targeting Framework* (ITF) mengalami penurunan ekspektasi yang lebih signifikan.⁷

Meskipun secara umum ekspektasi inflasi sudah menurun, pengelolaan ekspektasi inflasi masih menjadi tantangan pengendalian inflasi di masa depan. Dalam jangka panjang, ekspektasi inflasi cenderung menurun dan lebih terjangkau. Namun, masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi perhatian, seperti ekspektasi yang masih lebih tinggi dibanding sasaran inflasi maupun negara-negara kawasan. Dalam kondisi ekspektasi inflasi merupakan determinan

6 Ekspektasi inflasi 2007 dan 2016 berdasarkan angka survei *Consensus Forecasts* Januari 2006 dan Januari 2015.

7 Lihat Mehrotra dan Yetman (2014) dan Mishkin dan Schmidt-Hebbel (2007).

Grafik 6.13. Ekspektasi Inflasi 24 Bulan



Sumber: Consensus Economics, diolah

utama pembentuk inflasi inti dan tekanan inflasi ke depan, pengelolaan ekspektasi di masa depan dalam rangka pencapaian target inflasi tidak hanya menjadi semakin penting, namun juga semakin penuh tantangan. Ke depan, membaiknya perekonomian domestik dan global akan mendorong tekanan di sisi permintaan yang berimplikasi pada peningkatan tekanan inflasi inti. Berlanjutnya reformasi energi yang dilakukan oleh Pemerintah juga turut meningkatkan tekanan pada kelompok inti jika harga komoditas energi dunia dan tekanan depresiasi rupiah meningkat. Di sisi lain, sasaran inflasi telah ditetapkan menurun secara *gradual*, yakni $4\pm 1\%$ pada 2016-2017 dan $3,5\pm 1\%$ pada 2018. Ekspektasi inflasi akan semakin terjangkau apabila sasaran inflasi mampu dicapai secara konsisten sehingga kredibilitas bank sentral dan kebijakan moneter semakin meningkat. Pada akhirnya kredibilitas bank sentral yang meningkat akan membuat ekspektasi inflasi semakin terjangkau, sehingga menciptakan *a virtuous circle* di antara keduanya.

6.2. INFLASI VOLATILE FOOD (VF)

Inflasi VF cukup rendah. Inflasi VF tercatat sebesar 4,84% (yoy), menurun tajam dibandingkan tahun lalu dan lebih rendah dibandingkan historisnya empat tahun terakhir. Melambatnya inflasi VF didorong oleh lebih rendahnya inflasi aneka cabai dibandingkan tahun lalu (Tabel 6.3). Disamping itu, terbatasnya kenaikan harga beras di tengah *El Nino* kuat serta koreksi harga pangan global juga turut mendukung terkendalinya inflasi VF tahun 2015.

Terkendalinya inflasi VF tercermin dari dinamika bulanan inflasi VF yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu (Grafik 6.14). Pada paruh pertama 2015, kelompok

Tabel 6.3. Sumbangan Inflasi/Deflasi 9 Komoditas Pangan Strategis

Komoditas	2009	2013	2014	2015
Beras	0,26	0,14	0,36	0,31
Daging Ayam	0,07	0,10	0,07	0,15
Telur ayam	-0,01	0,03	0,07	0,09
Bawang putih	0,18	-0,04	0,03	0,07
Daging Sapi	0,02	0,07	0,03	0,05
Bawang Merah	0,03	0,31	-0,17	0,15
Mi Goreng	-0,04	0,02	0,07	-0,04
Cabai Rawit	0,01	0,07	0,15	-0,13
Cabai Merah	-0,05	0,32	0,41	-0,39

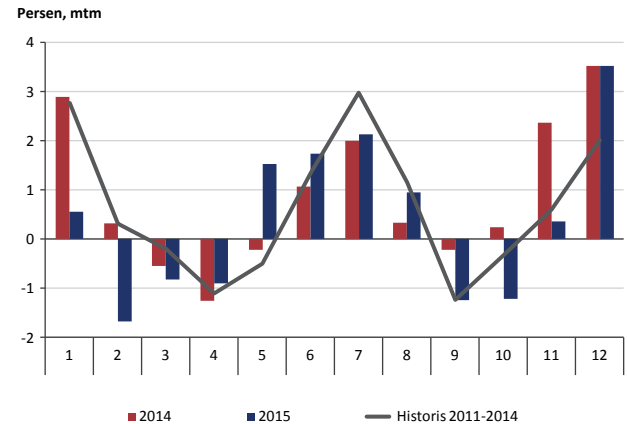
Sumber: BPS, diolah

VF tercatat inflasi sebesar 0,33% (ytd), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu (2,22% ytd). Rendahnya inflasi kelompok VF pada semester pertama 2015 terutama didorong oleh melimpahnya panen aneka cabai akibat cuaca yang mendukung serta adanya upaya khusus dari Pemerintah, terutama perluasan lahan pertanian. Pada paruh kedua 2015, lebih rendahnya inflasi VF dibandingkan periode yang sama tahun lalu didorong oleh panen raya aneka cabai di luar pola musimannya, koreksi harga daging dan telur ayam ras akibat melimpahnya pasokan, koreksi harga minyak goreng akibat rendahnya harga CPO dunia serta terbatasnya inflasi beras di tengah *El Nino* kuat.

Peran Pemerintah dalam mengendalikan harga pangan cukup signifikan. Pengendalian inflasi di bidang pangan oleh Pemerintah diutamakan pada upaya stabilisasi harga pada bulan Ramadhan dan mitigasi dampak *El Nino* kuat pada triwulan IV 2015. Upaya stabilisasi harga pada bulan Ramadhan dilakukan melalui operasi pasar komoditas pangan strategis, antara lain beras, daging, dan bawang. Sebagai upaya memitigasi dampak *El Nino* kuat, Pemerintah memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) antara lain melalui impor sebesar 700 ribu ton oleh BULOG, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) ke-13 dan ke-14, serta upaya khusus terkait perluasan lahan pertanian dan perbaikan irigasi. Selain itu, deregulasi impor pangan (daging sapi, hortikultura, jagung, dan kedelai) oleh Pemerintah turut menjaga pasokan pangan dan stabilisasi harga pangan nasional.

Kebijakan stabilisasi harga juga didukung oleh Program Tol Laut untuk mengurangi disparitas harga antar daerah. Pembangunan Tol Laut merupakan upaya penyediaan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan angkutan laut (pola subsidi) dan didukung peningkatan fasilitas kepelabuhanan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada

Grafik 6.14. Pola Historis Inflasi VF



Sumber: BPS, diolah

di nusantara. Dengan adanya hubungan antarpelabuhan laut tersebut maka akan tercipta kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok serta mengurangi disparitas harga antardaerah. Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan tiga trayek dari enam trayek yang telah ditetapkan atau diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut tahun anggaran 2015, sebagai berikut:

- Kode Trayek T-1: Tanjung Perak - Tual - Fak Fak - Kaimana - Timika - Kaimana - Fak Fak - Tual -Tanjung Perak. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 32).
- Kode Trayek T-4: Tanjung Priok - Biak - Serui - Nabire -Wasior - Manokwari - Wasior- Nabire - Serui - Biak - Tanjung Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 22).
- Kode Trayek T-6: Tanjung Priok - Kijang - Natuna - Kijang - Tanjung Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 4).

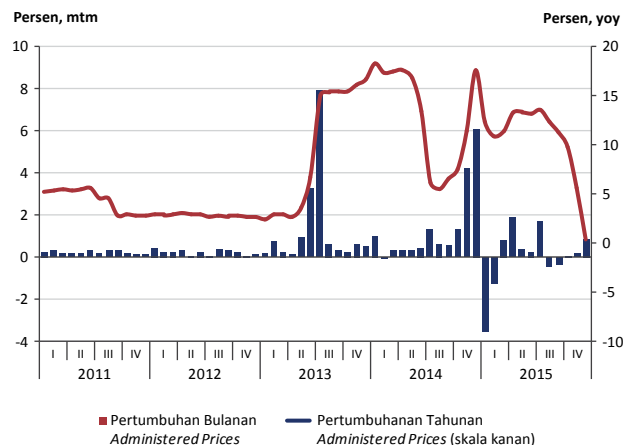
Meskipun realisasi inflasi VF tahun ini rendah, namun pada bulan Desember sempat meningkat lebih tinggi dari historisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai permasalahan struktural belum sepenuhnya teratasi sehingga tantangan pengendalian inflasi ke depan masih tinggi. Pengembangan infrastruktur sektor pertanian yang belum optimal serta terbatasnya instrumen kebijakan stabilisasi harga mendorong tingginya fluktuasi harga komoditas pangan strategis antar waktu. Ditinjau dari infrastruktur pertanian, pembangunan gudang penyimpanan hasil panen untuk komoditas strategis belum

optimal. Hal tersebut mendorong harga komoditas pangan melonjak ketika musim tanam dan jatuh ketika musim panen tiba. Sementara, instrumen kebijakan stabilisasi harga pangan masih terbatas pada penentuan Harga Pokok Pembelian (HPP) beras, operasi pasar, dan pembagian rastra. Patokan harga indikatif untuk komoditas cabai merah, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi juga belum dapat secara optimal mengatasi gejolak harga antar waktu.

6.3. INFLASI ADMINISTERED PRICES (AP)

Rendahnya tekanan AP tahun 2015 terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia. Sejak awal 2015, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan reformasi energi sebagai upaya untuk mendukung alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran (Gambar 6.1).⁸ Reformasi subsidi energi tersebut mengaitkan harga jual bensin dan solar dengan harga *Mean of Platts Singapore* (MOPS) dan kurs.⁹ Demikian pula dengan perhitungan tarif adjustmen listrik yang mengaitkan harga jual listrik dengan harga minyak *Indonesian Crude Price* (ICP), kurs, dan inflasi. Harga jual LPG 12 kg juga sangat tergantung dengan harga gas dunia. Inflasi AP tercatat sebesar 0,39% (yoy), menurun tajam dibandingkan tahun lalu dan lebih rendah dibandingkan historisnya empat tahun terakhir (Grafik 6.15). Perubahan

Grafik 6.15. Perkembangan Inflasi AP

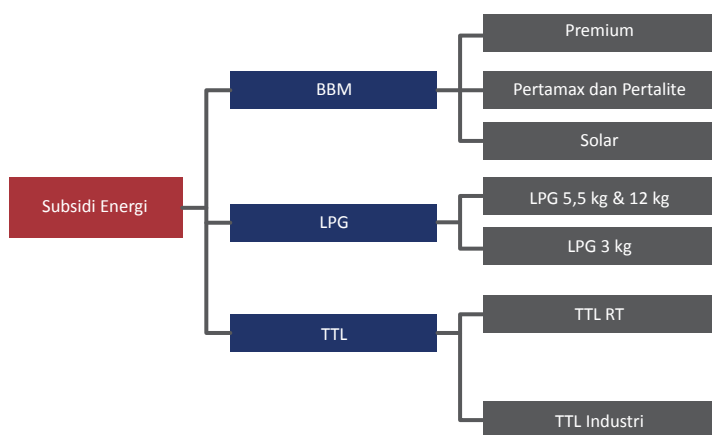


Sumber: BPS, diolah

harga beberapa komoditas AP sepanjang tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Harga BBM mengalami deflasi (Grafik 6.16). Turunnya harga minyak dunia di awal tahun mendorong Pemerintah untuk melakukan koreksi harga BBM sebanyak dua kali di Januari 2015. Pada 1 Januari 2015, Pemerintah mengoreksi harga bensin Premium RON 88 sebesar Rp900/liter dan Solar sebesar Rp250/liter. Pada 14 Januari 2015,

Gambar 6.1. Reformasi Subsidi di Bidang Energi



Kebijakan	Timeline
Market Price dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik	1 Jan 2015
Market Price	19 Jan 2015
Fixed Subsidy: Rp1.000/L	1 Jan 2015
Market Price	2015
LPG 3 kg naik Rp 1.000 per kg	2016
Market Price (>2.200 VA) Market Price (1.300-2.200 VA)	2014 2015
Pengurangan subsidi listrik 450VA-900VA	2016
Market Price (I3 dan I4)	2014

8 Reformasi subsidi di bidang listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2014. Sementara, reformasi subsidi di bidang BBM tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.4 Tahun 2015 yang diperbarui melalui Peraturan Menteri ESDM No.39 Tahun 2015.

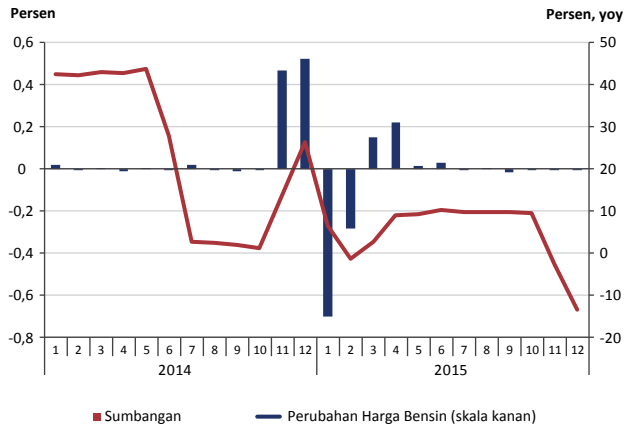
9 Pemerintah masih memberikan subsidi pada harga solar sebesar Rp1.000/liter dan pada minyak tanah yang harganya ditetapkan sebesar Rp2.500/liter.

Tabel 6.4.

Perubahan Beberapa Administered Prices Tahun 2015

	Bahan Bakar Rumah Tangga (BBM)		Tarif Tenaga Listrik (TTL)		Liquid Petroleum Gas (LPG)	Tarif Angkutan Udara	Tarif Tol
Januari	1 Jan: Koreksi harga sebesar Rp900/L untuk bensin RON 88 dan Rp250/L untuk solar bersubsidi.	14 Jan: Koreksi harga sebesar Rp1.000/L untuk bensin RON 88 dan Rp850/L untuk solar bersubsidi.	1 Jan: <i>Tariff Adjustment</i> Listrik untuk Sektor Industri, Bisnis, Kantor Pemerintahan, dan Rumah Tangga dengan Daya diatas 2200 VA.			Tarif batas bawah angkutan udara naik sebesar 10% dari sebelumnya.	
Februari			Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2.200 VA turun dari Rp1.496/kwh di Januari menjadi Rp1.468/kwh di Februari.				
Maret	1 Mar: Kenaikan harga sebesar Rp200/L untuk bensin RON 88.	28 Mar: Kenaikan harga sebesar Rp500/L untuk bensin RON 88 dan Solar Bersubsidi.	Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2.200 VA turun dari Rp1.468/kwh di Januari menjadi Rp1.426,6/kwh di Februari.		1 Mar: Kenaikan harga LPG 12 kg sebesar Rp5.000/ tabung atau Rp417/kg.		
Agustus			Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2.200 VA turun dari Rp1.547,9/kwh di Juli menjadi Rp1.546,6/kwh di Agustus.				
September	4 Sept: Tarif batas atas angkutan udara naik sebesar 10% dari sebelumnya, sementara tarif batas bawah dikoreksi sebesar 10% dari ketentuan sebelumnya.		Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2.200 VA turun dari Rp1.546,6/kwh di Agustus menjadi Rp1.523,4/kwh di September.		15 Sept: Koreksi harga LPG 12 kg sebesar Rp6.000/ tabung atau Rp500/kg.		
Oktober	9 Okt: Koreksi harga sebesar Rp200/L untuk Solar Bersubsidi.		Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2.200 VA turun dari Rp1.523,4/kwh di September menjadi Rp1.507,3/kwh di Oktober.	7 Okt: Diskon tarif listrik industri I3 dan I4 sebesar 30% untuk pemakaian listrik pada tengah malam (23:00) hingga pagi hari (08:00).			
November							1 Nov: Kenaikan tarif tol sebesar rata-rata 15%.
Desember			1 Des: <i>Tariff Adjustment</i> Listrik Rumah Tangga dg daya 1.300 VA-2.200 VA. Tarif listrik rumah tangga dengan daya 1.300 VA-2200 VA disesuaikan dari Rp1.352/kwh menjadi Rp1.508,8/kwh.	Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2.200 VA turun dari Rp1.532,8/kwh di November menjadi Rp1.508,8/kwh di Desember.			

Grafik 6.16. Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Inflasi Bensin



Sumber: BPS, diolah

Pemerintah kembali mengoreksi harga bensin Premium RON 88 sebesar Rp1.000/liter dan solar sebesar Rp850/liter. Sejalan dengan dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, penyesuaian harga Premium RON 88 dan Solar kembali terjadi pada Maret dan Oktober 2015.¹⁰ Secara keseluruhan, meskipun harga BBM sempat mengalami kenaikan pada bulan Maret, kebijakan pemerintah dalam mengelola tarif angkutan mampu menekan gejala dampak lanjutan kenaikan BBM.¹¹

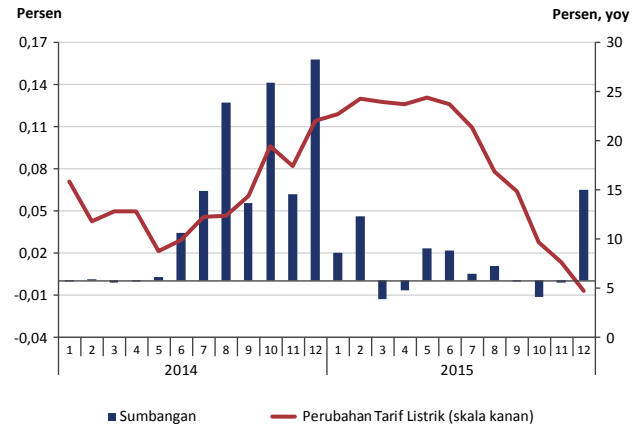
Disamping itu, inflasi listrik tercatat rendah. Rendahnya inflasi listrik ini seiring dengan turunnya harga minyak dunia. Hal ini mengingat salah satu faktor yang memengaruhi *tariff adjustment* adalah harga minyak ICP, selain nilai tukar dan inflasi. Selama tahun 2015 tarif listrik tercatat mengalami koreksi sebanyak enam kali.¹² Rendahnya fluktuasi inflasi listrik dari kebijakan tersebut juga didorong oleh penyesuaian tarif listrik

10 Pada 1 Maret 2015, Pemerintah menaikkan Premium RON 88 sebesar Rp200/liter dan pada 15 Maret 2015 kembali menaikkan harga Premium RON 88 dan Solar sebesar Rp500/liter. Pada Oktober 2015, melalui Paket Kebijakan Ekonomi jilid III, Pemerintah mengoreksi harga Solar sebesar Rp200/liter.

11 Untuk menjaga dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap tarif angkutan, Pemerintah mengesahkan Permenhub No. 31 Tahun 2015 pada 10 Februari 2015. Dalam peraturan tersebut dipaparkan bahwa penyesuaian tarif angkutan diperbolehkan ketika penyesuaian harga energi menyebabkan perubahan biaya pokok angkutan sebesar 20%. Salah satu komponen pembentuk biaya pokok tarif angkutan adalah harga solar. Komponen solar berkontribusi sekitar 39% terhadap pembentukan biaya pokok angkutan. Sepanjang tahun 2015, kenaikan harga Solar tertinggi terjadi pada 28 Maret 2015. Pada saat itu, harga solar meningkat dari Rp6.400/liter menjadi Rp6.900/liter atau meningkat sebesar 7,8% sehingga dampaknya terhadap perubahan biaya pokok angkutan kurang dari 20%.

12 Tarif listrik mengalami enam kali koreksi, yaitu pada bulan Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, dan Desember.

Grafik 6.17. Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Inflasi Listrik



Sumber: BPS, diolah

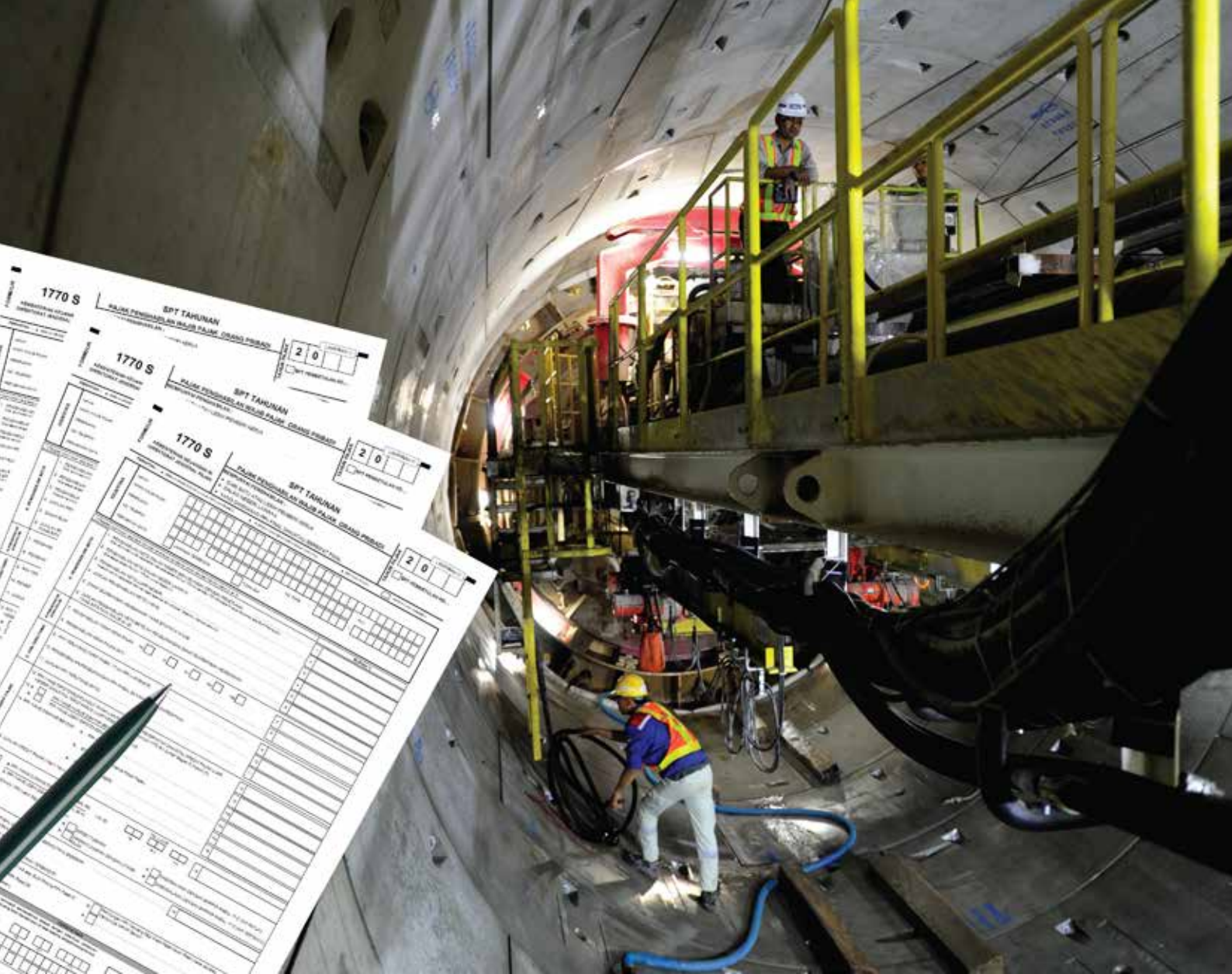
secara bertahap yang sudah berlangsung sejak 2014. Implikasinya, sumbangan inflasi listrik tahun 2015 sebesar 0,15%, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,69% (Grafik 6.17).

Ke depan, tantangan pengendalian inflasi AP relatif tinggi. Tingginya tantangan pengendalian AP bersumber dari risiko peningkatan harga minyak dunia serta pelemahan kurs. Di samping hal tersebut, rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga LPG 3 kg dan pengalihan pelanggan listrik dengan daya 900 VA ke 1300 VA turut meningkatkan tekanan inflasi AP. Oleh sebab itu, koordinasi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah perlu diperkokoh untuk menjaga tingkat inflasi yang telah ditetapkan. Koordinasi terkait besaran dan waktu implementasi penyesuaian harga energi penting untuk dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi AP.



Keterangan gambar:

Pada tahun 2015, harga komoditas global yang rendah menyebabkan penerimaan negara menurun tajam. Di sisi lain, Pemerintah tetap aktif melakukan belanja, khususnya infrastruktur, sebagai upaya kontrasiklikal terhadap perlambatan ekonomi. Namun demikian, defisit APBN 2015 berhasil dijaga tetap di bawah 3% PDB.



Bab 7

Fiskal

Pada tahun 2015, defisit APBN-P mampu dipertahankan pada level 2,5% dari PDB di tengah perlambatan ekonomi domestik dan penurunan harga komoditas. Meningkatnya defisit tersebut bersumber dari penerimaan dalam negeri yang lebih rendah dari target di tengah upaya pemerintah mendorong stimulus fiskal. Meskipun stimulus fiskal sempat terhambat pada paruh pertama 2015, belanja pemerintah meningkat pesat pada paruh kedua 2015. Peningkatan belanja pemerintah, terutama belanja modal, pada paruh kedua 2015 tersebut mampu mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Di tengah tekanan terhadap perekonomian, Pemerintah masih dapat menopang perekonomian dengan tetap menjaga defisit di bawah 3% PDB. Penurunan harga komoditas yang terjadi sejak tahun 2011 menyebabkan peran pajak semakin signifikan dalam penerimaan negara. Perlambatan ekonomi dan masalah dalam kepatuhan pajak menyebabkan penerimaan pajak tidak dapat mencapai target APBN-P yang ditetapkan tumbuh tinggi. Menyadari pentingnya belanja pemerintah sebagai upaya kontrasiklikal dalam perekonomian, Pemerintah memilih konsekuensi pelebaran defisit menjadi 2,5% PDB dari 1,9% PDB dalam APBN-P. Dengan perkiraan realisasi fiskal daerah yang masih surplus sebesar 0,2% PDB, keseluruhan defisit menjadi lebih rendah dari 2,5% PDB.¹ Defisit tersebut cukup jauh di bawah batas maksimum defisit yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3% PDB.

Stimulus fiskal sepanjang tahun 2015 diberikan melalui sisi penerimaan maupun belanja pemerintah. Dari sisi penerimaan, stimulus diberikan dalam berbagai bentuk insentif pajak yang ditujukan untuk memperkuat konsumsi maupun insentif dalam berinvestasi, misalnya melalui peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24 juta per Orang Pribadi (OP) menjadi Rp36 juta per OP. Stimulus dari sisi belanja diberikan terutama dalam bentuk belanja yang bersifat produktif seperti peningkatan belanja modal dan pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi belanja modal meningkat 43,1% dari Rp147,3 triliun menjadi Rp209,0 triliun. Peningkatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang tumbuh negatif sebesar 19,4%. Sementara, suku bunga KUR disubsidi sebesar 10% sehingga suku bunga KUR dapat turun dari 22% menjadi 12% pada tahun 2015. Di tengah keterbatasan penerimaan, ruang stimulus fiskal pada

tahun 2015 secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan subsidi energi. Sepanjang tahun 2015, subsidi BBM turun sebesar 74,7% dari Rp240,0 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp60,8 triliun dan subsidi listrik turun 42,7% dari Rp101,8 triliun menjadi Rp58,3 triliun. Penurunan subsidi energi tersebut menyediakan ruang fiskal yang cukup besar jika penerimaan tidak mengalami penurunan. Penyerapan stimulus fiskal yang masih terbatas sepanjang tahun 2015 juga nampak dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan yang membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Realisasi asumsi makro yang cukup berbeda dari asumsi pada APBN-P 2015 menjadi penyebab utama dari tidak tercapainya target penerimaan pemerintah (Tabel 7.1). Pendapatan negara mencatat kontraksi 3,0% terutama dipengaruhi oleh penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 36,3% (Tabel 7.2). Penurunan ini terkait dengan harga minyak serta *lifting* minyak dan gas bumi yang lebih rendah dari asumsi. Sementara, penerimaan pajak pada tahun 2015 masih mampu tumbuh positif sebesar 8,2%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,5%. Namun demikian, dengan target pajak pada APBN-P 2015 yang tinggi, pajak hanya dapat mencapai 83,3% dari target (*tax shortfall* sekitar Rp250 triliun), lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 92,0% dari target (Tabel 7.3). Penerimaan pajak yang kurang optimal ditengarai juga dipengaruhi oleh melemahnya kondisi makro dan penurunan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini berdampak pada *tax ratio* Pemerintah Pusat yang menurun dari 10,9% pada tahun 2014 menjadi 10,7% pada tahun 2015.

Pada sisi belanja, masalah administratif dan kendala struktural menyebabkan efek pengganda stimulus fiskal

Tabel 7.1. Asumsi Makro

Asumsi Makro	2014			2015		
	APBN	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Realisasi*
Pertumbuhan Ekonomi y.o.y (%)	6,0	5,5	5,0	5,8	5,7	4,8
Inflasi y.o.y (%)	5,5	5,3	8,4	4,4	5,0	3,4
Nilai Tukar (rupiah terhadap dolar AS)	10.500	11.600	11.870	11.900	12.500	13.392
Rata-rata Suku Bunga SPN 3 bulan (% per tahun)	5,5	6,0	5,8	6,0	6,2	5,97
Harga Minyak Internasional-ICP (dolar AS per barel)	105	105	97	105	60	49,2
<i>Lifting</i> Minyak Indonesia (ribu barel per hari)	870	818	794	900	825	777,6
<i>Lifting</i> Gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	1.240	1.224	1.221	1.248	1.221	1.195

Sumber: LKPP 2014 dan *)Siaran Pers Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Januari 2016

1 Perkiraan Bank Indonesia.

ditengarai masih belum optimal. Peralihan administrasi pemerintahan antara lain terkait penyesuaian nomenklatur anggaran kementerian/lembaga menyebabkan penyaluran belanja, khususnya belanja infrastruktur, baru mulai efektif pada triwulan III 2015. Selain itu, berbagai kendala klasik infrastruktur seperti pembebasan lahan dan masalah perijinan juga masih menghambat kemajuan pembangunan. Hal serupa juga terjadi dalam penyaluran KUR yang masih di bawah target karena waktu penyaluran yang baru dimulai pada semester II 2015. Berbagai kendala dalam penyaluran stimulus fiskal tersebut serta kondisi ekonomi global yang masih lemah ditengarai menyebabkan swasta masih menunjukkan sikap *wait and see* yang cukup persisten sepanjang tahun 2015.

Realisasi defisit yang lebih tinggi dari target APBN-P 2015 menyebabkan peningkatan signifikan kebutuhan pembiayaan, terutama pada paruh kedua tahun 2015. Defisit yang melebar hingga menjadi sebesar Rp292,1 triliun dibiayai dengan penerbitan tambahan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp416 triliun, pinjaman program dan pinjaman siaga sehingga berdampak pada peningkatan rasio utang menjadi sekitar 26% PDB. Upaya antisipasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan

tambahan pembiayaan tersebut sempat menimbulkan gejolak dalam likuiditas perbankan, terutama pada bulan Desember. Berbeda dengan pola pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Desember 2015, operasi keuangan pemerintah berdampak kontraksi terhadap likuiditas perbankan, meskipun untuk keseluruhan tahun 2015 masih berdampak ekspansi. Perubahan ini sempat menyebabkan peningkatan signifikan kebutuhan likuiditas yang tercermin dari kenaikan suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akibat berbagai upaya antisipasi pelebaran defisit dimaksud, pada akhir tahun transaksi Pemerintah masih menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26,1 triliun pada akhir tahun (Tabel 7.2).

7.1. PENDAPATAN NEGARA

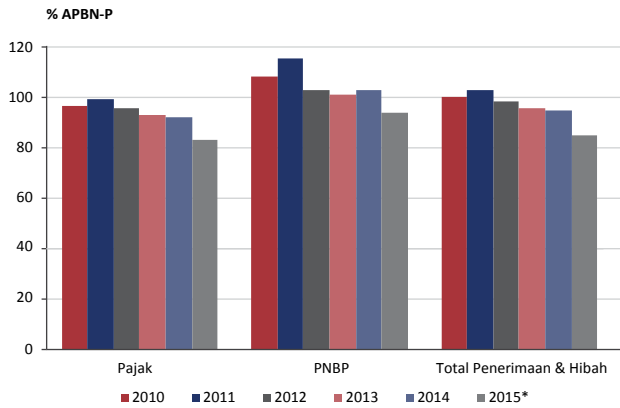
Perlambatan ekonomi global, penurunan *lifting* dan koreksi harga komoditas yang belum dapat diimbangi oleh peningkatan pajak merupakan penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pemerintah. Penerimaan negara hanya mencapai 85,4% dari target APBN-P, cukup rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar

Tabel 7.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2014-2015

Rincian	APBN-P 2014	Realisasi 2014				APBN-P 2015	Realisasi 2015*			
	Triliun Rp	Triliun Rp	%PDB**	%yoy	% APBN-P	Triliun Rp	Triliun Rp	%PDB**	%yoy	% APBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.635,4	1.550,5	14,7	7,8	94,8	1.761,7	1.504,5	13,0	-3,0	85,4
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.633,1	1.545,5	14,7	7,9	94,6	1.758,4	1.494,1	12,9	-3,3	85,0
1. Penerimaan Perpajakan	1.246,1	1.146,9	10,9	6,5	92,0	1.489,3	1.240,4	10,7	8,2	83,3
- Pajak Dalam Negeri	1.189,8	1.103,2	10,5	7,1	92,7	1.440,0	1.206	10,4	9,3	83,7
- Pajak Perdagangan Internasional	56,3	43,6	0,4	-8,0	77,6	49,3	35	0,3	-20,0	70,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	386,9	398,6	3,8	12,4	103,0	269,1	253,7	2,2	-36,4	94,3
II. Hibah	2,3	5,0	0,0	-26,3	216,5	3,3	10,4	0,1	105,6	313,6
B. Belanja Negara	1.876,8	1.777,2	16,9	7,7	94,7	1.984,1	1.796,6	15,6	1,1	90,5
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.280,3	1.203,6	11,4	5,8	94,0	1.319,5	1.173,6	10,2	-2,5	88,9
1. Belanja K/L	678,1	626,4	5,9	13,1	92,4	795,5	724,7	6,3	15,7	91,1
2. Belanja Non K/L	602,2	577,2	5,5	-1,1	95,8	524,1	448,9	3,9	-22,2	85,7
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	596,5	573,7	5,4	11,8	96,2	664,6	623,0	5,4	8,6	93,7
1. Transfer ke Daerah	596,5	573,7	5,4	11,8	96,2	664,6	623,0	5,4	8,6	93,7
2. Dana Desa	-	0,0	-	-	-	20,8	20,8	0,2	-	100,0
C. Keseimbangan Primer	(106,0)	-93,3	-0,9	-5,3	88,0	(66,7)	-136	-1,2	45,9	204,0
D. Surplus/Defisit Anggaran	(241,5)	-226,7	-2,2	7,2	93,9	(222,5)	-292	-2,5	28,9	131,3
E. Pembiayaan	241,5	248,9	2,4	5,1	103,1	267,0	329	2,9	32,3	123,4
I. Pembiayaan Dalam Negeri	254,9	261,2	2,5	7,6	102,5	287,0	307	2,7	17,7	107,1
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(13,4)	-12,3	-0,1	112,4	92,0	(20,0)	10	0,1	10,1	-52,0

Sumber: Kementerian Keuangan, *)Berdasarkan realisasi *update* per 22 Januari 2016, **) Didasarkan pada nominal PDB dengan tahun dasar 2010

Grafik 7.1. Capaian Komponen Penerimaan Pajak terhadap Target APBN-P



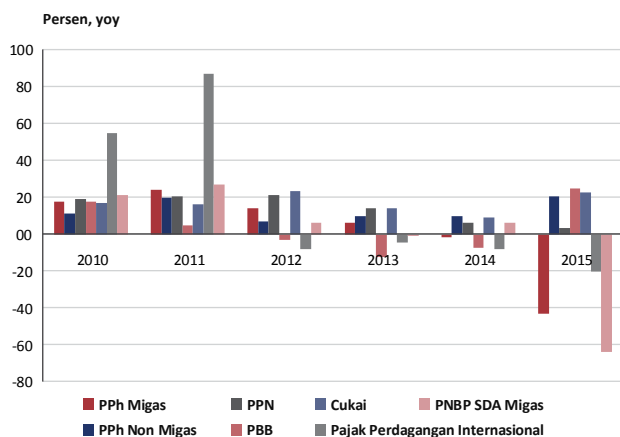
*Data per 22 Januari 2016

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

94,8% dan terkontraksi 3,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Grafik 7.1). Perkembangan ini terutama disebabkan oleh harga komoditas yang menurun dan kondisi ekonomi global yang masih lemah sehingga berdampak pada PNPB yang turun signifikan. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan sumber daya alam yang mencatat pertumbuhan negatif 57,5% (Grafik 7.2).

Penurunan PNPB belum dapat diimbangi oleh peningkatan penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 8,2% pada tahun 2015 sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% dan inflasi sebesar 3,35%. Namun, dengan target penerimaan pajak yang tinggi sebesar Rp1.489,3 triliun, realisasi pajak tersebut hanya mencapai 83,3% dari target, lebih rendah dari capaian tahun lalu sebesar 92% dari target APBN-P. Dengan

Grafik 7.2. Perbandingan Pertumbuhan Tahunan Komponen Penerimaan Pajak



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah berdasarkan LKPP dan Keterangan Pers Realisasi Sementara 2015 update 22 Januari 2015

Tabel 7.3. Perkiraan Shortfall Pajak

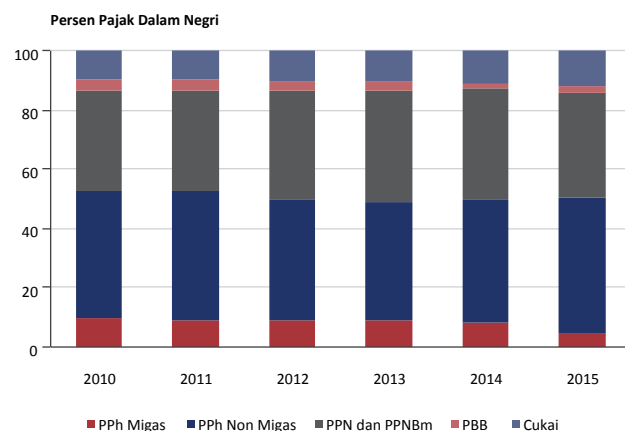
Nama Lembaga	Shortfall Pajak
World Bank	Rp 296 triliun
IMF	Rp 235 triliun
Center for Indonesia Taxation Analysis	Rp 250 triliun

*) Total *shortfall* pajak termasuk bea cukai
Sumber: <http://finansial.bisnis.com>

target tersebut, rasio pajak pemerintah ditargetkan meningkat 2% PDB dari 10,9% pada 2014 menjadi 12,9% pada 2015. Beberapa pengamat menilai bahwa target pajak tersebut terlalu tinggi di tengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi (Tabel 7.3).

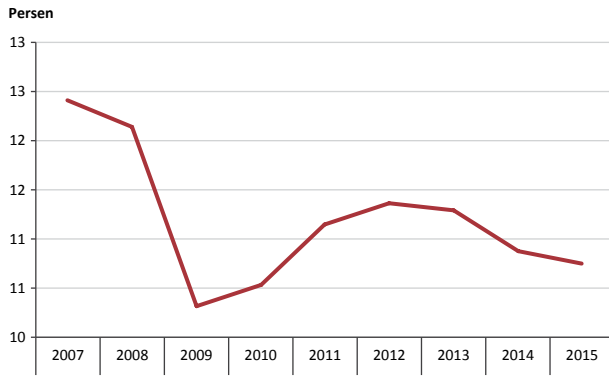
Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka mengantisipasi kecenderungan penurunan rasio pajak terhadap PDB dan sejalan dengan penancangan tahun 2015 sebagai tahun Pembinaan Wajib Pajak. Kebijakan tersebut antara lain berupa kebijakan keringanan sanksi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Aturan tersebut merupakan sarana legal untuk memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi jika Wajib Pajak melakukan koreksi Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, Pemerintah juga melakukan beberapa upaya penegakan hukum antara lain melalui *gijzeling* atau hukum paksa badan bagi Wajib Pajak yang belum membayar kewajibannya. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *reinventing policy* antara lain

Grafik 7.3. Perbandingan Komposisi Pajak Dalam Negeri



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah dari LKPP dan Keterangan Pers Realisasi Sementara 2015 update 22 Januari 2016

Grafik 7.4. Perkembangan Tax Ratio



Sumber: Indikator Terkini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, diolah dari Keterangan Pers Realisasi Sementara 2015 update 22 Januari 2016

pemberian insentif untuk perusahaan yang mendaftarkan revaluasi aset pada tahun 2015. Kebijakan ini mampu menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp20,1 triliun. Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan jenis penerimaan negara lainnya.

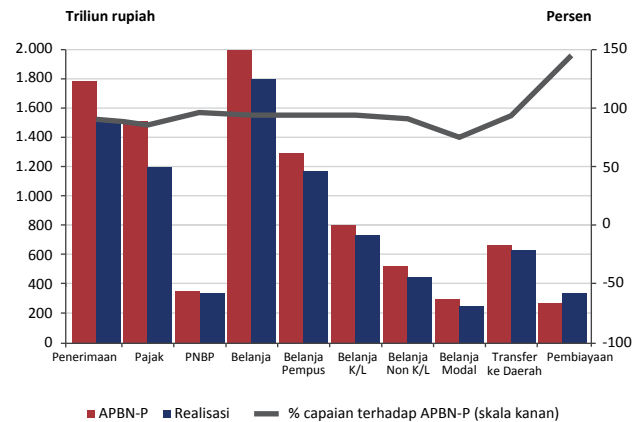
Ditinjau dari komposisinya, penerimaan PPh Nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak dalam negeri. Porsi PPh Nonmigas mencapai 45,8% dari seluruh penerimaan pajak dalam negeri, diikuti dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 35,1% (Grafik 7.3). Porsi tersebut sedikit meningkat dari 41,6% pada tahun 2014 karena penurunan dari penerimaan PPh Migas. Secara nominal, PPh Nonmigas meningkat 20,5% (yoy), sementara total PPN dan PPnBM mencatat kontraksi sebesar 0,1% (yoy), terutama dipengaruhi penurunan PPN Impor. Penurunan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut merefleksikan kegiatan ekonomi yang melambat. Realisasi PPh Migas mengalami penurunan signifikan sebesar 43,2%, sejalan dengan penurunan harga dan *lifting* minyak. Dengan perkembangan tersebut, *tax ratio* Pemerintah Pusat tahun 2015 tercatat sebesar 10,7%, lebih rendah dibandingkan *tax ratio* tahun 2014 sebesar 10,9% (Grafik 7.4).²

7.2. BELANJA NEGARA

Capaian belanja negara pada tahun 2015 lebih rendah dari capaian tahun 2014 dan 2013. Capaian belanja

² Merupakan *tax ratio* dalam arti sempit yaitu rasio pajak Pemerintah Pusat terhadap PDB.

Grafik 7.5. Capaian Realisasi APBN-P 2015

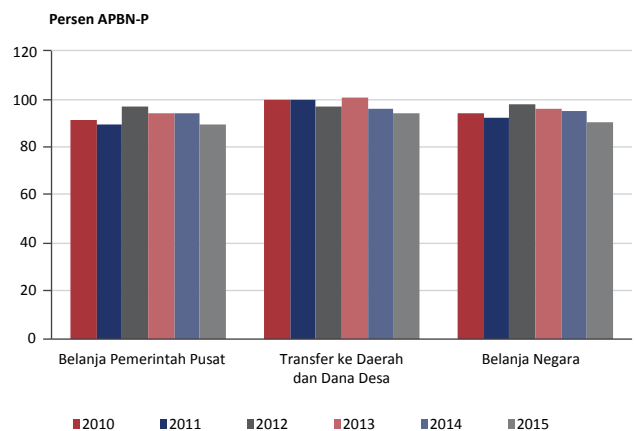


Sumber: Kementerian Keuangan, diolah berdasarkan realisasi sementara 31 Desember 2015 update 22 Januari 2016

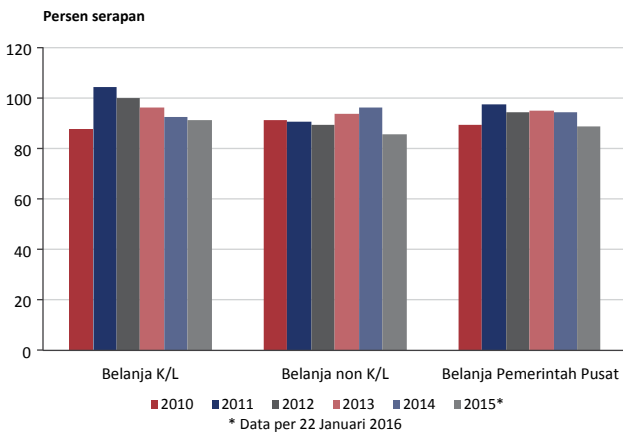
negara tersebut mencapai 90,5% dari pagu APBN-P dengan capaian belanja pemerintah pusat sebesar 88,9% dari target APBN-P (Grafik 7.5 dan Grafik 7.6). Hal ini terutama disebabkan oleh penyerapan yang terhambat akibat masalah nomenklatur sepanjang Semester I 2015. Meskipun APBN-P 2015 telah disetujui pada bulan Februari 2015, namun permasalahan akibat perubahan nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) serta persiapan Idul Fitri menyebabkan penyerapan belanja baru benar-benar efektif setelah memasuki Semester II 2015.

Secara keseluruhan, penyerapan belanja K/L mencapai 91,1% sementara penyerapan belanja non K/L mencapai 85,7% (Grafik 7.7). Realisasi belanja K/L tumbuh 15,6%, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 13,1%. Sementara, kontraksi belanja non K/L mencapai 19,8%, lebih dalam dibandingkan kontraksi tahun 2014 sebesar

Grafik 7.6. Pencapaian Belanja Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah dari LKPP dan Keterangan Pers Realisasi Sementara 2015 update 22 Januari 2016



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah dari Keterangan Pers Realisasi Sementara 2015 update 22 Januari 2016

1,1%. Pergeseran komponen belanja K/L dan nonK/L tersebut mencerminkan realokasi belanja yang terus berlanjut, terlihat dari kebijakan pemerintah untuk melakukan realokasi belanja dari subsidi energi ke jenis belanja yang lebih produktif seperti belanja modal.

Kontraksi belanja pemerintah pusat pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh penurunan subsidi. Subsidi mengalami penurunan 52,6% dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebagian besar disumbang oleh penurunan subsidi energi. Subsidi energi mengalami penurunan sebesar Rp222,7 triliun, dari Rp341,8 triliun menjadi Rp119,1 triliun, dengan penurunan terbesar berasal dari penghematan subsidi BBM, LPG, dan BBN. Subsidi BBM, LPG, dan BBN mengalami penurunan sebesar 74,7% dari Rp240,0 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp60,8 triliun pada tahun 2015. Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi untuk bahan bakar Premium dan menetapkan subsidi tetap Rp1.000 per liter untuk bahan bakar Solar. Adapun subsidi listrik turun sebesar 42,7% dari Rp101,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp58,3 triliun pada tahun 2015.

Penghematan subsidi belum dapat diserap secara optimal oleh belanja pemerintah pusat lainnya. Meskipun demikian, adanya perubahan dalam nomenklatur kementerian/lembaga menyebabkan realisasi belanja modal dan belanja barang pemerintah baru menunjukkan peningkatan signifikan memasuki triwulan III 2015. Realisasi belanja barang dan modal pada triwulan III masing-masing tumbuh 34,8% (yoy) dan 58,7% (yoy). Peningkatan belanja tersebut berlanjut pada triwulan IV seperti terlihat pada pertumbuhan belanja barang dan modal yang tercatat tinggi masing-masing sebesar 56,1% (yoy) dan 50,4% (yoy).

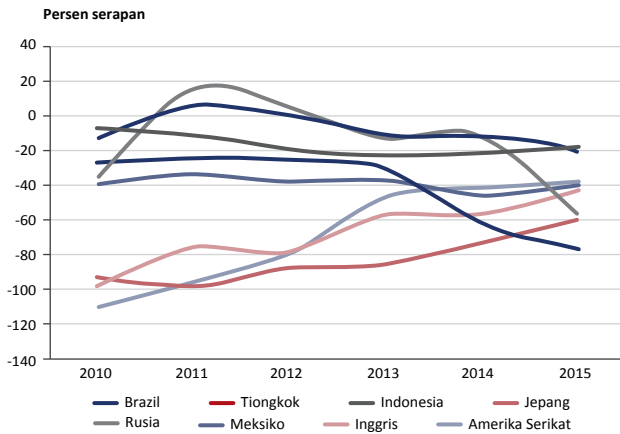
Realisasi belanja modal pada tahun 2015 tumbuh 41,9% (yoy), meskipun hanya mencapai 75,8% dari target APBN-P. Pertumbuhan belanja modal yang cukup tinggi ini didorong oleh akselerasi pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akselerasi belanja modal tersebut menjadi motor utama bagi peningkatan investasi, terutama investasi bangunan pada triwulan III dan IV 2015, di tengah sikap *wait and see* yang masih ditunjukkan oleh swasta.

Realisasi Bantuan Sosial sedikit menurun sebesar 0,9% (yoy) dengan serapan terhadap target mencapai 90,1% dari APBN-P. Hal ini sejalan dengan semangat realokasi subsidi kepada belanja yang mendukung kebijakan pemerintah terkait penguatan program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan. Upaya yang ditempuh antara lain (i) pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menyasar Rumah Tangga Sasaran (RTS) termasuk untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), (ii) bantuan stimulan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, dan (iii) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM).

7.3. PEMBIAYAAN

Shortfall pajak yang cukup besar berdampak pada peningkatan pembiayaan. Pemenuhan tambahan defisit tersebut selanjutnya dipenuhi melalui peningkatan penerbitan SBN maupun pinjaman. Dalam keterangan pers Kementerian Keuangan tanggal 22 Januari 2016, realisasi defisit pada 31 Desember 2015 mencapai Rp292,1 triliun atau sebesar 2,5% PDB. Dengan perkembangan tersebut, realisasi pembiayaan fiskal tahun 2015 mencapai Rp318,1 triliun, meningkat sebesar 34% (yoy) dan melampaui target sebesar 43,0%. Pembiayaan dalam negeri meningkat 23,4% dan melampaui target sebesar 22,9% sementara pembiayaan luar negeri mencapai neto positif Rp20,0 triliun, dari rencana awal capaian negatif (net bayar) Rp20,0 triliun. Pelampauan pembiayaan tersebut menghasilkan SiLPA sebesar Rp26,1 triliun. Peningkatan defisit tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Brazil, dan Inggris (Grafik 7.8). Secara keseluruhan, dengan perkiraan total realisasi APBD mencatatkan surplus 0,2% PDB, defisit total masih mencatatkan defisit yang cukup jauh di bawah batas defisit dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar maksimum 3% dari PDB (Grafik 7.9).

Grafik 7.8. Tren Defisit Fiskal di Beberapa Negara

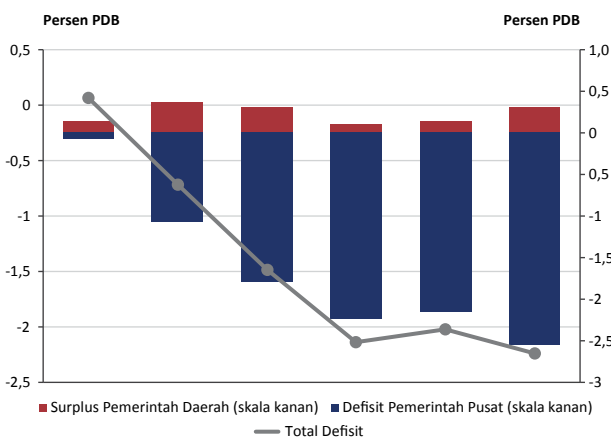


Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Oktober 2015 dan Kementerian Keuangan

Guna memenuhi kebutuhan pembiayaannya, Pemerintah kembali menerapkan strategi *front loading*. Secara keseluruhan, penerbitan SBN neto sepanjang tahun 2015 mencapai Rp361,6 triliun (Grafik 7.10). Porsi utang pemerintah pusat yang berasal dari SBN meningkat dari 74,2% pada tahun 2014 menjadi 75,7% dengan porsi SBN berdenominasi rupiah yang sedikit turun dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 56% dari sebelumnya 57%. Porsi SBN dalam mata uang asing meningkat sejalan upaya Pemerintah untuk melakukan diversifikasi antara lain dalam bentuk penerbitan *Samurai Bonds*. Imbal hasil SBN meningkat untuk berbagai tenor dibandingkan tahun 2014 (Grafik 7.11).

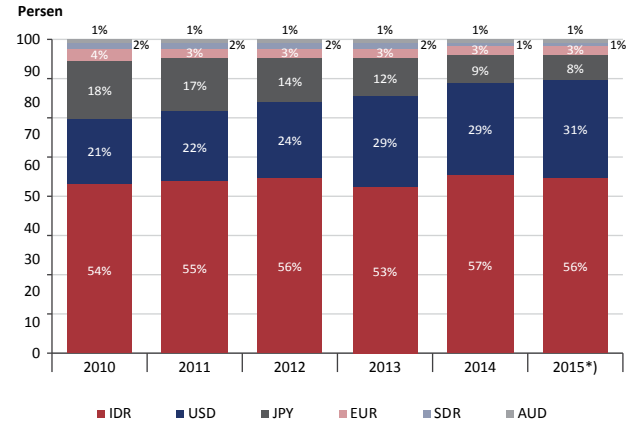
Realisasi pembiayaan berdampak pada peningkatan rasio utang pemerintah, meskipun masih jauh dari batas maksimal sebesar 60% PDB. Rasio Utang pemerintah

Grafik 7.9. Perkiraan Defisit Agregat Pemerintah



Sumber: Diolah berdasarkan LKPP dan Proyeksi Realisasi Sementara 31 Desember 2015 Siaran Pers update 22 Januari 2015, Surplus Pemerintah Daerah adalah perkiraan sementara

Grafik 7.10. Komposisi Denominasi SBN

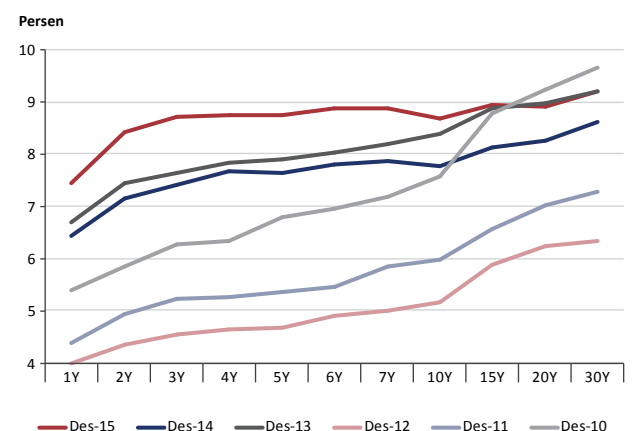


Sumber: Profil Utang Pemerintah Pusat Januari 2016, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan

pusat terhadap PDB pada posisi 31 Desember 2015 sebesar 26,8% dari PDB, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 24,7% (Grafik 7.12). Tingkat rasio tersebut masih di bawah batasan maksimal rasio utang dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB, dan lebih baik dari negara-negara lain.

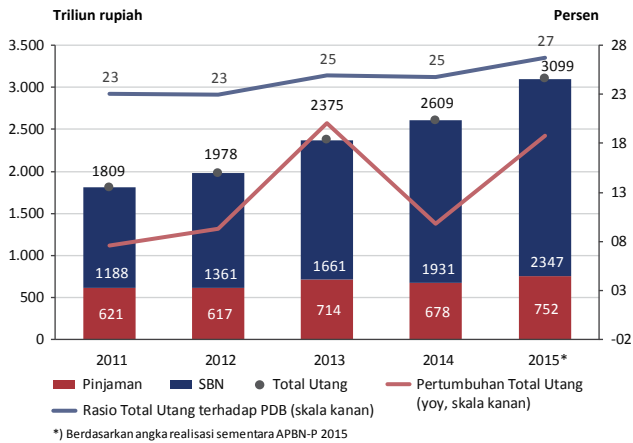
Dalam rangka akselerasi program-program APBN 2016, Pemerintah melakukan *prefunding* APBN 2016. Pada bulan Desember 2015, Pemerintah telah menerbitkan *Global Bond* sebesar 3,5 miliar dolar AS dan *Private Placement* sebesar Rp15 triliun, sehingga total *prefunding* yang diperoleh sekitar Rp63 triliun atau setara dengan 12% dari rencana penerbitan SBN bruto 2016. Upaya menyediakan pembiayaan yang lebih cepat untuk belanja di tahun 2016 yang disertai dengan peningkatan penerimaan pajak

Grafik 7.11. Imbal Hasil SBN



Sumber: Profil Utang Pemerintah Pusat Februari 2016, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan

Grafik 7.12. Porsi Utang Pemerintah terhadap PDB



*) Berdasarkan angka realisasi sementara APBN-P 2015

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah berdasarkan LKPP dan Keterangan Pers Realisasi Sementara 2015 update 22 Januari 2015

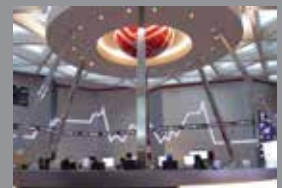
sepanjang Desember 2015 berdampak pada perubahan pola likuiditas perbankan. Berdasarkan pola historis, operasi keuangan pemerintah pada bulan Desember akan

Tabel 7.4. Net Claims on Government (NCG) 2013-2015

dalam miliar Rp

Keterangan	Des-13	Des-14	Des-15	Total 2015
Total <i>Inflow</i>	152.410	170.068	278.153	1.846.178
Total <i>Outflow</i>	221.605	173.383	230.686	1.993.973
Net Kontraksi/ (Ekspansi) Rupiah	-69.195	-3.315	47.467	-147.794
Kumulatif YTD	-193.711	-170.790	-147.794	

berdampak ekspansi sejalan dengan belanja pemerintah yang meningkat. Namun, pada bulan Desember 2015, kebijakan *prefunding* dan peningkatan pajak yang signifikan berdampak pada kontraksi likuiditas. Hal ini menyebabkan net ekspansi likuiditas pemerintah untuk keseluruhan tahun 2015 mengalami penurunan di tengah peningkatan nominal defisit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Tabel 7.4). Perubahan ini cukup berdampak terhadap likuiditas perbankan pada Desember 2015.



Keterangan gambar:

Seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global, kinerja pasar saham dan pasar obligasi domestik mengalami tekanan. Namun demikian, stabilitas sistem keuangan secara umum tetap terkendali.



Bab 8

Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan masih terkendali dengan baik di tengah tekanan yang meningkat. Belum pulihnya perekonomian domestik yang diikuti dengan peningkatan persepsi risiko kredit oleh bank telah mengurangi dampak pelonggaran kebijakan makropudensial dalam mendorong pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit perbankan, termasuk kredit kepada UMKM, tahun 2015 relatif terbatas dan lebih rendah dari prakiraan semula. Meski demikian, dukungan modal yang tinggi telah menopang resiliensi industri perbankan yang kuat di tengah penurunan kinerja keuangan perbankan. Di pasar keuangan, kondisi domestik dan global yang kurang menguntungkan juga memberikan tekanan terhadap perkembangan pasar saham dan obligasi.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) masih terjaga di level yang aman meskipun terjadi perlambatan ekonomi domestik sejak tahun 2014. Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menahan risiko instabilitas di sektor keuangan. Salah satu indikator yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai kondisi stabilitas sistem keuangan adalah Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK).¹ Selama tahun 2015, ISSK meningkat menjadi 0,93 dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,79, namun masih cukup jauh dari *threshold* sebesar 2 (Grafik 8.1).

Pada tahun 2015, kinerja industri perbankan, Industri Keuangan Nonbank (IKNB) dan pasar modal mengalami sedikit perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Meskipun demikian, di tengah berbagai tekanan, ketahanan perbankan nasional masih cukup kuat yang tercermin dari rasio permodalan yang tinggi dan risiko kredit yang terkendali. Sementara, IKNB secara umum juga menunjukkan penurunan kinerja pada tahun 2015 yang tercermin pada perlambatan pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan (PP), industri asuransi dan perusahaan dana pensiun. Dari sisi risiko, risiko PP dan asuransi juga meningkat, seperti tercermin pada peningkatan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan rasio klaim bruto dibandingkan premi bruto. Kinerja pasar obligasi dan saham juga menurun seiring dengan meningkatnya risiko di pasar keuangan. Penurunan kinerja di pasar obligasi dan saham pada tahun 2015 tercermin pada imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun yang meningkat, Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) yang menurun, serta meningkatnya volatilitas imbal hasil dari SBN dan IHSG.

Di tengah perlambatan pertumbuhan kredit, pembiayaan nonbank mengalami peningkatan. Peningkatan pembiayaan nonbank tersebut lebih banyak dilakukan oleh emiten di luar sektor keuangan sehingga pangsa emiten sektor keuangan menurun. Peningkatan pembiayaan nonbank tersebut tidak terlepas dari peningkatan *lending standard* oleh bank dalam penyaluran kredit seiring dengan peningkatan persepsi kredit oleh bank. Kondisi tersebut mendorong korporasi untuk menggunakan alternatif pembiayaan selain kredit, yaitu pembiayaan nonbank baik pasar saham, pasar obligasi dan sukuk korporasi, serta pasar *Medium Term Note* (MTN) dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

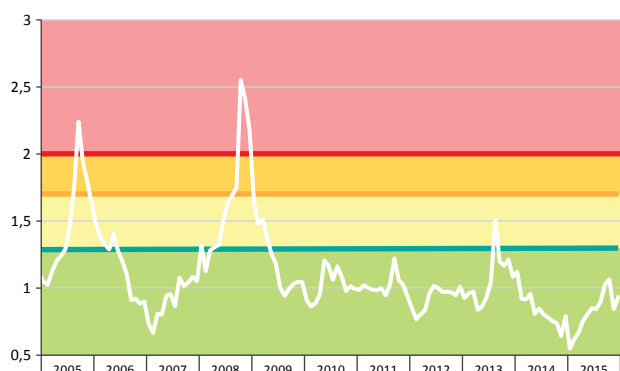
8.1. KINERJA PERBANKAN

Pada tahun 2015, kinerja industri perbankan mengalami sedikit perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Meskipun kinerja intermediasi melambat, industri perbankan masih mampu menjaga profitabilitasnya tumbuh positif. Pertumbuhan kredit pada tahun 2015 melambat menjadi 10,4% dari 11,6% pada tahun 2014. Akibat dari perlambatan tersebut, rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) juga mengalami penurunan, namun masih pada level yang cukup tinggi.

Di tengah berbagai tekanan, ketahanan perbankan nasional masih cukup kuat yang tercermin dari rasio permodalan yang tinggi dan risiko kredit yang terkendali. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal tahun 2015 meningkat menjadi 21,2% dari 19,5% pada tahun 2014. CAR tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di kawasan yang mencatat CAR tertinggi, yakni Thailand dengan CAR sebesar 17%. Risiko kredit masih terjaga pada level yang cukup rendah, dengan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 2,5%, hanya sedikit meningkat dibanding akhir tahun 2014 sebesar 2,2%. Kondisi ini mendorong perbankan lebih berhati-hati dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang terjadi dengan menjaga kemampuannya menyerap risiko.

Guna menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan makprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit. Kebijakan makprudensial tersebut meliputi: pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV), perluasan basis sumber pendanaan bank dengan *Loan to Funding Ratio* (LFR), kebijakan

Grafik 8.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan



1 Komponen pembentuk ISSK adalah Indeks Stabilitas Institusi Keuangan yang terdiri dari komponen tekanan, intermediasi dan efisiensi perbankan serta Indeks Stabilitas Pasar Keuangan.

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan kebijakan untuk memperkuat permodalan bank melalui ketentuan *countercyclical buffer*. Kebijakan tersebut mampu menahan perlambatan pertumbuhan kredit yang sempat mencapai 9,7% kembali di atas 10% dan menurunkan NPL yang sempat mencapai 2,8% kembali ke kisaran 2,5%.

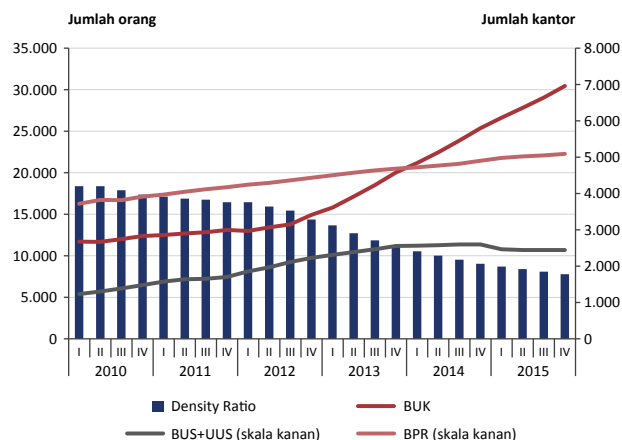
Perkembangan, Kinerja, dan Risiko Bank Umum

Struktur industri keuangan Indonesia pada tahun 2015 masih didominasi oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini terlihat dari total aset industri perbankan terhadap lembaga keuangan yang mencapai 78,2%.² Namun demikian, perlambatan kinerja intermediasi cukup berdampak pada perlambatan pertumbuhan aset perbankan. Secara kelembagaan, jumlah bank umum turun dari 119 bank menjadi 118 bank dan jumlah BPR turun dari 1.643 menjadi 1.637. Namun demikian, total aset perbankan tetap meningkat dari Rp5.615,1 triliun menjadi Rp6.132,8 triliun pada tahun 2015, atau meningkat 9,2%. Peningkatan tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 13,4%. Peningkatan total aset tersebut didukung dengan perluasan jaringan usaha bank, tercermin dari peningkatan jumlah kantor bank umum dari 25.477 menjadi 30.662 kantor dan jumlah kantor BPR dari 4.895 menjadi 5.100 kantor.

Bertambahnya jaringan kantor bank menunjukkan upaya bank berekspansi dan mendorong akses masyarakat yang lebih besar terhadap sistem keuangan (*financial inclusion*). Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan antara lain tercermin dari penurunan rasio jumlah kantor bank dengan jumlah penduduk (*density ratio*). Rasio densitas pada tahun 2015 menunjukkan bahwa satu kantor bank melayani 7.741 orang, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang melayani 9.021 orang (Grafik 8.2).³ Secara spasial, sebagian besar daerah di Indonesia telah memiliki rasio densitas yang cukup baik (Grafik 8.3). Beberapa daerah yang masih memiliki rasio densitas tinggi menjadi tantangan bagi industri perbankan untuk memperluas jaringan kantornya ke daerah tersebut.

Pada tahun 2015, kredit perbankan tumbuh melambat menjadi 10,4% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 11,6%, sebagai dampak dari perlambatan ekonomi domestik. Perlambatan ekonomi domestik telah

Grafik 8.2. Jumlah Kantor Bank dan Rasio Densitas Tahun 2010-2015



menyebabkan korporasi mengurangi permintaannya terhadap kredit yang digunakan untuk modal kerja. Selain kurangnya permintaan dari korporasi, perbankan juga bersikap lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dalam rangka menjaga risiko kreditnya pada level yang aman. Namun demikian, indeks *lending standard* mengalami penurunan pada semester II 2015 menjadi sebesar 5,9 pada akhir tahun 2015 sejalan dengan mulai terciptanya perbaikan momentum perkembangan ekonomi (Grafik 8.4).⁴ Pada tahun 2015, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menahan laju perlambatan kredit, yaitu pelonggaran LTV, perluasan sumber pendanaan intermediasi dengan aturan LFR, dan pengembangan UMKM. Pelonggaran LTV ditujukan untuk memberikan ruang bagi perbankan untuk meningkatkan kredit pada sektor properti dan otomotif. Sementara itu, aturan LFR diarahkan untuk memberikan ruang bagi bank untuk meningkatkan peran intermediasinya secara lebih luas tidak hanya mengandalkan sumber DPK. Kedua kebijakan tersebut ditempuh dalam konteks peran kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan kontrasiklikal, yaitu mengurangi laju perlambatan pertumbuhan kredit dan perekonomian.

Meskipun kinerja intermediasi cenderung melambat, namun peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi masih meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kredit terhadap PDB yang meningkat mencapai 45,6% pada tahun 2015 dibanding 40,1% pada tahun 2014. Namun apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan, seperti Malaysia, rasio tersebut masih cukup rendah. Rasio

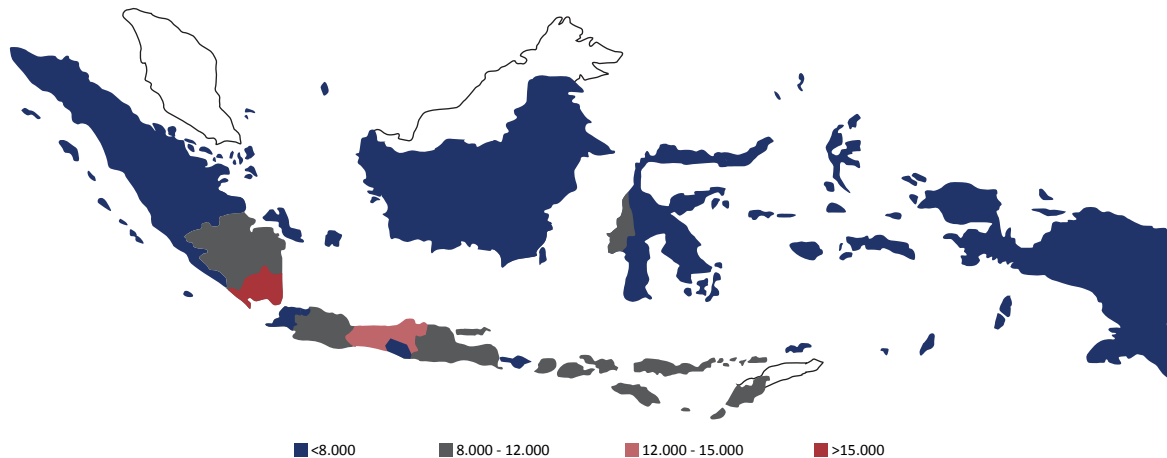
2 Kajian Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) edisi September 2015.

3 Koreksi terhadap data jumlah kantor BUK yang diterbitkan dalam Statistik Perbankan Indonesia oleh OJK.

4 Indeks yang menunjukkan perubahan persepsi atas tingkat keketatan penyaluran kredit perbankan.

Grafik 8.3.

Sebaran Spasial Rasio Densitas



kredit terhadap PDB Malaysia telah mencapai 123,1% pada tahun 2015 (Grafik 8.5).

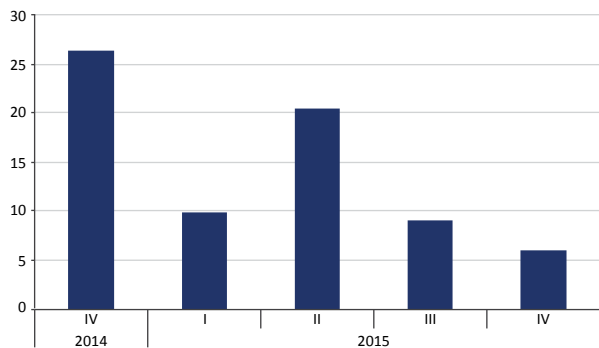
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumsi (KK) mengalami perlambatan, sementara kredit investasi (KI) tumbuh sedikit lebih tinggi. KMK tumbuh melambat menjadi 9,0% pada akhir 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 10,8%. Sementara itu, KI justru tumbuh meningkat di akhir tahun menjadi 14,7% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 13,2% (Grafik 8.6). Perlambatan pada KMK disebabkan oleh permintaan yang rendah dan percepatan pelunasan dari korporasi akibat perlambatan kegiatan ekonomi yang memengaruhi kinerja korporasi. Sementara, kredit konsumsi (KK) tumbuh melambat menjadi 9,1% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 11,5%. Kredit konsumsi sebagian besar berasal dari

sektor rumah tangga, terdiri atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Multiguna. Penurunan kinerja korporasi juga berdampak pada penurunan penghasilan rumah tangga sehingga mengurangi kredit konsumsinya. Namun demikian, laju perlambatan kredit konsumsi berhasil ditahan oleh pelanggaran aturan LTV.

Secara sektoral, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi di hampir semua sektor ekonomi. Perlambatan terutama terjadi pada sektor pertambangan, perdagangan dan lain-lain sebagai dampak dari penurunan harga komoditas yang menyebabkan kinerja korporasi menurun, baik yang memproduksi maupun yang memperdagangkan komoditas terkait (Grafik 8.7). Pada tahap awal, sektor yang terkena dampak terbesar adalah sektor pertambangan. Namun kemudian, dampak perlambatan menjalar ke sektor perdagangan sebagai *second round effect* dari penurunan

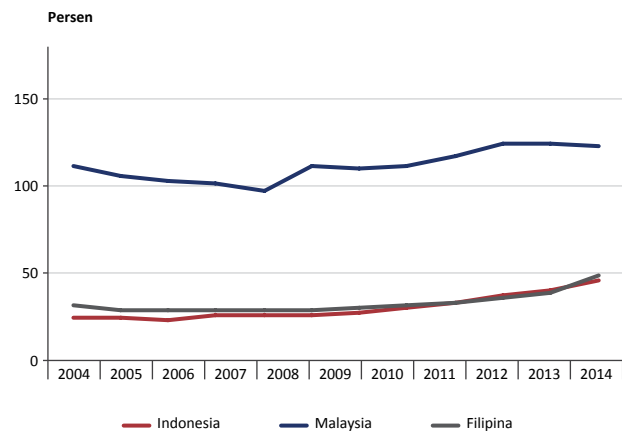
Grafik 8.4.

Perkembangan Indeks Lending Standard

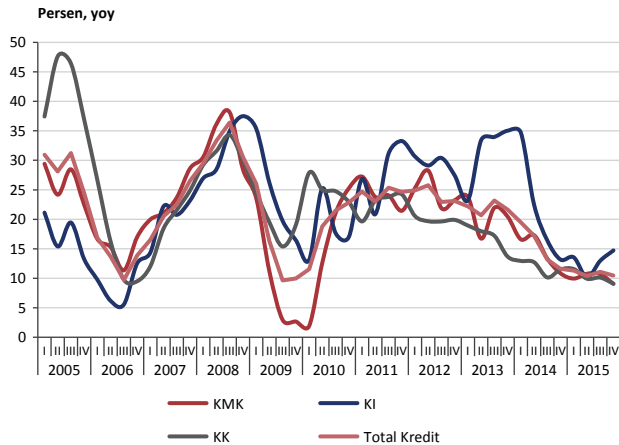


Grafik 8.5.

Rasio Kredit terhadap PDB



Grafik 8.6. Pertumbuhan Kredit Total dan Per Jenis Penggunaan



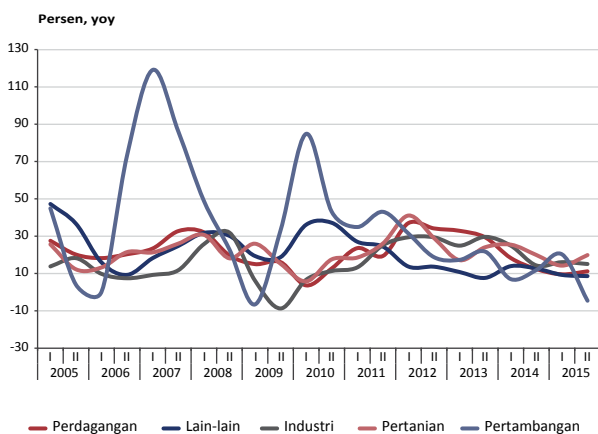
harga komoditas, terutama pada subsektor terkait perdagangan ekspor komoditas. *Second round effect* yang terjadi menyebabkan perlambatan kredit yang lebih dalam dibanding perlambatan yang terjadi pada tahun 2014. Pada sektor pertambangan, kinerja subsektor batubara yang merupakan salah satu produk komoditas utama mengalami penurunan yang signifikan. Menurunnya permintaan ekspor secara signifikan berdampak pada penurunan prospek usaha perusahaan sehingga permintaan terhadap kredit juga menurun. Akibat tingginya risiko yang dihadapi subsektor tersebut serta adanya penundaan ekspansi usaha atau restrukturisasi kredit bermasalah, korporasi yang menjadi debitur cenderung melakukan pelunasan pinjaman lebih awal dari yang dijadwalkan. Sementara untuk kredit sektor lain-lain atau kredit konsumsi yang sebagian besar merupakan KPR dan Multiguna juga mengalami perlambatan yang

cukup dalam sebagai dampak lanjutan dari menurunnya kinerja korporasi yang menyebabkan penghasilan rumah tangga menurun.

Risiko kredit perbankan cenderung meningkat di sepanjang tahun 2015 tetapi masih cukup jauh di bawah batas aman sebesar 5%. Rasio NPL *gross* perbankan pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,5% dari 2,2% pada tahun 2014 (Grafik 8.8). Peningkatan NPL tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kinerja korporasi di sektor yang terkena dampak penurunan harga komoditas. Dengan kondisi tersebut, sektor yang mengalami peningkatan NPL terutama berasal dari sektor pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan. Meskipun mengalami pemburukan dibandingkan dengan sektor lainnya, namun rasio NPL untuk ketiga sektor tersebut masih di bawah batas aman sebesar 5%.

Untuk sektor pertambangan, peningkatan NPL diakibatkan oleh penurunan kinerja perusahaan tambang akibat penurunan permintaan, khususnya batubara, dan penurunan harga di pasar internasional. Pemburukan pada sektor tersebut telah terjadi sejak tahun sebelumnya, namun berangsur mulai membaik pada akhir tahun 2015. Sejalan dengan hal ini, perbankan mengurangi penyaluran kredit kepada sektor tersebut dan lebih proaktif dalam mengupayakan penyelesaian kredit yang telah disalurkan sebelumnya. Peningkatan risiko kredit pada sektor pengangkutan dan perdagangan terutama disebabkan oleh *second round effect* dari penurunan permintaan dan penurunan harga komoditas. Sektor pengangkutan yang terkena dampak terbesar adalah angkutan komoditas melalui laut. Sementara itu, sektor perdagangan yang terkena dampak terbesar adalah ekspor barang komoditas.

Grafik 8.7. Pertumbuhan Kredit Lima Sektor Ekonomi Terbesar



Grafik 8.8. Perkembangan NPL Bank Umum

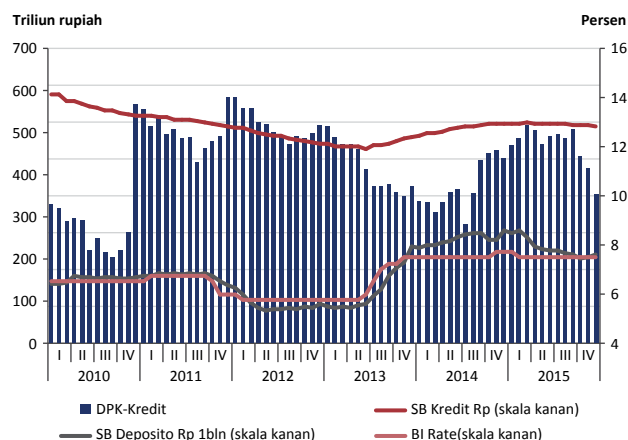


Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK juga melambat menjadi 7,3% pada akhir 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 12,3% seiring dengan melambatnya pertumbuhan kredit perbankan (Grafik 8.9). Perlambatan pertumbuhan DPK antara lain terkait dengan upaya peningkatan efisiensi perbankan melalui pengurangan biaya dana yang bersumber dari dana mahal dalam rangka menjaga tingkat profitabilitas. Disamping itu, menurunnya pertumbuhan DPK juga disebabkan oleh penurunan penghasilan masyarakat, akibat melemahnya kinerja korporasi, dan dampak dari peningkatan jumlah surat berharga yang dimiliki oleh Institusi Keuangan Non Bank pada tahun 2015.

Strategi efisiensi perbankan yang ditempuh berdampak pada penurunan suku bunga simpanan yang cukup signifikan sejak awal tahun 2015. Penurunan biaya dana (*cost of fund*) tersebut diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga kredit, walaupun dengan efek tunda (*lag*) dan besaran yang lebih kecil, sehingga *spread* suku bunga cenderung melebar (Grafik 8.10). Meskipun pertumbuhan DPK melambat, kondisi likuiditas perbankan selama tahun 2015 relatif stabil karena pertumbuhan kredit juga melambat. Hal ini tercermin pada relatif stabilnya rasio Alat Likuid (AL) terhadap DPK yang hanya menurun tipis dari 20,5% pada tahun 2014 menjadi 19,4% pada akhir tahun 2015 (Grafik 8.11). Rasio likuiditas tersebut masih jauh lebih besar dibandingkan batas aman sebesar 8,5% yang mengindikasikan masih amannya kondisi perbankan dalam mengantisipasi risiko penurunan likuiditas yang dapat terjadi.

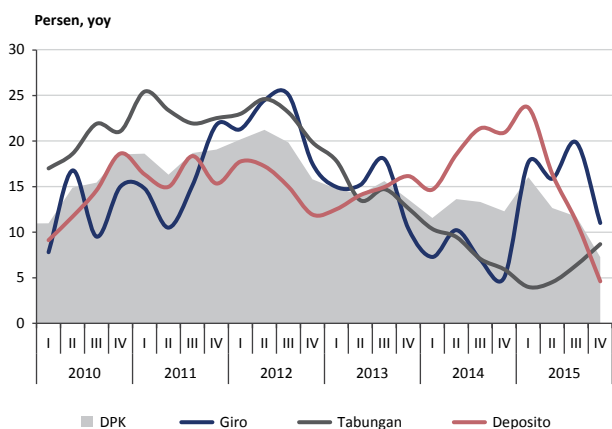
Kinerja intermediasi perbankan yang tertahan berdampak pada penurunan profitabilitas dan efisiensi perbankan yang tercermin pada rasio ROA yang menurun dan rasio

Grafik 8.10. Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiah dan BI Rate

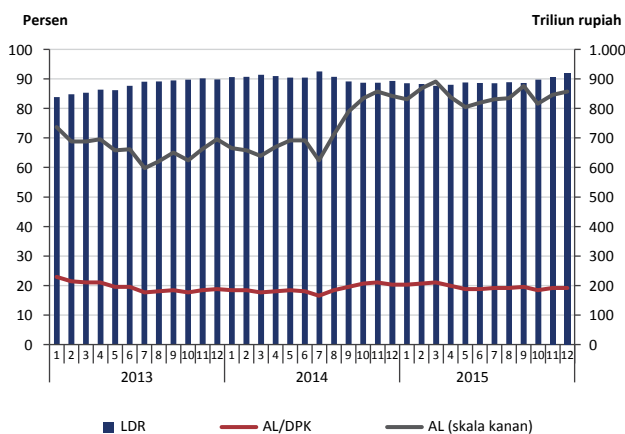


Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang meningkat. Penurunan kinerja yang tetap terjadi di tengah keberhasilan perbankan dalam menurunkan biaya dananya disebabkan oleh meningkatnya biaya pencadangan akibat dari perlambatan pertumbuhan kredit yang disertai peningkatan risiko kredit. Namun demikian, dibandingkan dengan negara kawasan, ROA perbankan Indonesia masih lebih tinggi. Penurunan ROA yang terjadi didorong oleh penurunan rasio NIM perbankan sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan kredit yang telah menyebabkan penurunan pendapatan bunga perbankan (Grafik 8.12). Rasio NIM pada akhir tahun 2015 tercatat 5,2%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,5%. Meski menurun, NIM perbankan di Indonesia tersebut masih jauh lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan Singapura yang berada

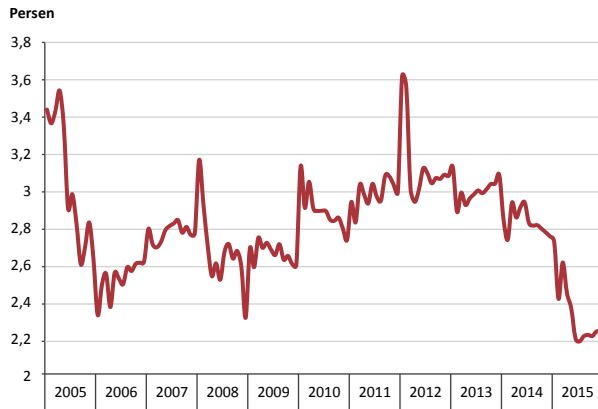
Grafik 8.9. Pertumbuhan DPK



Grafik 8.11. LDR dan Rasio AL/DPK



Grafik 8.12. Return on Asset (ROA)

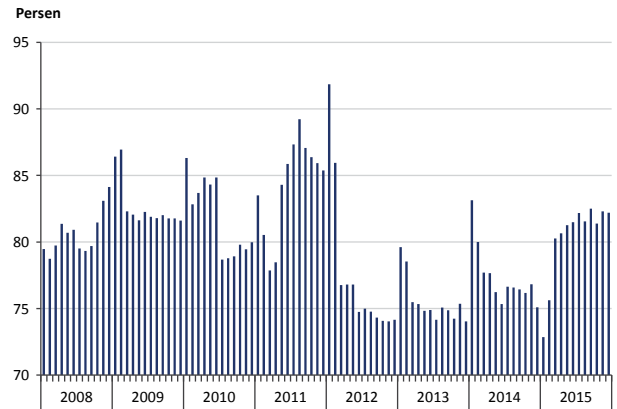


pada kisaran 1,6-2,0%. Lebih lanjut, meningkatnya biaya pencadangan dan menurunnya pendapatan bunga tersebut berdampak pada peningkatan rasio BOPO dari sebesar 75,1% pada tahun 2014 menjadi 82,2% pada akhir tahun 2015 (Grafik 8.13).

Perbankan di Indonesia tetap bersikap hati-hati (*prudent*) dalam menyikapi meningkatnya risiko eksternal dan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam kaitan ini, perbankan Indonesia pada tahun 2015 telah meningkatkan rasio permodalan sebagai bantalan risiko yang mungkin terjadi. Permodalan perbankan meningkat dari Rp722,2 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp938,1 triliun pada akhir tahun 2015. Rasio CAR pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 21,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan CAR tahun sebelumnya sebesar 19,4% (Grafik 8.14). Peningkatan permodalan yang ditempuh disamping untuk menjaga ketahanan menghadapi risiko yang dapat terjadi juga ditujukan sebagai persiapan perbankan untuk menghadapi berlakunya ketentuan Basel III yang mensyaratkan rasio permodalan yang lebih tinggi.

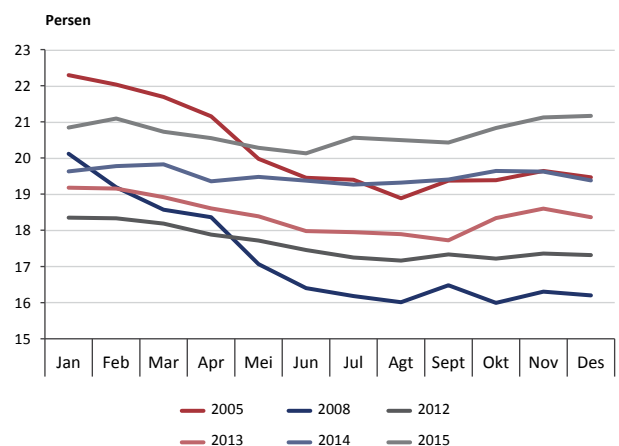
Bank Indonesia secara rutin melakukan asesmen ketahanan permodalan (CAR) bank terhadap risiko kredit dan risiko pasar dengan melakukan *stress test*, baik secara industri maupun individual bank. Penilaian ketahanan permodalan diuji terhadap risiko kredit dan risiko pasar. *Stress test* risiko kredit dilakukan dengan memperhitungkan dampak peningkatan NPL terhadap permodalan bank. Sementara, *stress test* risiko pasar dilakukan dengan memperhitungkan dampak peningkatan suku bunga, nilai tukar, dan penurunan harga SBN. Dampak risiko kenaikan suku bunga terhadap bank diukur melalui eksposur *net asset* dan kewajiban rupiah jangka pendek (di bawah 1 tahun) berdasarkan data *maturity*

Grafik 8.13. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)



profile bank. Penilaian ketahanan permodalan terhadap risiko pelemahan nilai tukar diukur melalui skenario pelemahan nilai tukar. Sementara itu, eksposur portofolio SBN bank dalam kategori *trading* dan *Available-for-Sale* (AFS) digunakan untuk menilai kerentanan bank terhadap risiko penurunan harga SBN di pasar obligasi. Hasil *stress test* dengan menggunakan skenario terburuk menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan kondisi perbankan, secara umum industri perbankan masih memiliki ketahanan permodalan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan CAR yang masih di atas batas aman. Apabila terjadi pemburukan ekonomi yang sangat signifikan, hasil *stress test* yang terintegrasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa bank yang membutuhkan suntikan modal untuk menjaga CAR-nya di atas *risk profile*.

Grafik 8.14. Perkembangan CAR Perbankan



Perkembangan, Kinerja dan Risiko Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2015 relatif stagnan. Dari sisi kelembagaan, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank, dengan 1.990 kantor, menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 2.151 kantor. Sementara itu, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) tetap sebanyak 22 UUS, dengan jumlah kantor sebanyak 311 kantor. Dari sisi aset, total aset perbankan syariah pada akhir tahun 2015 mencapai Rp296,3 triliun, meningkat Rp23,9 triliun atau 8,8% dari tahun 2014. Dengan total aset tersebut, pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 4,8% menurun tipis dibanding dengan tahun sebelumnya.

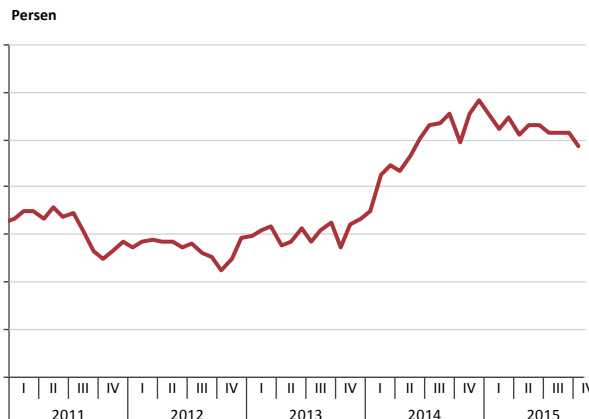
Perlambatan kinerja intermediasi dan peningkatan risiko pembiayaan juga dialami perbankan syariah. Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit perbankan, pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah pada tahun 2015 juga melambat menjadi 4,1%, dari 8,7% pada akhir tahun 2014 (Grafik 8.15). Perlambatan juga terjadi pada kinerja penghimpunan DPK dari 19,0% pada akhir tahun 2014 menjadi 2,4% pada akhir tahun 2015. Perlambatan kinerja intermediasi perbankan syariah tersebut lebih dalam dibandingkan dengan perlambatan industri perbankan nasional secara umum, dengan NPF yang cukup tinggi yaitu 4,8%, sedikit membaik dari tahun sebelumnya yang mencapai 5% (Grafik 8.16).

Perlambatan intermediasi bank syariah diikuti dengan penurunan kinerja. Secara profitabilitas, bank syariah cenderung stagnan di level yang cukup rendah, yang ditunjukkan dengan ROA yang jauh di bawah industri perbankan. ROA bank syariah pada tahun 2015 sebesar

Grafik 8.15. Perkembangan Intermediasi Bank Syariah



Grafik 8.16. Perkembangan NPF Bank Syariah



0,49%, meningkat tipis dibanding tahun 2014 sebesar 0,41%. Rasio profitabilitas yang rendah tersebut diikuti oleh rasio permodalan yang lebih rendah dibanding industri. CAR bank syariah pada tahun 2015 sebesar 15,0% turun dibanding CAR tahun 2014 sebesar 15,7%.

Perkembangan, Kinerja dan Risiko Kredit UMKM

Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik juga berdampak pada perlambatan permintaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akibat turunnya permintaan barang dan jasa. Di sisi lain, meningkatnya persepsi risiko kredit membuat perbankan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Pada tahun 2015, kredit UMKM mencapai Rp790,5 triliun atau hanya tumbuh sebesar 8,0% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 15,1% (yoy). Perlambatan kredit UMKM terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi, seperti sektor industri pengolahan yang tumbuh 10,0%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2014 sebesar 19,6%. Menurunnya permintaan barang dan jasa juga berdampak pada sektor lainnya, seperti sektor pertambangan yang bersumber dari UMKM pendukung (sewa truk, peralatan, dan upah buruh) dan sektor transportasi yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 19,2% dan 4,6%.

Berdasarkan klasifikasi usaha, perlambatan kredit UMKM terutama terjadi pada usaha mikro yang tumbuh sebesar 11,2%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 33,4%. Hal ini terkait dengan strategi perbankan, terutama bank-bank yang memiliki keterbatasan jaringan dan SDM, yang cenderung menahan penyaluran kredit usaha mikro akibat

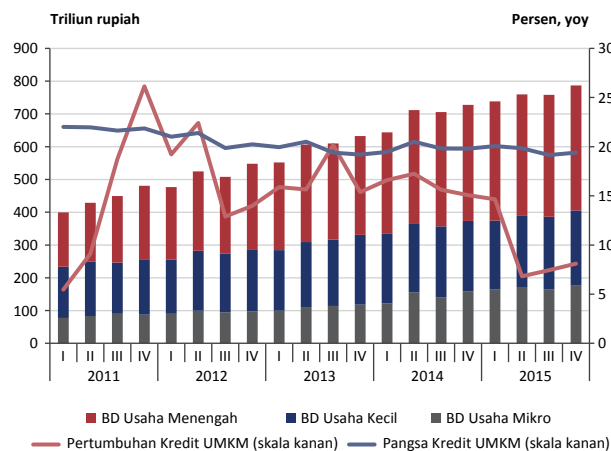
meningkatnya NPL. Bank-bank tersebut lebih fokus pada upaya perbaikan NPL pada tahun 2015. Di sisi lain, kredit usaha kecil menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 1,3% pada tahun 2014 menjadi 6,4% pada tahun 2015.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada tahun 2015 mencapai 19,3%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 19,7%. Porsi tersebut sebagian besar diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 52,2% (Rp412,7 triliun). Berdasarkan klasifikasi usaha, sebagian besar kredit UMKM disalurkan kepada usaha menengah dengan pangsa 48,6%, disusul oleh usaha kecil dengan pangsa 29,1%, dan usaha mikro dengan pangsa 22,3% (Grafik 8.17). Sementara itu berdasarkan lokasi proyek, penyerapan kredit UMKM masih terpusat di Jawa dengan pangsa sebesar 57,8%, disusul Sumatera sebesar 20,3%, dan Sulawesi sebesar 7,1%. Mayoritas kredit UMKM di ketiga wilayah tersebut diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran masing-masing sebesar 50,7%, 51,3% dan 62,5%.

Untuk terus mendorong penyaluran kredit kepada UMKM yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, pada tahun 2015 Bank Indonesia menerbitkan aturan yang memberikan insentif dan disinsentif bagi Bank Umum dalam pencapaian target penyaluran kredit UMKM. Pada akhir tahun 2015, Bank Umum wajib memenuhi tahap awal rasio kredit/pembiayaan UMKM minimal 5% dari total kredit/pembiayaan, serta menjaga rasio NPL kurang dari 5%. Mayoritas bank telah memenuhi rasio kredit UMKM di atas 5%, dan sebagian besar di antaranya juga mampu menjaga rasio NPL kredit UMKM dan NPL total kredit di bawah 5%.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru melalui Peraturan

Grafik 8.17. Trend Penyaluran Kredit UMKM



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada tanggal 7 Agustus 2015 (Tabel 8.1). KUR skema baru terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI dengan target penyaluran KUR tahun 2015 sebesar Rp30 triliun dengan suku bunga 12%. Selanjutnya, untuk mendorong penyaluran KUR, Pemerintah mengubah skema penyaluran KUR melalui penerbitan Permenko No. 8 Tahun 2015. Perubahan yang dilakukan antara lain meliputi: (i) penambahan sektor jasa-jasa dari sebelumnya yang hanya sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, (ii) tidak diwajibkannya agunan tambahan, (iii) penambahan jangka waktu kredit, dan (iv) mekanisme penyaluran melalui *linkage* baik *channeling* maupun *executing*. Bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR Mikro dan KUR Retail adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Sementara, untuk KUR TKI bank yang ditunjuk adalah Bank Sinarmas dan

Tabel 8.1. Skema KUR 2015

Keterangan	KUR Mikro	KUR Ritel	KUR TKI
Bidang Usaha	Pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan yang terkait		Terutama negara penempatan Singapura, Malaysia, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang
Plafon	s.d. Rp25 juta	>Rp25 juta s.d. Rp500 juta	s.d. Rp25 juta
Sumber Dana	100% dana bank pelaksana KUR		
Mekanisme Penyaluran	- Langsung dari bank pelaksana - Melalui lembaga <i>linkage</i> (pola <i>channeling</i>)		- Langsung dari bank pelaksana - Melalui lembaga <i>linkage</i> (pola <i>channeling</i> atau sindikasi)
Suku Bunga	12% (efektif per annum) atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara		
Jangka Waktu	- Maksimum 2 tahun untuk KMK - Maksimum 4 tahun untuk KI	- Maksimum 3 tahun untuk KMK - Maksimum 5 tahun untuk KI	Maksimum sesuai masa kerja dan tidak melebihi 3 tahun
Perusahaan Penjamin	Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo		

Bank Maybank Indonesia dengan penjaminan oleh Perum Jamkrindo dan PT Askrindo.

Sejak Agustus 2015 hingga 31 Desember 2015, realisasi KUR skema baru mencapai Rp22,8 triliun atau 75,9% dari target penyaluran. Jumlah penyaluran tersebut terdiri dari KUR Mikro sebesar Rp14,1 triliun (70,5% dari target), KUR Retail sebesar Rp8,7 triliun (96,2% dari target), dan KUR TKI sebesar Rp4,7 miliar (0,5% dari target). Tidak tercapainya target penyaluran KUR 2015 antara lain terkait dengan periode penyaluran KUR yang relatif pendek (lima bulan), terbatasnya bank penyalur, serta kurangnya sosialisasi skema KUR baru dan ketentuan pelaksanaannya. Selain itu, penyaluran KUR juga masih terkonsentrasi di wilayah Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat) dengan jumlah debitur sebanyak 1.003.663.

Risiko kredit UMKM juga mengalami peningkatan pada tahun 2015. Rasio NPL kredit UMKM tahun 2015 tercatat sebesar 4,2%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 4% (Grafik 8.18). Memburuknya NPL kredit UMKM terutama disebabkan oleh menurunnya kondisi keuangan debitur akibat perlambatan usaha seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, memburuknya NPL kredit UMKM juga disebabkan oleh belum kuatnya analisa dan monitoring yang dilakukan bank dalam penyaluran kredit UMKM. Tingginya rasio NPL kredit UMKM terutama terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran, yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan NPL UMKM tahun 2015 sebesar 49,2%. Sementara itu, rasio NPL kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 4%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 3,8%. Berdasarkan klasifikasi usaha, peningkatan NPL

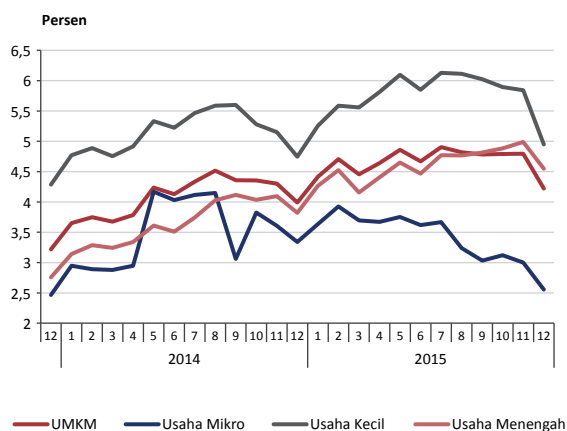
terjadi pada usaha kecil dan usaha menengah, yang pada tahun 2015 masing-masing mencapai 4,9% dan 4,5%. Tingkat NPL tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang masing-masing tercatat sebesar 4,7% dan 3,8%. Namun demikian, NPL usaha mikro menurun menjadi 2,6%, dari sebesar 3,3% pada tahun 2014. Hal tersebut disebabkan oleh sikap perbankan yang cenderung menahan laju penyaluran kredit usaha mikro, sejalan dengan peningkatan NPL, sehingga perbankan lebih fokus pada perbaikan NPL.

8.2. KINERJA SEKTOR KORPORASI DAN RUMAH TANGGA

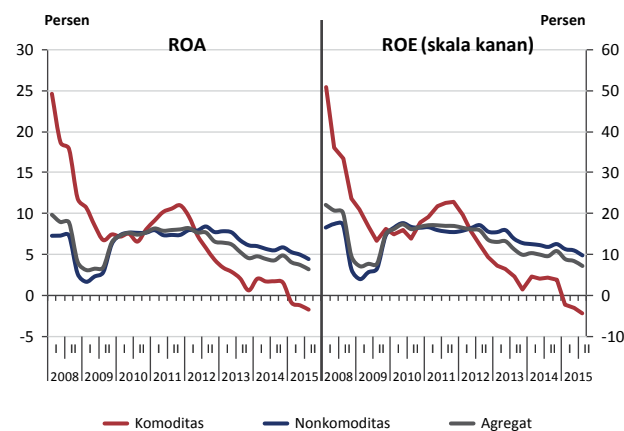
Pada tahun 2015, kinerja sektor korporasi mengalami penurunan namun masih memiliki ketahanan yang cukup baik. Profitabilitas korporasi mengalami penurunan yang menyebabkan kemampuan membayar hutang juga mengalami penurunan. Di sisi lain, sejalan dengan peningkatan volatilitas nilai tukar pada tahun 2015, korporasi cenderung mengurangi pengajuan kredit dan mulai melunasi kreditnya yang masih *outstanding*.

Secara umum, kinerja sektor korporasi publik di Indonesia melemah, tercermin dari penurunan profitabilitas dan kemampuan membayar hutang korporasi secara keseluruhan. ROA dan ROE, yang merupakan indikator profitabilitas, cenderung menurun pada tahun 2015. ROA turun dari 4,9% pada akhir 2014 menjadi 3,2% pada akhir September 2015. Sementara itu, ROE juga menurun dari 10,9% pada akhir 2014 menjadi 7,3% pada akhir September 2015 (Grafik 8.19). Penurunan profitabilitas tersebut telah menyebabkan proporsi hutang terhadap

Grafik 8.18. Trend Rasio NPL Kredit UMKM

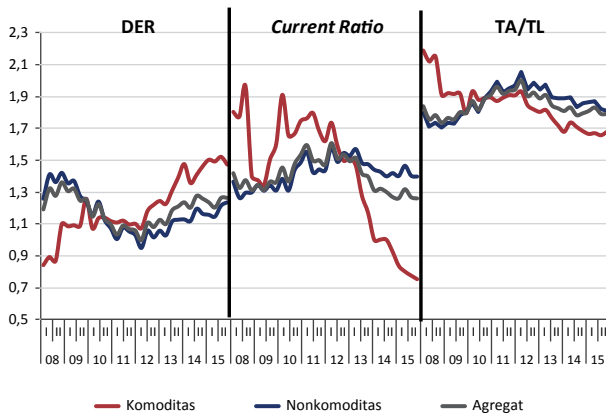


Grafik 8.19. Rasio Profitabilitas Korporasi Publik



Sumber: Lapkeu BEI dan Bloomberg, diolah

Grafik 8.20. Perkembangan Hutang Korporasi Publik

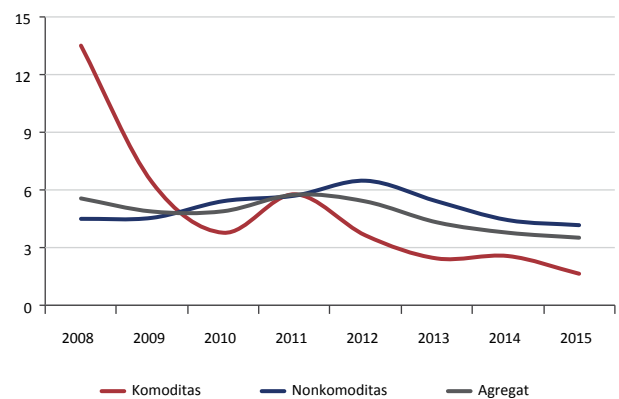


Sumber: Lapkeu BEI dan Bloomberg, diolah

modal korporasi menjadi semakin besar, tercermin dari indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) yang meningkat tipis dari sebesar 1,2 pada akhir 2014 menjadi 1,3 pada bulan September 2015 (Grafik 8.20). Melambatnya kinerja keuangan korporasi tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat dan perlambatan ekonomi global yang berpengaruh pada penurunan harga komoditas.

Tren penurunan harga komoditas yang terus berlanjut sejak tahun 2012 berpengaruh terhadap kinerja korporasi yang bergerak pada sektor tersebut. Strategi beberapa korporasi dalam menghadapi penurunan harga komoditas, salah satunya adalah dengan peningkatan volume ekspor, meski terjadi peningkatan biaya dan penurunan margin. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan membayar korporasi sektor komoditas yang tercermin

Grafik 8.22. Interest Coverage Ratio Korporasi Publik

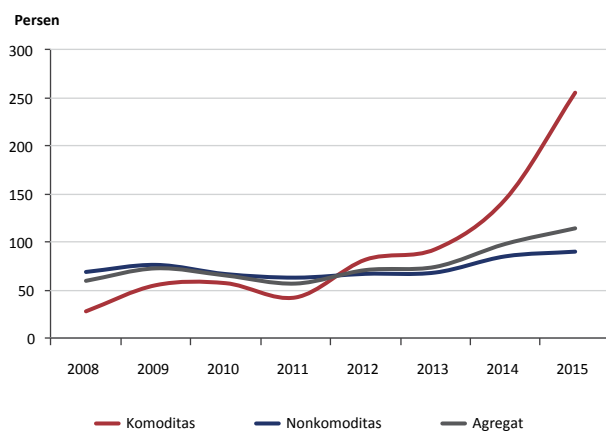


Sumber: Lapkeu BEI dan Bloomberg, diolah

dari *Debt Service Ratio* (DSR) yang meningkat tajam dari sebesar 144,5% pada 2014 menjadi 255,6% pada 2015 (Grafik 8.21). Disamping itu, rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi memburuk dari sebesar 2,6 pada tahun 2014 menjadi 1,7 pada tahun 2015 (Grafik 8.22).

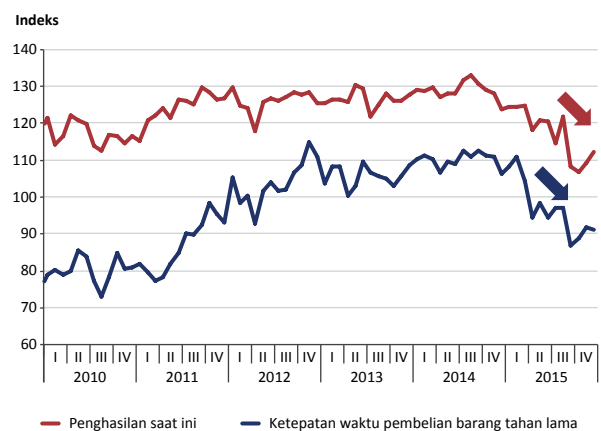
Perlambatan kinerja korporasi menyebabkan permintaan terhadap kredit perbankan melemah, terlebih ditambah adanya percepatan pelunasan kredit oleh korporasi untuk mengurangi risiko volatilitas nilai tukar. Selain itu, perlambatan kinerja korporasi juga telah menyebabkan peningkatan risiko kredit yang dihadapi perbankan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perbankan secara keseluruhan. Selain berdampak terhadap kinerja perbankan, penurunan kinerja korporasi juga berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga yang tercermin pada penurunan indeks penghasilan dari 123,8%

Grafik 8.21. Debt Service Ratio Korporasi Publik

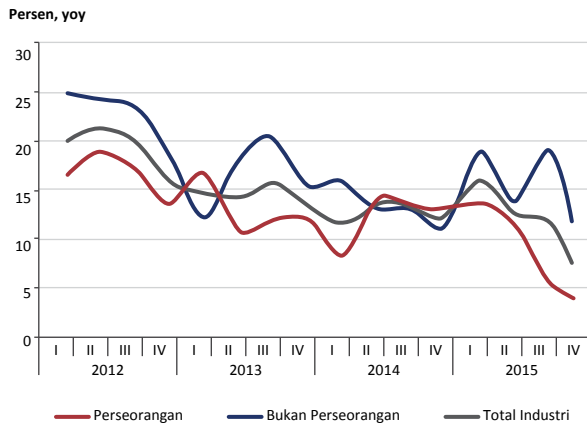


Sumber: Lapkeu BEI dan Bloomberg, diolah

Grafik 8.23. Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga



Grafik 8.24. Perkembangan DPK Berdasarkan Kepemilikan



pada akhir 2014 menjadi 112,3% pada akhir tahun 2015 (Grafik 8.23). Penurunan penghasilan ini juga tercermin pada peningkatan DSR rumah tangga dari 13,0 pada akhir tahun 2014 menjadi 13,2 pada akhir tahun 2015. Peningkatan DSR rumah tangga ini mengindikasikan semakin besarnya porsi cicilan terhadap pendapatan. Selain itu, penurunan penghasilan juga tercermin pada pertumbuhan DPK milik Perseorangan yang menurun sehingga menjadi lebih rendah daripada pertumbuhan DPK Nonperseorangan (Grafik 8.24). Selain menyebabkan penurunan DPK Perseorangan, penurunan penghasilan juga berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan dan peningkatan rasio NPL kredit konsumsi.

8.3. INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB) DAN KINERJA PASAR KEUANGAN

IKNB menunjukkan penurunan kinerja pada tahun 2015. Perusahaan pembiayaan (PP), industri asuransi dan perusahaan dana pensiun mencatat perlambatan pertumbuhan aset sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Sementara, jasa pegadaian mencatat peningkatan pertumbuhan aset pada tahun 2015, yaitu sebesar 10,9%, atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,0%. Dari sisi risiko, seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, risiko IKNB juga mengalami peningkatan. Risiko PP meningkat seperti tercermin pada peningkatan rasio NPF, meski masih terjaga dalam level yang rendah. Sementara itu, untuk industri asuransi, peningkatan risiko tingkat usaha ditunjukkan oleh rasio klaim bruto terhadap premi bruto. Namun demikian, disisi lainnya, risiko likuiditas asuransi relatif masih terjaga yang tercermin dari masih tingginya rasio *current asset* terhadap *current liabilities*.

Kinerja pasar modal, baik di pasar obligasi maupun pasar saham, juga mengalami penurunan pada tahun 2015. Di sisi pasar obligasi, penurunan kinerja tercermin dari imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun yang meningkat dari 7,80% pada tahun 2014 menjadi 8,75% pada tahun 2015. Di sisi pasar saham, penurunan kinerja tercermin pada turunnya IHSG menjadi sebesar 4.593,01 pada akhir tahun 2015, atau turun 12,13% dari IHSG pada akhir tahun 2014 sebesar 5.226,95. Sejalan dengan penurunan kinerja tersebut, risiko di pasar obligasi dan pasar saham juga meningkat. Peningkatan risiko di pasar obligasi tercermin baik pada peningkatan imbal hasil SBN tenor 10 tahun maupun peningkatan volatilitas dari imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun. Sementara, peningkatan risiko di pasar saham pada tahun 2015 tercermin pada turunnya IHSG dan volatilitas IHSG yang meningkat.

Sementara itu, pembiayaan nonbank pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Pembiayaan nonbank tersebut lebih banyak dilakukan oleh emiten nonsektor keuangan sehingga pangsa emiten sektor keuangan menurun. Pembiayaan nonbank, baik melalui pasar saham, pasar obligasi dan sukuk korporasi, serta pasar MTN dan NCD pada tahun 2015 mencapai Rp136,1 triliun, atau meningkat dibandingkan pada tahun 2014 sebesar Rp111,4 triliun. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peningkatan *lending standard* oleh bank dalam penyaluran kredit seiring dengan peningkatan persepsi kredit oleh bank. Kondisi tersebut mendorong korporasi untuk menggunakan alternatif pembiayaan selain kredit, yaitu pembiayaan nonbank baik pasar saham, pasar obligasi dan sukuk korporasi, serta pasar MTN dan NCD.

Kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB)

IKNB secara umum mencatat perlambatan pertumbuhan aset sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Perusahaan pembiayaan (PP), industri asuransi, dan perusahaan dana pensiun mencatat perlambatan pertumbuhan aset pada tahun 2015, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 1,3%, 4,6%, dan 10,2%, atau turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 5%, 17,1%, dan 13,7%. Sementara itu, jasa pegadaian mencatat peningkatan pertumbuhan aset pada tahun 2015, yaitu sebesar 10,9%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,0%. Peningkatan kinerja jasa pegadaian juga ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan pembiayaan jasa pegadaian yang tumbuh sebesar 12,3%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 5,3%. Salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan pembiayaan jasa pegadaian tersebut adalah peningkatan

kebutuhan sektor usaha, seperti perusahaan konveksi dan jasa kontraktor, untuk memperoleh permodalan jangka pendek setiap tahunnya dengan menggadaikan asetnya agar semakin produktif.

Dari sisi pembiayaan oleh PP, pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2015 melambat menjadi -0,8% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,2% seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Berdasarkan jenis pembiayaan, pembiayaan sewa guna usaha mencatat pertumbuhan negatif sebesar -5,0%, meski sudah lebih baik dibandingkan pada tahun 2014 sebesar -5,5%. Sementara itu, pembiayaan konsumen dan anjak piutang mencatat pertumbuhan positif, yaitu masing-masing sebesar 0,5% dan 14,1%, atau melambat dibandingkan dengan tahun 2014 masing-masing sebesar 10,2% dan 22,3%. Berdasarkan jenisnya, pembiayaan konsumen masih mendominasi pembiayaan PP dengan kontribusi sekitar 68,0% dari total pembiayaan, atau naik dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 67,12%. Sementara itu, sewa guna usaha merupakan jenis pembiayaan terbesar kedua dengan pangsa pada akhir tahun 2015 sebesar 29,0%, atau sedikit turun dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 30,3%. Secara nominal, jumlah pembiayaan selama tahun 2015 mencapai Rp363,3 triliun dalam bentuk pembiayaan konsumen (Rp247,1 triliun), *leasing* (Rp105,4 triliun), anjak piutang (Rp10,7 triliun), dan kartu kredit (Rp95,0 miliar). Dengan demikian, sebagaimana pada tahun sebelumnya, fokus PP masih pada pembiayaan konsumen, khususnya dengan jangka waktu pendek.

Dari sisi risiko, seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, risiko PP dan asuransi juga meningkat, tercermin pada peningkatan rasio NPF dan rasio klaim bruto dibandingkan premi bruto. Rasio NPF pada semester I 2015

mengalami sedikit peningkatan dari 1,4% pada akhir tahun 2014 menjadi sebesar 1,4% pada Juni 2015. Meskipun mengalami peningkatan, rasio NPF tersebut masih terjaga dalam level rendah seiring dengan intensifnya PP dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah. Sementara itu, untuk industri asuransi, peningkatan risiko tingkat usaha ditunjukkan oleh rasio klaim bruto terhadap premi bruto pada semester I 2015 sebesar 71,3% atau meningkat dibandingkan dengan semester II 2014 sebesar 62,4%. Namun demikian, disisi lainnya, risiko likuiditas asuransi relatif masih terjaga yang tercermin dari masih tingginya rasio *current asset* terhadap *current liabilities*.

Kinerja Pasar Obligasi

Kinerja pasar obligasi selama tahun 2015 menunjukkan penurunan yang tercermin dari imbal hasil SBN yang meningkat. Imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 8,75%, meningkat 95 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2014 sebesar 7,80% (Grafik 8.25). Di pasar perdana, kinerja pasar SBN juga menunjukkan penurunan ditunjukkan oleh imbal hasil SBN yang menunjukkan tren kenaikan. Imbal hasil SBN untuk tenor 1 tahun yang terakhir ditawarkan pada tahun 2015 tercatat sebesar 6,94% atau meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2014 sebesar 6,82%. Penurunan kinerja tersebut tidak terlepas dari sentimen dari perekonomian global, khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih melambat, ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama kenaikan FFR dan devaluasi yuan, serta divergensi kebijakan moneter negara maju. Sementara, dari perekonomian domestik, rilis pertumbuhan ekonomi yang

Grafik 8.25. Imbal Hasil SBN 10 Tahun dan Faktor Sentimen Selama 2015



Sumber: Bloomberg, diolah

di bawah perkiraan cukup berdampak pada penurunan kinerja di pasar obligasi.

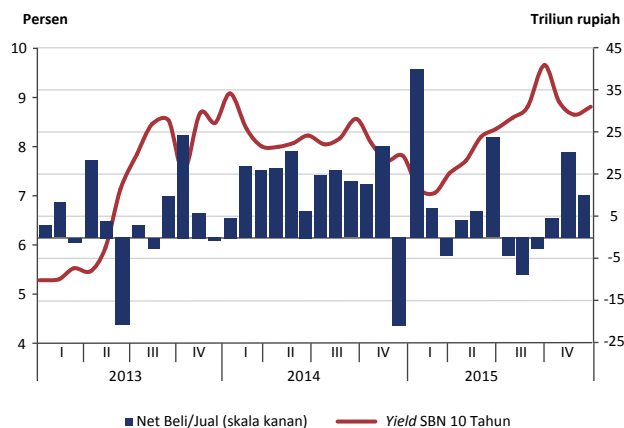
Risiko pasar obligasi juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 dipengaruhi oleh penurunan kinerja indikator-indikator risiko pasar obligasi. Hal ini tercermin pada imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun mengalami kenaikan pada tahun 2015. Selain itu, volatilitas imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,65 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 0,31. *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia juga menunjukkan penurunan kinerja yang tercermin dari naiknya CDS dari 160,31 pada akhir 2014 menjadi 222,92 pada akhir 2015.

Dinamika selama tahun 2015 diwarnai oleh imbal balik SBN sempat meningkat pada triwulan I 2015 seiring dengan optimisme pelaku pasar. Optimisme tersebut merupakan respons atas bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan BI yang menurunkan BI rate pada bulan Februari 2015 direspons positif oleh pasar dengan keyakinan inflasi akan tetap terkendali dan rendah. Pada triwulan II hingga akhir 2015, imbal balik SBN menunjukkan penurunan kinerja, yang tercermin dari imbal balik SBN yang terus menunjukkan kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dibawah ekspektasi pasar, kebijakan devaluasi yuan oleh bank sentral Tiongkok atau People's Bank of China (PBoC), dan kekhawatiran kenaikan FFR yang meningkat, pasca rilis data dan manufaktur AS yang membaik, merupakan sentimen negatif yang mendorong kenaikan imbal balik SBN.

Tren kenaikan imbal balik SBN tersebut dapat tertahan seiring dengan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah melalui bauran kebijakan dalam menghadapi tekanan di pasar keuangan. Paket Kebijakan Pemerintah, khususnya Paket Kebijakan Pemerintah Jilid 2 pada tanggal 9 September 2015 (yang difokuskan untuk memperbaiki iklim investasi dan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah) berdampak positif pada penurunan imbal balik SBN. Pada periode yang sama, menurunnya kekhawatiran kenaikan FFR seiring dengan rilis data *Nonfarm Payroll* (NFP) yang turun dalam diluar ekspektasi pelaku pasar, juga mendorong penurunan imbal balik SBN lebih jauh. Meskipun demikian, pada akhir tahun, imbal hasil SBN pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 8,75% atau meningkat 95 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2014 sebesar 7,80%

Kinerja pasar SBN selama tahun 2015 yang menunjukkan penurunan juga tercermin pada turunnya aktivitas investor nonresiden yang membeli SBN. Selama tahun 2015, investor nonresiden tercatat melakukan net beli di pasar

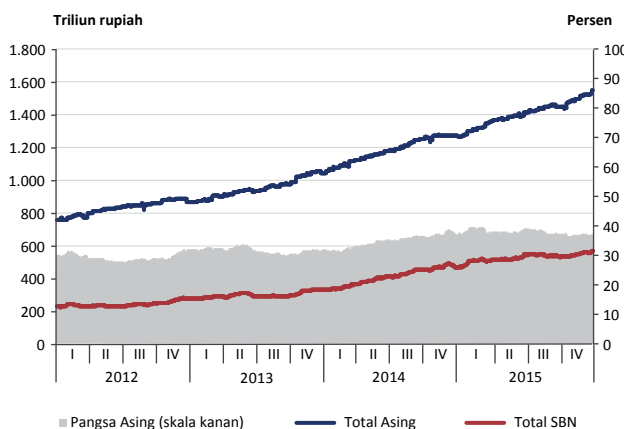
Grafik 8.26. Imbal Hasil SBN dan Net Beli/Jual Asing



Sumber: Bloomberg, diolah

SBN sebesar Rp96,1 triliun, lebih rendah dibandingkan net beli nonresiden pada tahun 2014 sebesar Rp137,5 triliun. Pada triwulan I 2015, investor nonresiden sempat mencatat net beli cukup besar mencapai Rp42,7 triliun seiring dengan optimisme atas respons bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah (Grafik 8.26). Namun demikian, pada triwulan III 2015, investor nonresiden mencatat net jual seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan dunia akibat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang di bawah ekspektasi pasar, devaluasi yuan, serta kekhawatiran kenaikan FFR yang meningkat. Kondisi tersebut berbalik pada triwulan IV 2015 seiring dengan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global yang ditopang optimisme yang meningkat sejalan dengan langkah-langkah stabilisasi rupiah yang ditempuh Bank Indonesia dan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah.

Grafik 8.27. Pangsa Kepemilikan Investor Nonresiden di Pasar SBN



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Peran investor nonresiden masih cukup besar di pasar SBN. Pangsa kepemilikan investor nonresiden di pasar SBN selama tahun 2015 relatif stabil di kisaran 37%. Secara rata-rata, pangsa kepemilikan investor nonresiden di pasar SBN pada tahun 2015 tercatat sebesar 37,4%, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 34,5% (Grafik 8.27). Kontribusi investor nonresiden yang cukup besar dalam kepemilikan SBN berimplikasi pada kuatnya faktor eksternal dalam memengaruhi dinamika di pasar SBN serta cukup tingginya risiko apabila terjadi pembalikan sentimen.

Kinerja Pasar Saham

Pasar saham domestik juga menunjukkan penurunan kinerja, yang tercermin pada turunnya IHSG menjadi sebesar 4.593,01 pada akhir tahun 2015, atau turun 12,13% dari IHSG pada akhir tahun 2014 sebesar 5.226,95. Pada triwulan I 2015, IHSG sempat menunjukkan peningkatan seiring dengan ekspektasi membaiknya pendapatan emiten pada tahun 2014 dan sentimen positif atas rilis laporan keuangan dan pembayaran deviden oleh emiten. Sementara itu, sentimen positif dari perekonomian global pada awal tahun 2015 juga mendorong penguatan IHSG. Sentimen positif dari eksternal tersebut antara lain meliputi peluncuran kebijakan ECB pada akhir Januari 2015 untuk memperluas QE dan spekulasi stimulus lanjutan dari PBoC pada akhir Maret 2015.

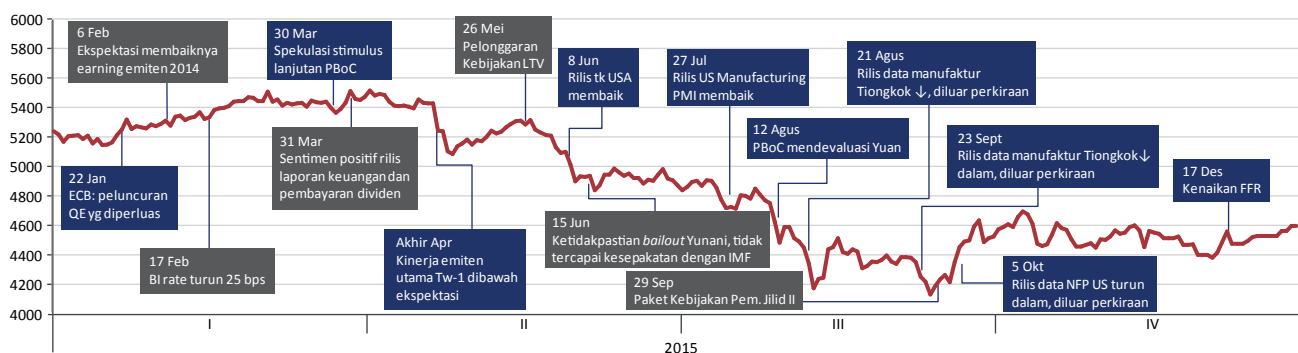
Risiko pasar saham juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 dipengaruhi turunnya IHSG dan naiknya volatilitas IHSG. Volatilitas IHSG pada tahun 2015 tercatat sebesar 407,7, meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 256,3. Tingginya volatilitas tersebut tidak

terlepas dinamika IHSG yang menunjukkan tren penurunan sejak triwulan II 2015. Pada triwulan II hingga akhir 2015, IHSG menunjukkan tren penurunan kinerja. Diawali dengan sentimen negatif kinerja emiten utama pada triwulan I 2015 yang dibawah ekspektasi, IHSG mulai menunjukkan tren penurunan pada awal April 2015. Sementara itu, dari sisi eksternal, berbagai sentimen negatif yang mendorong penurunan pasar obligasi juga menyebabkan mendorong turunnya IHSG lebih lanjut (Grafik 8.28).

Bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah mampu menahan penurunan IHSG. Seperti halnya di pasar obligasi, tren penurunan kinerja IHSG dapat tertahan seiring dengan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah melalui bauran kebijakan dalam menghadapi tekanan di pasar keuangan, termasuk dalam hal ini Paket Kebijakan Pemerintah, khususnya Paket Kebijakan Pemerintah Jilid 2 pada tanggal 9 September 2015. Meredanya kekhawatiran pasar terkait perkiraan ditundanya kenaikan FFR pada Oktober 2015 juga turut menopang kenaikan IHSG pada akhir tahun 2015. Namun demikian, secara keseluruhan tahun 2015, IHSG pada akhir tahun tercatat sebesar 4.593,01 pada akhir tahun 2015, atau turun 12,13% dari IHSG pada akhir tahun 2014 sebesar 5.226,95.

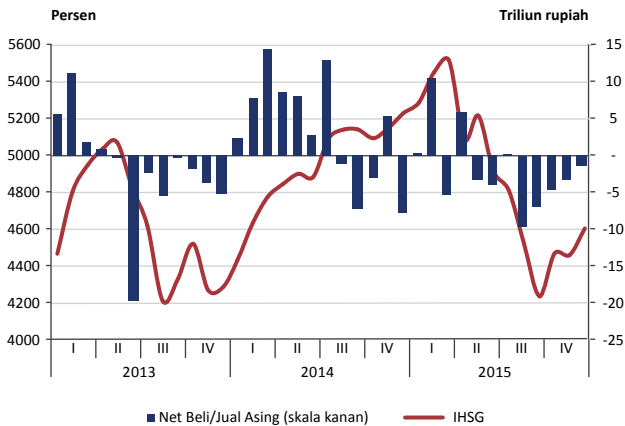
Penurunan kinerja pasar saham pada tahun 2015 juga terefleksikan pada tingginya net jual investor nonresiden di pasar saham. Selama tahun 2015, investor nonresiden tercatat melakukan net jual di pasar saham sebesar Rp22,6 triliun, sementara pada tahun 2014, investor nonresiden tercatat melakukan net beli sebesar Rp42,6 triliun (Grafik 8.29). Di sisi dinamika triwulan, pada triwulan I 2015, investor nonresiden masih mencatat net beli sebesar Rp5,4 triliun didorong oleh sentimen positif di pasar saham, antara lain ekspektasi membaiknya kinerja

Grafik 8.28. IHSG dan Faktor Sentimen Selama 2015



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 8.29. IHSI dan Net Beli/Jual Asing



emiten, keyakinan inflasi yang akan tetap terkendali, serta kebijakan ECB pada akhir Januari 2015 untuk memperluas QE. Namun demikian, sejak triwulan II 2015, tekanan jual oleh investor nonresiden meningkat seiring sentimen negatif, terutama dari sektor eksternal, antara lain devaluasi yuan, *concern* kenaikan FFR yang meningkat, dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lebih rendah dari perkiraan. Seperti yang terjadi di pasar obligasi, tekanan net jual mulai mereda, terutama pada triwulan IV 2015, seiring dengan mulai meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global dan perkembangan domestik yang mulai membaik. Sejak triwulan II 2015 sampai dengan akhir tahun, investor nonresiden tercatat melakukan net jual sebesar Rp26,6 triliun.

Peran investor nonresiden juga masih cukup besar di pasar saham. Pangsa investor nonresiden (beli) dalam nilai perdagangan cukup berfluktuatif, namun dengan pangsa yang cukup besar (>30%). Secara rata-rata, pangsa nilai perdagangan investor nonresiden di pasar saham pada tahun 2015 tercatat sebesar 42,2%, atau sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 42,0%. Kontribusi investor nonresiden yang cukup besar dalam nilai perdagangan tersebut mencerminkan kuatnya faktor eksternal dalam memengaruhi dinamika di pasar saham dan besarnya risiko pembalikan di pasar saham.

Pembiayaan Nonbank

Pembiayaan nonbank pada tahun 2015 meningkat dengan pangsa sektor keuangan yang menurun. Pembiayaan nonbank pada tahun 2015 mencapai Rp136,1 triliun, atau meningkat dibandingkan pada tahun 2014 sebesar Rp 111,4 triliun (Tabel 8.2). Pembiayaan nonbank pada tahun 2015 lebih banyak dilakukan oleh emiten nonsektor

keuangan sehingga pangsa sektor keuangan mengalami penurunan. Penurunan pangsa sektor keuangan terjadi terutama pada pembiayaan melalui pasar saham. Turunnya pangsa sektor keuangan dalam pasar saham tersebut (atau peningkatan peran sektor non keuangan) merupakan indikasi dari berjalannya pendalaman pembiayaan melalui pasar saham. Sementara itu, pangsa sektor keuangan masih dominan pada pembiayaan non bank lainnya, baik melalui obligasi maupun melalui *Medium Term Note* (MTN) dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Pembiayaan nonbank baik melalui pasar saham, pasar obligasi dan sukuk korporasi serta pasar MTN dan NCD menunjukkan peningkatan pada tahun 2015, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peningkatan *lending standard* oleh bank dalam penyaluran kredit seiring dengan peningkatan persepsi kredit oleh bank. Kondisi tersebut mendorong korporasi untuk menggunakan alternatif pembiayaan selain kredit, baik dari pasar saham, pasar obligasi dan sukuk korporasi, serta pasar MTN dan NCD.

Jumlah pembiayaan di pasar saham selama tahun 2015, baik melalui *right issue* maupun *Initial Public Offering* (IPO), tercatat sebesar Rp53,5 triliun, atau meningkat 12,3%, dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp47,7 triliun. Peningkatan pembiayaan di pasar saham tersebut didorong oleh peningkatan pembiayaan baik melalui *right issue* maupun IPO. Pembiayaan dalam bentuk *right issue* di pasar perdana tercatat sebesar Rp42,3triliun, atau naik 7,3% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp39,2 triliun. Sementara itu, jumlah pembiayaan melalui *Initial Public Offering* (IPO) tercatat sebesar Rp11,3 triliun, atau naik 35,8% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar

Tabel 8.2. Total Pembiayaan Nonbank

Keterangan	2014	2015
TOTAL PEMBIAYAAN NONBANK	111,4	136,05
Total o/w Emiten Sektor Keuangan	52,3	60,4
Pangsa Sektor Keuangan (%)	47,0	44,4
Saham	47,7	53,5
Saham o/w Emiten Sektor Keuangan	9,8	3,9
Pangsa Sektor Keuangan (%)	20,5	7,3
Obligasi dan Sukuk	48,7	62,4
Obligasi o/w Emiten Sektor Keuangan	33,4	42,3
Pangsa Sektor Keuangan (%)	68,5	67,7
MTN dan Promissory Notes +NCD	14,9	20,1
MTN, NCD o/w Emiten Sektor Keuangan	9,2	14,2
Pangsa Sektor Keuangan (%)	61,3	70,6

Sumber: OJK dan KSEI, diolah

Tabel 8.3.

Pembiayaan IPO dan *Right Issue*

IPO

Sektor	Realisasi 2014			Realisasi 2015		
	Jumlah Emiten	Nilai*	Pangsa (%)	Jumlah Emiten	Nilai*	Pangsa (%)
Pertanian	1	0,2	2,4	-	-	-
Pertambangan	1	0,3	3,9	1	0,8	7,4
Industri Dasar	2	1,8	21,8	-	-	-
Aneka Industri	-	-	-	2	0,3	2,6
Industri Barang Konsumsi	1	0,1	1,2	1	0,9	7,7
Properti dan <i>Real Estate</i>	1	0,4	5,2	5	3,5	30,7
Infrastruktur, <i>Utility</i> , dan Transportasi	4	3,2	38,8	-	-	-
Keuangan	6	0,5	6,1	3	0,1	1,2
Perdagangan, Jasa, dan Investasi	4	1,7	20,6	3	5,7	50,3
Total	20	8,3	100,0	15	11,27	100,0

Right Issue

Sektor	Realisasi 2014			Realisasi 2015		
	Jumlah Emiten	Nilai*	Pangsa (%)	Jumlah Emiten	Nilai*	Pangsa (%)
Pertanian	1	10,8	27,6	-	-	-
Pertambangan	3	1,9	4,9	1	5,4	12,7
Industri Dasar	2	6,0	15,4	2	0,7	1,6
Aneka Industri	-	-	-	-	-	-
Industri Barang Konsumsi	-	-	-	1	20,8	49,2
Properti dan <i>Real Estate</i>	-	-	-	4	11,2	26,5
Infrastruktur, <i>Utility</i> dan Transportasi	4	4,9	12,6	-	-	-
Keuangan	8	9,3	23,6	10	3,8	8,9
Perdagangan, Jasa, dan Investasi	3	6,3	16,0	1	0,4	1,1
Total	21	39,2	100,0	19	42,25	100,0

*) dalam triliun rupiah
Sumber: OJK, diolah

Rp8,3 triliun (Tabel 8.3). Peningkatan pembiayaan melalui pasar saham ini didorong oleh korporasi di sektor infrastruktur, properti, industri barang konsumsi, dan pertambangan. Peningkatan pembiayaan di pasar saham tersebut tidak terlepas dari ekspektasi membaiknya perekonomian Indonesia, khususnya terkait dengan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2015.

Penerbitan obligasi dan sukuk korporasi selama tahun 2015 tercatat sebesar Rp62,4 triliun, atau naik sebesar 28,1% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp48,7 triliun (Tabel 8.4). Setelah memperhitungkan obligasi dan sukuk korporasi yang jatuh tempo, penerbitan net obligasi dan sukuk korporasi selama tahun 2015 tercatat sebesar Rp26,9 triliun, atau meningkat lebih dari 3 kali lipat penerbitan net selama tahun 2014 sebesar Rp7,1 triliun. Peningkatan pembiayaan melalui obligasi korporasi pada tahun 2015 terutama bersumber dari korporasi di sektor infrastruktur dan sektor keuangan.

Meningkatnya penerbitan obligasi dan korporasi, sebagai alternatif pembiayaan non bank, terindikasi terkait dengan relatif rendahnya suku bunga dalam penerbitan obligasi dibandingkan dengan suku bunga kredit pada tahun 2015.

Sementara itu, penerbitan MTN dan NCD selama tahun 2015 tercatat sebesar Rp20,1 triliun, atau naik sebesar 34,6% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp14,9 triliun. Meskipun demikian, cukup tingginya penerbitan MTN dan NCD tersebut tidak terlepas dari cukup tingginya MTN dan NCD yang jatuh tempo pada tahun 2015. Sehingga sebagian dari penerbitan MTN dan NCD tersebut merupakan *replacement* atas MTN dan NCD yang jatuh tempo di 2015. Setelah memperhitungkan MTN dan NCD yang jatuh tempo, penerbitan MTN dan NCD selama tahun 2015 hanya sebesar Rp8,9 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11,5 triliun. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, penerbitan MTN dan NCD tersebut didominasi oleh korporasi disektor keuangan.

Tabel 8.4.

Pembiayaan Obligasi dan Sukuk Korporasi

Obligasi

Sektor	Realisasi 2014			Realisasi 2015		
	Jumlah Emiten	Nilai*	Pangsa (%)	Jumlah Emiten	Nilai*	Pangsa (%)
Pertanian	-	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-	-
Industri Dasar	1	1,7	17,6	-	-	-
Aneka Industri	-	-	-	-	-	-
Industri Barang Konsumsi	1	2	20,7	-	-	-
Properti dan <i>Real Estate</i>	1	0,5	5,2	1	0,3	10,7
Infrastruktur, <i>Utility</i> , dan Transportasi	2	2,0	20,7	-	-	-
Keuangan	5	3,5	35,8	3	2,5	89,3
Perdagangan, Jasa, dan Investasi	-	-	-	-	-	-
Total	10	9,6	100,0	4	2,80	100,0

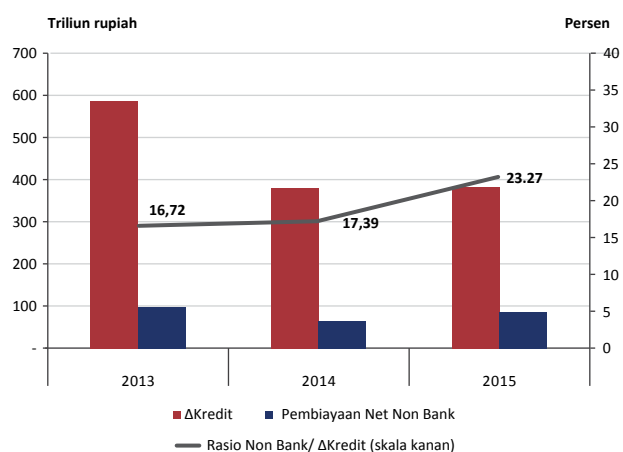
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi/Sukuk

Sektor	Realisasi 2014			Realisasi 2015		
	Jumlah Emiten	Nilai*	Pangsa (%)	Jumlah Emiten	Nilai*	Pangsa (%)
Pertanian	-	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-	-
Industri Dasar	-	-	-	-	-	-
Aneka Industri	-	-	-	-	-	-
Industri Barang Konsumsi	1	0,25	0,6	1	0,5	0,8
Properti dan <i>Real Estate</i>	4	2,9	7,4	7	4,9	8,3
Infrastruktur, <i>Utility</i> dan Transportasi	3	4,0	10,2	4	12,5	21,0
Keuangan	20	29,9	76,6	29	39,8	66,7
Perdagangan, Jasa, dan Investasi	3	2,0	5,1	3,0	1,9	3,2
Total	31	39,1	100,0	44	59,62	100,0

*) dalam triliun rupiah

Sumber: OJK, diolah

Grafik 8.30. Tambahan Kredit dan Pembiayaan Net Nonbank



Sumber: OJK, diolah

Peran pembiayaan nonbank meningkat pada tahun 2015. Secara keseluruhan, rasio pembiayaan nonbank dan pembiayaan bank (kredit) pada tahun 2015 tercatat sebesar 35,4%, lebih tinggi dari rasio yang sama tahun 2014 sebesar 29,2% (Grafik 8.30). Tren kenaikan tersebut juga masih berlaku apabila memperhitungkan faktor *refinancing* atas obligasi, MTN dan NCD yang jatuh tempo dan memiliki porsi yang cukup besar. Setelah memperhitungkan besaran faktor-faktor yang jatuh tempo tersebut, rasio pembiayaan nonbank terhadap pembiayaan bank (kredit) pada tahun 2015 tetap tercatat meningkat, dari 17,4% pada tahun 2014 menjadi 23,3% pada tahun 2015. Peningkatan rasio pembiayaan nonbank terhadap total kredit tersebut juga tidak terlepas dari turunnya penyaluran kredit.

Indonesia sebagai anggota dari berbagai forum internasional seperti G-20¹, *Financial Stability Board (FSB)*, maupun *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* terikat komitmen untuk mengikuti sejumlah asesmen internasional. Asesmen tersebut ditujukan untuk menilai ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan dan kepatuhan terhadap standar internasional. Pada tahun 2016, Indonesia akan menghadapi dua proses asesmen internasional yakni: *Financial Sector Assessment Program (FSAP)* dan *Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)*.

Financial Sector Assessment Program (FSAP)

FSAP ditujukan untuk menilai perkembangan dan stabilitas sektor keuangan suatu negara secara komprehensif. Keikutsertaan Indonesia dalam FSAP merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 dan FSB. Anggota di kedua forum tersebut diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan FSAP setiap lima tahun sekali². FSAP yang akan dilakukan pada 2016 merupakan FSAP kedua, setelah FSAP pertama pada tahun 2009/2010. FSAP akan menilai stabilitas dan kesehatan (*soundness*) sektor keuangan, serta menilai potensi kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan. FSAP tidak mengevaluasi kesehatan individual institusi keuangan, dan tidak ditujukan untuk memprediksi atau mencegah krisis Keuangan. Namun FSAP berupaya untuk mengidentifikasi sumber kerentanan utama yang dapat menjadi pemicu krisis di sektor keuangan. Penilaian terhadap stabilitas dari sektor keuangan akan dilakukan dengan melakukan *review* terhadap: resiliensi sektor perbankan dan nonbank; *stress-testing*; analisa

risiko sistemik termasuk keterkaitan antara bank dan nonbank serta *spillover* baik domestik maupun *cross-border*; kerangka mikroprudensial dan makroprudensial; kualitas pengawasan bank dan nonbank; *oversight* terhadap infrastruktur pasar keuangan (*Financial Market Infrastructures – FMIs*); maupun evaluasi terhadap *financial safety nets* untuk merespons tekanan yang sistemik secara efektif. Terkait aspek pengembangan (*development*), FSAP menilai kebutuhan pengembangan institusi, pasar, infrastruktur, keinklusan; kualitas kerangka hukum dan sistem pembayaran serta penyelesaian transaksi (*settlement*); mengidentifikasi hambatan kompetisi dan efisiensi sektor; topik-topik terkait dengan keuangan inklusi dan pembayaran retail; serta menilai kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Bank Indonesia memiliki peran yang krusial dalam pelaksanaan FSAP 2016. Hal ini mengingat cakupan FSAP setelah krisis keuangan global menekankan pada penilaian terhadap kerangka Makroprudensial yang merupakan kewenangan Bank Indonesia. Selain itu, penilaian terhadap FMIs pada sistem pembayaran juga menjadi kewenangan Bank Indonesia. Di area makroprudensial, penilaian FSAP dilakukan terhadap kerangka makroprudensial dengan cakupan antara lain meliputi: risiko sistemik pada sistem keuangan Indonesia, *tools* untuk identifikasi dan monitoring risiko sistemik, kerangka makroprudensial serta kebijakan yang diterapkan, keterkaitan antar sektor dan institusi keuangan serta potensi *spillover*, dan *institutional arrangement* di yurisdiksi. Selain itu, penilaian *stress testing* yang dilakukan juga akan dilaporkan dalam laporan yang fokus membahas isu *stress-testing*. Terkait Sistem Pembayaran, infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia termasuk jenis infrastruktur pasar keuangan (*payment system* dan *securities settlement system*) yang wajib mengikuti standar internasional untuk FMIs. Penilaian FSAP di area FMIs bertujuan untuk melihat keefektifan kerangka *oversight* FMIs maupun perkembangan implementasi *Principles for Financial Market Infrastructures*.

Manfaat FSAP bagi publik termasuk otoritas negara lain serta investor adalah sebagai acuan awal terhadap stabilitas sistem keuangan di suatu yurisdiksi. Oleh karena itu, FSAP merupakan asesmen yang strategis dan krusial untuk Indonesia. Hasil penilaian FSAP akan menjadi masukan bagi otoritas di Indonesia untuk meningkatkan

- 1 Anggota G-20 meliputi Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa (diwakili oleh European Commission dan European Central Bank).
- 2 Negara yang bukan anggota G-20/FSB namun ditetapkan oleh IMF sebagai negara dengan sektor keuangan yang sistemik (*systemically important financial sector*) juga diwajibkan mengikuti FSAP setiap lima tahun. Penetapan daftar negara dengan sektor keuangan yang sistemik dan wajib mengikuti asesmen didasarkan pada ukuran (*size*) dan keterkaitan (*interconnectedness*) dari sektor keuangan negara tersebut. Negara-negara yang ditetapkan memiliki sektor keuangan yang sistemik oleh IMF adalah Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brasil, Hong Kong, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Luksemburg, Meksiko, Perancis, Rusia, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Tiongkok, Turki.

resiliensi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia ke depan.

Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP).

RCAP merupakan respons dari BCBS atas pelajaran dari krisis keuangan global mengenai pentingnya implementasi kerangka Basel yang menyeluruh, tepat waktu, dan konsisten. BCBS memandang bahwa kepercayaan publik terhadap resiliensi sistem perbankan, keefektifan dan kepercayaan publik terhadap rasio prudensial, serta *level playing field* tidak dapat diekspektasikan, kecuali jika kerangka Basel (kerangka Basel II, II.5, dan III yang selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai kerangka Basel III) diadopsi dan diimplementasikan secara konsisten.

Tujuan pelaksanaan RCAP adalah untuk memastikan implementasi kerangka Basel III yang konsisten sehingga dapat berkontribusi terhadap stabilitas keuangan global. RCAP terdiri dari dua area yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu: i) *monitoring* ketepatan waktu adopsi standar Basel III dan ii) penilaian terhadap konsistensi dan kelengkapan dari adopsi standar Basel III, termasuk penilaian terhadap signifikansi deviasi kerangka regulasi domestik dibandingkan dengan standar Basel III. Hasil asesmen diharapkan dapat memberikan masukan mengenai *gaps* yang ada maupun potensi *gaps* dari regulasi domestik terhadap *financial stability*. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu yurisdiksi untuk melakukan reformasi yang diperlukan sehingga regulasi domestik lebih selaras dengan standar Basel.

Sebelum 2016, cakupan fokus RCAP meliputi asesmen terhadap adopsi kerangka permodalan Basel III, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan kerangka *Systemically Important Banks* (SIBs). Asesmen kerangka permodalan Basel III telah dimulai sejak 2012 sehingga hampir seluruh negara anggota BCBS telah selesai dinilai konsistensi dan

kelengkapan regulasi domestiknya terhadap kerangka permodalan Basel III. Untuk LCR, asesmen pertama kali dilakukan pada tahun 2014 dengan kajian asesmen LCR terhadap yurisdiksi anggota BCBS yang diterbitkan pada kuartal 1-2015. Sementara untuk kerangka SIBs, asesmen baru dilakukan sejak 2015. Seiring dengan perkembangan adopsi standar Basel lainnya sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan oleh BCBS, cakupan RCAP akan diperluas mulai 2017 yaitu untuk pula mencakup asesmen konsistensi dan kelengkapan adopsi standar *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Leverage Ratio*.

RCAP untuk tujuan monitoring ketepatan waktu adopsi standar Basel III telah diikuti oleh Indonesia secara reguler setiap tahun. Sedangkan RCAP untuk tujuan menilai konsistensi dan kelengkapan adopsi standar Basel III di Indonesia baru akan diikuti oleh Indonesia untuk pertama kalinya di 2016. Cakupan RCAP Indonesia untuk tujuan penilaian konsistensi dan kelengkapan regulasi Indonesia mencakup kerangka permodalan Basel III dan LCR. Dalam hal ini, Bank Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam regulasi di area makroprudensial, seperti regulasi mengenai Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* (CCB) yang juga menjadi cakupan kerangka permodalan Basel III. Selain itu, Bank Indonesia juga turut menjadi anggota tim RCAP Indonesia untuk hampir seluruh area yang dinilai dalam RCAP. Hal itu disebabkan penilaian terhadap konsistensi dan kelengkapan regulasi Indonesia dibandingkan dengan Basel III juga menjadi perhatian Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial.

Hasil dari RCAP akan menjadi masukan bagi otoritas sektor keuangan di Indonesia untuk menyelaraskan kerangka pengaturan dengan kerangka Basel. Namun demikian, karakteristik spesifik Indonesia tetap diperhatikan guna memperkuat rezim pengaturan di Indonesia. Dengan masukan RCAP diharapkan dapat semakin meningkatkan resiliensi sistem perbankan yang merupakan bagian yang signifikan untuk meningkatkan resiliensi sistem keuangan Indonesia.



Keterangan gambar:

Sepanjang tahun 2015, Bank Indonesia konsisten melakukan berbagai kebijakan SPPUR. Terkait pengelolaan uang rupiah, kebijakan ditempuh antara lain melalui kas keliling, yang bertujuan untuk menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.



Bab 9

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama tahun 2015, pelaksanaan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dan industri dapat berjalan baik dan lancar. Di sisi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia, hal ini tercermin pada keandalan dan ketersediaan sistem, serta *contingency plan* yang efektif. Sementara itu, penyelenggaraan sistem pembayaran oleh industri juga tidak terdapat gangguan yang signifikan. Di sisi pengelolaan uang rupiah, kebutuhan uang tunai dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.

Selama tahun 2015, sistem pembayaran nasional berkinerja baik dalam mendukung kegiatan perekonomian serta kestabilan sistem keuangan dan moneter. Kinerja sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tercermin pada keandalan dan ketersediaan (*availability*) sistem serta pelaksanaan *contingency plan* yang efektif sehingga layanan sistem pembayaran Bank Indonesia mampu memproses transaksi keuangan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Selanjutnya, pada sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri tidak terdapat gangguan signifikan dalam penyelenggarannya. Sementara itu di sisi pengelolaan uang rupiah, pencapaian positif tercermin pada terpenuhi kebutuhan uang tunai dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Terjaganya kinerja sistem pembayaran nasional tersebut tidak lepas dari upaya Bank Indonesia untuk terus memperkuat kebijakan baik di bidang sistem pembayaran maupun pengelolaan uang rupiah. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus fokus pada penguatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan keandalan dan keamanan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia selama tahun 2015 menerapkan lima kebijakan umum yang terintegrasi guna memperkuat pengelolaan uang rupiah yakni menjaga kecukupan kas Bank Indonesia, meningkatkan kualitas uang rupiah yang ada di masyarakat, memperluas jaringan distribusi uang dan layanan kas, memperkuat komunikasi ciri keaslian uang, dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran uang palsu.

Di sisi sistem pembayaran, nilai transaksi melalui sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia dan industri selama tahun 2015 tumbuh melambat sebesar 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,0% seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, volume transaksi tumbuh sebesar 18,6% dari sebelumnya sebesar 18,0%. Selama tahun 2015, sistem pembayaran nasional mampu melayani 5,5 miliar transaksi dengan nilai Rp33,3 ribu triliun. Untuk sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, pertumbuhan nilai transaksi selama tahun 2015 sedikit melambat menjadi 9,1% dari sebelumnya 9,8%.

Selanjutnya, pada sistem pembayaran yang diselenggarakan industri, Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk memperluas penggunaan sistem dan instrumen pembayaran nontunai yang meliputi alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), uang elektronik dan transfer dana. Perluasan penggunaan sistem dan instrumen pembayaran nontunai yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah dan

industri sistem pembayaran. Selain kebijakan perluasan penggunaan nontunai, Bank Indonesia juga senantiasa mendorong industri untuk meningkatkan keamanan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan instrumen pembayaran nontunai. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi positif yang terlihat dari meningkatnya transaksi pembayaran menggunakan sistem dan instrumen pembayaran nontunai.

Di sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang 5,7% menjadi 11,0% atau mencapai Rp586,8 triliun pada akhir 2015. Secara tren, dinamika pertumbuhan UYD tidak terlepas dari perkembangan aktivitas perekonomian. Tren pertumbuhan uang kartal cenderung melambat hingga pertengahan tahun 2015 namun mulai meningkat pada triwulan III 2015 sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik. Mulai meningkatnya tren pertumbuhan UYD tersebut juga terkonfirmasi oleh penarikan uang kartal (*outflow*) oleh bank penyalur APBN yang mulai meningkat pada periode yang sama seiring dengan membaiknya pertumbuhan konsumsi pemerintah. Sementara itu, *Cash in Vault* masih menunjukkan perlambatan sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga rupiah perbankan yang masih tertahan selama tahun 2015. Sejalan dengan dinamika perekonomian tersebut, Bank Indonesia mampu menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.

Untuk menjamin ketersediaan uang rupiah dan pecahannya, dilakukan berbagai langkah penting seperti mendorong peningkatan kapasitas cetak perusahaan pencetakan uang, menambah jumlah Kas Titipan pada wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia, dan melakukan penukaran uang melalui Kas Keliling pada tempat-tempat keramaian, wilayah terpencil dan pulau terdepan NKRI. Jumlah kantor bank penyelenggara Kas Titipan meningkat dari 30 pada tahun 2014 menjadi 35 pada akhir tahun 2015, sehingga cakupan wilayah jangkauan layanan kas Bank Indonesia meningkat dari 61% dari seluruh kota/kabupaten di Indonesia pada tahun 2014 menjadi 66% pada tahun 2015. Bank Indonesia juga menerapkan *clean money policy* melalui peningkatan standar kualitas uang yang diolah (*soil level*) baik di satuan kerja kas Bank Indonesia maupun bank, untuk meningkatkan kualitas uang yang diedarkan di masyarakat. Di samping itu, untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan

Rupiah Palsu (Botasupal) dan instansi pemerintah lainnya dalam berbagai kegiatan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang rupiah, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran uang rupiah palsu. Berbagai kebijakan pengelolaan uang rupiah yang ditempuh Bank Indonesia tersebut menunjukkan hasil yang baik. Hal ini antara lain tercermin pada membaiknya tingkat kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan perbankan dalam melaporkan temuan uang rupiah palsu ke Bank Indonesia, serta pengungkapan jaringan peredaran uang rupiah palsu oleh Kepolisian RI sebelum sempat beredar ke masyarakat.

9.1. KINERJA SISTEM PEMBAYARAN

Secara umum, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berjalan dengan baik dan lancar pada tahun 2015. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya Bank Indonesia menempuh kebijakan penguatan infrastruktur dan menerapkan *continuity plan* yang efektif sehingga sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tetap tersedia dan mampu memproses transaksi keuangan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha¹. Selain itu, juga telah dilakukan penyempurnaan *Business Continuity Management (BCM)* dan *Standard Operating Procedure (SOP)* Rencana Keberlangsungan Tugas (RKT) sistem pembayaran Bank Indonesia. Seperti halnya penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia, penyelenggaraan sistem pembayaran oleh industri juga berjalan baik. Bank Indonesia bersama Pemerintah dan industri secara konsisten terus mendorong perluasan akses masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai sebagai tindak lanjut dari pencaanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014.

Kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten ditujukan terutama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran nontunai semakin membuahkan hasil positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah instrumen pembayaran nontunai yang beredar di masyarakat dan perkembangan transaksi menggunakan instrumen tersebut. Selain upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas pembayaran nontunai, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan untuk memperluas akses masyarakat menggunakan instrumen

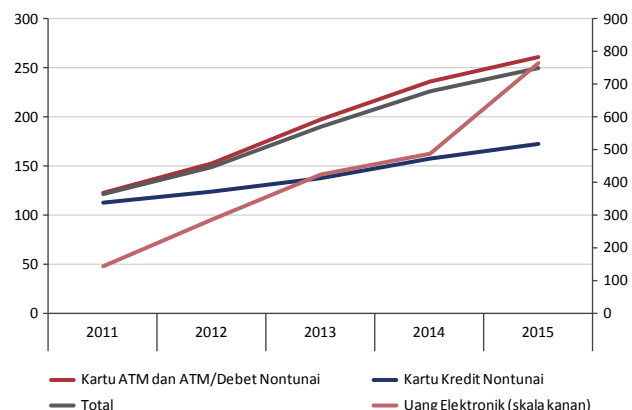
1 Pada triwulan I 2015 sempat terjadi kendala pada Jaringan Komunikasi Data (JKD) untuk mengakses sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, namun dengan penerapan *continuity plan* yang efektif, layanan sistem pembayaran tersebut tetap beroperasi dengan baik.

nontunai. Dengan kebijakan tersebut, penggunaan instrumen pembayaran nontunai meningkat, yang tercermin pada meningkatnya indeks sistem pembayaran nontunai. Indeks sistem pembayaran nontunai masyarakat mengalami peningkatan dari 225 pada 2014 menjadi 249 pada tahun 2015 (Grafik 9.1). Peningkatan indeks sistem pembayaran nontunai merupakan salah satu indikator keberhasilan dari tindak lanjut pencaanangan GNNT.

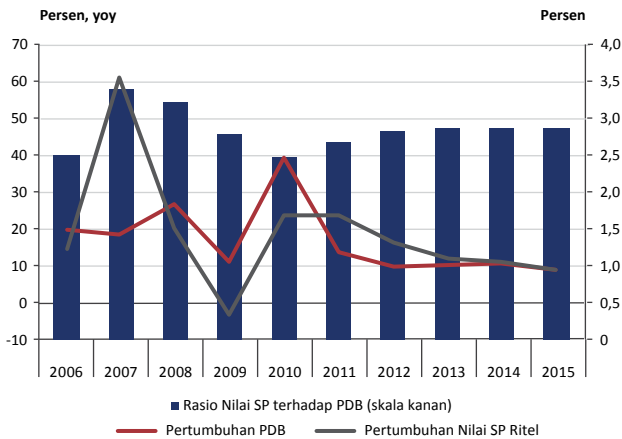
Berdasarkan jenis instrumen pembayaran nontunai, selama periode 2011-2015, indeks sistem pembayaran uang elektronik mencatat peningkatan yang paling signifikan. Indeks sistem pembayaran menggunakan uang elektronik meningkat dari 142 pada tahun 2011 menjadi 762 pada tahun 2015 (Grafik 9.1). Di samping karena uang elektronik merupakan instrumen pembayaran nontunai yang paling terakhir berkembang, peningkatan penggunaan uang elektronik yang signifikan merupakan hasil sinergi Bank Indonesia, Pemerintah, dan industri. Sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan Bank Indonesia dalam membantu Pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat (*Government to Person*) yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik dari sebelumnya disalurkan secara tunai. Selanjutnya, untuk kartu kredit dan kartu ATM (termasuk kartu ATM/debet) masing-masing meningkat dari 112 dan 123 pada tahun 2011 menjadi 173 dan 260 pada tahun 2015.

Dukungan sistem pembayaran ritel dalam kegiatan perekonomian juga ditunjukkan oleh meningkatnya nilai transaksi sistem pembayaran ritel. Nilai transaksi sistem pembayaran ritel yang terdiri dari SKNBI, APMK, uang elektronik, dan transfer dana pada tahun 2015 memiliki pangsa 25,5% dari keseluruhan nilai transaksi sistem pembayaran yang mendukung kegiatan perekonomian,

Grafik 9.1. Indeks Sistem Pembayaran Nontunai

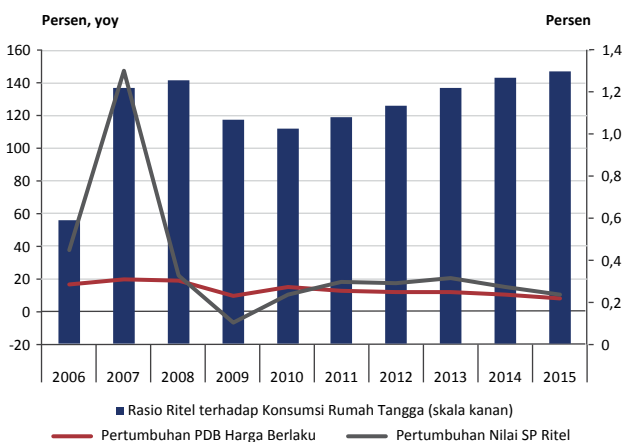


Grafik 9.2. Transaksi Ritel terhadap PDB

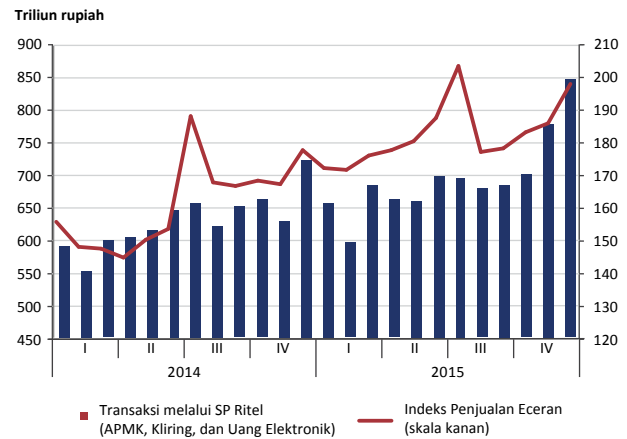


yaitu sebesar Rp8,5 ribu triliun. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, nilai transaksi sistem pembayaran ritel meningkat 11,7% dari sebelumnya senilai Rp7,6 ribu triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel terhadap PDB yang mengalami pertumbuhan dari 0,72 pada 2014, menjadi 0,74 pada tahun 2015 (Grafik 9.2). Dari sisi rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel terhadap nilai konsumsi, terjadi peningkatan rasio dari 1,29 pada tahun 2014 menjadi 1,31 pada tahun 2015. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin terbiasa dalam menggunakan instrumen pembayaran nontunai untuk membiayai pengeluaran konsumsinya (Grafik 9.3). Kondisi tersebut juga terkonfirmasi pada hubungan yang kuat antara perkembangan transaksi menggunakan sistem pembayaran ritel dengan Indeks Penjualan Eceran (Grafik 9.4).

Grafik 9.3. Rasio Transaksi Ritel terhadap Konsumsi Masyarakat



Grafik 9.4. Indeks Penjualan Eceran dan Transaksi Ritel



Sistem Pembayaran Nontunai Yang Diselenggarakan Bank Indonesia

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*

Melalui penerapan *continuity plan* yang efektif dan kebijakan penguatan infrastruktur, Sistem BI-RTGS pada 2015 secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut antara lain tercermin pada ketersediaan dan kemampuan Sistem BI-RTGS sebagai muara transaksi seluruh sistem pembayaran di Indonesia. Demikian pula dari sisi likuiditas, peserta Sistem BI-RTGS memiliki dana yang cukup untuk menjaga kelancaran transaksi. Kecukupan likuiditas antara lain tercermin dari rendahnya *unsettled transaction*, penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) yang relatif sedikit, dan penurunan *turn over ratio*.

Sistem BI-RTGS berhasil menyelesaikan 11,0 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp112,7 ribu triliun sepanjang tahun 2015. Volume transaksi tersebut mengalami penurunan sebesar 37,8% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 17,7 juta transaksi. Sementara itu, nilai transaksi mengalami peningkatan sebesar 1,7% dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp110,9 ribu triliun. Peningkatan nilai transaksi Sistem BI-RTGS sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan transaksi antar nasabah, valas dan pasar modal. Selanjutnya dilihat dari rata-rata harian (RRH) volume transaksi Sistem BI-RTGS tercatat sebesar 45 ribu transaksi dengan nilai Rp458,2 triliun (Grafik 9.5).

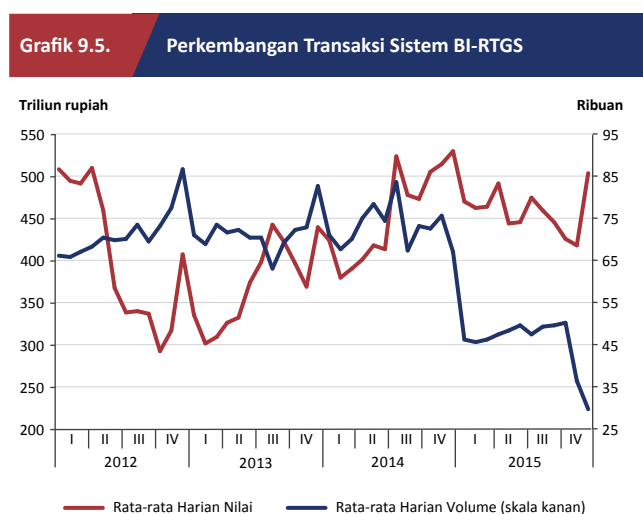
Penurunan volume transaksi pembayaran melalui Sistem BI-RTGS merupakan dampak dari kebijakan *capping* minimum transaksi menggunakan Sistem BI-RTGS. Jumlah

transaksi minimal melalui Sistem BI-RTGS ditingkatkan menjadi Rp500 juta sejak diimplementasikannya Sistem BI-RTGS Gen II pada 16 November 2015. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko operasional diawal implementasi Sistem BI-RTGS Gen II. Pemberlakuan *capping* minimum ini bersifat sementara sampai dengan batas waktu Juni 2016.

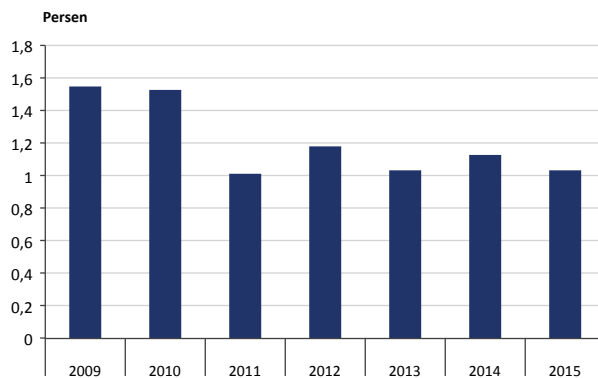
Terkait indikator *unsettled transaction*, pada tahun 2015 hanya menunjukkan persentase yang relatif kecil yaitu 0,004% untuk volume transaksi dan 0,027% untuk nilai transaksi. Relatif kecilnya persentase *unsettled transaction* ini merupakan hasil dari kebijakan Bank Indonesia yang senantiasa mengedepankan pentingnya peserta Sistem BI-RTGS untuk mengelola likuiditas. Dengan persentase yang relatif kecil tersebut, *unsettled transaction* yang terjadi tidak mengganggu kelancaran operasional Sistem BI-RTGS secara keseluruhan. Terkait dengan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), selama periode 2015, hanya terdapat dua kali penggunaan FLI. Rendahnya penggunaan FLI dan kecilnya proporsi *unsettled transaction* yang terjadi selama tahun 2015 mengindikasikan bahwa secara umum peserta Sistem BI-RTGS memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan transaksinya. Kecukupan likuiditas peserta Sistem BI-RTGS juga tercermin pada indikator *turn over ratio* industri yang menurun dari 1,17 pada tahun 2014 menjadi 1,04 pada tahun 2015 (grafik 9.6) yang mencerminkan berkurangnya ketergantungan peserta terhadap *incoming transaction*.

Bank Indonesia *Scriptless Securites Settlement System* (BI-SSSS)

Selama tahun 2015, BI-SSSS melayani penatausahaan surat berharga 183,6 ribu transaksi dengan nilai sebesar



Grafik 9.6. Turn Over Ratio Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

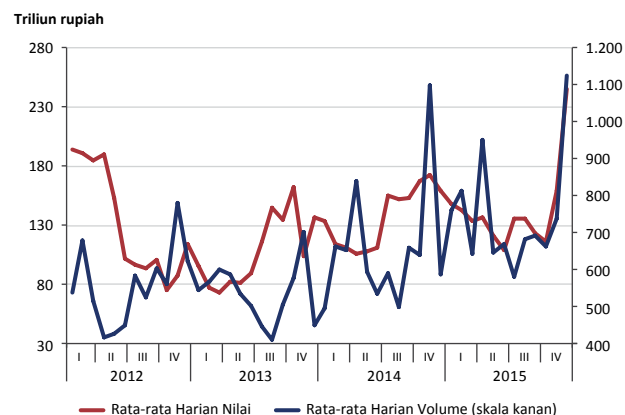


Rp34,9 ribu triliun. Volume tersebut meningkat sebesar 15,2% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 159,5 ribu transaksi. Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai transaksi surat berharga pada BI-SSSS meningkat sebesar 4,1% menjadi Rp34,9 ribu triliun dari sebelumnya Rp33,57 ribu triliun. Pada tahun 2015 RRH volume BI-SSSS adalah sebesar 747 transaksi dan Rp 142,0 triliun (Grafik 9.7).

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Volume transaksi SKNBI sepanjang tahun 2015 mencapai 113,5 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp3,2 ribu triliun.² Volume tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 5,5% dibandingkan volume transaksi SKNBI pada

Grafik 9.7. Perkembangan Transaksi BI-SSSS



2 SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

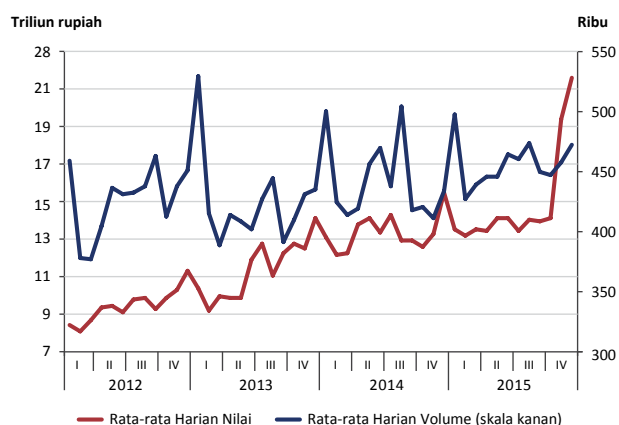
tahun 2014 yang tercatat sebesar 107,6 juta transaksi. Peningkatan volume transaksi juga diikuti oleh peningkatan nilai transaksi yang mencapai 13,1% dari sebelumnya Rp2,9 ribu triliun. RRH nilai transaksi SKNBI pada tahun 2015 tercatat 441,2 ribu transaksi dengan nilai sebesar Rp13,1 triliun transaksi (Grafik 9.8). Peningkatan transaksi melalui SKNBI terutama disebabkan oleh peningkatan batas maksimum nilai kliring kredit dan peningkatan batas minimum nilai Sistem BI-RTGS yang sebelumnya Rp100 juta sejak 15 Desember 2014 menjadi minimal Rp500 juta menyusul implementasi Sistem BI-RTGS Generasi II pada tahun 2015.

Sistem Pembayaran Nontunai yang Diselenggarakan Industri

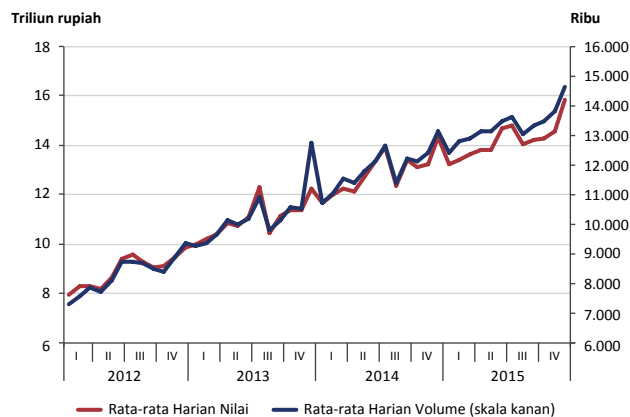
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Transaksi pembayaran dengan APMK yang meliputi kartu ATM, kartu ATM/debet dan kartu kredit selama tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang positif. Instrumen APMK yang beredar di masyarakat meningkat sebesar 12,5% menjadi 137,1 juta instrumen dari sebelumnya 121,9 juta instrumen. Volume transaksi APMK pada tahun 2015 mencapai 4,9 miliar transaksi dengan nilai Rp5,2 ribu triliun. Total volume ini 12,1% lebih besar dibanding total volume transaksi pada tahun 2014 sebanyak 4,3 miliar transaksi. Di sisi nilai transaksi, tercatat peningkatan nilai sebesar 10,2% dibandingkan nilai transaksi tahun 2014. Secara RRH, volume dan nilai APMK tahun 2015 tercatat masing-masing sebanyak 13,3 juta transaksi dan Rp14,2 triliun per hari (Grafik 9.9). Perkembangan transaksi APMK sebagian besar disumbang oleh transaksi kartu ATM dan kartu ATM/debet. Peningkatan volume dan transaksi APMK tersebut didukung

Grafik 9.8. Perkembangan Transaksi SKNBI



Grafik 9.9. Perkembangan Transaksi APMK



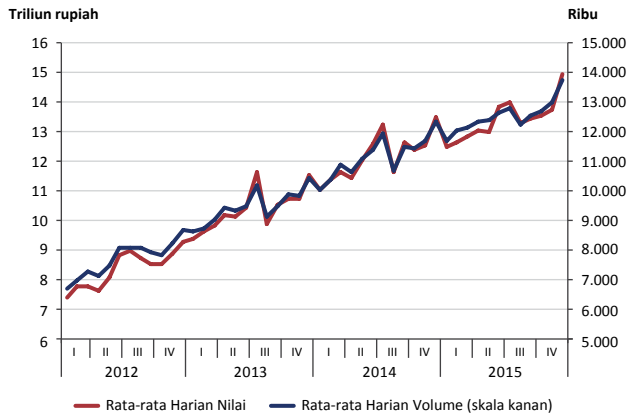
oleh peningkatan sarana pendukung transaksi APMK yaitu, mesin ATM dan EDC. Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat sekitar 97,8 ribu unit mesin ATM dan 1 juta unit mesin EDC, meningkat masing-masing sebesar 9,25% dan 19,29% dibandingkan tahun 2014 sebanyak 89,6 ribu unit mesin ATM dan 842,6 ribu unit mesin EDC.

Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet

Kebijakan Bank Indonesia untuk memperluas penggunaan instrumen pembayaran nontunai memperlihatkan hasil positif. Hal ini tercermin pada bertambahnya jumlah kartu ATM dan kartu ATM/debet yang beredar dan meningkatnya jumlah transaksi baik volume maupun nilai transaksi.³ Jumlah kartu ATM dan kartu ATM/debet yang beredar di masyarakat selama tahun 2015 meningkat sebesar 13,66% menjadi 121 juta kartu dari sebelumnya 105,8 juta kartu. Sejalan dengan peningkatan jumlah kartu beredar, perkembangan transaksi menggunakan kartu ATM dan kartu ATM/debet juga meningkat. Volume transaksi meningkat 12,18% menjadi 4,9 miliar transaksi dari sebelumnya 4,4 miliar transaksi. Selanjutnya, nilai transaksi juga meningkat 10% hingga mencapai Rp4.897,7 triliun dari sebelumnya Rp4.445,1 triliun. Secara RRH, volume transaksi kartu ATM dan kartu ATM/debet pada tahun 2015 tercatat sebanyak 12,5 juta transaksi dengan nilai Rp13,4 triliun. (Grafik 9.10)

3 Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu. Kartu ATM/debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu.

Grafik 9.10. Perkembangan Transaksi ATM dan ATM/Debet



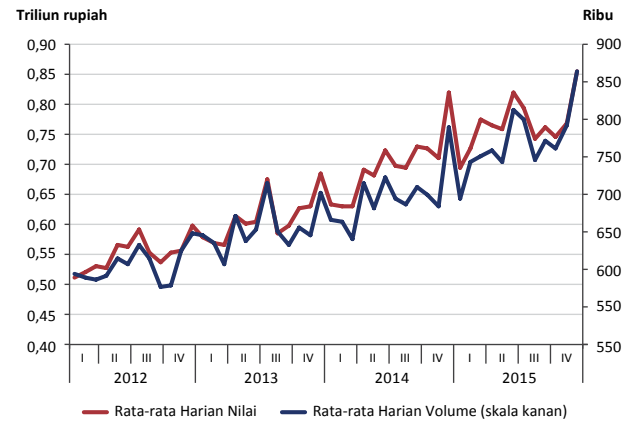
Kartu Kredit

Jumlah kartu kredit yang beredar pada tahun 2015 mencapai 16,9 juta kartu, meningkat 5,1% dari sebelumnya 16,0 juta kartu.⁴ Sementara itu, transaksi menggunakan kartu kredit pada tahun 2015 tercatat sebanyak 281,3 juta transaksi untuk volume dengan nilai sebesar Rp281,3 triliun. Volume transaksi kartu kredit menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,62% dari sebelumnya 254,3 juta transaksi. Pertumbuhan tersebut diikuti dengan peningkatan nilai transaksi sebesar 10,0% dari sebelumnya Rp255,1 triliun. RRH volume transaksi kartu kredit untuk tahun 2015 adalah sebanyak 770,8 ribu transaksi dengan nilai sebesar Rp768,6 miliar per hari (Grafik 9.11).

Berdasarkan proporsi penggunaan, pangsa tarik tunai (*cash advance*) mengalami peningkatan baik dari volume dan nilai transaksi. Pada tahun 2015, proporsi volume dan nilai transaksi tarik tunai tercatat sebesar 2,4% dan 2,7% dari keseluruhan penggunaan kartu kredit. Proporsi dan nilai transaksi tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang tercatat masing-masing sebesar 1,5% dan 1,9%. Volume dan nilai transaksi tarik tunai pada 2015 masing-masing tercatat sebanyak 6.607 transaksi dengan nilai Rp7,4 triliun pada tahun 2015. Jumlah volume dan nilai tersebut 80% dan 55% lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang masing-masing tercatat sebesar 3.777 transaksi dan Rp4,9 triliun. Sementara itu, posisi NPL masih aman meski

4 Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Grafik 9.11. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



mengalami sedikit peningkatan dari 2,02% pada akhir tahun 2014 menjadi 2,59% pada akhir tahun 2015 (Grafik 9.12).

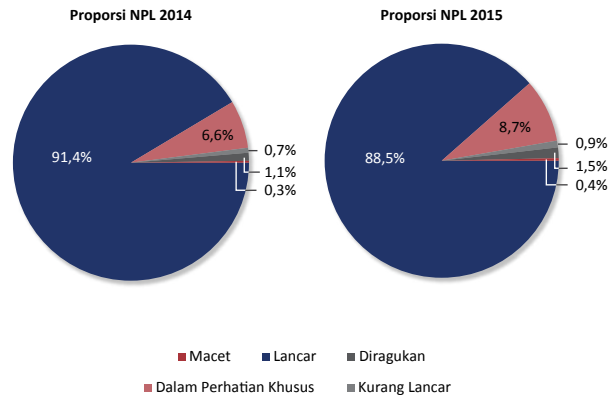
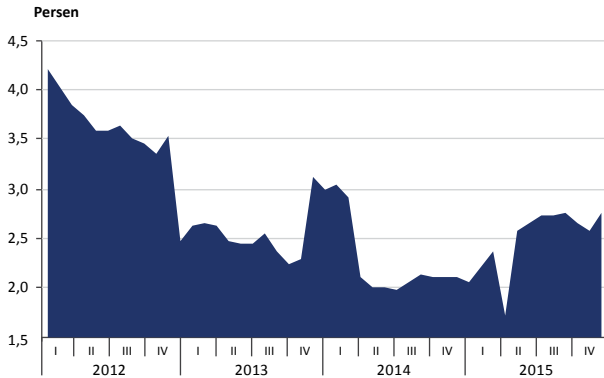
Uang Elektronik

Dalam rangka meningkatkan penggunaan instrumen sistem pembayaran, khususnya instrumen ritel yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan industri terus mendorong penggunaan uang elektronik (UE). Sejak tahun 2015, Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dengan menggunakan uang elektronik dari sebelum dilakukan secara tunai.⁵ Selain itu, peningkatan penggunaan uang elektronik juga merupakan hasil dari tindak lanjut pencaangan GNNT pada periode sebelumnya. Tindak lanjut tersebut antara lain melalui implementasi transaksi elektronik parkir (*E-Parking*), peluncuran Bandung *Smart Card* dan penyelenggaraan Festival Gerakan Nasional Non Tunai. Berbagai upaya yang telah ditempuh tersebut berhasil meningkatkan jumlah instrumen uang elektronik yang beredar, volume, dan nilai transaksi uang elektronik.

Dibandingkan dengan posisi tahun 2014, jumlah instrumen uang elektronik yang beredar di masyarakat pada tahun 2015 turun sebesar 4,0% menjadi 34,3 juta instrumen

5 Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; (3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (4) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Grafik 9.12. Rasio dan Proporsi NPL Kartu Kredit



dari sebelumnya 35,7 juta instrumen. Penurunan tersebut disebabkan oleh penghapusan instrumen dengan rekening *dormant* oleh penerbit uang elektronik.⁶ Namun demikian, volume dan nilai transaksi UE justru meningkat signifikan dengan total masing-masing mencapai 535,6 juta transaksi dan Rp5,3 triliun. Volume dan nilai transaksi uang elektronik tumbuh positif masing-masing sebesar 163,4% dan 59,1% dari sebelumnya 203,4 juta transaksi dan Rp3,3 triliun. Secara RRH, volume transaksi tercatat sebanyak 1,5 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp14,5 miliar (grafik 9.13). Kenaikan kinerja transaksi uang elektronik secara signifikan dipengaruhi oleh regulasi yang mewajibkan penggunaan uang elektronik untuk beberapa transaksi, antara lain di Kereta *Commuter* Jakarta (KCI) dan TransJakarta, langkah beberapa perusahaan yang melakukan pembayaran gaji melalui uang elektronik, dan penyaluran bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat menggunakan uang elektronik.

Penyelenggaraan Transfer Dana Bukan Bank

Transaksi transfer dana melalui penyelenggara transfer dana bukan bank (TD BB) sepanjang tahun 2015 tercatat sebanyak 26,5 juta transaksi dengan nilai Rp80,7 triliun.⁷ Pangsa volume transaksi transfer dana terbesar bersumber dari transaksi transfer dana domestik yang mencapai 57,4% dari keseluruhan volume transaksi melalui penyelenggara TD BB. Sementara itu, pangsa nilai transaksi didominasi oleh transaksi *incoming* dengan pangsa sebesar

6 Rekening *dormant* merupakan rekening yang sudah tidak aktif atau tidak bertransaksi selama jangka waktu tertentu.

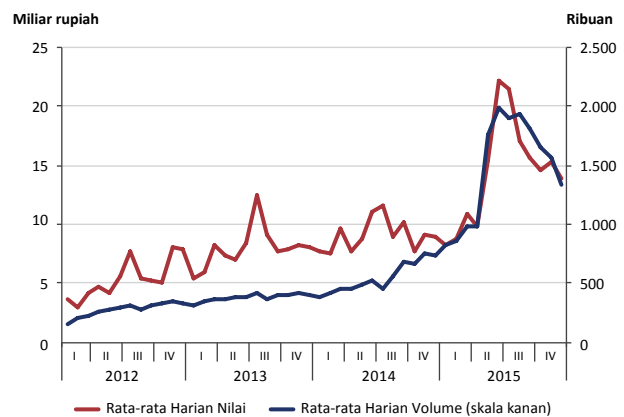
7 Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

54,4% (Grafik 9.14). Dalam rangka menjaga transaksi transfer dana yang dilakukan oleh TKI yang berada di luar negeri, Bank Indonesia secara aktif terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai transfer dana kepada calon TKI yang akan diberangkatkan. Bank Indonesia juga mendorong TKI dan calon TKI untuk menggunakan penyelenggara TD BB yang telah berizin di negara masing-masing.

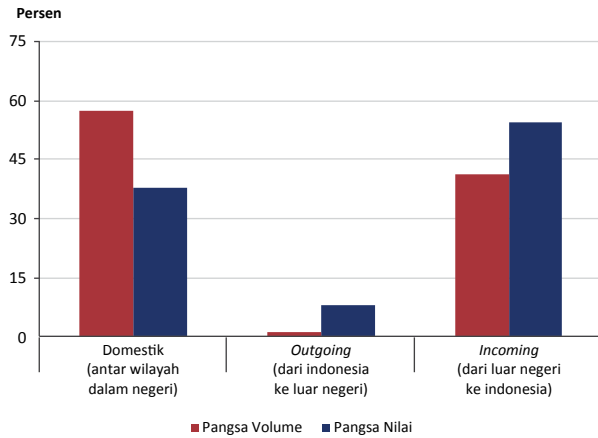
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada tahun 2015, transaksi jual beli Uang Kertas Asing (UKA) oleh KUPVA BB mengalami peningkatan.⁸ Nilai transaksi tahun 2015 meningkat 3,9% menjadi Rp226,7 triliun dari Rp218,0 triliun pada tahun 2014. Kontribusi transaksi jual beli UKA terbesar berada dalam pengawasan

Grafik 9.13. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



Grafik 9.14. Pangsa Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana



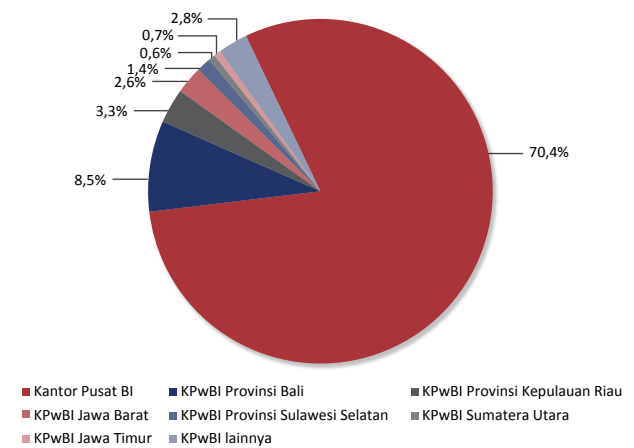
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia sebesar Rp159,5 triliun atau 70,4% dari total transaksi UKA di Indonesia. Transaksi terbesar berikutnya berada dalam pengawasan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN) Provinsi Bali dan KPwDN Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai masing-masing sebesar Rp28,9 triliun dan Rp11 triliun. Lebih lanjut, pangsa dari transaksi UKA di bawah KPwDN Provinsi Bali dan KPwDN Provinsi Kepulauan Riau masing-masing sebesar 12,7% dan 4,9% dari keseluruhan nilai transaksi UKA (Grafik 9.15).

9.2. KINERJA PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada tahun 2015, Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh sebesar 11,0% atau mencapai Rp586,8 triliun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,7%. Di lihat dari trendnya, pertumbuhan UYD tersebut terlihat kembali pada lintasan rata-rata pertumbuhan selama 2009 – 2013 sebesar 13,7% per tahun (Grafik 9.16). Secara bulanan pertumbuhan UYD dipengaruhi oleh faktor musiman masyarakat pada periode tertentu khususnya hari raya keagamaan (periode Ramadhan dan Natal) dan liburan masyarakat. Posisi UYD tertinggi terjadi pada akhir Ramadhan 2015 sebesar Rp604,2 triliun atau tumbuh 7,0% dibandingkan periode Ramadhan 2014 yang mencapai Rp564,5 triliun (Grafik 9.17).

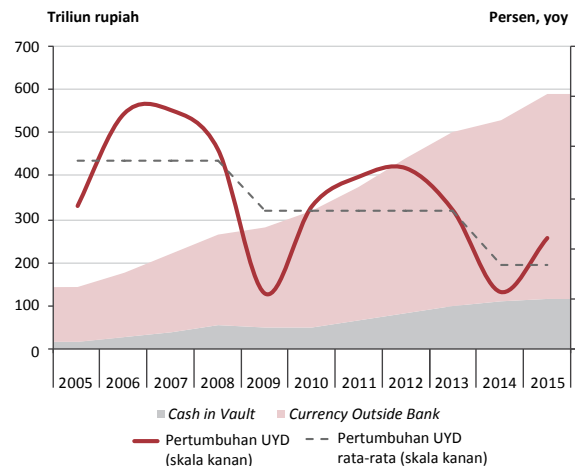
Dari sisi denominasi, komposisi UYD pecahan Rp100.000 terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari 35,4% pada tahun 2005 menjadi 62,8% pada tahun 2015, diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebesar 28,4% (Grafik 9.18). Pertumbuhan UYD yang mencapai 11,0%

Grafik 9.15. Pangsa Penyelenggara Bukan Bank 2015



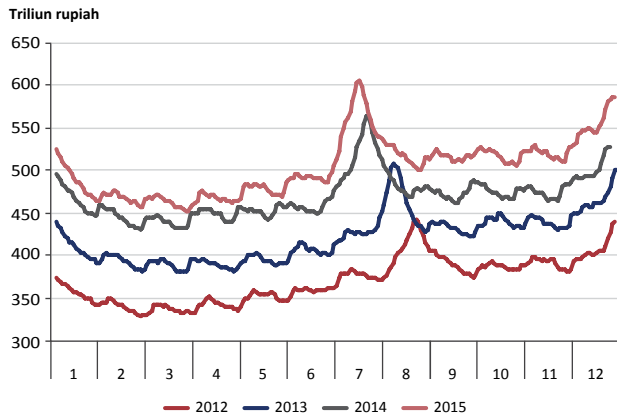
terutama didukung oleh pertumbuhan pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 masing-masing mencapai 12,2% dan 9,4% (Grafik 9.19). Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang cenderung untuk memegang uang rupiah pecahan besar karena faktor kepraktisan dan efisiensi. Di samping itu, preferensi masyarakat dalam memegang denominasi tertentu juga dipengaruhi oleh kemudahan akses dalam memperoleh uang dengan pecahan tertentu. Hal ini dikonfirmasi oleh survei yang dilakukan di beberapa kota besar pada tahun 2015 yang mengindikasikan bahwa pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 lebih mudah didapatkan oleh masyarakat melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).⁹ Kondisi ini juga dikonfirmasi oleh data penetrasi

Grafik 9.16. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan Akhir Tahun



9 Survei terhadap 487 responden di Makassar, Banjarmasin, Denpasar, Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang, Padang, Medan, dan Jakarta.

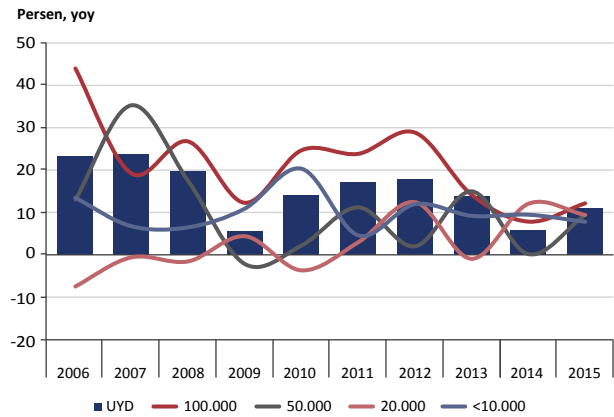
Grafik 9.17. Perkembangan UYD secara Harian



jumlah mesin ATM yang pada tahun 2015 tumbuh 9,2% menjadi 97.845 mesin ATM dan jumlah kartu ATM/Debet tumbuh 13,7% menjadi 120,3 juta kartu. Dari sisi jumlah penarikan tunai melalui ATM juga meningkat 9,4% menjadi Rp2.100,8 triliun selama tahun 2015.

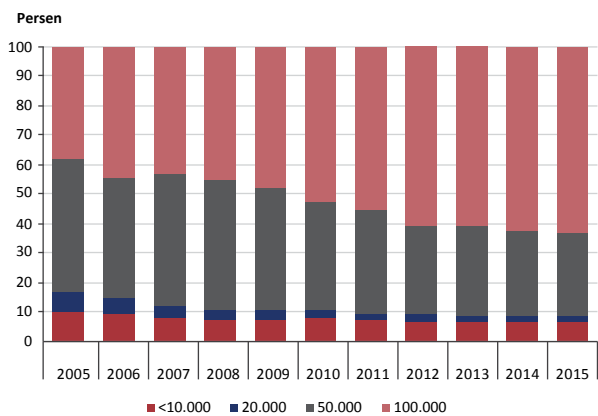
Pergerakan UYD juga tercermin dari aliran uang kartal melalui Bank Indonesia yang pada tahun 2015 mengalami net *outflow* sebesar Rp56,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan net *outflow* pada tahun 2014 yang hanya Rp27,9 triliun. Aliran uang kartal yang ditarik oleh perbankan dari Bank Indonesia (*outflow*) sebesar Rp566,3 triliun atau tumbuh 10,6%. Sementara itu, aliran uang kartal yang disetor oleh perbankan ke Bank Indonesia

Grafik 9.19. Pertumbuhan UYD Berdasarkan Denominasi

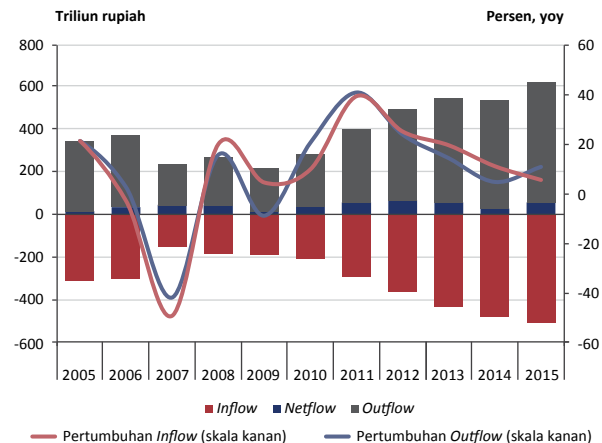


(*inflow*), dimana sebagian merupakan uang tidak layak edar, hanya mencapai Rp509,9 triliun atau tumbuh 5,3% (Grafik 9.20). Dilihat dari pola musimannya, dinamika transaksi kas dipengaruhi oleh faktor musiman yang biasanya mengalami *outflow* yang tinggi pada periode Ramadhan yang jatuh pada bulan Juli, periode Natal, dan liburan akhir tahun pada bulan Desember, namun kembali *inflow* ke Bank Indonesia pada beberapa bulan berikutnya. *Outflow* selama periode Ramadhan tahun 2015 mencapai Rp140 triliun atau naik 12,2% dibandingkan Ramadhan tahun sebelumnya. Sementara itu, *outflow* pada periode Natal dan liburan akhir tahun mencapai Rp85,6 triliun atau naik 17,5% dibandingkan tahun 2014 (Grafik 9.21).

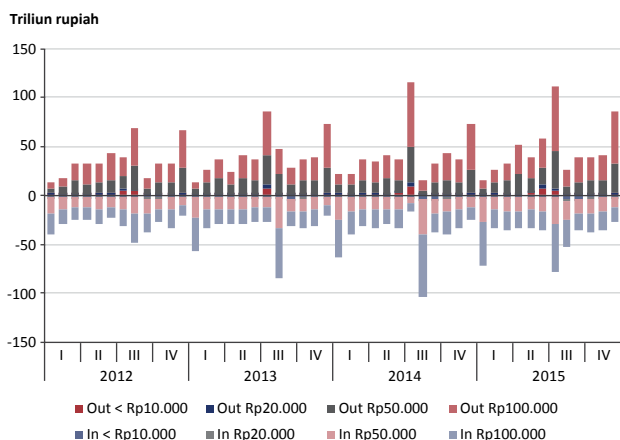
Grafik 9.18. Pangsa UYD Berdasarkan Denominasi



Grafik 9.20. Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia



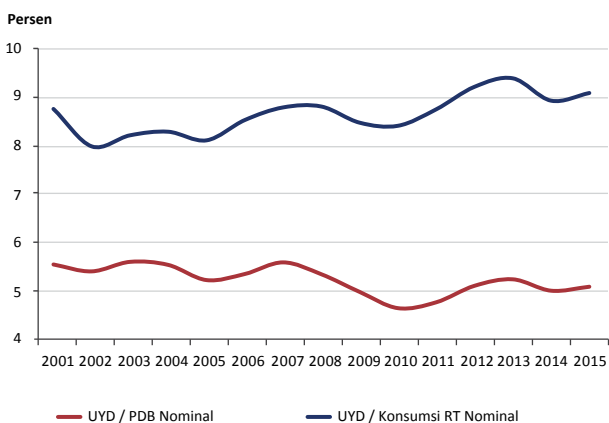
Grafik 9.21. Pola Siklikal Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia



Uang Kartal sebagai Indikator Perekonomian dan Likuiditas

Masih tingginya peran uang kartal dalam aktivitas perekonomian domestik tercermin pada rasio UYD terhadap PDB. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio UYD terhadap PDB nominal masih relatif stabil dengan rata-rata mencapai 5,1% atau pada kisaran 4,6% - 5,6%. Tingginya peran uang kartal terhadap likuiditas perekonomian terlihat pada rasio UYD terhadap Konsumsi Rumah Tangga (RT) nominal. Pada tahun 2015, rasio UYD terhadap Konsumsi RT mencapai 9,1% yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,9%, meskipun pertumbuhan Konsumsi RT mengalami perlambatan (Grafik 9.22). Hal ini juga dikonfirmasi oleh pola pertumbuhan UYD yang searah dengan pertumbuhan

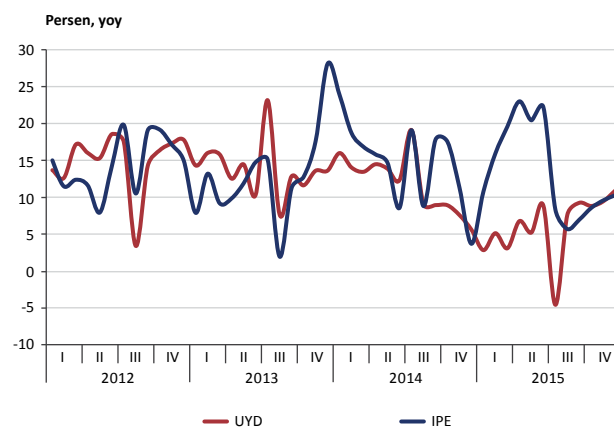
Grafik 9.22. Rasio UYD terhadap PDB dan Konsumsi Rumah Tangga



Indeks Penjualan Eceran (IPE). Pola pertumbuhan UYD dan IPE yang menurun terjadi pada periode 2 atau 3 bulan pertama tahun 2015 dan 1 atau 2 bulan pasca Ramadhan. Sedangkan UYD dan IPE naik pada periode lainnya, terutama beberapa bulan sampai dengan Ramadhan dan menjelang Natal dan liburan akhir tahun (Grafik 9.23).

Dalam beberapa tahun terakhir, pergerakan UYD masih sesuai dengan kisaran proyeksinya dengan deviasi yang lebih dekat dengan batas bawah proyeksi UYD.¹⁰ Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan UYD masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung lemah (Grafik 9.24). Namun, dari tren pertumbuhan UYD yang telah menghilangkan *seasonal factors* terlihat bahwa telah terjadi *bottoming-out* dari titik terendahnya di pertengahan tahun 2015.¹¹ Hal ini sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mulai mengalami peningkatan pada triwulan III 2015 yaitu 4,74% dan berlanjut pada triwulan IV 2015 sebesar 5,04% (Grafik 9.25). Mulai meningkatnya tren pertumbuhan UYD tersebut sejak semester II 2015 didukung oleh peningkatan pengeluaran pemerintah dari penarikan uang kartal (*outflow*) oleh bank penyalur APBN. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah yang mulai mengalami peningkatan pada triwulan III 2015 sebesar 7,11% dan berlanjut pada triwulan IV 2015 sebesar 7,31% (Grafik 9.26).

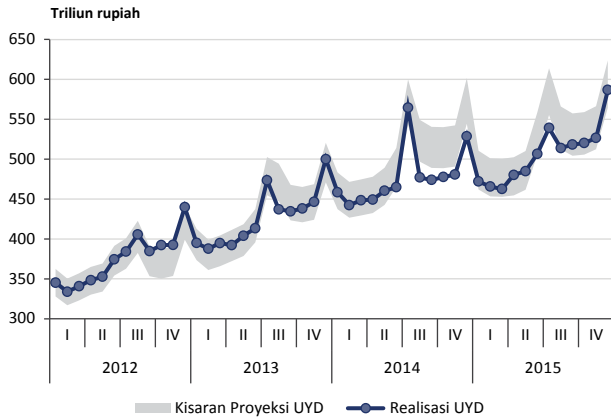
Grafik 9.23. Pola Pertumbuhan UYD dan IPE



10 Proyeksi UYD dihitung dengan menggunakan metode *Error Correction Model*, yang dipengaruhi oleh beberapa variabel makroekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, dan BI Rate.

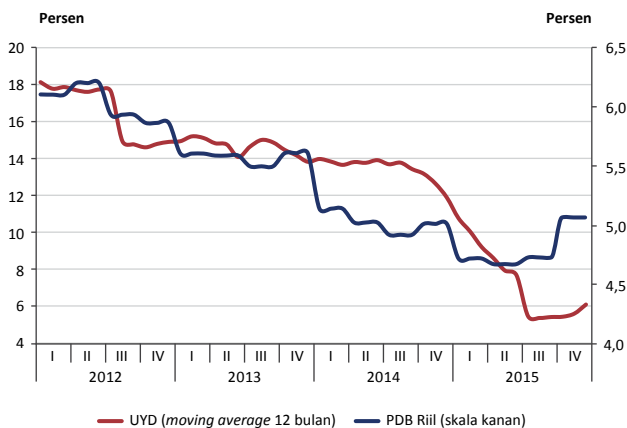
11 *Seasonal factors* yaitu meningkatnya permintaan uang kartal pada periode hari raya keagamaan, yaitu selama periode Ramadhan/Idul Fitri serta periode Natal dan liburan akhir tahun.

Grafik 9.24. Proyeksi dan Realisasi UYD



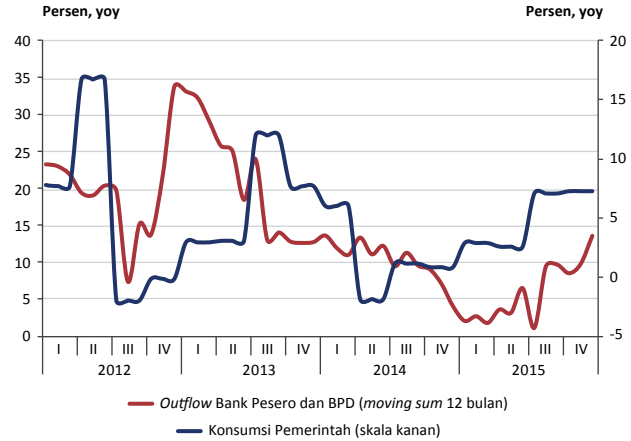
Dari sisi likuiditas, indikator uang kartal lainnya yaitu *Cash in Vault (CiV)* terus menunjukkan perlambatan pertumbuhan sampai akhir 2015.¹² Hal ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah perbankan dalam denominasi rupiah pada periode yang sama (Grafik 9.27). Pergerakan pertumbuhan CiV dan DPK tersebut juga dikonfirmasi oleh melambatnya pertumbuhan Transaksi Uang Kartal

Grafik 9.25. Pola Pergerakan Pertumbuhan UYD dan PDB Riil



12 *Cash in Vault (CiV)* merupakan salah satu komponen UYD yang ada di khazanah perbankan termasuk pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Komponen UYD lainnya adalah *Currency outside Banks (CoB)* yang merupakan uang kartal yang beredar di masyarakat atau berada di luar sistem perbankan.

Grafik 9.26. Pola Pergerakan Pertumbuhan *Outflow* Uang Kartal Bank Pesero dan BPD, dan Konsumsi Pemerintah Riil

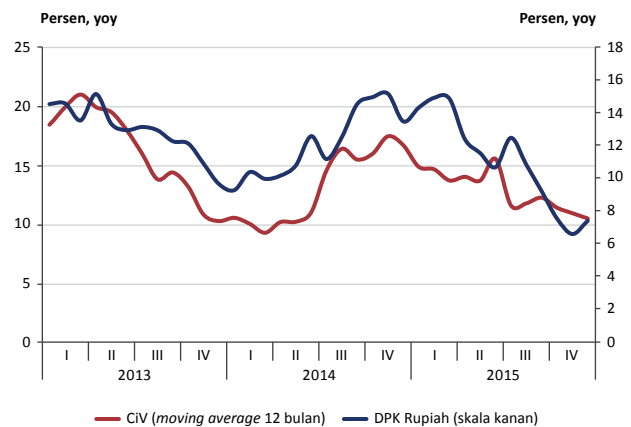


Antar Bank (TUKAB) di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada periode yang sama (Grafik 9.28)¹³

Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pengelolaan Uang Rupiah

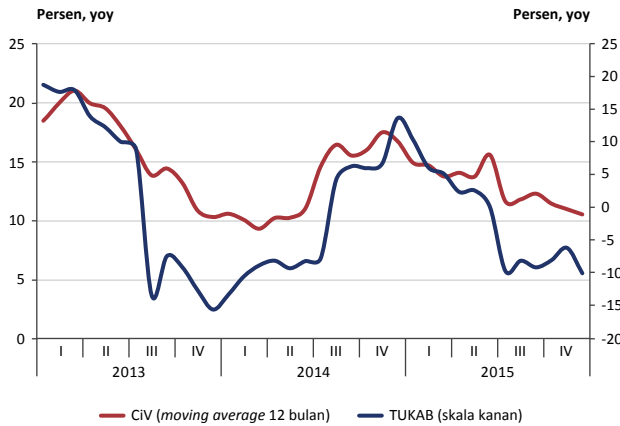
Sepanjang tahun 2015 Bank Indonesia melaksanakan implementasi berbagai kebijakan pengelolaan uang rupiah. Dampak dari implementasi berbagai kebijakan tersebut tercermin pada tersedianya uang kartal dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Sebagai langkah awal implementasi

Grafik 9.27. Pola Pergerakan Pertumbuhan *Cash in Vault* dan Dana Pihak Ketiga Perbankan



13 Transaksi Uang Kartal Antar Bank atau TUKAB merupakan kegiatan antar bank yang meliputi permintaan, penawaran, dan penukaran uang rupiah yang masih layak edar dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Grafik 9.28. Pola Pergerakan Pertumbuhan *Cash in Vault* dan Transaksi Uang Kartal Antar Bank

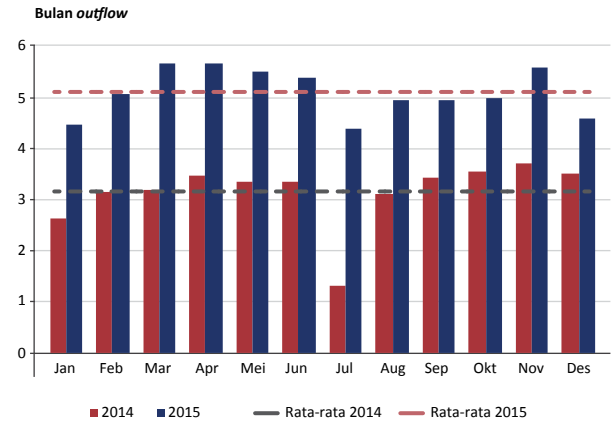


kebijakan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang kartal sepanjang tahun 2015 untuk menjamin kelancaran transaksi pembayaran tunai dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari rasio posisi kas Bank Indonesia yang mencapai rata-rata 5,1 bulan *outflow* sepanjang tahun 2015, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 3,1 bulan *outflow*. Rasio posisi kas tertinggi terjadi pada bulan Maret dan April 2015 yang mencapai 5,7 bulan *outflow* sejalan dengan karena arus balik uang kartal dari perbankan ke Bank Indonesia pasca periode Natal dan liburan akhir tahun 2014, serta adanya pasokan pencetakan uang rupiah dari Perum Peruri. Sementara itu, posisi kas terendah terjadi pada Juli 2015 yang mencapai 4,4 bulan *outflow* rata-rata yang dipicu oleh tingginya penarikan uang rupiah oleh perbankan pada periode Ramadhan 2015 (Grafik 9.29). Berdasarkan wilayah, rasio posisi kas tertinggi di Kantor Pusat Bank Indonesia yang mencapai 9,4 bulan *outflow*. Tingginya rasio kas tersebut ditujukan untuk menjaga *Iron Stock* Nasional (ISN) yang harus disediakan oleh Bank Indonesia dan antisipasi penarikan perbankan yang mayoritas berkantor pusat di wilayah Jakarta (Grafik 9.30).¹⁴

Ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup tersebut juga tidak terlepas dari implementasi kebijakan TUKAB sejak tahun 2011. Dengan kebijakan tersebut, bank diupayakan untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan

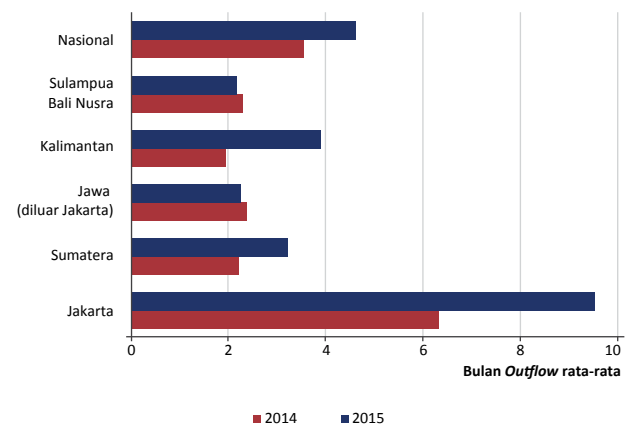
¹⁴ *Iron Stock* Nasional merupakan persediaan siaga untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan uang kartal yang tidak diprediksi pada saat penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang pada awal tahun, misalnya kenaikan BBM dan TTL pada periode tahun berjalan. Penetapan *iron stock* sebesar 20% dari proyeksi UYD adalah sesuai dengan *best practices* negara lain, misalnya Bank Sentral Spanyol dan Bank Sentral Korea Selatan.

Grafik 9.29. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata *Outflow* Bulanan

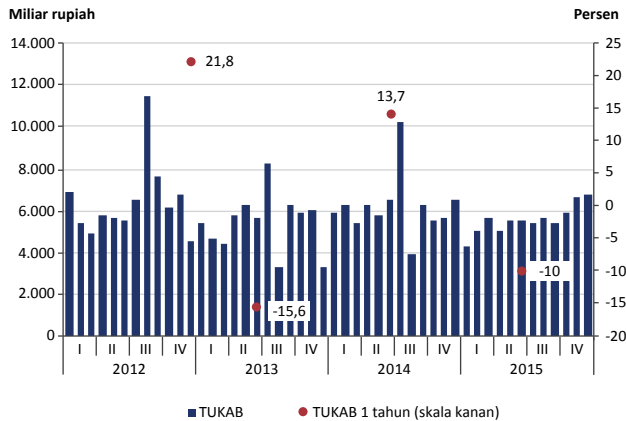


likuiditas uang rupiah dari transaksi dengan bank lainnya. Apabila tidak dapat diperoleh, bank dapat memperoleh kebutuhan uang rupiah dengan melakukan penarikan dari Bank Indonesia. Selama 2015 jumlah transaksi TUKAB di wilayah Jakarta mencapai Rp66,3 triliun atau turun sebesar 10,0% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp73,6 triliun (Grafik 9.31). Peran TUKAB dalam memenuhi kebutuhan uang rupiah perbankan selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 50,1%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 40,5%. Hal ini disebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan yang melambat tahun 2015, sehingga kebutuhan uang rupiah untuk dipertukarkan melalui mekanisme TUKAB juga menjadi berkurang (Grafik 9.32).

Grafik 9.30. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata *Outflow* Bulanan Menurut Wilayah



Grafik 9.31. Perkembangan TUKAB di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya



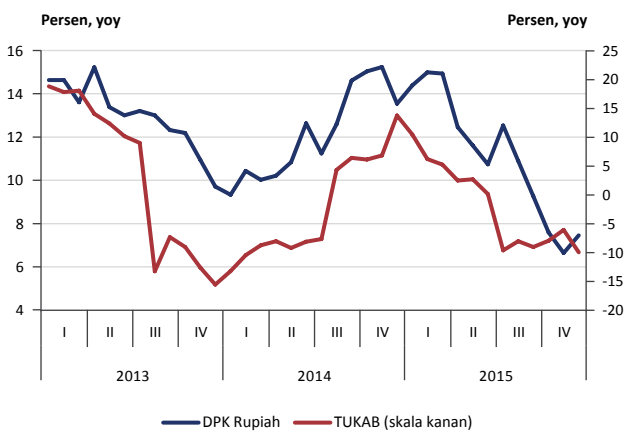
Dengan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah sepanjang tahun 2015, Bank Indonesia menempuh kebijakan reformasi distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia. Kebijakan tersebut ditempuh dengan mengembangkan infrastruktur (*capacity building*), yaitu membuka kantor perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober 2015 dan bekerja sama dengan perbankan untuk membuka 6 Kas Titipan baru di beberapa wilayah Indonesia yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia secara langsung.¹⁵ Dengan pembukaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi

Barat tersebut, maka satu Kas Titipan di Kota Mamuju telah dihentikan operasionalnya. Dengan perkembangan tersebut, jumlah Kas Titipan pada tahun 2015 berjumlah 35 kantor bank pengelola yang beranggotakan 368 kantor bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah Kas Titipan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah 30 kantor bank pengelola yang beranggotakan 267 kantor bank.

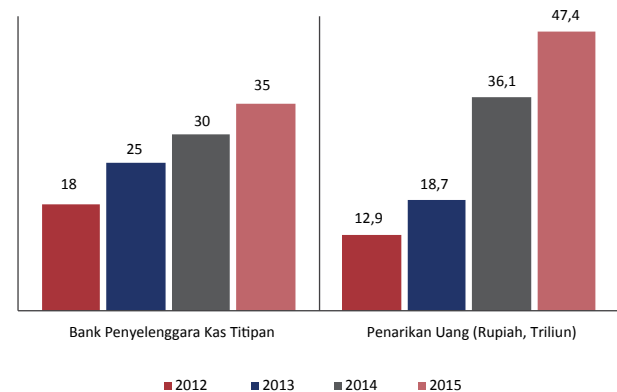
Dari sisi jumlah penarikan uang rupiah oleh bank penyelenggara Kas Titipan, selama tahun 2015 tercatat penarikan sebesar Rp47,4 triliun, atau naik 31,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp36,1 triliun (Grafik 9.33). Tingginya pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada paruh kedua tahun 2015 sejalan dengan bertambahnya jumlah Kas Titipan dan hari raya keagamaan. Dari sisi wilayah, kenaikan tersebut terutama terjadi pada Kas Titipan di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua. Dengan peningkatan *capacity building* tersebut, *coverage* layanan kas Bank Indonesia telah menjangkau 66% atau 338 kota/kabupaten di Indonesia pada tahun 2015. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 61% atau 316 kota/kabupaten di Indonesia.

Di samping memperluas jangkauan wilayah layanan kas melalui Kas Titipan, Bank Indonesia juga terus melakukan penukaran uang melalui kegiatan Kas Keliling di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan pulau terdepan NKRI.¹⁶ Upaya tersebut tercermin pada

Grafik 9.32. Pola Pergerakan TUKAB di Wilayah Jakarta dan Dana Pihak Ketiga Perbankan



Grafik 9.33. Jumlah Kas Titipan dan Penarikan Uang Rupiah



15 Kas titipan adalah kegiatan penyediaan uang rupiah sebagai titipan pada salah satu bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dalam rangka mencukupi persediaan kas bank dan memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

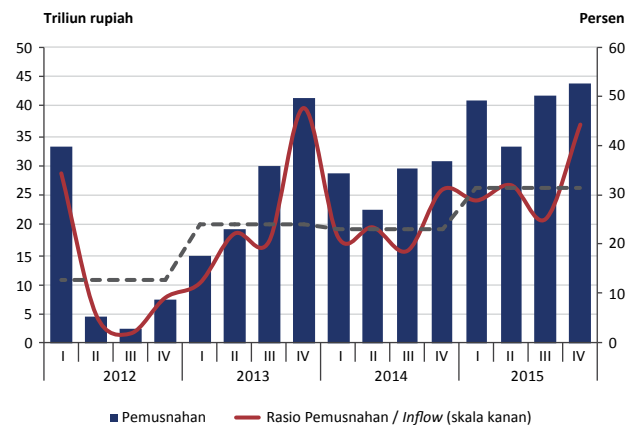
16 Kas Keliling adalah kegiatan penukaran uang rupiah oleh Bank Indonesia kepada masyarakat atau pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dengan menggunakan moda transportasi; dilakukan dengan mekanisme *retail* (kepada masyarakat umum) dan *wholesale* (kepada perbankan)

pertumbuhan jumlah penukaran uang sebesar 25,7% dari Rp1,5 triliun menjadi 1,8 triliun pada tahun 2015 (Grafik 9.34). Tingginya pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada triwulan III 2015 atau pada periode Ramadhan/Idul Fitri 2015.

Bank Indonesia juga secara berkesinambungan terus meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan kepada masyarakat (*clean money policy*) di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan dengan meningkatkan soil level atau tingkat kelusuhan uang yang menjadi standar bagi Bank Indonesia dan perbankan dalam melakukan sortasi atau pengolahan uang menjadi uang rupiah layak edar (ULE) dan uang rupiah tidak layak edar (UTLE). Dengan kebijakan tersebut, jumlah UTLE yang disetorkan oleh perbankan ke Bank Indonesia meningkat yang selanjutnya dimusnahkan dan diganti dengan uang baru dan uang layak edar dari setoran perbankan. Selama tahun 2015, jumlah pemusnahan UTLE mencapai Rp160,3 triliun atau meningkat 43,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp111,6 triliun. Kenaikan pemusnahan UTLE jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan *inflow* yang hanya mencapai 5,3%. Dengan perkembangan tersebut, rasio pemusnahan UTLE terhadap *inflow* mencapai 31,4% yang lebih tinggi dibandingkan rasio tahun sebelumnya sebesar 23,0% (Grafik 9.35). Berdasarkan jenis pecahan, pemusnahan UTLE pecahan besar (UPB) lebih tinggi dibandingkan uang pecahan kecil (UPK) mengingat kondisi UPK yang umumnya jauh lebih lusuh dibandingkan UPB (Grafik 9.36).

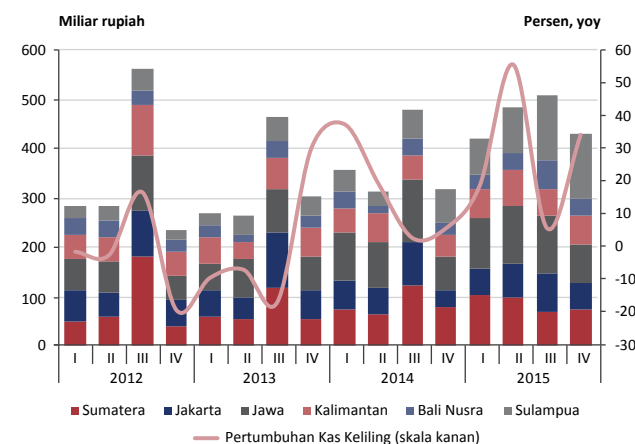
Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan uang rupiah selama tahun 2015 tercermin dari hasil survei kualitas uang layak edar pada beberapa kota di daerah

Grafik 9.35. Pemusnahan Uang Rupiah Tidak Layak Edar



perbatasan dan terpencil¹⁷. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks kualitas uang di kota di daerah perbatasan dan terpencil menunjukkan angka 6,8 atau lebih tinggi dari target semula pada angka 4. Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas pecahan besar (Rp100.000, Rp50.000, dan Rp20.000) menunjukkan indeks kualitas yang lebih tinggi dibandingkan uang kertas pecahan kecil (Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000). Berdasarkan wilayah, indeks kualitas uang pecahan besar yang paling tinggi terdapat di kota Ketapang, sementara indeks kualitas uang pecahan besar yang paling rendah terdapat di kota Jeneponto. Sementara itu, indeks kualitas uang kertas pecahan kecil yang tertinggi juga terdapat di kota Ketapang, dan indeks kualitas uang terendah di Sidangkalang, Kabanjahe, dan Brastagi.

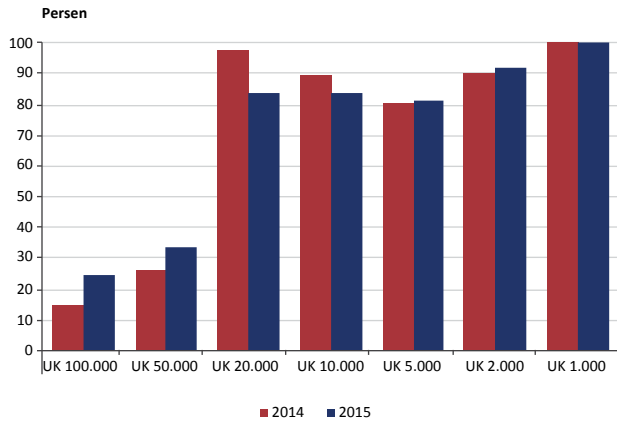
Grafik 9.34. Penarikan Uang Kartal dalam Rangka Kas Keliling



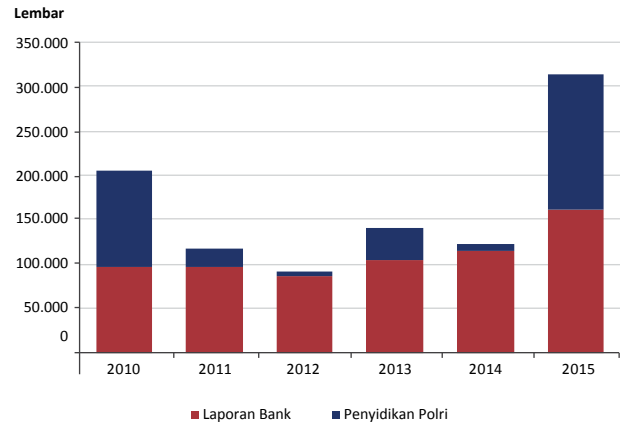
Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, terutama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kepatuhan perbankan dalam melaporkan uang rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia serta berbagai kegiatan edukasi publik kepada masyarakat mengenai ciri keaslian uang rupiah dan pencegahan pemalsuan uang rupiah. Keberhasilan koordinasi tersebut tercermin pada meningkatnya jumlah temuan uang rupiah palsu selama tahun 2015 yang tercatat sebesar 313.538 lembar atau

17 Survei terhadap 466 responden di Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Sanggau, Ketapang, Hulu Sungai Utara, Rembang, Pekalongan, Sawahlunto-Sijunjung, Jeneponto, Mojokerto, Sampang/ Pamekasan, Sidangkalang- Kabanjahe-Brastagi, Subang, Banyu Asin – Sungai Lilin, dan Amlapura.

Grafik 9.36. Rasio Pemusnahan Uang Rupiah terhadap Inflow Berdasarkan Pecahan

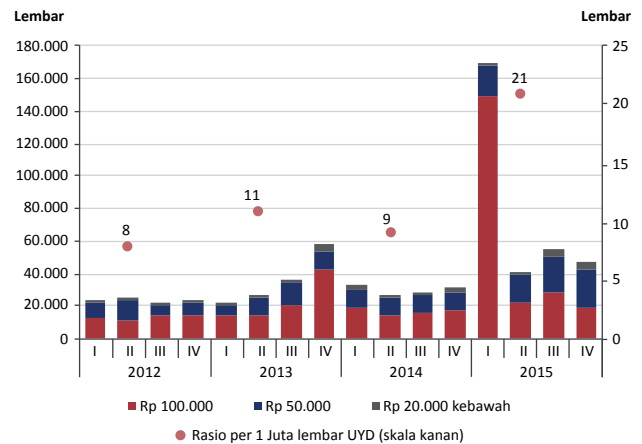


Grafik 9.38. Temuan Uang Rupiah Palsu oleh Kepolisian dan Laporan Perbankan



naik 156,8% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 122.091 lembar. Temuan uang palsu didominasi oleh uang kertas pecahan Rp100.00 dan Rp50.000, masing-masing sebesar 209.752 lembar (pangsa 71,7%) dan 70.626 lembar (pangsa 24,1%). Dari sisi sebarannya, temuan uang palsu didominasi di wilayah Jawa terutama Provinsi Jawa Timur serta di wilayah DKI Jakarta. Dengan perkembangan tersebut, rasio uang palsu naik dari 9 lembar menjadi 21 lembar per satu juta lembar uang yang diedarkan (Grafik 9.37). Tingginya temuan uang rupiah palsu didukung oleh peran aktif Kepolisian RI dalam mengungkap peredaran uang rupiah palsu selama tahun 2015, khususnya di wilayah Jember pada triwulan I 2015 yang mencapai 122.000 lembar. Di samping itu, meningkatnya temuan uang rupiah palsu juga bersumber dari meningkatnya kepatuhan perbankan dalam melaporkan uang rupiah palsu kepada Bank Indonesia (Grafik 9.38).

Grafik 9.37. Temuan Uang Rupiah Palsu dan Rasionya terhadap Uang yang Diedarkan



**Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
Generasi II**

Masyarakat pada saat ini dapat lebih mudah, cepat, dan terjangkau, dalam melakukan transfer dana melalui sistem kliring nasional. Apabila sebelumnya Layanan Transfer Dana melalui kliring dilakukan sebanyak 4 kali sehari, saat ini pelayanan ditambah menjadi 5 kali yaitu pada pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 16.15 WIB sementara Layanan Kliring Warkat Debit ditingkatkan menjadi 4 kali (sebelumnya 1 kali). Dengan penambahan layanan tersebut, dana nasabah akan terkirim dalam jangka waktu maksimal 4 jam. Hal tersebut dimungkinkan dengan mulai berjalannya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II pada Jumat, 5 Juni 2015.

Waktu transfer yang lebih cepat merupakan tahap pertama pengembangan Layanan Transfer Dana dan Kliring Warkat Debit dari dua tahap rencana pengembangan SKNBI Generasi II. Ke depan, Bank Indonesia akan mengembangkan Layanan *Multiple Transfer*, yaitu jasa layanan pemrosesan transaksi yang penerima maupun pengirimnya lebih dari satu pihak (*multiple*) guna memfasilitasi berbagai pembayaran/penagihan rutin.

SKNBI Generasi II, yang layanannya dibuka dari pukul 06.30 WIB s.d 16.00 WIB (diperpanjang menjadi 9,5 jam yang sebelumnya 8 jam), merupakan penyempurnaan dari SKNBI Generasi I yang telah berjalan selama 10 tahun. Penyempurnaan dalam SKNBI Generasi II juga mencakup perluasan akses kepesertaan terhadap Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank Umum, yaitu Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Non Bank khusus untuk Layanan Transfer Dana (Kliring Kredit). Hal ini memungkinkan masyarakat melakukan transfer dana ke seluruh wilayah Indonesia secara aman, murah dan efisien.

Dalam rangka peningkatan perlindungan kepada nasabah, telah ditentukan kewajiban waktu pemrosesan transfer dana bagi Bank Pengirim dan Bank Penerima. Bank Pengirim harus meneruskan transfer dana paling lama 2 jam setelah menerima amanat dari nasabah. Selanjutnya Bank Penerima harus membukukan ke rekening nasabah paling lama 2 jam setelah setelmen di Bank Indonesia. Biaya kliring maksimal telah ditentukan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah). Mengingat pelaksanaan kedua

ketentuan ini memerlukan penyesuaian sistem internal di masing-masing Peserta SKNBI Generasi II, maka diberlakukan masa transisi dan akan efektif pada tanggal 1 Januari 2016.

Dibandingkan dengan transfer melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), terdapat beberapa perbedaan transfer melalui SKNBI. Pertama, setelmen SKNBI dilakukan pada akhir periode (*netting*) sedangkan setelmen RTGS dilakukan secara individual (*gross*). Kedua, dari segi batasan nominal, transaksi nasabah yang dapat diproses melalui SKNBI maksimal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) per transaksi, sedangkan transaksi melalui RTGS minimal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta) per transaksi. Ketiga, biaya yang dikenakan Bank Indonesia kepada Peserta untuk SKNBI lebih murah, yaitu sebesar Rp750 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per transaksi, sedangkan untuk BI-RTGS sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Dalam rangka mendukung implementasi SKNBI Generasi II tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/13/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Dengan sistem yang baru, diharapkan keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, dapat lebih ditingkatkan.

Pihak *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS)

Kegiatan transaksi sistem pembayaran di masyarakat pada saat ini semakin aman, cepat serta andal melalui pembaruan teknologi dan peningkatan perlindungan terhadap nasabah. Hal tersebut akan terwujud melalui implementasi tiga sistem BI yang telah diperbarui pada tanggal 16 November 2015, yaitu BI-RTGS, Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP) Generasi II. Selain peningkatan kualitas teknologi dan

Tabel 1.

Perbandingan SKNBI Generasi I dan II

NO.	ITEM	GENERASI I	GENERASI II
1.	Message Format	Proprietary message format	ISO 20022 (xml format)
2.	Identifikasi Peserta	Kode kliring	Bank Identifier Code (BIC)
3.	Jenis Layanan	- Single Debit - Credit Transfer	- Single Debit Transfer - Single Credit Transfer - Multiple Debit Transfer - Multiple Credit Transfer
4.	Jangkauan Peserta	Bank	- Bank - Peserta Transfer Dana (PTD) Non Bank
5.	Penyelenggaraan Kliring Debit	Per wilayah	Sentralisasi
6.	Pelaksanaan Setelmen Transfer Dana	4 periode dalam 2 siklus	5 periode setelmen
7.	Pelaksanaan Setelmen Kliring Debit	3 zona waktu sesuai dengan zona waktu	4 zona kliring sesuai dengan kebutuhan
8.	Perlindungan konsumen	Pengaturan mengenai penerusan transfer dana kepada nasabah pada hari yang sama	Pengaturan mengenai batas waktu penerusan perintah transfer dana dan penerusan dana ke rekening nasabah
9.	Penyediaan Minimum Prefund Transfer Dana	Minimal Rp1,-	Tidak ada

jarangan komunikasi, Bank Indonesia juga meningkatkan perlindungan nasabah dengan menerapkan kewajiban maksimal proses dana transfer nasabah. Bank diwajibkan untuk memproses dana transfer nasabah paling lama 1 jam setelah bank penerima memperoleh dana di Sistem BI-RTGS.

Sistem BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta, terutama bank. Sistem ini mengakomodasi transfer dana nasabah dalam nominal besar yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. BI-SSSS digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik. Sementara itu, BI-ETP adalah sarana transaksi Bank Indonesia terkait operasi moneter, transaksi Pemerintah dalam pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN), transaksi pasar uang antar bank baik oleh perbankan konvensional (Pasar Uang Antar Bank/PUAB) maupun syariah (Pasar Uang Antar Syariah/PUAS).

Implementasi Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP Generasi II tersebut didasarkan pada lima pertimbangan penting yaitu peningkatan efisiensi dan kemampuan mitigasi risiko sistem sesuai *international best practices*, kemampuan untuk terhubung (interoperabilitas) dengan infrastruktur lain di pasar/sistem keuangan baik domestik

maupun *cross-border*, mengakomodasi dinamika di pasar/ sistem keuangan global maupun domestik termasuk perubahan kebijakan baik dari BI maupun Pemerintah, mengakomodasi perkembangan volume transaksi yang semakin meningkat, dan pembaharuan teknologi sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi I yang telah berjalan lebih dari 10 tahun.

Bagi perbankan, implementasi sistem Generasi II ini akan memberikan kesempatan dalam melakukan manajemen prioritas transaksi dan likuiditasnya dengan lebih baik. Selain itu, kebutuhan transaksi pasar uang juga dapat diakomodasi dengan baik karena informasi mengenai transaksi pasar uang dapat diperoleh dengan lebih baik. Sementara peningkatan perlindungan nasabah dilakukan dengan pengaturan waktu transfer serta batas atas biaya transaksi BI-RTGS, yaitu sebesar Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah). Hal ini menguntungkan bagi nasabah, karena adanya kepastian waktu dan biaya transfer.

Untuk mendukung implementasi sistem Generasi II tersebut serta memitigasi risiko yang mungkin timbul, Bank Indonesia akan menerbitkan ketentuan-ketentuan terkait dan menerapkan masa transisi penyelesaian transaksi transfer dana melalui sistem BI RTGS dan SKNBI sebagai berikut:

Tabel 2. Transisi Penyelesaian Transaksi Transfer Dana melalui Sistem BI RTGS dan SKNBI

Nominal Transaksi		Masa Berlaku
BI-RTGS	SKNBI	
Batas minimal transaksi (<i>flooring</i>) Rp500 juta	Tidak dibatasi	Mulai 16 November 2015 sd. 30 Juni 2016
Batas minimal transaksi (<i>flooring</i>) Rp100 juta	Batas maksimal transaksi Rp500 juta	Mulai 1 Juli 2016

Dengan sistem Generasi II ini diharapkan kegiatan sistem pembayaran nasional berlangsung aman dan lancar, serta dapat memenuhi kebutuhan perkembangan pasar keuangan Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan.



Keterangan gambar:

Secara regional, perlambatan ekonomi pada tahun 2015 dirasakan utamanya oleh daerah-daerah yang mengandalkan komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Oleh karena itu, perlu upaya diversifikasi struktur perekonomian dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing daerah.



Bab 10

Ekonomi Regional

Sejalan dengan penurunan harga dan permintaan global pada komoditas sumber daya alam (SDA), perekonomian regional pada tahun 2015 diwarnai dengan perlambatan pertumbuhan di sebagian besar wilayah, kecuali di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pertumbuhan signifikan di KTI antara lain merupakan dampak positif dari kebijakan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi ke lapangan usaha industri. Di sisi fiskal, terjadi peningkatan transfer dan belanja infrastruktur dari Pemerintah Pusat meski belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara di sisi harga, inflasi terkendali di sebagian besar wilayah. Lebih lanjut, ketahanan korporasi masih terjaga di tengah penyaluran kredit korporasi maupun rumah tangga yang melambat di seluruh wilayah.

Perekonomian regional mengalami perlambatan di sebagian besar wilayah pada tahun 2015, kecuali di KTI. Perkembangan harga komoditas SDA yang terus menurun disertai relatif lambatnya pemulihan ekonomi global, berpengaruh pada kinerja ekspor dan investasi di daerah. Kondisi ini memberikan dampak signifikan pada perekonomian di luar Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas SDA pertambangan dan perkebunan. Meski demikian, perlambatan tidak terjadi di seluruh wilayah yang memiliki basis ekonomi SDA, seperti terjadi pada 2014. Perekonomian KTI pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan historis 5 tahun terakhir, yang antara lain bersumber dari dampak positif program hilirisasi SDA yang konsisten.

Perlambatan ekonomi di wilayah berbasis SDA terkait dengan terbatasnya diversifikasi struktur perekonomian. Struktur perekonomian wilayah yang berbasis SDA terbukti lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas SDA. Tren perlambatan ekonomi khususnya dalam dua tahun terakhir mengonfirmasi kerentanan struktur ekonomi pada sejumlah daerah di wilayah luar Jawa yang berbasis SDA, yakni daerah produsen migas (Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat), produsen batubara (Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa provinsi lainnya di Kalimantan, serta Provinsi Sumatera Selatan), serta produsen konsentrat mineral dan logam yang tersebar pada beberapa provinsi di KTI, Kalimantan, dan Sumatera. Di sisi perkebunan, volatilitas harga komoditas perkebunan turut memengaruhi ketahanan perekonomian daerah yang bergantung pada SDA, diantaranya pada wilayah produsen kelapa sawit dan karet (Sumatera dan Kalimantan) maupun produsen kakao dan kopra (Sulawesi).

Kerentanan ekonomi wilayah yang berbasis SDA juga dipengaruhi oleh faktor struktural dari menipisnya cadangan SDA yang tidak terbarukan. Selain sebagai dampak dari berlanjutnya penurunan harga migas secara signifikan pada tahun 2015, terjadinya kontraksi pertumbuhan pada sejumlah daerah produsen migas di Sumatera dan Kalimantan juga disebabkan oleh penuaan kilang dan menipisnya cadangan migas. Dampak penurunan produksi dan produktivitas dari eksplorasi migas berpengaruh pada upaya mendorong hilirisasi di sektor migas di daerah. Harga migas saat ini yang jauh sangat lebih rendah dari historisnya menjadi disinsentif eksplorasi baru maupun investasi pada sektor migas. Kondisi ini menjadi tantangan fundamental perekonomian di daerah produsen migas maupun SDA lain yang tidak terbarukan, apabila tidak segera dilakukan upaya diversifikasi struktur perekonomian.

Di sisi lain, terdapat dampak positif dari upaya program hilirisasi SDA tambang di beberapa daerah yang

produksinya mampu menjaga berlanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi di KTI. Hal ini terutama pada hilirisasi di sektor mineral tambang melalui investasi pembangunan *smelter* yang telah berjalan di sejumlah daerah di Sulawesi. Efek positif yang signifikan ke perekonomian KTI dari implementasi kebijakan hilirisasi, terindikasi pada kinerja usaha konstruksi dan penyerapan tenaga kerja. Setelah pengoperasian *smelter* baru tersebut berhasil mendukung perbaikan kinerja usaha industri dan jasa. Namun, disadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam mendorong hilirisasi di daerah.¹ Dari 19 perusahaan yang berencana membangun *smelter* di KTI, hanya tujuh perusahaan yang menunjukkan *progress* yang signifikan termasuk dua diantaranya yang beroperasi pada tahun 2015. Beberapa kendala ditemui dalam pembangunan *smelter*, diantaranya terkait pasokan energi, pengadaan lahan, perijinan, kerusakan lingkungan, dan aspek pembiayaan.²

Keterkaitan perekonomian antar wilayah menyebabkan terjadinya rambatan dari perlambatan ekonomi di wilayah dengan basis ekonomi SDA ke non SDA. Menurunnya pendapatan ekspor di sejumlah daerah di wilayah luar Jawa berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga pada barang dan jasa yang sebagian besar berasal dari Jawa. Kinerja ekspor antardaerah terkonfirmasi melambat pada tahun 2015. Namun, pertumbuhan konsumsi yang didukung oleh belanja pemerintah dapat menahan perlambatan yang lebih dalam dari perekonomian Jawa.

Berdasarkan lapangan usaha utama, perlambatan pertumbuhan secara agregat terjadi baik pada lapangan usaha *tradables* maupun *non tradables*. Pada lapangan usaha *tradables*, perlambatan terutama pada industri pengolahan, khususnya di Jawa. Usaha pertanian mencatat perbaikan dengan peningkatan produksi dari tanaman bahan makanan (*tabama*) khususnya di Jawa,

1 Hilirisasi pada komoditas perkebunan seperti kelapa sawit di Sumatera, tertahan oleh rendahnya harga komoditas saat ini yang menyebabkan bea keluar CPO dan produk turunan relatif tidak berbeda jauh. Selain itu, efektivitas penggunaan *biofuel* yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan domestik terhadap impor migas juga relatif terbatas. Pada usaha migas, hilirisasi melalui pengembangan industri pengilangan minyak bumi dan petrokimia seperti di Kalimantan yang didorong melalui insentif pajak, juga terbatas karena biaya investasi yang sangat besar.

2 Dukungan pada reformasi struktural oleh Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengatasi permasalahan fasilitasi perdagangan dan pembebasan lahan. Beberapa Pemerintah Daerah telah mengoperasikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan melakukan perampingan jumlah perijinan, namun sebagian diantaranya masih bersifat parsial. Beberapa Pemerintah Daerah juga telah mendukung proses pembebasan lahan, termasuk melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait (BPN dan Kementerian LHK).

sementara kinerja sub usaha perkebunan di wilayah luar Jawa masih menurun. Usaha pertambangan juga mencatat perbaikan, meski masih tumbuh pada level negatif. Perbaikan kinerja yang signifikan pada usaha pertambangan di KTI mampu mengimbangi perlambatan usaha pertambangan di Sumatera dan Kalimantan. Di sisi *non tradables*, usaha perdagangan besar dan eceran mengalami perlambatan di wilayah luar Jawa, sejalan dengan menurunnya kinerja ekspor SDA. Sementara itu, usaha konstruksi melambat di seluruh wilayah kecuali di KTI, meski terdapat ekspansi proyek infrastruktur pemerintah.

Penurunan tingkat inflasi regional terjadi di keseluruhan wilayah pada tahun 2015 khususnya pada inflasi di kelompok harga yang diatur Pemerintah. Penurunan inflasi tercatat di Jawa dan Sumatera yang dipengaruhi oleh terjaganya pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan. Dampak *El Nino* pada tahun 2015 relatif moderat di sebagian besar daerah di Jawa yang menjadi lumbung pangan nasional. Di sisi lain, Kalimantan dan KTI mengalami tekanan inflasi yang relatif lebih tinggi terkait dengan gangguan distribusi dengan masih adanya keterbatasan konektivitas serta kapasitas maupun kualitas infrastruktur.

Dari aspek pembiayaan perbankan di daerah, perlambatan kredit terjadi di seluruh wilayah, meski stabilitas keuangan tetap terjaga. Menurunnya pertumbuhan kredit paling dalam tercatat di Kalimantan dan Jawa. Melambatnya perekonomian juga berpengaruh pada perlambatan dana pihak ketiga (DPK) di seluruh wilayah. Meski demikian, kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas keuangan di seluruh wilayah dengan terjaganya risiko kredit di bawah batas aman. Sementara dari sisi fiskal daerah, dukungan ke perekonomian relatif terbatas, terkait dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah pada tahun 2015. Terbatasnya kemampuan belanja daerah untuk menstimulasi perekonomian juga merupakan imbas dari menurunnya pendapatan daerah karena melambatnya perekonomian. Selain itu, terdapat indikasi meningkatnya risiko fiskal pada beberapa daerah yang mengalami penurunan bagi hasil ekspor komoditas SDA. Namun, terdapat peningkatan transfer dan belanja infrastruktur di daerah yang bersumber dari alokasi Pemerintah Pusat.

Ke depan, komitmen dan prioritas dalam mempercepat reformasi struktural khususnya melalui pembangunan infrastruktur strategis di daerah, diyakini akan mendukung kinerja perekonomian. Berlanjutnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis di daerah

didukung oleh pembiayaan APBN melalui peningkatan yang signifikan pada Dana Transfer Khusus (DTK).³ Sesuai dengan target RPJMN tahun 2015 -2019, pembangunan infrastruktur pada tahun 2016 difokuskan pada proyek kelistrikan 35 ribu MW yang menjadi permasalahan struktural utama di seluruh daerah, serta proyek infrastruktur pertanian yang turut mendukung ketahanan pangan di daerah. Pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas di daerah (jalan, pelabuhan, dan bandara) juga menjadi prioritas pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2016, yang akan mendukung peningkatan daya saing perekonomian.

Reformasi struktural di daerah juga menekankan pada diversifikasi struktur perekonomian dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki. Reformasi struktural di luar Jawa diarahkan pada membangun industri pengolahan berbasis SDA yang bernilai tambah lebih tinggi dan dapat menjadi pemasok bahan baku industri manufaktur di Jawa. Sementara itu, reformasi struktural di Jawa diarahkan pada transformasi industri yang terpadu dengan mengedepankan penguatan integrasi industri di domestik dan global, serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi global. Hal ini menjadi faktor krusial dalam menghadapi persaingan antar wilayah (regional) yang melampaui batas negara di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), termasuk dalam penguasaan pasar domestik.

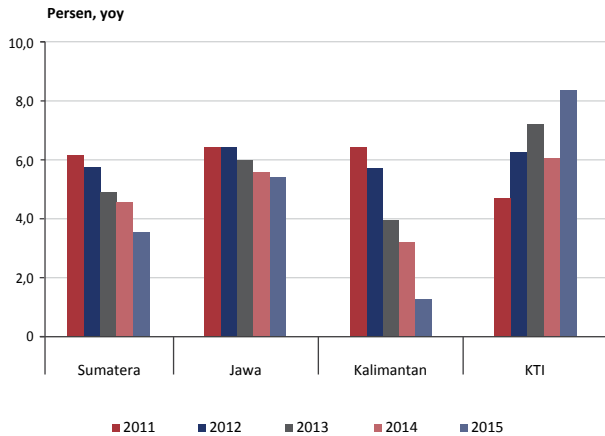
10.1. PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 melambat di seluruh wilayah, kecuali di KTI. Perlambatan pertumbuhan terdalam dialami oleh wilayah Kalimantan dan Sumatera (Grafik 10.1). Sementara di Jawa yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian nasional dan relatif lebih terdiversifikasi sumber pertumbuhannya, perlambatan ekonomi relatif moderat (-0,1% dari pertumbuhan ekonomi tahun 2014). Kondisi global yang kurang mendukung menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi regional melalui penurunan kinerja ekspor komoditas utama daerah. Ekspor mengalami pertumbuhan negatif di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di sisi lain, ekspor di KTI mampu mencatatkan pertumbuhan dua

³ Dari 14,2% peningkatan dana transfer ke daerah pada tahun 2016, DTK (dahulu DAK) meningkat paling tinggi yang mencapai sekitar 266% (dari Rp58,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp156,4 triliun pada tahun 2016).

Grafik 10.1. Pertumbuhan Ekonomi Regional Tahun 2015



Sumber: BPS, diolah

digit 18,8% (yoy), didukung oleh ekspor komoditas pertambangan. Hal tersebut menjadi pendorong perbaikan perekonomian KTI yang memiliki bobot sekitar 11,3% dari PDB (2,3% lebih tinggi dari pertumbuhan tahunan pada tahun 2014). Perbaikan ekspor KTI juga menjadi faktor meningkatnya investasi di wilayah tersebut yang tercatat mencapai 9,1% (yoy).⁴

Perlambatan ekonomi terdalam pada tahun 2015, terutama dialami oleh daerah produsen migas utama. Aceh dan Kalimantan Timur telah mencatatkan pertumbuhan negatif, sementara Riau masih mampu tumbuh positif (Gambar 10.1).⁵ Perlambatan kinerja usaha pertambangan migas sebagai dampak penurunan harga minyak dunia berpengaruh pula pada kinerja sejumlah lapangan usaha terkait, diantaranya usaha industri, usaha perdagangan besar dan eceran, serta usaha konstruksi yang tumbuh lebih rendah. Selain itu, penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) juga menurun tajam yang memberikan tekanan ke perekonomian dengan terbatasnya kapasitas fiskal untuk mendorong belanja. Daerah lain di luar Jawa yang memiliki ketergantungan pada SDA dan mengalami perlambatan

4 Di sisi lain, pertumbuhan investasi di Sumatera, Jawa dan Kalimantan melambat, meski terdapat dukungan dari proyek investasi infrastruktur Pemerintah. Pertumbuhan investasi di ketiga wilayah tersebut tercatat masing-masing sebesar 3,3% (yoy), 4,3% (yoy), dan 2,19% (yoy).

5 Pertumbuhan Provinsi Aceh, Riau, dan Kalimantan Timur pada tahun 2014 masih berada di zona positif. Kontraksi pertumbuhan di ketiga daerah ini menjadi faktor yang membawa ekonomi Sumatera dan Kalimantan tumbuh lebih rendah. Menipisnya cadangan migas turut menjadi faktor penurunan kinerja sektor migas di ketiga provinsi tersebut dan bahkan di Aceh masih terdapat faktor *base effect* dari terhentinya operasional kilang gas Arun. Upaya modifikasi kilang Arun menjadi pabrik regasifikasi LNG telah dilakukan, namun pengoperasiannya masih dalam skala yang terbatas.

ekonomi cukup dalam adalah daerah produsen batubara, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Penurunan kinerja perekonomian Jawa yang memiliki bobot PDRB terbesar (58%) sangat berpengaruh pada belum pulihnya ekonomi secara nasional. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa, selain sebagai pengaruh dari kondisi global, juga terimbas pelemahan ekonomi domestik. Ekspor manufaktur yang dominan dalam struktur ekonomi Jawa mengalami tekanan, baik pada pasar tujuan luar negeri maupun domestik. Di sisi domestik, penurunan ekspor manufaktur ke wilayah luar Jawa dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi di daerah dengan basis ekonomi SDA. Fenomena perlambatan ekonomi Jawa, turut disebabkan oleh menurunnya daya saing industri manufaktur.⁶ Meski demikian, terjaganya konsumsi di Jawa mampu menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut. Adanya pembangunan berbagai proyek infrastruktur baik pendukung konektivitas maupun pertanian turut menopang perekonomian Jawa, khususnya dari sisi investasi dan penyerapan lapangan kerja.⁷

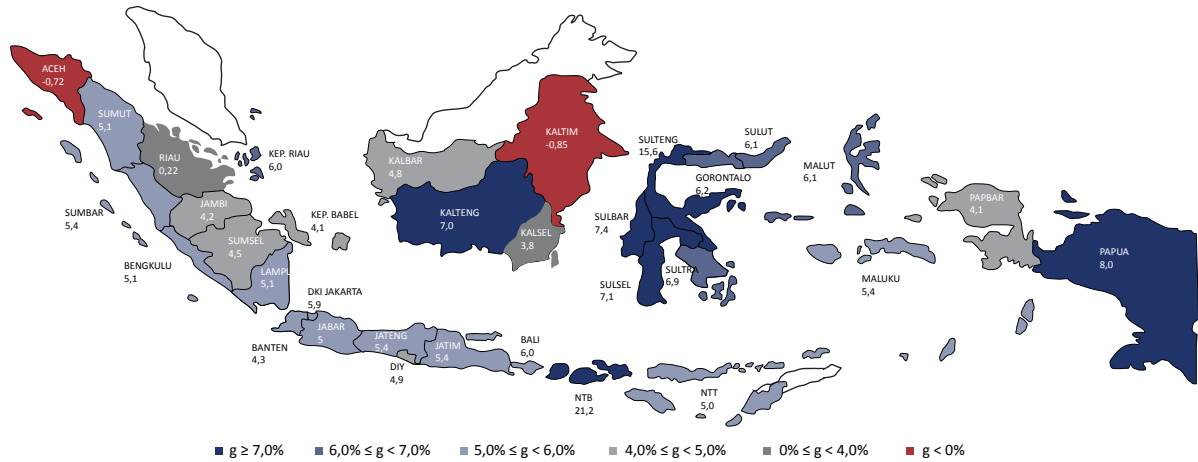
Perbaikan perekonomian KTI bersumber dari peningkatan kinerja usaha pertambangan dan industri. Setelah diberlakukannya larangan ekspor mineral mentah pada 2014, pemberian kembali ijin ekspor konsentrat tambang memberikan faktor *base effect* pada kinerja ekonomi KTI, khususnya di Provinsi Papua dan NTB (Gambar 10.1). Perkembangan kebijakan hilirisasi yang ditandai dengan pengoperasian sejumlah pabrik *smelter* juga mendukung kinerja perekonomian KTI khususnya Sulawesi dengan pengoperasian dua pabrik *smelter* pada tahun 2015. Pembangunan proyek infrastruktur di KTI juga turut menjadi faktor yang mampu memberikan dampak positif (*multiplier effect*) dari lapangan usaha konstruksi ke usaha transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi. Dari sisi struktur perekonomian, pangsa perekonomian KTI terhadap nasional konsisten meningkat dalam periode empat tahun terakhir yang memberikan sinyal kemajuan dan pemerataan pembangunan.⁸

6 Penurunan daya saing industri di Jawa tercermin dari penurunan pangsa industri pada PDRB dalam 10 tahun terakhir. Penurunan pangsa industri terbesar dalam kurun waktu tersebut, tercatat di Provinsi Kalimantan Timur, Banten, dan Aceh.

7 Ekspansi proyek infrastruktur di Jawa yang mayoritas pada infrastruktur perhubungan juga memberikan pengaruh positif pada perkembangan usaha transportasi dan pergudangan, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, serta usaha informasi dan komunikasi. Kondisi ini terkonfirmasi di DKI Jakarta yang melakukan pembangunan infrastruktur transportasi berskala besar (*mass rapid transit*).

8 Meskipun telah terdapat kemajuan, pemerataan pembangunan ke luar Jawa khususnya ke KTI masih membutuhkan perhatian, terutama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 10.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional 2015 (PDRB Tahun Dasar 2010)



Sumber: BPS, diolah

Sumber Pertumbuhan Lapangan Usaha Ekonomi Regional

Lapangan usaha pertanian tumbuh meningkat di sebagian besar wilayah pada tahun 2015. Hal ini didukung oleh kenaikan produksi tanaman bahan makanan (tabama) yang sumbangan terbesarnya berasal dari peningkatan produksi padi di Jawa. Pertanian di Jawa tumbuh meningkat signifikan menjadi 3,4% (yoy) pada tahun 2015, setelah tumbuh 1,3% (yoy) pada 2014. Kebijakan upaya khusus (upsus) pertanian melalui dukungan prasarana dan sarana produksi turut mendorong peningkatan kinerja usaha pertanian, di tengah adanya risiko dampak *El Nino*. Dampak *El Nino* terhadap produksi tabama cenderung lebih besar di wilayah luar Jawa yang mengandalkan lahan tadah hujan. Adapun alih fungsi lahan masih menjadi tantangan bagi kinerja usaha pertanian yang salah satunya terindikasi dari penurunan produksi di Provinsi Jawa Barat akibat perkembangan kota dan kawasan industri yang pesat.

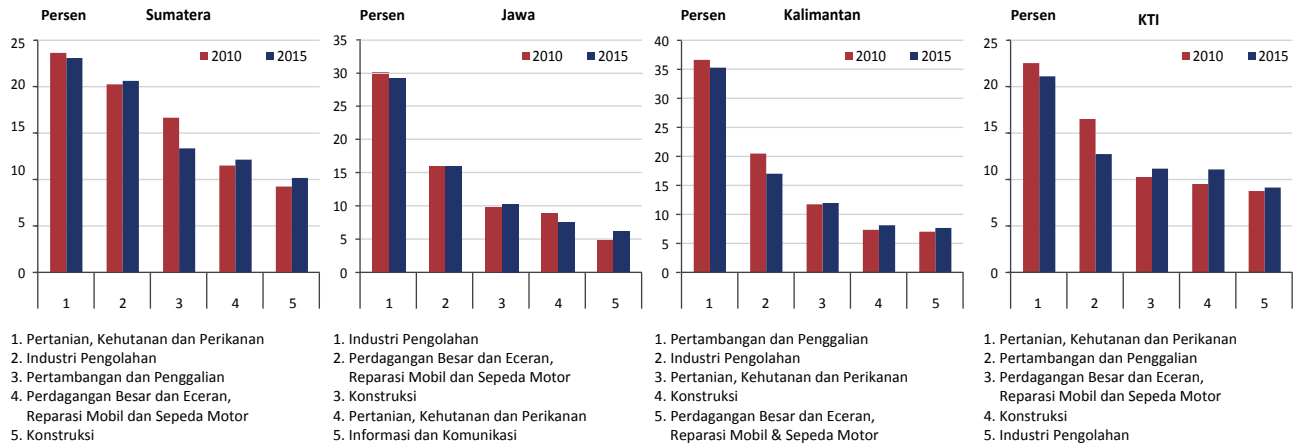
Menurunnya kinerja usaha perkebunan di seluruh wilayah luar Jawa menahan usaha pertanian tumbuh lebih tinggi. Melemahnya harga dan permintaan global menjadi faktor utama menurunnya kinerja usaha perkebunan. Kinerja usaha perkebunan yang rendah di Sumatera dan Kalimantan bersumber dari menurunnya ekspor komoditas sawit dan karet. Sementara itu, kinerja usaha perkebunan di KTI dipengaruhi oleh melemahnya ekspor komoditas kakao, cengkeh, dan pala. Dampak cuaca ekstrem akibat *El Nino* dan kebakaran hutan menjadi faktor menurunnya kinerja produksi perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Penurunan produksi sawit akibat dari kebakaran hutan di kedua wilayah tersebut diestimasi mencapai sekitar 15%. Secara umum, pangsa usaha pertanian pada PDRB

di sebagian besar wilayah lebih rendah dibandingkan 10 tahun lalu yang sangat dipengaruhi oleh kinerja sub lapangan usaha perkebunan (Grafik 10.2).

Perbaikan kinerja usaha pertambangan hanya terjadi di KTI. Pertumbuhan usaha pertambangan di KTI tumbuh mencapai 18,8% (yoy) dan menjadi faktor pendorong utama dari peningkatan pertumbuhan di KTI. Selain faktor pemberian kembali ijin ekspor konsentrat mineral dan logam, hilirisasi komoditas tambang yang telah berjalan di KTI, turut mendukung kinerja usaha pertambangan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku *smelter*. Sementara itu, peningkatan produktivitas kilang migas dengan dukungan teknologi relatif masih terbatas. Hal ini tercermin dari *lifting* migas pada tahun 2015 yang cenderung lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tren penurunan produksi yang lebih permanen akibat penuaan sumur dialami oleh sebagian besar kilang migas di Sumatera dan Kalimantan. Kilang yang baru dioperasikan juga belum mencapai kapasitas optimum produksi seperti Blok Cepu di Jawa.

Sementara itu, usaha pertambangan tumbuh melambat signifikan di Kalimantan dan Sumatera (Grafik 10.3). Pertumbuhan usaha pertambangan di Kalimantan dan Sumatera, secara tahunan mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,9% (yoy) dan 2,8% (yoy). Usaha pertambangan di Kalimantan yang memiliki pangsa PDRB terbesar mengalami kontraksi pertumbuhan untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan tersebut disebabkan oleh produksi batubara yang turun tajam hingga 75% dibandingkan 2014, terkait dengan menurunnya permintaan global khususnya dari Tiongkok serta masih terbatasnya kebutuhan domestik. Sementara itu, perlambatan pertambangan di Sumatera

Grafik 10.2. Pangsa PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Utama Wilayah



Sumber: BPS, diolah

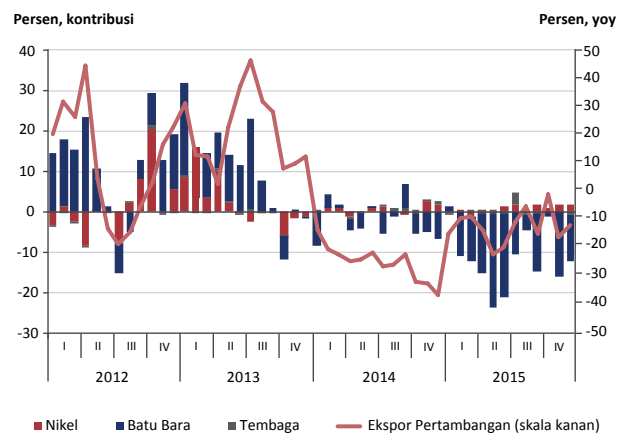
tidak sedalam di Kalimantan karena perekonomian Sumatera yang relatif lebih terdiversifikasi. Produksi batubara di Sumatera Selatan bahkan terindikasi meningkat untuk memenuhi kebutuhan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sumatera yang mulai beroperasi pada tahun 2015.⁹

Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh melambat di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan (Grafik 10.4). Hal ini terkait dengan turunnya permintaan ekspor dan melemahnya permintaan domestik pada produk manufaktur di Jawa, diantaranya produk kendaraan bermotor, tekstil, dan produk tekstil (Grafik 10.5).

Penurunan ini terkonfirmasi dari hasil survei *liaison* ke pelaku usaha terkait kinerja penjualan yang sebagian besar lebih rendah daripada 2014. Industri manufaktur, khususnya di Jawa, juga terbebani oleh ketergantungan impor bahan baku dan peningkatan biaya produksi yang berpengaruh ke daya saing. Pelemahan konsumsi domestik di wilayah di luar Jawa turut menjadi tantangan bagi penjualan produk olahan industri di Jawa. Di samping itu, ekspor produk dari industri berbasis SDA di Sumatera dan Kalimantan seperti minyak kelapa sawit dan karet olahan juga melemah, namun lebih disebabkan oleh rendahnya permintaan global (Grafik 10.6).

Di sisi lain, industri pengolahan tumbuh meningkat di KTI sejalan dengan implementasi kebijakan hilirisasi. Pengoperasian pabrik LNG Donggi Senoro di Provinsi

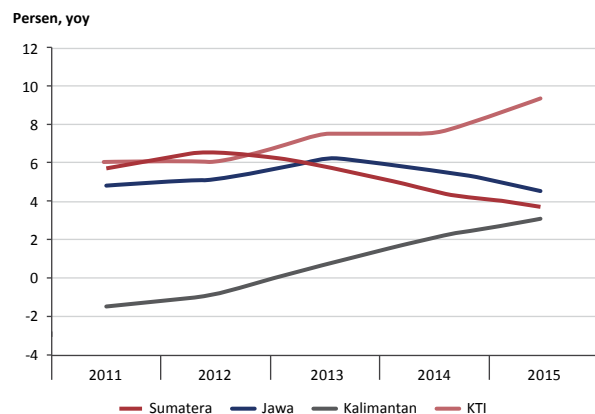
Grafik 10.3. Pertumbuhan Tambang Kalimantan dan KTI



Sumber: BPS, diolah

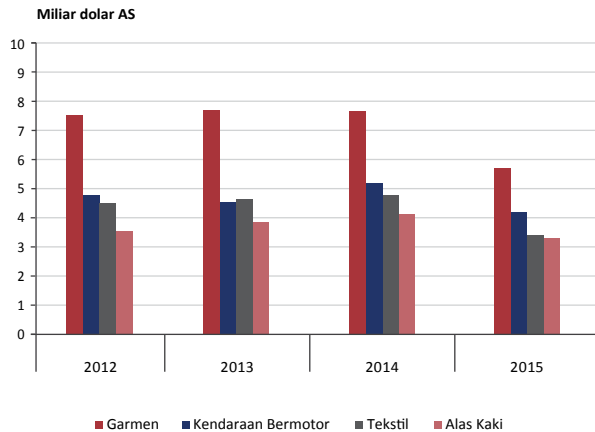
9 PLTU berkapasitas 1.060 MW dioperasikan di Sumatera Bagian Selatan dan Tengah dan 580 MW di Sumatera Bagian Utara.

Grafik 10.4. Pertumbuhan Industri Pengolahan Regional

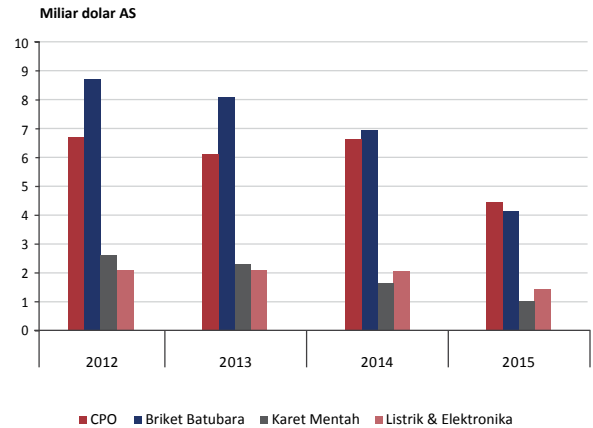


Sumber: BPS, diolah

Grafik 10.5. Ekspor Industri Jawa



Grafik 10.6. Ekspor Industri Sumatera & Kalimantan



Sulawesi Tengah dan sejumlah *smelter ferronikel* di Provinsi Sulawesi Tengah dan Tenggara pada tahun 2015, menjadi faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan industri di KTI. Pertumbuhan industri yang cukup pesat di KTI juga didukung oleh pembiayaan dari sektor perbankan yang tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi. Kemajuan industrialisasi di KTI dalam beberapa tahun terakhir tercermin dari pergeseran struktur pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir (Grafik 10.2). Penurunan pangsa PDRB pada usaha pertambangan dikompensasi dengan peningkatan pangsa pada industri pengolahan yang mengonfirmasi telah adanya diversifikasi struktur perekonomian dan mendukung adanya indikasi kembali meningkatnya *output* potensial KTI.¹⁰

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan di sebagian wilayah, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Penurunan aktivitas perdagangan terkait dengan pelemahan daya beli masyarakat dengan terbatasnya penerimaan pendapatan ekspor komoditas hasil tambang. Kebakaran hutan dan bencana kabut asap memberikan dampak pada terbatasnya aktivitas perdagangan di kedua wilayah tersebut. Omset penjualan diestimasikan menurun di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, masing-masing sebesar 40%-50% dan 20%-30% selama terjadinya kabut asap. Hal ini terkonfirmasi oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan indeks keyakinan konsumen yang lebih rendah di Kalimantan dan Sumatera, serta penyaluran kredit ke usaha perdagangan besar dan eceran yang melambat di sebagian besar wilayah.

¹⁰ *Output* potensial dihitung menggunakan HP Filter dengan data PDRB dari 2008 hingga tahun 2015. Di sisi lain, *output* potensial wilayah lain masih cenderung menurun.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran di Jawa masih mampu tumbuh meningkat. Kondisi ini dipengaruhi oleh dimulainya pembangunan infrastruktur skala besar serta adanya perbaikan pendapatan pada usaha pertanian. Penyelenggaraan Pilkada serentak di 263 daerah provinsi, kabupaten, dan kotamadya juga memberikan dampak dalam level yang moderat. Meski demikian, konsumsi rumah tangga di Jawa sedikit menurun pada tahun 2015 sejalan dengan moderasi pada keyakinan konsumen. Sementara itu, usaha perdagangan besar dan eceran masih mampu tumbuh tinggi di KTI, didukung dengan peningkatan konsumsi dan investasi, baik pada proyek pembangunan *smelter* maupun infrastruktur.

Lapangan usaha konstruksi tumbuh melambat di sebagian besar wilayah pada tahun 2015, di tengah meningkatnya intensitas pembangunan infrastruktur. Perlambatan kinerja konstruksi terutama terjadi di Kalimantan dan Sumatera sebagai pengaruh dari minimnya proyek konstruksi swasta. Usaha konstruksi di kedua wilayah tersebut melambat cukup dalam, yakni masing-masing dari 7,6% (yoy) menjadi 2,8% (yoy) dan dari 7,0% (yoy) menjadi 4,2% (yoy), sehingga turut menyebabkan terjadinya peningkatan risiko kredit pada usaha konstruksi. Kinerja usaha konstruksi di Jawa sedikit melambat dengan tumbuh sebesar 4,8% (yoy) di tengah berjalannya sejumlah proyek infrastruktur pertanian (waduk dan irigasi) serta pendukung konektivitas (MRT Jakarta, Jalan Trans Jawa, perluasan bandara). Sementara itu, usaha konstruksi di KTI tumbuh meningkat dengan dukungan proyek infrastruktur dan pembangunan pabrik *smelter*. Perkembangan tersebut mendorong peningkatan laju pertumbuhan sektor konstruksi dari 8,3% (yoy) menjadi 9,6% (yoy) di KTI.

Kemajuan realisasi proyek infrastruktur pemerintah yang mendukung kinerja usaha konstruksi terlihat di berbagai daerah pada tahun 2015. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), realisasi proyek fisik terutama terjadi di Sumatera dan Kalimantan sejalan dengan kemajuan proyek pembangunan pembangkit listrik dan bandara baru.¹¹ Dari total tambahan kapasitas PLTU dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) sebesar 2.600 MW, sekitar 63% berada di Sumatera. Adapun proyek bandara skala besar di Kalimantan pada tahun 2015 adalah perluasan bandara Supadio Pontianak serta pembangunan bandara Muara Teweh di Barito Utara dan Maratua di Kalimantan Timur. Pada infrastruktur pertanian, pembangunan difokuskan pada 16 waduk yang tersebar di berbagai daerah. Terdapat 3 waduk (Payaseunara dan Rajui di Aceh serta Marangkayu di Kalimantan Timur) yang mendekati penyelesaian pada tahun 2015. Sementara itu, kemajuan pembangunan jalan juga terlihat di beberapa daerah, antara lain proyek tol trans Sumatera, dan trans Jawa (ruas Pejagan-Pemalang, Semarang-Solo dan Solo-Ngawi).

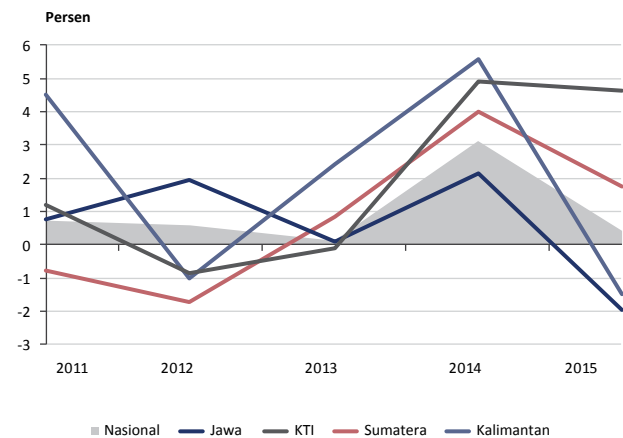
Kondisi Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Regional

Pertumbuhan angkatan kerja menurun di seluruh wilayah pada tahun 2015, khususnya di Kalimantan dan Jawa (Grafik 10.7).¹² Di tengah ketidakpastian dan volatilitas perekonomian berbasis SDA, sebagian dari angkatan kerja ditengarai memilih mencari kerja ke wilayah lain yang memiliki prospek pasar tenaga kerja lebih kondusif atau melanjutkan pendidikan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang berlangsung sepanjang tahun, juga memberikan dampak pada peningkatan tingkat pengangguran, sejalan dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada usaha pertambangan. Tingkat pengangguran tertinggi di Kalimantan tercatat di Kalimantan Timur (7,5%). Angkatan kerja juga menurun cukup signifikan di Jawa, walaupun tingkat pengangguran terbuka cenderung stabil (Grafik 10.8). Dukungan penyerapan tenaga kerja di Jawa berasal dari sektor pertanian dan perdagangan yang masih mengalami pertumbuhan, disamping peningkatan kegiatan konstruksi dengan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur skala besar. Di sisi lain, terbatasnya kinerja sejumlah manufaktur turut menyebabkan tingkat pengangguran di DKI Jakarta

11 Data TEPRA bersumber dari pelaporan realisasi keuangan dan proyek fisik oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya.

12 Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau memiliki pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Grafik 10.7. Pertumbuhan Angkatan Kerja Regional

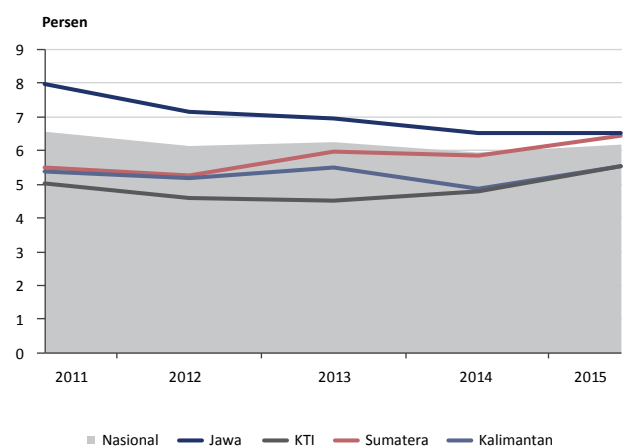


Sumber: BPS, diolah

(7,2%) dan Jawa Barat (8,7%) berada di atas rata-rata nasional.

Pertumbuhan angkatan kerja di Sumatera dan KTI juga mengalami penurunan pada tahun 2015. Adapun dampak dari perlambatan perekonomian tercermin dari peningkatan tingkat pengangguran, khususnya di Sumatera yang mencapai sebesar 6,4%. Sejumlah daerah di Sumatera yang memiliki tingkat pengangguran tinggi adalah di Aceh (9,9%) dan Riau (7,8%). Sementara itu, tingkat pengangguran di KTI merupakan yang terendah secara nasional. Sebagian besar daerah di KTI memiliki tingkat pengangguran di bawah nasional, kecuali di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Tingkat pengangguran terendah di KTI tercatat di Bali (2%).

Grafik 10.8. Tingkat Pengangguran Regional



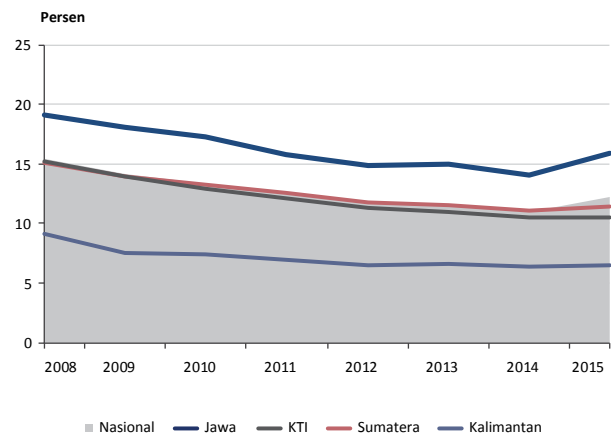
Sumber: BPS, diolah

Sebaran tingkat pengangguran antardaerah menunjukkan tren yang semakin menyempit (Grafik 10.9). Hal ini mengindikasikan mobilisasi tenaga kerja antarwilayah yang semakin tinggi atau secara tidak langsung penyerapan pasar tenaga kerja yang lebih optimal. Meski demikian, pola sebaran tingkat pengangguran pada masing-masing periode menunjukkan bahwa justru sebagian besar daerah dengan pangsa terhadap PDRB yang cukup kecil, terindikasi cenderung memiliki lebih banyak sektor informal sehingga dapat menyerap lebih banyak pekerja.

Tingkat kemiskinan meningkat di seluruh wilayah sejalan dengan tren perlambatan ekonomi pada tahun 2015. Tingkat kemiskinan di KTI meningkat cukup tinggi dan berada jauh di atas nasional, meski pada saat bersamaan terdapat ekspansi perekonomian di tahun 2015 (Grafik 10.10). Tercatat 11 dari total 13 daerah provinsi di KTI dengan tingkat kemiskinan yang mencapai dua digit. Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. DKI Jakarta dengan pangsa perekonomian besar dan lebih terdiversifikasi, memiliki tingkat kemiskinan terendah dibandingkan wilayah lain dalam 5 tahun terakhir. Peran sektor informal yang cenderung dominan di DKI Jakarta, cenderung menjadi *buffer* di tengah perlambatan perekonomian. Kalimantan yang pertumbuhan ekonominya paling lemah dibandingkan wilayah lain, mampu menjaga tingkat kemiskinan terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Rasio Gini juga menunjukkan belum adanya perbaikan signifikan pada ketimpangan di sebagian besar daerah. Rasio Gini di Jawa dan KTI lebih tinggi dibandingkan wilayah lain pada tahun 2015 (Grafik 10.11). Meski

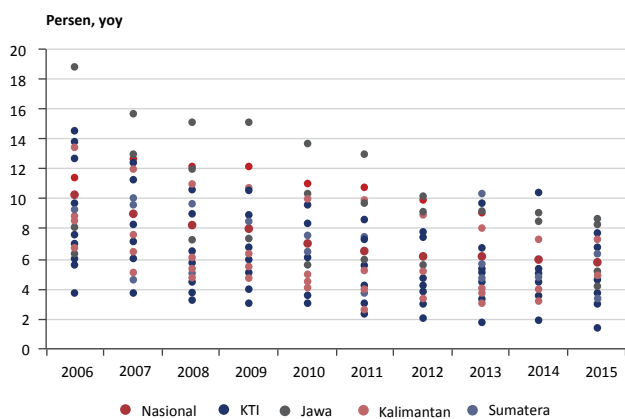
Grafik 10.10. Tingkat Kemiskinan Regional



Sumber: BPS, diolah

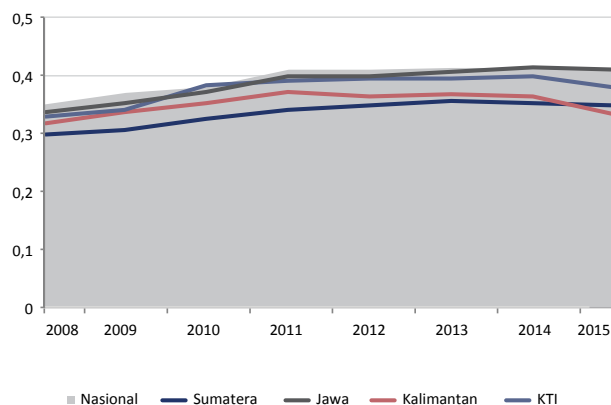
demikian, ketimpangan di KTI cenderung menurun pada tahun 2015, sedangkan di Jawa masih berada di level yang menyamai nasional (0,41). Secara spasial, rasio Gini tertinggi tercatat di Provinsi Papua Barat (0,44), DKI Jakarta (0,43), dan DI Yogyakarta (0,43). Adapun penurunan rasio Gini yang signifikan terjadi di Sulawesi Utara dan Bali. Sementara di Sumatera dan Kalimantan, rasio Gini berada di di bawah rata-rata nasional. Secara tren dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio Gini cenderung meningkat, diantaranya sebagai pengaruh dari *booming* harga komoditas SDA yang mengurangi inklusivitas pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah. Secara umum, sebaran tingkat kemiskinan di berbagai daerah juga menunjukkan kecenderungan yang semakin menyempit. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan yang paling rendah tercatat di DKI Jakarta (3,6%), sementara

Grafik 10.9. Disparitas Tingkat Pengangguran Regional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 10.11. Rasio Gini



Sumber: BPS, diolah

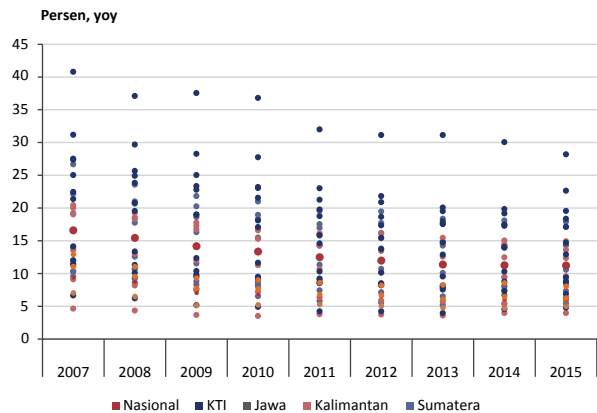
yang paling tinggi tercatat di Papua (28,4%). Disparitas tingkat kemiskinan antara DKI Jakarta dengan Papua yang sangat lebar mencerminkan tingkat keparahan kemiskinan di KTI apabila dibandingkan dengan Jawa. Adapun sebaran tingkat kemiskinan yang berada di bawah nasional, tercatat di sebagian besar KTI dan Sumatera (Grafik 10.12). Sedangkan di Jawa dan Kalimantan sebaran tingkat kemiskinan cenderung berada di bawah nasional.

10.2. INFLASI REGIONAL

Dinamika Inflasi Regional

Penurunan inflasi regional pada tahun 2015 terjadi di keseluruhan wilayah, terutama di Jawa dan Sumatera.¹³ Seperti halnya pada tahun 2014, terkendalinya inflasi di kedua wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh terjaganya pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan (Gambar 10.2). Dampak *El Nino* yang terjadi pada tahun 2015 relatif moderat di sebagian besar daerah di Jawa yang menjadi lumbung pangan nasional. Di sisi lain, Kalimantan dan KTI mengalami tekanan inflasi yang relatif lebih tinggi terkait dengan gangguan distribusi dengan masih adanya keterbatasan konektivitas serta kapasitas maupun kualitas infrastruktur. Adapun dampak dari penurunan harga BBM tidak merata secara spasial, terkait dengan perbedaan

Grafik 10.12. Disparitas Tingkat Kemiskinan Regional

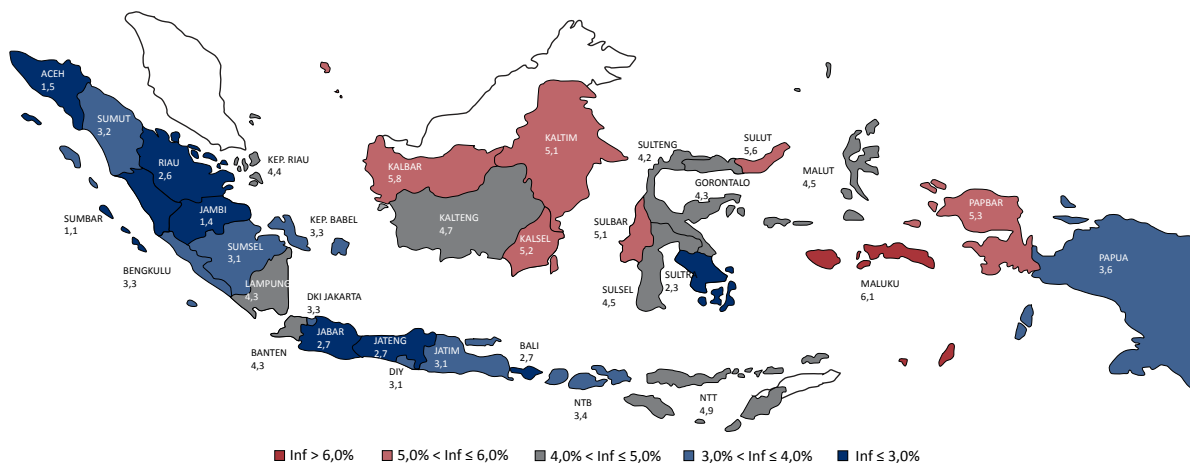


Sumber: BPS, diolah

penyesuaian tarif angkutan melalui Peraturan Daerah.¹⁴ Dalam kaitan itu, Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara aktif terus berperan dalam mendukung pengendalian laju inflasi daerah melalui koordinasi kebijakan baik yang bersifat jangka pendek maupun yang mengarah pada faktor inflasi struktural.

Tekanan inflasi pada periode lebaran tahun 2015 yang lebih moderat dari rata-rata beberapa tahun terakhir juga menjadi faktor penurunan inflasi regional. Perlambatan ekonomi

Gambar 10.2. Peta Inflasi Daerah 2015 (Persen, yoy)



Sumber: BPS, diolah

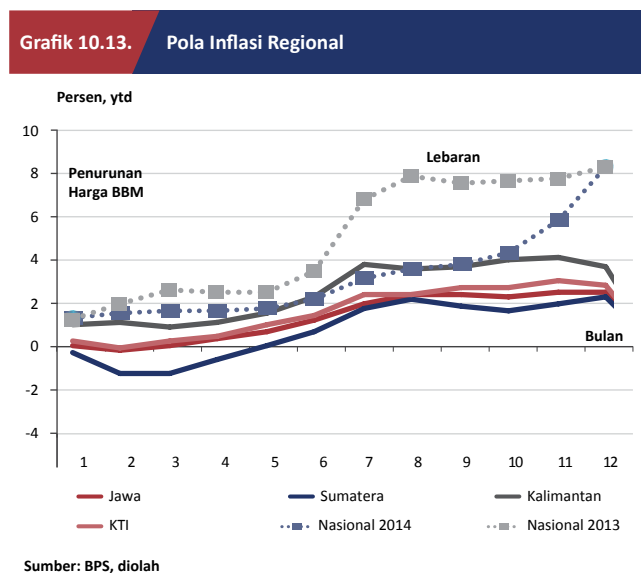
¹³ Pangsa inflasi Jawa dan Sumatera tertinggi secara nasional, yakni masing-masing sebesar 62% dan 19,6% (SBH tahun 2012). Dari 14 provinsi di Jawa dan Sumatera, hanya 1 provinsi di Jawa Bagian Barat dan 2 provinsi di Sumatera Bagian Selatan yang mencatatkan inflasi di atas nasional.

¹⁴ Perbedaan penyesuaian tarif angkutan di daerah pasca penurunan harga BBM pada Januari tahun 2015, merujuk pada kisaran penurunan tarif sebesar 5-10% berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan. Selain itu, waktu penyesuaian tarif angkutan juga berbeda antardaerah terkait dengan mekanisme penetapan yang diatur Peraturan Daerah dengan memperhatikan masukan Organda setempat.

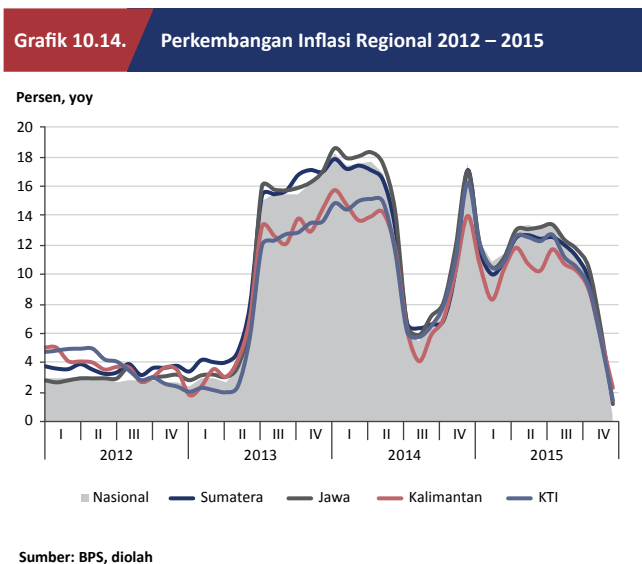
yang terjadi pada tahun 2015 memberikan pengaruh pada daya beli dan permintaan masyarakat khususnya di Sumatera, Jawa, dan KTI. Minimalnya gangguan distribusi dan terjaganya pasokan pangan di sebagian besar wilayah juga mendukung terkendalinya inflasi regional pada periode Lebaran. Di sisi lain, inflasi periode Lebaran di Kalimantan cenderung lebih tinggi yang didorong oleh kenaikan harga pangan dan tarif angkutan udara (Grafik 10.13).

Secara spasial, Sumatera dan Jawa mencatatkan inflasi terendah pada tahun 2015 dengan moderatnya permintaan dan terjaganya ketersediaan pasokan. Inflasi di Sumatera dan Jawa tercatat masing-masing sebesar 3,05% (yoy) dan 3,12%, terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (Grafik 10.14). Turunnya inflasi di Sumatera didukung oleh penurunan inflasi yang signifikan di Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Aceh. Inflasi terendah secara nasional tercatat di Sumatera Barat (1,08%) yang mencatatkan penurunan paling dalam.¹⁵ Di Jawa, penurunan inflasi terdalam terjadi di Banten, Jakarta dan Jawa Tengah. Kenaikan produksi tabama di Jawa turut mendukung ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Meski lebih lambat dari tahun 2014, inflasi di Kalimantan dan KTI pada tahun 2015 lebih tinggi dari inflasi nasional. Inflasi di Kalimantan dan KTI tercatat masing-masing sebesar 5,12% dan 4,06%. Inflasi tertinggi di Kalimantan terjadi di Kalimantan Barat (5,79%). Meski permintaan cenderung melemah sejalan dengan perlambatan ekonomi



15 Inflasi di Sumatera Barat yang tercatat paling tinggi pada 2014, mengalami penurunan paling signifikan pada tahun 2015, yakni sebesar 9,67%. Pengoperasian terminal agrobisnis dan kerja sama antar Pemerintah Kota ditengarai sebagai salah satu faktor yang turut mendukung stabilisasi harga pangan di daerah tersebut.



yang signifikan di Kalimantan, terbatasnya konektivitas dan sarana transportasi masih menjadi permasalahan inflasi. Inflasi pada sub kelompok transportasi secara khusus menjadi isu di Kalimantan Barat, terkait dengan kenaikan tarif angkutan udara. Sementara di KTI, daerah yang memiliki inflasi relatif tinggi adalah Maluku, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Inflasi tertinggi secara nasional tercatat di Maluku, yakni mencapai 6,15%. Inflasi yang masih cukup tinggi di KTI dipengaruhi oleh bahan makanan, khususnya dari komoditas ikan segar yang memiliki bobot besar dalam keranjang inflasi.¹⁶ Selain itu, berbeda dengan kondisi Kalimantan, peningkatan pertumbuhan ekonomi KTI yang signifikan juga menjadi faktor pendorong permintaan yang lebih kuat.

Dampak dari kebakaran hutan dan gangguan kabut asap ke inflasi regional lebih terkonsentrasi di Kalimantan. Meskipun intensitas kebakaran hutan dan gangguan kabut asap relatif lebih luas di Sumatera, namun dampak dari kabut asap lebih dominan di Kalimantan.¹⁷ Terdapatnya gangguan penerbangan dan distribusi barang melalui jalur darat, sungai, maupun udara berpengaruh pada ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang paling terkena dampak kabut asap.

16 Tekanan inflasi pada komoditas ikan segar selain dari gangguan cuaca, juga terdapat dampak dari kebijakan pelarangan aktivitas alih muatan (*transshipment*) di tengah laut untuk produk perikanan tangkap yang mengurangi pasokan.

17 Meski terdapat gangguan pada distribusi barang di Sumatera, namun ketersediaan pasokan cukup memadai. Hal ini disebabkan pula oleh permintaan yang menurun, terkait dengan keterbatasan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan.

Sumber Inflasi regional

Penurunan inflasi yang signifikan pada komoditas dalam kelompok *administered prices* menjadi sumber utama dari terkendalinya inflasi regional pada tahun 2015. Hal ini terutama sebagai dampak dari penurunan harga BBM dan penyesuaian tarif angkutan. Dampak paling signifikan dari penurunan harga BBM dan tarif angkutan terindikasi di Kalimantan pada periode awal tahun. Selain kebijakan penurunan tarif angkutan darat, penyesuaian tarif angkutan sungai dilakukan turut secara signifikan memengaruhi biaya distribusi barang di Kalimantan. Secara *sampling* di sejumlah daerah, penurunan tarif angkutan darat tertinggi tercatat di Sumatera (11,4%), diikuti Jawa (9,8%) dan Kalimantan (5,5%). Meski demikian, dibandingkan dengan penyesuaian tarif angkutan darat pascakenaikan harga BBM tahun 2014, penurunan tarif pada tahun 2015 jauh lebih moderat di keseluruhan wilayah.

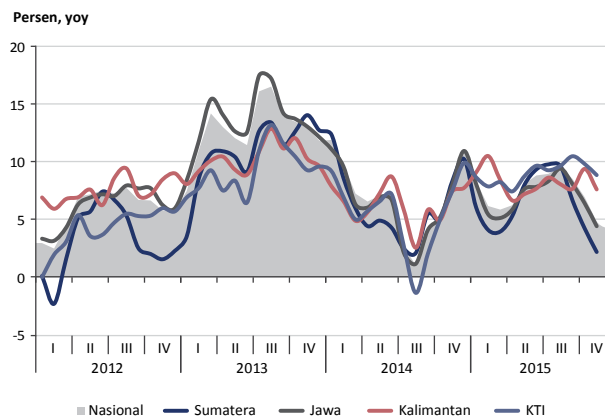
Di sisi lain, terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) dan penyesuaian tarif keekonomian listrik yang berlaku di seluruh daerah. Dampak ke inflasi regional dari penyesuaian BBRT dipengaruhi oleh perbedaan biaya distribusi dan Peraturan Daerah yang mengatur harga eceran tertinggi LPG.¹⁸ Secara rata-rata, harga jual LPG tertinggi di Sumatera, diikuti dengan KTI dan Kalimantan. Harga jual rata-rata LPG di Jawa yang lebih rendah disebabkan oleh biaya distribusi yang lebih rendah dengan ketersediaan infrastruktur transportasi.¹⁹

Inflasi pada kelompok bahan pangan turut menyumbang penurunan inflasi regional pada tahun 2015 dengan skala yang berbeda antarwilayah. Penurunan inflasi kelompok bahan pangan terdalam tercatat di Sumatera dan Jawa (Grafik 10.15). Hal ini sejalan dengan relatif moderatnya permintaan, ketersediaan pasokan bahan pangan yang memadai, serta kelancaran distribusi bahan pangan. Sedikit menurunnya permintaan sebagai dampak dari bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang berlangsung dari Februari hingga Oktober 2015 juga menjadi faktor penurunan inflasi kelompok bahan pangan di Sumatera. Inflasi kelompok bahan pangan yang mengalami penurunan di Sumatera terutama pada sub kelompok bumbu-bumbuan yang tercatat menurun sebesar 28% untuk keseluruhan

18 Dampak dari penyesuaian tarif listrik ke inflasi regional juga bervariasi yang dipengaruhi oleh jumlah konsumen di tiap golongan daya listrik yang berbeda antardaerah. Dalam kaitan dengan penyesuaian harga keekonomian listrik pada tahun 2015 yang menasar pada pelanggan dengan daya 3500 – 6500 watt, dampak ke Jawa relatif lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain.

19 Harga jual rata-rata LPG di Jawa sekitar 11,7% lebih rendah dari Sumatera (perhitungan menggunakan harga jual resmi berdasarkan wilayah pemasaran Pertamina pasca kenaikan harga di Januari tahun 2015).

Grafik 10.15. Inflasi Kelompok Bahan Pangan



Sumber: BPS, diolah

tahun.²⁰ Sementara itu, penurunan inflasi kelompok bahan pangan di Kalimantan dan KTI lebih moderat dengan ditopang oleh terjaganya pasokan khususnya di sub kelompok padi-padian, daging, dan bumbu-bumbuan.

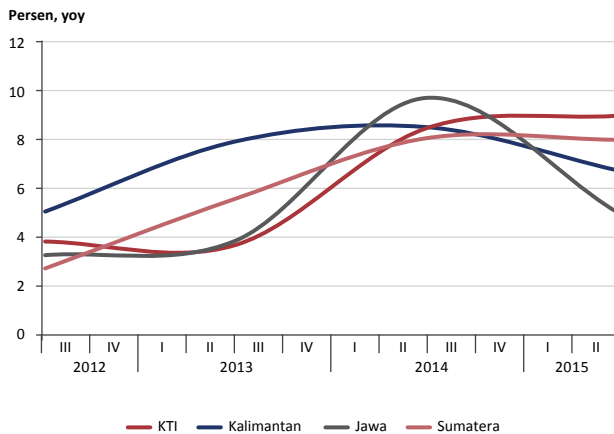
Terkendalnya inflasi komoditas beras di sebagian wilayah, terkait dengan terjaganya pasokan baik dari produksi domestik.²¹ Inflasi komoditas beras di Jawa terpantau lebih rendah dibandingkan historisnya (7,5%, yoy) sehingga turut berdampak pada penurunan inflasi inflasi kelompok bahan pangan cukup dalam di wilayah tersebut (Grafik 10.16). Di tengah terjadinya *El Nino* pada tahun 2015, produksi padi di Jawa terindikasi meningkat dengan adanya perbaikan produktivitas dan optimalisasi jaringan irigasi. Sementara di Kalimantan, penurunan inflasi komoditas beras relatif lebih rendah sehingga inflasi inflasi kelompok bahan pangan turun terbatas.

Pada komoditas yang termasuk dalam inflasi inti, tekanan relatif terkendali pada tahun 2015, terkecuali di Kalimantan. Tekanan inflasi pada komoditas yang termasuk dalam inflasi inti terutama bersumber dari komoditas makanan jadi. Selain faktor permintaan dan pelemahan nilai tukar

20 Penurunan yang drastis dari inflasi sub kelompok bumbu-bumbuan di Sumatera dapat mengkompensasi meningkatnya inflasi komoditas beras yang lebih tinggi pada tahun 2015 (7,98%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

21 Proyeksi produksi padi berdasarkan ARAM II mengindikasikan peningkatan baik di Jawa maupun luar Jawa pada tahun 2015. Meski demikian, terdapat sejumlah daerah yang terkena dampak *El Nino* lebih kuat dibandingkan daerah lain, sehingga berpengaruh pada kinerja produksi padi setempat. Adapun dampak *El Nino* di KTI cenderung meluas khususnya di wilayah bagian utara KTI (Gorontalo dan Sulawesi Utara), namun penurunan produksi relatif moderat dengan adanya penambahan luas lahan pertanian. Inflasi beras di KTI pada tahun 2015 hampir mencapai 9%, tertinggi dari seluruh wilayah lain.

Grafik 10.16. Inflasi SubKelompok Padi-padian



Sumber: BPS, diolah

yang berpengaruh pada biaya produksi makanan jadi, juga terdapat faktor harga bahan baku domestik. Gejala harga bahan pangan yang bersifat lokal seperti beras, daging sapi, dan daging ayam menjadi pendorong laju inflasi kelompok makanan jadi seperti nasi dengan lauk. Di Jawa, kelompok makanan jadi menyumbang 18% terhadap keseluruhan inflasi IHK pada tahun 2015. Sementara di Sumatera, Kalimantan, dan KTI, sumbangan inflasi kelompok makanan jadi masing-masing sebesar 14%, 21%, dan 13%. Kenaikan harga kelompok makanan jadi terbesar tercatat di Kalimantan (10,6%, yoy) yang selain faktor harga bahan pangan, juga disebabkan oleh kenaikan harga BBRT.²² Perbedaan biaya distribusi antardaerah juga menjadi penyebab perbedaan harga jual produk makanan jadi termasuk makanan jadi hasil olahan industri.

Inflasi pada komoditas yang termasuk dalam inflasi inti di keseluruhan wilayah juga dipengaruhi oleh penyesuaian upah dan biaya hidup. Kenaikan upah minimum yang cukup signifikan di sejumlah daerah turut menyumbang peningkatan inflasi inti dengan adanya penyesuaian upah jasa-jasa.²³ Kenaikan biaya hidup terutama pada kelompok

22 Peningkatan inflasi kelompok *volatile food* di Kalimantan mengonfirmasi transmisi inflasi harga bahan pangan ke komoditas makanan jadi. Tren peningkatan inflasi inti di Kalimantan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir juga ditengarai terkait dengan belum optimalnya efisiensi sistem logistik di wilayah tersebut.

23 Upah minimum provinsi (UMP) di seluruh wilayah rata-rata naik di atas 10%. Upah minimum di Jawa meningkat rata-rata 17% dengan variasi yang cukup tinggi antardaerah. UMP di Banten meningkat 43%, sementara di DKI Jakarta meningkat 11%. Adapun daerah provinsi lain di Jawa tidak menetapkan UMP. Rata-rata upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIY masing-masing meningkat 18%, 15%, 15%, dan 8%. Di wilayah luar Jawa, provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi adalah Bangka Belitung, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah dengan kenaikan di atas 20%.

biaya tempat tinggal dan pendidikan yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap keseluruhan inflasi IHK di sebagian besar wilayah. Biaya tempat tinggal menyumbang inflasi terbesar di Sumatera yakni sebesar 13%, diikuti dengan Kalimantan sebesar 12% dan KTI sebesar 10%. Sementara di Jawa, sumbangan terhadap inflasi dari biaya tempat tinggal hanya sebesar 9%. Selain faktor peningkatan permintaan dan level pendapatan masyarakat, ketersediaan pasokan dari tempat tinggal dan biaya konstruksi yang relatif lebih tinggi turut memengaruhi inflasi kelompok biaya tempat tinggal di wilayah luar Jawa. Komponen biaya hidup lain yang juga memengaruhi inflasi regional pada tahun 2015 adalah biaya pendidikan yang sumbangan terbesar ke keseluruhan inflasi IHK tercatat di Sumatera dan Jawa, yakni masing-masing sebesar 5%.

Tantangan Pengendalian Inflasi Regional

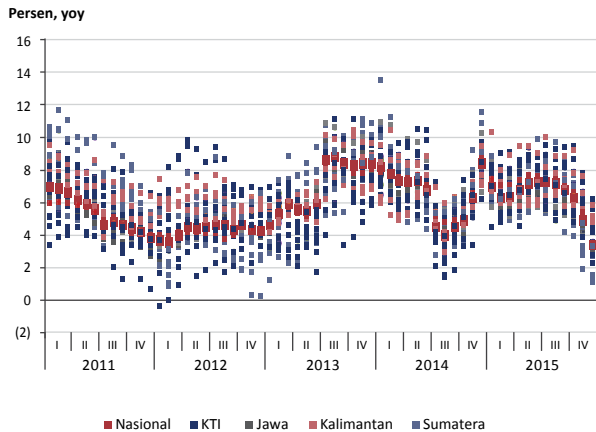
Tantangan pengendalian inflasi sangat terkait dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Hal yang mendesak untuk menjadi perhatian adalah perbaikan (revitalisasi) infrastruktur pertanian di Jawa dan pembangunan infrastruktur pertanian di luar Jawa. Data terakhir mengindikasikan sekitar 59% jaringan irigasi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten serta sekitar 53% jaringan irigasi di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi rusak. Alokasi yang lebih besar pada pembiayaan infrastruktur pertanian pada tahun 2015 menjadi titik awal dari upaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui perbaikan sistem irigasi.

Kerja sama perdagangan antardaerah juga menjadi tantangan dalam jangka menengah panjang pada pengendalian inflasi daerah. Kerja sama perdagangan khususnya dalam menjaga ketersediaan komoditas pangan di keseluruhan wilayah sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan kondisi surplus defisit pangan antardaerah serta kesinambungan produksi yang berpengaruh pada tata niaga pangan. Realisasi kerja sama perdagangan antardaerah saat ini belum cukup optimal, meski telah terdapat sejumlah inisiatif pada tahun 2015.²⁴

Konvergensi inflasi regional masih menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi regional pada tahun 2015. Dibandingkan dengan 2014, perbedaan inflasi tertinggi dan terendah antardaerah mengalami peningkatan pada

24 Kerja sama perdagangan antardaerah yang direalisasikan pada tahun 2015, diantaranya antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat dalam pemenuhan kebutuhan beras di Jakarta, serta Pemerintah Kota Pontianak dengan Probolinggo yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan bawang di Pontianak.

Grafik 10.17. Konvergensi Inflasi Regional



Sumber: BPS, diolah

tahun 2015 (Grafik 10.17).²⁵ Secara spasial, konvergensi inflasi antardaerah terbesar di Sumatera dan KTI yang juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, konvergensi inflasi antardaerah di Jawa merupakan yang terendah dan mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam kelancaran distribusi dan pembenahan sistem tata niaga. Kelancaran distribusi akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi melalui penurunan biaya distribusi yang memiliki pangsa signifikan dalam struktur biaya logistik. Sejumlah pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas yang telah dimulai pada tahun 2015, memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah ke depan. Berbagai tantangan tersebut telah diupayakan untuk diatasi melalui penyusunan *Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah. Diharapkan kebijakan maupun program pengendalian inflasi yang lebih terukur dan fokus pada risiko inflasi yang bersifat struktural menjadi prioritas TPID di seluruh daerah.

10.3. FISKAL DAERAH

Secara agregat, postur APBD mengalami peningkatan pada tahun 2015 di tengah tren perlambatan ekonomi.²⁶ Peningkatan postur APBD yang signifikan (16,7%) bersumber dari meningkatnya dana transfer yang meliputi dana perimbangan dan otonomi khusus (7,9%) serta pemberian dana desa sebesar Rp20,77 triliun (APBN-P

25 Dalam jangka waktu yang lebih panjang, konvergensi inflasi regional cenderung menyempit yang ditengarai sebagai pengaruh dari perlambatan perekonomian yang telah berlangsung dalam 3 tahun terakhir.

26 Total alokasi belanja APBD sebesar Rp 922,4 triliun mewakili sekitar 42% dari total belanja negara (Pemerintah Pusat dan Daerah).

2015). Kenaikan APBD yang cukup signifikan terindikasi di sebagian wilayah Jawa dan KTI. Sementara itu, kenaikan APBD di wilayah Sumatera dan Kalimantan relatif moderat. Dari seluruh daerah, hanya Kalimantan Timur yang mengalokasikan APBD lebih rendah pada tahun 2015. Hal ini terkait dengan ekspektasi penurunan DBH migas. Di sisi lain, sejumlah daerah lain yang memiliki perekonomian berbasis SDA seperti Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat, mengalokasikan peningkatan APBD dalam level yang moderat.

Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi fiskal daerah menunjukkan kinerja yang lebih rendah di tahun 2015 khususnya dari sisi pendapatan. Dari sisi pendapatan, perlambatan perekonomian regional di sebagian besar wilayah menyebabkan rendahnya penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Sementara di sisi belanja, di tengah peningkatan jumlah transfer ke daerah yang dialokasikan untuk pembangunan proyek infrastruktur strategis, pemerintah daerah masih belum mampu mengatasi dengan baik berbagai masalah yang rutin dihadapi setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan minimnya dukungan stimulus fiskal daerah dalam menahan perlambatan perekonomian yang lebih dalam pada tahun 2015.

Secara agregat, realisasi pendapatan daerah tahun 2015 di bawah tahun sebelumnya sebagai pengaruh dari penurunan PAD dan dana perimbangan. Realisasi PAD diperkirakan mencapai 108,3% di tahun 2015, lebih rendah dari tahun sebelumnya maupun daripada rata-rata selama 3 tahun terakhir (Tabel 10.1). Tidak tercapainya penerimaan berbagai jenis pajak dan restribusi daerah merupakan dampak dari perlambatan ekonomi yang memengaruhi aktivitas perdagangan dan jasa.²⁷ Penerimaan dana perimbangan juga mengalami penurunan terkait dengan tidak tercapainya target penerimaan DBH dari kegiatan pengolahan SDA maupun dari sumber pajak seperti pajak penghasilan yang juga menurun dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Sementara itu, pendapatan daerah lain-lain yang sah di atas targetnya, meski juga lebih rendah dari capaian tahun 2014.

Dalam rangka penguatan otonomi daerah dan implementasi pembangunan infrastruktur, dana perimbangan (transfer) ke daerah meningkat signifikan pada APBN-P tahun 2015.

27 Menurunnya sejumlah aktivitas perdagangan dan jasa berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, maupun pajak bumi dan bangunan.

	Tahun 2014			Tahun 2015			
	APBD	Realisasi		APBD	Rata-rata 3 Tahun	Estimasi*	
Pendapatan	759.5	799.4	105.3%	859.9	108.4%	882.96	102.7%
PAD	180.4	199.7	110.7%	222.9	116.1%	241.44	108.3%
Dana Perimbangan	482.2	476.0	98.7%	498.6	101.6%	475.19	95.3%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	96.9	123.6	127.6%	138.4	-	166.32	120.2%
Belanja	817.7	764.0	93.4%	922.4	92.4%	864.38	93.7%
Belanja Pegawai	326.7	313.0	95.8%	371.1	109.9%	346.09	93.3%
Belanja Barang dan Jasa	182.5	165.6	90.8%	202.8	96.8%	187.94	92.7%
Belanja Modal	213.7	181.0	84.7%	228.1	91.3%	206.03	90.3%
Belanja Lainnya	94.7	104.3	110.1%	120.4	-	124.32	103.2%

Sumber: DJPK, Kemenkeu (* Estimasi menggunakan data sementara pada awal Maret 2016)

Dana perimbangan meningkat sebesar 2,7% dari APBN ke APBN-P yang dialokasikan ke Dana Alokasi Khusus (DAK), dana otonomi khusus (Otsus), dana keistimewaan DIY, dan dana desa.²⁸ Alokasi DAK mendapatkan tambahan sebesar Rp25,8 triliun atau dua kali lipat dari APBN untuk mendukung kabupaten/kota di daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah. Peningkatan DAK juga untuk mendukung komitmen program prioritas di bidang infrastruktur. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Papua and Aceh turut mendapatkan tambahan dana Otsus pada tahun 2015. Sementara alokasi dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp20,8 triliun pada APBN-P yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan di daerah desa dan tertinggal.²⁹ Namun, realisasi dana perimbangan pada tahun 2015 yang lebih rendah dari alokasinya, disebabkan oleh penurunan DBH migas, sejalan dengan tren harga minyak dan gas yang terus melemah. Realisasi dana perimbangan hanya mencapai 95,3%, lebih rendah dari tahun 2014 maupun rata-rata 3 tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2015 diperkirakan tidak lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Capaian belanja daerah diproyeksikan sekitar 93,7% dengan realisasi belanja pegawai yang cenderung sedikit lebih rendah. Alokasi belanja pegawai yang tumbuh 13,6% pada tahun 2015, terindikasi terserap

lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, pangsa belanja pegawai terhadap total belanja pada tahun 2015 sebesar 13,2%, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang masing-masing tumbuh sebesar 11,1% dan 6,8% pada tahun 2015, diperkirakan tercapai jauh di bawah rata-rata 3 tahun terakhir. Serapan belanja barang dan jasa diproyeksikan mencapai sekitar 92,7%, sementara belanja modal terserap sekitar 90,3%. Sejumlah kendala baik dari sisi administratif maupun implementasi di lapangan menjadi faktor rendahnya penyerapan belanja barang dan jasa serta barang modal.

Secara spasial, penyerapan belanja daerah terbesar terindikasi di Kalimantan dan KTI.³⁰ Realisasi belanja di kedua wilayah tersebut masing-masing sekitar 93,5% dan 92,9% dengan penyerapan belanja tertinggi diproyeksikan di Kalimantan Tengah dan Gorontalo. Sementara di Sumatera dan Jawa, penyerapan belanja mencapai masing-masing sekitar 91,1% dan 88%. Penyerapan belanja yang terendah tercatat di Jakarta yang hanya mencapai 68,9%, sebagai pengaruh dari keterlambatan penetapan APBD dan pemangkasan pos APBD-perubahan untuk efisiensi. Daerah lain yang juga memiliki penyerapan anggaran rendah berdasarkan data TEpra adalah Jawa Tengah (72,5%) dan Banten (73,6%).

Serapan belanja yang cenderung lebih rendah terindikasi di daerah dengan ekonomi berbasis SDA migas. Hal ini ditengarai sebagai pengaruh dari penurunan DBH migas secara signifikan yang menjadi sumber pendanaan APBD, meski secara nominal DBH meningkat 11,2% pada tahun

28 Alokasi transfer ke daerah meningkat 11,4% dari 2014 dengan pendanaan yang berasal dari realokasi subsidi BBM. Pangsa transfer ke daerah mencapai 33,3% dari total belanja APBN-P tahun 2015 atau 1,5% lebih tinggi daripada pangsa di tahun 2014.

29 Visi Nawa Cita untuk membangun dari pinggiran dengan memperkuat ekonomi daerah dan desa.

30 Proyeksi target pencapaian belanja oleh masing-masing daerah pada akhir tahun 2015 (monitoring dan evaluasi TEpra).

2015. Melihat kondisi demikian, terindikasi adanya penyesuaian realisasi belanja untuk mengurangi potensi defisit anggaran yang dibatasi 3,25%–6,25% dari PAD untuk tahun 2015.³¹ Faktor lain yang turut berpengaruh adalah tren penurunan akumulasi SILPA di sejumlah daerah yang bergantung pada DBH migas.

Rendahnya penyerapan belanja pada tahun 2015 turut dipengaruhi oleh adanya keterlambatan pengesahan APBD di sejumlah daerah. Tren waktu penetapan APBD pada tahun 2015 menunjukkan adanya perbaikan dengan 431 APBD dari total 548 Daerah Tingkat I (Provinsi) dan II (Kabupaten/Kota) ditetapkan tepat waktu pada Desember 2014. Meski demikian, jumlah APBD yang penetapannya mundur dari triwulan I terindikasi lebih besar, salah satunya adalah APBD DKI Jakarta. Terlambatnya penetapan APBD DKI Jakarta yang memiliki nilai cukup besar (sekitar 7,3% dari total agregat APBD), berdampak cukup signifikan terhadap kinerja penyerapan APBD secara nasional. Faktor keterlambatan penetapan APBD antara lain adalah belum matangnya perencanaan anggaran yang menyebabkan panjangnya proses pembahasan serta adanya transisi pada periode pergantian pimpinan daerah.

Dalam merealisasikan belanja modal, terdapat pula masalah terkait dengan pembebasan lahan di daerah. Kendala dalam pembebasan lahan merupakan hal yang krusial dan sensitif di sejumlah daerah. Meskipun telah terdapat landasan hukum perundangan dan mekanisme pembebasan lahan yang lebih jelas, namun dalam kenyataannya, beberapa proses pembebasan lahan di daerah berlangsung berlarut-larut. Selain menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian, hal ini juga berpengaruh pada perencanaan anggaran tahun jamak di sejumlah daerah.

Tantangan Fiskal Daerah dan Upaya Mengakselerasi Penyerapan Anggaran

Penyerapan belanja daerah yang rendah menyebabkan tingginya penempatan dana pemerintah daerah di perbankan. Hingga Juni tahun 2015, penempatan dana pemerintah daerah di perbankan masih berada dalam tren yang meningkat, seperti pola yang terjadi pada 2014. Pada posisi Juni tahun 2015, dana pemerintah daerah di

perbankan mencapai Rp279,8 triliun atau tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Adapun 37% dari dana pemerintah daerah tersebut merupakan milik pemerintah daerah di wilayah Jawa. Sejumlah hal memengaruhi kondisi dimaksud, diantaranya adalah meningkatnya transfer APBN ke daerah secara signifikan yang tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas penyerapan anggaran di level pemerintah daerah. Kondisi ini juga diperberat oleh adanya indikasi masih besarnya Dana Desa yang belum tersalurkan dari rekening Pemerintah Kabupaten/Kota ke rekening Desa di sejumlah daerah.³² Dana *idle* yang menumpuk di perbankan turut berdampak pada SILPA yang cukup tinggi pada akhir tahun. Hal ini turut mengkonfirmasi minimnya dukungan fiskal dalam menahan perlambatan perekonomian regional pada tahun 2015.

Tantangan struktural dari fiskal daerah juga mencakup sumber pembiayaan keuangan daerah yang masih bergantung pada dana perimbangan. PAD masih belum dapat sepenuhnya memenuhi total pembiayaan di sebagian besar daerah. Pada tahun 2015, penurunan DBH di daerah yang memiliki ketergantungan pada ekspor SDA turut menekan sumber pembiayaan mandiri daerah. Hal ini tercermin pula dari kapasitas fiskal yang turun di sebagian besar daerah di luar Jawa. Meskipun demikian, daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, selain DKI Jakarta, masih mengandalkan pada ekspor SDA, yakni Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Rasio PAD terhadap PDRB di KTI tercatat paling rendah, sementara yang tertinggi di Kalimantan yang turut dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah mengantisipasi penurunan DBH.

Berbagai inisiatif dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga di daerah untuk mendorong percepatan penyerapan belanja APBD pada tahun 2015. Langkah yang dilakukan pemerintah pusat secara umum mencakup pengetatan monitoring (sistem pelaporan realisasi keuangan daerah melalui TEPPRA), revisi aturan pengadaan, optimalisasi teknologi untuk mempercepat pengadaan (*e-catalog/LKPP, e-procurement*), serta pemberlakuan sistem insentif (*reward*) dan *punishment* dalam rangka mendorong penyerapan anggaran (Dana Insentif Daerah). Kemendagri juga telah secara khusus membentuk tim yang akan melakukan pemantuan langsung realisasi anggaran di daerah.

31 PMK Nomor 183 / PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA tahun 2015.

32 Hal ini terutama disebabkan oleh permasalahan administratif, yakni pengesahan APB Desa-Perubahan yang mencakup alokasi tambahan Dana Desa dari APBN-P.

10.4. STABILITAS KEUANGAN REGIONAL

Pada tahun 2015, penyaluran kredit korporasi melambat di seluruh wilayah, terutama di Kalimantan dan Jawa yang masing-masing menurun 6% dan 2,1% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit ke usaha pertambangan di Kalimantan mengalami tekanan terbesar dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 2,8% atau turun 21,4% dari 2014 (Grafik 10.18).³³ Menurunnya pertumbuhan kredit ke usaha pertambangan baik di Kalimantan maupun Sumatera, berdampak pada kinerja penyaluran kredit pada lapangan usaha lain, utamanya ke usaha industri (pengolahan hasil tambang) dan usaha jasa-jasa pendukung (transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan). Sementara itu, perlambatan terdapat dari penyaluran kredit korporasi di Jawa tercatat pada usaha industri baik untuk keperluan modal kerja maupun investasi, serta pada usaha konstruksi. Pertumbuhan kredit ke usaha industri dan konstruksi di Jawa masing-masing menurun sebesar 5,3% dan 16,5% dibandingkan tahun 2014.³⁴

Pertumbuhan kredit korporasi di Sumatera mengalami perlambatan paling moderat. Hal ini ditopang oleh masih tumbuh meningkatnya kredit pada usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha industri yang memiliki pangsa terbesar di Sumatera.³⁵ Pertumbuhan kredit pada usaha perdagangan besar dan eceran tercatat sebesar 10,9%, sementara kredit ke usaha industri tumbuh sebesar 15,2%. Pertumbuhan kredit korporasi di KTI juga melambat, namun dalam level moderat dengan dukungan kinerja perekonomian yang masih meningkat. Pertumbuhan kredit korporasi yang tinggi di KTI adalah ke usaha industri (41,6%), usaha pertanian (28,3%), usaha pertambangan (12,1%), dan usaha jasa perusahaan (9,7%).

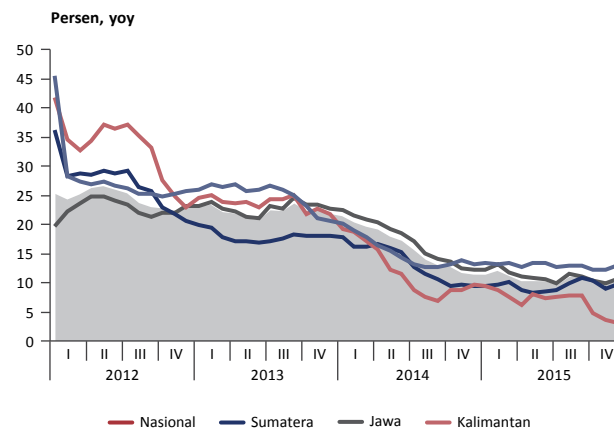
Pembiayaan kredit dari sumber domestik melalui dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami perlambatan di

33 Kredit ke usaha pertambangan di Kalimantan masih tumbuh sebesar 17,39% (yoy) pada 2014. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada pertumbuhan kredit ke usaha pertambangan di Sumatera yang mengalami kontraksi pertumbuhan lebih dalam dari Kalimantan (5,37%) atau 24,3% lebih rendah dari 2014. Namun, penyaluran kredit ke usaha pertambangan di Sumatera jauh lebih rendah secara nominal.

34 Pertumbuhan kredit ke usaha transportasi dan pergudangan, serta usaha informasi dan komunikasi di Jawa juga melambat signifikan sebagai pengaruh dari melemahnya aktivitas usaha manufaktur dan pembangunan proyek properti komersial.

35 Pertumbuhan kredit ke usaha perdagangan besar dan eceran mengalami perlambatan di seluruh wilayah kecuali Sumatera.

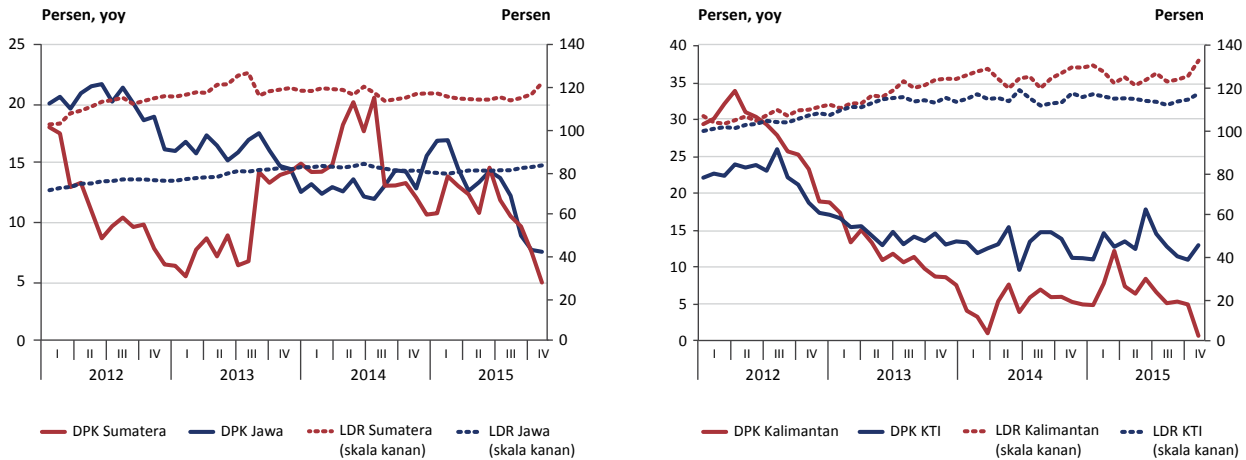
Grafik 10.18. Perkembangan Kredit Regional



seluruh wilayah dengan menurunnya simpanan rumah tangga. Pertumbuhan DPK melambat signifikan di Jawa dan Sumatera yang memiliki pangsa terbesar (88,2%). DPK hanya tumbuh sebesar 6,9% di Jawa dan 6,8% di Sumatera, jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun 2014 masing-masing sebesar 12,9% dan 12,1% (Grafik 10.19). Dengan perlambatan pertumbuhan DPK yang lebih dalam dari kredit, rasio kredit terhadap DPK (LDR) meningkat di seluruh wilayah kecuali di Kalimantan. Sesuai historis, Jawa memiliki LDR terendah yaitu sekitar 83% pada tahun 2015. Seluruh wilayah di luar Jawa mencatatkan LDR di atas 100% yang mengindikasikan ketergantungan pada sumber pembiayaan dari Jawa, khususnya DKI Jakarta yang merupakan pusat finansial nasional.

Risiko kredit tercermin dari *non performing loan* (NPL) korporasi yang meningkat di seluruh wilayah sejalan dengan melemahnya kemampuan bayar. Namun demikian, ketahanan korporasi tetap terjaga. Kondisi ini tidak hanya terkait dengan tekanan pada pendapatan korporasi yang bergerak pada usaha pertambangan dan perkebunan di wilayah luar Jawa, namun juga dialami sejumlah usaha manufaktur di Jawa. Peningkatan NPL korporasi tertinggi terjadi di Jawa, khususnya di DKI Jakarta yang meningkat 0,4% dibandingkan 2014 (Grafik 10.20). Meski demikian, NPL korporasi di Jawa (2,4%) jauh lebih rendah dibandingkan NPL di wilayah luar Jawa. NPL korporasi di Kalimantan dan Sumatera yang juga meningkat tinggi, tercatat mencapai 3,7% dan 3,1%. Peningkatan NPL korporasi di KTI relatif lebih moderat yaitu sebesar 3%. Berdasarkan lapangan usaha, NPL yang tinggi pada usaha pertambangan di Kalimantan dan Sumatera (masing-masing 9,5% dan 5,9%), serta usaha

Grafik 10.19. Perkembangan DPK dan LDR

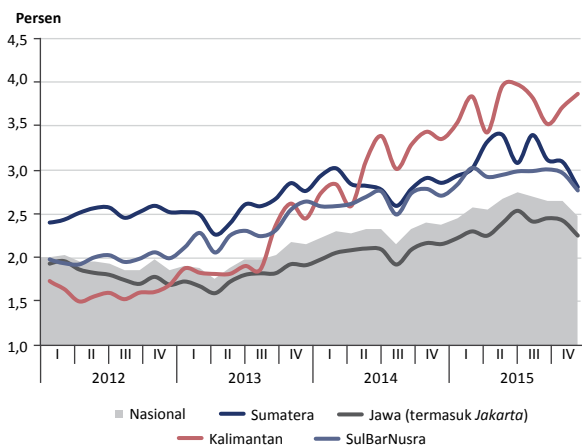


industri dan pertanian di KTI (masing-masing 6,6% dan 5,5%). Adapun NPL pada usaha industri di Jawa masih dalam batas aman (2,5%), meski meningkat cukup signifikan dari 2014 (1,7%). NPL yang relatif tinggi di seluruh wilayah juga terjadipada usaha konstruksi.³⁶

Dari sisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlambatan kredit UMKM juga menjadi fenomena di seluruh wilayah. Kredit UMKM mengalami perlambatan terdalam di Sumatera yang hanya tumbuh 3,6% pada

tahun 2015, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 yang masih tumbuh 13,5%. Demikian pula pertumbuhan kredit UMKM di Kalimantan tercatat hanya sebesar 4,5%. Penurunan harga komoditas dan lemahnya penjualan usaha perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat baik di Sumatera maupun Kalimantan, telah menurunkan permintaan pembiayaan kredit maupun kemampuan bayar. Di sisi lain, perlambatan kredit UMKM di KTI tercatat paling moderat dengan perbaikan kondisi perekonomian pada tahun 2015. Kredit UMKM tumbuh paling tinggi di KTI (9,4%) dan Jawa (7,3%). Namun, NPL UMKM di KTI dan Jawa lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera dan Kalimantan, sehingga dapat menjaga ketahanan UMKM (Grafik 10.21). Adapun NPL UMKM di Sumatera dan Kalimantan tercatat masing-masing sebesar 6,4% dan 6,2%.

Grafik 10.20. Perkembangan Non Performing Loan

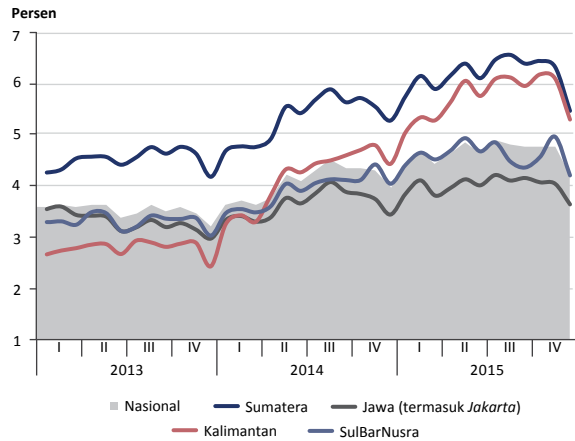


³⁶ NPL usaha konstruksi di Kalimantan mencapai 10,69%, sementara di Sumatera dan KTI tercatat sebesar 8,58% dan 7,12%. Tingginya NPL usaha konstruksi dipengaruhi oleh penundaan pembangunan proyek properti komersial termasuk prasarana dan sarana industri dengan melemahnya kondisi perekonomian domestik.

Kredit rumah tangga mengalami perlambatan di seluruh wilayah pada tahun 2015. Perlambatan kredit rumah tangga paling dalam terjadi di KTI yang memiliki kondisi perekonomian lebih baik dibandingkan wilayah lain. Meski demikian, pertumbuhan kredit rumah tangga di KTI merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 11,5%, diikuti dengan Jawa (10,2%), Kalimantan (9,6%), dan Sumatera (9%). Secara agregat, peningkatan NPL rumah tangga tertinggi di Kalimantan dan Jawa. Berdasarkan jenis kredit rumah tangga, perlambatan terdalam pada kredit multiguna khususnya di wilayah luar Jawa.³⁷

³⁷ Pertumbuhan kredit multiguna masih mencapai 2-digit di sejumlah wilayah (Jawa, KTI, dan Sumatera). Hal ini berbeda dengan kredit kendaraan bermotor yang tumbuh 1-digit di seluruh wilayah pada tahun 2015, sementara di 2014 masih mengalami pertumbuhan 2-digit di seluruh wilayah.

Grafik 10.21. Perkembangan NPL UMKM



Perlambatan kredit kendaraan bermotor yang cukup signifikan juga terjadi wilayah luar Jawa, khususnya di Kalimantan dan KTI. Penyaluran kredit kendaraan bermotor di Kalimantan bahkan mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 3,1% yang disebabkan oleh menurunnya pembelian kendaraan bermotor untuk keperluan usaha pertambangan maupun usaha jasa pendukung pertambangan. Kinerja penyaluran kredit untuk pembelian properti mengalami perlambatan paling moderat. Dengan jumlah nominal kredit rumah tangga terbesar, perlambatan kredit properti (kredit kepemilikan rumah/KPR, kredit kepemilikan apartemen/KPA dan ruko/rukan) terutama terjadi di KTI dan Jawa.

Risiko kredit rumah tangga pada tahun 2015 masih berada pada level yang terjaga, meski mengalami peningkatan. Kenaikan NPL rumah tangga di Jawa tercatat paling rendah dan seluruh jenis kredit rumah tangga masih dalam kategori lancar. Kinerja usaha pertanian yang meningkat ditengarai dapat menopang ketahanan rumah tangga. Di sisi lain, walaupun kinerja usaha pertanian mengalami perlambatan di KTI, namun NPL rumah tangga masih cukup rendah. Kinerja lapangan usaha pertambangan dan industri yang membaik, menjadi faktor penopang ketahanan rumah tangga di wilayah tersebut. Sementara itu, kenaikan NPL rumah tangga di Kalimantan merupakan yang terbesar, sebagai dampak dari penurunan pendapatan dengan melemahnya kinerja perekonomian. Berdasarkan jenis kredit, NPL rumah tangga tertinggi pada KPA yaitu 12,9%, yang sebagian besar berasal dari debitur yang bekerja di sektor pertambangan. Penurunan kinerja sektor pertambangan di Sumatera juga berdampak pada tingkat NPL KPA (5,2%) yang melewati batas aman.

10.5. SISTEM PEMBAYARAN DAN PEREDARAN UANG

Kinerja Pengelolaan Uang Rupiah

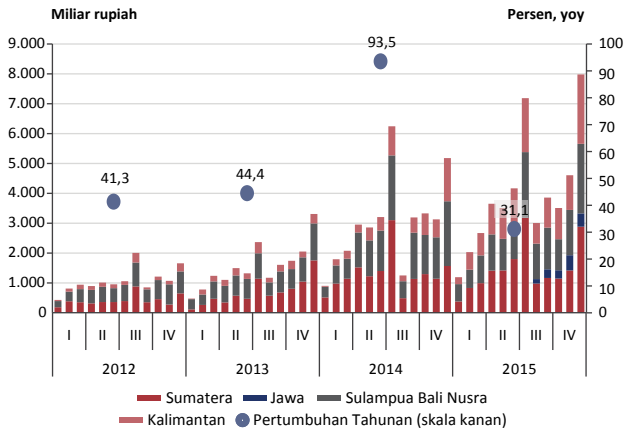
Secara umum, *net outflow* uang kartal terjadi di sebagian besar daerah dan hanya sebagian kecil daerah mengalami *net inflow*.³⁸ Pertumbuhan *net outflow* sangat signifikan terjadi di Jawa, khususnya di DKI Jakarta.³⁹ Perubahan pola *net outflow* di Jawa dipengaruhi oleh kebijakan peningkatan dana transfer ke daerah yang signifikan serta penyelenggaraan Pilkada serentak yang sebagian besar dananya diperoleh dari Jakarta. Setelah mengalami *net inflow* pada tahun 2014, pertumbuhan *net outflow* di Jawa mencapai 137,1% atau sebesar Rp129,5 triliun pada tahun 2015. KTI mengalami peningkatan *net outflow* sebesar 61,7% terkait dengan ekspansi perekonomian KTI dan juga dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pilkada serentak dalam jumlah terbesar. Sesuai polanya, *net inflow* dipengaruhi oleh pola penggunaan dan kebutuhan uang kartal oleh masyarakat, khususnya pada periode perayaan hari besar keagamaan nasional. Hal ini juga terkait dengan remitansi yang dilakukan oleh pekerja mudik. *Net inflow* yang cukup besar pada tahun 2015 tercatat di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Di keempat daerah tersebut, *net inflow* mencapai Rp72,9 triliun.

Tahun 2015 juga ditandai dengan perluasan distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia yang tercermin dari penambahan jumlah kantor bank sebagai penyelenggara kas titipan dan jumlah aliran uang kartal yang ditarik dari Bank Indonesia. Selama tahun 2015 terdapat penambahan 6 kas titipan baru di daerah Tanjung Pandan, Serang, Batu Licin, Dumai, Tanjung Selor, dan Pare-pare. Dengan perkembangan tersebut, jumlah kas titipan yang dikelola oleh 35 kantor bank mencapai total 368 kantor bank di seluruh wilayah Indonesia, jauh lebih tinggi dari 2014 yang sebesar 267 kantor bank. Selain itu, dari jumlah bank pengelola juga bertambah dari 30 bank pada 2014. Dengan perluasan distribusi yang signifikan tersebut, *net outflow* dalam rangka kas titipan mengalami peningkatan. *Net outflow* meningkat dari Rp14,7 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp22,9 triliun pada tahun 2015 atau naik 55,7% (Grafik 10.22). Jumlah *net outflow* tersebut terdiri dari penarikan bank sebesar Rp47,4 triliun dan penyetoran bank sebesar Rp24,5 triliun yang mayoritas merupakan

38 *Net inflow* adalah aliran uang kartal yang masuk ke sistem perbankan yang kemudian disetorkan kembali ke Bank Indonesia.

39 *Net outflow* di Provinsi DKI Jakarta yang besar juga dipengaruhi oleh faktor operasional kas perbankan yang mayoritas berkantor pusat di Jakarta.

Grafik 10.22. Pola Penarikan Uang Kartal Melalui Kas Titipan



uang tidak layak edar. Selama tahun 2015, jumlah penukaran uang dalam rangka kegiatan kas keliling sebesar Rp1,8 triliun atau meningkat 25,7% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun. Peningkatan penukaran uang tersebut terutama terjadi di wilayah KTI dan Kalimantan yang meningkat masing-masing 87,7% dan 21,9% (Grafik 10.23).

Penyelenggaraan Transfer Dana Bukan Bank di Daerah

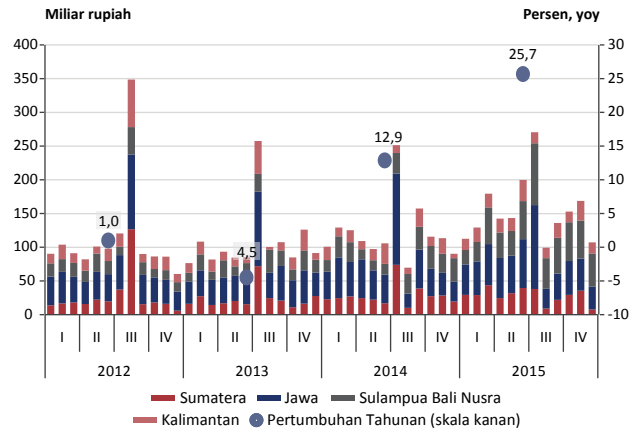
Sejalan dengan perkembangan transaksi transfer dana penyelenggara bukan bank (TD BB) di tingkat nasional, TD BB mengalami kenaikan baik dari sisi nilai maupun volume di hampir seluruh daerah. Jawa mendominasi aktivitas transaksi TD BB baik dari sisi volume maupun nilai hingga lebih dari 95%, diikuti oleh KTI dan Sumatera.⁴⁰ Pangsa TD BB di Kalimantan terendah dibandingkan wilayah lainnya dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas TD BB juga terkait erat dengan dominasi asal TKI yang sebagian besar berasal dari Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), KTI dan Sumatera.

Sumber aliran transaksi dana penyelenggara bukan bank berbeda di masing-masing wilayah.⁴¹ Sumber TD BB di Sumatera dan Jawa berasal dari domestik dan *incoming*.

40 Sebaran penyelenggara transfer dana, yang dilakukan oleh BI cukup terkonsentrasi di Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kantor Pusat (Jakarta) dengan total pangsa lebih dari 90%.

41 Kegiatan Transfer Dana Bukan Bank domestik memiliki lingkup antarwilayah dalam negeri, *outgoing* merupakan transaksi dari Indonesia keluar negeri dan *incoming* adalah kegiatan transfer dari luar negeri ke dalam Indonesia.

Grafik 10.23. Pola Penukaran Uang Kartal Melalui Kas Keliling



Di sisi lain, sumber TD BB di Kalimantan dan KTI sebagian besar dari transaksi *incoming* dengan pangsa yang mencapai di atas 95%. Relatif kecilnya porsi aktivitas TD BB domestik di Kalimantan dan KTI sejalan dengan skala perekonomiannya di kedua wilayah tersebut, yang pertumbuhannya masih lebih didorong oleh peran sektor pemerintah dan swasta besar. Pada kedua sektor ini, transaksi cenderung dilakukan melalui perbankan.

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) menunjukkan peningkatan di berbagai wilayah pada tahun 2015. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang didukung dengan penambahan fasilitas bebas visa. Peningkatan terbesar terjadi di Jawa (14,1%), diikuti Sumatera (4,6%) dan KTI (2,8%). Sementara, di Kalimantan tercatat mengalami penurunan sebesar 12%. Sekitar 78% pangsa dari nilai penukaran valuta asing terdapat di Jawa, diikuti oleh KTI sebesar 15,2%. Pangsa penukaran valuta asing terendah di Kalimantan yakni sebesar 0,7%. Besarnya KUPVA BB di wilayah Jawa dipengaruhi oleh karakteristik kota Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya yang menjadi tempat kunjungan kerja maupun liburan dari wisatawan asing. Sementara di KTI, sumber aktivitas penukaran valuta asing terutama berasal dari Bali yang menjadi tujuan wisata utama wisatawan mancanegara. Jumlah penyelenggara KUPVA BB berijin juga meningkat pada tahun 2015. Peningkatan KKUPVA BB berijin tercatat sebesar 7,2% pada tahun ini, atau total menjadi 994 penyelenggara. Sebagian besar penyelenggara dimaksud

berada di wilayah Jakarta (39%), kemudian di Batam (14%) dan Denpasar (13%).

Pangsa nilai mata uang yang ditransaksikan dalam KUPVA BB di empat wilayah menunjukkan bobot yang bervariasi. Di Sumatera, lebih dari 83% KUPVA BB dalam mata uang dolar Singapura dan ringgit Malaysia yang dipengaruhi oleh

besarnya jumlah TKI yang dikirim ke kedua negara tetangga tersebut. Sementara di Kalimantan, transaksi ringgit Malaysia sangat dominan yang mencapai 65% dari total transaksi. Sebaliknya, transaksi penukaran dolar Amerika dominan di Jawa dan KTI. Khusus di KTI, transaksi dolar Australia, euro, dan yen Jepang juga cukup besar pada tahun 2015, yang bersumber dari wisatawan mancanegara.

Transformasi perekonomian daerah yang semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir, mendorong peningkatan peran institusi di daerah. Hal ini khususnya terjadi semenjak era otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar ke daerah dalam menentukan arah pembangunan, serta tanggung jawab lebih besar terhadap implementasi kebijakan maupun program pembangunan di daerah. Kompleksitas perekonomian daerah juga semakin tinggi dengan semakin besarnya keterkaitan ekonomi antardaerah dan juga dengan ekonomi global. Tantangan perekonomian daerah dewasa ini juga terkait dengan agenda reformasi struktural yang telah menjadi komitmen pemerintah baik di pusat maupun daerah. Adanya perbedaan reformasi struktural antardaerah serta pada cakupan lintas sektor maupun yurisdiksi, membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat.

Sejalan dengan peningkatan peran institusi di daerah, Bank Indonesia turut berperan sebagai mitra strategis dalam membangun visi maupun mendukung pembangunan perekonomian daerah. Peran serta Bank Indonesia selain dalam konteks mendukung efektivitas kebijakan moneter agar secara optimal dapat mendukung aktivitas perekonomian di sektor riil, juga dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi khususnya pada pengendalian inflasi. Kemitraan Bank Indonesia dan Pemerintah, selain dilakukan di level pusat juga di daerah melalui sejumlah pertemuan koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta kerja sama dalam peningkatan kapasitas. Beberapa langkah kongkrit yang

telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah kerja sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kantor Perbendaharaan Negara dalam penyusunan asesmen. Disamping itu, juga dilakukan peninjauan pembuatan Nota Kesepahaman dengan sejumlah Kementerian/Lembaga di level pusat yang akan menjadi basis kemitraan antara Bank Indonesia dan pemerintah di daerah.

Terkait dengan agenda reformasi struktural yang diarahkan untuk mendukung terjaganya stabilitas makro dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Bank Indonesia juga turut berperan aktif. Hal ini merupakan bagian dari penguatan peran *advisory* Bank Indonesia di daerah. Untuk mendukung hal ini, Bank Indonesia melakukan penataan ulang pelaksanaan tugas kantor perwakilan Bank Indonesia di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, UMKM dan Inklusi Keuangan yang difokuskan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan serta berkualitas. Di samping itu, Bank Indonesia pada akhir 2014 telah membentuk satuan kerja yang berfungsi sebagai koordinator bagi masing-masing wilayah koordinasi Bank Indonesia guna mendorong dan meningkatkan efektivitas peran *advisory* Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Sebagai salah satu perwujudan dari peran aktif Bank Indonesia tersebut, berbagai koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendukung agenda reformasi struktural telah dilakukan dalam bentuk Rakor di daerah antara lain di Ambon, Balikpapan, dan Yogyakarta pada tahun 2015.¹

1 Selengkapnya lihat Bab 14.



Keterangan gambar:

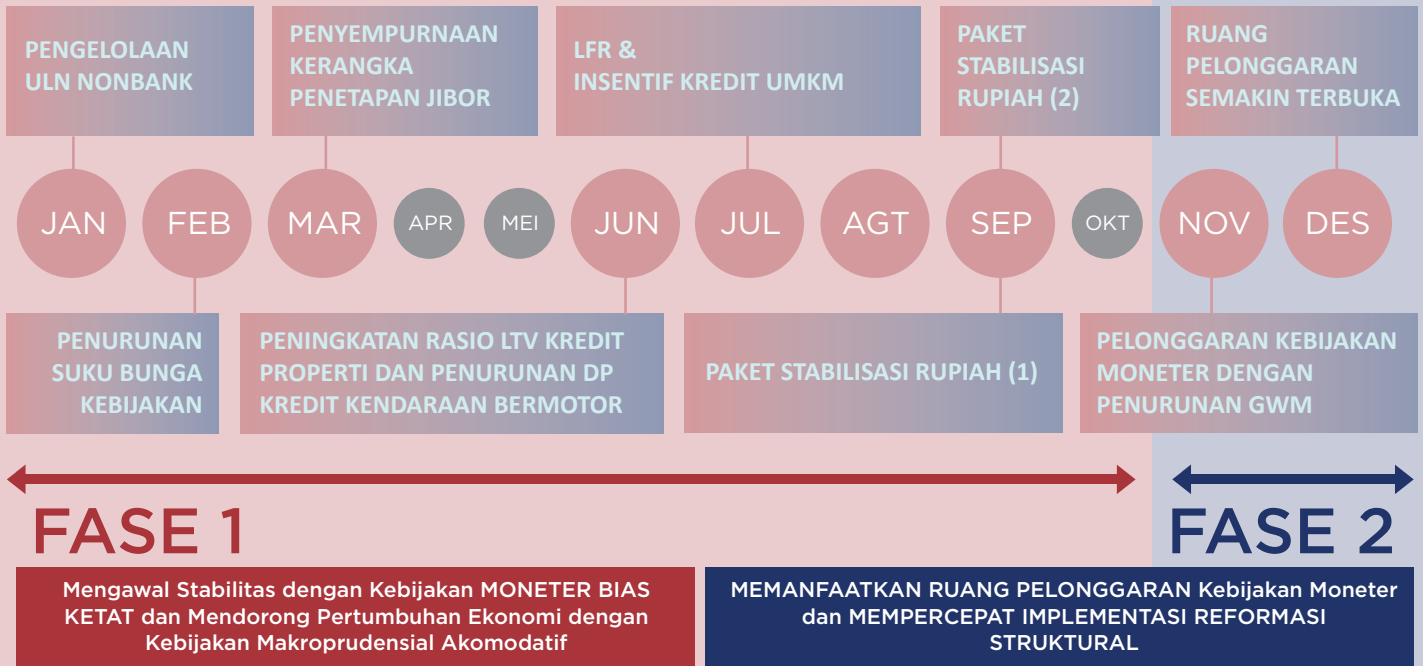
Sebagaimana halnya Tari Piring Lilin yang berusaha menjaga keseimbangan untuk menyajikan penampilan terbaik, bauran kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai titik keseimbangan yang optimal bagi perekonomian. Bank Indonesia juga senantiasa memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait.



BAGIAN III

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

MENGAWAL STABILITAS DAN MENDORONG PERTUMBUHAN DENGAN BAURAN KEBIJAKAN



FASE 1

Mengawal Stabilitas dengan Kebijakan MONETER BIAS KETAT dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Kebijakan Makroprudensial Akomodatif

FASE 2

MEMANFAATKAN RUANG PELONGGARAN Kebijakan Moneter dan MEMPERCEPAT IMPLEMENTASI REFORMASI STRUKTURAL

3 PILAR KEBIJAKAN



BAGIAN III

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

Perekonomian selama tahun 2015 dihadapkan pada tiga tantangan kebijakan makroekonomi yang harus dikelola dengan baik. Tantangan kebijakan pertama terkait dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan domestik di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi. Ketidakpastian tersebut terutama bersumber dari ketidakpastian normalisasi kebijakan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, dan devaluasi yuan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Ketidakpastian di pasar keuangan global tersebut mendorong investor global cenderung risk off yang berdampak pada menurunnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Sejalan dengan hal tersebut, tekanan depresiasi rupiah meningkat, sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi.

Tantangan kebijakan kedua terkait dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi global yang disertai dengan berlanjutnya penurunan harga komoditas memberikan tekanan yang signifikan pada kinerja ekspor dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA). Tekanan tersebut bahkan sudah merambat pada sektor bukan komoditas. Potensi berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik perlu dimitigasi guna menjaga sentimen positif terhadap prospek ekonomi domestik. Dengan masih melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan domestik menjadi kunci bagi proses pemulihan perekonomian dalam jangka pendek. Tantangan kebijakan ketiga terkait dengan upaya mempercepat implementasi reformasi struktural. Berbagai permasalahan struktural domestik yang ada telah mengekskalasi dampak negatif guncangan eksternal baik terhadap stabilitas makroekonomi maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, implementasi reformasi struktural perlu dipercepat untuk memperkokoh fondasi perekonomian Indonesia sebagai landasan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, sinergi kebijakan pengelolaan makroekonomi antara Bank

Indonesia dan Pemerintah terus diperkuat. Bauran kebijakan Bank Indonesia difokuskan pada upaya mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut juga diperkuat oleh koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pemangku kebijakan lainnya. Guna mendorong momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia berupaya dengan menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kebijakan ini disinergikan dengan peningkatan stimulus fiskal yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat implementasi reformasi struktural. Dalam konteks ini, Pemerintah pada tahun 2015 menerbitkan rangkaian paket kebijakan ekonomi Pemerintah jilid I-VIII untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi domestik. Upaya percepatan reformasi struktural Pemerintah juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan pada peningkatan resiliensi dan efisiensi perekonomian domestik.

Dari sisi Bank Indonesia, upaya menjaga stabilitas makroekonomi difokuskan untuk mengembalikan inflasi ke kisaran sasarannya, menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, serta mengelola stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konteks ini, sepanjang tahun 2015 Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar, operasi moneter, lalu lintas devisa, dan penguatan *buffer* cadangan devisa. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, guna mendorong momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan makroprudensial secara selektif untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan dan kebijakan moneter melalui penurunan GWM untuk memberi ruang likuiditas yang memadai bagi bank untuk menyalurkan kredit. Kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter via GWM yang akomodatif ini ditempuh secara terukur dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam upaya mendukung reformasi struktural, Bank Indonesia terus melakukan pendalaman pasar keuangan, peningkatan

keuangan inklusi, serta penguatan sistem pembayaran. Pendalaman pasar keuangan ditujukan untuk menciptakan pasar keuangan yang resilien dan efisien. Sementara itu, kebijakan keuangan inklusi diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses pembiayaan ekonomi. Lebih lanjut, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan infrastruktur sistem pembayaran untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien yang berdaya dukung terhadap efisiensi perekonomian.

Kebijakan suku bunga tetap diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran inflasi, menurunkan defisit transaksi berjalan, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terkait dengan inflasi, kebijakan suku bunga bias ketat ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi dan permintaan domestik agar inflasi segera kembali pada kisaran sasaran $4\pm 1\%$. Dengan ekspektasi inflasi yang masih tinggi pada awal tahun 2015, Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate pada level 7,75% pada Januari 2015. Pada Februari 2015, BI melakukan normalisasi kembali BI Rate pasca kenaikan BI Rate yang dilakukan pada November 2014. Normalisasi ini dilakukan dengan menurunkan BI Rate sebesar 25bps setelah mempertimbangkan keyakinan bahwa proyeksi inflasi akhir tahun 2015 kembali berada dalam sasaran. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% sampai akhir tahun 2015. Di satu sisi, BI memandang bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan masih sesuai dengan upaya mengendalikan permintaan domestik dan impor untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Turunnya defisit transaksi berjalan ini pada gilirannya mengurangi permintaan valas domestik. Di sisi lain, BI juga memandang bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan cukup kompetitif untuk menarik pasokan valas terutama dari aliran masuk modal asing. Kombinasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan depresiasi rupiah yang berlebihan, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kebijakan suku bunga yang diambil terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan baik, tercermin pada tercapainya inflasi pada kisaran target inflasi tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, penurunan defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 2% dari PDB, dan penguatan rupiah pada triwulan IV 2015.

Pencapaian inflasi tersebut juga tidak lepas dari koordinasi yang semakin intens antar instansi melalui TPI/TPID mampu mengendalikan inflasi ke dalam kisaran target 2015 sebesar $4\pm 1\%$. Laju inflasi tahun 2015 tercatat sebesar 3,35%, menurun tajam dari inflasi tahun 2014 sebesar 8,36%. Penguatan koordinasi berhasil menjaga kelancaran distribusi dan pasokan di tengah dampak *El Nino* sehingga mampu menjaga stabilitas harga *volatile food*. Keberhasilan ini juga tercermin pada inflasi lebaran 2015 yang terkendali dan lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi lebaran dalam empat tahun terakhir. Terkendalnya inflasi *volatile food* dan didukung oleh stabilitas harga yang dilakukan Pemerintah (*administered prices*) mendorong penurunan ekspektasi inflasi sehingga berdampak pada penurunan inflasi inti (*core inflation*) pada tahun 2015 menjadi 3,95% dari sebesar 4,93% pada tahun 2014.

Kebijakan moneter yang bias ketat juga ditujukan untuk memitigasi dampak divergensi kebijakan moneter global yang memicu pergeseran dan peningkatan volatilitas *capital flows* ke negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Kebijakan suku bunga dapat meredam sebagian tekanan depresiasi nilai tukar, meskipun pengaruh eksternal tetap dominan. Tekanan global semakin menguat pada triwulan III 2015 seiring meningkatnya sentimen kenaikan FFR dan devaluasi yuan yang tidak terduga sebelumnya. Kondisi ini membuat ruang kebijakan moneter menjadi terbatas sehingga perlu ditopang oleh kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa. Untuk itu, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I pada tanggal 9 September 2015 dan Paket Kebijakan Ekonomi II pada tanggal 30 September 2015. Dalam paket kebijakan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah yang berdasarkan tiga pilar, yakni i) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, (ii) memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, dan (iii) memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas.

Bank Indonesia senantiasa berada di pasar untuk mengelola stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia

melakukan intervensi di pasar *spot* maupun *forward* guna menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan valas sehingga volatilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga. Untuk memperkuat penawaran dan permintaan valas, pada bulan September 2015 Bank Indonesia menyesuaikan frekuensi lelang FX *swap* dari dua kali menjadi sekali seminggu, menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen *underlying*, dan menerbitkan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBBI) valas. Sementara untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, Bank Indonesia menyesuaikan mekanisme lelang operasi pasar terbuka (OPT) dari *variable rate tender* (VRT) menjadi *fixed rate tender* (FRT). Selain itu juga memperkaya instrumen OPT dengan beberapa variasi tenor termasuk i) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) tenor 3 dan 6 bulan, ii) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor 9 dan 12 bulan, dan iii) *Reverse Repo* SBN tenor 2 minggu. Di samping memperkuat pengelolaan likuiditas, pengayaan instrumen operasi moneter (OM) juga ditujukan untuk membentuk *term structure* suku bunga OM yang sesuai dengan arah kebijakan moneter untuk memperkuat sinyal kebijakan di pasar uang.

Pada tahun 2015 Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah secara lebih fundamental. Sejak tanggal 1 Januari 2015 Bank Indonesia mengimplementasikan aturan mengenai pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Sementara untuk menurunkan transaksi domestik yang menggunakan valas dan turut meningkatkan kebutuhan valas, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini mampu menurunkan transaksi valas antar penduduk yang selama ini menggunakan valas. Koordinasi dengan Pemerintah juga dilakukan dengan mendorong devisa hasil ekspor (DHE) agar menetap lebih lama di dalam negeri. Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang bersedia menyimpan DHE di perbankan dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat menarik masuk DHE yang selama ini diparkir di luar negeri sehingga dapat memperkuat cadangan devisa.

Penguatan *buffer* kecukupan cadangan devisa juga menjadi salah satu strategi Bank Indonesia untuk mengantisipasi adanya *sudden shock* yang bersumber dari sentimen eksternal. Selain kecukupan cadangan devisa sebagai *first line of defense*, Bank Indonesia juga melakukan penguatan jaring pengaman keuangan internasional sebagai *second line of defense*. Fasilitas *second line of defense* tersebut dalam bentuk kerja sama regional *financial arrangement* maupun kerja sama bilateral dengan negara mitra, diantaranya: *ASEAN Swap Arrangement* (ASA), *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) antara Bank Indonesia - Bank of Japan (BoJ). Bank Indonesia juga menjalin kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan Bank of Korea (BoK), the People's Bank of China (PBoC) dan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mendorong perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal kedua negara. BCSA BI-PBoC juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Berbagai rangkaian kebijakan stabilisasi nilai tukar dan penguatan *line of defense* yang disiapkan tersebut mampu meredam kekhawatiran pelaku pasar dan investor asing sehingga depresiasi rupiah relatif lebih terkelola dibanding negara *peers*.

Untuk turut menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif pada tahun 2015. Pada bulan Juni 2015, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan menaikkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau rasio *Financing to Value* (FTV) untuk kredit properti dan menurunkan uang muka (*down payment*) untuk kredit kendaraan bermotor. Sementara untuk memperluas basis sumber pendanaan intermediasi perbankan, Bank Indonesia juga mendorong penerbitan surat-surat berharga (SSB) yang dimasukkan dalam perhitungan *Loan to Funding Ratio* (LFR) menggantikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Penerapan LFR akan memberikan ruang intermediasi yang lebih besar kepada perbankan dan pendanaannya tidak hanya bergantung pada dana pihak ketiga (DPK). Kemudian untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, Bank Indonesia juga memberikan insentif peningkatan batas atas target LFR bagi bank yang dapat memenuhi target penyaluran kredit

kepada UMKM dengan rasio NPL yang terjaga. Pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut diharapkan dapat mendorong pemulihan pertumbuhan kredit yang sempat mencapai titik terendahnya pada level 9,7% (yoy) pada Juli 2015. Untuk mendukung upaya pemulihan pertumbuhan kredit tersebut, Bank Indonesia juga menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam rupiah dari 8% menjadi 7,5% yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2015. Untuk keseluruhan tahun, akhirnya pertumbuhan kredit meningkat mencapai 10,4% (yoy), sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,79%.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, Bank Indonesia juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dalam rangka implementasi reformasi struktural. Kebijakan reformasi struktural difokuskan pada upaya penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing, pencapaian kedaulatan pangan, energi, dan air, serta pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah telah mengeluarkan rangkaian paket kebijakan ekonomi jilid I-VIII. Selain mendukung perumusan Paket Kebijakan Ekonomi tersebut, Bank Indonesia juga aktif menyelenggarakan beberapa Forum Koordinasi Nasional untuk menyamakan visi yang diturunkan menjadi strategi konkrit dalam pengembangan sektor prioritas. Sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan dalam Forum Koordinasi Nasional meliputi: pengembangan ekonomi berbasis kemaritiman di Ambon, ketahanan energi di Balikpapan, serta pengembangan sektor industri dan pariwisata di Yogyakarta.

Untuk mendukung reformasi struktural, Bank Indonesia juga secara aktif mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif. Upaya pendalaman pasar keuangan dilakukan melalui perluasan cakupan pelaku pasar, memperbanyak variasi instrumen pasar keuangan dan mendorong terbentuknya harga yang efisien. Sementara untuk meningkatkan akses masyarakat pada layanan jasa keuangan dilakukan melalui sistem pembayaran, seperti Layanan Keuangan Digital (LKD) dan pengembangan sektor UMKM. Selain dapat meningkatkan akses pada pembiayaan dari lembaga keuangan, pengembangan UMKM juga dapat mendorong pemerataan ekonomi.

Pengembangan UMKM juga diselaraskan dengan Sembilan Program Prioritas (Nawa Cita) yang dicanangkan Pemerintah dalam mendorong sektor-sektor unggulan. Sejalan dengan pengembangan sektor unggulan, Bank Indonesia juga turut berperan sebagai *counterpart* dari Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung penyaluran kredit program Pemerintah.

Sementara untuk mendukung aktivitas perekonomian yang akan semakin meningkat, Bank Indonesia juga melakukan penguatan infrastruktur sistem pembayaran. Pada tahun 2015, Bank Indonesia mengimplementasikan BI-RTGS Generasi II, BI-SSSS Generasi II dan SKNBI Generasi II. Hal ini dimaksudkan agar keamanan, keandalan, dan kecepatan penyelesaian transaksi dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian. Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai dalam bertransaksi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Kemudian untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan, Bank Indonesia juga terus memperluas jangkauan program Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Sementara untuk mendukung pembayaran tunai, Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan uang rupiah yang cukup dalam berbagai denominasi. Kualitas uang rupiah yang diedarkan hingga pelosok tanah air juga terus ditingkatkan melalui *clean money policy*. Upaya pengedaran dan pemenuhan uang rupiah hingga daerah perbatasan terus diintensifkan melalui reformasi distribusi uang dan layanan kas sejalan dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai bauran kebijakan yang ditempuh secara konsisten tersebut mampu menjaga kinerja perekonomian Indonesia di tengah berbagai guncangan dari sektor eksternal. Kinerja positif kinerja perekonomian tersebut tercermin pada semakin membaiknya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta terlewatinya titik balik pertumbuhan ekonomi domestik. Di sisi makroekonomi, membaiknya stabilitas makroekonomi ditunjukkan oleh tercapainya sasaran inflasi 2015 sebesar $4\pm 1\%$, turunnya defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 2% dari PDB,

dan terkendalinya stabilitas rupiah, bahkan cenderung menguat pada triwulan IV 2015. Di sisi sistem keuangan, resiliensi perbankan tetap kuat yang ditopang oleh kecukupan modal yang tinggi dan dukungan berbagai kebijakan makroprudensial yang ditempuh. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga sudah menemukan momentum perbaikan sejak semester II 2015.

Ke depan, dampak positif dari berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan akan memberikan daya dukung bagi pemulihan ekonomi pada tahun 2016. Paket Kebijakan Ekonomi jilid I hingga VIII yang dikeluarkan Pemerintah dipercaya akan meningkatkan keyakinan pelaku usaha untuk mulai meningkatkan investasi dan aktivitas usahanya. Sementara dukungan kebijakan Bank Indonesia dalam memanfaatkan ruang pelonggaran moneter secara berhati-hati dan kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan memberikan tambahan daya dorong bagi momentum pemulihan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi yang semakin diperkuat dengan hasil implementasi reformasi struktural, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2016 untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan dan lebih tahan terhadap guncangan eksternal.



Keterangan gambar:

Kebijakan moneter pada tahun 2015 secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tantangan yang tidak ringan. Kebijakan tersebut didukung oleh komunikasi yang semakin transparan dan efektif untuk menegaskan komitmen Bank Indonesia.



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



Bab 11

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter tahun 2015 diarahkan untuk memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap stabilitas makroekonomi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia (BI) menempuh *stance* kebijakan moneter bias ketat yang diperkuat dengan paket kebijakan stabilisasi rupiah. Sejalan dengan terkelolanya stabilitas makroekonomi, BI melonggarkan kebijakan moneter secara berhati-hati untuk mendorong pemulihan ekonomi. Disiplin dan kehati-hatian kebijakan moneter yang ditempuh mampu menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari tercapainya sasaran inflasi, turunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya stabilitas rupiah, dan mulai bergulirnya momentum pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi menghadapi tantangan yang tidak ringan pada 2015. Ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat akibat rencana kenaikan suku bunga kebijakan oleh Bank Sentral AS, sementara di sisi lain kebijakan moneter negara maju lainnya cenderung longgar, memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada tren depresiasi sejak awal tahun sampai dengan September 2015. Tekanan depresiasi yang cukup kuat dan terus berlanjut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, depresiasi yang terus berlanjut dapat semakin menurunkan sentimen terhadap prospek perekonomian Indonesia yang pada saat bersamaan juga melemah sebagai pengaruh kondisi global yang kurang menguntungkan. Dalam kondisi demikian, langkah-langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi guna mengelola persepsi positif terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi menjadi penting, terutama karena penurunan prospek ekonomi berisiko memberikan tekanan balik pada stabilitas nilai tukar rupiah.

Mitigasi risiko tekanan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan pengendalian stabilitas makroekonomi secara keseluruhan menjadi fokus kebijakan moneter pada tahun 2015. Kebijakan moneter difokuskan untuk mengurangi tekanan berlebihan pada nilai tukar rupiah sehingga tetap bergerak sesuai nilai fundamentalnya. Langkah ini ditempuh secara konsisten dalam rangka menurunkan laju inflasi sehingga kembali berada dalam kisaran sasaran yakni $4\pm 1\%$ pada tahun 2015-2017 serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat. Sebagaimana diketahui, inflasi IHK pada tahun 2014 meningkat cukup tinggi hingga mencapai 8,36% sebagai dampak kenaikan harga BBM. Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga berada pada level yang tinggi pada tahun 2014 yakni mencapai 3,1% dari PDB, sebagai pengaruh permintaan global yang melemah dan harga komoditas yang terus turun. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan stabilitas makroekonomi yang merupakan prakondisi penting dalam mendukung langkah penguatan struktur ekonomi menjadi lebih sehat dan berdaya tahan. Berbagai langkah stabilisasi makroekonomi tersebut ditempuh melalui kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum, nilai tukar, penguatan operasi moneter, lalu lintas devisa, yang ditopang oleh pendalaman pasar keuangan.

Stance kebijakan moneter berada pada kondisi bias ketat hingga Oktober 2015, diperkuat dengan paket stabilisasi nilai tukar rupiah. BI Rate dipertahankan tetap pada level 7,50% sejak Februari 2015 hingga akhir tahun.

Stance kebijakan moneter bias ketat juga ditopang paket stabilisasi nilai tukar rupiah pada September 2015. Paket stabilisasi nilai tukar ini berisikan tiga pilar yakni stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamental, penguatan pengelolaan likuiditas rupiah, termasuk *term structure* suku bunga operasi moneter, serta penguatan pengelolaan permintaan dan penawaran valas. Kebijakan stabilisasi nilai tukar ini juga didukung upaya mempercepat pendalaman pasar uang.

Untuk memitigasi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi pada stabilitas ekonomi, ditempuh langkah penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah. GWM Primer Rupiah diturunkan 0,5% menjadi 7,50% semenjak 1 Desember 2015. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan rupiah yang melemah berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi yang tercermin dari meningkatkan risiko korporasi yang pada akhirnya menurunkan investasi. Selanjutnya, penurunan kinerja korporasi menyebabkan peningkatan risiko pada sektor perbankan. Di samping itu, ekonomi yang melambat berdampak pula pada semakin turunnya ruang fiskal yang berperan dalam mendorong perekonomian. Menyikapi potensi dampak pelemahan pertumbuhan ekonomi tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya respons kebijakan yang tepat untuk menjaga persepsi positif pelaku ekonomi. Kebijakan penurunan GWM Primer Rupiah ditempuh dengan pertimbangan bahwa pelanggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI Rate cukup berisiko di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal ini terkait dengan potensi pembalikan modal asing dan meningkatnya tekanan depresiasi nilai tukar.

Kebijakan moneter yang ditempuh, didukung oleh koordinasi yang erat dengan Pemerintah dan otoritas kebijakan lainnya, dapat mengendalikan stabilitas ekonomi dan memberikan topangan bagi upaya pemulihan ekonomi. Inflasi tahun 2015 dapat dikendalikan dalam kisaran sasaran $4\pm 1\%$ (3,35% yoy). Defisit transaksi berjalan juga menurun ke level yang lebih sehat yaitu 2,1% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Sementara itu, depresiasi nilai tukar rupiah juga dapat ditahan dan bahkan berada dalam tren menguat pada triwulan IV 2015. Perbaikan stabilitas makroekonomi ini juga didukung likuiditas perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan, tercermin dari pertumbuhan uang beredar (M2) yang melambat sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perkembangan suku bunga baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit berada dalam tren menurun seiring dengan rendahnya permintaan uang sebagai pengaruh perlambatan ekonomi.

11.1. KEBIJAKAN SUKU BUNGA DAN GIRO WAJIB MINIMUM

Kebijakan suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2015 secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan target sasaran $4\pm 1\%$ pada tahun 2015-2017 serta membawa defisit transaksi berjalan yang lebih sehat. Upaya mengendalikan inflasi sesuai dengan target pada tahun 2015 cukup penting, mengingat inflasi tahun 2014 yang cukup tinggi hingga mencapai 8.36%, di atas target sasaran tahun 2014 ($4,5\pm 1\%$).¹ Selain itu, upaya mengarahkan defisit transaksi ke tingkat yang lebih sehat juga menjadi perhatian dengan mempertimbangkan level defisit pada tahun 2014 yang cukup tinggi yaitu mencapai 3,1% dari PDB.

Perkembangan inflasi yang kondusif pada awal tahun 2015 memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate pada Februari 2015. Pada awal tahun 2015, sejumlah indikator menunjukkan tekanan inflasi kembali menurun pasca kenaikan harga BBM November 2014. Ekspektasi inflasi pada tingkat pedagang eceran dan tingkat konsumen terpantau kembali pada tren menurun pada triwulan I 2015. Sejalan dengan itu, ekspektasi inflasi pelaku ekonomi yang terpantau pada *consensus forecast* juga turun ke kisaran target sasaran inflasi $4\pm 1\%$ untuk akhir tahun 2015. Mempertimbangkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia pada Februari 2015 menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,50%. Penurunan BI Rate tersebut disertai penurunan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,50%, sementara suku bunga *Lending Facility* dipertahankan pada level 8,00%.

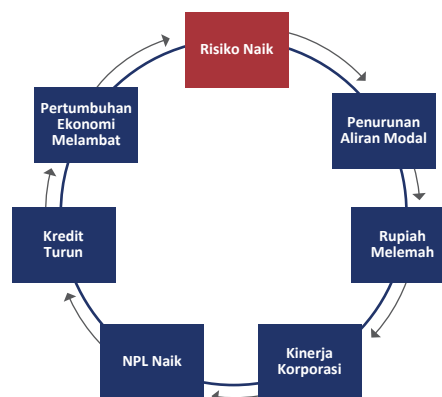
Ketidakpastian global yang semakin kuat memicu ketidakpastian aliran modal global dan membuat risiko ketidakstabilan makroekonomi domestik kembali meningkat pada triwulan III 2015. Hal ini dipicu sentimen rencana kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR). Pada Agustus 2015, ketidakpastian global semakin meningkat, dipicu keputusan bank sentral Tiongkok untuk mendevaluasi mata uang yuan guna memberikan dorongan pada ekonominya yang terus melemah. Risiko global yang meningkat pada gilirannya menyebabkan investor global memindahkan investasinya ke aset-aset yang dipandang lebih aman (*safe haven assets*) dan mengurangi penempatan di negara *emerging markets* (EM). Kondisi ini kemudian memberikan tekanan kuat pada mata uang negara EM termasuk rupiah. Nilai tukar rupiah selama

tahun 2015 berada dalam tren melemah dengan tekanan yang cukup tinggi pada triwulan III 2015.

Mitigasi terhadap pelemahan rupiah yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Pelemahan rupiah yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan inflasi, menurunkan kinerja korporasi, dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah dapat semakin menurunkan sentimen terhadap prospek pertumbuhan ekonomi yang sedang dalam tren melemah. Untuk itu, upaya untuk menjaga persepsi positif terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kuat pada nilai tukar menjadi semakin penting. Hal ini terkait dengan kekhawatiran penurunan prospek ekonomi akan semakin meningkatkan risiko ke perekonomian dan pada akhirnya dapat memberikan tekanan balik pada nilai tukar rupiah (Diagram 11.1).

Bank Indonesia merespons perkembangan ekonomi yang kurang kondusif dengan mengarahkan kebijakan suku bunga untuk memitigasi risiko pelemahan nilai tukar rupiah dan mengendalikan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter difokuskan untuk mengurangi tekanan berlebihan pada nilai tukar rupiah sehingga tetap bergerak sesuai nilai fundamentalnya. Langkah ini juga konsisten dengan upaya untuk menurunkan laju inflasi sehingga kembali berada dalam kisaran sasaran yakni $4\pm 1\%$ pada tahun 2015-2017 serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate tetap pada level 7,50% hingga akhir Desember 2015. Sejalan dengan itu, suku bunga *Deposit Facility* dan suku bunga *Lending Facility* juga dipertahankan

Diagram 11.1. Tantangan Perekonomian pada Periode Pelemahan Rupiah



1 Peningkatan inflasi terutama disebabkan kenaikan harga BBM pada November 2014.

masing-masing pada level 5,50% dan 8,00%. Kebijakan BI mempertahankan level BI Rate yang bias ketat dan *Standing Facilities Rate* ditempuh juga dengan mempertimbangkan risiko jangka pendek dari global yang masih tinggi.

Untuk memitigasi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi pada stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia menempuh langkah penurunan GWM Primer dalam Rupiah. Pada November 2015 Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan GWM Primer dalam Rupiah, dari 8,0% menjadi 7,50% yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2015. Penurunan GWM ini ditempuh seiring dengan stabilitas makroekonomi yang semakin baik sehingga terdapat ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama karena kemungkinan kenaikan FFR dan keberagaman kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral Eropa, Jepang, dan Tiongkok, Bank Indonesia tetap berhati-hati dalam menempuh langkah pelonggaran kebijakan moneter. Kebijakan penurunan GWM diambil dengan mempertimbangkan ruang pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI Rate cukup berisiko di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal ini terkait dengan potensi pembalikan modal asing dan meningkatnya tekanan depresiasi rupiah. Dalam kaitan ini, pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan GWM Primer diharapkan akan meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang terindikasi mulai meningkat semenjak triwulan III 2015.

11.2. KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, kebijakan moneter didukung oleh kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menjaga perkembangan nilai tukar yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan serta sejalan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan valas yang terjadi di pasar yang didasarkan oleh kondisi fundamental perekonomian dan pasar keuangan. Stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan nilai fundamentalnya sangat penting untuk menjaga inflasi agar tetap pada tren menurun, terlebih saat tekanan depresiasi meningkat. Melalui ekspektasi inflasi yang terkelola, dampak terusan (*passthrough*) pelemahan nilai tukar akan tetap terkendali. Selain itu, stabilitas nilai tukar

juga memperkuat keyakinan terhadap prospek ekonomi Indonesia.²

Bank Indonesia terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya, dalam rangka mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Intervensi di pasar valas dilakukan secara terukur untuk mengurangi gejala yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valas. Strategi yang dilakukan Bank Indonesia adalah melakukan *dual intervention*, yaitu stabilisasi rupiah melalui intervensi jual di pasar valas yang disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi *dual intervention* ini disamping mendukung kestabilan nilai tukar juga menjaga kecukupan likuiditas rupiah. Langkah ini sekaligus menambah kepemilikan SBN Bank Indonesia untuk digunakan sebagai instrumen dalam operasi moneter. Kebijakan nilai tukar ini didukung dengan terjaganya kecukupan cadangan devisa yang berperan sebagai *first line of defense* dalam merespons ketidakpastian global yang meningkat.

Bank Indonesia meningkatkan intensitas penguatan kebijakan stabilisasi nilai tukar seiring dengan tekanan depresiasi yang tinggi khususnya pada triwulan III 2015. Merespons tekanan yang meningkat, Bank Indonesia mengeluarkan serangkaian paket kebijakan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah (Tabel 11.1). Paket kebijakan Bank Indonesia tersebut bersinergi dengan paket kebijakan Pemerintah dalam rangka menjaga prospek perekonomian Indonesia yang diyakini akan terus membaik. Seluruh rangkaian kebijakan tersebut diupayakan untuk segera diimplementasikan, sehingga dapat secara efektif mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Penguatan Pengendalian Likuiditas Rupiah dan Pengembangan Instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT)

Kebijakan pengendalian likuiditas rupiah melalui kebijakan operasi moneter ditempuh Bank Indonesia guna menopang arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Kebijakan operasi moneter diarahkan untuk mengelola likuiditas sehingga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan likuiditas tetap terjaga dan dampak kebijakan moneter pada suku bunga pasar keuangan

² Pembahasan lengkap mengenai perkembangan nilai tukar rupiah terdapat pada Bab 5. Nilai Tukar.

Kebijakan	Strategi
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian volatilitas nilai tukar rupiah • Pembelian SBN di pasar sekunder • Intervensi <i>forward</i> untuk menyeimbangkan supply dan demand di pasar <i>forward</i>
Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian mekanisme lelang OPT dari <i>variable rate tender</i> (VRT) menjadi <i>fixed rate tender</i> (FRT) • Penyesuaian <i>pricing</i> lelang OPT • Penerbitan SDBI tenor 3 bulan dan 6 bulan • Penerbitan kembali SBI tenor 9 bulan dan 12 bulan • Penerbitan RR SBN tenor 2 minggu
Memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen <i>underlying</i> • Penguatan kebijakan untuk mengelola permintaan dan penawaran valas di pasar <i>forward</i> • Penyesuaian frekuensi lelang FX <i>Swap</i> dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu • Penyesuaian mekanisme lelang TD Valas dari <i>variable rate tender</i> (VRT) menjadi <i>fixed rate tender</i> (FRT), penyesuaian <i>pricing</i> dan perpanjangan tenor s/d 3 bulan • Penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBi) Valas • Penurunan <i>minimum holding period</i> SBI menjadi 1 minggu • Penguatan informasi Lalu Lintas Devisa (LLD) • Koordinasi dengan Pemerintah tentang pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah

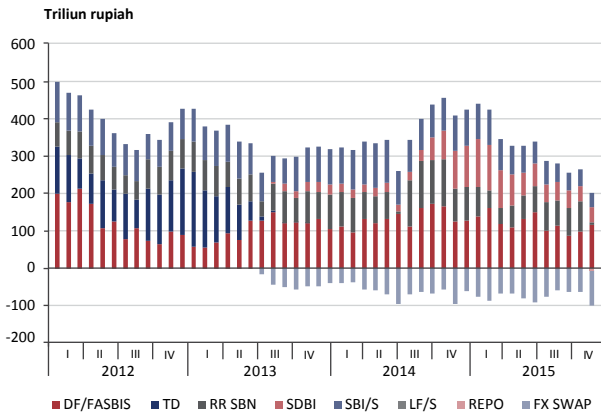
dapat ditransmisikan dengan baik. Pengelolaan likuiditas dilakukan melalui kegiatan operasi moneter yang terdiri dari OPT dan *standing facilities*. Pada paruh pertama 2015, Bank Indonesia melakukan beberapa penguatan kebijakan operasi moneter. Penguatan operasi moneter dilakukan dengan menyederhanakan lelang OPT melalui penghentian lelang SBI tenor 9 bulan dan membuka lelang perdana Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) tenor 9 bulan. Penguatan operasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan SBN milik Bank Indonesia melalui *Reverse Repo* SBN serta mengurangi frekuensi lelang SDBI dari 6 kali menjadi 2 kali sebulan.

Sejalan dengan arah kebijakan operasi moneter, Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan likuiditas guna mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian *pricing* lelang OPT dan penyesuaian mekanisme lelang OPT dari *variable rate tender* (VRT) menjadi *fixed rate tender* (FRT), penerbitan SDBI tenor 3 dan 6 bulan, penerbitan *Reverse Repo* SBN tenor 2 minggu serta penerbitan kembali SBI tenor 9 dan 12 bulan. Kebijakan penyesuaian *pricing* lelang OPT dan mekanisme lelang OPT dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Penyesuaian *pricing* lelang, berupa kenaikan suku bunga OPT, diarahkan untuk memitigasi risiko penggunaan likuiditas rupiah yang berlebihan pada kegiatan transaksi valas yang dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai

tukar rupiah. Sementara itu, penyesuaian lelang OPT dari VRT menjadi FRT ditujukan untuk memperkuat sinyal kebijakan Bank Indonesia mengelola likuiditas rupiah. Penyesuaian mekanisme lelang tersebut bersifat sementara dan akan dilakukan evaluasi kembali pada waktunya. Di samping untuk mengelola likuiditas, penguatan operasi moneter juga ditujukan untuk menjaga konsistensi dan memperkuat sinyal kebijakan moneter. Dalam konteks ini, Bank Indonesia mendesain *term structure* suku bunga instrumen operasi moneter yang sesuai dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh.

Pada paruh pertama tahun 2015, posisi operasi moneter (OM) cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014, sedangkan pada paruh kedua tahun 2015 posisi OM jauh menurun jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2014. Rata-rata posisi OM semester I 2015 meningkat sekitar 11% dibandingkan semester I 2014 (Grafik 11.1). Pada periode paruh pertama tahun 2015 tersebut, penguatan operasi moneter dilakukan dengan menyederhanakan lelang OPT melalui penghentian lelang SBI 9 bulan dan membuka lelang perdana SDBI 9 bulan. Bank Indonesia juga mengoptimalkan penggunaan SBN milik Bank Indonesia melalui *Reverse Repo* SBN serta mengurangi frekuensi lelang SDBI dari 6 kali menjadi 2 kali sebulan. Rata-rata posisi OM semester II 2015 turun sebesar sekitar 35% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2014. Penguatan pengelolaan likuiditas rupiah dan valas yang

Grafik 11.1. Posisi Operasi Moneter

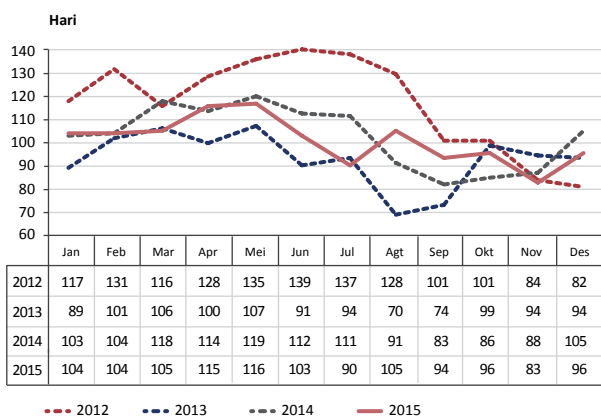


dilakukan sejak Agustus 2015 mendukung kebijakan pengelolaan stabilitas nilai tukar. Sejak Agustus 2015, durasi operasi moneter berhasil ditingkatkan meskipun tidak setinggi awal tahun. Perpanjangan durasi operasi moneter dipengaruhi oleh penurunan surplus likuiditas harian di sistem perbankan dan faktor musiman sehingga bank cenderung lebih konservatif dalam menjaga likuiditasnya di tenor pendek (Grafik 11.2 dan 11.3).

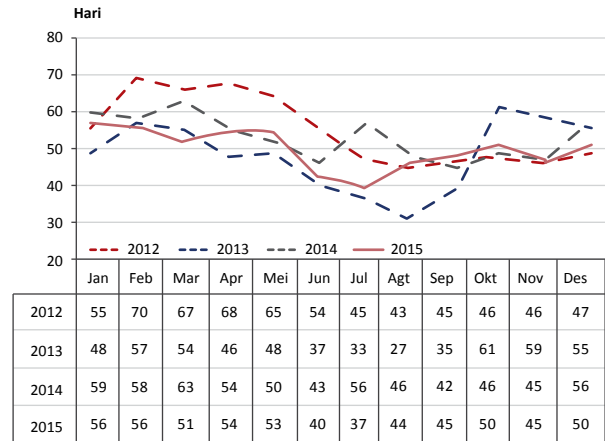
Penguatan Pengelolaan Permintaan dan Penawaran Valas

Salah satu pilar dalam paket stabilisasi nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia adalah kebijakan penguatan pengelolaan permintaan dan penawaran valas. Kebijakan tersebut meliputi penurunan batas pembelian valas

Grafik 11.2. Durasi OM berdasarkan Tenor



Grafik 11.3. Durasi OM berdasarkan Sisa Jatuh Waktu



dengan pembuktian dokumen *underlying*, penguatan kebijakan dalam pengelolaan permintaan dan penawaran valas di pasar *spot* dan *forward*, optimalisasi instrumen *Term Deposit* valas, optimalisasi instrumen *FX Swap*, penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas, penurunan *minimum holding period* SBI menjadi 1 minggu, dan penguatan informasi Lalu Lintas Devisa (LLD). Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan DHE di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah.

Kebijakan penurunan batas nilai maksimum pembelian valas tanpa *underlying* dilakukan pada Agustus 2015. Pembelian valas melalui transaksi *spot* yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (*underlying*) diturunkan dari 100 ribu dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS atau ekuivalennya per bulan per nasabah. Kebijakan perubahan batas maksimum pembelian valas ini ditempuh untuk mengendalikan permintaan valas yang tidak terkait langsung dengan transaksi kegiatan ekonomi riil. Adapun transaksi yang terkait dengan kegiatan ekonomi riil (memiliki *underlying*) seperti untuk keperluan pembayaran impor, biaya sekolah, biaya pengobatan di luar negeri, dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN), tidak diberlakukan pembatasan.

Selanjutnya pada September 2015, Bank Indonesia memperkuat kebijakan untuk mengelola pasokan dan permintaan valas di pasar *forward*. Kebijakan ini bertujuan mendorong transaksi *forward* jual dan memperjelas *underlying forward* beli. Untuk mendorong transaksi *forward* jual, batas maksimum transaksi *forward* jual dengan *underlying* dinaikkan dari semula 1 juta dolar

AS menjadi 5 juta dolar AS per transaksi per nasabah. Selanjutnya, cakupan *underlying* untuk transaksi *forward* (pihak domestik dan asing) dan *spot* jual (transfer rupiah ke pihak asing) diperluas termasuk bukti kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri atau luar negeri.

Penguatan pengelolaan pasokan dan permintaan valas turut didukung melalui optimalisasi instrumen *term deposit* valas (TD valas). Optimalisasi penyerapan likuiditas valas dilakukan melalui perpanjangan *window time* lelang, penyempurnaan metode lelang dan penetapan *pricing*, serta penambahan jangka waktu penempatan (tenor). Perpanjangan *window time* lelang TD valas *overnight* dari pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB menjadi pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan optimalisasi potensi pemanfaatan likuiditas valas bank-bank domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan pada metode lelang dan penetapan *pricing* serta penambahan tenor yang lebih panjang yaitu 3 bulan dalam rangka *lengthening* penyerapan TD Valas. Metode lelang diubah dari *Variabel Rate Tender* (VRT) menjadi *Fixed Rate Tender* (FRT) guna mengkomunikasikan *stance* kebijakan dengan lebih cepat. Implementasi metode FRT dan penetapan *pricing* yang sejalan dengan *market rate* memberikan hasil positif, tercermin dari kenaikan transaksi TD valas dan peningkatan jumlah peserta lelang.

Kebijakan lain yang ditempuh adalah pengoptimalan instrumen *FX Swap* untuk menjamin ketersediaan instrumen lindung nilai serta mendukung pengelolaan likuiditas dalam menjaga keseimbangan pasokan serta permintaan rupiah dan valas. Pada September 2015, sebagai bagian dari langkah-langkah penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia, dilakukan perluasan tenor lelang *FX Swap* sampai dengan 12 bulan untuk melengkapi *FX Swap* dengan tenor 1, 3, dan 6 bulan yang telah ada. Langkah ini ditempuh untuk menjamin ketersediaan instrumen lindung nilai kepada perbankan dan dunia usaha. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian frekuensi lelang dan jumlah outstanding *FX Swap* pada waktu-waktu tertentu. Strategi ini dalam jangka pendek mendorong kenaikan *swap rate*, namun bersifat sementara dan segera kembali normal seiring dengan penyesuaian-penyempurnaan yang dilakukan pasar.

Kebijakan penerbitan SBBI valas dan pemendekan *minimum holding period* SBI adalah langkah kebijakan yang ditempuh selanjutnya. Kebijakan ini ditempuh selain untuk memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas juga diarahkan untuk memperkuat upaya pendalaman pasar keuangan. SBBI valas adalah

instrumen yang bersifat *tradable* dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Penerbitan SBBI valas yang bersifat *tradable* diharapkan dapat mendukung upaya pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan pasar sekunder SBBI tersebut. Sementara itu, kebijakan memperpendek *minimum holding period* SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu ditempuh guna meningkatkan minat investor nonresiden dalam menempatkan dana di Indonesia. Peningkatan investasi nonresiden dapat mendukung pengelolaan likuiditas valas, meningkatkan efektivitas operasi moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Selain berbagai kebijakan untuk langsung memengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran valas, Bank Indonesia juga memperkuat infrastruktur informasi pasokan dan permintaan valas. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Lalu Lintas Devisa (LLD) khususnya terkait transparansi dan ketersediaan informasi penggunaan devisa. Sesuai UU No.24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data terkait LLD kepada penduduk. Dalam kaitan itu maka berbagai upaya penguatan informasi perlu ditempuh Bank Indonesia melalui penguatan informasi pada laporan LLD. Salah satu fitur utama penguatan informasi tersebut ialah Bank Indonesia mewajibkan pelaku LLD melaporkan penggunaan devisanya dengan dilengkapi dokumen pendukung untuk transaksi yang lebih besar dari nilai tertentu. Dengan demikian, selain menyampaikan informasi, nasabah dengan transaksi penerimaan dan pembayaran di atas nilai tertentu yang memengaruhi rekening giro bank di luar negeri, harus menyertakan dokumen pendukung transaksi kepada bank.

Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan DHE di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah. Kebijakan ini telah dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Besaran insentif pajak secara progresif ditentukan oleh lama penempatan atau konversi penuh ke rupiah. Pengurangan PPh bunga deposito hingga sebesar 0% untuk deposito dalam mata uang dolar AS dengan jangka waktu lebih enam bulan dan untuk deposito dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu minimal 6 bulan.

Penguatan Kecukupan Cadangan Devisa

Kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas didukung dengan kebijakan untuk menjaga kecukupan cadangan devisa, baik sebagai *first line of defense* maupun *second line of defense*. Cadangan devisa menjadi penyangga untuk mengantisipasi gejolak yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi. Penguatan cadangan devisa ini menjadi semakin penting sebagai mitigasi terhadap risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat seperti pada tahun 2015. Hingga akhir tahun 2015, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang cukup untuk menjaga ketahanan eksternal, meskipun menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 11.4). Posisi cadangan devisa pada akhir 2015 mencapai 105,9 miliar dolar AS, menurun dibandingkan akhir 2014 sebesar 111,9 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran untuk pembayaran ULN pemerintah serta penggunaan devisa dalam rangka menjaga nilai tukar rupiah dan mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Meskipun menurun, level cadangan devisa akhir tahun 2015 masih dapat membiayai 7,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Cadangan devisa ini masih lebih tinggi bila dibandingkan standar internasional serta rata-rata level cadangan devisa negara *peers*.³

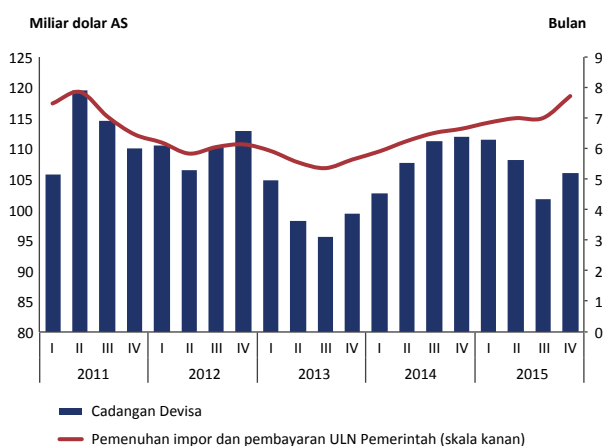
Penguatan cadangan devisa antara lain ditempuh melalui jaring pengaman keuangan internasional (*second line of defense*). Dalam kaitan itu, fasilitas *second line of defense* diperoleh melalui kerja sama

regional financial arrangement dan kerja sama bilateral dengan negara mitra. Fasilitas tersebut meliputi ASEAN *Swap Arrangement (ASA)*, *the Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*, dan *Bilateral Swap Arrangement (BSA)* Bank Indonesia – Bank of Japan (Tabel 11.2).

Dalam konteks regional, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama *swap arrangement* dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk ASEAN *Swap Arrangement (ASA)*. Kerja sama *swap arrangement* mencapai 2 miliar dolar AS. Pada 17 November 2015, Gubernur Bank Sentral ASEAN telah memperpanjang perjanjian ASA hingga tahun 2017. ASA dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami tekanan neraca pembayaran. Pada periode tahun 2015-2017, Bank Indonesia bertindak sebagai *Agent Bank* yang mengkoordinasikan implementasi ASA pada saat terdapat *participating member* yang mengajukan aktivasi pemanfaatan fasilitas tersebut.

Bank Indonesia juga memiliki skema *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)* dengan People's Bank of China (PBoC), Bank of Korea (BOK), dan Reserve Bank of Australia (RBA). Kerja sama tersebut ditujukan untuk mendorong perdagangan bilateral dan menjamin penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal kedua negara. Dalam kaitan ini, kerja sama diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS sehingga mendorong terciptanya stabilitas nilai tukar rupiah. Selain untuk tujuan tersebut, BCSA dengan PBoC juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan likuiditas jangka pendek guna menjaga stabilitas pasar keuangan. BCSA BI-BOK yang ditandatangani pada tahun 2014 bernilai Rp115 triliun dengan masa berlaku hingga 2017. Sementara itu, BCSA BI-RBA yang ditandatangani pada 15 Desember 2015, memungkinkan dilakukannya transaksi *swap* mata uang lokal kedua negara senilai 10 miliar dolar Australia atau setara dengan Rp100 triliun.

Grafik 11.4. Kecukupan Pemenuhan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah



3 IMF menetapkan standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

11.3. PENDALAMAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Upaya pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik terus diperkuat. Dinamika perkembangan pasar keuangan dalam setahun terakhir semakin menunjukkan tentang pentingnya pasar keuangan yang likuid dan dalam, agar dapat menyerap guncangan yang timbul dari eksternal maupun internal. Upaya pendalaman pasar keuangan mencakup perluasan pelaku pasar, instrumen yang bervariasi, dan terbentuknya harga yang efisien. Program pendalaman pasar keuangan

Tabel 11.2. Kerja Sama Swap Arrangement

No	Jenis Fasilitas	Tujuan Fasilitas	Nilai Fasilitas	Penandatanganan Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan
1	<i>ASEAN Swap Arrangement</i>	Kerja sama multilateral dalam bentuk <i>swap</i> antara dolar AS/yen/euro dengan mata uang domestik sepuluh negara ASEAN, bertujuan untuk menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami permasalahan neraca pembayaran.	USD2 miliar (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar USD600 juta)	16 November 2015	2 tahun	Perpanjangan beberapa kali sejak penandatanganan pertama pada 15 November 2005.
2	CMIM	Kerja sama multilateral dalam bentuk <i>swap</i> antara USD dengan mata uang domestik negara ASEAN+3, bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan.	USD240 miliar (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar USD22,76 miliar)	17 Juli 2014	Tidak terbatas	Amandemen perjanjian untuk penguatan fasilitas CMIM. Perjanjian awal ditandatangani Maret 2010.
3	<i>Bilateral Swap Arrangement</i> BI-BOJ	Kerja sama bilateral dalam bentuk <i>swap</i> antara USD dengan rupiah, bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kesulitan likuiditas valas jangka pendek.	USD22,76 miliar	12 Desember 2013	3 tahun	Perpanjangan beberapa kali setelah penandatanganan pertama pada Februari 2003, dengan peningkatan nilai dan jenis fasilitas.
4	<i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i> BI-PBOC	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk <i>swap</i> CNY dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia-Tiongkok, membantu penyediaan likuiditas valas jangka pendek bagi stabilisasi pasar keuangan, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	CNY100 miliar (ekuivalen Rp175 triliun)	1 Oktober 2013	3 tahun	Perpanjangan. Penandatanganan pertama pada Maret 2009.
5	<i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i> BI-BOK	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk <i>swap</i> KRW dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia-Korea, serta memperkuat kerja sama keuangan yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi kedua negara.	KRW10,7 triliun/ Rp115 triliun (ekuivalen dengan USD10 miliar)	6 Maret 2014	3 tahun	
6	<i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i> BI-RBA	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk <i>swap</i> AUD dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia-Australia, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	AUD10 miliar (ekuivalen Rp100 triliun)	15 Desember 2015	3 tahun	

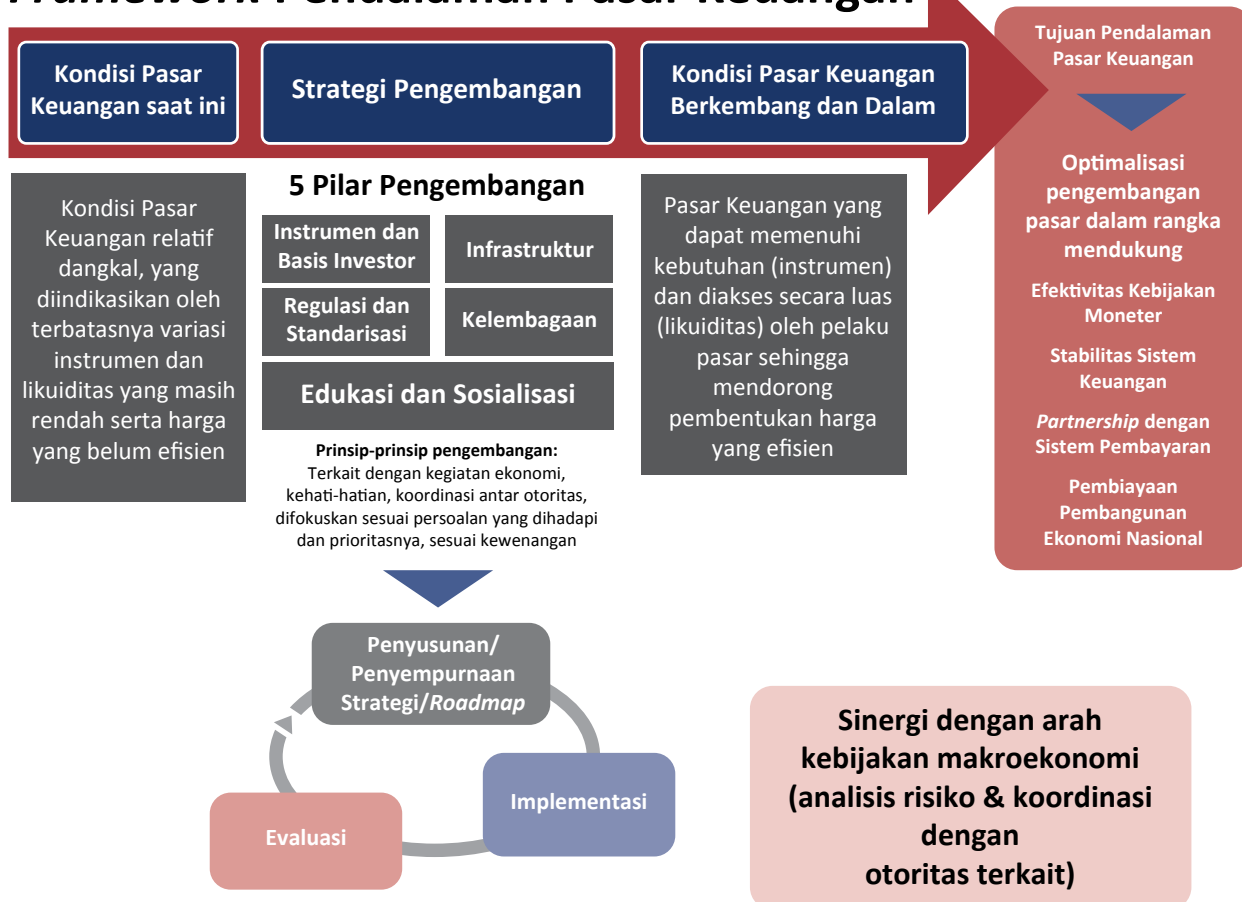
juga difokuskan untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya melalui peningkatan kemudahan sisi pembiayaan.

Blueprint pendalaman pasar keuangan disusun sebagai panduan bagi perbaikan dan pengembangan struktur pasar keuangan domestik 5-10 tahun ke depan. *Blueprint* tersebut mencakup *guidance* bagi program pengembangan pasar uang, pasar valas, pasar keuangan syariah, dan pasar obligasi (koordinatif). Pengembangan pasar keuangan dilakukan dengan lima strategi yaitu pengembangan instrumen dan basis investor, penguatan regulasi dan standarisasi, pengembangan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta edukasi dan sosialisasi yang efektif. Pengembangan dengan strategi tersebut diharapkan akan menciptakan pasar keuangan yang semakin berkembang, likuid dan efisien, serta mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan pembangunan ekonomi (Diagram 11.2).

Pengembangan pasar keuangan mencakup pengembangan pasar uang rupiah dan pasar uang valas, baik konvensional maupun syariah. Pada pasar uang rupiah, strategi program pendalaman pasar mencakup pengembangan pasar *collateralized* guna mendorong ketersediaan likuiditas, efisiensi harga dan pembentukan *term structure*, meningkatkan akses antarbank di pasar *uncollateralized* atau Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan pengembangan instrumen pasar uang yang berfungsi sebagai sumber likuiditas bagi pelaku pasar. Sementara itu, di pasar uang valas, program pendalaman akan difokuskan pada pengembangan variasi instrumen penempatan dana valas secara luas dan derivatif suku bunga. Besaran strategi pendalaman pasar valas ditempuh dengan mendorong transaksi valas derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang efektif dan efisien. Pendalaman pasar valas juga ditempuh dengan mendukung diversifikasi dan partisipasi pelaku pasar dalam rangka meningkatkan keseimbangan permintaan dan penawaran valas. Selain itu, dengan cara meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi valas melalui pengembangan infrastruktur pasar. Sementara

Diagram 11.2. *Framework* Pendalaman Pasar Keuangan

Framework Pendalaman Pasar Keuangan



untuk mengembangkan pasar keuangan dan ekonomi syariah, Bank Indonesia memiliki strategi peningkatan pangsa pasar keuangan syariah, pengembangan instrumen pasar keuangan syariah, serta optimalisasi dana sosial dan pemberdayaan sektor riil.

Koordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkuat untuk mengembangkan pasar obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah ditekankan pada pengembangan obligasi pemerintah jangka pendek, pengembangan infrastruktur transaksi, dan penerbitan variasi instrumen obligasi. Sementara itu, koordinasi Bank Indonesia dengan OJK difokuskan pada penyempurnaan regulasi untuk mendukung penerbitan obligasi korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mendukung upaya tersebut, dilakukan penyiapan infrastruktur yang terintegrasi dalam transaksi obligasi korporasi.

Ketentuan di pasar valas direlaksasi untuk mendukung kebijakan kewajiban lindung nilai bagi korporasi nonbank sebagai implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri. Relaksasi ketentuan mencakup transaksi derivatif yang dilakukan antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/6/PBI/2015 dan PBI No.17/7/PBI/2015. *Underlying* untuk transaksi valas yang dilakukan pihak domestik diperluas mencakup pemberian pembiayaan untuk kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, untuk meningkatkan likuiditas transaksi derivatif dilakukan melalui penghapusan persyaratan minimum tenor bagi pihak asing dalam bertransaksi derivatif. Lebih lanjut, transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) secara eksplisit menjadi bagian dari transaksi derivatif yang diatur, sehingga diharapkan dapat menambah fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai.

Bank juga diberikan ruang lebih untuk mengelola posisi valas pada intrahari agar lebih leluasa menyediakan instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar. Kewajiban menjaga posisi devisa neto (PDN) bank dalam setiap 30 menit dihapus melalui PBI No.17/5/PBI//2015 tanggal 29 Mei 2015 terkait dengan Perubahan keempat atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Dengan dihapuskannya ketentuan PDN 30 menit ini, bank yang memberikan jasa kepada nasabah dalam bertransaksi valas, akan lebih mudah dalam mengelola posisinya dan dapat melakukan *squaring position* dengan waktu yang lebih fleksibel sampai dengan akhir hari. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan volatilitas rupiah intrahari.

Upaya mendorong penggunaan *hedging* juga diarahkan ke perusahaan-perusahaan BUMN dengan melibatkan Pemerintah. Bank Indonesia, Pemerintah, dan penegak hukum telah menyepakati bahwa konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari transaksi lindung nilai BUMN bukan merupakan kerugian negara, sepanjang transaksi tersebut dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pada triwulan II 2015, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero), yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, melakukan penandatanganan fasilitas lindung nilai (*forex line*) dengan tiga bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penandatanganan fasilitas lindung nilai oleh ketiga BUMN tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan penggunaan transaksi lindung nilai oleh BUMN lainnya dan korporasi swasta dalam pengelolaan risiko nilai tukar. Sosialisasi kewajiban lindung nilai dilakukan secara intensif dengan melibatkan *stakeholder* agar pemanfaatan transaksi lindung nilai dapat ditingkatkan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia bersama dengan BPK, BPKP, KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kemenkeu dan Kementerian BUMN menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Lindung Nilai sebagai Alat Tata Kelola Keuangan Negara dan Perusahaan” pada awal Mei 2015.

Penyempurnaan mekanisme suku bunga penawaran antarbank atau yang selama ini dikenal sebagai *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR), terus dilakukan. Penyempurnaan mekanisme JIBOR dilakukan melalui penerbitan PBI No.17/2/PBI/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank. PBI ini mengatur JIBOR yang ditetapkan berdasarkan suku bunga indikasi yang disampaikan oleh bank kontributor. Dalam rangka meningkatkan kredibilitas JIBOR, sejak 1 April 2015 Bank Indonesia mewajibkan bank kontributor untuk menerima permintaan transaksi dari bank kontributor lain untuk meminjam dan/atau meminjamkan rupiah pada tingkat suku bunga sesuai suku bunga indikasi yang disampaikan oleh bank kontributor tersebut, sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan lain yang ditentukan, atau yang disebut dengan *hitable* JIBOR.

Penyempurnaan terhadap JIBOR diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas transaksi keuangan karena seluruh pelaku pasar/pelaku ekonomi akan menggunakan suku bunga acuan yang sama untuk setiap tenor. Pembentukan suku bunga acuan pasar uang untuk tenor satu tahun ke bawah juga akan melengkapi imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu 2 tahun sampai dengan 30 tahun, sehingga diharapkan terbentuk kurva imbal hasil

(*yield curve*) yang lengkap dan kredibel, yaitu dari tenor *overnight* hingga 30 tahun. Kurva imbal hasil yang lengkap penting bagi berjalannya transmisi kebijakan moneter (*monetary transmission channel*), karena didalamnya terkandung faktor ekspektasi pasar terhadap kondisi perekonomian ke depan. Selain itu, dengan kurva imbal hasil yang lengkap akan mendorong pembentukan instrumen baru di pasar, sehingga memberikan alternatif bagi pelaku usaha untuk membiayai ekspansi usahanya dan bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolionya.

Untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan terkait Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan fasilitasi kesepakatan terkait *Mini Master Repo Agreement (MRA)* Syariah. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/4/PBI/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada ketentuan ini, alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah diperluas mencakup transaksi surat berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali (*repurchase agreement*) atau disebut juga dengan *Repo* Syariah. Melalui pengaturan *Repo* Syariah ini, maka jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh bank syariah bertambah, melengkapi instrumen syariah yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA). Pada tanggal 2 Juli 2015 delapan belas bank syariah anggota *Islamic Global Market Association (IIGMA)* sepakat untuk menandatangani kesepakatan untuk menggunakan *Mini Master Repo Agreement (MRA)* Syariah sebagai dokumen acuan pada transaksi *repo* berdasarkan prinsip syariah. Kesepakatan ini dilakukan mempertimbangkan besarnya potensi industri keuangan syariah di Indonesia, namun disisi lain pengelolaan likuiditas dalam keuangan syariah masih belum optimal. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan pengelolaan likuiditas industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah dapat terjaga serta mampu meningkatkan transaksi baik di pasar sukuk maupun di pasar uang antarbank syariah, dan pada akhirnya akan semakin mendorong pendalaman pasar keuangan.

11.4. TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

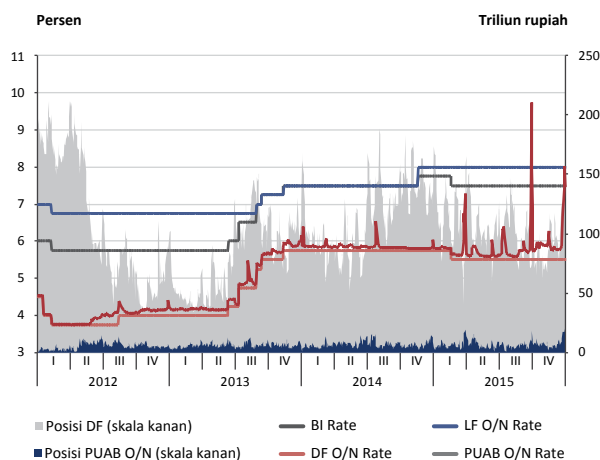
Transmisi Kebijakan Jalur Suku Bunga

Suku bunga PUAB *overnight (O/N)* rupiah pada tahun 2015 beberapa kali mengalami lonjakan signifikan, namun

bersifat temporer, dan kembali mendekati *Deposit Facility (DF) rate* seiring dengan kondisi likuiditas harian yang masih cukup tinggi. Suku bunga PUAB mengalami dengan kenaikan tertinggi pada bulan September 2015 (Grafik 11.5). Pada periode tersebut, kenaikan suku bunga PUAB O/N diikuti oleh suku bunga PUAB dalam tenor yang lebih panjang. Suku bunga PUAB rupiah tenor 1 minggu yang biasanya berada pada kisaran 6%, meningkat ke kisaran 6,5%. Demikian pula, tenor 1 bulan meningkat dari kisaran 6,5% ke kisaran 8%. Pada bulan yang sama, premi *swap* juga sempat mengalami peningkatan ke kisaran 18% untuk tenor 1 bulan sebagai dampak dari tingginya kebutuhan lindung nilai dari korporasi dan pergeseran struktur *supply* dan *demand* di PUAB rupiah. Meski demikian, premi *swap* dapat kembali turun ke kisaran 8% pada akhir bulan Oktober 2015. Kondisi likuiditas harian yang masih relatif tinggi mendorong suku bunga PUAB O/N kembali menurun pasca lonjakan suku bunga PUAB O/N. Kondisi likuiditas tersebut diindikasikan dengan rata-rata volume penempatan di DF/S selama semester kedua 2015 yang sebesar Rp97,2 triliun per hari, sementara volume di PUAB O/N hanya sebesar Rp6,9 triliun per hari. Likuiditas harian yang relatif tinggi tersebut terkait dengan kebutuhan bank untuk berjaga-jaga terutama menjelang akhir tahun, ketika kondisi surplus likuiditas menurun dan ketika terdapat ketidakpastian di pasar keuangan. Volatilitas di pasar PUAB dan pasar *swap* tersebut dapat saling merambat dan memengaruhi satu sama lain.⁴

Pergerakan suku bunga PUAB *overnight (O/N)* diikuti oleh tenor lainnya (non-O/N) dengan *spread* yang semakin

Grafik 11.5. Suku Bunga PUAB O/N

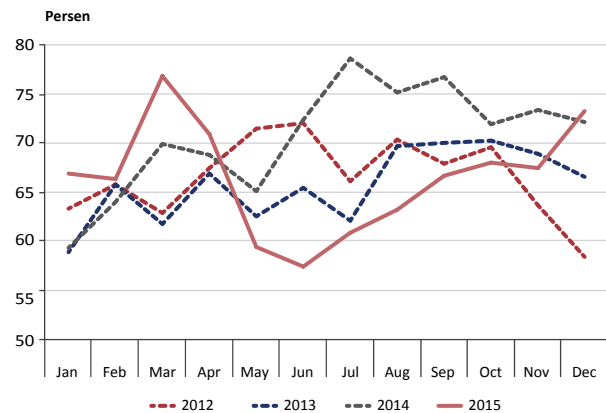


4 Kondisi ini dipengaruhi proses arbitrase antara likuiditas di PUAB dan pasar FX *swap* cenderung kurang optimal salah satunya karena adanya *institutional arrangement* di perbankan. *Institutional arrangement* tersebut misalnya dalam bentuk terbatasnya *credit line* dan perbedaan fungsi *desk* pasar uang (PUAB) dan pasar valas (FX *swap*).

melebar seiring *term premium* dan *risk premium* yang meningkat. Melebarnya *spread* suku bunga PUAB O/N dan non-O/N dipengaruhi oleh peningkatan volatilitas PUAB O/N selama 2015. Peningkatan volatilitas ini menimbulkan ketidakpastian biaya bagi bank sehingga memasukkan *term premium* yang lebih besar dan memengaruhi suku bunga pada tenor yang lebih panjang. Rata-rata *spread* (absolut) suku bunga PUAB O/N dan 1 minggu pada periode Jan – 21 Agustus 2015 sebesar 15 bps, sementara pada periode 24 Agustus – 31 Desember 2015 sebesar 46 bps. Dari sisi *risk premium*, heterogenitas pelaku di pasar uang antar bank, terutama dari sisi ukuran aset, cenderung menyebabkan segmentasi yang dapat memengaruhi *risk premium* pada suku bunga PUAB non-O/N. Bank yang meminjamkan dana harus memperhitungkan risiko kredit dan *funding liquidity risk* bank peminjam di tengah heterogenitas perbankan domestik tersebut. Selain itu, *market liquidity* yang relatif minim pada transaksi PUAB non-O/N juga cenderung menambah *risk premium* di transaksi tenor tersebut, sehingga memengaruhi lebarnya *spread* antara suku bunga PUAB O/N dan non O/N. Selama 2015, rata-rata volume transaksi harian PUAB tenor 2 minggu dan lebih lama dari 2 minggu masing-masing hanya sebesar Rp1,1 triliun atau 9,45% dari total PUAB dan Rp263 miliar atau 2,26% dari total PUAB (Grafik 11.6 dan 11.7).

Penurunan suku bunga deposito selain dipengaruhi likuiditas yang longgar hingga triwulan III 2015, juga sebagai penyesuaian atas tingginya suku bunga deposito tahun 2014 karena meningkatnya kompetisi. Pada tahun 2015, suku bunga deposito turun sebesar 84 bps ke level 7,94% yang dipengaruhi oleh penurunan kompetisi perbankan dalam menarik DPK, sejalan dengan masih tingginya pertumbuhan DPK hingga triwulan III 2015 dan menurunnya penyaluran kredit. Penurunan suku

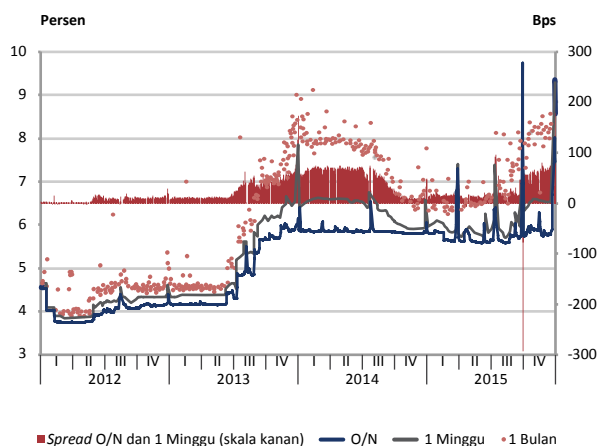
Grafik 11.7. Porsi PUAB O/N terhadap total PUAB



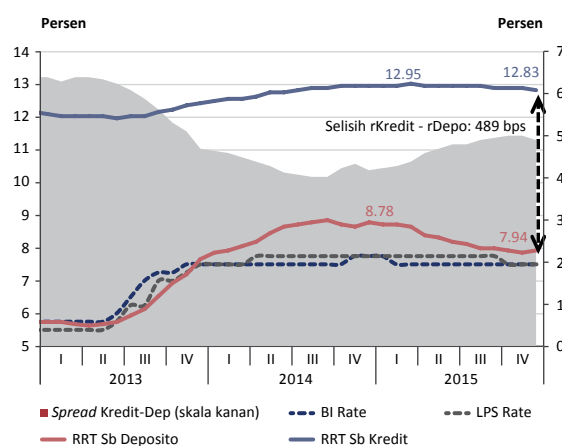
bunga deposito yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit berdampak pada *spread* suku bunga deposito dan suku bunga kredit 2015 yang meningkat. *Spread* suku bunga perbankan tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 489 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2014 yang sebesar 417 bps. *Spread* suku bunga perbankan Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan *spread* suku bunga perbankan di negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan Singapura, yang berada pada kisaran 1,6-2,0% (Grafik 11.8).

Penurunan suku bunga deposito diikuti oleh turunnya suku bunga kredit namun dengan besaran yang lebih rendah dan waktu penyesuaian yang lebih lambat. Penurunan suku bunga kredit yang lebih rendah ini dipengaruhi oleh meningkatnya risiko kredit yang ditunjukkan oleh tren peningkatan rasio kredit bermasalah atau *non performing*

Grafik 11.6. Suku Bunga PUAB O/N dan Non-O/N



Grafik 11.8. Suku Bunga Deposito dan Kredit



loan (NPL) pada tahun 2015. Sementara itu, efek tunda penurunan yang lebih lama disebabkan oleh proses penyesuaian internal bank yang memerlukan waktu setelah penurunan suku bunga deposito. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 12,83%, turun 12 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2014 yang tercatat sebesar 12,95%. Berdasarkan jenis penggunaannya, semua jenis suku bunga kredit turun dengan besaran yang bervariasi. Dibandingkan dengan akhir tahun 2014, suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) turun 33 bps menjadi 12,46%, suku bunga Kredit Investasi (KI) turun 24 bps menjadi 12,12%, sedangkan suku bunga Kredit Konsumsi (KK) naik 30 bps menjadi 13,88%. Perbedaan besaran penurunan kelompok suku bunga kredit, khususnya suku bunga KK yang naik, dipengaruhi oleh NPL kelompok kredit ini yang lebih tinggi dibandingkan NPL rata-rata industri.

Transmisi Kebijakan Jalur Likuiditas

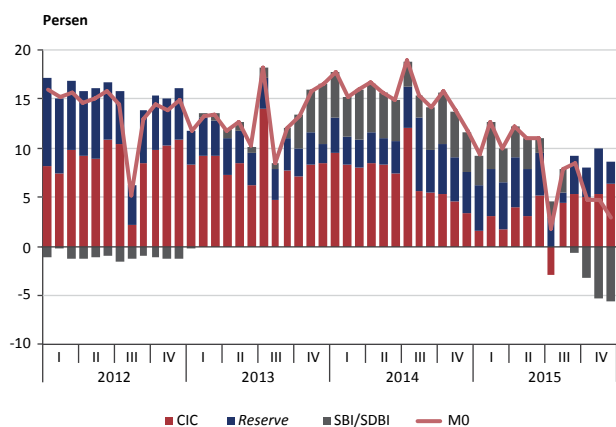
Pertumbuhan uang primer (M0) pada 2015 melambat signifikan dari 11,77% pada Desember 2014 menjadi 2,99%. Perlambatan pertumbuhan M0 terutama dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan GWM sekunder yang dipenuhi oleh SBI dan SDBI. Perlambatan pertumbuhan M0 juga dipengaruhi saldo giro bank di Bank Indonesia yang melambat akibat penurunan GWM Primer pada bulan Desember 2015 serta perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sementara itu, pertumbuhan uang kartal tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2014. Berdasarkan faktor yang memengaruhi, perlambatan pertumbuhan M0 pada 2015 didorong oleh menurunnya pertumbuhan *net foreign asset* (NFA) dan *net domestic asset* (NDA). Pertumbuhan M0 yang melambat sejak awal 2015 akibat penurunan NFA terkait dengan upaya stabilisasi

rupiah. Sementara itu, pertumbuhan NDA yang menurun disebabkan oleh penurunan posisi OPT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank di tengah terbatasnya ekspansi rekening pemerintah (Grafik 11.9).

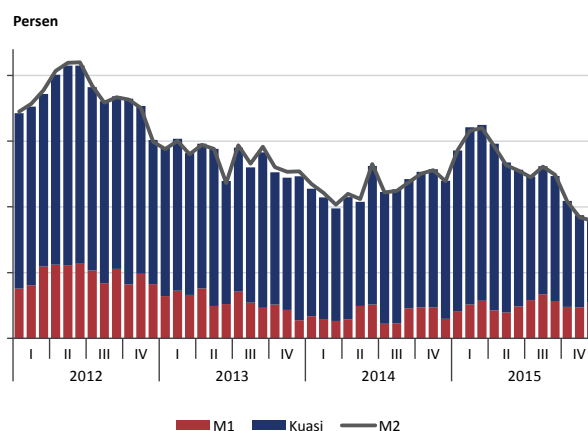
Sejalan dengan perlambatan M0, pertumbuhan M2 juga turun meskipun pertumbuhan M1 meningkat. Pertumbuhan M2 pada tahun 2015 turun menjadi 8,95% dari 11,95% pada tahun 2014, yang berdasarkan komponen, didorong oleh penurunan pertumbuhan uang kuasi (Grafik 11.10). Uang kuasi tumbuh melambat menjadi 8,37% pada tahun 2015 dari 13,90% pada tahun 2014. Sementara itu, pertumbuhan M1 meningkat menjadi 12,00% pada tahun 2015 dari 6,22% pada tahun 2014. Kenaikan pertumbuhan M1 tersebut ditopang oleh kenaikan giro rupiah dan permintaan uang kartal (Grafik 11.11 dan 11.12). Perlambatan pertumbuhan uang kuasi yang mendorong perlambatan M2 dikontribusi oleh perlambatan pertumbuhan deposito rupiah yang merupakan komponen terbesar uang kuasi (Grafik 11.13). Pertumbuhan deposito rupiah pada tahun 2015 tercatat sebesar 7,55%, turun signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 24,32%, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tren penurunan suku bunga deposito.

Berdasarkan faktor yang memengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 disebabkan perlambatan pertumbuhan NFA dan NDA. Pertumbuhan NFA pada tahun 2015 tercatat sebesar 3,0%, turun dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,3%. Penurunan pertumbuhan NFA dikontribusi oleh penurunan NFA BI, terkait dengan upaya stabilisasi nilai tukar. Sementara itu, NFA bank umum masih tumbuh positif (Grafik 11.14) sejalan dengan turunnya pinjaman yang diterima bank umum dari pihak nonresiden. NDA juga melambat dari 12,9% pada tahun 2014 menjadi 11,1%

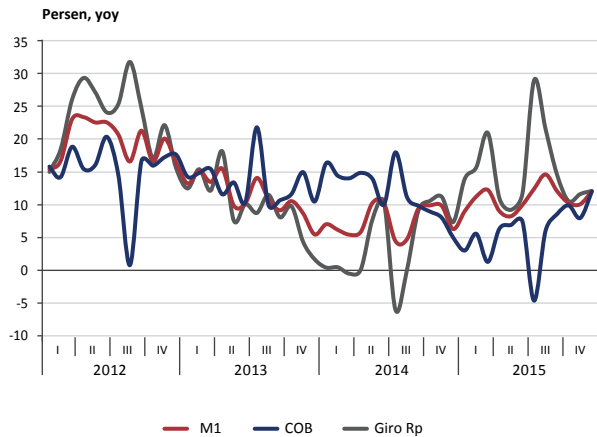
Grafik 11.9. Kontribusi Komponen M0



Grafik 11.10. Kontribusi Komponen M2



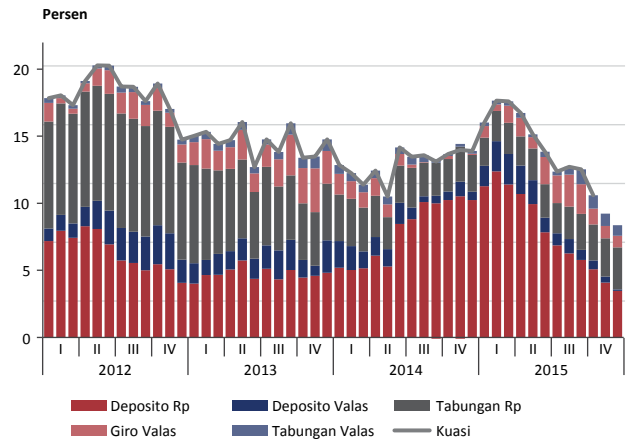
Grafik 11.11. Komponen M1



pada tahun 2015. Penurunan kontribusi NDA terhadap pertumbuhan M2 didorong terutama oleh perlambatan pertumbuhan kredit. Perlambatan pertumbuhan ekonomi 2015 dan kebijakan moneter bias ketat berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan kredit dari 11,6% pada 2014 menjadi 10,45% pada 2015. Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi pada hampir semua sektor ekonomi terutama sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Sementara itu, pertumbuhan kredit untuk listrik, gas, dan air meningkat signifikan pada tahun 2015. Namun demikian, sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap total kredit sehingga belum cukup kuat menyokong pertumbuhan kredit 2015.

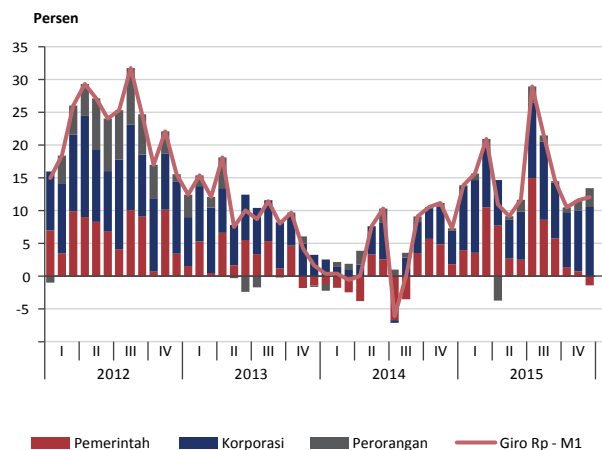
Secara umum, perkembangan likuiditas perekonomian tetap sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Di tengah

Grafik 11.13. Kontribusi Komponen Kuasi Terhadap M2

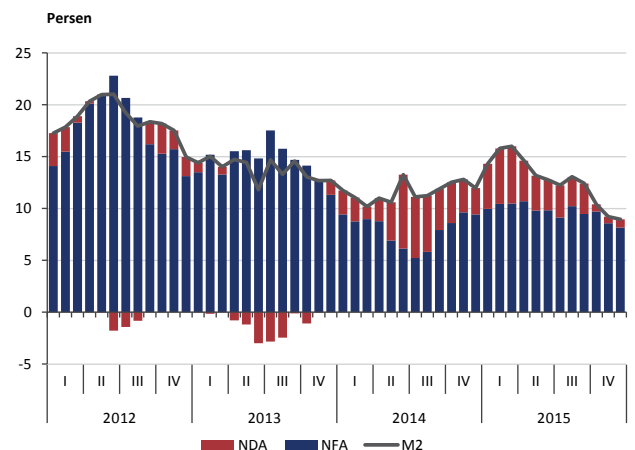


pertumbuhan M2 pada 2015 yang turun sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, indikator velositas uang M2 relatif stabil. Hal ini mengindikasikan perkembangan likuiditas cukup memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi domestik tanpa memberikan tekanan tambahan pada sisi harga (Grafik 11.15). Sementara itu, angka pengganda uang (*money multiplier*) M2 pada akhir tahun 2015 sedikit meningkat. Kenaikan ini terutama akibat penurunan GWM Primer dalam Rupiah pada Desember 2015. Namun, apabila faktor perubahan GWM dihilangkan, angka pengganda uang M2 relatif stabil (Grafik 11.16).

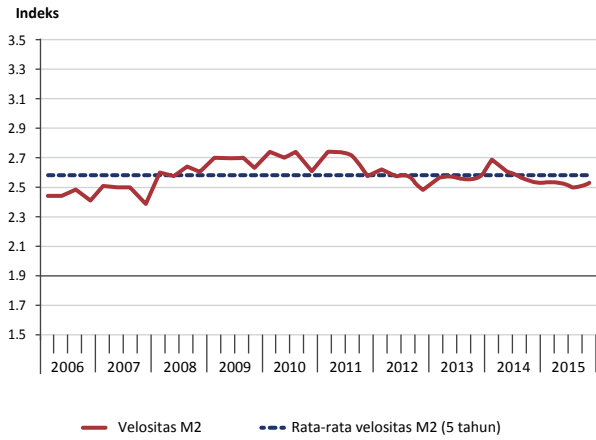
Grafik 11.12. Kontribusi Komponen Giro Rupiah



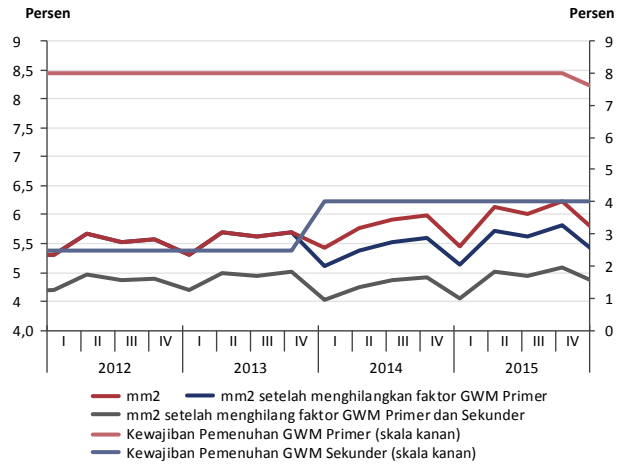
Grafik 11.14. Kontribusi Faktor M2



Grafik 11.15. Velocitas M2



Grafik 11.16. Money Multiplier M2 dan Kewajiban Pemenuhan GWM





Keterangan gambar:

Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial yang cenderung akomodatif pada tahun 2015 untuk menahan perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia melonggarkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti.



Bab 12

Kebijakan Makroprudensial

Pada tahun 2015, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk menahan laju perlambatan pertumbuhan kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial tersebut meliputi: pelonggaran ketentuan pemberian kredit properti dan kendaraan bermotor, perluasan sumber pendanaan intermediasi perbankan melalui ketentuan *Loan to Funding Ratio* (LFR), kebijakan mendorong pemberian kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kebijakan untuk mengurangi perilaku prosiklikalitas perbankan yang berlebihan melalui kebijakan *countercyclical buffer* (CCB).

Perekonomian yang stabil dan berkesinambungan memerlukan kontribusi yang cukup besar dari sistem keuangan. Pertumbuhan perekonomian global yang terus melambat pada tahun 2015 telah berdampak terhadap peningkatan risiko di sistem keuangan domestik, terutama yang bersumber dari ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, penurunan harga komoditas, dan respons kebijakan moneter yang bervariasi dari berbagai bank sentral. Dari sisi domestik, penurunan aliran masuk modal asing serta peningkatan tekanan nilai tukar yang menyebabkan penurunan kinerja korporasi turut memberi tekanan pada kinerja sistem keuangan. Namun demikian di tengah meningkatnya risiko baik pada perekonomian global maupun domestik, kondisi sistem keuangan secara umum masih terjaga. Terjaganya kondisi stabilitas sistem keuangan tersebut mempunyai peran penting terhadap berkembangnya fungsi intermediasi, meningkatnya pembiayaan ekonomi, serta penguatan resiliensi dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Sebagai respons dari kuatnya tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan sebagai dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada tahun 2015 menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan kontrasiklikal dalam rangka mendorong perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial tersebut merupakan bagian dari strategi bauran kebijakan Bank Indonesia dalam rangka merespons tantangan ekonomi global dan domestik. Kebijakan makroprudensial mempunyai peran penting dalam mencegah dan mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, kebijakan makroprudensial difokuskan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan.

Pada Juni 2015, Bank Indonesia menaikkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) untuk kredit properti dan menurunkan uang muka (*down payment*) untuk kredit kendaraan bermotor yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit pada sektor properti dan otomotif. Kemudian untuk memberikan ruang bagi bank dalam meningkatkan peran intermediasinya, Bank Indonesia memperluas sumber pendanaan intermediasi melalui penerbitan surat-surat berharga yang diperhitungkan dalam *Loan to Financing Ratio* (LFR) sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian insentif dan disinsentif bagi bank dalam pencapaian target penyaluran kredit UMKM. Selain itu, menjelang akhir tahun 2015 Bank

Indonesia juga mengeluarkan ketentuan *Countercyclical Buffer* (CCB) untuk memperkuat permodalan Bank sehingga dapat mencegah risiko sistemik.

Selain kebijakan tersebut diatas, secara reguler Bank Indonesia juga melakukan *surveillance* dan asesmen atas stabilitas sistem keuangan dalam rangka mengidentifikasi sumber-sumber kerentanan dan ketidakseimbangan, terutama kepada bank-bank besar. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan tematik dan pemeriksaan kepatuhan (*compliance*). Pemeriksaan tematik dilakukan untuk menilai dan meneliti lebih lanjut mengenai kondisi dan praktek perbankan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Sementara pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk menilai dan meyakini bahwa bank telah melaksanakan dan mematuhi berbagai ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi dengan otoritas terkait, baik dilakukan secara bilateral maupun melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), terutama dalam pencegahan dan penanganan krisis.

Stance pelanggaran kebijakan makroprudensial yang telah dipersiapkan sejak awal tahun berhasil mengantisipasi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan yang cukup berat pada tahun 2015. Terjaganya stabilitas sistem keuangan tercermin pada Indeks Stabilitas Sistem Keuangan yang tetap berada pada level normal yakni sebesar 0,93 atau sedikit meningkat dari tahun 2014 sebesar 0,79. Angka indeks tersebut masih jauh di bawah *threshold* krisis sebesar 2,0. Stabilitas sistem keuangan cukup terjaga seiring dengan tingginya ketahanan sektor perbankan yang diindikasikan melalui rasio kecukupan permodalan bank, di tengah tren perlambatan kredit dan pendanaan bank. Ketahanan ini didukung pula oleh ekspansi anggaran pemerintah dan berbagai stimulus fiskal yang dikeluarkan Pemerintah pada tahun 2015.

12.1. PELONGGARAN KETENTUAN LOAN/ FINANCING TO VALUE RATIO (LTV/FTV)

Pelonggaran kebijakan makroprudensial pertama yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 2015 adalah pelanggaran LTV/FTV untuk kredit properti dan uang muka (*down payment*) untuk kredit otomotif. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan to Value* (LTV) atau Rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Adapun tujuan

pelonggaran kebijakan LTV/FTV dan uang muka tersebut adalah untuk mendorong pemulihan perekonomian yang melambat, khususnya melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor properti dan sektor otomotif, termasuk pembiayaan dengan menggunakan akad syariah. Pelonggaran kebijakan LTV/FTV dan uang muka tersebut tetap disertai prinsip kehati-hatian dengan mengaitkan pelonggaran kredit atau pembiayaan dengan pemenuhan rasio kredit/pembiayaan bermasalah.

Pelonggaran tersebut mencakup beberapa hal, terutama terkait besaran rasio LTV/FTV dengan kenaikan 10% pada semua kelompok properti yaitu rumah tapak, rumah susun dan ruko/rukan maupun untuk pemilikan rumah pertama, kedua maupun ketiga. Besaran rasio LTV/FTV dibedakan juga berdasarkan akad pembiayaan syariah, yaitu rasio yang sama untuk akad *murabahah* dan *istisna'*. Sementara untuk akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) lebih tinggi 5% untuk properti tipe > 70. Dengan demikian, kisaran rasio LTV/FTV menjadi 65% hingga 90% dengan rasio menjadi semakin besar apabila tipe properti semakin kecil dan untuk kepemilikan pertama (Tabel 12.1). Sebaliknya, untuk tipe properti yang semakin besar dan kepemilikan properti selanjutnya, maka rasionya akan semakin kecil. Sementara untuk kredit kendaraan bermotor, besaran penurunan uang muka berlaku sama sebesar 5% untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 atau lebih yang bersifat nonproduktif (Tabel 12.2).

Pelonggaran ketentuan ini memungkinkan bank untuk memberikan rasio LTV/FTV yang lebih besar bagi nasabahnya. Ketentuan ini berlaku untuk bank yang memiliki rasio kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan bruto (*gross*) dan rasio kredit/pembiayaan properti bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan properti secara bruto kurang dari 5%. Hal yang sama juga berlaku jika bank menurunkan uang

Tabel 12.2. Besaran Rasio Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan	Bank	
	Konvensional	Syariah
Roda 2	20%	20%
Roda 3 atau lebih non-produktif	25%	25%
Roda 3 atau lebih produktif	20%	30%

muka untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB). Sementara untuk bank yang memiliki rasio kredit/pembiayaan bermasalah lebih tinggi dari ketentuan, maka besaran rasio LTV/FTV yang digunakan bank mengalami penurunan 10% untuk kredit properti dan pembiayaan syariah dengan akad *murabahah* dan *istisna'*. Sedangkan untuk pembiayaan syariah dengan akad MMQ dan IMBT rasionya tidak mengalami perubahan.

Terkait dengan pembelian properti secara inden, ketentuan LTV/FTV tidak mengalami perubahan. Hal ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Bank hanya dapat memberikan kredit atau pembiayaan properti secara inden untuk kredit/pembiayaan pertama dan terdapat perjanjian kerja sama antara Bank dengan pengembang yang harus memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai yang diperjanjikan. Selain itu, pengembang juga harus memberikan jaminan, baik yang berasal dari pengembang sendiri maupun pihak lain apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau diserahkan sesuai perjanjian.

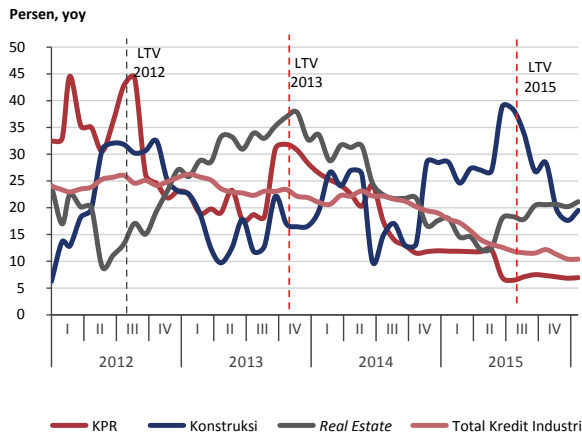
Pelonggaran kebijakan LTV/FTV berhasil menahan perlambatan pertumbuhan kredit properti (KPR) yang dalam tren menurun (Grafik 12.1). Sementara untuk kredit *real estate* telah meningkat hingga tumbuh mencapai

Tabel 12.1. Besaran Rasio LTV Kredit Properti dan FTV Pembiayaan Properti Syariah

Kredit Properti dan Kredit Properti Syariah Akad Murabahah dan Istishna'			
Tipe Properti (m ²)	KP dan KP Syariah		
	I	II	III
Rumah Tapak			
Tipe >70	80%	70%	60%
Tipe 22-70	-	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	-	-
Rumah Susun			
Tipe >70	80%	70%	60%
Tipe 22-70	90%	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	80%	70%
Ruko/Rukan	-	80%	70%

Kredit Properti Syariah Akad MMQ dan IMBT			
Tipe Properti (m ²)	KP dan KP Syariah		
	I	II	III
Rumah Tapak			
Tipe >70	85%	75%	65%
Tipe 22-70	-	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	-	-
Rumah Susun			
Tipe >70	85%	75%	65%
Tipe 22-70	90%	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	80%	70%
Ruko/Rukan	-	80%	70%

Grafik 12.1. Pertumbuhan Kredit Properti



21,1% di akhir tahun 2015, meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan level pertumbuhan terendah pada bulan Maret 2015 sebesar 13,6% (yoy). Namun demikian, dampak penurunan uang muka untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) belum terasa, dimana pertumbuhan KKB masih terus melambat hingga akhir tahun 2015 (Grafik 12.2). Perlambatan pertumbuhan KKB tersebut disebabkan oleh penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat untuk barang sekunder, perlambatan aktivitas produksi dan kegiatan dunia usaha seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015.

Grafik 12.2. Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor



12.2. PERLUASAN SUMBER PENDANAAN INTERMEDIASI MELALUI ATURAN *LOAN TO FUNDING RATIO (LFR)*

Selain melonggarkan ketentuan LTV/FTV dan uang muka untuk meningkatkan permintaan kredit properti dan kredit kendaraan bermotor, Bank Indonesia juga mendorong peningkatan kapasitas intermediasi perbankan. Bank Indonesia memperluas sumber pendanaan intermediasi perbankan melalui penerbitan surat berharga yang diperhitungkan dalam *Loan to Financing Ratio (LFR)* sehingga tidak hanya mengandalkan DPK.¹ Sebelumnya, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* digunakan sebagai indikator kinerja intermediasi perbankan dan penetapan kisaran target intermediasi yang dipergunakan Bank Indonesia. Penggunaan indikator LFR menggantikan LDR akan meningkatkan ruang penyaluran kredit perbankan walaupun dengan kisaran target yang tetap.

Bank Indonesia memandang perlu untuk memperluas komponen pendanaan intermediasi dari semula hanya mencakup simpanan atau DPK (*deposit*). Perluasan komponen pendanaan intermediasi dilakukan efektif sejak 1 Agustus 2015, dengan memperhitungkan surat berharga yang diterbitkan bank. Perluasan cakupan pendanaan (*funding*) akan memberikan ruang kepada bank sehingga dapat melakukan ekspansi kredit yang lebih besar. Bank Indonesia mengatur kriteria surat berharga yang diterbitkan bank untuk dapat diperhitungkan dalam LFR, yakni diterbitkan dalam bentuk *medium term notes (MTN)*, *floating rate notes (FRN)*, dan obligasi selain obligasi subordinasi. Ketiga jenis surat berharga tersebut harus ditawarkan melalui penawaran umum terbatas dan memiliki peringkat (*rating*) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi. Selain itu, surat berharga tersebut harus dimiliki oleh investor nonbank dan ditatausahakan oleh lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.

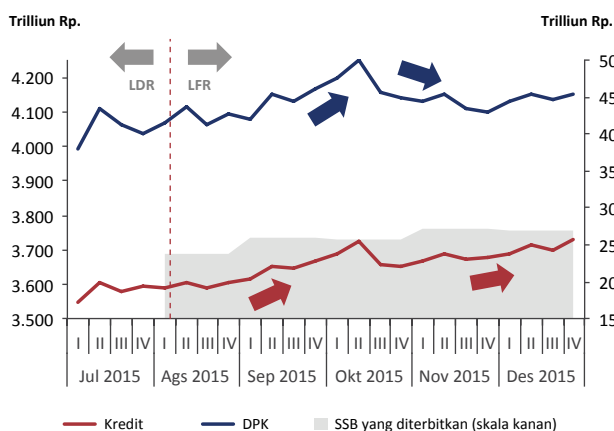
Kisaran target LFR yang ditetapkan Bank Indonesia sama dengan kisaran target LDR yang digantikan, yakni 78% sebagai batas bawah dan 92% sebagai batas atas. Dalam hal bank memiliki LFR di luar kisaran tersebut, maka Bank Indonesia mengenakan disinsentif berupa tambahan kewajiban GWM yang harus disetorkan ke

1 Dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas PBI No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bagi Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

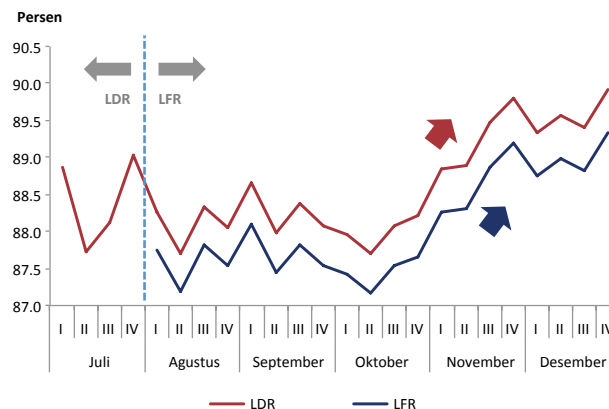
Bank Indonesia. Adapun parameter disinsentif bawah (LFR < 78%) sebesar 0,1 dan parameter disinsentif atas (LFR > 92% dan CAR < 14%) sebesar 0,2 yang masing-masing dikalikan dengan selisih LFR bank dengan target untuk selanjutnya dikalikan dengan DPK rupiah masing-masing bank untuk memperoleh besaran tambahan kewajiban GWM tersebut. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memberikan insentif berupa pelanggaran batas atas LFR menjadi 94% bagi Bank yang memenuhi target pencapaian kredit UMKM dan memiliki kualitas kredit yang baik, yaitu apabila rasio NPL total kredit bank secara bruto (*gross*) < 5% dan rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (*gross*) < 5%.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga akhir tahun 2015, jumlah surat berharga yang telah diterbitkan Bank mengalami peningkatan setelah pemberlakuan ketentuan LFR (Grafik 12.3). Selain itu, perluasan cakupan pendanaan intermediasi dari *deposit* menjadi *funding* juga menurunkan level LFR (lebih rendah dari LDR) sehingga menambah ruang bagi bank untuk meningkatkan kredit (Grafik 12.4). Namun demikian, pada periode yang sama terjadi perlambatan pertumbuhan DPK perbankan sehingga pertumbuhan DPK lebih rendah dari pertumbuhan kredit. Perlambatan tersebut tidak terlepas dari perlambatan perekonomian secara keseluruhan yang menurunkan pendapatan korporasi dan rumah tangga sehingga sejak Oktober 2015 terjadi peningkatan LFR yang didorong oleh penurunan simpanan.

Grafik 12.3. GWM LFR dan SSB Diterbitkan Bank



Grafik 12.4. LDR dan LFR Perbankan



12.3. KEBIJAKAN MENDORONG PENGEMBANGAN UMKM

Kebijakan dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dilakukan untuk mendukung pencapaian tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dari sisi *supply* maupun terlaksananya fungsi intermediasi perbankan yang lebih seimbang. Strategi pengembangan UMKM tersebut diimplementasikan melalui dua pendekatan utama, yakni perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan, serta peningkatan kapasitas UMKM. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai program, antara lain penyempurnaan ketentuan, peningkatan akses keuangan UMKM, dan peningkatan kapasitas UMKM.

Sejalan dengan diberlakukannya PBI No.17/11/PBI/2015, juga dilakukan penyempurnaan atas PBI No.17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas PBI No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penyempurnaan PBI ini merupakan perwujudan bauran antara kebijakan pengembangan UMKM dan kebijakan makprudensial. Bagi bank yang dapat mencapai target pemenuhan kredit UMKM lebih cepat dari tahapan yang ditentukan dengan rasio NPL terjaga akan memperoleh kelonggaran batas atas LFR. Sebaliknya, bank yang tidak memenuhi target kredit UMKM sesuai ketentuan dan/atau memiliki rasio NPL 5% atau lebih, akan terkena disinsentif berupa pengurangan jasa giro sebesar 0,5% ditambah dengan 0,1 dikalikan selisih antara rasio kredit UMKM yang ditetapkan dengan yang dicapai bank. Sedangkan bagi bank yang dapat memenuhi target rasio kredit UMKM, namun memiliki rasio NPL 5% atau lebih hanya dikenakan pengurangan jasa

giro sebesar 0,5%. Selain itu, bagi bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan UMKM juga diberikan insentif berupa penyediaan pelatihan bagi pejabat kredit (*account officer*) (AO) UMKM Bank, pelatihan bagi usaha mikro dan kecil (UMK), fasilitasi pemanfaatan pemeringkatan kredit usaha kecil dan menengah (UKM), publikasi keberhasilan bank, serta pemberian penghargaan kepada bank.

Guna meningkatkan kapasitas UMK dalam menyediakan informasi keuangan dalam rangka akses pembiayaan kepada lembaga keuangan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun modul Laporan Keuangan sederhana bagi UMK. Modul tersebut terdiri dari Pedoman Umum, Pedoman Teknis dan Modul Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) UMK Perorangan dan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) bagi UMK yang diinisiasi Bank Indonesia pada tahun 2014. Selain itu, untuk lebih memudahkan UMK menghasilkan laporan keuangan sederhana, Bank Indonesia juga telah mengembangkan *tools/prototype* awal aplikasi PTK yang dapat digunakan melalui *smartphone (android)* dan dapat diunduh secara gratis melalui *playstore*. Pengembangan *tools/prototype* awal mengacu kepada Pedoman Teknis dan Modul Pelatihan PTK yang telah disusun sebelumnya, serta telah disimulasikan kepada beberapa UMK dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk disempurnakan.

Dalam meningkatkan pembiayaan di sektor pertanian dan sebagai tindak lanjut dari kajian tahun 2014, Bank Indonesia melaksanakan *pilot project* pembiayaan rantai nilai atau *value chain financing (VCF)*. Program pembiayaan rantai nilai ini bertujuan untuk mengetahui *key success factors* pembiayaan VCF agar dapat diterapkan pada skala yang lebih luas. Dalam *pilot project* dilakukan restrukturisasi rantai nilai, antara lain restrukturisasi pola tanam, kelembagaan, pasar serta pembiayaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengakses pembiayaan. Pada akhir *pilot project*, telah disalurkan kredit komersial atas dasar skema VCF kepada kluster binaan Bank Indonesia. Adapun *key success factors* dari pembiayaan rantai nilai, antara lain (i) keterlibatan seluruh pelaku rantai nilai, (ii) adanya pasar terstruktur, (iii) penerapan sistem produksi berbasis permintaan pasar, (iv) penerapan sistem produksi kolektif dengan aplikasi teknologi (pola tanam, *good agricultural practices*, pengolahan pascapanen), (v) pendampingan bagi pelaku rantai nilai, dan (vi) layanan pembiayaan pedesaan.

Pada tahun 2015 pengembangan kluster tetap berbasis komoditas ketahanan pangan atau komoditas yang

menjadi sumber tekanan inflasi. Penetapan target kluster tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok Bank Indonesia, yaitu stabilitas harga, khususnya pada komoditas *volatile food*. Bank Indonesia telah berhasil melakukan replikasi tiga model bisnis kluster ketahanan pangan (cabai merah, bawang merah dan sapi potong) di empat provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam rangka mendorong dan memotivasi pelaksanaan program pengembangan kluster, Bank Indonesia juga melaksanakan program penghargaan kinerja (*championship*) kluster ketahanan pangan. Program ini merupakan salah satu pendekatan untuk menginternalisasi pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengembangkan kluster sebagai upaya mendukung pengendalian inflasi di wilayahnya. Dari program tersebut dipilih kluster komoditas ketahanan pangan/komoditas sumber tekanan inflasi dengan kinerja terbaik yang tersebar di 43 wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia, baik binaan Bank Indonesia, Pemda/Dinas atau kerja sama Pemda dengan pihak lain. Penilaian kinerja kluster didasarkan pada beberapa faktor, antara lain modal sosial, kemitraan dan *networking/jaringan*, kompetensi dan keahlian, akses pasar, dan dukungan infrastruktur.

Di samping itu, pada tahun 2015 Bank Indonesia juga menyusun berbagai kajian, antara lain kajian strategi peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi MEA 2015 dan kajian dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin di pedesaan maupun pesisir. Dengan diberlakukannya MEA 2015 yang bertujuan mewujudkan pasar tunggal, basis produksi, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian dunia, perlu diketahui posisi UMKM Indonesia dibandingkan UMKM negara ASEAN lainnya, serta strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi MEA 2015. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kontribusi UMKM Indonesia dalam MEA, kinerja UMKM Indonesia perlu ditingkatkan dari segi produktivitas, kontribusi terhadap ekspor, partisipasi dalam jaringan produksi global dan regional serta kontribusi terhadap nilai tambah. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan faktor penentu daya saing UMKM, baik faktor internal (SDM, produktivitas, pemasaran, inovasi) maupun eksternal (kemudahan berusaha, akses keuangan dan permodalan, akses pasar, infrastruktur dan kondisi makroekonomi). Selain itu, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan terkait UMKM, yang semula lebih bersifat kesejahteraan sosial (perlindungan secara berlebihan) menjadi lebih fokus pada pendekatan bisnis melalui fasilitasi untuk memperoleh akses. Hal ini disebabkan UMKM memerlukan akses terhadap input (bahan baku,

SDM, barang modal), pembiayaan maupun pasar bagi produk atau jasa yang dihasilkan.

Untuk meningkatkan akses keuangan bagi komunitas masyarakat di sektor perikanan yang belum terhubung dengan layanan lembaga keuangan atau *unbanked*, Bank Indonesia melakukan kajian potensi keuangan masyarakat *unbanked* di wilayah pesisir. Kajian dilakukan di dua lokasi, yaitu Demak (Jawa Tengah) dan Gorontalo Utara (Gorontalo). Kajian antara lain bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan usaha maupun bentuk akses keuangan dan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha masyarakat *unbanked* di pesisir memerlukan peningkatan kualitas dan karakter masyarakat. Sebagai contoh, diperlukan perubahan paradigma berpikir masyarakat agar mampu mengendalikan pola hidup konsumtif dan meningkatkan kesadaran untuk menyimpan sebagian hasil usahanya untuk pengembangan usaha. Selain itu, diperlukan upaya pemberdayaan dan pendampingan usaha secara kontinyu untuk mengatasi permasalahan terkait usaha sektor perikanan, yaitu mengembangkan mata pencaharian alternatif pada musim paceklik ikan, meningkatkan akses terhadap permodalan, teknologi dan informasi, pasar secara global, serta mengembangkan kelembagaan masyarakat melalui kelompok (koperasi). Terkait akses keuangan, diperlukan lembaga keuangan yang mampu menjangkau masyarakat dengan produk baik tabungan maupun pinjaman yang memiliki prosedur sederhana dan tidak rumit.

Dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di pedesaan maupun pesisir, tersedianya lembaga keuangan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah tersebut juga memegang peranan penting. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan *Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA)* melaksanakan proyek “*Documenting Global Best Practices on Sustainable Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Developing Countries*” yang merupakan proyek *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*. Proyek ini bertujuan mengembangkan jasa keuangan untuk masyarakat di sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui aplikasi *best practice* yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Kriteria *best practices* ditentukan berdasarkan *inclusion criteria* yang ditetapkan APRACA, antara lain produk yang ditawarkan (tabungan dan pembiayaan), jangkauan, agunan, inovasi dan tata kelola yang baik. Sebagai tahap awal, telah diidentifikasi *best practices* lembaga penyedia jasa keuangan/skema pembiayaan di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

(LKMA) Pincuran Bonjo di Sumatra Barat, BMT Sidogiri di Jawa Timur, dan KUD Mina Samudera di Banten. Keunggulan dari *best practices* tersebut antara lain merupakan lembaga yang didirikan atas dasar inisiatif dan sumberdaya lokal, mandiri dan menunjukkan kinerja yang baik. Jasa keuangan yang dikembangkan antara lain berupa tabungan sesuai kebutuhan dan pinjaman yang tidak selalu mempersyaratkan agunan, tetapi memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penjamin atau dengan sistem tanggung renteng. *Best practices* ini akan diimplementasikan dalam suatu *pilot project* di kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah) dan kabupaten Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat).

Diperkirakan sekitar 50% dari UMKM di Indonesia dimiliki wanita dengan skala usaha umumnya berukuran lebih kecil dan informal. Jumlah ini cukup signifikan apabila dikembangkan dan berpotensi mendorong perekonomian nasional. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan *International Finance Corporation (IFC)* melaksanakan kajian mengenai wanita wirausaha di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi UMKM khususnya yang dimiliki oleh wanita, kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi bagi *stakeholders*. Secara umum, UMKM menghadapi sejumlah tantangan terkait status informal serta keterbatasan sumber modal jangka panjang. Namun, tantangan bagi wanita wirausaha juga disebabkan keterbatasan waktu dan ruang gerak terkait peran ganda wanita dalam usaha dan keluarga. Selain itu, wanita wirausaha juga kurang akrab dengan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain direkomendasikan untuk lebih mempermudah pengajuan izin usaha bagi wanita wirausaha, insentif pengurangan pajak bagi wirausaha baru, serta pelatihan dan edukasi keuangan, termasuk penerapan *mobile banking* yang dapat mempermudah akses layanan keuangan bagi wanita wirausaha.

12.4. KEWAJIBAN PEMBENTUKAN COUNTERCYCLICAL BUFFER

Menjelang akhir 2015, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan yaitu kebijakan *Countercyclical Buffer (CCB)*. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen yang bertujuan untuk mencegahnya terjadinya risiko sistemik akibat penyaluran kredit yang berlebihan melalui pembentukan tambahan penyangga modal CCB. Hal ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas perbankan, yaitu penyaluran kredit yang berlebihan

pada saat perekonomian dalam fase ekspansi dan sebaliknya berkurangnya penyaluran kredit pada saat perekonomian sedang dalam fase kontraksi. Sebagai akibatnya, perilaku prosiklikalitas di fase ekspansi ekonomi dapat menyebabkan potensi risiko kredit meningkat. Hal ini tercermin dari kenaikan NPL (*Non Performing Loan*) di fase kontraksi ekonomi.

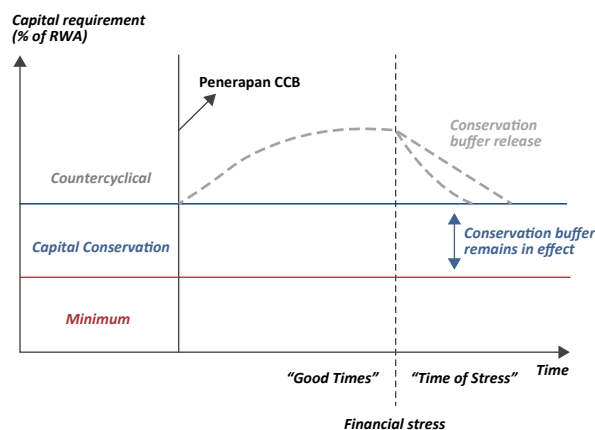
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan ketahanan bank. Ketahanan tersebut dapat dicapai dengan cara mengurangi penyaluran kredit yang berlebihan pada fase ekspansi ekonomi dan membentuk tambahan modal yang dapat digunakan bank untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi pada saat ekonomi dalam fase kontraksi.

Dalam rangka memperkuat ketahanan bank dari sisi permodalan, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) telah memperkenalkan tambahan permodalan (*buffer*) yaitu *conservation buffer*, *Countercyclical Buffer* (CCB) dan *capital surcharge*.² CCB merupakan tambahan modal yang ditujukan untuk mengurangi perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit dan meningkatkan ketahanan perbankan. Kebijakan CCB bersifat *time varying* yaitu *rate* CCB dapat berubah sesuai dengan kondisi makroekonomi dan sistem keuangan. Pembentukan tambahan modal CCB dilakukan pada fase ekspansi, khususnya pada saat diperkirakan terdapat potensi risiko sistemik dari pertumbuhan kredit yang berlebihan. Sementara itu, pelepasan (*release*) tambahan modal CCB yang telah dibentuk bank dapat dilakukan pada fase kontraksi agar dapat digunakan bank antara lain untuk mendukung penyaluran kredit dan menutup kerugian. Grafik 12.5 merupakan ilustrasi pembentukan dan pelepasan *buffer* CCB. Adapun besaran (*rate*) CCB pada kisaran 0–2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Mengacu kepada pedoman BCBS mengenai implementasi CCB dan juga kajian implementasi CCB yang telah dilakukan Bank Indonesia, telah diterbitkan PBI No.17/22/PBI/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*. Kebijakan ini perlu diimplementasikan di Indonesia mengingat adanya

2 *Conservation buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis, sedangkan *capital surcharge* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian. *Conservation buffer* berlaku bagi bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, sedangkan *capital surcharge* berlaku bagi bank yang ditetapkan berdampak sistemik (*Domestic Systemically Important Bank*, D-SIB)

Grafik 12.5. Ilustrasi Pembentukan dan Pelepasan *Buffer* CCB



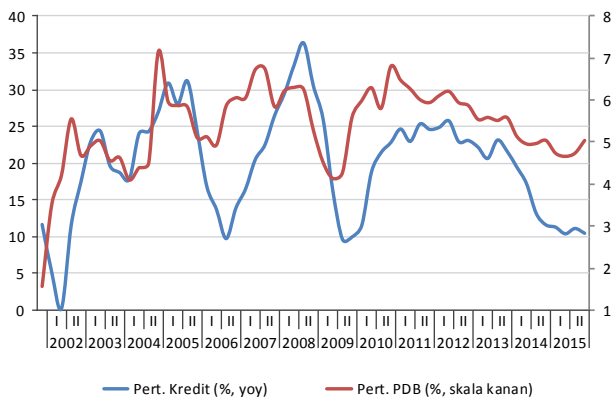
perilaku prosiklikal pada pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit di Indonesia (Grafik 12.6).

Keputusan implementasi CCB tidak bersifat mekanistik dalam artian bukan hanya didukung oleh informasi dari indikator utama dan indikator pelengkap yang bersifat kuantitatif, namun juga dikombinasikan dengan *judgement* yang bersifat kualitatif. Indikator utama merupakan panduan (*buffer guide*) yang digunakan untuk menghitung besaran (*rate*) CCB. Indikator utama yang akan digunakan adalah gap kredit terhadap PDB (*credit-to-GDP gap*). Sementara itu indikator pelengkap merupakan informasi pendukung yang meliputi antara lain siklus keuangan, indikator makroekonomi, indikator perbankan dan harga aset. CCB wajib dibentuk oleh bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk bank asing (KCBA).

Pembentukan tambahan modal CCB dilakukan bersamaan dengan *conservation buffer* dan *capital surcharge* yang dipenuhi dengan komponen Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1 – CET 1). Adapun pembentukan ketiga tambahan modal (*buffer*) tersebut dilakukan setelah pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko.³ Evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan CCB dilakukan Bank Indonesia paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Dalam PBI No.17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*, Bank Indonesia menetapkan *rate* CCB sebesar 0% per 1 Januari 2016, sehingga saat ini bank belum perlu untuk membentuk tambahan modal CCB.

3 Penjelasan permodalan bank umum dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank.

Grafik 12.6. Prosiklikalitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Kredit di Indonesia



12.5. SURVEILLANCE DAN PEMERIKSAAN MAKROPRUDENSIAL

Untuk mendukung tercapainya stabilitas makroekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan *surveillance* terhadap sistem keuangan dan pemeriksaan makroprudensial terhadap bank secara regular. *Surveillance* dan asesmen terhadap stabilitas sistem keuangan dilakukan untuk mengidentifikasi sumber kerentanan dan ketidakseimbangan, terutama kepada bank-bank besar, yang dapat memicu terjadinya risiko sistemik. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tematik dan pemeriksaan kepatuhan (*compliance*) atas ketentuan makroprudensial dan ketentuan Bank Indonesia lainnya.

Pemeriksaan tematik yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar dalam menelaah, menilai, dan meneliti lebih lanjut

mengenai kondisi dan praktek perbankan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada informasi spesifik mengenai risiko-risiko inheren bank. Risiko-risiko tersebut jika terakumulasi dapat berdampak tidak saja kepada bank secara individual tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, baik pada bank lain maupun pada industri perbankan secara keseluruhan. Sementara pemeriksaan kepatuhan dilakukan dalam rangka menilai kepatuhan bank dalam melaksanakan dan mematuhi berbagai ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Selama tahun 2015, Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa bank besar dalam rangka melakukan asesmen terhadap kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Salah satu hal yang diteliti terkait dengan tren volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Meskipun pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS dialami secara global, Bank Indonesia memiliki *concern* yang tinggi terhadap penyebab volatilitas nilai tukar rupiah. Hal ini mengingat dampaknya volatilitas nilai tukar rupiah terhadap perekonomian domestik cukup signifikan. Selain pemeriksaan tematik terkait volatilitas nilai tukar tersebut, pemeriksaan juga dilakukan dalam rangka mengetahui ketahanan likuiditas bank, serta kesiapan bank dalam melakukan *stress test*.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada bank, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan di bidang mikroprudensial. Kerja sama antara BI dan OJK secara intens dilakukan dalam bentuk Forum Koordinasi Makro dan Mikro (FKMM) yang senantiasa ditingkatkan melalui proses *sharing* informasi. Selain itu, koordinasi dan penyalarsan kebijakan juga dalam rangka melakukan *supervisory action* terhadap bank-bank yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik.



Keterangan gambar:

Pembayaran tol secara non tunai merupakan salah satu implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang selama ini telah berhasil meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mendorong berbagai inisiatif elektronifikasi di berbagai bidang ekonomi.



Bab 13

Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia 2015 difokuskan pada penguatan infrastruktur, antara lain melalui implementasi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* Generasi II serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II dan elektronifikasi pembayaran. Bank Indonesia juga mendorong kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI dan memperkuat pengawasannya melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, reformasi distribusi uang dan layanan kas juga ditempuh untuk menyediakan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, berkualitas, pecahan yang sesuai, dan tepat waktu. Upaya tersebut ditopang dengan *clean money policy* dan penanggulangan peredaran uang palsu.

Kebijakan penguatan infrastruktur sistem pembayaran menjadi perhatian utama Bank Indonesia selama tahun 2015. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem pembayaran agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kebijakan penguatan infrastruktur ditempuh melalui implementasi BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II serta SKNBI Generasi II. Keandalan sistem menjadi faktor penting agar dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian transaksi melalui sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sistem pembayaran dan penetapan biaya transaksi maksimal yang dapat dikenakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran. Sementara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan instrumen pembayaran nontunai, Bank Indonesia secara konsisten mendorong industri sistem pembayaran agar senantiasa memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaat atas penggunaan instrumen pembayaran nontunai dan menjadi terbiasa menggunakan instrumen pembayaran nontunai dalam bertransaksi (*less cash society*) yang merupakan tujuan utama dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Kebijakan Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan pelaksanaan kebijakannya berlandaskan pada tiga pilar kebijakan. Tiga pilar kebijakan pengelolaan uang rupiah adalah tersedianya uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas yang prima. Bank Indonesia terus berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal dalam kondisi yang layak edar untuk mendukung kegiatan perekonomian di seluruh wilayah NKRI. Disadari bahwa ketersediaan uang rupiah yang cukup dalam berbagai denominasi, kualitas uang rupiah yang layak edar dan luasnya geografis wilayah Indonesia, merupakan tantangan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas di bidang pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, untuk menjaga kepercayaan terhadap uang rupiah sebagai alat transaksi pembayaran, Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan peredaran uang rupiah palsu yang meningkat, terutama pada wilayah yang kegiatan ekonominya tinggi.

Tantangan-tantangan dalam pengelolaan uang rupiah harus dijawab melalui upaya nyata Bank Indonesia dengan menempuh beberapa kebijakan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan yang ditempuh selama tahun 2015 adalah tetap menjaga kecukupan posisi kas Bank

Indonesia. Selanjutnya, kebijakan reformasi distribusi uang dan layanan kas menjadi suatu aspek penting bagi Bank Indonesia untuk memperluas jangkauan ketersediaan uang rupiah yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Dalam hal ini, peran perbankan dan perusahaan penyelenggara jasa pengolahan uang (*cash in transit*) terus dioptimalkan dalam mendukung tugas Bank Indonesia dalam mengedarkan uang. Demikian pula, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan kerja sama dengan badan usaha milik negara sangat penting, terutama untuk menjaga kelancaran distribusi uang ke seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menempuh kebijakan meningkatkan standar kualitas uang rupiah terhadap penyeteroran uang rupiah oleh perbankan. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah uang rupiah tidak layak edar yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan tersebut ditempuh dengan pertimbangan kecukupan posisi kas Bank Indonesia dan terjaganya pasokan pencetakan uang dari Perum Peruri. Dari sisi perlindungan konsumen, Bank Indonesia mengakselerasi kegiatan sosialisasi ciri keaslian uang rupiah, baik dari frekuensi dan keberagaman kegiatan sosialisasi maupun media komunikasi publik. Dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan masyarakat semakin mengenali ciri keaslian uang rupiah dengan baik. Hal tersebut sekaligus dapat menjadi bekal bagi masyarakat agar terhindar dari penggunaan uang rupiah palsu. Selanjutnya untuk menahan peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia meningkatkan kepatuhan perbankan dalam melaporkan temuan uang rupiah palsu ke Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya terhadap pengungkapan kasus peredaran uang rupiah palsu untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan uang rupiah palsu.

13.1. KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Sistem pembayaran merupakan infrastruktur sistem keuangan yang harus dijaga kelancaran penyelenggaraannya agar mampu mendukung transaksi ekonomi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Untuk itu, peran sistem pembayaran sangat strategis dalam mendukung kestabilan moneter dan sistem keuangan. Selaku otoritas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa menempuh kebijakan yang mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang aman, andal dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank

Indonesia melakukan kebijakan penguatan infrastruktur guna meningkatkan keamanan dan keandalan sistem pembayaran, serta perluasan akses dalam rangka meningkatkan efisiensi melalui penggunaan instrumen nontunai. Selain itu, Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran dengan senantiasa memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Implementasi Penguatan Infrastruktur Sistem Pembayaran di Bank Indonesia

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar dengan jenis dan jangkauan layanan kepada masyarakat yang semakin luas. Untuk menyempurnakan infrastruktur sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia mengimplementasikan SKNBI Generasi II secara bertahap. SKNBI Generasi II telah menggunakan teknologi terkini dan standar internasional sehingga mampu mengakomodasi transaksi lintas negara (*cross border transactions*) dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. SKNBI Generasi II juga meningkatkan kecepatan transaksi dengan adanya penambahan periode setelmen transfer dana dari empat kali menjadi lima kali. Di sisi lain, adanya *Service Level Agreement* (SLA) atau batas waktu pengiriman transfer dana melalui SKNBI juga meningkatkan perlindungan konsumen.

Berdasarkan tahapan pengembangannya, SKNBI Generasi II dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pengembangan layanan yang telah ada sebelumnya (layanan transfer dana individual dan layanan kliring debit individual). Sedangkan tahap kedua meliputi pengembangan layanan *multiple credit transfer* dan *multiple debit transfer* untuk melayani kebutuhan pembayaran reguler masyarakat. Untuk tahap pertama, layanan SKNBI Generasi II diimplementasikan pada Juni 2015, sementara untuk tahap kedua akan diimplementasikan pada triwulan I 2016.

Selain SKNBI Generasi II, pengembangan sistem pembayaran juga diwujudkan melalui implementasi tiga sistem besar infrastruktur keuangan Indonesia Generasi II. Sistem pertama adalah BI-RTGS sebagai infrastruktur sistem transfer dan setelmen dana nilai besar (*high value payment system*). Sedangkan sistem kedua adalah BI-SSSS sebagai infrastruktur setelmen dan penatausahaan surat berharga, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) dan

Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI). Adapun sistem ketiga adalah Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP) sebagai infrastruktur sistem transaksi (*trading platform*) untuk transaksi lelang SBN, SBBI dan Pasar Uang. Ketiga sistem yang telah diperbarui tersebut mulai diimplementasikan pada 16 November 2015.

Implementasi ketiga sistem tersebut menandai era baru penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia. Era baru penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan bisnis dan teknologi yang terus berkembang. Kebutuhan bisnis terkait dengan perkembangan untuk pengelolaan likuiditas yang lebih efisien, ragam surat berharga yang semakin bertambah, dan kemudahan untuk melakukan transaksi. Sedangkan penggunaan infrastruktur *hardware* dan *software* terkini serta standarisasi *message* merupakan akomodasi terhadap teknologi terkini, sekaligus pembaharuan infrastruktur sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi I yang sudah berusia 10 tahun. Khusus untuk standarisasi *message*, yang merupakan adopsi *message format* ISO 15022 sebagai standar internasional sistem pembayaran, memberikan kemudahan bagi peserta untuk melakukan interkoneksi antara sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP Generasi II dengan sistem terkait di internal peserta masing-masing, maupun nantinya interkoneksi secara *cross border*. Dengan adanya pengembangan dari Generasi I ke Generasi II tersebut diharapkan dapat meningkatkan keandalan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan BI-RTGS dan BI-SSSS, memberikan kemudahan perubahan kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam melaksanakan transaksi dan penatausahaan SBN.

Perkembangan Tahapan Pengembangan Teknis *National Payment Gateway* (NPG)

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak positif terhadap sistem pembayaran ritel elektronik. Dampak tersebut dapat dilihat dari penggunaan instrumen pembayaran nontunai, seperti APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) dan Uang Elektronik yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun secara jumlah, volume, dan nilai transaksi APMK serta uang elektronik terus tumbuh, namun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya infrastruktur pembayaran ritel elektronik di Indonesia. Hal ini tercermin antara lain pada masih terfragmentasinya penyedia layanan sistem pembayaran ritel, dimana antara penyedia layanan sistem pembayaran

ritel yang satu dengan lainnya belum memiliki layanan yang setara. Masing-masing penyedia layanan sistem pembayaran juga memiliki anggota yang tidak saling terhubung satu sama lain (Gambar 13.1). Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dan ketidakmerataan akses layanan sistem pembayaran oleh masyarakat.

Di samping itu, fragmentasi yang terjadi juga menyebabkan penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran ritel elektronik menjadi belum efisien, mengingat interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara dan penyedia layanan pembayaran belum efektif. Keberadaan beberapa penyelenggara jasa *switching* yang tidak terkoneksi mengakibatkan bank/penyelenggara harus menjadi anggota pada semua penyelenggara *switching* yang ada. Sementara itu, ketersediaan berbagai *channel* pembayaran yang tidak interop mengakibatkan layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat juga terbatas.

Kondisi ini juga menyulitkan Bank Indonesia dalam mengakses dan menatausahakan data dan informasi transaksi sistem pembayaran ritel secara komprehensif. Sebagai bank sentral, kemampuan dalam melakukan pengawasan, mitigasi risiko, dan pengambilan kebijakan sistem pembayaran maupun stabilitas sistem keuangan menjadi tidak optimal. Data-data sistem pembayaran ritel belum tersedia, antara lain data transaksi APMK (lokal maupun internasional), transaksi *electronic banking* (*e-banking*), dan data transaksi *electronic commerce* (*e-commerce*).

Mencermati berbagai permasalahan tersebut, Bank Indonesia akan mengembangkan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway-NPG*), dengan tujuan mengintegrasikan berbagai *channel* pembayaran

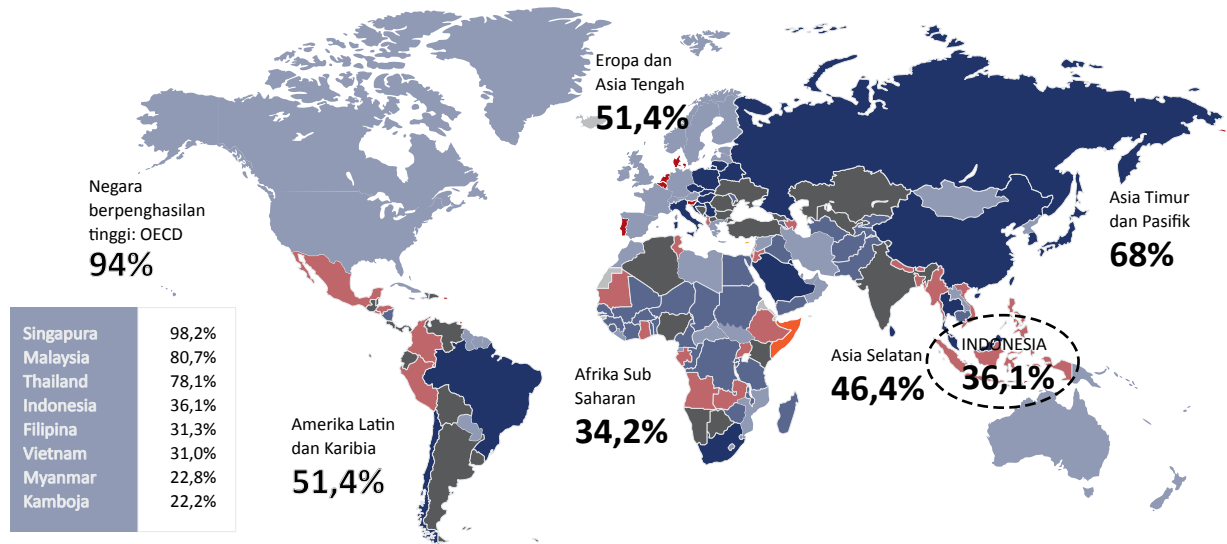
untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik. Rencana implementasi NPG ini telah melalui serangkaian riset yang mendalam dan pembelajaran dari *best practices* yang diterapkan negara lain. Saat ini, riset kebijakan yang dilakukan antara lain mencakup analisis perbandingan dari 13 (tiga belas) contoh negara di dunia yang telah mengimplementasikan NPG. Formulasi kebijakan implementasi NPG di Indonesia memerlukan kecermatan dan kehati-hatian untuk menyikapi *payment gateway (switching)* yang ada saat ini, baik domestik maupun global. Sebagai otoritas, Bank Indonesia tetap memperhatikan keberadaan pelaku penyedia *switching* pembayaran yang ada dengan maksud menciptakan kompetisi yang sehat, efisiensi biaya pemrosesan transaksi pembayaran, serta inovasi layanan yang mendukung kebutuhan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, Bank Indonesia memandang bahwa penggunaan infrastruktur pembayaran ritel yang saat ini telah tersedia harus diefektifkan dan dioptimalkan.

Hasil *benchmarking* terhadap negara-negara lain menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat 2 kelompok topologi infrastruktur yang digunakan untuk mendukung NPG, yaitu model *centralized* dan *distributed*. Apapun model yang akan dipergunakan, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam menentukan model operasional maupun institusi yang akan menjadi penyelenggara. Secara umum, penyelesaian implementasi NPG di Indonesia akan dibagi ke dalam empat tahapan berupa penerbitan kebijakan dasar NPG di tahun 2016, yang akan diikuti dengan pengembangan tahap pertama, dilanjutkan dengan kebijakan perluasan cakupan layanan NPG, dan diakhiri dengan pengembangan tahap akhir.

Pada tahun 2015, Bank Indonesia telah menyelesaikan lebih dari 80% penyusunan desain konsep NPG yang mencakup definisi, fungsi dan cakupan layanan NPG, tahapan pengembangan NPG, prioritas pengembangan, kepemilikan dan penyelenggaraan NPG, serta berbagai metode pengembangan yang akan dilakukan. Desain konsep NPG ini akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran (SP) dalam mengembangkan berbagai layanan transaksi pembayaran bagi masyarakat yang terintegrasi sesuai kebutuhan perekonomian nasional. Dengan adanya NPG, sistem pembayaran ritel yang ada di Indonesia diharapkan akan semakin efisien, aman dan andal, dan tentunya mengepankan kepentingan nasional. Sebagai regulator, Bank Indonesia akan meregulasi harga, *brand*, dan juga mekanisme sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran.

Gambar 13.1. Fragmentasi Layanan Sistem Pembayaran Ritel di Indonesia





Sumber: Global Findex – World Bank, 2014

Keuangan Inklusif

Kebijakan Keuangan Inklusif Bank Indonesia tahun 2015 masih melanjutkan kebijakan tahun 2014 yang terfokus pada pilar edukasi keuangan, penyusunan kebijakan/peraturan yang mendukung dan fasilitasi intermediasi serta saluran distribusi. Kebijakan yang disusun oleh Bank Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses masyarakat kepada lembaga keuangan. Hasil survei World Bank menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2014 sebesar 36,1% meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 19,6% (Gambar 13.2).¹ Dibandingkan dengan negara kawasan angka tersebut relatif masih lebih rendah (tingkat inklusi keuangan di Asia Timur dan Pasifik sebesar 69,0%).

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah sampai moderat terlihat dari beberapa indikator.² Pertama, tingkat pengenalan masyarakat terhadap lembaga keuangan sebesar 35,2, dimana lembaga keuangan yang paling dikenal oleh masyarakat adalah Bank (76,0%), Kantor Pos (63,0%), Koperasi (59,0%) dan Pegadaian (58,9%). Kedua, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap konsep dasar keuangan (konsep inflasi, asuransi, suku bunga dan investasi/saham) sebesar 54,5. Ketiga, sikap masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang diukur dari sikap menabung, sikap dalam

memandang masa depan, tidak bersifat spontan, sikap selalu berorientasi pada prestasi sebesar 61,2. Keempat, perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang diukur dari aspek perencanaan keuangan, pengawasan keuangan, menghindari pengeluaran berlebih, menutupi pengeluaran tak terduga, perencanaan masa tua, pemanfaatan informasi, hidup mandiri, dan seleksi produk sebesar 63,1.

Sebagai langkah awal upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, Bank Indonesia telah merumuskan strategi edukasi Keuangan Inklusif (KI) sebagai pedoman dalam melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat. Strategi edukasi KI terdiri dari tiga pilar, yaitu: (i) kebijakan yang mencakup analisa atas pelaksanaan edukasi KI, assesmen terhadap hasil survei KI, *roadmap*, dan monitoring; (ii) program yang terdiri dari: a) materi yang dikelompokkan menjadi sikap dan perilaku serta pengetahuan keuangan, b) media untuk publikasi, seperti cetak, elektronik, dan sosial, c) mekanisme edukasi KI melalui kampanye/sosialisasi, *Training of Trainer (ToT)*, dan *Training of Beneficiary (ToB)*; (iii) Sasaran edukasi KI, yaitu masyarakat dan *influencer*. Dalam pelaksanaannya, strategi edukasi KI lebih difokuskan pada kegiatan edukasi yang bersifat *massive* dengan melakukan kampanye atau sosialisasi, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media cetak, elektronik, dan sosial. Selama tahun 2015, Bank Indonesia bekerja sama dengan K/L terkait melakukan berbagai program edukasi KI, yakni edukasi keuangan kepada calon TKI dan TKI (bersama BNP2TKI, Kemenaker, World Bank, ILO, Tifa, dan

1 Global Findex, World Bank, 2015.

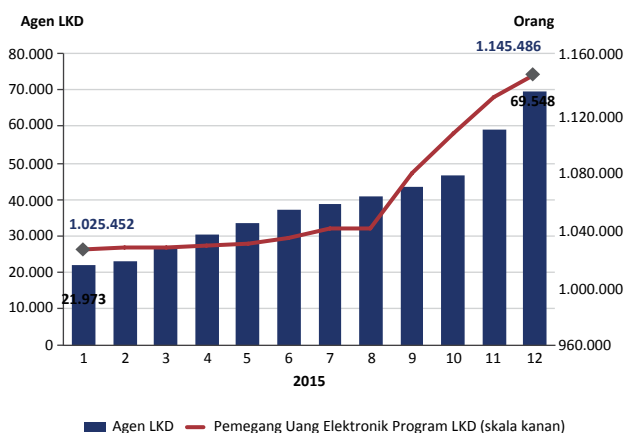
2 Survei Keuangan Inklusif Indonesia, Bank Indonesia, 2015.

perbankan), masyarakat di pulau terdepan, pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, petani/nelayan/pedagang, buruh, penerima bantuan pemerintah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

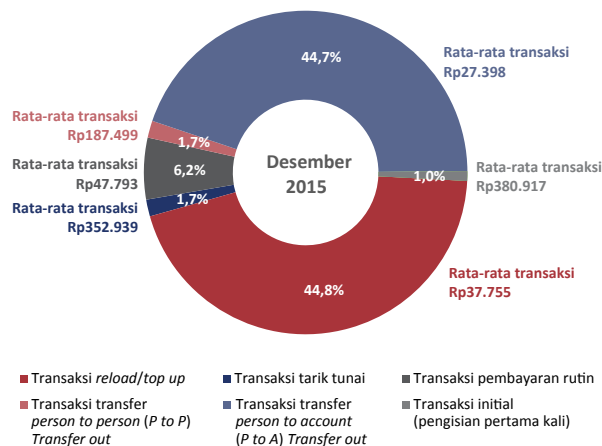
Upaya meningkatkan literasi keuangan juga diwujudkan melalui program Layanan Keuangan Digital (LKD). Program yang diluncurkan pada Juli 2014 tersebut, perkembangannya cukup baik dengan telah hadirnya LKD di seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan positif tersebut tercermin dari bertambahnya bank penyelenggara LKD dan jumlah agen LKD. Sampai dengan Desember 2015, penyelenggara LKD sebanyak 5 bank dengan jumlah agen LKD yang melayani masyarakat mencapai 69.548 agen dan menjangkau 461 Kabupaten/kota (Grafik 13.1). Jumlah pemegang uang elektronik telah mencapai 1.145.486 orang dengan nominal sebesar Rp43,1 miliar. Jenis transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di agen LKD, terbesar adalah setor tunai (*top-up*) uang elektronik sebesar 44,8%, diikuti dengan transfer *person to account* (44,7%), dan transaksi pembayaran rutin (6,2%). Rata-rata transaksi di agen LKD sebesar Rp44.891, dengan rata-rata transaksi terbesar adalah transaksi initial (pengisian pertama kali) sebesar Rp380.917 dan rata-rata transaksi terkecil adalah setor tunai sebesar Rp27.398 (Grafik 13.2). Rata-rata transaksi di agen tersebut sesuai dengan gambaran kemampuan masyarakat *unbanked* dalam membelanjakan uang.

Pada tahun 2015 juga dilakukan berbagai program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan komunitas, yang salah satunya menyasar komunitas masyarakat Islam melalui strategi *Islamic Financial Inclusion*. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan *pilot project* dengan melibatkan 3 perusahaan

Grafik 13.1. Perkembangan LKD



Grafik 13.2. Rata-rata Transaksi



jasa telekomunikasi (telco) sebagai penyelenggara LKD dan komunitas pesantren sebagai agen LKD. Pertimbangan melibatkan telco dalam uji coba tersebut karena telco telah terbiasa melayani *mass market*, unggul dalam teknologi komunikasi, dan memiliki aplikasi uang elektronik yang menyatu dengan nomor telepon. Sementara pertimbangan melibatkan pondok pesantren karena terkenal sebagai *influencer*, memiliki komunitas dan unit usaha yang berpengalaman melayani transaksi pembayaran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan transaksi keuangan mikro di sekitar pondok pesantren. Dari sisi produk, uang elektronik sangat tepat digunakan untuk menarik masyarakat Islam bertransaksi dengan LKD mengingat uang elektronik tidak memiliki unsur bunga yang menimbulkan riba dan bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan *pilot project* merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia untuk mensinergikan kebijakan perluasan akses yang fokus pada pengembangan LKD sebagai *point of access* dengan kebijakan elektronifikasi sebagai pengembangan ekosistem LKD.

Bank Indonesia juga membantu Pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (*Government to Person*) secara nontunai melalui LKD dan Kantor Pos. Penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) secara nontunai memiliki manfaat bagi pemerintah, penyelenggara dan penerima bantuan. Pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, efisiensi biaya, dan ketepatan sasaran. Sedangkan penyelenggara memperoleh manfaat berupa munculnya pasar baru untuk pengembangan produk, meningkatkan pendapatan dari *fee* transaksi. Bagi penerima bantuan juga mendapatkan manfaat berupa biaya pengambilan dana lebih murah, efisiensi waktu dalam pengambilan dana bantuan, terhubung

dengan bank, sebagai sarana dalam menyimpan uang, dan meningkatkan keamanan dalam menyimpan uang. Secara makro penyaluran bantuan sosial secara nontunai akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan keuangan inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang.

Tindak Lanjut Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

Selain melalui LKD, untuk meningkatkan literasi keuangan juga dilakukan melalui program elektronifikasi. Bank Indonesia telah menyusun *roadmap* elektronifikasi untuk mendukung percepatan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan pada Agustus 2014. Adapun tujuan dari penyusunan *roadmap* adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung program elektronifikasi.³ Peningkatan transaksi nontunai melalui program elektronifikasi memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Hasil asesmen menunjukkan bahwa peningkatan transaksi nontunai sebesar 10% memiliki korelasi meningkatkan belanja konsumen sebesar 0,5%. Sementara belanja konsumen merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi sehingga akan meningkatkan prospek terjadinya siklus positif (*virtuous cycle*) antara transaksi nontunai dengan pertumbuhan ekonomi.⁴

Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan K/L dan otoritas terkait untuk meningkatkan transaksi ritel nontunai masyarakat, terutama menggunakan instrumen uang elektronik. Bank Indonesia telah menandatangani 45 naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan K/L, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk kelanjutan dari MoU tersebut, Bank Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengimplementasikan penggunaan transaksi nontunai dan perluasan akses keuangan dalam kegiatan penempatan dan perlindungan TKI. Selain untuk kegiatan yang dilakukan di Indonesia, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan nontunai melalui formal

remittance channel pada pengiriman uang oleh TKI dari luar negeri. Dengan penerapan kebijakan ini, seluruh proses tata kelola dan transaksi TKI diharapkan dapat lebih efisien dan transparan.

Beberapa program elektronifikasi telah diimplementasikan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada tahun 2015. Elektronifikasi di sektor transportasi antara lain dilakukan dengan implementasi e-tiket di Transjakarta dan KAI *Commuter* Jabodetabek (KCJ), serta implementasi *e-parking* bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Pemda DKI Jakarta di beberapa wilayah yang telah memiliki terminal parkir elektronik (TPE). Sementara implementasi elektronifikasi di daerah, antara lain e-restribusi pasar tradisional di Palembang, Bandung *smart card* (uang elektronik yang pada tahap pertama untuk transaksi belanja, parkir dan tiket bus, yang akan dikembangkan untuk pembayaran kesehatan dan pendidikan) di Bandung, transfer gaji PNS di Banjarmasin, transfer gaji pegawai kontrak di seluruh SKPD Pemprov Kalimantan Tengah, BPD Bali *Mobile* (pembayaran pajak dan restribusi ke Pemkot Denpasar melalui *mobile banking*), dan e-tiket di penyeberangan Galala-Poka Ambon.

Untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai, pada tahun 2015, Bank Indonesia juga menyelenggarakan festival GNNT. Festival GNNT mengusung tema “Cinta Non Tunai, Cinta Rupiah”, melalui beberapa kegiatan interaktif dan pameran produk jasa sistem pembayaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Semangat untuk meningkatkan perluasan transaksi nontunai juga dilaksanakan di berbagai wilayah melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia, diantaranya melalui penerapan *Less Cash Society* (LCS) di berbagai universitas, seperti di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Serang) dan Universitas Pattimura (Ambon). Sosialisasi dan edukasi juga dilakukan kepada pejabat dan pegawai di K/L, Pemerintah Daerah, dan masyarakat luas.

Implementasi Teknologi Chip dan PIN Online Enam Digit pada Kartu ATM/Debet

Guna mewujudkan sistem pembayaran yang aman, Bank Indonesia menerapkan kebijakan implementasi teknologi *chip* dan PIN *online* 6 digit pada kartu ATM/Debet. Penggunaan *chip* untuk kartu ATM/Debet berdasarkan pertimbangan adanya penurunan *fraud* transaksi kartu kredit sejak *chip* diimplementasikan pada awal tahun 2010. Penggunaan *chip* juga merupakan upaya pencegahan *counterfeit* dan *skimming*, sedangkan penerapan PIN 6 digit akan meningkatkan keamanan,

3 Definisi elektronifikasi adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Tujuan elektronifikasi adalah mengubah semua metode pembayaran dari manual menjadi elektronik, mengubah sebagian besar mekanisme pembayaran dari fisik menjadi digital, dan meningkatkan akses yang terbatas menjadi luas (inklusif).

4 *Global Insight (2003). The Virtuous Circle: Electronic Payments and Economics Growth. San Francisco: Visa International.*

khususnya pada kasus *lost and stolen*. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga ditujukan untuk mendorong efisiensi melalui interoperabilitas dan meningkatkan kemandirian industri nasional.

Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk mendukung implementasi kebijakan implementasi teknologi chip dan PIN *online* 6 digit pada kartu ATM/Debet. Pertama, Surat Edaran Bank Indonesia No.17/51/DKSP yang mengatur perubahan batas tarik tunai dan transfer melalui mesin ATM.⁵ Untuk Kartu ATM dengan *magnetic stripe*, batas nominal penarikan tunai paling banyak sebesar Rp10.000.000 perhari dan transfer antarbank paling banyak Rp25.000.000 per hari. Sedangkan untuk Kartu ATM dengan teknologi *chip*, batas nominal penarikan tunai paling banyak sebesar Rp15.000.000 per hari dan transfer antarbank paling banyak Rp50.000.000 per hari. Kedua, Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP yang memuat penyesuaian jadwal implementasi standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 digit pada transaksi kartu ATM/Debet.⁶ Implementasi yang sebelumnya dijadwalkan paling lambat 31 Desember 2015 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2021. Sementara implementasi PIN *online* 6 digit pada kartu ATM/Debet yang menggunakan *magnetic stripe* diperpanjang menjadi paling lambat 30 Juni 2017. Untuk penerapan teknologi *chip*, seluruh kartu ATM/Debet yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia beserta saranan pendukungnya wajib menggunakan standar nasional teknologi *chip* paling lambat 31 Desember 2021. Penerbit masih dapat menggunakan teknologi *magnetic stripe* untuk rekening simpanan dengan saldo maksimum Rp5.000.000 berdasarkan perjanjian tertulis antara Penerbit dan nasabah.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk kebijakan Bank Indonesia untuk terus mendorong penggunaan instrumen nontunai di masyarakat dengan biaya murah. Penyesuaian implementasi standar nasional kartu ATM/Debet dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan mayoritas penyelenggara kartu ATM/Debet belum sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan standar nasional teknologi *chip* dan PIN *online* 6 digit. Untuk mendorong hal tersebut, Bank Indonesia memberikan insentif terhadap penggunaan kartu yang telah menggunakan teknologi

5 Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/51/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

6 Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online* 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

chip berupa peningkatan batas maksimum tarik tunai dan transfer untuk kartu ATM/Debet.

Implementasi Ketentuan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam konteks bauran kebijakan, Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI secara efektif mampu menegakkan kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI. Dengan adanya kewajiban tersebut, transaksi nontunai dalam negeri yang semula menggunakan mata uang dolar AS mulai menurun tajam sejak diberlakukannya ketentuan tersebut pada Juli 2015.⁷ Perkembangan ini menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI berdampak positif mendukung upaya pengelolaan permintaan valuta asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal tersebut juga tercermin dari hasil survei persepsi terhadap sampel Biro Perjalanan Wisata (BPW) di empat daerah yaitu Batam, Jakarta, Surabaya dan Bali.

Secara umum, hampir seluruh sampel perusahaan yang disurvei telah mengetahui Undang-Undang No. 7 tahun 2011 dan pemberlakuan ketentuan mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI yang diterbitkan Bank Indonesia. Dari aspek kuota harga, mayoritas sampel BPW di Jakarta dan Bali menyediakan kuota harga atau tarif dalam valuta asing. Sebaliknya mayoritas sampel BPW di Batam dan Surabaya tidak menyediakan kuota harga dalam valuta asing. Alasan utama masih adanya kuota harga dalam valuta asing karena kurs rupiah terhadap valuta asing yang fluktuatif atau tidak stabil dan untuk mengakomodir *customer* warga negara asing. Penerimaan dalam valuta asing selama tiga bulan setelah pemberlakuan ketentuan Bank Indonesia menunjukkan penurunan, sebaliknya penerimaan dalam rupiah menunjukkan peningkatan. Selanjutnya sampel BPW menyatakan kesiapan menggunakan uang rupiah dengan mencantumkan harga perjalanan wisata, baik wisata dalam negeri maupun luar negeri, dengan menggunakan rupiah.

Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata

7 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dan Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi terkait. Koordinasi dan sosialisasi dilakukan terkait proyek infrastruktur strategis, kurs acuan, kegiatan transaksi pada sektor industri, perdagangan, jasa keuangan, migas, perhubungan dan haji.

Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran

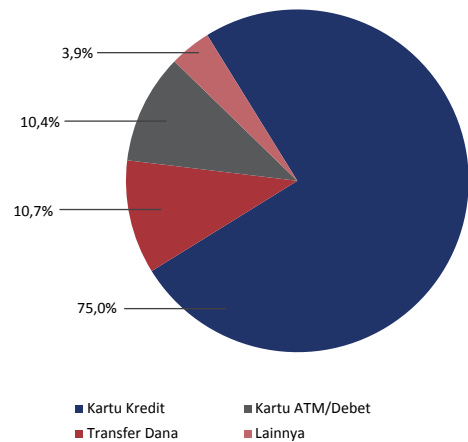
Bank Indonesia terus meningkatkan perlindungan konsumen sistem pembayaran. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/16/DKSP, fungsi perlindungan konsumen yang dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk edukasi, konsultasi dan fasilitasi kepada setiap individu yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran seperti pemegang kartu ATM dan kartu kredit. Adapun cakupan dari perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran adalah instrumen pemindahan/ penarikan dana, kegiatan transfer dana, APMK, uang elektronik, serta penyediaan/penyetoran uang rupiah.

Hingga Desember 2015, Bank Indonesia menerima pengaduan dari nasabah sebanyak 1.870 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, pengaduan nasabah terbesar adalah terkait dengan kartu kredit sebanyak 1.361 pengaduan atau 75,0% dari total pengaduan, kartu ATM/Debet sebanyak 195 pengaduan atau 10,7%, dan transfer dana 188 pengaduan atau 10,4% (Grafik 13.3). Pengaduan yang disampaikan kepada Bank Indonesia terkait produk sistem pembayaran yang digunakan oleh pihak lain, penyalahgunaan data, seperti *skimming*, *phising* atau *vishing*, dan etika penagihan kartu kredit.

Selain menerima pengaduan nasabah, Bank Indonesia juga menerima permintaan informasi terkait berbagai produk dalam sistem pembayaran. Sepanjang 2015, Bank Indonesia telah menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi sebanyak 23.377 permintaan. Permintaan informasi yang terbesar adalah terkait kewajiban penggunaan rupiah di Wilayah NKRI sebanyak 17.810 permintaan atau 76,2% (Grafik 13.4). Selanjutnya, diikuti dengan permintaan informasi terkait penyediaan dan penyetoran uang sebanyak 3.067 permintaan (13,1%) dan transfer dana sebanyak 595 permintaan (2,2%).

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pada tahun 2015 Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran di

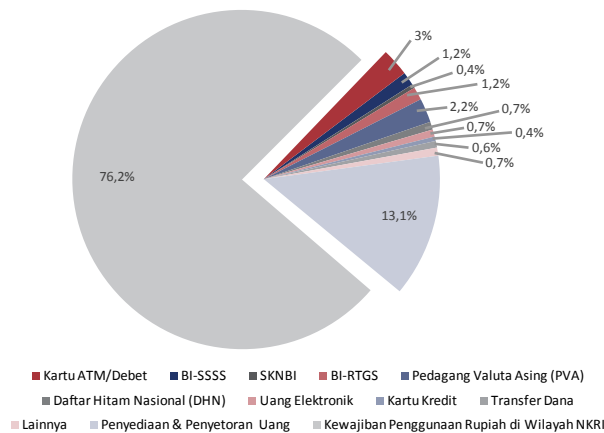
Grafik 13.3. Porsi Jenis Pengaduan Sistem Pembayaran



beberapa kota di Indonesia yaitu di Solo, Aceh, dan Mataram. Terkait transaksi nontunai juga diselenggarakan Festival GNNT dengan tema “Cinta Non Tunai, Cinta Rupiah” dengan peserta 13 bank penyelenggara jasa sistem pembayaran, 1 perusahaan pengembang inovasi sistem pembayaran dan 1 KUPVA Bukan Bank. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak masyarakat menggunakan instrumen pembayaran nontunai dan sekaligus mengajak seluruh pihak untuk menggunakan rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia pada setiap transaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Bank Indonesia juga meningkatkan aspek perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan SKNBI Generasi II melalui kebijakan penetapan harga. Hal tersebut diakomodasi dalam bentuk ketentuan mengenai batas waktu penerusan dana kepada nasabah dan batas

Grafik 13.4. Permintaan Informasi Sistem Pembayaran



tertinggi biaya transaksi yang dapat dibebankan oleh bank kepada nasabah. Untuk SKNBI, batas waktu penerusan dana adalah 2 jam setelah akseptasi dan 2 jam setelah dana dilakukan setelmen di rekening bank. Bank wajib segera meneruskan perintah transfer dana ke Bank Indonesia dalam 2 jam setelah bank menerima perintah transfer dana dari nasabah, dan bank penerima dana wajib meneruskan transfer dana ke rekening nasabah dalam 2 jam setelah adanya setelmen dana SKNBI. Sementara terkait pengaturan batas tertinggi biaya transfer dana SKNBI yang dapat dibebankan oleh bank kepada nasabah sebesar Rp5.000, sedangkan biaya transaksi yang dibebankan Bank Indonesia kepada Peserta sebesar Rp750. Selain aspek perlindungan konsumen, penetapan biaya transfer dana juga memperhatikan *cost recovery* dari implementasi dan penyelenggaraan sistem dimaksud.

Adapun pengenaan tarif per transaksi pada BI-SSSS Generasi II adalah tarif tertinggi transaksi *single credit* sistem BI-RTGS, yakni sebesar Rp23.000 (Tabel 13.1). Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan perlindungan nasabah melalui transparansi dan mendorong efisiensi di sisi Peserta. Bank Indonesia juga telah memberlakukan batas tertinggi biaya transfer dana melalui Sistem BI-RTGS yang dapat dibebankan oleh bank kepada nasabah sebesar Rp35.000. Selain itu, Bank Indonesia juga telah mewajibkan Bank yang menyediakan layanan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS untuk menginformasikan tarif yang diberlakukan kepada seluruh nasabah, baik untuk tarif yang dikenakan Bank Indonesia kepada Peserta maupun besarnya tarif yang dikenakan Bank kepada nasabah.

Tabel 13.1. Tarif Transaksi Sistem BI-RTGS Generasi II

Jenis Biaya	Pukul 06.30 sampai dengan 10.00 WIB	Di atas pukul 10.00 sampai dengan 14.00 WIB	Di atas pukul 14.00 WIB sampai dengan <i>cut off</i>
Transaksi <i>single credit</i>	Rp9.000,-	Rp18.000,-	Rp23.000,-
Transaksi <i>multiple credit</i>	Rp35.000,-	Rp35.000,-	Rp50.000,-
Transaksi <i>single credit</i> antar-Peserta untuk nasabah dalam rangka TSA	Rp0,-	Rp0,-	Rp0,-

Implementasi Interkoneksi Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB)

Salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah memberikan layanan jasa perbankan khusus kepada mitra strategis, antara lain Pemerintah c.q Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan. Layanan yang diberikan utamanya berupa pengelolaan rekening giro sekaligus menyediakan sarana elektronik dan *online* yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan memproses transaksi keuangan. Sarana elektronik tersebut adalah BIG-eB yang saat ini baru bisa diakses oleh Kementerian Keuangan.

Untuk memberikan *service excellence* kepada mitra strategis, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan pengembangan terhadap BIG-eB setelah melakukan *review* kebutuhan proses bisnis dan performance BIG-eB, baik dari sisi *customer* maupun Bank Indonesia. Secara umum, tujuan pengembangan BIG-eB adalah: (i) mendukung proses pengumpulan informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat oleh nasabah dalam rangka *forecasting* dan penyusunan laporan keuangan; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian transaksi nasabah, terutama pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) oleh Kemenkeu; (iii) memitigasi risiko operasional atas penyelesaian transaksi nasabah dan meningkatkan *good governance* di Bank Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi yang aman dan andal; dan (iv) mendukung kebijakan dan kredibilitas Bank Indonesia, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antar lembaga.

Pada tahun 2015 telah dilakukan pengembangan BIG-eB. Pengembangan tersebut meliputi: (i) penambahan jenis transaksi guna mengakomodasi proses penyelesaian transaksi kliring, transfer valas dan *future date*; (ii) penambahan jenis laporan untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi yang diperlukan nasabah dan penyelenggara aplikasi; dan (iii) peningkatan kapasitas infrastruktur dalam rangka memperbaiki kinerja layanan. Selain itu, saat ini juga sedang dipertimbangkan untuk memperluas akses internet banking BI ini agar dapat digunakan oleh *multi user*, bukan hanya oleh Kemenkeu.

Penggunaan Central Bank Money (CeBM)

Penggunaan CeBM merupakan salah satu rekomendasi dalam *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs) yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). Penggunaan CeBM bertujuan untuk memitigasi kemungkinan timbulnya risiko kredit dan risiko likuiditas dalam pelaksanaan setelmen

dana atas transaksi surat berharga. Risiko kredit timbul karena adanya kemungkinan wanprestasi (*default*) oleh Bank Pembayaran atas kewajibannya, sedangkan risiko likuiditas timbul apabila setelah diselesaikannya kewajiban pembayaran, peserta atau penyelenggara tidak dapat mengalihkan asetnya dari Bank Pembayaran menjadi aset likuid lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengimplementasikan penggunaan CeBM untuk setelmen transaksi efek di pasar modal pada 18 Juni 2015. Penggunaan CeBM diperuntukkan untuk transaksi SBN dan non SBN yang diinisiasi oleh Bank Kustodian (Tabel 13.2). Dalam hal ini, Bank Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan peserta Pasar Modal kelompok Bank Kustodian, telah melakukan penerapan penggunaan CeBM tahap pertama. Pada tahap pertama, seluruh Bank Kustodian wajib melakukan penyelesaian dana dengan KSEI melalui sistem BI-RTGS untuk semua transaksi pasar modalnya dalam mata uang rupiah. Peresmian penggunaan CeBM tahap pertama yang dilakukan pada 29 Juni 2015 merupakan babak baru dalam sistem keuangan Indonesia. Penggunaan Sistem BI-RTGS untuk setelmen dana transaksi pasar modal antara Peserta KSEI dengan KSEI (sebagai Penyelenggara *Central Securities Depository* (CSD) untuk saham, obligasi korporasi dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh sektor usaha swasta tersebut) juga merupakan pemenuhan salah satu standar internasional dalam penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan, yang dikenal dengan PFMI.

Tabel 13.2. Tahapan Pengembangan Penggunaan CeBM untuk Setelmen Transaksi Efek di Pasar Modal

Peserta C-BEST	Efek dalam USD		Efek dalam IDR	
	SBN	Non SBN	SBN	Non SBN
Hybrid 1 → Telah diimplementasikan tanggal 18 Juni 2015				
Bank Kustodian	x	x	√	√
Perusahaan Efek	x	x	x	x
Hybrid 2 → Implementasi pada Triwulan ke I 2016				
Bank Kustodian	x	x	√	√
Perusahaan Efek	x	x	√	x
Hybrid 3 → kajian lebih lanjut				
Bank Kustodian	x	x	√	√
Perusahaan Efek	x	x	√	√
Full CeBM → Kajian lebih lanjut				
Bank Kustodian	√	√	√	√
Perusahaan Efek	√	√	√	√

Hybrid: Mengombinasikan penggunaan CeBM dan CoBM untuk setelmen sisi dana transaksi efek berdasarkan denominasi efek, jenis efek dan jenis peserta pelaku transaksi dengan implementasi di Sistem BI-RTGS.

Full CeBM: Setelmen seluruh transaksi efek dengan denominasi IDR dan Valuta Asing (valas) di pasar modal menggunakan CeBM.

Dengan penggunaan CeBM, kegiatan penyetoran dan penarikan dana dalam rangka setelmen transaksi efek di pasar modal oleh Bank Kustodian yang selama ini dilakukan hanya melalui 5 bank pembayaran, ke depan akan dilakukan melalui transfer dana antara rekening giro Bank dengan rekening giro KSEI di Sistem BI-RTGS. Keuntungan lain dari mekanisme ini adalah terciptanya *competitive neutrality* karena setiap Bank dapat melakukan setelmen transaksi pasar modal dan tidak tergantung pada Bank Pembayaran tertentu. Selain itu, penggunaan CeBM akan meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bagi setiap Bank karena tidak perlu memiliki rekening pada institusi lain untuk keperluan setelmen transaksi pasar modal.

Penguatan Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh BI

Ketentuan BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II

Untuk mendukung pengembangan dan penyelenggaraan sistem BI-ETP, BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II diperlukan penguatan aspek hukum. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketiga sistem tersebut dan dalam rangka penyesuaian ketentuan besar biaya transaksi, *price cap*, dan transparansi informasi penggunaan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika. Peraturan tersebut juga didukung dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/30/DPSP perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*. Selain itu, untuk mengakomodasi perkembangan transaksi operasi moneter dan transaksi di pasar keuangan serta penggunaan infrastruktur untuk transaksi di pasar keuangan yang dikembangkan, Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara.

Ketentuan SKNBI Generasi II

Untuk memberikan payung hukum penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal melalui implementasi SKNBI Generasi II, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. Adapun pokok-pokok penyempurnaan

dalam penyelenggaraan SKNBI Generasi II meliputi: (i) perluasan akses kepesertaan yang tidak terbatas pada Bank Umum; (ii) penambahan jasa layanan untuk transaksi yang bersifat rutin; (iii) sentralisasi penyelenggaraan Layanan Kliring Warkat Debit; dan (iv) peningkatan perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI. Sebagai tahap awal implementasi SKNBI Generasi II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015, penyelenggaraan SKNBI terbatas pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Kliring Warkat Debit dan kepesertaan terbatas pada Bank. Untuk tahap selanjutnya, layanan SKNBI mencakup Layanan Pembayaran Reguler dan Layanan Penagihan Reguler serta kepesertaan mencakup Penyelenggara Transfer Dana selain Bank.

13.2. KINERJA PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan uang rupiah yang meliputi 6 tahapan kegiatan. Tahapan tersebut adalah perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, serta pencabutan dan penarikan. Sedangkan kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Di samping itu, perkembangan kondisi makro ekonomi dan pasar keuangan juga menjadi faktor penting bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan uang rupiah selama tahun 2015.

Secara garis besar Bank Indonesia menempuh 5 kebijakan pengelolaan uang rupiah pada tahun 2015. *Pertama*, menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia. *Kedua*, meningkatkan kualitas uang rupiah yang berada di masyarakat (*clean money policy*). *Ketiga*, perluasan jaringan distribusi uang dan layanan kas. *Keempat*, penguatan komunikasi publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah. *Kelima*, pencegahan dan penanggulangan pemberantasan uang rupiah palsu.

Menjaga Kecukupan Posisi Kas Bank Indonesia

Dalam rangka memenuhi penarikan uang kartal oleh perbankan selama tahun 2015, Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk menjaga kecukupan posisi kas di seluruh kantor Bank Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Sebagaimana pada tahun 2014, Bank Indonesia menetapkan tingkat kecukupan posisi kas dengan indikator jumlah *Iron Stock* Nasional (ISN) sebesar 20% dari proyeksi Uang Yang Diedarkan (UYD) tahun berjalan dan Kas Minimum sebesar 1,5 bulan penarikan bank (*outflow*).⁸ Rasio posisi kas Bank Indonesia mencapai rata-rata 5,1 bulan *outflow* sepanjang tahun 2015, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 3,1 bulan *outflow*.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan posisi kas di seluruh kantor Bank Indonesia ditempuh melalui beberapa kebijakan. Dari sisi *supply*, Perum Peruri telah melakukan pencetakan uang rupiah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Demikian pula, dari sisi ketepatan jadwal pengiriman uang yang diselaraskan dengan kebutuhan Bank Indonesia terutama menjelang periode hari raya keagamaan. Upaya Perum Peruri untuk memenuhi pencetakan uang dari Bank Indonesia adalah dengan modernisasi peralatan pencetakan uang, penambahan satu lini produksi uang kertas, dan optimalisasi waktu kerja. Di samping itu, kelancaran distribusi uang antar kantor Bank Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan badan usaha yang menyelenggarakan moda transportasi, seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan badan usaha swasta lainnya.

Dari sisi permintaan, sejak 2011 Bank Indonesia menerapkan kebijakan bahwa kegiatan penarikan dan/atau penyetoran uang kartal oleh bank melalui Bank Indonesia dilakukan setelah perbankan melakukan pertukaran uang kartal antar bank (TUKAB).⁹ Kegiatan tersebut dilakukan baik antara bank dengan bank lain

8 Kas minimum merupakan jumlah persediaan kas minimum yang harus dijaga di seluruh kantor Bank Indonesia, dengan asumsi tidak ada penyetoran uang dari bank ke Bank Indonesia. Faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kas minimum adalah faktor distribusi dan transportasi serta pasokan uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) oleh Perum Peruri.

9 TUKAB atau transaksi uang kartal antar bank adalah kegiatan antar bank yang meliputi permintaan, penawaran, dan penukaran uang rupiah yang masih layak edar dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang sesuai ketentuan Bank Indonesia.

maupun dengan perantara Bank Indonesia melalui mekanisme *dropshot*.¹⁰ Kebijakan tersebut berdampak positif bagi bank untuk mempercepat ketersediaan uang rupiah sesuai dengan pecahannya. Sedangkan bagi Bank Indonesia, kebijakan ini berdampak meningkatnya efisiensi manajemen pengelolaan perkasan. Pada akhirnya, Bank Indonesia dapat mengelola pertumbuhan penarikan dan penyetoran uang rupiah oleh perbankan, diluar faktor ekonomi atau faktor siklikal (*seasonal factor*).

Selama tahun 2015, Bank Indonesia telah mendistribusikan uang rupiah ke seluruh kantor Bank Indonesia sebesar Rp240,4 triliun atau meningkat 44,4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp166,5 triliun. Pangsa terbesar distribusi uang untuk pemenuhan ketersediaan kas di Kantor Pusat Bank Indonesia, dengan pertimbangan untuk memenuhi penarikan uang oleh perbankan yang mayoritas berkantor pusat di wilayah Jakarta. Sementara untuk daerah, pangsa terbesar distribusi uang untuk pemenuhan ketersediaan kas di kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur, masing-masing pada kisaran Rp20 triliun.

Ketersediaan uang rupiah juga tercermin dari terpenuhinya penarikan uang kartal selama periode hari raya keagamaan, terutama pada periode Ramadhan/Idul Fitri dan Natal/liburan akhir tahun 2015. Penarikan uang kartal pada periode Ramadhan/Idul Fitri 2015 mencapai Rp140,0 triliun atau 111,8% dari kebutuhan uang berdasarkan proyeksi perbankan. Tingginya realisasi tersebut terutama bersumber dari kenaikan realisasi penarikan pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Demikian pula, pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2015, realisasi penarikan uang kartal mencapai Rp85,6 triliun atau 106,0% dari kebutuhan uang berdasarkan proyeksi perbankan.

Meningkatkan Kualitas Uang yang Beredar di Masyarakat (*Clean Money Policy*)

Ketersediaan posisi kas di seluruh kantor Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup, menjadi landasan utama bagi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan

¹⁰ *Dropshot* adalah kebijakan pembayaran uang rupiah layak edar (ULE) setoran dari bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan penghitungan secara rinci dan penyortiran. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam 1 kemasan plastik transparan (*10 brood*) yang masih utuh, tersegel, dan terdapat label bank penyetor.

untuk meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan standar tingkat kelusuhan (*soil level*) uang yang disetorkan oleh perbankan ke Bank Indonesia dan pengolah Bank Indonesia. Dengan meningkatnya *soil level* berdampak kepada melonjaknya jumlah uang tidak layak edar yang harus dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, mulai tahun 2015 Bank Indonesia melakukan modernisasi peralatan kas yang dapat meningkatkan kapasitas pengolahan dan pemrosesan uang rupiah.¹¹ Selama tahun 2015 pemusnahan uang tidak layak edar mencapai Rp160,25 triliun atau meningkat 43,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya komposisi jumlah penarikan uang yang berkualitas baik (hasil cetak sempurna dari Perum Peruri) terhadap total penarikan perbankan ke Bank Indonesia.

Upaya meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat juga dilakukan melalui peningkatan frekuensi kegiatan dan jumlah penukaran uang rupiah melalui kegiatan Kas Keliling.¹² Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dan bekerja sama dengan pihak lain seperti kementerian dan instansi terkait, serta perbankan. Di samping itu perluasan kerja sama dengan perbankan untuk membuka Kas Titipan pada daerah yang belum terjangkau oleh layanan kas Bank Indonesia, juga menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kualitas uang di masyarakat.¹³ Hasil survei kualitas uang layak edar pada beberapa kota di daerah perbatasan dan terpencil yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa indeks kualitas uang di kota di daerah perbatasan dan terpencil menunjukkan angka 6,8, atau lebih tinggi dari perkiraan awal pada angka 4.

Perluasan Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas

Salah satu upaya yang dicanangkan dalam Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) 2024 di bidang pengelolaan uang rupiah, adalah melakukan reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas. Hal ini

¹¹ Modernisasi peralatan kas yang dilakukan berupa *replacement* dan penambahan peralatan kas berupa 26 Mesin Sortir Uang Kertas – Racik (MSUK-R) dan 14 Mesin Racik Uang Kertas (MRUK).

¹² Kas Keliling adalah kegiatan layanan penukaran uang oleh unit kerja kas di Kantor Pusat Bank Indonesia dan KPwDN-BI kepada masyarakat, bank, dan pihak lain dengan menggunakan sarana transportasi tertentu.

¹³ Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah atau daerah tertentu.

berdasarkan pertimbangan akselerasi pencapaian misi Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah dalam jumlah yang cukup di seluruh wilayah Indonesia pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan berkualitas dengan faktor biaya yang efisien. Reformasi akan dilakukan secara *multiyear* dengan target pencapaian *coverage* jaringan distribusi uang dan layanan kas pada tahun 2019 telah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Upaya reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas secara garis besar mencakup perluasan peran Bank Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Mata Uang dan peningkatan bentuk kerja sama dengan perbankan maupun badan usaha di bidang penyelenggaraan jasa pengolahan uang. Hasil implementasi kebijakan reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas selama tahun 2015 adalah pengembangan infrastruktur (*capacity building*), serta penyempurnaan manajemen perkasan dan proses bisnis pengelolaan uang rupiah (*cash management and business model*).

Dari aspek pengembangan infrastruktur pengelolaan uang rupiah yang telah dilakukan selama tahun 2015 adalah perluasan kantor Bank Indonesia dan Kas Titipan (Tabel 13.3). Kebijakan pertama pada tahun 2015 adalah pembukaan kantor Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah (Oktober). Sedangkan kebijakan kedua pada tahun yang sama adalah penambahan 6 Kas Titipan baru di Tanjungpandan (Juni), Serang (Agustus), Batu Licin (Agustus), Dumai (November), Tanjung Selor (Desember), dan Pare-pare (Desember), serta penutupan 1 Kas Titipan di Mamuju-Provinsi Sulawesi Barat (September).

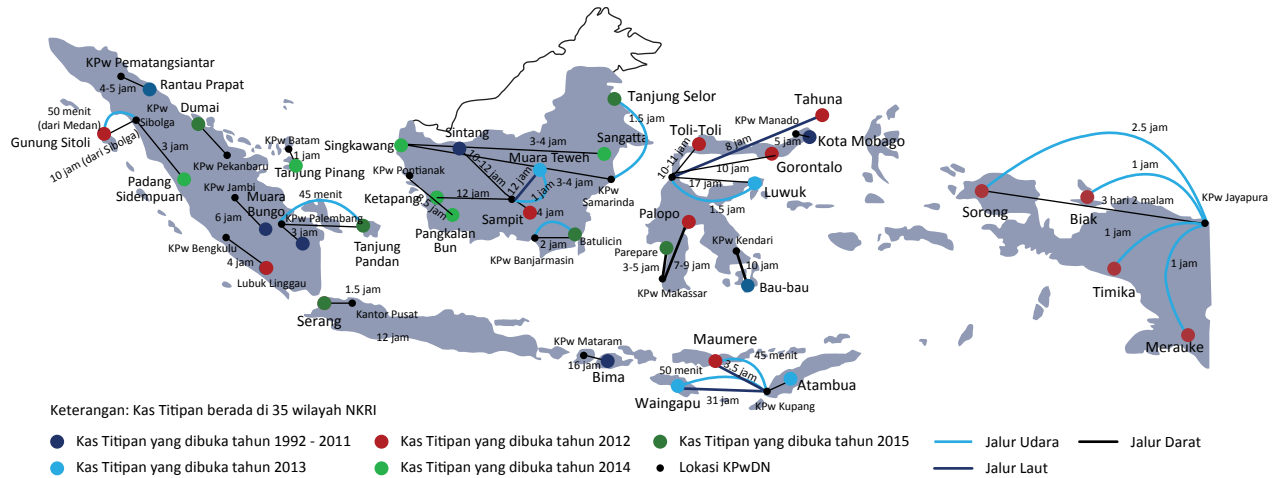
Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2015, telah terdapat 35 Kas Titipan di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (Gambar 13.3) Jumlah kas titipan tersebut bertambah 5 kantor dibandingkan tahun 2014. Tiga puluh lima Kas Titipan di Indonesia tersebut dikelola oleh 14 bank umum dan beranggotakan 368 kantor bank umum. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dikelola oleh 12 bank umum dan beranggotakan 267 kantor bank umum.

Untuk meningkatkan tata kelola dan kepatuhan terhadap penyelenggaraan Kas Titipan, secara periodik Bank Indonesia melakukan pengawasan, baik secara *off-site* melalui kewajiban penyampaian laporan maupun secara *on-site* melalui pemeriksaan langsung kepada bank pengelola Kas Titipan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan penyelenggaraan Kas Titipan telah sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dan Bank Pengelola. Di samping itu, juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Pengelola dan memastikan jumlah fisik uang rupiah yang dititipkan kepada Bank Pengelola sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Kas Titipan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Bank Indonesia. Beberapa aspek yang perlu dioptimalisasi adalah pelayanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat, penyimpanan dan pemisahan uang rupiah di khazanah uang bank pengelola sebagai Kas Titipan dengan uang rupiah milik

Tabel 13.3. Bank Pengelola dan Bank Anggota Kas Titipan

No	Nama Bank Pengelola	Jumlah Kas Titipan	Lokasi dan Jumlah Bank Anggota
1	Bank Mandiri	9	Rantau Prapat (14 bank anggota), Toli-Toli (4), Tahuna (4), Gorontalo (14), Sorong (13), Timika (11), Biak (5), Tanjung Pinang (13), Tanjung Pandan (10)
2	Bank Negara Indonesia	5	Gunung Sitoli (5), Luwuk (8), Muaro Bungo (19), Bau-Bau (7), dan Padang Sidempuan (12)
3	Bank Rakyat Indonesia	4	Lubuk Linggau (12), Sampit (7), Waingapu (3), Dumai (15)
4	BPD Kalimantan Barat	3	Sintang (14), Ketapang (12), Singkawang (10)
5	BPD Kalimantan Tengah	2	Muara Teweh (6) dan Pangkalan Bun (12)
6	BPD Kalimantan Timur	2	Sangatta (11), Tanjung Selor (3)
7	BPD Nusa Tenggara Timur	2	Maumere (4) dan Atambua (4)
8	BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	2	Palopo (13), Pare-Pare (7)
9	BPD Sulawesi Utara	1	Kotamobagu (6)
10	BPD Sumsel Babel	1	Prabumulih (22)
11	BPD Nusa Tenggara Barat	1	Bima (6)
12	BPD Papua & Papua Barat	1	Merauke (8)
13	BPD Jabar & Banten	1	Serang (40)
14	BPD Kalimantan Selatan	1	Batulicin (14)
	Jumlah : 14 Bank	35 kantor bank	368 kantor bank anggota

Gambar 13.3. Peta Penyebaran Kas Titipan



bank pengelola, dan penyampaian laporan secara berkala kepada Bank Indonesia.

Penguatan Komunikasi Publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ciri keaslian rupiah, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan kegiatan komunikasi publik dalam bentuk sosialisasi secara langsung kepada berbagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut antara lain *cash handlers* (seperti kasir perbankan dan kasir *minimart*), akademisi/pelajar, aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi dikemas melalui temu muka secara langsung, keikutsertaan dalam pameran pembangunan di daerah, maupun kesenian rakyat/tradisional. Di samping itu, materi ciri keaslian uang rupiah telah menjadi salah satu bagian dari materi ajar Kebanksentralan untuk tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi secara nasional.

Pada tahun 2015, kegiatan komunikasi publik diperluas dengan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (3D “Dilihat – Diraba – Diterawang”) pada beberapa media TV Nasional dan di media sosial. Masyarakat juga dapat mengunduh video edukasi mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah yang berisikan tutorial mengenai ciri uang rupiah dan cara mengenali keasliannya. Bank Indonesia juga menyediakan *minisite* rupiah pada website Bank Indonesia dengan informasi mengenai ciri uang rupiah, pencegahan dan penanggulangan kejahatan pemalsuan uang rupiah, edukasi dan permainan untuk anak, serta berbagai permainan interaktif mengenai uang rupiah. Materi

tersebut dapat diunduh dalam bentuk *leaflet* dan *booklet* sesuai kelompok pengguna, seperti masyarakat umum, perbankan dan *cash handlers*, serta aparat penegak hukum.

Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Uang Rupiah Palsu

Untuk mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran uang rupiah palsu. Bentuk dukungan tersebut adalah dengan penyediaan laboratorium analisis uang rupiah yang diduga palsu dan sistem informasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Laboratorium tersebut digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang rupiah yang diduga palsu hasil pengungkapan kasus oleh Kepolisian RI, dan pemeriksaan temuan uang rupiah yang diragukan keasliannya berdasarkan permintaan klarifikasi bank. Hasil analisis laboratorium berupa identifikasi tanda-tanda uang rupiah palsu, baik dari sisi jenis kertas dan tinta yang digunakan, maupun teknik cetak yang digunakan.

Sementara itu, sistem informasi BI-CAC digunakan sebagai pusat *database* uang rupiah palsu yang dapat mendukung tugas Kepolisian dalam pengungkapan jaringan pembuatan dan pengedaran uang rupiah palsu. Hasil pemeriksaan laboratorium dan BI-CAC juga menjadi bahan masukan penting bagi Bank Indonesia dalam meningkatkan kualitas fitur keamanan (*security features*) dalam rencana penerbitan uang rupiah ke depan. Ketersediaan BI-CAC juga untuk mendukung amanat Bank

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menyatakan keaslian uang rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia menyediakan sumber daya manusia untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan kasus tindak pidana kejahatan uang rupiah palsu.

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah juga terus dilakukan Bank Indonesia berkoordinasi dengan instansi

penegak hukum (Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung). Hal ini bertujuan untuk melakukan upaya penuntutan maksimal kepada para pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah, sehingga menimbulkan efek jera baik bagi para pelaku maupun terhadap pihak-pihak yang bermaksud untuk membuat dan/atau mengedarkan uang rupiah palsu. Beberapa kasus tindak pidana uang rupiah palsu telah dituntut dan diputus sanksi pidana yang cukup tinggi oleh Pengadilan Negeri selama tahun 2014-2015, diantaranya kasus di Jember, Nusa Tenggara Timur, dan Merauke.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan uang rupiah khususnya distribusi uang dan layanan kas, Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Salah satu tantangan terbesar terkait aspek distribusi uang adalah ketersediaan moda dan jalur transportasi regular yang terbatas yang menyebabkan rendahnya konektivitas antardaerah serta kondisi iklim dan cuaca yang sering mengalami perubahan. Sementara itu, tantangan terkait aspek layanan kas adalah masih terdapat daerah terpencil, perbatasan dan pulau terdepan NKRI yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia. Tantangan tersebut menyebabkan pengedaran uang layak edar menjadi tidak merata di wilayah NKRI, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas uang rupiah atau uang yang beredar di wilayah tersebut memiliki tingkat kelusuhan yang tinggi.

Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia secara berkesinambungan menempuh kebijakan dalam rangka penyempurnaan model bisnis pengelolaan uang, khususnya terkait distribusi uang dan layanan kas. Kebijakan tersebut, antara lain adalah *pertama*, kerja sama dengan bank umum melalui pembukaan Kas Titipan di daerah dengan aktivitas ekonomi yang berkembang, sejak tahun 1993. Model bisnis yang berlaku adalah Bank Indonesia melakukan pengiriman uang rupiah kepada bank pengelola Kas Titipan. Sedangkan biaya penyelenggaraan Kas Titipan menjadi beban yang ditanggung bersama oleh bank pengelola dan bank anggota. *Kedua*, kerja sama dengan pihak lain dan Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil (PPUPK) mulai 2005 sampai dengan 2008. Model bisnis yang berlaku adalah pihak lain dan PPUPK mendapatkan *fee* dari Bank Indonesia dan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat tetap tidak dipungut biaya. *Ketiga*, pemindahan kewajiban kegiatan sortasi uang kepada bank umum, sejak diterapkannya kebijakan setoran dan penarikan uang oleh bank umum pada tahun 2007.¹ Dengan kebijakan tersebut, bank umum yang sebelumnya dapat menyetorkan uang rupiah layak edar (ULE) dan uang tidak layak edar (UTLE) kepada Bank Indonesia, menjadi tidak berlaku lagi. Kebijakan tersebut mengatur bahwa bank harus melakukan sortasi uang rupiah menjadi ULE dan UTLE. Selanjutnya ULE terlebih dahulu harus dipertukarkan dengan bank lain melalui mekanisme

1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/37/DPU tanggal 27 Desember 2007 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia, yang dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU tanggal 5 April 2011 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia.

TUKAB (Transaksi Uang Kartal Antar Bank). Apabila terdapat kelebihan ULE setelah mekanisme TUKAB, maka ULE tersebut dan UTLE dapat disetorkan ke Bank Indonesia.

Dalam melakukan penyempurnaan model bisnis pengelolaan uang, Bank Indonesia melakukan kajian terhadap *international best practices of cash management* yang dilakukan oleh beberapa bank sentral lain. Bank sentral yang menjadi obyek kajian berasal dari negara berkembang yang memiliki kemiripan kondisi perekonomian dan karakteristik geografis dengan Indonesia. Di samping itu, model bisnis pengelolaan uang pada bank sentral di negara-negara maju juga menjadi referensi bagi Bank Indonesia dalam melakukan penyempurnaan model bisnis pengelolaan uang. *Best practices* pengelolaan uang di beberapa bank sentral difokuskan pada dua model bisnis, yaitu model bisnis di bidang distribusi uang dan model bisnis di bidang layanan kas.

Model bisnis di bidang distribusi uang di beberapa bank sentral, secara garis besar dibagi menjadi dua aspek, yaitu *distribution network* dan pelaksanaan pengiriman uang. Model jaringan distribusi uang yang dilakukan oleh bank sentral secara umum terdiri dari tiga bentuk. Pertama, distribusi uang dilakukan sepenuhnya oleh Bank Sentral, melalui jaringan kantornya di wilayah negara tersebut. Bank sentral yang melakukan distribusi uang secara otonom adalah Filipina, Tiongkok, Arab Saudi, Thailand, dan Jepang. Kedua, distribusi uang dengan memanfaatkan pihak lain, antara lain Malaysia dengan menunjuk MEPS (*Malaysia Electronic Payment System*), Norwegia dengan menunjuk

Diagram 1. Distribution Network

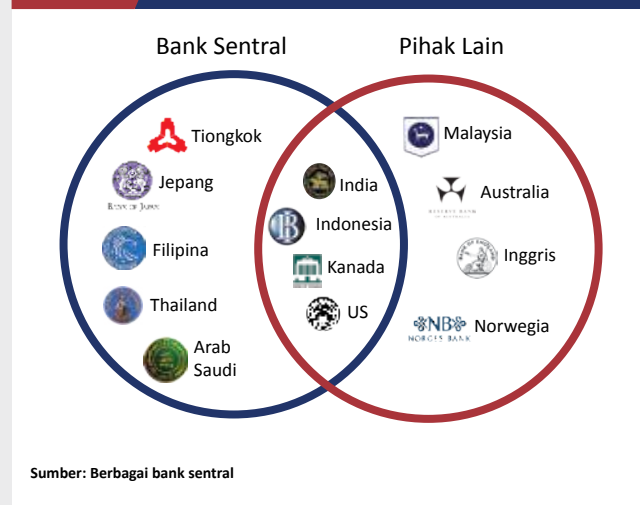
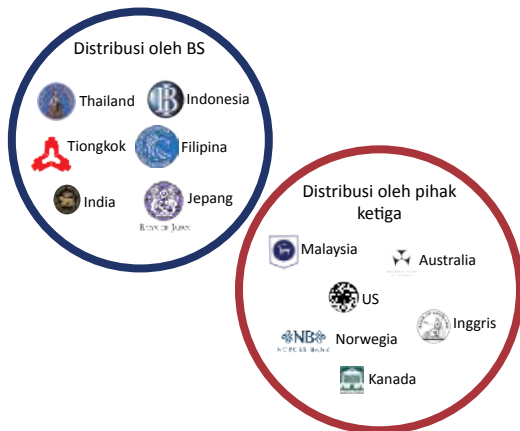
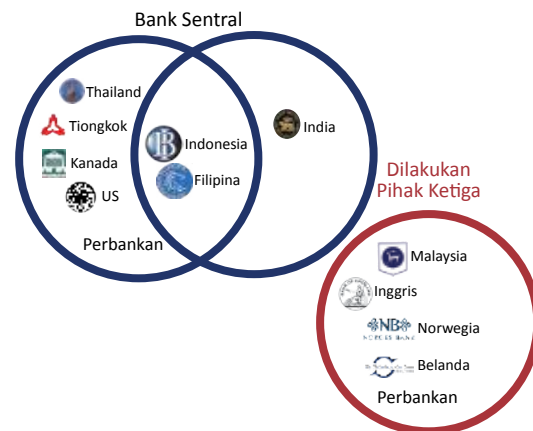


Diagram 2. Pelaksanaan Pengiriman Uang



Sumber: Berbagai bank sentral

Diagram 3. Layanan Kas: Perbankan-Retail



Sumber: Berbagai bank sentral

NOKAS (*Norsk Kontantservice*), serta Australia dan Inggris dengan memanfaatkan perusahaan jasa pengolahan uang (*cash in transit/CiT*). Ketiga, kombinasi penggunaan jaringan kantor bank sentral dengan pihak lain. Bank sentral yang menerapkan model ini adalah India dengan *Currency Chest* dan *Small Coin Deposits*, Amerika Serikat dengan *Cash Deposit*, *Strategic Inventory* dan *Custodial Inventory*, dan Canada dengan *Regional Deposit Center*. Model ketiga ini juga diterapkan oleh Bank Indonesia dengan berperannya Kas Titipan (*Cash Custody*). Penerapan model bisnis ini di Indonesia disebabkan karena keberadaan kantor Bank Indonesia yang belum dapat menjangkau secara langsung wilayah Indonesia, dan faktor terbatasnya ketersediaan moda dan jalur transportasi regular ke berbagai wilayah Indonesia.

Aspek kedua dari model bisnis distribusi uang adalah pelaksanaan pengiriman uang. Berdasarkan struktur jaringan distribusi uang, pelaksanaan pengiriman uang dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu jaringan kantor internal bank sentral dan milik lembaga/fasilitas lain yang bekerja sama dengan bank sentral.² Struktur jaringan distribusi ini selanjutnya dapat memengaruhi cara pengiriman uang ke suatu lokasi. Bank sentral yang melaksanakan pengiriman uang secara otonomi adalah Filipina, Thailand, Jepang, India, Tiongkok, dan Indonesia. Sedangkan bank sentral yang menunjuk lembaga/ fasilitas

2 Jaringan kantor internal Bank Sentral yang diterapkan oleh Bank Indonesia adalah melalui pembentukan Kantor Depo Kas (KDK). Dalam hal ini Kantor Pusat Bank Indonesia mengirimkan uang (*remise*) kepada 11 KDK dan 4 KPwDN-BI secara langsung. Selanjutnya 11 KDK melakukan pengiriman uang kepada KPwDN-BI lainnya. Moda transportasi yang digunakan adalah truk, kereta api, kapal penumpang, kapal barang, dan pesawat.

lain untuk melaksanakan pengiriman uang adalah Amerika Serikat (*CiT*), Inggris (*CiT*), Malaysia (*MEPS*), Kanada (*CiT*), Norwegia (*CiT*), dan Australia (*CiT*).

Saat ini Bank Indonesia menggunakan model pengiriman uang secara otonom dengan pertimbangan pengawasan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia, serta frekuensi dan jumlah pengiriman uang dapat lebih fleksibel sesuai dengan dinamika perkembangan ekonomi yang ada. Namun demikian, hal ini berdampak pada biaya distribusi uang menjadi kurang efisien, dan memerlukan kontrak atau kerja sama dengan penyedia jasa transportasi.

Selanjutnya, model bisnis di bidang layanan kas secara garis besar terdiri dari dua bentuk, yaitu kegiatan layanan kas yang diselenggarakan oleh bank sentral dan pendelegasian seluruh kegiatan layanan kas kepada pihak lain. Kegiatan layanan kas yang diselenggarakan oleh bank sentral dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu layanan kas hanya kepada perbankan (misalnya di Thailand, Tiongkok, Kanada, dan Amerika Serikat), dan layanan kas kepada perbankan dan retail (misalnya di Filipina dan Indonesia). Sementara itu, bank sentral yang mendelegasikan seluruh kegiatan layanan kasnya kepada pihak lain namun hanya kepada perbankan adalah Norwegia, Malaysia, Inggris dan Belanda.

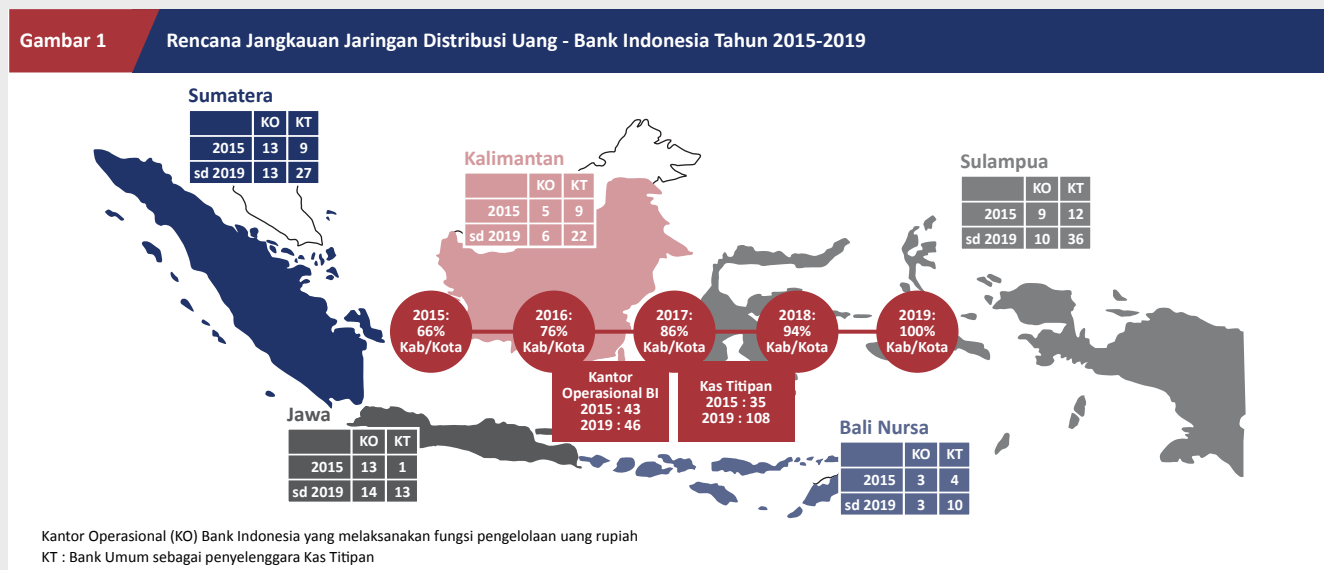
Saat ini Bank Indonesia menggunakan model layanan kas kepada perbankan dan retail yang diselenggarakan langsung oleh Bank Indonesia. Faktor yang mendasari penggunaan model ini adalah Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan layanan kas. Namun demikian, penggunaan model ini membutuhkan sumber daya dan infrastruktur yang besar untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Kajian *best practices* pengelolaan uang di berbagai negara tersebut menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam melakukan penyempurnaan kegiatan pengelolaan uang, khususnya terkait jaringan distribusi uang dan layanan kas. Namun, hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dan kondisi perekonomian daerah yang terus berkembang. Mengacu pada hal tersebut, sejumlah langkah telah disiapkan dalam pengembangan distribusi uang dan layanan kas. Pertama, peningkatan peran industri dalam memperluas *coverage* dan efisiensi operasional distribusi uang. Kedua, penguatan infrastruktur terkait perkasan untuk meningkatkan efektivitas distribusi ke seluruh wilayah NKRI. Ketiga, penyempurnaan pola hubungan dengan industri dalam kegiatan perkasan.

Reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas telah diawali dengan *pilot project* pada tahun 2015 melalui empat kegiatan. Kegiatan pertama adalah Kas Keliling secara *wholesale* oleh bank pengelola Kas Titipan di Merauke, Waingapu dan Prabumulih, serta Kas Keliling oleh perusahaan *CIT* di Provinsi Bali.³ Kegiatan kedua adalah sosialisasi penyempurnaan model bisnis Kas Titipan, termasuk kemungkinan pemberian bantuan keuangan (*financial scheme*) kepada bank pengelola Kas Titipan. Beberapa aspek yang mendasari penyempurnaan model bisnis tersebut adalah peningkatan standar infrastruktur dan pengamanan area kas, mendorong peran loket layanan

penukaran uang di Kas Titipan, mendorong penyerapan uang tidak layak edar dan meningkatkan kualitas sortasi uang. Kegiatan ketiga adalah distribusi uang (*dropping/pengambilan*) dari kantor Bank Indonesia ke Kas Titipan atau sebaliknya, yang dilakukan oleh bank pengelola Kas Titipan di Merauke dan Prabumulih. Kegiatan keempat adalah distribusi uang antar Kantor Kas Bank Indonesia, yaitu dari KPw Lampung ke KPw Bengkulu dalam rangka optimalisasi jalur distribusi dan mendorong terbentuknya KPw Lampung sebagai KDK.

Melalui reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas yang ditempuh oleh Bank Indonesia, diharapkan pada tahun 2019 *coverage* layanan kas Bank Indonesia telah dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.⁴ Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan peran industri, baik perbankan maupun badan usaha yang menyelenggarakan jasa pengolahan uang. Di samping itu, meningkatnya peran industri juga dipengaruhi oleh penyempurnaan model bisnis pengelolaan uang, sehingga Bank Indonesia akan mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan pengolahan uang oleh perbankan maupun oleh perusahaan jasa penyelenggara pengolahan uang lainnya, sehingga terdapat standarisasi pengolahan uang oleh seluruh pihak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, dikaji pula kemungkinan pemberian *financial scheme* kepada industri yang melakukan kegiatan pengiriman uang dan layanan kas (Gambar 1).



3 Kas keliling secara *wholesale* adalah kegiatan layanan penukaran uang yang ditujukan kepada pihak lain di luar masyarakat, seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, *retailer*, dan sebagainya; dengan cakupan wilayah layanan di daerah terpencil dan terdepan NKRI

4 Perhitungan *coverage* jangkauan jaringan distribusi uang dan layanan kas menggunakan metode jumlah kota dan kabupaten yang terlayani oleh kantor Bank Indonesia dan Kas Titipan, berdasarkan faktor waktu tempuh dan moda transportasi. Sebagai contoh *coverage* KPw Provinsi Aceh dapat menjangkau 4 kota/kabupaten yaitu Banda Aceh Kota, Aceh Besar, Sabang Kota, dan Aceh Jaya.



Keterangan gambar:

Merespons berbagai tantangan dalam perekonomian yang mengemuka pada tahun 2015, Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait. Koordinasi ini terbukti berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi di tengah tingginya ketidakpastian sekaligus menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi.



Bab 14

Koordinasi Kebijakan

Beragamnya tantangan pada tahun 2015 dan semakin kompleksnya dinamika perekonomian ke depan di tengah perekonomian domestik yang masih rentan mendorong Bank Indonesia untuk memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik Pusat dan Daerah, dan otoritas terkait. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi yang erat dengan berbagai bank sentral dan lembaga internasional melalui fora-fora internasional. Penguatan koordinasi tersebut diselenggarakan dalam koridor menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural.

Tercapainya kondisi makroekonomi yang stabil di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian dunia tidak terlepas dari penguatan koordinasi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya. Stabilitas makroekonomi yang terpelihara sepanjang tahun 2015 tercermin dari pencapaian inflasi IHK yang berada dalam rentang sasaran inflasi. Sementara meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar yang terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter AS, implementasi devaluasi yuan oleh People's Bank of China (PBoC), dan terbatasnya pasokan valas telah berhasil diredam melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah. Meskipun kondisi perekonomian nasional relatif terjaga, upaya pencegahan dan penanganan risiko dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan tetap ditingkatkan. Hal tersebut mengingatkan masih tingginya potensi risiko di pasar keuangan global serta adanya potensi dampak rambatan dari berbagai kebijakan moneter negara–negara lain yang cenderung *divergen*.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah mencakup berbagai bidang. Selain untuk menjaga stabilitas makroekonomi, sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah juga difokuskan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi di bidang makroprudensial, terutama dalam rangka meningkatkan kinerja sektor riil secara langsung pada bidang perdagangan, konstruksi, dan industri manufaktur. Bank Indonesia turut berperan dalam mendukung penyaluran kredit program oleh Pemerintah, mengembangkan UMKM serta masyarakat kelautan dan perikanan, serta mempercepat pertumbuhan kewirausahaan nasional. Koordinasi dimaksud dilaksanakan sejalan dengan rangkaian Paket Kebijakan Ekonomi yang dirilis Pemerintah. Lebih jauh, momentum pertumbuhan nasional di sepanjang 2015 turut difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui penyelenggaraan koordinasi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang aman, handal, dan efisien.

Fokus terakhir terkait koordinasi kebijakan adalah mewujudkan reformasi struktural, khususnya demi terciptanya pasar keuangan yang dalam, kemudahan di bidang pengembangan sektor riil, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah yang semakin menjangkau seluruh wilayah nusantara. Reformasi pendalaman pasar keuangan ditujukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional yang lebih berkelanjutan melalui jalur pasar keuangan dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Sementara koordinasi dalam rangka implementasi reformasi struktural dalam

pengembangan sektor riil difokuskan pada bidang kemaritiman, pangan, infrastruktur energi, serta industri dan pariwisata. Adapun perwujudan reformasi struktural di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah difokuskan pada perluasan cakupan wilayah distribusi uang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Tentara Nasional Indonesia.

14.1. KOORDINASI DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI

Pencapaian kondisi perekonomian yang stabil dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar serta sistem keuangan yang ditempuh melalui koordinasi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri.

Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi

Inflasi IHK tahun 2015 sebesar 3,35% yang berada dalam rentang sasaran inflasi tidak terlepas dari koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Melalui Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), upaya pengendalian inflasi selama 2015 difokuskan untuk mengendalikan inflasi *volatile food* dan *administered prices*. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang reformasi kebijakan energi, terutama untuk komoditas BBM, Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan LPG. Dalam kaitan pengendalian inflasi pangan, sejumlah kebijakan diarahkan untuk mendorong ketersediaan stok dan efisiensi pasar, memperkuat data dan informasi, serta mengintensifkan komunikasi untuk mengelola ekspektasi.

Dukungan dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian inflasi di daerah juga semakin kuat. Semakin kuatnya peran Pemerintah Daerah tercermin pada perkembangan jumlah TPID yang terus mengalami peningkatan dan berbagai program pengendalian inflasi daerah yang difokuskan pada upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga pangan dan komunikasi yang intensif. Pada akhir 2015, telah terbentuk 442 TPID, yang terdiri dari 34 TPID provinsi dan 408 TPID kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat cukup pesat dibandingkan dengan tahun 2014 (396 TPID). Sejalan dengan peningkatan jumlah TPID yang cukup signifikan tersebut, maka koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kebijakan perlu semakin diperkuat. Dalam konteks ini, peran Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID sebagai koordinator

TPID dalam menjembatani arah kebijakan Kementerian/Lembaga dan program pengendalian inflasi di daerah menjadi semakin penting.

Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah salah satunya dilakukan dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID. Forum ini merupakan forum koordinasi tertinggi yang dimaksudkan untuk merumuskan arah strategi pengendalian inflasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Fokus utama pembahasan dalam Rakornas TPID 2015 adalah mengoptimalkan peran Pemda dalam mendukung stabilitas harga dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga di daerah. Hal ini didasari oleh inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur guna mendukung target swasembada pangan, serta agenda Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah guna memperbaiki sistem logistik yang perlu mendapat dukungan Pemda. Rakornas TPID keenam yang untuk pertama kalinya dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia menghasilkan penegasan bahwa upaya mengawal pencapaian sasaran inflasi harus didukung oleh semua pihak.

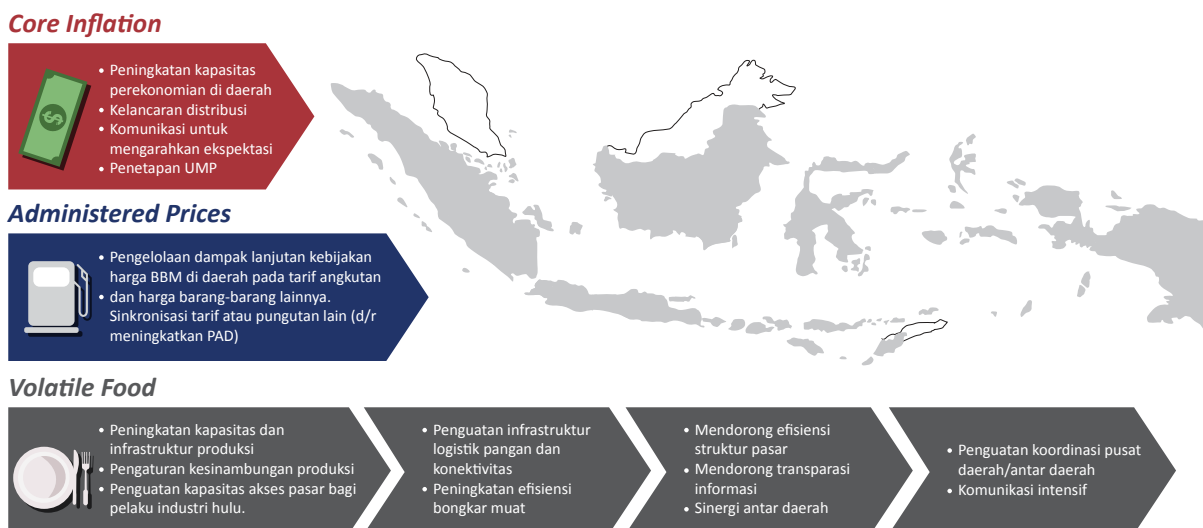
Sebagai tindak lanjut dari Rakornas TPID tersebut, pada tahun 2015 telah disusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi sampai dengan tahun 2018. *Roadmap* tersebut mencakup rencana berbagai upaya pengendalian inflasi dengan mengatasi sejumlah tantangan struktural, yang meliputi: (i) terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domestik, (ii) ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis SDA dan bahan baku impor, (iii) produksi pangan yang rentan

terhadap gangguan pasokan, (iv) inefisiensi struktur mikro pasar, (v) pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor BBM dan LPG, (vi) masih lemahnya konektivitas antar daerah, dan (vii) kondisi ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, pengendalian inflasi memerlukan upaya yang terkoordinasi dan terencana dengan baik, serta komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perlu keterlibatan secara intensif dari berbagai instansi dalam mengendalikan inflasi sehingga diperlukan acuan tunggal dalam rangka harmonisasi kebijakan. *Roadmap* Pengendalian Inflasi disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik masing-masing daerah dan juga mencakup langkah-langkah identifikasi, rekomendasi (jangka pendek dan menengah) serta dukungan/peran Bank Indonesia, Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah (Gambar 14.1). *Roadmap* Pengendalian Inflasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan program kerja Pemerintah dan Pemda yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah terkait *Roadmap* Pengendalian Inflasi tersebut tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I. Bersamaan dengan momentum peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I Pemerintah, Bank Indonesia juga turut merilis Paket Kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dimana salah satu fokus dalam paket tersebut yaitu mengenai pengendalian inflasi (Gambar 14.2).

Gambar 14.1. Pemetaan Permasalahan Inflasi berdasarkan Kewilayahan



Koordinasi terkait Stabilisasi Nilai Tukar

Kondisi ekonomi global memberikan tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi global yang melambat, ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat seiring dengan spekulasi *timing* perubahan suku bunga *Federal Funds Rate* (FFR) dan devaluasi mata uang Tiongkok yang terjadi di luar perkiraan. Kondisi tersebut meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah dan fluktuasi di pasar keuangan domestik yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya, terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas nilai tukar, melalui beberapa paket kebijakan ekonomi.

Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I dan II. Paket Kebijakan Bank Indonesia yang diluncurkan pada momentum peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I Pemerintah juga berfokus pada upaya stabilisasi nilai tukar. Dalam hal ini Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selain itu, dalam Paket Jilid I ini Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memperkuat pengelolaan *supply* dan *demand* valas (Gambar 14.2).

Koordinasi bersama dengan Pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar berlanjut pada peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi II. Dalam kebijakan tersebut Bank Indonesia dan Pemerintah semakin fokus dalam upaya

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya ketidakpastian sentimen global yang dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan FFR dan adanya devaluasi yuan yang berdampak signifikan terhadap pergerakan mata uang di negara kawasan. Sinergi kebijakan dilakukan untuk mendorong devisa hasil ekspor (DHE) agar menetap lebih lama di dalam negeri. Dalam hal ini, Pemerintah akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak bunga deposito kepada para eksportir yang bersedia menyimpan devisa hasil ekspor di perbankan Indonesia atau menukarkannya ke dalam bentuk rupiah. Kebijakan dimaksud berjalan seiring dengan langkah penguatan laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang bertujuan meningkatkan tingkat transparansi serta ketersediaan informasi atas penggunaan devisa.

Koordinasi terkait Stabilitas Sistem Keuangan

Risiko yang semakin meningkat di pasar keuangan global telah memengaruhi perkembangan perekonomian domestik selama 2015. Pemulihan ekonomi dunia yang masih berjalan secara tidak seimbang dan diikuti oleh berlanjutnya pelemahan harga komoditas dunia, serta ketidakpastian waktu dan besaran kenaikan suku bunga acuan *Fed Fund Rate* telah menimbulkan respons kebijakan yang beragam antar negara. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia semakin memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik, khususnya dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis (*crisis prevention* dan *crisis resolution*) melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Forum yang

Gambar 14.2. Koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Makroekonomi



terbentuk sejak 2012 tersebut terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Efektifitas FKSSK semakin meningkat, baik di tingkat teknis melalui forum *Deputies' Meeting*, maupun di *high-level* dalam melakukan asesmen terkait kondisi stabilitas sistem keuangan dan merumuskan rekomendasi bersama. Hal tersebut tercermin dari dibentuknya lima *working group* yang bertujuan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan tugas FKSSK yang terbagi atas tiga fungsi, yaitu pemantauan pencegahan krisis (*crisis prevention surveillance*), penguatan kebijakan penanganan krisis (*policy options*), dan panduan penanganan krisis (*crisis management guidance*).¹

Untuk semakin mengoptimalkan koordinasi, FKSSK pada tahun 2015 kembali melakukan simulasi uji kesiapan protokol pengambilan keputusan dalam menangani situasi krisis. Langkah ini mengevaluasi kecukupan prosedur perangkat ketentuan di masing-masing institusi pelaksana Protokol Manajemen Krisis (PMK), kecukupan *crisis binder*, serta kecukupan prosedur komunikasi. Simulasi yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2015 tersebut merupakan salah satu agenda utama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Berbeda dengan simulasi yang dilakukan pada periode sebelumnya, simulasi kali ini lebih berfokus untuk menguji kelengkapan dan *practicality* dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), terutama dalam hal pengambilan keputusan dalam penentuan status Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) serta penanganan bank bermasalah sesuai dengan ketentuan dalam RUU JPSK. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam kerangka kerja RUU JPSK, hal yang diuji adalah kontribusi asesmen dalam penetapan status SSK Nasional. Adapun area pengambilan keputusan yang diuji antara lain: (i) menentukan dampak tekanan terhadap nilai tukar dan sistem keuangan sehingga menyebabkan timbulnya perubahan status dari normal menjadi tidak normal, (ii) menentukan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) kepada bank yang mengalami permasalahan likuiditas, (iii) menentukan

apakah bank yang mengalami permasalahan likuiditas memiliki dampak sistemik, (iv) menentukan opsi kebijakan untuk meredakan tekanan nilai tukar dan/atau sistem keuangan, dan (v) menetapkan solusi dalam bank yang memiliki dampak sistemik namun tidak memenuhi persyaratan fasilitas penyediaan likuiditas Bank Indonesia.

Selain memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga, Bank Indonesia juga bersinergi untuk menyusun landasan hukum yang kuat dalam penanganan krisis. Landasan hukum yang dimaksud adalah yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang OJK. Dalam kedua undang-undang dimaksud, disebutkan perlunya keberadaan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum utama dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi krisis. Rancangan Undang-Undang (RUU) JPSK tersebut meliputi koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), penanganan kondisi SSK dengan status tidak normal, serta penanganan permasalahan bank yang berdampak sistemik, baik dalam kondisi SSK dengan status normal maupun kondisi tidak normal. Di penghujung 2015, RUU JPSK tersebut telah berhasil disusun dan akan disahkan dalam waktu dekat.

14.2. KOORDINASI DALAM RANGKA MENDORONG MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

Momentum pertumbuhan perlu senantiasa dijaga dan semakin didorong untuk keberlanjutan kinerja perekonomian nasional dalam jangka panjang, terlebih di tengah pemulihan perekonomian global yang masih diliputi dengan penuh ketidakpastian. Koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada bidang makroprudensial dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah menjadi bagian penting untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Koordinasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Makroprudensial

Kondisi perekonomian nasional cenderung mengalami perlambatan seiring pelemahan harga komoditas ekspor andalan. Hal ini mengindikasikan semakin pentingnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan sektor riil dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama tahun 2015. Dengan mengacu kepada Sembilan Program Prioritas Nawa Cita yang dicanangkan oleh Pemerintah,

1 *Working Group I* dan *Working Group II* berada dalam fungsi pencegahan krisis, dimana masing-masing bertugas untuk menentukan indikator dalam rangka asesmen terhadap status stabilitas sistem keuangan secara nasional serta meningkatkan kualitas pemantauan stabilitas sistem keuangan dan melaksanakan pertukaran data dan informasi. Sementara fungsi *policy option* dirumuskan oleh WG III dan WG IV, yang masing-masing berfokus untuk menyempurnakan dan melengkapi *Standard Operating Procedure* aktivasi *International Financial Safety Net* (IFSN) serta memperkuat kerangka resolusi bank. Sedangkan WG V memperbaharui mekanisme *crisis binder* dan menyusun dokumen untuk pelaksanaan *Financial System Assessment Program* (FSAP).

Bank Indonesia melakukan sinergi untuk mendorong harmonisasi pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang telah dipetakan ke dalam perencanaan pengembangan sektor yang menjadi prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejalan dengan pengembangan sektor unggulan, Bank Indonesia turut berperan sebagai mitra (*counterpart*) dari Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung penyaluran kredit program oleh Pemerintah. Kontribusi Bank Indonesia dalam hal ini antara lain berupa evaluasi penyaluran KUR selama 2014, serta rekomendasi terkait penyusunan pedoman pelaksanaan dan pencapaian target penyaluran KUR selama 2015. Hal ini ditegaskan melalui Keputusan Presiden No. 14 tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh relaksasi ketentuan *Loan/Financing to Value Ratio* (LTV/FTV) kredit properti dan ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor yang diharapkan dapat mendorong kinerja sektor perdagangan, konstruksi, dan industri manufaktur.

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, Bank Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama untuk mengembangkan UMKM dan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan akses dan jangkauan layanan keuangan. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas pemberdayaan lembaga keuangan/penyedia jasa/pendamping UMKM di sektor kelautan dan perikanan, melakukan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan dalam lingkup kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan *less cash society*, serta pertukaran data dan informasi. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman No. 17/1/NK.KKP/GBI/2015 dan No.07/MEN-KKP/KB/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, pelaksanaan program pada tahun 2015 lebih diarahkan pada upaya untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan wirausaha. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sinergi dengan *stakeholders* (kementerian, lembaga/instansi) dengan fokus pada pengembangan program inkubator bisnis. Misalnya, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman No. 16/2/GBI/DPAU/NK tanggal 5 November 2014 tentang Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pondok Pesantren dan Peningkatan Layanan Non-tunai untuk Transaksi Keuangan di Lingkungan Kementerian Agama, Bank Indonesia bersama

Kementerian Agama telah merumuskan kerangka kerja yang terdiri dari tiga program utama. Program tersebut yaitu program kemandirian ekonomi pesantren melalui peningkatan wawasan mengenai ekonomi syariah, program kewirausahaan yang diwujudkan melalui pendirian inkubator bisnis syariah, dan program pionir wirausaha pesantren yang dilakukan antara lain melalui pendampingan usaha, fasilitasi akses pemasaran, dan fasilitasi akses keuangan. Program pemberdayaan ekonomi tersebut pada prinsipnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.

Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan program kewirausahaan bagi warga binaan pemasyarakatan serta peningkatan kapasitas dan perubahan *mindset* bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Program ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Bank Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kerja sama Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Nomor 16/1/GBI/DPAU/NK tanggal 18 September 2014. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian bantuan teknis kepada petugas pemasyarakatan, pelatihan dan/atau pendampingan usaha kepada warga binaan pemasyarakatan dengan mengembangkan komoditas tanaman pangan dan hortikultura penyumbang inflasi atau komoditas lain yang dapat menunjang perekonomian daerah.

Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian juga bekerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor pertanian. Hal ini dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman No. 17/2A/NK/GBI/2015 dan No. 11/MoU/HK.230/M/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 dengan ruang lingkup, antara lain: (i) peningkatan kapasitas usaha di sektor pertanian, khususnya komoditas penyumbang inflasi, (ii) pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya skala mikro, kecil dan menengah yang dilakukan petani, kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk peningkatan akses dan jangkauan keuangan, (iii) fasilitasi pemberdayaan kepada lembaga keuangan di sektor pertanian, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan penyuluh pertanian, (iv) implementasi GNNT untuk layanan keuangan di bidang pertanian, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, dan (v) pemberian sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Sementara untuk mendukung pengendalian harga cabai yang cenderung meningkat pada akhir tahun, Bank Indonesia mendukung Gerakan Tanam Cabai Musim Kemarau (GTCK) yang digagas oleh Kementerian Pertanian di beberapa daerah yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Maluku

Utara. Gerakan ini diperluas pada klaster binaan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung.

Berbagai kebijakan, program, dan kerja sama Bank Indonesia dengan Pemerintah di atas dilaksanakan seiring dengan upaya Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang dikemas dalam rangkaian Paket Kebijakan Ekonomi. Dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah mengumumkan berbagai kebijakan yang dikemas dalam 8 Paket Kebijakan Ekonomi di tahun 2015 (Tabel 14.1). Kebijakan-kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini antara lain mendorong percepatan realisasi program-program prioritas nasional, mempercepat realisasi belanja pemerintah, dan kemudahan investasi di sektor properti yang tertera di dalam Paket Jilid I. Kebijakan Pemerintah lainnya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yaitu mempermudah investasi di kawasan industri sesuai zona dan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor alat transportasi untuk mendukung pertumbuhan sektor perhubungan, sebagaimana tertera dalam Paket Jilid II. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif listrik untuk industri padat karya dan berdaya saing lemah serta penurunan suku bunga dan perluasan penerima KUR (Paket Jilid III). Sementara pada Paket Kebijakan Ekonomi IV, Pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memberikan fasilitas pinjaman untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi ekspor, bersifat padat karya, dan rentan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah juga memberikan insentif pajak revaluasi aset serta menghapus pajak berganda atas kontrak kolektif dana investasi real estate (KIK DIRE) melalui Paket Kebijakan V. Pemberian insentif untuk delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga dilakukan Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi (Paket Jilid VI).

Pada bulan Desember 2015 Pemerintah juga menambah kebijakan untuk menjaga momentum positif. Kebijakan ini diantaranya adalah memberikan insentif pajak untuk industri padat karya serta keringanan PPh pasal 21 untuk pegawai di industri padat karya, sebagaimana tertera dalam Paket Jilid VII. Kebijakan terakhir di tahun 2015 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan insentif pembangunan kilang minyak baru serta penghapusan bea masuk impor suku cadang pesawat yang tercakup dalam Paket Jilid VIII.

Koordinasi Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga terkait juga dilakukan dalam mendukung berbagai kesepakatan kerja sama internasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menyadari pentingnya peranan investasi sebagai motor pertumbuhan, Bank Indonesia mendukung pemerintah untuk menjadikan proyek pembiayaan infrastruktur di negara *emerging* sebagai fokus utama pembahasan fora kerja sama internasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terlibat aktif dalam pembentukan Islamic Investment Infrastructure Bank atau World Islamic Investment Bank (WIIB) untuk membantu pembiayaan proyek infrastruktur negara anggota IDB.

Bank Indonesia juga terlibat aktif dan mendukung pemerintah dalam pembentukan *Global Infrastructure Hub* (GIH) di fora G20, yang diharapkan dapat beroperasi secepatnya sebagai pusat informasi dalam investasi infrastruktur. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung komitmen pemerintah dalam G20 *growth strategy*, yang merupakan strategi pertumbuhan komprehensif untuk memastikan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif. Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan menyusun finalisasi G20 *Adjusted Growth Strategy* yang merupakan komitmen para negara anggota G20 untuk memelihara

Tabel 14.1. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Paket Jilid I 9 Sept 2015	Paket Jilid II 29 Sept 2015	Paket Jilid III 7 Okt 2015	Paket Jilid IV 15 Okt 2015	Paket Jilid V 23 Okt 2015	Paket Jilid VI 5 Nov 2015	Paket Jilid VII 4 Des 2015	Paket Jilid VIII 21 Des 2015
<ul style="list-style-type: none"> Akselerasi penyerapan anggaran Percepatan proyek strategis nasional Paket kemudahan investasi di sektor properti 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian insentif kawasan industri sesuai zona Pembebasan PPN impor alat transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Insentif listrik untuk industri padat karya dan berdaya saing lemah Penurunan tingkat suku bunga dan perluasan penerima KUR 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kredit untuk UKM berorientasi ekspor dari LPEI Mendorong kemudahan akses KUR 	<ul style="list-style-type: none"> Insentif Pajak Revaluasi Aset Menghapuskan Pajak Berganda Atas Kontrak Kolektif Dana Investasi Real Estate (REITS) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pemberian insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Insentif PPh 21 Selama Dua Tahun untuk industri padat karya dan berorientasi ekspor Insentif pajak untuk Industri padat karya 	<ul style="list-style-type: none"> Insentif Pembangunan Kilang minyak baru untuk ketahanan energi Insentif untuk industri jasa transportasi udara

momentum pertumbuhan di negaranya masing-masing serta mendorong perekonomian di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Koordinasi terkait Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Momentum pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh sistem pembayaran yang optimal dan handal. Kondisi tersebut dapat terwujud melalui koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan kementerian dan otoritas terkait. Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan OJK membentuk Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI). Forum tersebut bertujuan untuk menyepakati arah kebijakan strategis sistem pembayaran, menyelaraskan kebijakan atau ketentuan terkait sistem pembayaran antar kementerian dan otoritas terkait, mengkoordinasikan program atau inisiatif lintas kementerian dan otoritas terkait, menggerakkan inovasi di bidang sistem pembayaran, serta memberikan rekomendasi program sosialisasi dan edukasi kebijakan sistem pembayaran.

FSPI dapat menjadi sarana koordinasi, komunikasi dan harmonisasi kebijakan, pengaturan dan program kerja masing-masing kementerian dan otoritas yang terkait dengan sistem pembayaran. Selain itu, pembentukan FSPI diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi industri untuk menyampaikan masukan kepada regulator dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan terkait Sistem Pembayaran. FSPI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/3/KEP.GBI/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia. Sekretariat FSPI berada di Bank Indonesia yang dalam pelaksanaan rapat dapat mengundang mitra diskusi dari berbagai kalangan diantaranya akademisi, profesional maupun kementerian lain yang terkait.

Bentuk koordinasi lainnya terkait sistem pembayaran dan pengedaran uang adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). MoU tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tersebut ditandatangani pada Maret 2015. MoU ini merupakan penyempurnaan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2010. Bentuk kerja sama yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut antara lain meliputi pertukaran informasi, perumusan ketentuan hukum atau pedoman

pelaksanaan audit kepatuhan, sosialisasi, pendidikan serta pelatihan, penelitian, penugasan pegawai Bank Indonesia di PPATK serta pengembangan sistem informasi.

Dalam hal pemeriksaan langsung (audit), Bank Indonesia dan PPATK saling berkoordinasi dalam rangka audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dibawah pengawasan Bank Indonesia, serta melakukan pemeriksaan bersama (*joint audit*). Hal ini dilakukan dalam rangka menilai tingkat kepatuhan PJK tersebut terhadap penerapan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, BI dan PPATK telah melakukan pendidikan dan pelatihan baik secara mandiri maupun bersama-sama yang melibatkan pegawai dari kedua instansi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain *Workshop Regulatory Guidance* terkait Anti Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (APU dan PPT) serta *Workshop Persiapan Mutual Evaluation Financial Action Task Force (FATF)*.

Selain koordinasi yang dituangkan dalam nota kesepahaman, BI dan PPATK sebagai anggota Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga telah melakukan beberapa kegiatan kerja sama. Bentuk kerja sama tersebut antara lain melakukan koordinasi dan harmonisasi untuk memblokir dana yang dimiliki oleh terduga yang masuk dalam Daftar Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), berlandaskan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Selain itu, PPATK mengkoordinasikan penyusunan *National Risk Assessment (NRA)* yang melibatkan Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), serta para penegak hukum, badan intelijen, lembaga keuangan dan otoritas terkait lainnya. Proyek NRA tersebut merupakan proyek nasional strategis yang terdiri dari proses identifikasi, penilaian dan pemahaman risiko yang komprehensif terhadap Indonesia yang ditimbulkan oleh *money laundering* dan pendanaan terorisme. Fokus NRA adalah pada peraturan perundang-undangan/kebijakan dan penegakannya, serta mitigasi risiko.

Menindaklanjuti diterbitkannya PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, Bank Indonesia secara aktif melakukan koordinasi terkait ketentuan dimaksud dengan berbagai lembaga. Selama 2015 telah dilaksanakan penandatanganan 26 Pokok-pokok Kesepahaman (PPK) antara Kepala KPwDN Bank Indonesia di level provinsi dengan Kepala Kepolisian Daerah

(Kapolda) setempat. Adapun substansi PPK adalah untuk menyepakati tata cara pelaksanaan kerja sama dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di daerah (Tabel 14.2).

Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) tentang Kerja Sama dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kapolri pada 1 September 2014. Kesepakatan tersebut juga menindaklanjuti penandatanganan empat Pedoman Kerja (PK) yaitu “Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing” yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) pada 24 September 2014, “Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah” yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan Kabareskrim pada 20 November 2015, “Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Bank Indonesia dan Pengawasan Barang Berharga Milik Negara” yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Korps Brigade Mobil (Kakor Brimob) pada 23 Februari 2015, serta “Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang Melakukan Kegiatan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengolahan Uang Rupiah” yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) pada 26 Februari 2015.

Selain melakukan koordinasi dengan otoritas dan lembaga domestik terkait, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia juga melakukan langkah-langkah penguatan dalam fora internasional melalui kerja sama baik dengan bank sentral lain maupun lembaga internasional. Koordinasi dalam fora internasional yang dilakukan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dilakukan antara lain di *The Financial Sector Reform and Strengthening (FIRST) Initiative Consultative Group Meeting 2015*, WCPSS, koordinasi terkait *National Risk Assessment*, serta *Technical Assistance (TA) World Bank* terkait *Financial Inclusion Support Framework*. Pada skala regional, Bank Indonesia terlibat aktif dalam kerja sama ASEAN di bidang Sistem Pembayaran dalam *Working Committee on Payment and Settlement System (WCPSS)*. Fokus utama WCPSS di sepanjang tahun 2015 adalah melanjutkan upaya fasilitasi sistem pembayaran untuk mendukung liberalisasi aliran barang, jasa, modal dan investasi dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan infrastruktur sistem pembayaran *high value* guna mencapai level kesetaraan penyediaan infrastruktur sistem pembayaran di antara negara ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) dengan BCLMV (Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam).

Bank Indonesia juga melakukan inisiatif dan *arrangement* secara bilateral dengan beberapa negara untuk mengembangkan kerja sama dan mendukung transaksi perdagangan yang lebih efisien. Beberapa upaya yang mulai dilakukan antara lain inisiatif pengembangan *local/regional currency settlement* dan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran untuk mendukung investasi keuangan *cross border* (seperti pasar modal) dan pengembangan

Tabel 14.2. Bentuk Koordinasi Antarlembaga

No	Lembaga/Instansi	Materi Koordinasi
1	Otoritas Jasa Keuangan	Perusahaan asuransi, perusahaan dana reksa, dan perusahaan pembiayaan
2	Kementerian Luar Negeri	Wilayah ekstrateritorial dan lembaga internasional
3	Kementerian Agama	Biaya haji dan umroh
4	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur strategis dan transaksi pada angkutan darat, laut, dan udara
5	Kementerian Perindustrian	Acuan baku kurs dan industri tekstil
6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perhotelan dan tour and travel
7	Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Infrastruktur strategis dan kuota <i>Feed in Tariff (FIT)</i>
8	Direktorat Minyak dan Gas serta SKK Migas	Pemetaan terhadap transaksi hulu migas
9	Direktorat Ketenagalistrikan	Infrastruktur strategis dan Kontrak PT PLN dengan vendor
10	BPH Migas	Penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
11	Direktorat Jenderal Pajak	Pembukuan dan pajak
12	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Toko bebas bea
13	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Penanaman modal asing di Indonesia
14	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi	Rekapitulasi produk berjangka yang ditransaksikan di dalam dan/atau di luar bursa berjangka

penyelesaian transaksi perdagangan (*trade settlement*). Penggunaan *local currency* diharapkan akan mengurangi ketergantungan penyelesaian transaksi pembayaran *cross border* saat ini yang masih dalam denominasi US dollar dan sekaligus meningkatkan efisiensi dari sisi rate dan biaya konversi.

Sementara untuk transaksi ritel masyarakat, kerja sama dalam WPCSS difokuskan pada peningkatan efisiensi transaksi menggunakan kartu.² Kebijakan yang diusulkan antara lain terkait dengan penetapan tarif/biaya transaksi, menghilangkan ketentuan yang merugikan masyarakat, dan yang membatasi ruang gerak pelaku domestik. Selanjutnya, masih dalam rangka melanjutkan kerja sama mendukung pencapaian integrasi ASEAN setelah 2015, WCPSS telah menyusun rencana prioritas inisiatif pengembangan dan kerja sama bidang sistem pembayaran untuk dilaksanakan secara bersama-sama oleh negara ASEAN sampai dengan tahun 2025.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapabilitas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia mengoptimalkan kerja sama yang telah dibangun dengan otoritas (bank sentral) negara lain dan lembaga internasional. Kerja sama Bank Indonesia dengan World Bank yang diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis dalam kerangka *The Financial Sector Reform and Strengthening Initiative (FIRST)* dengan fokus penguatan infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional Indonesia pada aspek *legal and regulatory framework, payment system oversight* serta pengembangan remitansi serta inovasi instrumen pembayaran.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan masing-masing dan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal).³ Bank Indonesia juga memperluas koordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), OJK, dan PPATK. Koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan mata uang, khususnya kejahatan uang rupiah palsu. Dengan koordinasi tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah dan pihak lain yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan pembuatan/pengedaran uang rupiah palsu.

2 Transaksi ritel menggunakan kartu saat ini difasilitasi oleh pelaku internasional.

3 Botasupal atau Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012, yang terdiri dari 5 unsur, yaitu Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

Dalam melakukan perencanaan uang rupiah yang akan dicetak secara tahunan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Perencanaan rupiah tersebut meliputi perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang akan dicetak dan perencanaan penetapan pecahan. Dalam melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang akan dicetak, dengan memerhatikan beberapa variabel makro ekonomi antara lain asumsi tingkat inflasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, juga memerhatikan rencana tentang macam dan harga rupiah serta jumlah rupiah yang dimusnahkan. Variabel lain yang digunakan dalam menyusun perencanaan pencetakan uang rupiah adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

Sejak 2015 perencanaan pencetakan uang rupiah dilakukan untuk periode *multiyears* (tahun 2016 dan 2017). Perencanaan pencetakan uang tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan melakukan evaluasi tahunan terhadap asumsi makro ekonomi yang digunakan sebagai salah satu dasar penetapan perencanaan pencetakan uang. Dengan mempertimbangkan bahwa perencanaan uang rupiah secara *multiyears* baru mulai dilakukan, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Secara umum, perencanaan pencetakan uang rupiah secara *multiyears* dapat dilakukan, dengan tetap melakukan mitigasi risiko terkait kualitas bahan baku uang rupiah.

Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kegiatan pemusnahan uang rupiah. Bentuk koordinasi tersebut berupa penyampaian informasi jumlah uang rupiah yang dimusnahkan secara triwulanan kepada Kementerian Keuangan. Selama tahun 2015, Bank Indonesia telah menyampaikan informasi jumlah uang rupiah yang dimusnahkan untuk triwulan I 2015, triwulan II 2015, dan triwulan III 2015. Informasi jumlah dan nominal pemusnahan uang rupiah juga disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap satu tahun sekali. Informasi ini kemudian diumumkan kepada publik melalui penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk data pemusnahan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Peningkatan jumlah uang yang didistribusikan didukung oleh koordinasi Bank Indonesia dengan beberapa lembaga. Koordinasi Bank Indonesia dengan PT. Kereta Api Indonesia dimaksudkan untuk penyediaan moda

transportasi kereta api terjadwal untuk distribusi uang terutama di wilayah Jawa. Sedangkan koordinasi Bank Indonesia dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia dimaksudkan untuk penyediaan moda transportasi kapal penumpang terjadwal sebagai alternatif bagi Bank Indonesia, disamping kapal barang. Disamping itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap seluruh kegiatan distribusi uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu telah melaksanakan rapat koordinasi pada bulan Desember 2015. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang rupiah palsu, serta menyepakati program kerja untuk tahun 2016 (Gambar 14.3). Berdasarkan perkembangan temuan uang rupiah palsu, baik dari keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus tindak pidana maupun meningkatnya jumlah temuan uang rupiah palsu dari laporan bank, maka diperlukan penguatan koordinasi antar seluruh unsur Botasupal.

Selain koordinasi dalam wadah Botasupal, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan OJK untuk memberikan pelatihan kepada para hakim tentang peran dan tugas Bank Indonesia. Koordinasi Bank Indonesia dan MARI telah dilakukan selama 13 tahun dengan materi pelatihan mengenai perbankan. Sejak tahun 2014 koordinasi diperluas dengan menyertakan OJK. Pada tahun 2015, ruang lingkup koordinasi kembali diperluas dengan menyertakan materi mengenai Pengelolaan Uang Rupiah. Selama tahun 2015, kegiatan pelatihan atau disebut juga dengan Temu Wicara Hakim telah diadakan di 4 kota yaitu Palembang

dengan jumlah 30 hakim (Maret), Banjarmasin dengan jumlah 30 hakim (Mei), dan Manado dengan jumlah 30 hakim (Agustus), serta terakhir di Semarang dengan jumlah 30 hakim (Oktober). Unsur hakim yang mengikuti pelatihan terdiri dari hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

14.3. KOORDINASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN REFORMASI STRUKTURAL

Reformasi struktural sebagai salah satu agenda Pemerintah turut menjadi landasan dari koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan otoritas terkait selama tahun 2015, khususnya terkait dengan bidang pendalaman pasar keuangan, sektor riil, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah.

Koordinasi terkait Pendalaman Pasar Keuangan

Secara umum reformasi terkait pendalaman pasar keuangan bertujuan untuk memperkuat fundamental ekonomi melalui penciptaan stabilitas makro dan pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan ketersediaan likuiditas yang memadai, kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, perolehan harga yang wajar, serta risiko yang lebih minimal. Sebagai bagian dari reformasi pendalaman pasar keuangan tersebut, Bank Indonesia selama 2015 telah melakukan upaya pendalaman pasar valuta asing domestik melalui tiga ketentuan, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, PBI tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing, dan PBI tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Melalui ketentuan di atas, definisi transaksi derivatif tidak hanya terbatas pada transaksi *forward*, *swap*, dan *option* saja, namun juga mencakup *cross currency swap* (CCS), yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran dana beserta bunganya dalam mata uang yang berbeda. Selain itu terdapat penambahan *underlying* yang diatur dalam transaksi valuta asing terhadap rupiah, yaitu tercakupnya perkiraan pendapatan (*income estimation*) dan perkiraan biaya (*expense estimation*) kegiatan perdagangan dan investasi dalam *underlying* transaksi. Sementara penghapusan persyaratan jangka waktu minimum transaksi derivatif satu minggu untuk pihak asing dalam rangka memberikan kepastian bagi pihak asing untuk mengoptimalkan instrumen-instrumen derivatif

Gambar 14.3. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu



sebagai instrumen *hedging* atas investasinya di Indonesia juga disahkan berdasarkan ketentuan tersebut.

Koordinasi dengan Pemerintah berlanjut dalam Paket Kebijakan Ekonomi I dan II yang bertujuan untuk melakukan pendalaman pada pasar keuangan. Bank Indonesia menyusun kebijakan intervensi di pasar *forward* untuk menjaga keseimbangan *supply* dan *demand* di pasar keuangan, serta menerbitkan Surat Deposito Bank Indonesia dan *Reverse Repo* (RR) Surat Berharga Negara bertenor dua minggu untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang. Sinergi melalui dua kebijakan di atas diharapkan dapat secara efektif memberikan sentimen positif terhadap pergerakan rupiah di pasar keuangan dan memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul akibat tekanan dari perekonomian global. Hal tersebut merupakan kondisi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tengah turbulensi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas perdagangan dan investasi di dalam negeri, melalui fleksibilitas transaksi oleh pelaku ekonomi, yang pada akhirnya akan mewujudkan terciptanya pasar keuangan yang lebih dalam. Perumusan kebijakan di atas dilakukan dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Bank diwajibkan untuk memenuhi pengaturan-pengaturan terkait mitigasi risiko, sebagaimana yang telah diatur pula oleh otoritas perbankan.

Koordinasi terkait Reformasi Sektor Riil

Koordinasi dalam rangka implementasi reformasi struktural dilakukan pada bidang unggulan yang menjadi prioritas utama pada tahun 2015 yaitu bidang kemaritiman, pangan, infrastruktur energi, serta industri dan pariwisata. Reformasi pada empat bidang yang menjadi penggerak utama perekonomian nasional tersebut semakin dipercepat untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Bentuk koordinasi yang diadakan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kemaritiman yaitu forum koordinasi nasional yang berlangsung pada tanggal 25 Mei 2015 di Ambon, Maluku. Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memadukan visi kemaritiman yang diturunkan menjadi strategi konkrit pada tingkat teknis untuk mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia. Pengembangan ekonomi berbasis maritim merupakan langkah tepat dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat mengingat potensi

maritim yang sangat besar untuk dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Selama ini pemanfaatan potensi tersebut masih relatif terbatas ditunjukkan oleh ekspor ikan dan hasil laut yang masih rendah dan industri berbasis maritim yang belum optimal. Sebaliknya kemaritiman justru sering dipandang sebagai pemisah dan belum menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan ekonomi berbasis maritim tidak hanya akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi berbasis maritim merupakan suatu terobosan yang tepat untuk memperkuat struktur ekonomi sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan keputusan terkait fokus pambangunan maritim yang diarahkan pada empat strategi, yaitu penguatan kedaulatan maritim, pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan sumber daya manusia, iptek dan budaya maritim. Pembahasan terhadap strategi pengembangan maritim dalam rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah memiliki kesiapan untuk mempercepat implementasinya dalam mewujudkan ekonomi berbasis maritim.

Selain kemaritiman, reformasi struktural juga dilakukan pada bidang infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Koordinasi bidang tersebut dilakukan pada 11 Agustus 2015 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rapat koordinasi membahas berbagai permasalahan dan tantangan serta rekomendasi dalam mewujudkan sinergi kebijakan makroekonomi, sektoral, dan strategi pembiayaan infrastruktur energi. Hal ini penting dalam mencapai ketahanan energi untuk mendukung industrialisasi, sehingga ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi, berkelanjutan dan inklusif. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi se-Kalimantan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan korporasi terkait, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mempersiapkan insentif fiskal dalam pengembangan infrastruktur energi. Fasilitas yang disediakan adalah rencana pemberian *tax holiday* dalam bentuk relaksasi jangka waktu yang lebih panjang bagi industri sumber

daya terbarukan dan industri pengilangan minyak bumi. Pemerintah juga menyediakan *tax allowance*, antara lain berupa pengurangan pajak penghasilan bersih, percepatan penyusutan serta *amortisasi* bagi bidang usaha terkait pertambangan, smelter dan pembangkit listrik. Terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur, Pemerintah mendorong skema *public-private partnership* (PPP) dalam proses akuisisi lahan, pengembangan proyek, termasuk penjaminan pemerintah melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.

Sementara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemerintah memberikan prioritas kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur untuk memanfaatkan tata ruang serta penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Beberapa pencapaian yaitu telah diselesaikannya perubahan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi di Kalimantan. Selain itu, untuk mendukung percepatan pembangunan listrik 35.000 MW, Kementerian LHK juga telah memproses berbagai perijinan yang menjadi kewenangannya, termasuk berbagai persetujuan prinsip kepada PT. PLN untuk mempercepat penyediaan listrik. Terkait kawasan hutan, berdasarkan arahan Presiden RI, pada seluruh fungsi hutan mulai dari cagar alam, hutan lindung, hingga hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur energi. Namun demikian, hal ini tetap membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW.

Kementerian ESDM juga menjadikan pengembangan infrastruktur energi sebagai prioritas dengan memberikan kemudahan perijinan. Implementasi kebijakan dan proyek strategis dilakukan untuk melaksanakan bauran energi nasional. Terkait listrik dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Kementerian ESDM melakukan penyederhanaan proses perizinan dari 52 tahap menjadi hanya 29 tahap sehingga memperpendek waktu proses. Demikian juga terkait dengan kegiatan di sektor migas dan minerba. Terkait dengan proyek listrik, selain relaksasi juga dilakukan penyederhanaan prosedur penetapan harga jual listrik serta perpanjangan jaminan kontrak hingga mencapai 25 tahun.

Pengembangan di sektor industri dan pariwisata dilaksanakan sebagai upaya mempercepat peningkatan daya saing sektor industri dan pariwisata. Rapat koordinasi yang diselenggarakan melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah berlangsung pada 13 November 2015 di Yogyakarta. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan daya saing sektor industri dan pariwisata, antara lain menerbitkan rangkaian Paket

Kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk mendukung daya saing industri nasional. Kebijakan tersebut antara lain mencakup upaya untuk mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokratisasi, mempermudah perizinan investasi dan pemberian insentif pajak untuk alat transportasi, dan penyederhanaan izin pertanahan. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kepariwisataan, beberapa langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah mencakup kebijakan pembebasan visa kunjungan menjadi total 90 negara, kemudahan wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia menggunakan *yacht* dan mempercepat pengembangan infrastruktur bandara dan pelabuhan laut.

Berbagai bentuk koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang telah dijelaskan di atas dilaksanakan seiring dengan upaya Pemerintah dalam mempercepat reformasi struktural. Selain bersifat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, berbagai kebijakan dalam delapan paket kebijakan Pemerintah juga dilakukan dalam rangka mempercepat reformasi struktural. Kebijakan ini berupa penyederhanaan izin usaha hingga ke tingkat daerah serta pembaharuan kelembagaan koperasi (Paket Jilid I). Selain itu, Pemerintah juga melakukan reformasi perizinan investasi industri dan sektor kehutanan, sebagaimana dituangkan dalam Paket Jilid II. Masih dalam rangka mempercepat reformasi struktural, Pemerintah merombak sistem pengupahan dengan menerbitkan tujuh peraturan ketenagakerjaan sekaligus yang meliputi peraturan tentang formula upah minimum, upah minimum provinsi, upah minimum sektoral, struktur skala upah, tunjangan hari raya, uang jasa, serta kebutuhan hidup layak (Paket Jilid IV). Sementara itu, reformasi struktural di bidang perbankan dilakukan melalui penyederhanaan izin penerbitan produk-produk perbankan syariah (Paket Jilid V). Adapun reformasi struktural dalam bidang Sumber Daya Air (SDA) dilaksanakan melalui Paket Jilid VI yang memberi kepastian tetap berlakunya izin investasi sumber daya air bagi investor yang telah menerima sebelum dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh MK. Sementara melalui Paket Jilid VII, pemerintah menyederhanakan layanan sertifikat tanah agar proses penerbitannya lebih singkat. Kebijakan reformasi struktural selanjutnya dikemas dalam Paket Jilid VIII, yaitu melalui *One Map Policy* (Tabel 14.3).

Koordinasi terkait Reformasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan uang, Undang-Undang Mata Uang mengamanatkan Bank Indonesia untuk berkoordinasi dengan Pemerintah pada

Tabel 14.3. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Rangka Reformasi Sektor Riil

Paket Jilid I 9 Sept 2015	Paket Jilid II 29 Sept 2015	Paket Jilid IV 15 Okt 2015	Paket Jilid V 23 Okt 2015	Paket Jilid VI 5 Nov 2015	Paket Jilid VII 4 Des 2015	Paket Jilid VIII 21 Des 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan izin usaha hingga ke tingkat daerah • Memperkuat kelembagaan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemangkasan tahap perizinan investasi industri serta lingkungan hidup dan kehutanan • Percepatan pengurusan <i>tax allowance</i> dan <i>tax holiday</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi pengupahan untuk memberikan kepastian usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan izin produk perbankan syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemangkasan tahap perizinan impor bahan baku obat • Reformasi regulasi perusahaan Sumber Daya Air (SDA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemangkasan tahap penerbitan dan peningkatan layanan sertifikasi tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan melalui <i>One Map Policy</i>

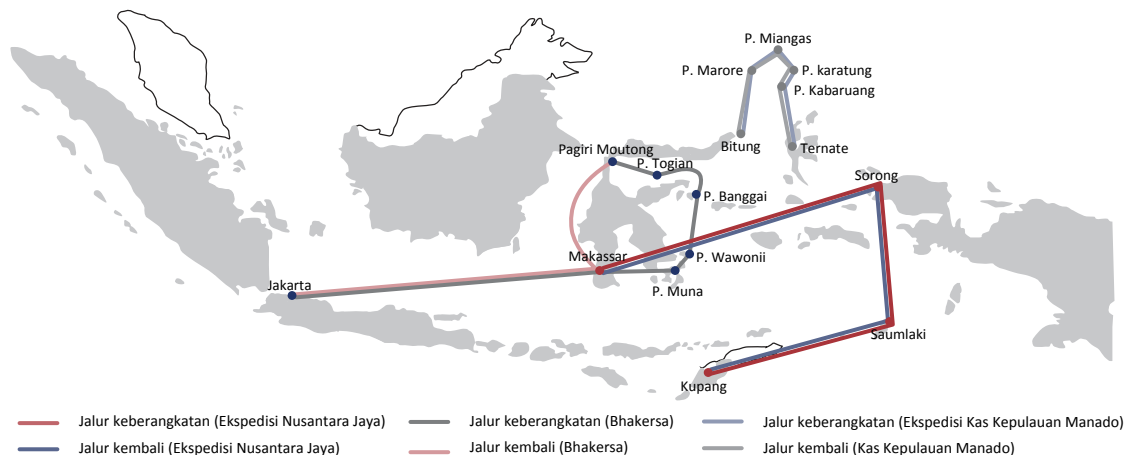
tiga tahapan kegiatan pengelolaan uang rupiah, meliputi perencanaan, pencetakan serta pemusnahan rupiah. Reformasi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah difokuskan pada perluasan cakupan wilayah distribusi uang di seluruh wilayah NKRI.

Dalam program reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas secara nasional, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan badan usaha yang menyelenggarakan moda transportasi. Koordinasi yang dilakukan bersama dengan Kementerian Perhubungan meliputi pemenuhan kelancaran distribusi uang di wilayah NKRI, penerapan kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI, pelaksanaan gerakan nasional non-tunai dan perluasan akses keuangan inklusif, pemenuhan kelancaran distribusi logistik di wilayah NKRI dalam rangka pengendalian inflasi

dan pertumbuhan ekonomi, serta pertukaran data/informasi dan pelaksanaan penelitian bersama. Kerja sama distribusi uang di wilayah NKRI bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan kelancaran pengiriman uang ke seluruh wilayah Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat (Gambar 14.4).

Sementara itu, kerja sama dengan berbagai lembaga terus ditingkatkan agar cakupan distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI pada tahun 2019. Dalam upaya untuk menjangkau masyarakat khususnya di wilayah terpencil dan pulau terdepan NKRI, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL).

Gambar 14.4. Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas Nasional





Keterangan gambar:

Tari Srikandi melukiskan kecerdasan, keberanian, sekaligus kepewasaan seorang prajurit dalam memainkan berbagai senjata untuk memenangkan pertempuran. Perekonomian Indonesia perlu memiliki karakteristik seorang Srikandi dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.



BAGIAN IV

TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

TANTANGAN
GLOBAL

TANTANGAN
DOMESTIK

1
Pelonggaran Kebijakan
Moneter-Makroprudensial
Secara Berhati-hati

2
Sinergi Kebijakan
Moneter-Fiskal Mendorong
Pertumbuhan

3
Percepatan Reformasi
Struktural

BAURAN DAN ARAH KEBIJAKAN

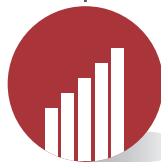
Perkiraan Ekonomi Indonesia

2016

Inflasi $4 \pm 1\%$

Pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,6%

Defisit transaksi berjalan sedikit meningkat, namun tetap aman dan mempunyai struktur yang lebih sehat



Prospek Jangka Menengah

2020

Inflasi $3,5 \pm 1\%$

Pertumbuhan Ekonomi 6,3 - 6,8%

Defisit transaksi berjalan dibawah batas aman 3% dari PDB dengan struktur yang lebih sehat

BAGIAN IV

TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan berjalan gradual, sementara Eropa dan Jepang diperkirakan tetap menerapkan kebijakan *Quantitative Easing* (QE) sehingga divergensi kebijakan moneter mulai menyempit. Namun demikian, meski divergensi kebijakan moneter di negara maju mulai berkurang, kinerja perekonomian Tiongkok yang belum pulih dapat memicu sentimen negatif investor terhadap negara *emerging markets*. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Tantangan global lainnya mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Dalam kaitan ini, peluang Indonesia menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya.

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Tantangan struktural yang pertama adalah pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air sebagai faktor input utama yang diperlukan dalam proses transformasi menuju industrialisasi. Di sektor pangan, jumlah dan kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas dan teknologi yang mencukupi. Di sisi lain, permintaan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras akibat minimnya diversifikasi pangan. Di sektor energi,

ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan energi masih terus berlangsung. Di sisi produksi, berbagai kendala pembangunan infrastruktur energi menyebabkan ketidakmampuan produksi energi domestik untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Di sisi permintaan, minimnya pemanfaatan bahan bakar alternatif belum mampu menggeser penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan. Tantangan struktural kedua adalah tantangan memperkuat daya saing industri, maritim, dan pariwisata. *Terkait daya saing industri*, sektor industri di Indonesia masih berbasis komoditas ekstraktif dan yang bernilai tambah rendah. Di samping itu, keunggulan komparatif Indonesia terus mengalami penurunan terutama pada sektor dengan muatan teknologi menengah dan tinggi. Untuk itu, diperlukan strategi untuk memperkuat daya saing investasi guna menjadi basis produksi dalam memasok dalam rantai nilai global. *Terkait sektor maritim*, Indonesia dihadapkan pada tantangan kedaulatan wilayah, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi maritim. Di *sektor pariwisata*, tantangan utama pengembangan sektor ini bersumber dari terbatasnya infrastruktur yang pada gilirannya menghambat akses dan waktu jelajah wisatawan. Tantangan struktural ketiga adalah tantangan untuk memperkuat daya dukung pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan dan mendorong aliran masuk modal asing dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Tantangan struktural keempat adalah tantangan untuk memperluas tingkat partisipasi ekonomi masyarakat dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi.

Empat tantangan permasalahan struktural domestik tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan modal dasar pembangunan khususnya yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Berdasarkan pendekatan *growth diagnostic*, tantangan utama dalam perekonomian di hampir seluruh wilayah Indonesia bersumber dari permasalahan infrastruktur listrik, konektivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Listrik sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi belum dapat terpenuhi dengan baik terutama di luar Jawa. Sementara itu, belum

terintegrasinya infrastruktur terkait konektivitas menjadi hambatan dalam upaya menurunkan biaya logistik pada rantai nilai domestik, memperkuat integrasi internal, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari sisi kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan tenaga kerja yang mayoritas merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah belum kompatibel dengan upaya penguatan struktur ekonomi pada sektor teknologi menengah-tinggi. Di sisi iklim usaha, meski sudah jauh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, perbaikan iklim usaha perlu terus ditingkatkan antara lain melalui kemudahan terkait ijin investasi, mekanisme perpajakan, penyederhanaan birokrasi, dan perbaikan manajemen pemerintah. Di sisi iptek, belum optimalnya dukungan iptek dalam meningkatkan daya saing sektor produksi dan jasa merupakan permasalahan yang harus terus dicermati

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Di sisi moneter, Bank Indonesia akan secara konsisten dan berhati-hati mengarahkan kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), dan nilai tukar untuk menjaga inflasi sesuai dengan sarannya, mengelola defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat, dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang telah tercipta. Dalam kaitan tersebut, kebijakan suku bunga ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi, permintaan domestik, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya guna mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi dan defisit transaksi berjalan yang sehat dengan tetap mendukung momentum pertumbuhan yang sedang berjalan. Kebijakan GWM akan ditetapkan secara berhati-hati untuk mendukung kecukupan likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan nilai tukar tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan nilai fundamental. Upaya menjaga stabilitas rupiah ini sangat penting untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan sehingga akan memperkuat kinerja perekonomian secara

keseluruhan. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan melakukan penguatan operasi moneter baik rupiah maupun valas. Berbagai kebijakan tersebut juga akan terus diperkuat Bank Indonesia antara lain melalui pengelolaan lalu lintas devisa yang berhati-hati dan penguatan jaring pengaman keuangan internasional melalui kerja sama dengan berbagai otoritas pemangku kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Bank Indonesia juga terus mendorong pendalaman pasar keuangan dan perluasan akses keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan, efisiensi perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam upaya melanjutkan pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia antara lain mendorong penggunaan *General Master Repurchase Agreement* (GMRA) dan melanjutkan pengembangan instrumen pasar uang rupiah dan valas. Dalam konteks akses keuangan, Bank Indonesia akan menempuh kebijakan perluasan akses yang fokus pada pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD). Sementara itu, arah kebijakan pengembangan UMKM akan tetap fokus untuk mendukung tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dari sisi *supply* dan menyeimbangkan fungsi intermediasi perbankan. Pesatnya perkembangan sistem pembayaran diimbangi Bank Indonesia dengan menetapkan misi mengatur dan menjaga sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar. Seiring dengan berkembangnya peran pasar modal, Bank Indonesia turut menjaga keamanan dan kelancaraan aktivitas dan penyelesaian transaksi dalam pasar tersebut. Agar kebutuhan uang rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan berkualitas di seluruh Indonesia tercapai, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, dan industri untuk memperkuat infrastruktur pengolahan uang rupiah. Sementara itu, Pemerintah akan terus memperkuat stimulus fiskal untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang tercipta serta meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus mempercepat reformasi struktural untuk mendukung terciptanya modal dasar pembangunan yang kuat berupa infrastruktur yang berkualitas dan merata, sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi,

iklim investasi yang kondusif, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modal dasar pembangunan tersebut akan dimanfaatkan untuk menopang penguatan ketahanan pangan, energi, dan air, mendorong daya saing industri, maritim dan pariwisata, memperluas dan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang, serta penciptaan ekonomi inklusif. Dengan berbagai penguatan tersebut, struktur ekonomi Indonesia akan lebih terdiversifikasi sehingga lebih kokoh dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prospek perekonomian Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan sedikit membaik di tengah perekonomian global yang tumbuh terbatas. Meskipun harga komoditas global diperkirakan masih menurun, namun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 3,4% di atas tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2015 menjadi sekitar 5,2-5,6% pada tahun 2016. Pertumbuhan ini masih disokong oleh permintaan domestik dan investasi yang diperkirakan meningkat. Secara sektoral, sektor industri pengolahan diperkirakan masih menjadi penyokong utama perekonomian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi. Ketiga sektor tersebut diperkirakan masih menjadi unggulan, terutama sektor konstruksi sejalan pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Perekonomian daerah juga menunjukkan prospek yang membaik secara agregat pada tahun 2016, terutama perekonomian wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sejalan dengan membaiknya aktivitas perekonomian, defisit transaksi berjalan tahun 2016 diperkirakan sedikit meningkat, namun masih di bawah batas aman 3% dari PDB. Di sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial (TMF) diperkirakan akan mengalami peningkatan surplus. Secara keseluruhan, kinerja sektor eksternal NPI pada tahun 2016 diperkirakan akan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, inflasi diperkirakan masih terkendali sesuai dengan target sebesar $4\pm 1\%$ pada tahun 2016. Tekanan inflasi inti diperkirakan moderat dan tetap terkendali, sedangkan inflasi kelompok *administered prices* diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Inflasi kelompok *volatile food* diperkirakan sedikit meningkat sejalan dengan dampak El Nino.

Stabilitas Sistem Keuangan diperkirakan tetap terkendali didukung dengan terjaganya ketahanan perbankan dan membaiknya kinerja pasar keuangan. Prospek ekonomi ke depan yang membaik diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit masing-masing menjadi sebesar 13-15% dan 12-14%.

Perekonomian Indonesia jangka menengah akan semakin berkualitas ditopang oleh konsistensi kebijakan dalam mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta reformasi struktural. Sejalan dengan implementasi reformasi struktural yang ditempuh, perekonomian domestik ke depan diperkirakan akan semakin kuat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap meningkat mencapai 6,3-6,8% pada tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh membaiknya perekonomian global, keberhasilan reformasi struktural yang terlihat dari pembangunan infrastruktur dan kemudahan proses berinvestasi, serta peningkatan investasi di Indonesia. Konsumsi rumah tangga diperkirakan semakin kuat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk kelas menengah dan membaiknya perlindungan sosial. Reformasi struktural dalam bentuk pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan investasi langsung dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Belanja modal Pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur akan terbuka lebar seiring dengan penurunan subsidi. Defisit transaksi berjalan diperkirakan membaik seiring dengan meningkatnya daya saing produk Indonesia. Neraca TMF juga diperkirakan membaik sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, kinerja NPI menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dari sisi regional, peningkatan alokasi transfer ke daerah akan memperkuat perekonomian daerah dan mendukung pemerataan pembangunan di daerah. Sejalan dengan peningkatan kapasitas perekonomian domestik sebagai dampak dari konsistensi implementasi reformasi struktural serta dan konsistensi Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas makroekonomi, inflasi akan tetap terjaga dalam kisaran sasaran $3,5\pm 1\%$ dalam jangka menengah. Konsistensi implementasi reformasi struktural merupakan kunci bagi pencapaian kinerja positif prospek perekonomian domestik jangka menengah tersebut.



Keterangan gambar:

Upaya mengeksplorasi wilayah baru akan selalu menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, tantangan tersebut akan dapat diatasi dengan strategi yang tepat disertai langkah antisipasi yang memperhitungkan segala kemungkinan.



Bab 15

Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan

Perekonomian Indonesia masih akan menghadapi berbagai tantangan. Di sisi eksternal, tantangan utama bersumber dari risiko pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan penurunan harga komoditas. Di sisi domestik, tantangan struktural terkait: (i) ketahanan pangan, energi, dan air; (ii) daya saing industri, maritim, dan pariwisata; (iii) pembiayaan jangka panjang; dan (iv) ekonomi inklusif. Di samping itu, modal dasar pembangunan serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu diperkuat. Untuk itu, bauran kebijakan diarahkan untuk mengawal stabilitas, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural. Ke depan, struktur ekonomi Indonesia diharapkan lebih terdiversifikasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Momentum pertumbuhan ekonomi domestik ke depan akan menghadapi sejumlah tantangan baik global maupun domestik. Dari sisi global, risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun seiring dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter negara maju. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia ke depan berisiko berjalan lambat dan diiringi oleh berlanjutnya tren penurunan komoditas global. Meskipun risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun, terdapat risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang bersumber dari kondisi perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Dengan berbagai kondisi tersebut, aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia, akan membaik meskipun cenderung moderat dan mata uang dolar AS masih berada dalam tren penguatan. Dalam skala regional, perekonomian kawasan yang semakin terintegrasi serta besarnya peran Tiongkok dalam perekonomian negara berkembang lainnya, menghadapi risiko terkena dampak rambatan dari proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, baik dari jalur pelemahan harga komoditas, jalur perdagangan, maupun melalui jalur finansial.

Dari sisi domestik, penguatan perekonomian nasional masih menghadapi sejumlah permasalahan struktural. Pertama, tantangan mencapai ketahanan pangan, energi, dan air sebagai input faktor utama dalam mendukung proses transformasi menuju industrialisasi. Kedua, masih tertinggalnya Indonesia dalam rantai nilai global dibandingkan dengan negara pesaing di kawasan, dimana tidak berimbangnya struktur industri dan rendahnya produktivitas menyebabkan daya saing produk industri Indonesia relatif lemah. Ketiga, penguatan basis pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk mendukung investasi sebagai fondasi penggerak perekonomian. Keempat, menciptakan pemerataan bagi masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menghadapi sejumlah tantangan tersebut, sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat. Bauran kebijakan di tingkat nasional diarahkan untuk mengawal stabilitas makroekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih diversifikasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah panjang. Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati. Di sisi Pemerintah,

kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Di samping itu, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mempercepat reformasi struktural untuk mendukung terciptanya modal dasar pembangunan yang kuat berupa infrastruktur yang berkualitas dan merata, sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi, iklim investasi yang kondusif, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modal dasar pembangunan tersebut akan dimanfaatkan untuk: (i) menopang penguatan ketahanan pangan, energi, dan air; (ii) mendorong daya saing industri, maritim, dan pariwisata; (iii) memperluas dan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang; dan (iv) menciptakan ekonomi inklusif.

15.1. TANTANGAN PEREKONOMIAN

Tantangan Perekonomian Global

Ke depan, perekonomian global akan membaik namun masih menyimpan berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Terdapat beberapa tantangan yang mengiringi ketidakpastian ekonomi global, terutama risiko belum solidnya prospek pertumbuhan ekonomi global dan masih melemahnya harga komoditas. Meskipun prospek pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, masih terdapat risiko pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini antara lain terkait dengan masih belum cukup kuatnya prospek perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang merupakan motor perekonomian global. Di samping itu, kondisi perekonomian Tiongkok yang belum kuat juga mengandung risiko lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global ke depan. Di sisi pasar keuangan global, meski ketidakpastian di pasar keuangan akan membaik namun kondisi perekonomian Tiongkok yang belum stabil dapat memicu kembali peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun terkait dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter di negara maju, namun risiko yang bersumber dari masih lemahnya perekonomian Tiongkok tetap harus diwaspadai. Menyempitnya divergensi kebijakan moneter terkait dengan normalisasi kebijakan moneter AS yang diperkirakan bersifat gradual di tengah berlanjutnya kebijakan *Quantitative Easing* (QE) Eropa dan Jepang. Normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan masih akan berlanjut pada 2016 namun dengan kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) yang moderat seiring dengan kondisi perekonomian AS yang belum cukup solid. Di sisi lain, kebijakan QE di Eropa oleh *European Central Bank* (ECB) dipastikan masih akan terus berlanjut hingga triwulan

I 2017 dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Namun demikian, risiko perekonomian Tiongkok berpotensi menjadi sumber pemicu pembalikan sentimen investor terhadap negara *emerging markets* yang berdampak pada peningkatan *risk premium* dan volatilitas aliran modal asing. Dengan demikian, nilai tukar dolar AS diperkirakan akan menguat pada tahun 2016. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap neraca transaksi modal dan finansial, stabilitas makroekonomi, serta stabilitas sistem keuangan.

Penurunan harga komoditas diperkirakan masih berlanjut, sejalan dengan masih melambatnya perekonomian Tiongkok. Proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, sebagai konsumen komoditas terbesar di dunia, dalam jangka pendek masih akan diikuti oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik sehingga berpengaruh terhadap turunnya permintaan dan harga komoditas global. Pada saat yang sama, harga minyak dunia dalam jangka pendek juga diperkirakan masih lemah sejalan dengan belum dilakukannya pengurangan produksi secara signifikan oleh pemasok minyak baik OPEC maupun non-OPEC. Di samping itu, pelemahan harga minyak dan harga komoditas juga didorong oleh perilaku investor yang melakukan pergeseran investasi dari komoditas ke aset dolar AS. Hal ini pada gilirannya berpotensi memberikan tekanan pada perbaikan kinerja transaksi berjalan.

Terkait dengan risiko terhadap penguatan nilai tukar dolar AS, peran dana asing yang besar pada struktur pembiayaan korporasi menyiratkan risiko lain. Utang luar negeri korporasi berada dalam tren meningkat sejak 2010, didorong mudahnya sumber dana global seiring kebijakan pelonggaran moneter negara maju. Dibandingkan dengan negara lain, ketergantungan korporasi di Indonesia terhadap utang luar negeri juga cukup besar. Ketergantungan korporasi pada utang luar negeri menimbulkan kerentanan dalam perekonomian nasional ketika kesadaran untuk melakukan kegiatan lindung nilai terhadap kewajiban valuta asing baru menyentuh sebagian kecil korporasi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko bagi korporasi saat terjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menciptakan tantangan dan peluang ke depan yang semakin beragam. Peluang Indonesia cukup besar untuk menjadi basis produksi untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global. Dengan dihapuskannya tarif (perdagangan bebas) maka total potensi pasar akan membesar dan produk domestik diharapkan mampu bersaing dengan produk dari negara pesaing. Akan tetapi, jika peluang ini tidak dipersiapkan dengan baik

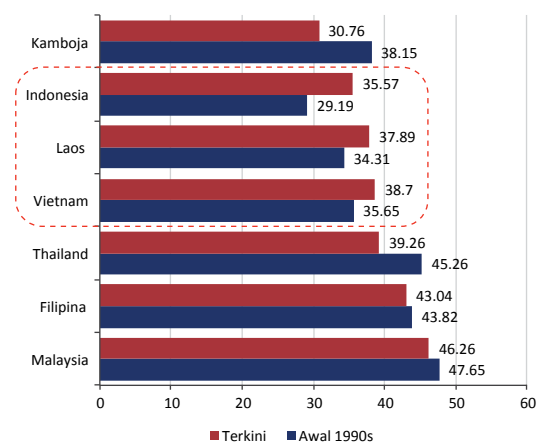
dikhawatirkan bahwa Indonesia hanya akan menjadi target pasar bagi produk barang dan jasa dari negara MEA lainnya.

Tantangan Perekonomian Domestik

Dari sisi domestik, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan struktural yang menghambat pencapaian pertumbuhan potensialnya. Permasalahan tersebut antara lain meliputi rentannya kecukupan pangan, energi, dan air, tidak berimbangnya struktur industri dan rendahnya produktivitas yang menyebabkan ketertinggalan dari rantai nilai global, masih dangkalnya struktur pasar keuangan domestik, serta kesenjangan ekonomi yang meningkat (Grafik 15.1).

Dari sejumlah tantangan struktural dimaksud, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, terdapat empat pilar yang menjadi prioritas untuk dibenahi (Gambar 15.1). Empat pilar prioritas pembangunan tersebut terdiri dari (i) ketahanan pangan, energi, dan air, (ii) daya saing maritim, industri, dan pariwisata, (iii) pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, dan (iv) ekonomi inklusif. Upaya pembenahan yang ditempuh memerlukan dukungan sejumlah modal dasar pembangunan, berupa jaringan infrastruktur yang berkualitas dan menyeluruh, tersedianya SDM yang berkualitas, iklim investasi yang kondusif, serta peranan IPTEK yang signifikan. Disamping itu, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Grafik 15.1. Indeks Gini Negara ASEAN

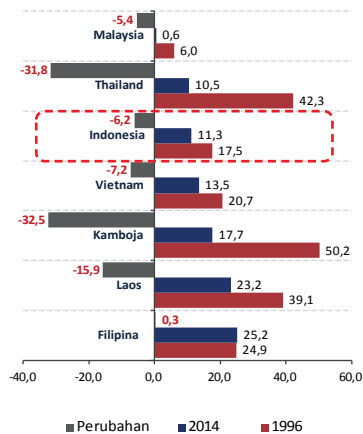


Sumber: World Bank

juga menjadi prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, prioritas kebijakan difokuskan untuk menciptakan struktur ekonomi domestik yang kuat, sehingga tercipta perekonomian yang berkelanjutan dan seimbang. Diversifikasi ekonomi dan transformasi struktural memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal. Proses transformasi perekonomian harus diperhatikan dengan seksama agar berjalan sesuai tahapannya. Transformasi dilakukan dengan memperhatikan faktor pendukung ekonomi domestik, antara lain konsumsi domestik dan pasar tenaga kerja yang kuat, harga energi dan pangan yang rendah dan stabil, ketahanan air yang kuat, infrastruktur dan konektivitas yang menyeluruh, iklim investasi yang kondusif, perluasan integrasi dalam rantai perdagangan dunia, serta diversifikasi produk ekspor terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas primer. Di samping itu, kontribusi produktivitas yang masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara (Chen, 1997) perlu menjadi fokus perhatian dalam penyusunan kebijakan. Semakin kompleksnya tantangan struktural yang dihadapi serta tren melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik yang terjadi sejak tahun 2012 mendorong urgensi implementasi reformasi struktural. Percepatan reformasi struktural diharapkan tidak hanya mempercepat transisi Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi, namun juga menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas sehingga

Grafik 15.2. Tingkat Kemiskinan Negara-negara ASEAN



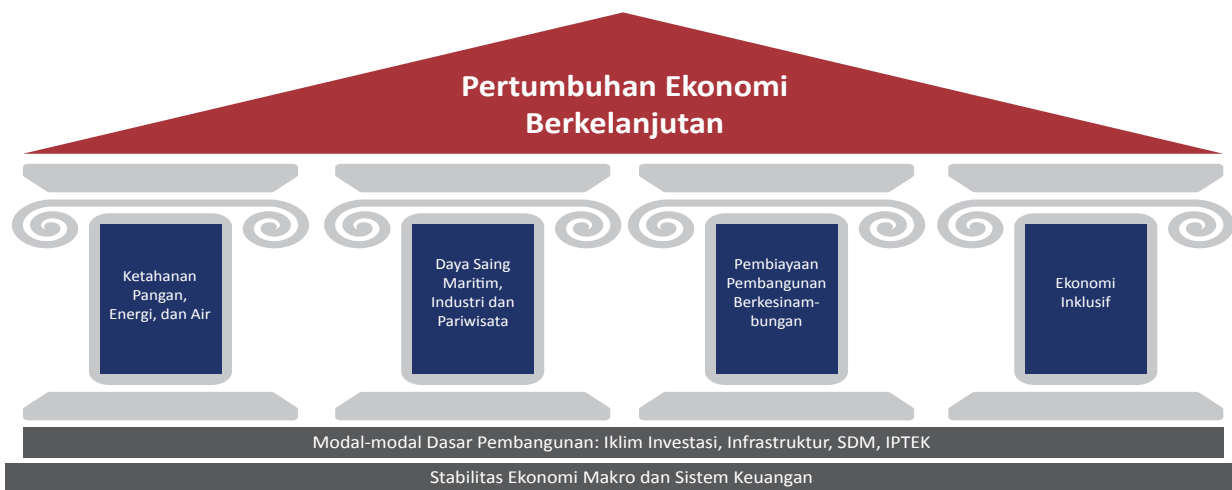
Sumber: World Bank

dapat semakin mendorong penurunan angka ketimpangan dan kemiskinan (Grafik 15.2).

Tantangan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Ketahanan pangan, energi, dan air sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan permasalahan mendasar yang perlu dibenahi. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya usia harapan hidup dan pendapatan, mendorong meningkatnya ketersediaan pangan, energi, dan air dengan harga terjangkau dan dalam jumlah cukup. Sebagai sektor yang menghasilkan input faktor produksi, ketersediaan serta kestabilan harga pangan, energi, dan air dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 15.1. Empat Pilar Tantangan Struktural



Tren harga pangan, energi, dan air yang terus meningkat dalam jangka menengah panjang, perubahan iklim dan demografi, peningkatan urbanisasi, alih fungsi lahan, serta perubahan pola konsumsi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam mendorong produksi pangan, energi, dan air nasional.

Saat ini, ketahanan pangan Indonesia relatif masih rendah, terutama dari sisi kualitas dan daya beli masyarakat.¹ Dari sisi produksi, jumlah dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, terutama terkendala oleh keterbatasan input faktor produksi, diantaranya terkait dengan berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas pertanian dan teknologi. Dalam kurun waktu 2006-2013, hanya terdapat 47.000 ha pertahun pembukaan lahan baru, sementara laju konversi lahan menjadi kawasan pemukiman dan industri mencapai 100.000 ha pertahun (Bappenas, 2015). Di sisi lain, konsumsi pangan yang terus meningkat belum diimbangi dengan peningkatan produksi pangan.

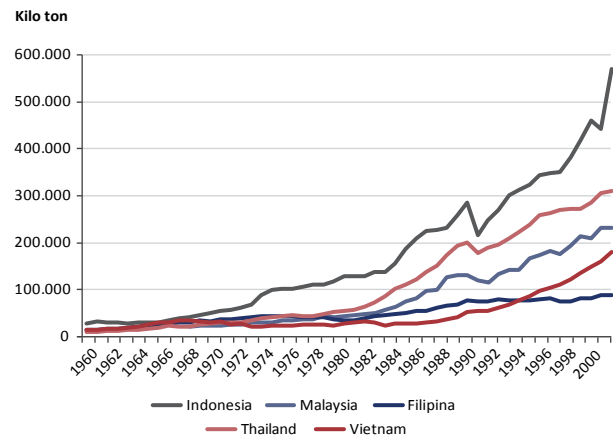
Dari sisi energi, meski memiliki potensi sumber daya energi yang besar, Indonesia menghadapi risiko ketahanan energi yang cukup rentan. Terus meningkatnya kebutuhan bahan bakar belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produksi energi domestik. Beberapa masalah yang menghambat produksi energi domestik terutama adalah kendala pembangunan infrastruktur berupa pengembangan menara dan pembangkit listrik serta terbatasnya pengembangan diversifikasi energi baru dan terbarukan.² Di sisi lain, minimnya pemanfaatan bahan bakar alternatif, seperti *biofuel*, belum mampu menggeser ketergantungan yang tinggi pada sumber daya energi fosil.³ Hal ini perlu diwaspadai, karena disamping berdampak pada semakin langkanya ketersediaan energi fosil, juga berakibat pada kerusakan lingkungan dan pemanasan global (Grafik 15.3). Meskipun Pemerintah telah melakukan reformasi energi antara lain dengan mengurangi subsidi BBM, tingginya impor migas dan terbatasnya cadangan minyak Indonesia masih membebani defisit neraca pembayaran (Grafik 15.4). Apabila tidak dikelola dengan baik, defisit neraca

1 Berdasarkan *global food security index*.

2 EIA (2015) memperkirakan konsumsi energi dunia akan terus meningkat dari 97,1 quadrillion Btu (2013) meningkat menjadi 100,8 quadrillion Btu (2020).

3 Produksi *biofuel* mencapai 4,4% dari total produksi energi primer setelah minyak mentah, batu bara dan biomasa. Sedangkan konsumsi *biofuel* digunakan untuk sektor transportasi dengan pangsa mencapai 22% setelah BBM yang mencapai 78%.

Grafik 15.3. Emisi CO2 Negara ASEAN

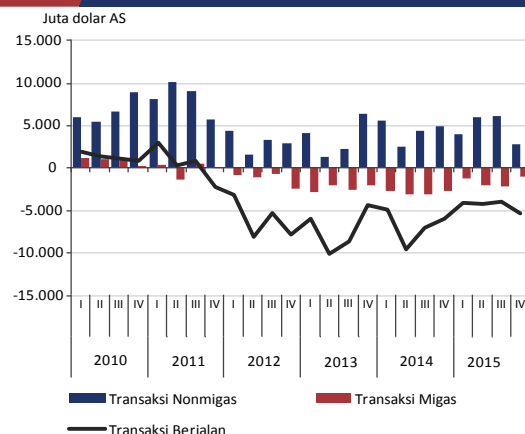


Sumber: World Bank

pembayaran dalam jangka menengah-panjang berpotensi meningkatkan kerentanan perekonomian.⁴

Ketersediaan jumlah dan kualitas air merupakan hal penting bagi kesejahteraan dan kesehatan manusia serta lingkungan. Penguatan ketahanan airnasional merupakan tantangan yang dihadapi terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi pangan, dan sumber

Grafik 15.4. Neraca Pembayaran Indonesia



4 Emisi Indonesia mencapai 523 juta ton dan menempati posisi 9 besar negara penghasil CO2 terbesar di dunia (World Bank, Juni 2015), dan diprediksi meningkat dari 116 juta ton menjadi 270 juta ton pada tahun 2018. Dari 270 juta ton gas CO2 tersebut 84,5% berasal dari pembakaran batu bara. Tahun 2015, pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif antara lain: dana desa, pembangunan kapal dan pelabuhan, kartu keluarga sejahtera dan keluarga harapan, subsidi pertanian, dana alokasi khusus, kartu Indonesia sehat, armada perbatasan, sistem informasi dan logistik kelautan, proyek infrastruktur berupa waduk, air minum, jalan dan jalan tol, dan kartu Indonesia pintar.

energi. Rentannya ketahanan air Indonesia terutama dipengaruhi oleh relatif rendahnya kapasitas pengelolaan sumber daya air serta adanya faktor yang memengaruhi sumber daya air seperti alih fungsi lahan, infrastruktur SDA yang relatif terbatas, gangguan daerah aliran sungai, serta pencemaran air.

Pemerintah telah menyusun sasaran dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air, namun realisasinya masih terbatas.⁵ Sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air ke depan, Pemerintah menyadari perlunya dilakukan pembenahan struktur dan sistem sektor pertanian, energi, dan pengelolaan air. Terkait sektor pertanian, pembenahan dilakukan antara lain melalui reformasi kebijakan, pengembangan dan perbaikan infrastruktur, produksi dan pasca panen, serta tata usaha pasar. Di sektor energi, pembenahan kebijakan energi yang akan ditempuh antara lain berupa pengembangan dan pemanfaatan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, pengelolaan minyak dan gas bumi termasuk pengalihan subsidi BBM, pemenuhan ketenagalistrikan, serta peningkatan nilai tambah produk tambang, seperti batu bara. Sedangkan ketahanan air, Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ke-6 yang terkait dengan penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Paket kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2015 telah memberikan sinyal positif bagi arah pembaharuan pembangunan nasional. Namun, evaluasi untuk menilai keberhasilannya saat ini belum dapat dilakukan. Di sektor pertanian, reformasi kebijakan akan mendorong semakin efisiennya biaya tenaga kerja dan biaya produksi, yang diiringi juga dengan peningkatan produktivitas, sehingga mampu meningkatkan produksi hingga 10%-20%. Hal ini pada gilirannya dapat menurunkan ketergantungan impor pangan sehingga harga pangan lebih stabil dan pendapatan petani meningkat.⁶ Di sektor energi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga mikro hidro, dan tenaga biomassa mampu meningkatkan ketersediaan energi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi dan bauran energi primer. Sementara, eksplorasi cadangan migas dan pengoperasian kilang di Cilacap mampu mengurangi impor BBM dan meningkatkan ketahanan pasokan BBM. Sementara itu, ketahanan air meliputi hak rakyat

5 Terdapat 4 arah pokok kebijakan pangan 2015-2019, yaitu: (i) peningkatan produksi, (ii) stabilisasi harga dan pasokan, (iii) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, dan (iv) penanganan gangguan ketahanan pangan.

6 Berdampak pada penghematan devisa hingga Rp52 triliun.

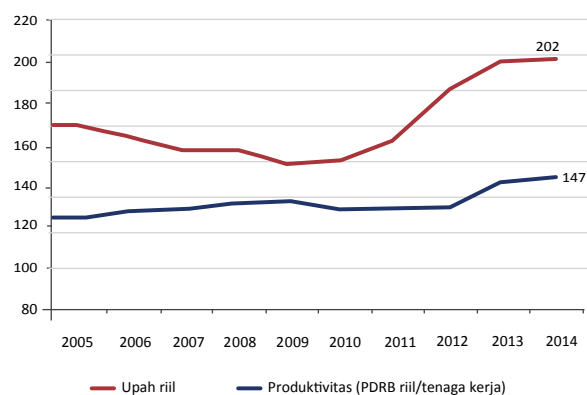
atas air, kelestarian lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian air, serta peran negara sebagai prioritas utama pengelolaan air.

Tantangan Daya Saing Industri, Maritim, dan Pariwisata

Ke depan, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural terkait daya saing di bidang industri, maritim, dan pariwisata. Strategi perekonomian Indonesia tidak dapat terus mengandalkan komoditas ekstraktif, namun harus lebih bertumpu pada keunggulan daya saing industri yang bernilai tambah tinggi. Meski demikian, strategi tersebut menghadapi tantangan terutama dari sisi produktivitas, diversifikasi, muatan teknologi, dan integrasi ekonomi global. Untuk itu, perlu penguatan daya saing non-upah melalui reformasi struktural yang berorientasi pada produktivitas. Hal ini penting mengingat bahwa dalam satu dekade terakhir, produktivitas industri domestik cenderung stagnan dan belum mengimbangi tekanan kenaikan upah (Grafik 15.5). Oleh karena itu, strategi pengembangan industri nasional, terutama industri padat karya, tidak dapat terus bergantung pada rezim upah murah. Sebagai kebijakan yang bersifat non-siklikal, upaya meningkatkan produktivitas tersebut tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tapi juga meningkatkan pertumbuhan potensial secara permanen.

Di sektor industri, pembangunan ekonomi menghadapi tantangan struktural yang mendasar, karena berbasis komoditas ekstraktif dengan nilai tambah rendah dan dapat merusak lingkungan, terutama bagi provinsi di kawasan luar Jawa. Penerapan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah mampu mendorong investasi di sektor hilirisasi SDA mineral, terutama kawasan di luar

Grafik 15.5. Perbandingan Upah Riil dan Produktivitas Industri Pengolahan (Indeks 2000=100)



Sumber: Kemenakertrans, BPS, diolah

Jawa.⁷ Namun hal ini perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan diversifikasi sektor ekonomi, agar tercipta lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan produktif. Pembangunan ekonomi di luar Jawa perlu didukung oleh proses *self discovery* pelaku usaha, yaitu proses inovasi yang ditandai dengan tumbuhnya industri baru.⁸ Mengingat proses inovasi tersebut membutuhkan biaya tinggi dan memiliki risiko kegagalan, maka perlu didukung ketersediaan modal dasar pembangunan yang efisien. Dalam hal ini, Jawa sudah lebih maju karena memiliki infrastruktur dan iklim usaha yang lebih baik. Sementara itu, reformasi struktural kawasan di luar Jawa untuk memperkuat integrasi internal, agar nusantara menjadi sebuah kesatuan zona produksi bagi dunia.

Tantangan lainnya adalah perlunya menjaga kesinambungan proses industrialisasi sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan transformasi ekonomi menjadi negara maju. Sebagai negara berkembang, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh investasi modal, sumber daya alam dan energi. Untuk itu, agar tidak terjebak dalam de-industrialisasi prematur, penting bagi Indonesia untuk *catch up* dengan ekonomi global melalui peningkatan kapabilitas teknologi yang didukung oleh tenaga kerja berkeahlian, perbaikan sistem inovasi dan *upgrading* dalam rantai nilai global. Disamping itu, untuk menjaga konsistensi kebijakan perbaikan daya saing industri, aktivitas industri manufaktur perlu diarahkan sebagai suatu kluster kegiatan yang didukung oleh kinerja sektor lainnya seperti jasa, perdagangan dan konektivitas logistik, energi, dan kualitas tenaga kerja.

Dari sisi muatan teknologi, keunggulan komparatif Indonesia terus mengalami penurunan, terutama pada sektor dengan muatan teknologi menengah dan tinggi. Penurunan daya saing ekspor Indonesia terutama pada sektor yang memiliki keterkaitan tinggi, seperti elektronik dan permesinan, dimana tingkat kecanggihan produk ekspor Indonesia relatif rendah dibandingkan negara pesaing di regional.⁹ Di sisi lain, jenis produk yang cenderung masih bertahan dalam keunggulan ekspor

Indonesia merupakan produk SDA dan olahannya. Hal ini perlu diwaspadai mengingat bahwa untuk menciptakan industri yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berstandar internasional diperlukan peningkatan daya saing pada sektor teknologi menengah dan tinggi. Untuk itu, dukungan kualitas tenaga kerja yang memadai juga memegang faktor kunci. Disamping itu, penguatan daya saing pada sektor-sektor tersebut juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan Indonesia dalam bertransisi menjadi negara maju (lihat Boks 15.1).

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk MEA, Indonesia perlu memperkuat daya tarik investasi untuk menjadi basis produksi yang memasok dalam rantai nilai global. Rendahnya daya saing Indonesia dalam rantai nilai global terlihat dari kemampuan memberikan nilai tambah setelah mengimpor bahan baku, untuk kemudian diekspor kembali ke berbagai negara, yang terbatas. Perbandingan karakteristik FDI di antara negara ASEAN menunjukkan bahwa investasi di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, namun lebih berorientasi domestik. Sementara itu, negara lain di kawasan dapat mengundang investasi yang lebih berkualitas untuk mendorong peningkatan ekspor dan menyerap tenaga kerja terampil. Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan daya tarik sebagai lokasi investasi untuk tujuan ekspor ke pasar dunia dan memanfaatkan integrasi dalam rantai nilai global guna memperluas pasar, mengadopsi kemajuan teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mendorong kemajuan industri kecil dan menengah. Permasalahan kualitas SDM hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, kajian Affandi dan Anugrah (2015) menunjukkan dampak peningkatan kualitas SDM sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹⁰

Sektor maritim menghadapi tantangan kedaulatan wilayah, optimalisasi pengelolaan SDA, konektivitas, dan pengembangan ekonomi maritim. Dari sisi kedaulatan wilayah, salah satu permasalahan yang dihadapi terkait kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga. Meskipun saat ini telah memiliki kesepakatan batas maritim dengan satu negara tetangga, yaitu Papua Nugini, Indonesia masih harus menyelesaikan perundingan dengan sembilan negara tetangga lainnya. Dari sisi pengelolaan SDA, potensi besar sektor perikanan tangkap dan budidaya belum dikelola secara optimal, sehingga skala ekspor Indonesia masih tertinggal

7 Berdasarkan Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016).

8 Konsep *self-discovery* mengacu pada Hausmann, R. dan D. Rodrik (2002). "*Economic Development as Self-Discovery*". Pembangunan ekonomi membutuhkan proses *self-discovery*, dimana agen swasta melakukan inovasi yang berisiko untuk mencari insentif finansial. Dalam proses tersebut, terjadi realokasi sumber daya dari yang tidak mampu bertahan ke yang mampu tumbuh dengan lebih produktif, sehingga secara agregat ekonomi memperoleh keuntungan. Kebijakan publik diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung *self-discovery* tersebut.

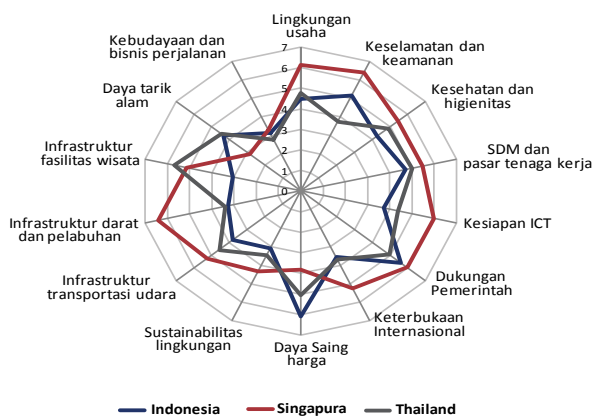
9 Berdasarkan pemetaan *product space*.

10 Selengkapnya lihat: Affandi dan Anugrah (2015), "*Strategi Pertumbuhan di Indonesia: Pendekatan Growth Diagnostic*", Bank Indonesia.

dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand.¹¹ Sementara itu, permasalahan konektivitas Indonesia berupa infrastruktur dasar yang kurang memadai menyebabkan rantai nilai domestik kurang efisien. Hal ini terjadi mengingat infrastruktur listrik, pelabuhan bongkar muat, konektivitas digital, dan sektor jasa pendukung tersedia lebih baik di wilayah Jawa dibandingkan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berbasis maritim.

Sektor pariwisata Indonesia masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang menghambat akses dan waktu jelajah, terutama untuk objek wisata yang memiliki kekuatan daya tarik keindahan alam. Indikator daya saing perjalanan dan pariwisata menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara.¹² Secara umum, Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dari sisi harga, daya tarik alam, dan dukungan pemerintah, namun memiliki kelemahan dari aspek infrastruktur dan lingkungan pendukung seperti kesehatan dan higienitas, kemajuan teknologi, fasilitas wisata, dan kapasitas modal manusia. Selain itu, faktor keselamatan dan keamanan, khususnya terkait terorisme, juga masih menjadi pertimbangan wisatawan, sehingga mengurangi potensi wisata nasional (Grafik 15.6). Hal ini perlu dicermati, karena selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa, pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja pertanian.

Grafik 15.6. Perbandingan Daya Saing Pariwisata dan Perjalanan



Sumber: *World Economic Forum*, 2015

11 Berdasarkan Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga triwulan III 2015 peningkatan perikanan tangkap dan budidaya masing-masing sebesar 5,05% dan 3,98% .

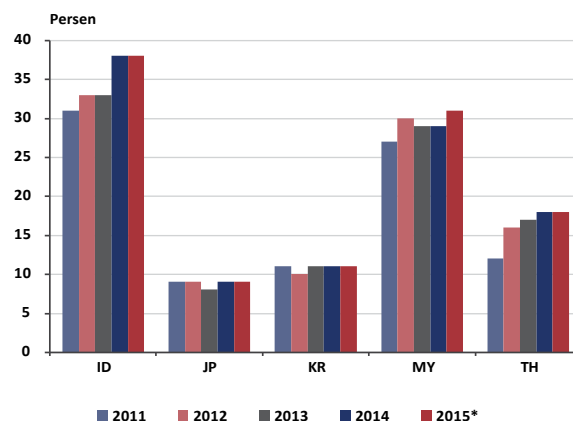
12 Berdasarkan *World Economic Forum* (2015); peringkat 1 adalah yang terbaik.

Tantangan Pembiayaan Pembangunan Berkesinambungan

Tantangan lain terkait dengan fundamental perekonomian Indonesia adalah terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan formal dalam pembangunan nasional. Sektor jasa keuangan Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan yang memiliki basis sumber dana jangka pendek, sehingga memiliki risiko terjadinya *mismatch*, sedangkan pemanfaatan pasar modal masih sangat terbatas. Upaya penguatan pembiayaan investasi jangka panjang saat ini masih terkendala oleh beberapa permasalahan struktural. Pertama, tingginya biaya modal sejalan dengan mahalnya struktur *liabilities* perbankan karena masih tingginya persepsi risiko terhadap sektor riil serta ketidakpastian. Kedua, cukup besarnya pangsa kepemilikan asing di SBN dan kontribusi asing dalam perdagangan saham sehingga seringkali menyebabkan tingginya volatilitas harga di pasar sekunder (Grafik 15.7). Ketiga, masih terbatasnya sumber pembiayaan jangka panjang dari pasar modal, bahkan relatif tertinggal dibanding kawasan, demikian pula kapasitas dan likuiditas pasar keuangan domestik (Grafik 15.8).

Tantangan lain bagi pembiayaan pembangunan nasional adalah pentingnya mendorong aliran masuk modal asing dalam bentuk penanaman langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*). Penanaman FDI pada industri berorientasi ekspor tidak hanya merupakan sumber pembiayaan yang penting, namun juga berpotensi meningkatkan daya saing industri dimaksud dalam rantai perdagangan internasional (Boks 15.2).¹³ Keterbatasan

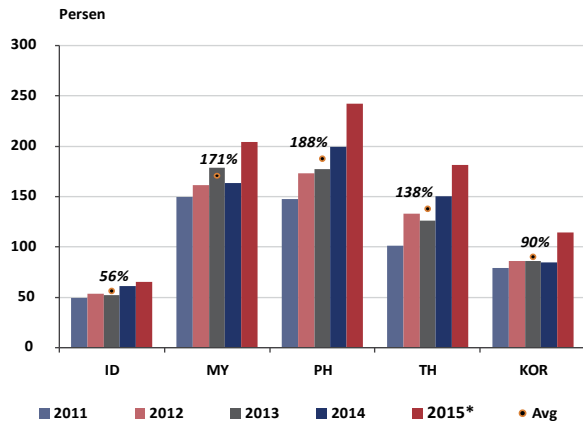
Grafik 15.7. Kepemilikan Asing di Obligasi Pemerintah



*) data 2015 per September 2015

13 Rata-rata rasio FDI terhadap PDB Indonesia (2004–2014) sebesar 1,8% lebih rendah dibandingkan negara *peer* kawasan seperti Vietnam (5,9%), Malaysia (3,2%), Thailand (3,0%), maupun Tiongkok (2,1%).

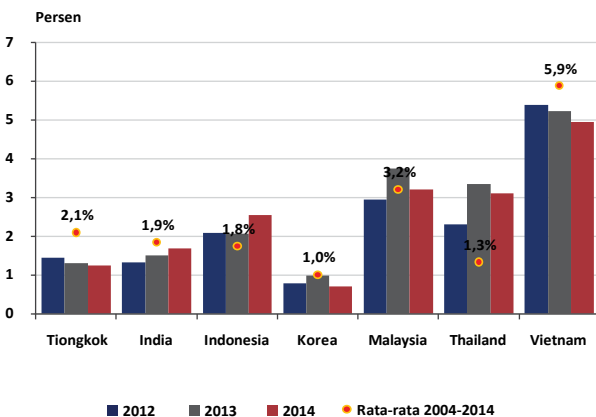
Grafik 15.8. Market Capitalization



*) data 2015 per September 2015

pembiayaan jangka panjang tampak dari pergerakan *basic balance* neraca pembayaran Indonesia yang sering mengalami defisit.¹⁴ Keterbatasan infrastruktur, dan kendala perijinan investasi yang cenderung lambat dan berbelit-belit menjadi salah satu permasalahan utama yang menghambat aliran FDI ke Indonesia, dimana rasio FDI terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga (Grafik 15.9).¹⁵

Grafik 15.9. Rasio FDI terhadap PDB



14 *Basic Balance* menunjukkan kemampuan pembiayaan transaksi berjalan dengan sumber dari pendanaan jangka panjang. *Basic Balance* merupakan penjumlahan dari transaksi berjalan, neto investasi langsung, dan neto investasi lainnya jangka panjang.

15 Kebijakan investasi saat ini mengacu pada UU No.25/2007 tentang penanaman modal. UU ini merevisi UU No. 11/1970 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 12/1970 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Pembaruan diarahkan terutama pada kemudahan dalam berinvestasi, perlakuan yang sama antara asing dan domestik, serta pemberian kepastian hukum.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, sebagian besar investasi terutama didominasi sektor manufaktur (Tabel 15.1), namun belum terfokus pada sektor industri yang berorientasi ekspor.

Tantangan Ekonomi Inklusif

Tantangan lainnya yang dihadapi perekonomian Indonesia berupa masih tingginya ketimpangan pembangunan serta ketidakmerataan masyarakat dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi mencapai 5,8% dalam lima tahun terakhir, masih belum mampu membawa Indonesia masuk dalam kelompok negara *upper middle income*. Meskipun kinerja ekonomi mampu menurunkan rasio penduduk miskin dan tingkat pengangguran, namun masih belum dirasakan secara merata tercermin dari rasio Gini yang terus meningkat terutama di KTI. Bank Dunia (2012) menyebutkan sebanyak 30 juta atau 40% penduduk Indonesia rentan masuk kelompok penduduk miskin, terutama bila terjadi *shock* harga pangan.¹⁶

Tabel 15.1. Pangsa Investasi Berdasarkan Sektor

dalam Persen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Industri Pengolahan	36,1	42,5	46,7	45,3	34,6	26,0
Pertambangan dan Penggalian	13,8	17,8	9,5	13,2	13,5	10,9
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	17,4	13,9	15,8	10,4	8,6	8,3
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	2,1	1,3	6,3	10,1	17,3	32,3
Perdagangan Besar dan Eceran	17,9	12,9	6,5	5,2	8,6	10,7
Lembaga Perantara Keuangan	3,0	5,2	5,4	2,7	6,8	5,3
Lainnya	8,1	-0,3	3,9	4,3	2,3	4,3
Real Estate, Persewaan, dan Jasa Bisnis	0,2	3,0	4,3	4,6	5,9	2,5
Listrik, Gas, dan Air	1,5	2,1	1,5	1,9	1,1	-2,3
Perikanan	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	1,3
Konstruksi	-0,4	1,7	-0,4	1,8	0,6	-0,1
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Adm. Pemerintahan dan Pertahanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendidikan	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Hotel dan Restoran	0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
Jasa Kemasyarakatan, dsb.	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*) data hingga triwulan III-2015

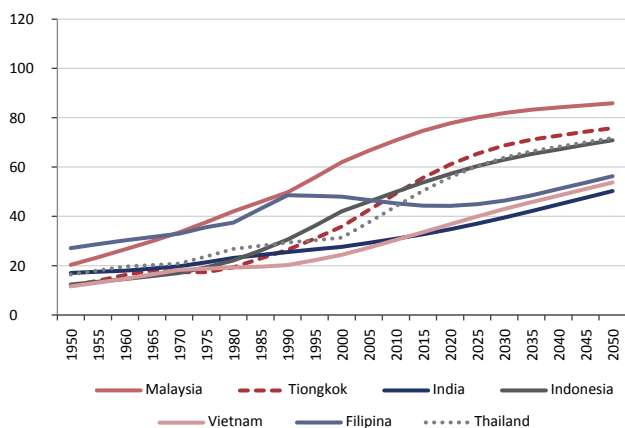
16 Sebanyak 14,3% penduduk pedesaan berada dibawah garis kemiskinan, lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan yang mencapai 8,4% (Vujanovic, 2015).

Ketimpangan pembangunan pedesaan-perkotaan mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan dan aglomerasi yang akhirnya menarik perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan (Grafik 15.10). Seiring dengan tingginya arus urbanisasi, diperkirakan 70% penduduk akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050 (United Nation, 2012). Untuk itu, perlu adanya dukungan kebijakan terutama dalam penyediaan infrastruktur dan iklim usaha yang mendukung penyediaan lapangan kerja dan lingkungan hidup yang layak. Minimnya infrastruktur berkualitas menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Grafik 15.11), sedangkan secara spasial juga terdapat kesenjangan akses masyarakat memperoleh kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, sanitasi, telekomunikasi, dan tempat tinggal, terutama pada KTI. Demikian pula pada sektor keuangan, dimana akses keuangan belum bersifat inklusif dan belum dirasakan secara merata oleh berbagai lapisan masyarakat, baik berdasarkan tingkat pendapatan maupun wilayah.

Tantangan Modal Dasar Pembangunan

Untuk memperkuat fundamental perekonomian, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural terkait modal dasar pembangunan, khususnya infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sisi infrastruktur, Indonesia perlu menjaga momentum reformasi struktural dengan memelihara kredibilitas, efektivitas, dan kecepatan implementasi kebijakan.¹⁷ Kredibilitas dalam jangka pendek dapat

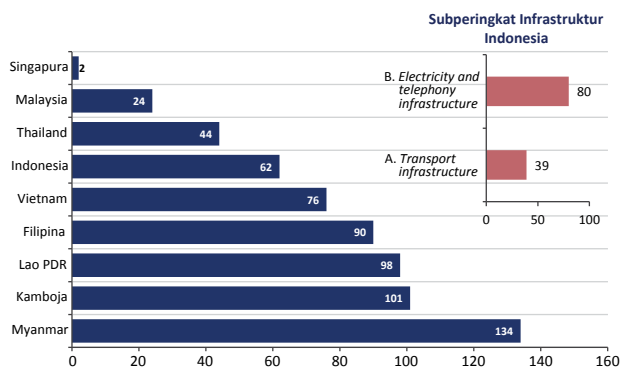
Grafik 15.10. Tingkat Urbanisasi Negara Asia



Sumber: United Nations

17 Kredibilitas berarti kesesuaian realisasi dengan rencana, sementara efektivitas adalah persentase pencapaian, dan kecepatan adalah lama pembangunan.

Grafik 15.11. Peringkat Infrastruktur ASEAN



Sumber: World Economic Forum 2013

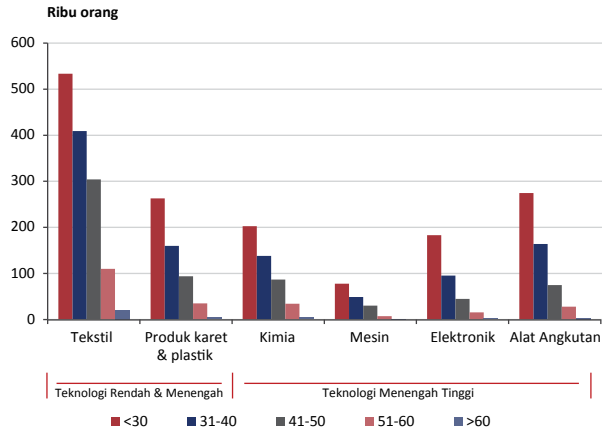
memengaruhi perilaku agen ekonomi melalui ekspektasi, sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Sedangkan efektivitas dan kecepatan dapat memengaruhi besarnya deviasi peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial.¹⁸ Untuk memperkuat efektivitas, reformasi struktural juga perlu memperhatikan prioritas pembangunan.

Berdasarkan pendekatan *growth diagnostic*, hambatan utama dalam perekonomian di hampir seluruh wilayah Indonesia bersumber dari permasalahan infrastruktur listrik, konektivitas, dan kualitas sumber daya manusia.¹⁹ Listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang cukup tinggi bagi industri di Jawa, serta kebutuhan rumah tangga dan industri yang belum terpenuhi di kawasan luar Jawa. Infrastruktur konektivitas, seperti pelabuhan dan jalan dibutuhkan untuk menurunkan biaya logistik pada rantai nilai domestik, memperkuat integrasi internal, serta meningkatkan daya saing, sehingga keseluruhan nusantara dapat menjadi zona produksi yang berorientasi ekspor. Di luar Jawa, ketersediaan infrastruktur berkualitas dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif sehingga mendorong diversifikasi sektor ekonomi (Lihat Boks 15.2). Dari sisi sumber daya manusia, diperlukan upaya peningkatan ketersediaan tenaga kerja berkeahlian dan partisipasi sekolah di daerah pedesaan. Meskipun struktur demografi Indonesia unggul atas ketersediaan tenaga kerja usia produktif, namun mayoritas merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah (Grafik 15.12 dan 15.13). Sedangkan penguatan

18 Konsep kredibilitas, efektivitas, dan kecepatan mengacu pada Santoro, M. 2015. *Long-term Gain, Short-Term Pain: Assessing the Potential Impact of Structural Reforms in Chile*. IMF Working Paper.

19 Kajian *Growth Diagnostic* telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk 11 provinsi pada tahun 2015. Selengkapnya lihat Boks 15.2.

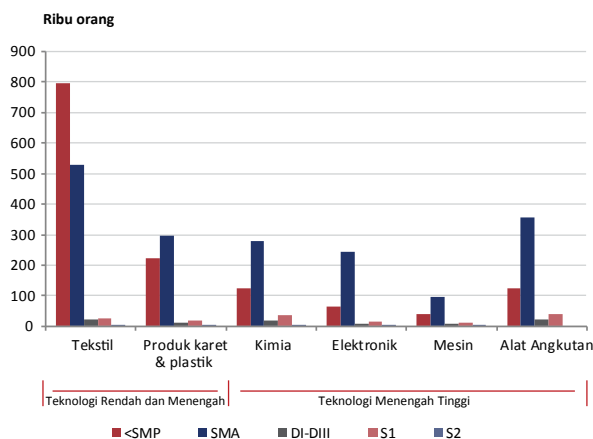
Grafik 15.12. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Umur



Sumber: BPS-SAKERNAS, 2014²⁰

struktur ekonomi pada sektor teknologi menengah-tinggi membutuhkan banyak tenaga kerja dengan pendidikan atau *skill* yang lebih tinggi. Saat ini, Indonesia masih menghadapi *gap* yang cukup besar pada kualitas pendidikan tenaga kerja, sebagaimana tercermin pada nilai PISA sains dan matematika yang terpaut cukup besar dibandingkan beberapa negara lainnya di Asia (Tabel 15.2). Lebih jauh, laju transformasi Indonesia menjadi negara industri juga membutuhkan dukungan peningkatan produktivitas pertanian di pedesaan, khususnya dalam mencapai target swasembada pangan. Tingkat pendidikan yang lebih rendah di daerah pedesaan dapat menghambat peningkatan produktivitas, sehingga partisipasi sekolah di pedesaan, khususnya pada tingkat pendidikan menengah

Grafik 15.13. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan



Sumber: BPS-SAKERNAS, 2014²⁰

²⁰ Klasifikasi sektor berdasarkan teknologi rendah, menengah, dan tinggi merujuk pada OECD *Technology Intensity Definition* (2011).

Tabel 15.2. Nilai PISA Beberapa Negara di Asia

Negara	Sains	Matematika
Tiongkok	613	570
Hong Kong	561	545
Singapura	573	542
Jepang	536	538
Korea Selatan	554	536
Taiwan	560	523
Thailand	427	441
Kazakhstan	432	393
Indonesia	375	396
Rata-rata Asia	613	570
Rata-rata OECD	561	545

dan tinggi perlu ditingkatkan. Pada akhirnya keseimbangan produktivitas antara masyarakat pedesaan dan perkotaan akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Reformasi kelembagaan sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan iklim usaha yang kompetitif secara global dan menarik investasi. Indikator kemudahan berusaha menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan peringkat kemudahan berusaha dari 120 (2015) menjadi 109 (2016). Perkembangan positif terutama diperoleh dari pembayaran pajak, izin konstruksi, dan akses kredit. Namun terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, berupa: (i) waktu, biaya, dan prosedur dalam memulai usaha; (ii) waktu dan mekanisme pembayaran pajak; dan (iii) waktu dan biaya dalam mengurus pendaftaran properti. Selain itu, permasalahan terkait kemudahan berusaha juga bersumber dari kepastian hukum, izin konstruksi, dan fasilitasi perdagangan. Dalam hal fasilitasi perdagangan, waktu dan biaya yang tinggi dalam ekspor-impor terutama disebabkan oleh hambatan akses di darat dan proses bongkar muat pelabuhan. Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah penyederhanaan birokrasi, dan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, tata kelola, dan bersih.

Tantangan Memperkokoh Stabilitas Ekonomi Makro dan Sistem Keuangan

Penciptaan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan merupakan faktor fundamental untuk mempercepat reformasi struktural dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tren globalisasi yang mendorong semakin terintegrasinya ekonomi nasional terhadap global dapat terjadi melalui tiga mekanisme yang terdiri

dari kinerja perdagangan yang semakin kompetitif, rantai perdagangan global melalui multinasional produksi, dan integrasi pasar keuangan. Untuk itu, struktur ekonomi makro yang kuat dan stabil merupakan salah satu prasyarat untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terutama menghadapi berbagai gejala yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Ke depan, risiko masih melambatnya ekonomi domestik dan belum berimbangnyanya pemulihan ekonomi global menjadi satu hal yang patut diwaspadai. Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian stabilitas ekonomi makro guna mengarahkan ekspektasi melalui pengendalian laju inflasi dan kestabilan nilai tukar. Namun upaya tersebut menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama mengingat masih tingginya fluktuasi harga beberapa bahan makanan, risiko pembalikan modal asing, serta berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Oleh sebab itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang didukung oleh kebijakan reformasi struktural diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat stabilitas ekonomi makro melalui penguatan fungsi pasar modal dan pasar uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, termasuk penguatan sektor ekonomi.

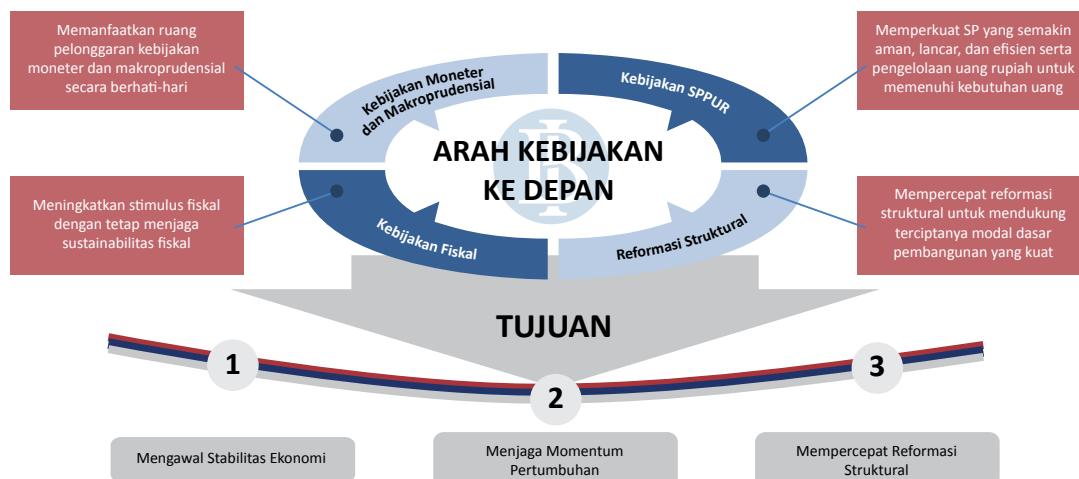
Pencapaian stabilitas sistem keuangan juga menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan dan perdagangan Indonesia. Untuk mendukung tercapainya stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, perlu terus dilakukan upaya penguatan kebijakan makroprudensial dan kegiatan *surveillance* terhadap sistem keuangan. Respons kebijakan di bidang SSK tersebut juga bersinergi dengan kebijakan di bidang moneter dan sistem pembayaran, yang didukung dengan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Di sisi lain, pencapaian SSK juga perlu didukung dengan ketersediaan

dan terpenuhinya kebutuhan pecahan uang rupiah yang merata di masing-masing daerah. Beragamnya kualitas uang, khususnya di wilayah terpencil dan pulau terdepan NKRI, serta terbatasnya pemenuhan kebutuhan pecahan uang rupiah merupakan tantangan yang dihadapi dan menjadi fokus kebijakan Bank Indonesia. Sementara itu, peredaran uang rupiah palsu yang meningkat selama 2015 juga merupakan tantangan yang dihadapi Bank Indonesia untuk tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

15.2. ARAH KEBIJAKAN

Ke depan, berbagai tantangan, baik dari eksternal maupun domestik, perlu diwaspadai agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Untuk itu, sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat. Bauran kebijakan tersebut diarahkan untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah panjang akan dapat dicapai (Diagram 15.1). Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati. Di sisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Di samping itu, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mempercepat reformasi struktural agar segera tercipta fondasi perekonomian yang kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diagram 15.1. **Framework Bauran Kebijakan Pengelolaan Makroekonomi**



Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati. Di sisi moneter, melalui kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), dan nilai tukar, Bank Indonesia secara konsisten dan berhati-hati akan menempuh kebijakan yang mengarahkan inflasi sesuai dengan sarannya, mengelola defisit transaksi berjalan di tingkat yang sehat, dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang telah tercipta. Dalam kerangka ini, kebijakan suku bunga akan ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi, permintaan domestik, serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya. Kebijakan ini konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi dan defisit transaksi berjalan yang sehat dengan tetap mendukung momentum pertumbuhan yang sedang berjalan. Kebijakan GWM senantiasa dikalibrasi secara berhati-hati untuk mendukung kecukupan likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan nilai tukar tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan nilai fundamental. Upaya menjaga stabilitas rupiah ini sangat penting untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan sehingga akan memperkuat kinerja perekonomian secara keseluruhan. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan operasi moneter baik rupiah maupun valas. Berbagai kebijakan tersebut juga akan terus diperkuat Bank Indonesia antara lain melalui pengelolaan lalu lintas devisa yang berhati-hati dan penguatan jaring pengaman keuangan internasional melalui kerja sama dengan berbagai otoritas pemangku kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia akan menempuh beberapa langkah strategis untuk memperkuat kerangka kebijakan makroprudensial. Pertama, mempertegas fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Kedua, Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan ketahanan permodalan perbankan, menjaga kecukupan likuiditas, dan memperdalam pasar keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga yang merata di daerah melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan di tingkat nasional dan daerah. Keempat, Bank Indonesia

berkolaborasi dengan OJK akan terus mengembangkan peran ekonomi dan sistem keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia. Hal ini antara lain ditempuh melalui pengembangan instrumen moneter dan instrumen keuangan berbasis syariah.

Bank Indonesia juga melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat resiliensi pasar keuangan terhadap guncangan dan meningkatkan perannya sebagai sumber pembiayaan yang efisien. Upaya pendalaman pasar keuangan diperkuat dengan penyamaan visi pendalaman pasar keuangan lintas otoritas, khususnya dalam mendukung pembiayaan perekonomian. Untuk itu, akan dibentuk “Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan” yang terdiri dari Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia. Forum ini penting bagi upaya pendalaman pasar, dan bertugas untuk menyusun usulan dan rekomendasi kebijakan bagi masing-masing otoritas untuk mendorong pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Ketiga otoritas tersebut saat ini dalam tahap finalisasi penyusunan MoU.

Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pelaku pasar juga merupakan salah satu program penting yang secara kontinu akan dilakukan di masa datang. Tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama terhadap pasar keuangan dan berperilaku sangat konservatif dengan hanya menggunakan dana sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Peningkatan *financial literacy* menjadi sangat penting bagi upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Berkenaan dengan hal ini, pelaksanaan program sosialisasi, koordinasi dan edukasi akan direncanakan secara komprehensif dan terintegrasi, dan dilakukan tidak hanya dengan pelaku pasar, tapi juga dengan penegak hukum, lembaga arbitrase, auditor, dan lembaga terkait lainnya.

Kebijakan perluasan akses keuangan akan terus didorong untuk mendukung tercapainya SSK, efisiensi perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bank Indonesia akan mensinergikan kebijakan perluasan akses yang fokus pada pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai *point of access* dengan kebijakan elektronifikasi sebagai pengembangan ekosistem LKD, yang dikenal dengan dual kebijakan (Gambar 15.2).²¹ Sinergi tersebut dilakukan karena disadari efektivitas peningkatan akses keuangan melalui saluran distribusi saja tidaklah cukup jika adaptasi masyarakat atas cara penggunaan layanan pembayaran masih rendah. Sinergi strategi ini salah satunya akan diterapkan pada

²¹ Elektronifikasi adalah segala upaya untuk melakukan transaksi ritel secara non tunai.

upaya Bank Indonesia dalam mendorong dan memfasilitasi penyaluran bantuan Pemerintah secara nontunai yang diyakini akan mampu meningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia dengan signifikan.

Upaya perluasan akses keuangan, difokuskan melalui pengembangan inovasi berbasis teknologi digital, pemanfaatan elektronifikasi, dan inovasi pembayaran retail di bidang teknologi keuangan. Arah pengembangan inovasi berbasis teknologi digital akan terus diperluas, terutama untuk mengatasi keberadaan kantor cabang bank yang minim di pedesaan dan wilayah pelosok. Sementara itu, upaya pengembangan ekosistem pembayaran secara elektronik ditempuh melalui pengenalan kepada komunitas, pelaku industri maupun kerja sama dengan Pemerintah. Di sisi lain, inovasi pembayaran retail diperlukan sebagai motor penggerak sistem pembayaran di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendorong *e-payment* di Indonesia dan berkontribusi positif bagi perekonomian.

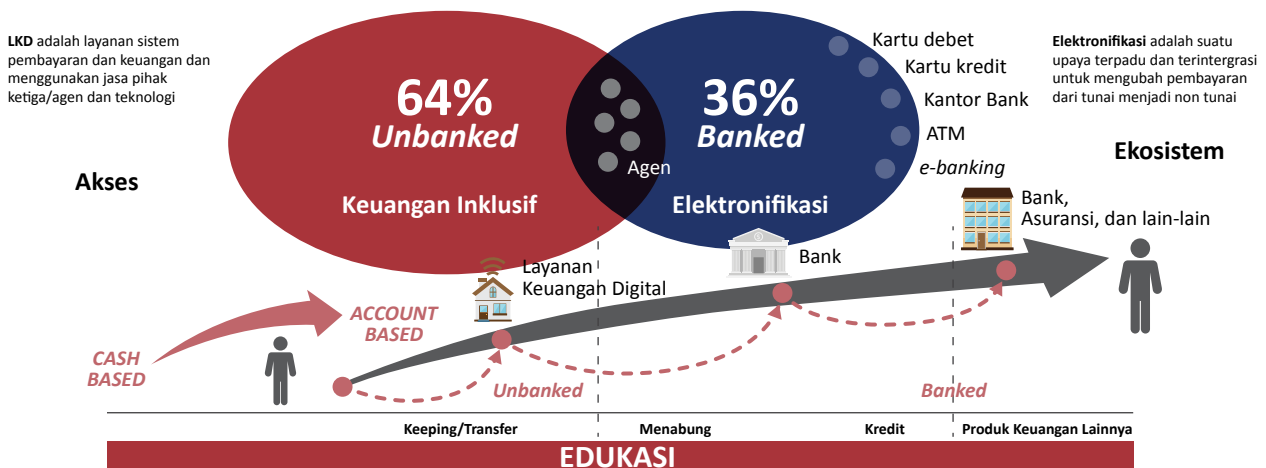
Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan UMKM melalui perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan serta peningkatan kapasitas UMKM. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan akses keuangan UMKM terhadap perbankan, berupa pengembangan klaster yang diimplementasikan pada aspek budidaya maupun pembiayaan melalui pendekatan komersial. Kemudahan akses pelaku UMKM terhadap jasa keuangan juga menjadi perhatian, diantaranya melalui pemanfaatan sistem resi gudang dan pembinaan melalui pelatihan pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi (*smartphone*). Selanjutnya untuk memperkuat dasar penyusunan kebijakan dalam

meningkatkan akses terhadap jasa keuangan, Bank Indonesia akan melaksanakan kajian terkait akses keuangan pola syariah bagi masyarakat komunitas tertentu yang belum tersentuh layanan perbankan, seperti pondok pesantren.

Di sisi Sistem Pembayaran (SP), arah kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mengatur dan menjaga SP yang aman, efisien dan lancar. Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan *blueprint* SP Indonesia secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan tren SP ke depan baik domestik maupun global, tren sektor lain terkait SP seperti perbankan, pasar modal, teknologi informasi, telekomunikasi, *e-commerce*, pasar keuangan, keuangan inklusif, serta *international best practices*. Disamping itu, sejalan dengan peran pasar modal yang terus meningkat dalam perekonomian nasional, arah kebijakan difokuskan pada upaya menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas dan penyelesaian transaksi, antara lain melalui implementasi *Central Bank Money* (CeBM). Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa perkembangan berbagai inovasi layanan SP (*internet, smartphone, Near Field Communication*) juga berpotensi meningkatkan berbagai macam risiko, seperti risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum. Berbagai risiko tersebut wajib dimitigasi tanpa menghambat laju perkembangan inovasi, melalui pengaturan sarana pemroses transaksi pembayaran, yang mencakup *governance*, penerapan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan keamanan dalam penyelenggaraan sarana pemroses transaksi pembayaran.

Di bidang pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks untuk mencapai misi terpenuhinya kebutuhan uang rupiah

Gambar 15.2. Dual Kebijakan



dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI. Untuk itu, dilakukan penguatan koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, peningkatan infrastruktur pengolahan uang rupiah, dan perluasan kerja sama dengan industri. Penguatan aspek *governance* juga dilakukan melalui: (i) penguatan koordinasi dengan Pemerintah berupa penyempurnaan kebijakan perencanaan pencetakan uang rupiah secara *multi years*; (ii) penguatan infrastruktur pengelolaan uang rupiah melalui modernisasi peralatan pemrosesan uang rupiah di seluruh kantor Bank Indonesia; (iii) perluasan peran perbankan maupun badan usaha melalui pemberian insentif kepada industri yang melakukan kegiatan pengiriman uang dan layanan kas kepada perbankan dan masyarakat; dan (iv) mitigasi risiko terhadap perencanaan pencetakan uang secara *multi years*, seperti mitigasi terhadap dinamika indikator makro ekonomi, perubahan harga dan kualitas bahan baku uang, serta ketersediaan pasokan bahan baku dalam jangka menengah. Di samping itu, juga dilakukan penguatan sistem pengawasan terhadap perbankan yang menyelenggarakan kas titipan dan pengaturan terhadap badan usaha yang menyelenggarakan jasa pengolahan uang rupiah.²²

Kebijakan Fiskal

Peran kebijakan fiskal untuk mendorong perekonomian Indonesia semakin penting ditengah pelemahan perekonomian dan ketidakpastian sektor keuangan global. Pelemahan perekonomian global, penurunan harga komoditas dan kinerja perekonomian domestik, akan memberikan tekanan pada penerimaan pendapatan pemerintah dan mengurangi ruang fiskal.²³ Untuk itu, perlu ditempuh upaya optimalisasi kebijakan fiskal melalui pemberian stimulus terhadap perekonomian secara langsung melalui penyaluran belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan struktural. Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk memperkuat fundamental perekonomian serta mendukung ketahanan perekonomian domestik. Paket kebijakan tersebut ditujukan untuk

meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, meningkatkan ketahanan fiskal, dan menjaga terlaksananya program prioritas pembangunan, serta mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Dalam jangka pendek, upaya pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan melalui stimulus fiskal. Pelaksanaan upaya pemerintah tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul, seperti keterbatasan ruang fiskal maupun penyerapan anggaran yang kurang optimal serta cenderung menumpuk di akhir tahun. Guna mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu upaya untuk mengelola anggaran lebih efisien dan berkualitas, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran negara.

Dari sisi pendapatan, fokus pemerintah meningkatkan pendapatan diarahkan menjadi dua kebijakan, yaitu kebijakan penerimaan pajak dan bukan pajak. Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, serta mengendalikan konsumsi barang kena cukai. Selain itu, pencapaian target penerimaan pajak dilakukan dengan penerapan kebijakan *extra effort*, melalui: (i) optimalisasi pemeriksaan dengan fokus pada sektor unggulan masing-masing, *transfer pricing*, dan *fraud*; (ii) ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak melalui optimalisasi IT, *e-tax invoice*, serta perbaikan regulasi; dan (iii) implementasi tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum.

Fokus belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2016 mencakup tiga dimensi pembangunan, serta satu kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung (Gambar 15.3). Dimensi pembangunan manusia merupakan penjabaran Nawa Cita, meliputi peningkatan kualitas hidup manusia, melalui bidang pendidikan, perumahan, air minum dan sanitasi serta kesehatan. Dimensi pembangunan sektor unggulan berupa peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar internasional dan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi pemerataan dan kewilayahan ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup melalui pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Di samping itu, dukungan keberlangsungan pembangunan memerlukan dukungan dari kepastian

22 Pengaturan terhadap badan usaha tersebut merupakan bagian dari transformasi Bank Indonesia, yang secara garis besar akan memberikan pedoman pada kegiatan distribusi uang rupiah (*cash distribution*), pemrosesan uang rupiah yang mencakup penghitungan, sortasi, dan pengemasan (*cash processing*); penyimpanan uang rupiah di khazanah (*cash in safe*), dan pengisian uang rupiah di ATM, serta pengambilan uang rupiah di CDM, berikut pemantauan kecukupan uang rupiah pada ATM dan/atau CDM (*cash replenishment*).

23 Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatasi besaran defisit fiskal tidak melebihi 3% Produk Domestik Bruto.

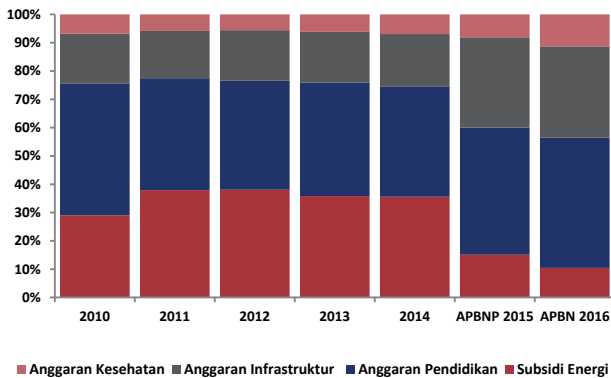


dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Dari sisi belanja negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan ruang fiskal melalui optimalisasi pendapatan, melanjutkan efisiensi subsidi dan belanja, pengendalian *earmarking* dan belanja wajib, serta penguatan dan penyalarsan desentralisasi fiskal.

Reformasi subsidi energi dilakukan dengan merealokasi belanja subsidi energi kepada belanja yang lebih produktif, berupa subsidi pangan, bunga kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR), benih, dan *Public Service Obligation*

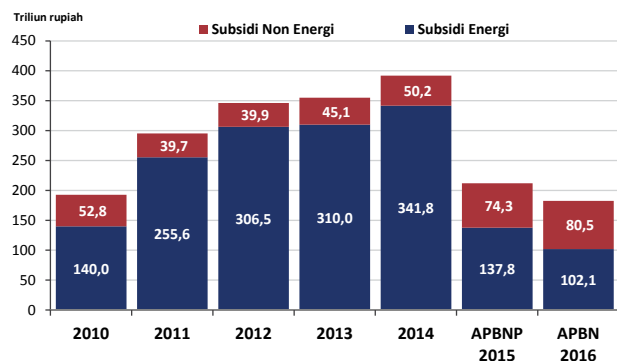
(Grafik 15.14). Kebijakan ini selanjutnya disempurnakan pada awal tahun 2015 dengan implementasi skema subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan premium. Reformasi tersebut masih akan dilanjutkan pada 2016 terutama pada tarif tenaga listrik dan LPG, guna melanjutkan penyaluran subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran serta realokasi anggaran kepada belanja yang lebih produktif yaitu anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Grafik 15.15). Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan agar sejalan dengan upaya pembangunan sektor unggulan serta pemerataan dan kewilayahan.

Grafik 15.14. Perbandingan Subsidi Energi, Anggaran Pendidikan, Infrastruktur, dan Kesehatan



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 15.15. Perkembangan Subsidi Pemerintah



Sumber: Kementerian Keuangan

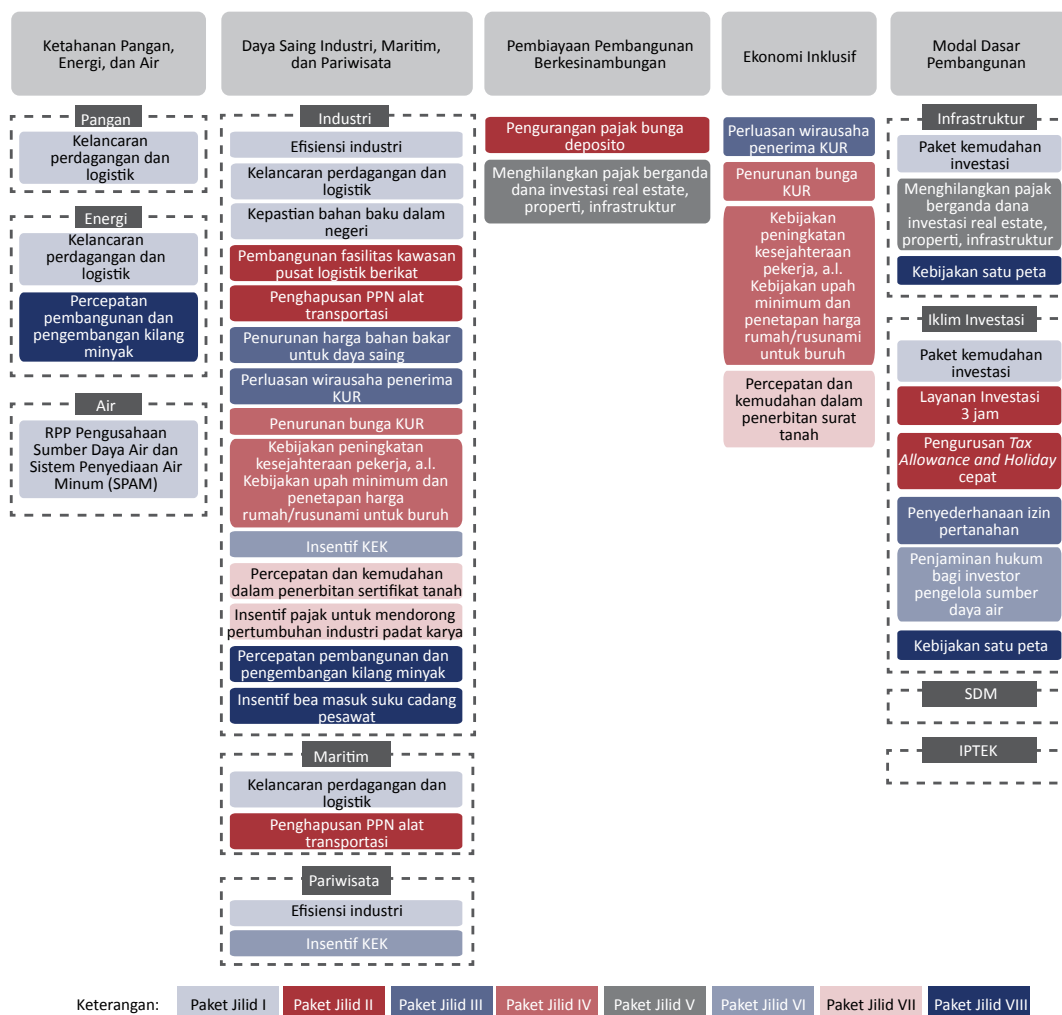
Kebijakan Reformasi Struktural

Selama tahun 2015, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk memperkuat fundamental perekonomian Indonesia, namun masih terdapat ruang perbaikan dengan dilengkapi kebijakan struktural lainnya (Gambar 15.4). Secara umum, paket kebijakan yang telah ditempuh cenderung lebih fokus pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan UMKM. Sedangkan kebijakan terkait pangan-energi, dan pembiayaan berkesinambungan terhitung relatif minim. Meski masih dini untuk mengevaluasi dampak berbagai paket kebijakan dimaksud, namun perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan sinyal dan tren yang positif. Untuk itu, agenda reformasi struktural perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menjawab isu struktural yang terkait, seperti ketahanan pangan, energi, dan air, peningkatan daya saing industri maritim dan pariwisata, pembiayaan pembangunan berkesinambungan, ekonomi

yang lebih inklusif, penguatan sumber daya manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai paket kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan daya saing. Dari sisi pangan, kebijakan pembangunan diperlukan khususnya dalam menjawab tantangan peningkatan produktivitas. Dari sisi energi, masih diperlukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan produksi dan efisiensi. Sementara terkait industri, penyusunan kebijakan diarahkan pada peningkatan daya saing, produktivitas dan muatan teknologi. Pada sektor maritim, arah kebijakan perlu ditujukan pada penguatan kedaulatan wilayah, pengelolaan SDA, konektivitas, dan pengembangan ekonomi. Sementara, sektor pariwisata memerlukan kebijakan yang mengarah pada penguatan infrastruktur, fasilitas wisata, dan kapasitas SDM. Dukungan pembiayaan yang berkesinambungan memerlukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber dana berbasis jangka

Gambar 15.4. Pemetaan Paket Kebijakan Pemerintah Tahun 2015



panjang yang bersumber dari domestik maupun luar negeri. Terkait ekonomi inklusif, diperlukan kebijakan yang mengarah pada pemerataan pembangunan dan akses keuangan. Sementara terkait SDM dan IPTEK, diperlukan kebijakan yang mengarah pada upaya mendorong kesuksesan Indonesia bertransisi menjadi negara berpendapatan tinggi.

Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Potensi sektor pertanian yang besar belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum mampu ditransformasikan menjadi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Peran sektor pertanian pada PDB relatif masih rendah, padahal sektor tersebut menyerap sebagian besar penduduk Indonesia (34%), yang justru sebagian besarnya tercatat sebagai rumah tangga miskin. Rendahnya produktivitas serta berbagai permasalahan dari sisi produksi, distribusi, pemasaran, maupun sisi institusi dan kebijakan, memerlukan suatu reformasi kebijakan struktural menyeluruh. Fokus perwujudan ketahanan pangan terutama pada peningkatan produksi untuk mencapai swasembada, penguatan stabilisasi harga dan pasokan, perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat, serta penanganan gangguan ketahanan pangan, yang dituangkan pada beberapa program kebijakan. Program tersebut antara lain meliputi pembukaan lahan baru, perbaikan dan pembangunan irigasi, pembangunan pasar dan sarana-prasarana transportasi, pemulihan kesuburan lahan, pengembangan dan pembangunan gudang dengan fasilitas yang memadai, pengembangan bank pertanian dan UMKM, peningkatan kemampuan petani, pembangunan agribisnis kerakyatan, pengendalian impor pangan, serta reformasi regulasi agraria.

Sedangkan untuk mewujudkan ketahanan energi, arah kebijakan difokuskan pada empat prioritas kebijakan, yaitu: peningkatan produksi dan cadangan energi primer, peningkatan bauran energi, perluasan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan energi dan listrik, serta pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran. Urgensi penyelesaian permasalahan energi nasional tertuang dalam RPJMN 2015-2019, dimana kedaulatan energi dan ketenagalistrikan menjadi prioritas ke-7 Nawa Cita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedaulatan energi merupakan sasaran sektor ESDM, dengan target pendapatan pemerintah Rp1.994 triliun, sedangkan total investasi dan pendanaan pada sektor energi dan sumber daya mineral ditargetkan 273 miliar dollar AS dengan pendanaan APBN pada Kementerian ESDM Rp71,5 triliun. Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan air nasional, kebijakan Pemerintah dipadukan

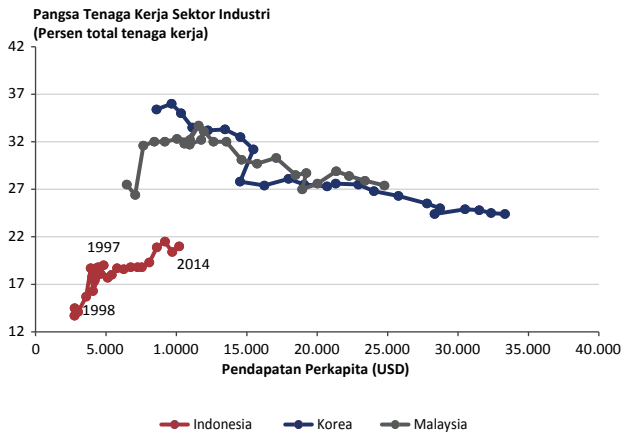
dengan konservasi sumber daya air. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain pembangunan waduk, peningkatan akses air minum dan sanitasi, pengembangan infrastruktur konservasi air, perlindungan sumber air alami, sertapengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Peningkatan daya saing industri, maritim, dan pariwisata

Dalam upaya menjawab tantangan daya saing industri, maritim, dan pariwisata, pemerintah akan fokus menerapkan berbagai strategi pembangunan. Fokus kebijakan industri berupa pengembangan industri di luar Jawa, peningkatan populasi industri, penguatan integrasi dalam rantai nilai dunia, serta peningkatan daya saing dan produktivitas. Pengembangan wilayah industri di luar Jawa dengan memfasilitasi pembangunan kawasan industri, sentra industri kecil-menengah, infrastruktur pendukung industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja. Sedangkan peningkatan populasi industri dengan mendorong investasi industri hilirisasi SDA yang memenuhi kebutuhan konsumsi domestik dan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, dan terintegrasi dalam rantai nilai global. Pemerintah juga akan membina industri kecil dan menengah agar dapat berafiliasi dengan industri besar yang terhubung dalam rantai nilai global. Untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas, Pemerintah akan meningkatkan efisiensi teknis, mendorong penguasaan iptek dan inovasi, serta membangun SDM yang lebih berkualitas sebagai bagian dari *labor reform* di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, keterlibatan investor asing dalam bentuk FDI diperlukan dalam memperluas basis industri dan peningkatan produktivitas sebagai bagian dari penguatan struktur industri di Indonesia secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan *institutional reform* yang telah ditempuh guna memperkuat kepastian hukum dan efisiensi birokrasi yang menopang penguatan daya saing industri Indonesia. Strategi utama agar proses *catching-up* menuju negara pendapatan tinggi dapat tercapai, yaitu dengan meningkatkan partisipasi industri manufaktur Indonesia dalam rantai nilai global yang didukung oleh perbaikan modal dasar investasi, penyediaan modal dasar pembangunan dan implementasi strategi akses ke pasar global. Arah kebijakan yang mendukung peningkatan industrialisasi perlu terus didorong mengingat peningkatan pendapatan perkapita Indonesia cenderung berjalan lambat seiring dengan terbatasnya pangsa tenaga kerja sektor industri Indonesia (Grafik 15.16).

Dari sisi maritim, penguatan kedaulatan maritim, pengentasan penangkapan ikan liar, pembangunan konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, menjadi program yang akan

Grafik 15.16. Pangsa Tenaga Kerja Sektor Manufaktur dan Pendapatan Perkapita



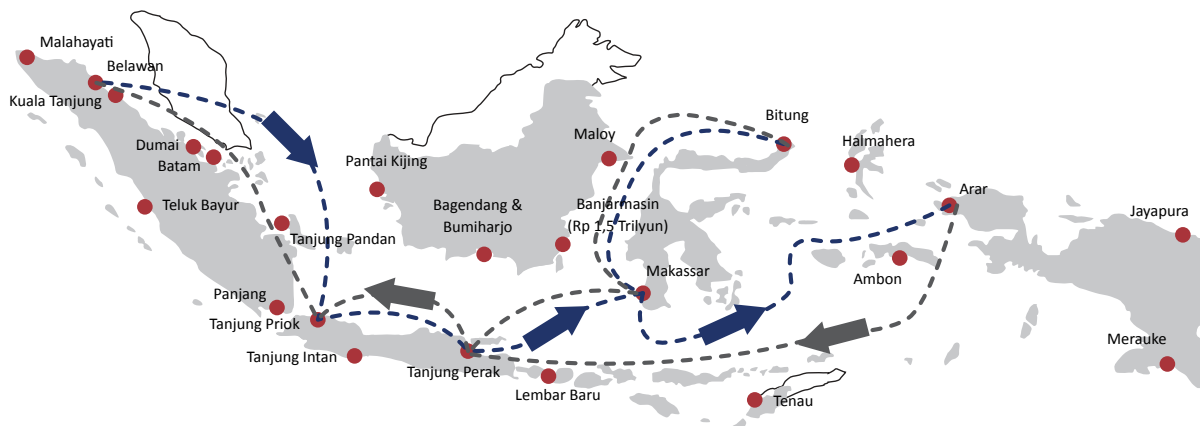
ditempuh. Pemerintah akan menyelesaikan tata batas laut dan mendaftarkan pulau-pulau kecil ke PBB, mengatur dan mengendalikan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta memperkuat pengawasan dan keamanan laut. Untuk mengurangi tindakan perikanan liar, melalui peningkatan jumlah hari operasi kapal pengawas dan pengawasan melalui udara. Pembangunan konektivitas nasional dilakukan dengan pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut dan program poros maritim (Gambar 15.5), penyediaan trayek dan kapal perintis, pembangunan kapal perintis penumpang dan barang, serta revitalisasi lokasi industri galangan kapal. Sedangkan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dilakukan melalui peningkatan armada perikanan terutama kapal dengan tonase besar, membina kawasan minapolitan dan pusat perbenihan, serta pengembangan kawasan perikanan budidaya.

Pengembangan pariwisata dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan destinasi pariwisata, meningkatkan pemasaran, membangun industri pariwisata, dan memperkuat kelembagaan. Tahun 2016, pemerintah menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara, dengan target perolehan devisa mencapai Rp172,8 triliun. Pembangunan destinasi pariwisata dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan lokasi pariwisata serta meningkatkan citra kepariwisataan, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan pemasaran, Pemerintah akan memperkuat kerja sama internasional kepariwisataan. Sedangkan pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui pembinaan masyarakat lokal, fasilitasi investasi, pengembangan standarisasi dan sertifikasi, serta integrasi ekosistem pariwisata. Untuk memperkuat kelembagaan, kebijakan akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, fasilitasi peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja, peningkatan kualitas penelitian, dan pengelolaan manajemen perubahan.

Penguatan basis pembiayaan pembangunan

Dalam rangka menjawab tantangan penguatan basis pembiayaan pembangunan ekonomi diperlukan upaya terkoordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah serta otoritas keuangan lainnya. Tantangan utama pembiayaan pembangunan ekonomi berupa keterbatasan sumber pendanaan jangka panjang. Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terintegrasi dengan perekonomian global, mendorong kesempatan untuk mendapatkan sumber pembiayaan jangka panjang antara lain melalui PMA. Untuk itu, peran pemerintah sangat diharapkan guna memperkuat kondisi fundamental perekonomian

Gambar 15.5. Rencana Pengembangan 24 Pelabuhan Strategis



Sumber: Kementerian Perhubungan, 2015

antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Perbaikan tersebut diharapkan akan berdampak positif pada integrasi internal Indonesia dan daya tarik Indonesia bagi aktivitas *off shoring* oleh produsen-produsen global. Selain itu, peran kebijakan fiskal melalui optimalisasi ruang fiskal juga menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian.

Di sisi pasar keuangan, penguatan basis pembiayaan pembangunan dilakukan dalam konteks *financial sector reforms* dengan terus mendorong pendalaman pasar keuangan guna mewujudkan pasar keuangan domestik yang lebih likuid dan efisien. Kondisi pasar keuangan sangat penting untuk mendukung stabilitas moneter, SSK serta pembiayaan pembangunan ekonomi domestik. Pasar keuangan yang berkembang dapat lebih *resilient* terhadap tekanan internal dan eksternal, mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan akan berkontribusi sebagai alternatif sumber pembiayaan ekonomi. Peran Bank Indonesia dalam pendalaman pasar keuangan, untuk menjawab tantangan di pasar uang rupiah dan valas, serta pasar keuangan syariah, mengacu pada *blueprint* pendalaman pasar keuangan Indonesia yang mencakup penyusunan *framework*, strategi, program kerja, dan *roadmap* pendalaman jangka panjang. Sementara itu, di pasar modal dan pasar keuangannya lainnya, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam berkoordinasi dengan otoritas terkait dalam rangka mendorong pengembangan pasar modal dan pasar keuangan lainnya. Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK terus berupaya mencari solusi untuk pengembangan pasar obligasi melalui kemudahan dan percepatan pemberian ijin penerbitan obligasi korporasi.

Upaya pendalaman pasar uang rupiah dilakukan dengan menyerap surplus likuiditas melalui instrumen jangka panjang, sekaligus mengembangkan instrumen pasar uang dan meningkatkan kepercayaan bertransaksi antar pelaku. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah menyiapkan beberapa kebijakan guna mengembangkan pasar repo. Sementara itu, upaya pendalaman pasar uang rupiah melalui pengembangan PUAB guna meningkatkan efisiensi transaksi *unsecured* dilakukan dengan mendorong peningkatan *credit line* antarbank, serta peningkatan peran *reference rate* melalui penerapan *hittable* JIBOR. Untuk pengembangan pasar Repo, Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK berupaya untuk meningkatkan jumlah bank yang menandatangani *Global Master Repo Agreement* (GMRA) Indonesia, dan bertransaksi repo dengan menggunakan GMRA Indonesia. Dalam kaitan ini, upaya langsung berupa sosialisasi dan edukasi secara terintegrasi antara BI dan OJK akan dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman pelaku pasar terhadap

transaksi Repo dan penggunaan GMRA sebagai perjanjian transaksi yang solid. Dalam rangka meningkatkan *governance* dalam bertransaksi di pasar uang, Bank Indonesia akan melakukan pengaturan di pasar uang, pengaturan instrumen pasar uang, prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi, pengaturan infrastruktur, mekanisme pelaporan dan pengawasan, yang akan dituangkan dalam pengaturan PBI Pasar Uang sebagai payung dari transaksi dan perdagangan instrumen di pasar uang. Bank Indonesia juga akan mendorong penerbitan *negotiable certificate of deposit* (NCD) melalui penetapan kriteria NCD yang dapat ditransaksikan di pasar uang. Dalam rangka penambahan instrumen di pasar uang, Bank Indonesia saat ini sedang mengkaji kemungkinan pengembangan instrumen *commercial paper* sebagai salah satu alat pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi korporasi non-bank.

Sementara itu, pengembangan pasar valas terutama ditujukan untuk mendorong pengembangan instrumen pasar uang valas, meningkatkan *credit line* antarbank, serta terus mengembangkan berbagai instrumen derivatif. Pengembangan instrumen pasar valas antara lain melalui ketersediaan pengembangan instrumen *structured product* secara terbatas dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban lindung nilai bagi korporasi non-bank. Untuk mendorong peningkatan likuiditas di pasar derivatif, BI juga akan berkoordinasi dengan kementerian BUMN untuk mendorong peningkatan transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh BUMN. Dalam rangka standardisasi kontrak derivatif, BI akan berupaya menstandarisasi bentuk kontrak transaksi derivatif yang tidak hanya sesuai dengan *best practice* namun juga lebih mudah untuk dipahami oleh pelaku pasar maupun stakeholder lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi pasar keuangan domestik, sehingga menjadi kontrak yang implementatif. Bank Indonesia bekerjasama dengan OJK menempuh beberapa langkah penyempurnaan ketentuan yang dinilai sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini.

Penguatan Ekonomi Inklusif

Upaya mewujudkan dan menguatkan ekonomi yang inklusif, telah menjadi perhatian Pemerintah yang dituangkan melalui sejumlah strategi kebijakan. Skema pemerataan pembangunan antar wilayah tertuang dalam beberapa kebijakan Nawa Cita, dimana dalam jangka menengah – pendek, Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dimensi pembangunan manusia berupa pemenuhan akses kebutuhan dasar, dimensi pemerataan pembangunan dan kewilayahan.²⁴ Disamping

²⁴ Meliputi pembangunan desa, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pengembangan pusat perekonomian di luar Jawa.

itu, juga disusun langkah strategis pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, layak hidup yang didukung oleh pengembangan lingkungan dan berbasis teknologi.

Upaya penguatan ekonomi inklusif juga perlu didukung oleh penciptaan sistem keuangan yang inklusif. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus mendorong terciptanya sistem keuangan inklusif melalui perluasan akses layanan keuangan yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pendapatan. Namun saat ini akses penduduk Indonesia terhadap sistem keuangan formal masih relatif rendah yaitu hanya menjangkau sekitar 52% total penduduk (Bank Dunia, 2010), dimana hanya 50% masyarakat yang menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank. Sehingga diperlukan keterlibatan dan kerja sama antara Bank Indonesia dan regulator, kementerian dan lembaga pemerintah yang baik dan terstruktur.

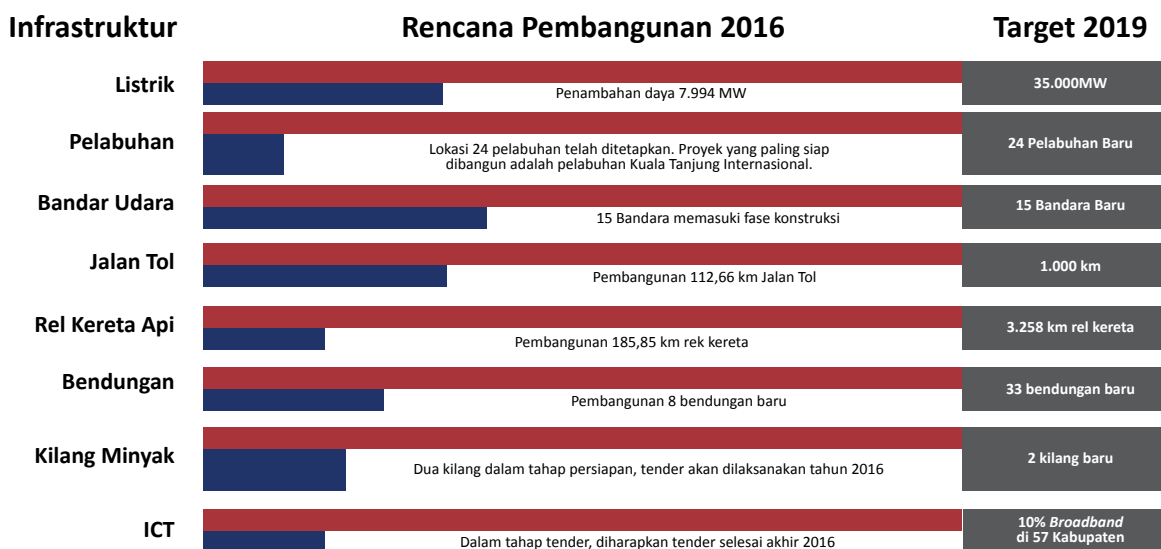
Bank Indonesia juga akan terus berupaya untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional melalui perluasan transaksi nontunai. Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta industri sistem pembayaran, inisiatif pembayaran nontunai akan didorong melalui perluasan pembayaran digital yang terintegrasi melalui pembangunan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pengembangan ini mengacu pada rencana strategis pengembangan GPN yang telah disusun Bank Indonesia, yang mencakup strategi bisnis, fungsi dan cakupan layanan, tahapan dan prioritas pengembangan,

kepemilikan dan penyelenggaraan, serta metode pengembangan infrastruktur GPN. Rencana strategis tersebut akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia yang dapat melayani berbagai transaksi pembayaran ritel secara luas dan terintegrasi sesuai kebutuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan peran pelaku nasional.

Penguatan modal dasar pembangunan

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan empat pilar perekonomian di atas perlu didukung dengan reformasi struktural pada sisi infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, serta IPTEK. Terkait infrastruktur, pemerintah menetapkan tema Rencana Kerja tahun 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan infrastruktur sebagai dasar untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas melalui peningkatan *public capital stock*. Pemerintah juga menyusun 225 Proyek Strategis Nasional dan 30 Proyek Prioritas sebagai fokus pembangunan infrastruktur, yang meliputi peningkatan kapasitas energi, penguatan konektivitas nasional serta penguatan konektivitas digital (Gambar 15.6). Untuk memelihara momentum reformasi struktural, tercapainya target pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dalam jangka pendek, ekspektasi dunia usaha dan rumah tangga akan terus terjaga, sehingga mendorong kenaikan investasi dan konsumsi. Sementara dalam jangka panjang, akan mendorong kenaikan produktivitas dan perbaikan daya saing.

Gambar 15.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur 2016 dan Target 2019



Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP)

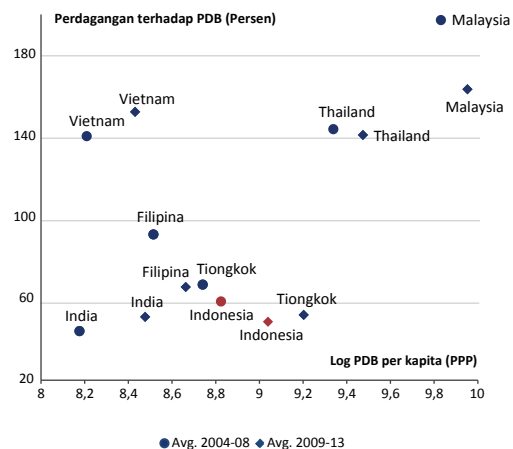
Defisit transaksi berjalan Indonesia yang telah terjadi sejak akhir tahun 2011 disebabkan salah satunya oleh melemahnya kinerja ekspor Indonesia. Pelemahan ini dipengaruhi dua faktor utama, yaitu faktor domestik, masalah struktural pada industri dan perdagangan, dan faktor eksternal, berupa penurunan harga komoditas. Kerentanan transaksi berjalan tersebut terkait dengan struktur ekspor Indonesia yang saat ini didominasi oleh industri pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) yang kinerjanya bergantung pada harga komoditas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengoptimalkan potensi Indonesia, perlu dilakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan daya saing industri di pasar global. Industri menjadi sentral dalam transformasi karena merupakan lokomotif pertumbuhan menuju negara maju, menyerap banyak tenaga kerja, dapat menciptakan nilai tambah yang besar, dan pada akhirnya dapat menjadi sumber devisa secara fundamental.

Framework analisa daya saing (*Trade Competitiveness Diagnostics*) yang dikembangkan Reis dan Farole (2012) dapat digunakan untuk mengukur kinerja perdagangan internasional Indonesia dan daya saing faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja ekspor tersebut. Dalam hal ini, kinerja Indonesia dibandingkan dengan *peer countries*-nya.¹

Pada tahapan pertama, analisa daya saing dilakukan analisis kinerja perdagangan (ekspor) pada empat dimensi yaitu *intensive*, *extensive*, *quality* dan *sustainability margin*.² Hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor Indonesia tertinggal dibandingkan negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand. Ekspor Indonesia masuk dalam klasifikasi negara *low middle income* yang cenderung berbasis SDA dengan nilai tambah rendah. Indonesia terlihat mengalami penurunan kinerja pada keempat dimensinya dengan isu utama pada *intensive* dan *quality margin*.

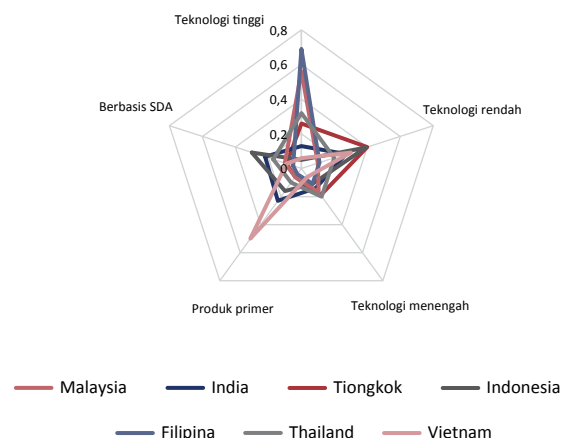
1 Perbandingan secara khusus dilakukan terhadap Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok dan India.
2 Yang pertama adalah *intensive margin* yang tercipta dengan menjual lebih banyak produk yang sama di pasar yang sama. Dimensi kedua, *extensive margin*, adalah arus ekspor baru dari menjual produk baru atau menjual produk yang ada saat ini ke pasar yang baru. Berikutnya *quality margin* terjadi jika kualitas dan kecanggihan produk yang diekspor meningkat. Produk dengan nilai tambah lebih tinggi dari sisi orisinalitas (*ingenuity*), *skill*, dan teknologi akan memiliki harga yang lebih tinggi di pasar. Dimensi terakhir, *sustainability margin* mengevaluasi *survival rate* dari ekspor, baik barang baru maupun barang yang sudah lama diekspor.

Grafik 1 Trade Openness

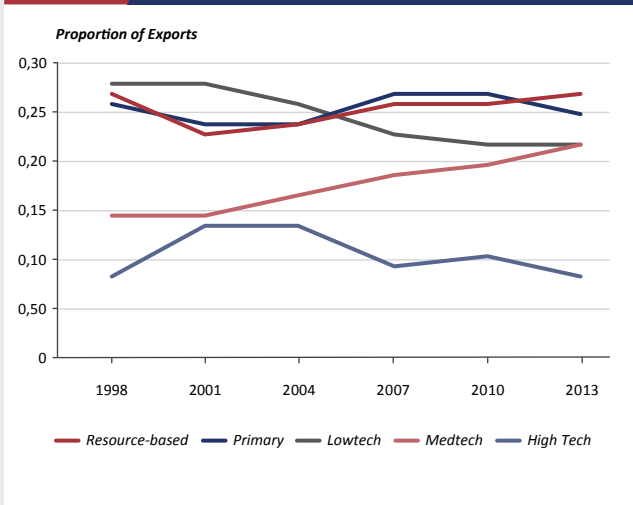


Dimensi *intensive margin* diwakili oleh *trade openness* (rasio ekspor dan impor terhadap PDB) yang merupakan ukuran tingkat integrasi suatu perekonomian dengan perdagangan dunia. Tingkat keterbukaan Indonesia pada tahun 2009-2013 sebesar 50%, menurun dibandingkan tahun 2004-2008 (60%) (Grafik 1). Negara *peers* umumnya mengalami peningkatan *trade openness* dengan level yang lebih tinggi seperti Vietnam (150%) dan Filipina (65%). Dari sisi *extensive margin*, jangkauan ekspor Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara lain. Dari total 3906 produk ekspor Indonesia pada tahun 2013, hanya sekitar 53% atau

Grafik 2 Pangsa Ekspor (2013)



Grafik 3 Perkembangan Pangsa Ekspor Indonesia berdasarkan Komponen Teknologi



2099 produk yang terjual di lebih dari 10 pasar. Angka ini lebih rendah dibandingkan Tiongkok yang mampu menjual 4133 produk, atau 88% dari total produknya ke lebih dari 10 pasar. Selain itu, tingkat kematian produk Indonesia cukup tinggi dengan produk yang bertahan dengan nilai tinggi adalah barang berbasis SDA.

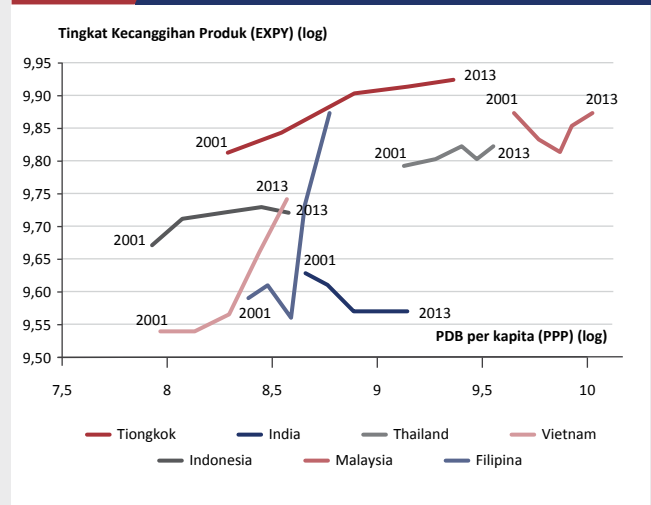
Dari dimensi *quality margin*, Indonesia unggul pada *primary products* namun tertinggal pada produk *high tech* (Grafik 2).³ Selama 2 dekade terakhir, terdapat indikasi pergeseran produk ekspor Indonesia dari *low* dan *high tech* menjadi *med tech* dan *resource-based* (Grafik 3). Ekspor Indonesia juga memiliki tingkat kecanggihan yang rendah dan mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan negara lain (Grafik 4).⁴ Indikator lain adalah *product space* (Hidalgo *et al*, 2007) yang menggambarkan jaringan keterkaitan antar produk dalam perdagangan internasional.⁵ Pada *product space* (Grafik 5), produk yang bernilai tinggi umumnya terletak di daerah inti yaitu kluster industri yang memiliki banyak keterkaitan antar produk (*dense forest*) seperti mesin, metalurgi, dan

3 Klasifikasi produk ekspor menurut komponen teknologi dimungkinkan menggunakan SITC 3 digit berdasarkan Hatzichronoglou (1997) dan Lall (2000).

4 Merujuk pada Hausmann, Hwang and Rodrik (2007).

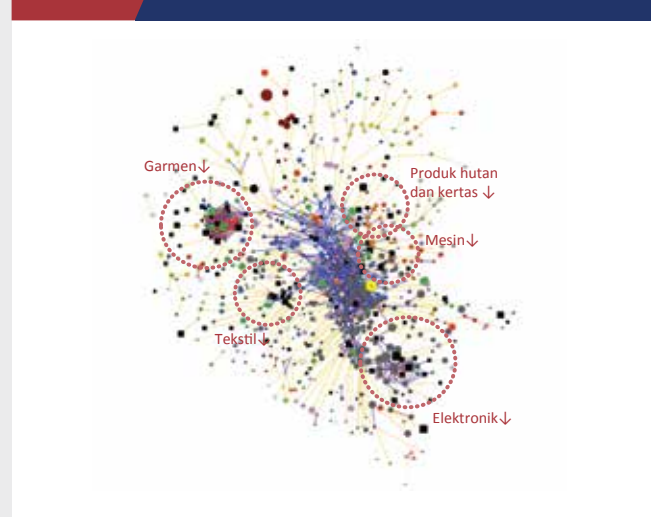
5 *Product space* terdiri atas titik simpul dan garis yang menghubungkan simpul. Titik simpul dengan warna berbeda mewakili klasifikasi produk Leamer (contoh SDA, padat karya, dan metalurgi) dengan ukuran simpul mewakili nilai perdagangan internasional produk tersebut. Warna garis mencerminkan tingkat kedekatan antar produk dimana warna merah dan biru tua menunjukkan kedekatan yang tinggi sedangkan kuning dan biru muda menggambarkan keterkaitan yang rendah. Yang membedakan *product space* tiap negara adalah titik hitam yaitu produk ekspor negara tersebut yang memiliki $RCA > 1$.

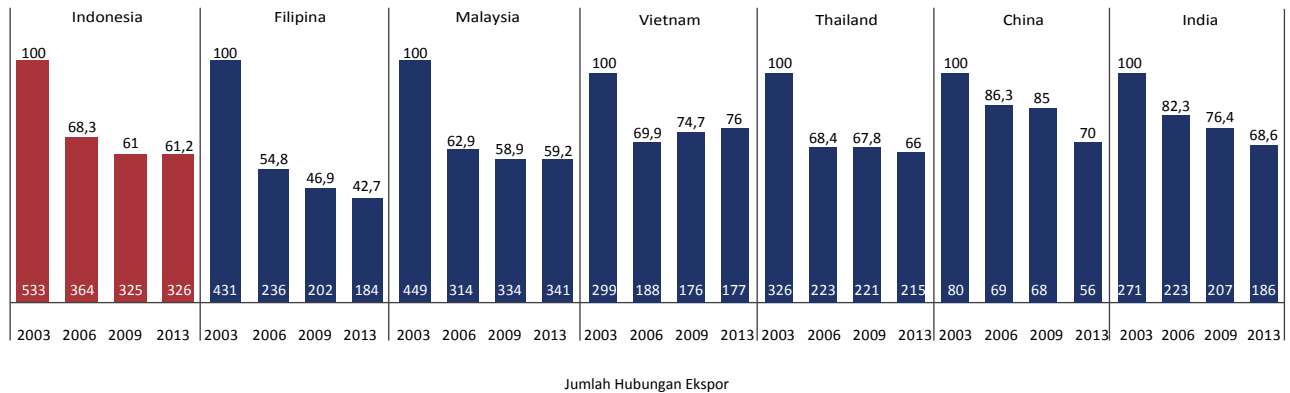
Grafik 4 Kecanggihan Produk (2001-2013)



otomotif. Sementara produk bernilai rendah berada di daerah yang jaringan keterkaitannya rendah. Suatu negara umumnya akan lebih mudah memproduksi barang yang dekat dengan produk yang sudah diproduksinya. Dengan demikian, negara yang memiliki keunggulan komparatif di kluster industri dengan keterkaitan tinggi akan lebih cepat melakukan *upgrading* terhadap produk ekspornya. Analisis *product space* Indonesia dari tahun 2000 hingga 2013 menunjukkan *product space* Indonesia semakin menjauh dari daerah inti yang memiliki keterkaitan tinggi. Hal tersebut terlihat dari penurunan jumlah produk berkeunggulan komparatif pada garmen dan tekstil serta mesin, elektronik, dan furnitur yang merupakan tendensi keunggulan komparatif pada *upper-middle countries*. Menurut Hidalgo *et al* (2007), daya saing rendah pada kluster industri ini akan menyulitkan transisi ke *income*

Grafik 5 Product Space Indonesia (2013)





group yang lebih tinggi yang berarti adanya risiko (*lower middle income trap*) bagi Indonesia.

Dimensi lainnya, yaitu *sustainability margin* diwakili oleh indikator kemampuan untuk mempertahankan hubungan perdagangan. Selama rentang tahun 2003-2013, pangsa hubungan ekspor baru Indonesia yang masih bertahan adalah sebesar 61,2% (Grafik 6). Durasi ekspor ini hanya lebih baik dibandingkan Filipina dan Malaysia, namun lebih rendah dibandingkan Vietnam, Thailand, China dan India.

Kinerja perdagangan Indonesia juga perlu dilihat dari aspek daya saing dalam rantai nilai dunia. Perkembangan perekonomian global pada abad 21 menunjukkan adanya perubahan pola perdagangan dari persaingan memproduksi produk tertentu menjadi persaingan terlibat dalam proses produksi, yaitu *manufacturing, pre-fabrication, ataupun post-fabrication*.⁶ Kemampuan

Indonesia terlibat dalam salah satu proses produksi tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh daya saing sebagai lokasi pilihan sesuai dengan karakteristik faktor input. Daya tarik investasi Indonesia perlu diperkuat untuk mendorong investasi berorientasi ekspor. Analisis perbandingan karakteristik FDI di antara negara ASEAN menunjukkan bahwa investasi di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, namun lebih berorientasi domestik. Sementara negara lain di kawasan dapat mengundang investasi yang lebih berkualitas seperti Thailand: FDI mendorong ekspor, Vietnam: FDI mendorong ekspor dan penyerapan tenaga kerja, dan Malaysia: FDI mendorong produk ekspor berbasis tenaga kerja terampil (Tabel 1).

Lebih jauh, hasil analisis dengan menggunakan pendekatan skema perdagangan segitiga (*triangular trading scheme*) menunjukkan bahwa negara ASEAN yang paling kompetitif dalam rantai nilai global adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Grafik 7).⁷ Ukuran kompetitif tersebut diperoleh berdasarkan tingkat produktivitas impor, yaitu kemampuan mengekspor setelah mengimpor bahan baku dan barang antara. Ukuran kompetitif juga mempertimbangkan skala ekspor dalam rantai nilai dunia.

Tabel 1.

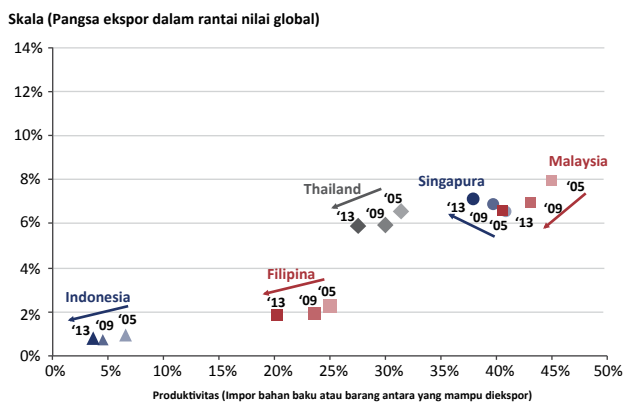
Karakteristik FDI Negara ASEAN

Rasio Produktivitas	FDI/Perusahaan Terafiliasi (USD Juta)	Ekspor/Perusahaan Terafiliasi (USD Juta)	Tenaga Kerja/Perusahaan Terafiliasi
Indonesia	\$4,85	\$69,39	809
Vietnam	\$10,80	\$107,81	896
Malaysia	\$3,48	\$122,25	389
Thailand	\$6,10	\$204,24	709

6 Berdasarkan karakteristik nilai tambah dan faktor input, setiap tahapan produksi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk *smiley curve*.

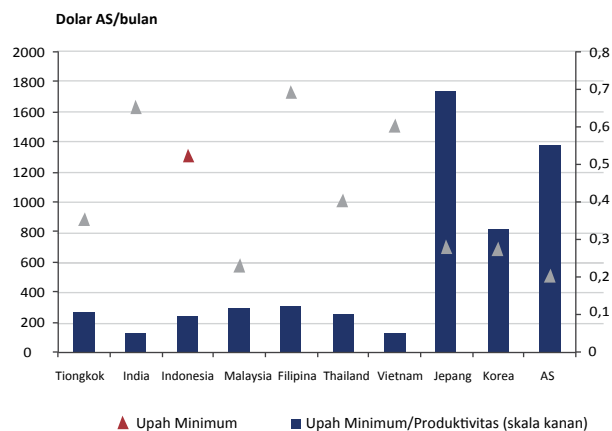
7 Konsep skema perdagangan segitiga mengacu pada Lejour et al (2013) dan Johnson-Noguera (2011). Berdasarkan metode tersebut, data perdagangan yang semula bersifat bilateral direkonstruksi menjadi perdagangan antara tiga negara, yaitu pemasok bahan baku (*origin*), penghubung (*hub*), dan tujuan akhir (*final destination*). Melalui pola perdagangan tiga negara tersebut diperoleh informasi antara lain: (1) Impor bahan baku yang diolah untuk ekspor (*production hub*) (2) Impor bahan baku yang diolah untuk domestik (3) Ekspor bahan mentah ke dunia (4) Ekspor produk olahan yang bahan bakunya dari domestik, dan (5) aktivitas berdikari (bersumber, diproses, dan dikonsumsi domestik).

Grafik 7. Daya Saing Negara ASEAN 5 Dalam Rantai Nilai Global



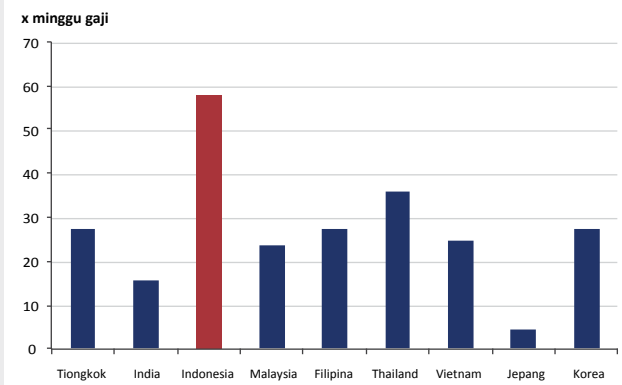
Tahap kedua analisa daya saing bertujuan untuk menganalisa daya saing faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja ekspor Indonesia. Daya saing diukur pada tiga dimensi yaitu akses pasar, faktor sisi suplai dan dukungan promosi perdagangan. Masing-masing dimensi ini membentuk kinerja ekspor melalui pengaruhnya terhadap perusahaan melalui jalur *entry cost*, biaya faktor dan transaksi yang menentukan daya saing produksi dari tingkat pabrika, serta tingkat teknologi dan efisiensi dari sektor atau perusahaan. Dari hasil analisis, tantangan pada ekspor Indonesia terjadi terutama disebabkan lemahnya daya saing tenaga kerja (*skill set*), biaya produksi dan logistik yang tinggi, tidak kondusifnya lingkungan bisnis dan rumitnya birokrasi terkait kebijakan dan institusi domestik, serta lemahnya akses pasar.

Grafik 8. Upah Minimum dan Produktivitas



Sumber: *World Development Indicators, World Bank, diolah*

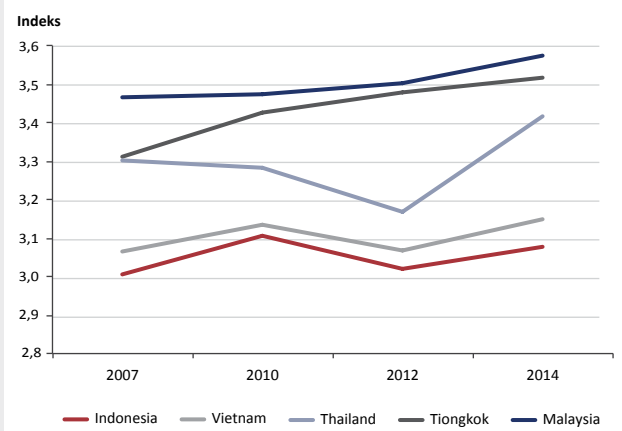
Grafik 9. Biaya Pemecatan



Sumber: *Global Competitiveness Index, WEF*

Dari dimensi faktor kondisi, terdapat biaya yang tinggi pada tenaga kerja Indonesia. Upah minimum dengan mempertimbangkan produktivitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara maju (Grafik 8). Upah minimum yang tinggi menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan pemindahan pabrik ke provinsi dengan UMR lebih rendah. Biaya pemecatan juga sangat tinggi dibandingkan *peers*, yaitu sekitar 50 kali gaji mingguan (Grafik 9). Selain itu, terdapat beberapa *implicit cost* seperti banyaknya serikat buruh yang menyulitkan proses negosiasi, banyaknya demonstrasi, serta meningkatnya risiko operasional. Dari sisi *skill*, terdapat permasalahan yang lebih serius. World Bank (2014) menyatakan bahwa terdapat *skill mismatch* dimana 50% lulusan SMA/setara dan 15% lulusan universitas bekerja di *unskilled position*.

Grafik 10. Logistics Performance Index



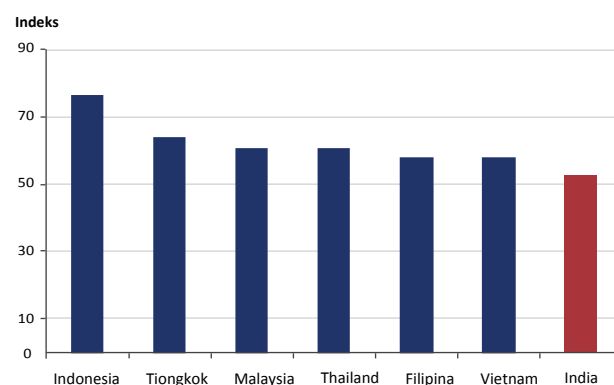
Sumber: World Bank

70% pengusaha manufaktur mengatakan sangat sulit untuk mengisi *skilled positions*. Sementara hanya 5% pekerja yang memperoleh *on-the-job formal training*.

Kondisi logistik Indonesia sangat menghambat perkembangan daya saing. Asosiasi Logistik dan *Forwarder* Indonesia (2015) menyebutkan biaya logistik Indonesia berkisar 24% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara Asia. Walaupun data WDI menunjukkan bahwa *Logistic Performance Index* Indonesia sedikit meningkat (Grafik 10), namun kondisinya masih lebih rendah dibandingkan *peers*. Isu lainnya dari faktor kondisi adalah kurangnya sertifikasi internasional dan *compliance* atas produk ekspor dan proses industri (Grafik 11).

Dari sisi kerangka insentif bagi pelaku usaha, kebijakan yang memudahkan FDI (Grafik 12) dan kemudahan berusaha Indonesia (Grafik 13) terendah di ASEAN. Beberapa aspek jauh lebih rendah dari *peers* seperti memulai usaha, berurusan dengan ijin konstruksi, mendaftarkan properti, membayar pajak dan menegakkan kontrak. Dari sisi akses pasar yaitu perjanjian perdagangan, Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam terlihat lebih unggul dari Indonesia. FTA Indonesia sebagian besar dilakukan dalam *regional trading system* ASEAN. Dalam *regional block trading*, Indonesia sedang melakukan negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang juga diikuti negara ASEAN lainnya dan tidak termasuk dalam *Trans Pacific Partnership* (TPP). Hambatan lainnya adalah *non-tariff measures* seperti *sanitary and phytosanitary* dan *technical barriers* yang dihadapi produk ekspor Indonesia.

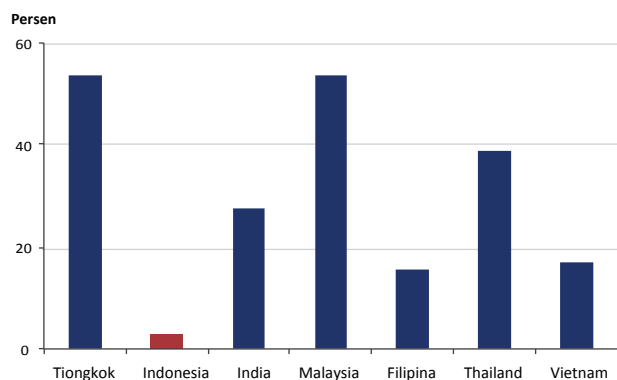
Grafik 12 Ease of Establishment Index (2014)



Sumber: Enterprise Surveys, World Bank

Dari sisi dukungan promosi perdagangan, promosi ekspor dan investasi Indonesia masih relatif lemah. Isu lainnya adalah pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang belum optimal. Jumlah KEK di Indonesia relatif setara dengan *peers* namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah ini masih lebih kecil (UNIDO, 2015). Selain itu, pengembangan KEK ini masih terbatas karena tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti integrasi dengan energi dan konektivitas. Beberapa KEK didirikan jauh dari infrastruktur pendukungnya seperti pelabuhan. Selain itu manajemen pengelolaan kawasan belum sepenuhnya efektif dengan dukungan promosi yang masih lemah.

Grafik 11 Persentase Perusahaan dengan Sertifikasi Internasional



Sumber: Enterprise Surveys, World Bank

Gambar 13 Kemudahan Berusaha Indonesia (2015)



Sumber: World Bank

STRATEGI INDUSTRI NASIONAL

Institusi dan Leadership	Skema insentif Trade dan Investment	SDM dan Ketenagakerjaan	Infrastruktur	Efisiensi Teknis dan Business Services	Akses Pembiayaan	Akses Pasar
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi (antar sektor, pusat-daerah) • Trust dan collective action • Efektivitas manajemen, pemerintahan dan tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi ekspor • Fasilitasi investasi • Kawasan industri • Insentif fiskal • Lingkungan makro (inflasi terkendali dan nilai tukar yang stabil) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan sistem pendidikan nasional (<i>Link and Match</i>) • Keterampilan dan produktivitas kerja • Kebijakan Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas (jalan, logistik, pelabuhan, customs) • Energi & utilitas • Kebijakan fiskal logistik • Koordinasi dan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Technological improvement • R&D dan inovasi • Business services • HAKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pembiayaan (<i>financial inclusion</i>) • Modal ventura • Sumber pembiayaan jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Trade Agreement • Sertifikasi/standarisasi • Sistem informasi (<i>repository</i>) • Perluasan pasar dan sistem

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan peningkatan daya saing industri melalui *upgrading* dan *deepening* industri, penciptaan nilai tambah, serta industri yang berorientasi ekspor. Industri yang dimaksud adalah seluruh industri secara umum, baik yang berbasis SDA, padat karya, teknologi menengah maupun teknologi

tinggi. Untuk itu, diperlukan strategi industri nasional yang mencakup tujuh elemen dasar, yaitu: (i) Institusi dan *leadership*; (ii) Skema insentif perdagangan dan investasi; (iii) SDM dan ketenagakerjaan; (iv) Infrastruktur; (v) Efisiensi teknis dan *business services*; (vi) Akses pembiayaan; dan (vii) Akses pasar (Gambar 1).

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi struktural adalah menyusun strategi pertumbuhan yang dapat memberikan dampak signifikan pada perekonomian suatu negara sehingga perlu disusun strategi pembangunan berdasarkan prioritas yang mengacu pada hambatan utama. Reformasi struktural juga perlu memperhatikan aspek kewilayahan, karena setiap daerah dapat memiliki karakteristik sumber daya dan hambatan struktural yang berbeda.

Terkait hal di atas, Hausmann, Rodrik, dan Velasco (2005) telah memperkenalkan alternatif pendekatan *Growth Diagnostic* untuk melakukan identifikasi hambatan utama dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Analisis hambatan utama tersebut dilakukan dengan mendiagnosis setiap cabang pohon keputusan (*decision tree*), yang diawali dengan dua faktor utama, yaitu pembiayaan yang tinggi dan pengembalian ekonomi yang rendah (Gambar 1). Untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan hambatan utama tersebut, dilakukan proses simulasi kebijakan dengan menggunakan model *Computable General Equilibrium (CGE)-IndoTERM*.¹ Penggunaan model tersebut diperlukan untuk menganalisis dampak reformasi struktural terhadap makroekonomi daerah dan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Bank Indonesia (2015) melakukan studi *Growth Diagnostic* untuk 24 provinsi di Indonesia dengan memadukan analisis *decision tree* dan model CGE.²

Secara umum, hambatan utama di hampir seluruh wilayah Indonesia bersumber dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas dan reliabilitas listrik. Terkait sumber daya manusia, rata-rata lama sekolah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan KTI masing-masing adalah 8.6, 8.1, 8.1, dan 7.9 tahun, atau secara nasional masih di bawah 9 tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena Indonesia

membutuhkan banyak tenaga kerja teknis berpendidikan tinggi untuk bertransisi menjadi negara maju, khususnya dalam memperkuat struktur ekonomi pada sektor industri terkait teknologi menengah dan tinggi. Bagi kawasan luar Jawa, ketersediaan tenaga kerja ahli juga dibutuhkan untuk memperkuat diversifikasi sektor ekonomi bernilai tambah tinggi. Selama ini, fenomena kekurangan tenaga kerja ahli di kawasan luar Jawa dapat dilihat dari banyaknya penggunaan tenaga kerja dari wilayah lain. Lebih jauh, hasil analisis di beberapa provinsi juga menunjukkan bahwa umumnya tenaga kerja dengan pendidikan rendah berada di daerah pedesaan, dengan aktivitas utama di sektor pertanian. Kualitas tenaga kerja yang rendah di sektor pertanian tersebut dapat menghambat proses peningkatan produktivitas pertanian terutama untuk mencapai swasembada pangan. Tidak tercapainya swasembada atau berkurangnya pasokan pangan akan menyebabkan kenaikan harga pangan relatif terhadap barang industri. Tingginya harga bahan makanan sebagai kebutuhan pokok akan meningkatkan biaya hidup di kota, yang kemudian berujung pada tekanan kenaikan upah oleh pekerja industri. Hal ini pada akhirnya akan menghambat penyerapan tenaga kerja dan memengaruhi laju transformasi Indonesia menjadi negara industri. Kemudian, hasil simulasi kebijakan menggunakan model CGE-IndoTERM mengkonfirmasi identifikasi hambatan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil simulasi, peningkatan produktivitas melalui akselerasi pembangunan modal manusia berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh nusantara, khususnya dalam memperkuat sektor manufaktur unggulan di masing-masing wilayah (Grafik 2). Secara nasional, program kebijakan pembangunan modal manusia berpotensi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25% per tahun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,50% per tahun (deviasi dari skenario *baseline* tanpa kebijakan).³

Terkait listrik, kebutuhan rumah tangga untuk kawasan Jawa relatif tercukupi, namun populasi industri yang besar mendorong kebutuhan energi yang besar pula, sehingga kapasitas listrik masih perlu ditingkatkan. Sementara untuk kawasan luar Jawa, kekurangan energi listrik dirasakan oleh dunia usaha maupun rumah tangga. Selain itu, masih banyaknya jumlah perusahaan yang berusaha menyediakan pasokan listrik sendiri, menggambarkan bahwa kehandalan listrik juga masih

1 IndoTERM adalah model CGE antardaerah multisektor yang bersifat *bottom-up*, dibangun oleh kolaborasi dari beberapa institusi yaitu Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran Indonesia; Center for Policy Studies, Victoria University Australia; Asian Development Bank; AusAID; dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2 24 provinsi yang menjadi objek kajian *Growth Diagnostic* Bank Indonesia tahun 2015 adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

3 Selengkapnya lihat: Affandi dan Anugrah (2015) Strategi Pertumbuhan Indonesia: Pendekatan *Growth Diagnostic*.

Gambar 1. Pohon Keputusan *Growth Diagnostic*



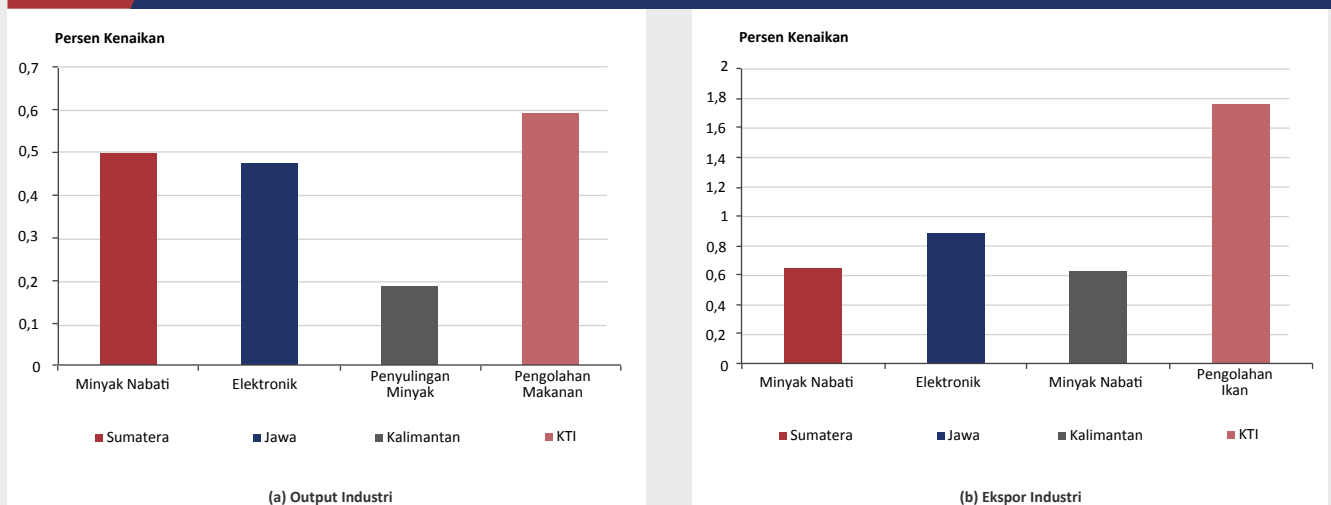
Sumber: Hausmann, Rodrik, dan Velasco (2005)

belum memadai. Berdasarkan hasil *World Bank Enterprise Survey* (2009), tingkat kerugian akibat pemadaman listrik di Indonesia dapat mencapai 1,6% nilai produksi. Hasil simulasi kebijakan menggunakan model CGE-IndoTERM juga mengkonfirmasi pentingnya pembangunan listrik. Berdasarkan hasil simulasi, kebijakan pembangunan kapasitas listrik berpotensi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,25% pertahun dan penyerapan tenaga kerja 0,13% pertahun (deviasi dari skenario *baseline* tanpa kebijakan). Pembangunan listrik juga berpotensi mendorong peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan peluang bagi masing-masing wilayah Indonesia untuk mengembangkan

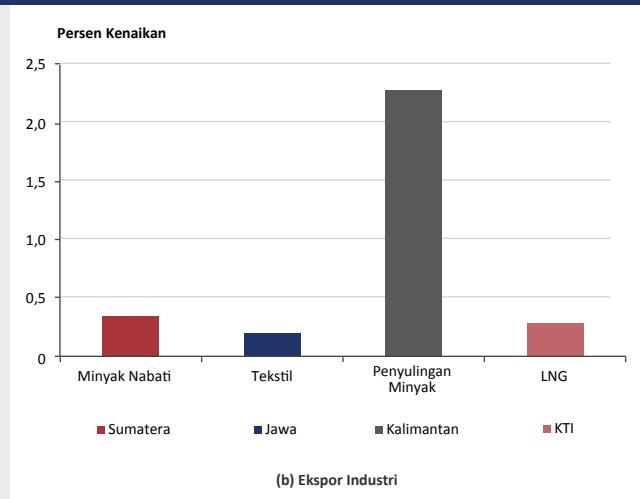
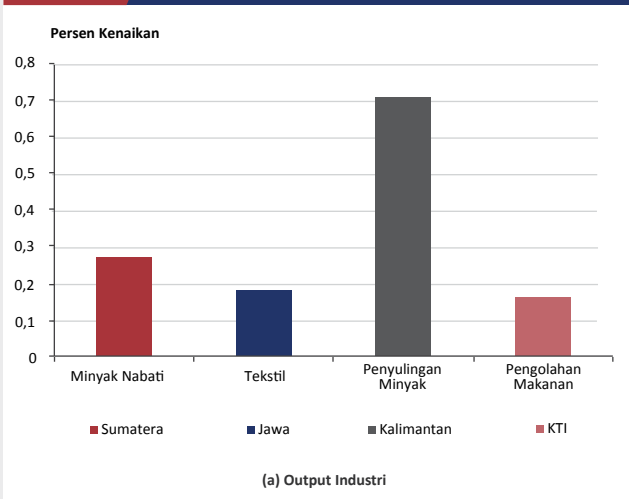
industri unggulannya (Grafik 3). Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan infrastruktur listrik sangat dibutuhkan bagi dunia usaha, baik dalam melakukan ekspansi, maupun meningkatkan produktivitas dari potensi kerugian yang dihadapi saat ini.

Selain modal manusia dan infrastruktur energi, konektivitas juga merupakan hambatan utama bagi banyak wilayah di Indonesia. Hambatan tersebut khususnya bersumber dari kapasitas dan kualitas pelabuhan, jalan dan bandara. Perbandingan waktu bongkar muat (*dwelling time*), waktu perputaran (*turnaround time*), dan kapasitas pelabuhan menggambarkan bahwa

Grafik 2. Dampak Pembangunan SDM di 4 Wilayah Indonesia (Industri yang mengalami kenaikan terbesar di masing-masing wilayah)



Grafik 3. Dampak Pembangunan Listrik di 4 Wilayah Indonesia (Industri yang mengalami kenaikan terbesar di masing-masing wilayah)



efisiensi pelabuhan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara pesaing di ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Sementara terkait jalan, masih banyak industri yang merasa tingkat kerusakan cukup tinggi dan menghadapi banyak pungutan liar, termasuk di kawasan Jawa yang memiliki infrastruktur relatif lebih baik. Selain

itu, beberapa provinsi di Indonesia juga menghadapi hambatan lain yang cukup bervariasi, seperti masalah birokrasi dan keamanan. Permasalahan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, baik infrastruktur konektivitas (jalan, pelabuhan, dan rel kereta api) maupun infrastruktur energi listrik.



Keterangan gambar:

Masa depan senantiasa diwarnai dengan ketidakpastian. Namun demikian, masa depan juga menjanjikan harapan bagi mereka yang berusaha. Perekonomian Indonesia memiliki potensi untuk bertumbuh lebih tinggi dan memiliki fondasi yang lebih kokoh.



Bab 16

Prospek Perekonomian

Prospek ekonomi ke depan diperkirakan tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari komitmen untuk mempercepat pelaksanaan reformasi struktural secara berkelanjutan, konsisten, dan tersinergi antarsektor. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bertumpu pada permintaan domestik yang ditopang oleh investasi dari proyek infrastruktur. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi akan meningkat sejalan dengan dampak proyek infrastruktur terhadap peningkatan kapasitas perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan ke depan akan tetap terjaga.

Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang terbatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diperkirakan tetap berada dalam tren meningkat sejalan dengan implementasi reformasi struktural. Secara keseluruhan prospek perekonomian global diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya walaupun masih terbatas. Perekonomian dunia diperkirakan akan mulai menunjukkan perbaikan terutama dari negara maju, khususnya ekonomi Amerika Serikat. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok diperkirakan masih akan mengalami perlambatan yang berdampak pada masih tertahannya pertumbuhan harga komoditas. Dengan prospek perekonomian global tersebut, laju perekonomian Indonesia ke depan juga sangat ditentukan oleh implementasi reformasi struktural yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia memprakirakan prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2016 akan meningkat dengan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2-5,6% dan laju inflasi yang terkendali menuju sasaran yang ditetapkan sebesar $4\pm 1\%$. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pertumbuhan kredit diperkirakan sebesar 12-14%. Adapun defisit transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 sejalan dengan intensifnya proyek-proyek infrastruktur, namun tetap pada level yang aman, yakni di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap meningkat dan lebih berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan dapat mencapai 6,3-6,8%. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil ditunjang oleh bertambahnya porsi kelas menengah dan perluasan perlindungan sosial. Investasi tumbuh meningkat sejalan dengan terealisasinya proyek-proyek infrastruktur dan perbaikan iklim usaha. Kualitas pengeluaran pemerintah akan meningkat dengan belanja modal yang lebih intensif sejalan dengan penurunan pangsa untuk keperluan subsidi. Selain itu, alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBN akan semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya guna mencapai pembangunan yang lebih merata diseluruh daerah. Implementasi program reformasi struktural akan menentukan kapasitas dan kapabilitas sisi produksi untuk memungkinkan perekonomian tumbuh lebih kuat, berkelanjutan dan inklusif.

16.1. PROSPEK PEREKONOMIAN JANGKA PENDEK

Prospek Perekonomian Global

Kinerja perekonomian global akan membaik meskipun terbatas. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 3,4% dengan ditopang oleh perbaikan ekonomi AS yang terus berlangsung. Perbaikan ekonomi AS didukung oleh konsumsi yang meningkat seiring dengan peningkatan kinerja sektor tenaga kerja dan masih rendahnya harga minyak. Meski cenderung solid, namun dengan mempertimbangkan beberapa risiko yang masih membayangi perekonomian AS, normalisasi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) pada tahun 2016 diperkirakan akan gradual. Sementara itu, perbaikan ekonomi di Eropa mulai terlihat pada sisi permintaan yang didukung dengan kebijakan moneter yang akomodatif. Perbaikan terutama didorong oleh peningkatan konsumsi dan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, masih berlanjutnya langkah kebijakan *Quantitative Easing* (QE) dari Bank Sentral Eropa diperkirakan dapat mengurangi sebagian dari pengaruh kebijakan the Fed terhadap pergerakan arus modal global ke *emerging markets*. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok diperkirakan melambat seiring proses *rebalancing* yang masih berlangsung. Sejalan dengan pola pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan masih belum merata, volume perdagangan dunia diperkirakan hanya tumbuh moderat pada tahun 2016.

Pertumbuhan harga komoditas global diperkirakan masih berada pada level yang negatif. Penurunan harga komoditas mengindikasikan telah berakhirnya era *super-cycle* harga komoditas global yang disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang terutama Tiongkok yang selama ini menjadi pembeli utama komoditas global. Selain itu, harga minyak dunia masih akan berada pada level yang rendah seiring dengan pemulihan ekonomi dunia yang terbatas serta masih melimpahnya pasokan minyak dunia.

Prospek Perekonomian Domestik

Prospek PDB Permintaan

Permintaan domestik masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Permintaan domestik diperkirakan dapat membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,6% di tengah terbatasnya pemulihan kondisi eksternal. Secara keseluruhan,

konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,0-5,4% pada tahun 2016 (Tabel 16.1). Percepatan reformasi struktural melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah kesempatan kerja. Kenaikan upah buruh dan pembayaran gaji ke 14 untuk PNS, TNI/POLRI dan pensiunan turut mendorong pertumbuhan pendapatan. Selain dari sisi penghasilan, terjaganya daya beli masyarakat juga didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga pada kisaran target $4\pm 1\%$.

Tabel 16.1. Proyeksi PDB Sisi Permintaan

Variabel	Realisasi 2015	Proyeksi 2016
Pertumbuhan PDB (% yoy)	4,8	5,2-5,6
Konsumsi Rumah Tangga*	4,8	5,0-5,4
Konsumsi Pemerintah	5,4	6,4-6,8
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,1	7,2-7,6
Ekspor Barang dan Jasa	-2,0	-5,5 - (-5,1)
Impor Barang dan Jasa	-5,8	-5,1 - (-4,7)

Sumber : BPS (diolah)
 * Penggabungan 2 Jenis Pengeluaran : (i) Konsumsi Rumah Tangga; (ii) Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga

Investasi tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan investasi pada tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai 7,2-7,6%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Investasi bangunan masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan investasi ke depan. Hal ini terutama didasari oleh semakin membaiknya implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dengan memperbesar alokasi belanja yang

produktif. Alokasi belanja produktif akan difokuskan pada peningkatan modal dasar pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Pertumbuhan investasi swasta juga diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan mulai kuatnya permintaan domestik dan perkiraan mulai meningkatnya permintaan eksternal untuk produk ekspor Indonesia. Peningkatan peran swasta juga ditopang oleh kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih akomodatif.

Pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Untuk mempercepat realisasi rencana pemerintah, 225 proyek yang sudah memiliki *pre-feasibility study* dan bernilai di atas Rp100 miliar sudah ditetapkan pemerintah sebagai PSN (Diagram 16.1). Dari 225 proyek tersebut, Pemerintah menugaskan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) untuk mempercepat pembangunan 30 proyek infrastruktur yang sebagian besar berpotensi untuk didanai melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Dari 30 proyek prioritas telah terdapat 13 proyek yang telah melalui tahap tender dan beberapa proyek telah masuk dalam tahap konstruksi (Diagram 16.2). Untuk mendukung keberhasilan implementasi PSN, Pemerintah mengeluarkan Perpres No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memberikan fasilitas dan kemudahan terkait dengan perizinan, pengadaan, penyediaan lahan, serta jaminan dari Pemerintah. Untuk infrastruktur ketenagalistrikan, diberikan fasilitas tambahan selain yang telah tertera dalam perpres PSN, yang tertuang dalam Perpres No.4 tahun 2016, untuk mempermudah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Perpres ini mengatur mengenai

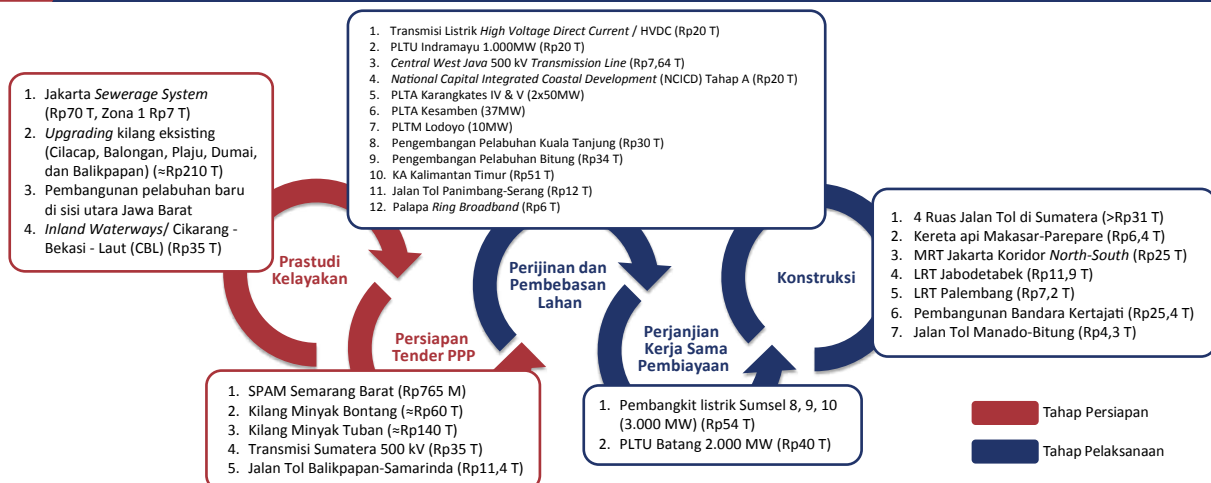
Diagram 16.1. Proyek Strategis Nasional



	Jalan	Rel Kereta	Bandara	Pelabuhan	Perumahan	Energi	Listrik
PSN	52	19	17	13	3	7	402
Proyek Prioritas	4	5	1	4	-	3	9
	SPAM	Bendungan	Pertanian dan Perikanan	PLBN	ICT	KEK	
PSN	10	60	3	7	3	25	
Proyek Prioritas	3	-	-	-	1	-	

Sumber: KPPPIP

Diagram 16.2. Perkembangan Proyek Prioritas



kepastian wewenang PLN sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, bantuan pendanaan dari Kementerian Keuangan, BUMN, dan ESDM, perlindungan hukum, serta keleluasaan PLN dalam mencari pendanaan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan disertai jaminan dari Pemerintah.

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekspor tahun 2016 diprakirakan masih tumbuh negatif. Kurang baiknya kinerja ekspor sejalan dengan perkiraan berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok, yang merupakan salah satu pasar utama ekspor Indonesia. Sejalan dengan itu, harga komoditas ekspor utama juga diperkirakan masih mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Walaupun beberapa negara tujuan ekspor utama Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan, namun tidak cukup untuk mengimbangi penurunan permintaan barang ekspor Indonesia secara keseluruhan. Ekspor riil Indonesia tahun 2016 diprakirakan tumbuh sekitar -5,5 – (-5,1%).

Pertumbuhan impor diperkirakan tidak berbeda signifikan dengan tahun sebelumnya. Dengan permintaan domestik yang meningkat di tengah ekspor yang masih mengalami pertumbuhan negatif, pertumbuhan impor tahun 2016 diperkirakan mencapai -5,1 – (-4,7%). Masih lemahnya impor, di tengah peningkatan investasi, disebabkan oleh sumber peningkatan investasi terbesar adalah investasi bangunan/infrastruktur. Mengingat bahwa elastisitas impor dari investasi bangunan/infrastruktur tidak sebesar elastisitas investasi mesin/peralatan, dampak dari kenaikan investasi terhadap impor relatif terbatas. Selain itu, kecenderungan penurunan impor bahan baku pada awal 2016 juga didorong oleh belum beroperasinya kegiatan manufaktur Indonesia pada kapasitas yang tinggi.

Prospek PDB Lapangan Usaha

Berdasarkan sisi produksi, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama sejalan dengan permintaan domestik yang membaik, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor konstruksi. Pada tahun 2016, ketiga sektor tersebut masih menjadi tumpuan perekonomian, terutama sektor konstruksi seiring dengan implementasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Sektor industri pengolahan diprakirakan tumbuh mencapai 4,8 – 5,2% pada tahun 2016 sejalan dengan mulai pulihnya permintaan domestik (Tabel 16.2). Relatif terbatasnya pertumbuhan di sektor ini sejalan dengan prospek harga komoditas global yang masih rendah sehingga berpotensi menjadi disinsentif bagi eksportir barang industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Di sisi lain, pertumbuhan sektor ini turut didukung oleh subsektor industri barang dari logam yang terkait dengan investasi pemerintah di bidang infrastruktur.

Sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tetap melanjutkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor ini diperkirakan dapat tumbuh sebesar 9,2-9,6% pada tahun 2016. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perkiraan realisasi proyek-proyek pengembangan terminal, pelabuhan, bandara, serta penyediaan moda-moda transportasi oleh pemerintah sebagai bagian dari rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah. Dalam konteks ini, Pemerintah antara lain akan melakukan pengadaan sekitar 1.050 *Bus Rapid Transit* (BRT) untuk 32 provinsi, pembangunan 10 unit kapal perintis, pengadaan 3 unit kapal ferry lintas Merak-Bakauheni, pengembangan 34 bandara besar dan kecil di 17 provinsi, dan pengembangan 40 pelabuhan di 14 provinsi. Pada akhir tahun 2016, terminal 3 *Ultimate* Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan

Tabel 16.2.

Proyeksi PDB Sisi Lapangan Usaha

Variabel	Realisasi	Proyeksi
	2015	2016
Pertumbuhan PDB (% yoy)	4,8	5,2-5,6
Pertanian	4,0	3,4-3,8
Pertambangan dan Penggalian	-5,1	-6,6 - (-6,2)
Industri Pengolahan	4,2	4,8-5,2
Listrik, Gas, dan Air Bersih*	1,6	3,3-3,7
Bangunan	6,6	8,7-9,1
Perdagangan, Hotel, dan Restoran**	2,8	4,1-4,5
Pengangkutan dan Komunikasi***	8,5	9,2-9,6
Kuangan, Persewaan, dan Jasa****	7,0	8,8-9,2
Jasa-jasa*****	6,5	7,0-7,4

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Indonesia

* Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas; (ii) Pengadaan air

** Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; (ii) Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum

*** Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan; (ii) Informasi dan Komunikasi

**** Penggabungan 3 lap. usaha: (i) Jasa Keuangan; (ii) Real Estate; (iii) Jasa Perusahaan

***** Penggabungan 4 lap. usaha: (i) Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; (ii) Jasa Pendidikan; (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya; (iv) Jasa Lainnya.

sudah mulai beroperasi. Proyek ini akan mendorong meningkatnya daya angkut transportasi udara sekaligus stimulus untuk moda transportasi lainnya. Sementara itu, sejalan dengan strategi penguatan konektivitas nasional, Pemerintah juga akan mengembangkan sistem angkutan massal, termasuk angkutan massal cepat berbasis rel dan pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan.

Meningkatnya kebutuhan di bidang data dan komunikasi akan mendorong pertumbuhan subsektor komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan ekspansi kelas menengah yang terus berlanjut, kebutuhan akan jaringan komunikasi membuat kebutuhan terhadap data dan *traffic* komunikasi akan terus bertambah. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan *broadband* di Indonesia melalui peninjakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah sulit terjangkau. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi yang baru, yaitu 4G, dengan kecepatan *download* dan *upload* yang besar diperkirakan akan mendorong penggunaan data yang semakin besar di Indonesia. Akselerasi pembangunan infrastruktur di bidang *Information and Communication Technology* (ICT) akan meningkatkan perkembangan ekonomi digital di tanah air. Perkembangan ekonomi digital ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi ke depan (lihat Boks 16.1).

Sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh menguat menjadi 8,7-9,1% pada tahun 2016. Perkembangan sektor ini terutama ditopang oleh semakin terakselerasinya proyek-proyek infrastruktur setelah diterbitkannya

Perpres No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Setelah sempat tertunda pada tahun 2015 karena proses konsolidasi di pemerintahan, Pemerintah pada tahun 2016 semakin meningkatkan dan mempercepat berbagai proses tender dan pengadaan serta memulai konstruksi proyek-proyek yang tersebar di delapan sektor. Sektor-sektor tersebut ialah sektor perhubungan udara, telekomunikasi dan informatika, perhubungan laut, perkeretaapian, ketenagalistrikan dan energi, perhubungan darat dan jalan, perumahan pemukiman dan cipta karya, serta sumber daya air. Sementara itu, beberapa proyek yang telah dimulai antara lain termasuk pembangunan Terminal 3 *Ultimate* Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan bandara Kertajati Majalengka, pengembangan bandara Ahmad Yani Semarang, pembangunan terminal Kalibaru Priok, pembangunan terminal *multi purpose* Teluk Lamong, pembangunan tol Trans Jawa (Cikampek-Palimanan, Bawen-Salatiga, dan Solo-Ngawi-Kertosono), serta pembangunan tol Trans Sumatera (Bakauheni-Tegineneng, Pekanbaru-Dumai, dan Kayuagung-Betung).

Prospek PDB Regional

Prospek perekonomian di berbagai daerah pada tahun 2016 secara agregat lebih baik dibanding tahun 2015, terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perekonomian Jawa diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,6–6,0%, didorong oleh meningkatnya kinerja investasi yang bersumber dari ekspansi pembangunan infrastruktur pemerintah, baik infrastruktur pertanian (waduk, embung, dan jaringan irigasi) maupun infrastruktur pendukung konektivitas (jalan, jalur rel kereta, pelabuhan, maupun bandara). Di samping itu, berlanjutnya perbaikan konsumsi dan ekspor manufaktur turut mendorong peningkatan ekonomi Jawa seiring dengan membaiknya ekspektasi pendapatan masyarakat dan permintaan dari negara tujuan ekspor produk manufaktur. Sementara itu, perekonomian Sumatera diperkirakan tumbuh di kisaran 4,2-4,7%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera juga diperkirakan terkait dengan realisasi proyek infrastruktur berskala besar seperti pembangunan jalan Trans Sumatera, pembangkit listrik, dan sarana penunjang kegiatan Asian Games 2018. Perekonomian Kalimantan pada 2016 diperkirakan tumbuh membaik meskipun masih berada pada kisaran yang rendah yakni 2,1-2,5%. Membaiknya perekonomian Kalimantan ditopang oleh peningkatan kinerja industri pengolahan seiring dengan berlanjutnya upaya hilirisasi di beberapa daerah (*smelter* dan industri turunan CPO), disamping perbaikan kinerja pertanian dan pertambangan. Namun, perbaikan ekonomi Kalimantan diperkirakan tertahan oleh prospek

harga komoditas pertambangan yang masih rendah. Di sisi lain, perekonomian KTI pada 2016 diperkirakan tumbuh di kisaran 7,1-7,5%, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 karena masih terbatasnya kinerja ekspor pertambangan dan investasi swasta.

Prospek Inflasi

Inflasi tahun 2016 diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi sebesar $4\pm 1\%$. Tekanan inflasi inti tahun 2016 diperkirakan moderat dan tetap terkendali. Dari sisi eksternal, faktor yang memengaruhi inflasi inti relatif terjaga dengan mempertimbangkan terjaganya volatilitas nilai tukar dan masih rendahnya harga komoditas nonmigas internasional. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat direspons sisi penawaran tanpa menyebabkan tekanan ke inflasi yang signifikan. Ekspektasi inflasi diperkirakan masih tetap terjaga sejalan dengan dukungan kebijakan dan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan relatif moderat.

Inflasi dari kelompok *volatile food* pada tahun 2016 diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Inflasi *volatile food* yang meningkat tersebut terkait dengan permintaan domestik yang tetap kuat dan adanya potensi pergeseran musim tanam. Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) mengemukakan bahwa puncak paceklik padi yang biasanya setiap tahun terjadi pada Januari-Februari bisa menjadi lebih lama yaitu menjadi Januari-Maret pada awal 2016 akibat *El Nino*. Minimnya curah hujan pada Oktober 2015 menyebabkan petani, terutama petani tadah hujan, tidak bisa menanam. Dengan kondisi tersebut, panen pada bulan Februari 2016 akan lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya karena mundurnya musim tanam. Untuk meredam tekanan inflasi *volatile food* dalam periode mendatang, perlu adanya penguatan stok serta peningkatan produksi untuk menjaga pergerakan harga komoditas bahan makanan.

Inflasi kelompok *administered prices* (AP) 2016 secara rata-rata diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dengan skema penetapan harga energi yang lebih fleksibel mengikuti harga pasar dan asumsi harga minyak dunia pada tahun 2016 yang diperkirakan akan lebih rendah dari tahun sebelumnya, inflasi kelompok AP diperkirakan akan relatif rendah. Namun dengan mempertimbangkan masih berlanjutnya reformasi subsidi, tidak tertutup kemungkinan ke depan masih akan terdapat penyesuaian terhadap harga-harga komoditas yang diatur oleh

Pemerintah seperti tarif tenaga listrik dan harga gas LPG bersubsidi.

Prospek Neraca Pembayaran

Defisit neraca transaksi berjalan pada 2016 diperkirakan berada di bawah 3% PDB. Defisit transaksi berjalan tersebut terkait dengan peningkatan impor nonmigas yang didorong oleh aktivitas perekonomian domestik. Pada 2016, meskipun permintaan dunia mengalami peningkatan, berlanjutnya koreksi harga komoditas dan harga minyak dunia yang tetap rendah menyebabkan tertahannya peningkatan kinerja ekspor. Di sisi lain, impor barang nonmigas diperkirakan meningkat sejalan dengan pertumbuhan permintaan domestik terutama terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

Prospek harga minyak dunia yang menurun pada tahun 2016 diperkirakan berdampak negatif terhadap prospek ekspor migas. Penurunan harga minyak dunia ini berpotensi mengurangi investasi migas sehingga dapat memperburuk *lifting* migas yang sedang mengalami penurunan akibat usia sumur yang menua (*natural declining*). Kondisi ini akan menurunkan ekspor migas yang berdampak pada tertekannya neraca perdagangan migas. Dari sisi impor, volume impor minyak diperkirakan akan meningkat sejalan dengan penambahan konsumsi BBM namun dengan nilai yang menurun akibat perkiraan harga minyak dunia yang rendah. Secara keseluruhan defisit neraca perdagangan migas diperkirakan sedikit menurun.

Neraca transaksi modal dan finansial (TMF) diperkirakan akan mengalami peningkatan surplus. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya arus masuk dana asing melalui investasi langsung dan berkurangnya defisit investasi lainnya. Peningkatan surplus investasi asing langsung tersebut sejalan dengan peningkatan perkiraan PMTB yang didukung oleh membaiknya fundamental ekonomi. Sementara itu, berkurangnya defisit investasi lainnya terutama disebabkan oleh penurunan penempatan simpanan sektor swasta di perbankan luar negeri. Di sisi lain, kenaikan FFR berdampak terhadap menurunnya aliran masuk modal nonresiden. Perbaikan surplus neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan mampu membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga *overall balance* NPI kembali mencatat surplus.

Prospek Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2016 diperkirakan tetap terkendali, ditopang oleh ketahanan perbankan

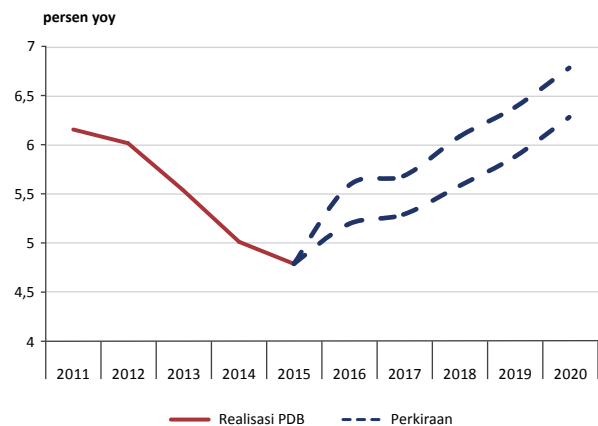
yang tetap terjaga dan kinerja pasar keuangan yang membaik. Rasio kecukupan modal diperkirakan masih tinggi, di atas ketentuan minimum 8%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah diperkirakan tetap rendah dan stabil. Likuiditas perbankan diperkirakan semakin membaik seiring dengan operasi keuangan pemerintah yang lebih ekspansif. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit diperkirakan akan meningkat sehingga mencapai, masing-masing, sebesar 13-15% dan 12-14%. Kisaran proyeksi pertumbuhan kredit tersebut masih konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia akan terus mendorong peran aktif perbankan dalam mendukung upaya pengelolaan ekonomi ke arah yang lebih sehat melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, pasar saham maupun SBN diperkirakan akan mencatatkan kinerja yang membaik sejalan dengan positifnya persepsi investor terhadap perbaikan fundamental dan prospek ekonomi Indonesia ke depan.

16.2. PROSPEK PEREKONOMIAN JANGKA MENENGAH

Dalam jangka menengah hingga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada dalam tren yang meningkat. Prakiraan ini didukung oleh membaiknya prospek perekonomian global yang disertai dengan dampak berbagai kebijakan struktural yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi jangka menengah akan dapat mencapai 6,3-6,8% pada tahun 2020 (Grafik 16.1). Dari sisi domestik, investasi tumbuh sejalan dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, iklim usaha yang membaik, reformasi birokrasi, dan FDI yang meningkat. Pengeluaran pemerintah yang lebih mengarah pada belanja modal dan penguatan efisiensi alokasi subsidi juga berkontribusi meningkatkan investasi. Implementasi berbagai program perbaikan struktural dan rangkaian paket kebijakan akan mendorong peningkatan produktivitas sehingga memperkuat sisi produksi yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan impor barang antara dan barang modal. Kondisi tersebut akan membuat volatilitas rupiah lebih terjaga dan mendukung tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil (Grafik 16.2).

Konsumsi rumah tangga dalam jangka menengah diperkirakan terus meningkat. Tren tersebut didukung oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif sehingga akan meningkatkan jumlah angkatan kerja sekaligus menurunkan rasio ketergantungan (Grafik 16.3). Selain itu, tren penurunan tingkat kemiskinan yang tetap

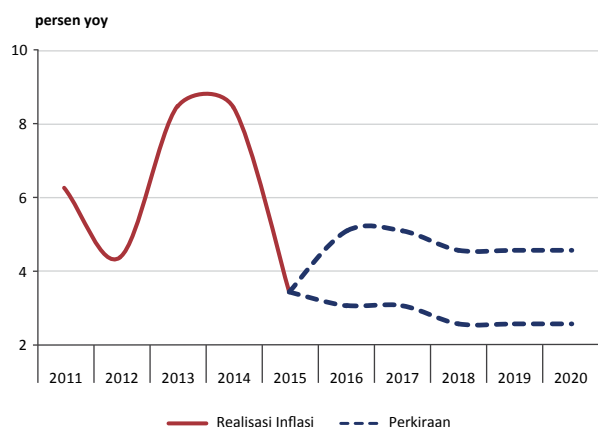
Grafik 16.1. Proyeksi PDB 2016-2020



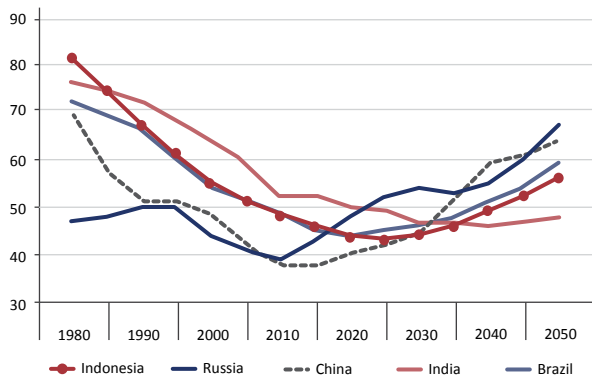
berlanjut dan meningkatnya jumlah kelas menengah akan meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Disamping itu, kontribusi ekspor yang diperkirakan membaik akan menambah daya beli masyarakat melalui penghasilan ekspor sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat ditopang oleh naiknya pendapatan pemerintah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan.

Pertumbuhan investasi dalam jangka menengah terkait erat dengan reformasi struktural yang sedang berlangsung. Perwujudan dari reformasi struktural yang sangat penting adalah pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan pemerintah. Berbagai infrastruktur yang saat ini sedang

Grafik 16.2. Proyeksi Inflasi 2016 – 2020



Grafik 16.3. *Dependency Ratio* Indonesia dan Beberapa Negara Kawasan

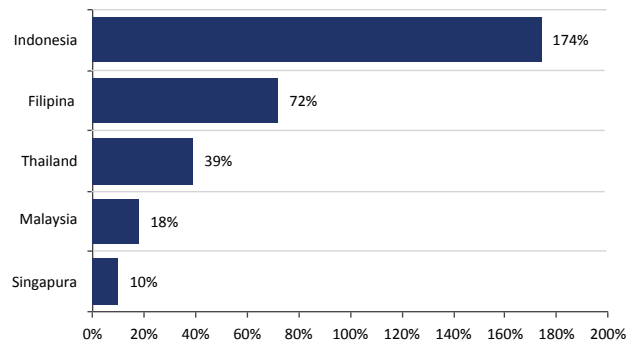


Sumber: UN-DESA, diolah

dibangun di berbagai kawasan Indonesia diperkirakan dapat menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah, khususnya di luar Jawa. Selain itu, reformasi struktural juga dilakukan melalui perbaikan iklim investasi yang diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi di Indonesia serta meningkatkan kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tercermin dari berbagai paket kebijakan pendukung perbaikan iklim investasi yang telah diterbitkan. Hasil survei dari beberapa institusi internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi yang mengindikasikan daya saing Indonesia yang terus membaik. Selain itu, pasar Indonesia yang besar dan terus tumbuh, khususnya kelas menengah, juga menjadi daya tarik untuk kegiatan investasi (Grafik 16.4). Untuk memenuhi semakin membesarnya jumlah dan ragam permintaan barang dan jasa baik untuk keperluan domestik maupun ekspor, investasi perlu tumbuh dengan proporsi yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi di sektor UMKM dan di luar Jawa berpotensi besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pertumbuhan ekspor diperkirakan akan membaik sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi mitra dagang yang membaik, harga komoditas yang tumbuh positif, serta peningkatan kemampuan untuk memproduksi barang ekspor yang lebih bervariasi, kontribusi ekspor dalam pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat. Walaupun beberapa negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti Tiongkok dan Eropa, diperkirakan memasuki tren pertumbuhan yang lebih rendah, beberapa negara dan kawasan tujuan utama ekspor Indonesia, seperti AS, Jepang, dan India, diperkirakan berada dalam

Grafik 16.4. *Pertumbuhan Kelas Menengah*



Sumber: AC Nielsen

tren pertumbuhan yang meningkat. Disamping itu, beroperasinya smelter, ekspor mineral, dan olahan bahan tambang diperkirakan berdampak positif terhadap ekspor terkait dengan nilai tambahnya yang lebih tinggi. Dengan langkah-langkah peningkatan daya saing, termasuk nilai tukar yang tetap kompetitif, inflasi yang terjaga, serta diversifikasi pasar dan produk, pertumbuhan ekspor dalam jangka menengah diperkirakan akan meningkat.

Impor diperkirakan meningkat sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi. Dengan perkiraan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi, pertumbuhan impor barang modal dalam bentuk mesin dan perlengkapan juga diperkirakan meningkat. Selain itu, kegiatan produksi yang semakin meningkat untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri akan mendorong permintaan impor bahan baku. Impor barang konsumsi diperkirakan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Tingkat inflasi dalam jangka menengah diperkirakan stabil dan terjaga di kisaran $3,5 \pm 1\%$ pada tahun 2020. Tekanan inflasi dari sisi eksternal cenderung moderat. Hal ini sejalan dengan perkiraan peningkatan harga komoditas internasional yang diperkirakan masih terbatas dalam jangka menengah dan volatilitas pergerakan nilai tukar yang rendah. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan dapat direspons oleh sisi penawaran yang membaik sejalan dengan dampak reformasi struktural terhadap meningkatnya kapasitas perekonomian. Dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan relatif minimal. Selain itu, ekspektasi inflasi akan tetap terjaga sejalan dengan melalui implementasi kebijakan moneter yang konsisten dengan target inflasi yang ditetapkan yang ditopang oleh penguatan koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Kinerja NPI dalam jangka menengah diperkirakan akan membaik dengan defisit transaksi berjalan yang sehat dan berada pada level yang berkelanjutan. Perbaikan tersebut terutama bersumber dari ekspor nonmigas yang diperkirakan semakin membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan kembali positifnya pertumbuhan harga komoditas nonmigas. Di sisi lain, peningkatan permintaan domestik dan ekspor serta pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal. Dari sisi migas, prospek harga minyak yang kembali meningkat secara gradual berdampak pada penerimaan ekspor minyak yang membaik. Namun demikian, peningkatan tersebut semakin terbatas didorong oleh penurunan produksi secara natural akibat usia sumur yang menua. Ekspor gas diperkirakan tetap naik sejalan dengan asumsi produksi gas yang meningkat, meskipun terdapat kewajiban pemenuhan kebutuhan migas untuk dalam negeri sebesar 25% dari produksi migas. Sementara itu, impor minyak diperkirakan terus meningkat seiring dengan penambahan kelas menengah yang mendorong peningkatan konsumsi BBM.

Neraca TMF diperkirakan semakin membaik dan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Fundamental perekonomian yang membaik, sebagai hasil dari implementasi kebijakan reformasi struktural pemerintah, berpeluang mendorong arus modal masuk, baik investasi langsung (FDI) maupun portofolio. Dengan meningkatnya arus masuk modal asing, peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan akan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, dengan kondisi defisit transaksi berjalan yang terkendali dan surplus pada neraca TMF, Neraca Pembayaran Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan mengalami surplus.

Faktor Risiko

Ke depan, masih terdapat beberapa faktor risiko yang dapat berdampak negatif pada prospek perekonomian. Dari sisi eksternal, masih terbatasnya dan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi global dapat menahan pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan, terutama dari sisi perdagangan. Dengan komposisi ekspor saat ini, pertumbuhan ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh permintaan dari negara berkembang, khususnya Tiongkok. Apabila pertumbuhan negara-negara tersebut melambat lebih dalam dari perkiraan, kinerja ekspor Indonesia dapat mencatat pertumbuhan yang lebih rendah. Pertumbuhan ekspor yang lebih rendah tersebut tidak hanya dari sisi volume, namun juga dari sisi nilai mengingat dinamika pertumbuhan ekonomi dunia juga memengaruhi harga komoditas internasional.

Harga komoditas internasional yang lebih rendah juga berpotensi mengakibatkan penurunan output potensial. Apabila struktur ekspor Indonesia di masa mendatang tetap didominasi sektor komoditas, terdapat risiko terbatasnya pertumbuhan output potensial Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan investasi yang melambat akibat prospek harga komoditas yang rendah. Dengan pertumbuhan output potensial yang terbatas, terdapat risiko peningkatan inflasi yang signifikan di saat pertumbuhan ekonomi meningkat.

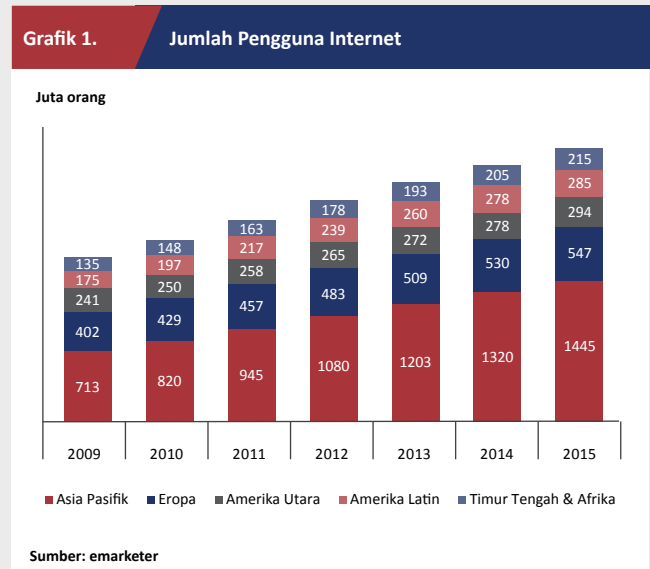
Dari pasar keuangan global, meskipun peningkatan FFR diperkirakan lebih gradual, masih terdapat risiko terkait ketidakpastian kebijakan normalisasi lanjutan. Di satu sisi, masih belum jelasnya konsistensi dari perbaikan ekonomi di AS mengisyaratkan bahwa kenaikan FFR akan bersifat gradual. Namun di sisi lain, ketidakpastian tersebut juga dapat meningkatkan persepsi risiko dari para investor. Risiko perilaku *risk on-risk off* investor tersebut pada gilirannya dapat memengaruhi volatilitas aliran modal. Dengan aliran modal asing yang berfluktuasi, tingkat volatilitas nilai tukar juga akan meningkat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan tertundanya investasi, meningkatnya inflasi domestik, serta dapat meningkatkan risiko pada *balance sheet* perusahaan.

Beberapa risiko juga terdapat pada implementasi kebijakan reformasi struktural. Implementasi reformasi struktural yang tidak sesuai dengan rancangan awal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) dapat berdampak pada pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pelaksanaan proyek infrastruktur khususnya yang membutuhkan banyak impor berpotensi menyebabkan semakin dalam defisit transaksi berjalan sejalan dengan masih terbatasnya kapasitas domestik. Hal ini pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Masih terkait dengan kinerja transaksi berjalan dan reformasi struktural, risiko hilirisasi di sektor pertambangan yang tidak berjalan optimal dapat memperlemah keseimbangan eksternal perekonomian akibat tidak terealisasinya potensi maksimal kontribusi ekspor produk-produk tambang yang sudah diolah. Apabila implementasi dari berbagai program dan kebijakan yang sudah dicanangkan tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan maka semakin besar risiko pertumbuhan ekonomi untuk tidak mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko tersebut, implementasi reformasi struktural menjadi kunci agar perekonomian dapat tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Ekonomi digital (*digital economy*) menjadi salah satu isu yang hangat akhir-akhir ini, baik di Indonesia maupun dunia. Ekonomi digital sendiri didefinisikan sebagai “*the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange*” (Hartman, 2000). Konsep tentang ekonomi digital pada awalnya terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, infrastruktur pendukung, yang antara lain mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), telekomunikasi, jaringan, dan sebagainya. Kedua, *e-business*, yaitu bagaimana proses bisnis dilakukan; mencakup setiap proses yang organisasi lakukan dengan mediasi jaringan komputer. Ketiga, *e-commerce*, yaitu bagaimana proses transfer barang dan jasa juga dilakukan dengan mediasi jaringan komputer (Mesenbourg, 2001).

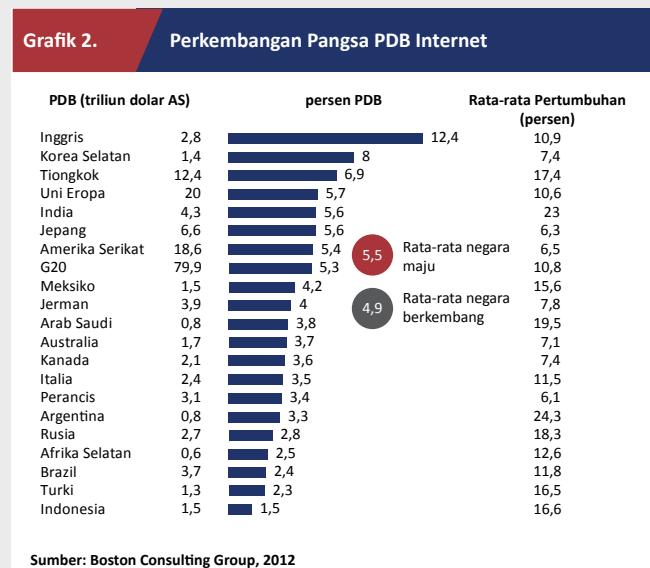
Seiring dengan perkembangannya yang sangat cepat, konsep tentang ekonomi digital sudah sedemikian bervariasi dan merambah banyak sektor dalam ekonomi. Implikasinya tidak hanya di bidang *Information and Communication Technology* (ICT), namun juga ke sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi, keuangan, dan kesehatan. Pada sektor retail, yang paling klasik adalah mengenai konsep *e-commerce*. Pada sektor transportasi, kemudian dikembangkan konsep *e-ticket* bahkan sampai pada *automated vehicles* pada moda-moda transportasi massal. Pada sektor pendidikanpun sudah mulai banyak diadopsi mengenai konsep *open online course* yang pada awalnya diinisiasi oleh University of Harvard dan MIT. Buku-buku dan jurnalpun saat ini banyak diperjualbelikan tidak hanya melalui jaringan internet, namun juga dalam bentuk elektronik (*soft file*). Pada sektor kesehatan konsep tentang ekonomi digital juga sudah sedemikian banyak diadopsi. Hal itu antara lain terlihat pada adanya *electronic record* ataupun diagnosa-diagnosa kedokteran yang disajikan dalam angka-angka dan grafik di layar monitor.

Perkembangan ekonomi digital di dunia sedemikian pesatnya yang tergambar pada beberapa indikator. Nilai investasi dalam bidang telekomunikasi cukup tinggi dan dalam tren yang masih terus meningkat. OECD (2015) mencatat bahwa nilai investasi bidang telekomunikasi di dunia sejak tahun 2000 mencapai rata-rata 200 miliar dolar AS per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, total sambungan telekomunikasi yang terdiri dari telepon analog, digital (ISDN dan DSL), modem, serat fiber, dan

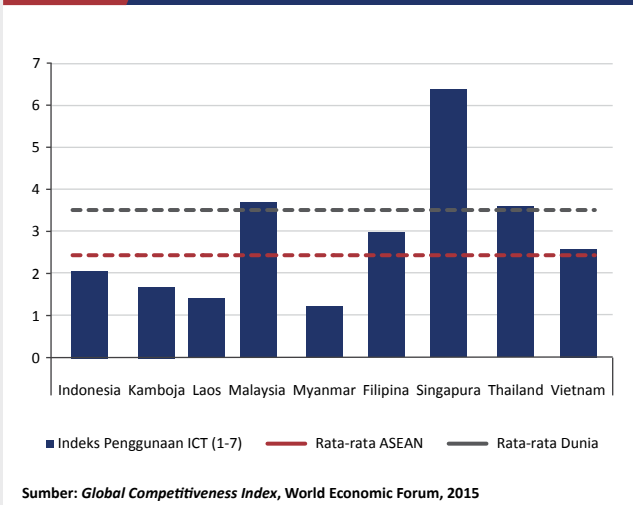


seluler mencapai sekitar 2,1 miliar sambungan pada 2013. Sambungan telepon analog tetap (*fixed*) menunjukkan penurunan sejak 2001, dimana hal ini menandakan bahwa preferensi masyarakat dunia terhadap telepon *mobile* semakin tinggi. Jumlah pengguna internet juga makin bertambah dan akan terus bertambah, terutama di Asia (Grafik 1). Ekonomi digital berbasis internet di 2016 diperkirakan mencapai 5,5% PDB di negara-negara maju G20 dan mencapai 4,9% PDB di negara berkembang G20 (Grafik 2).

Dalam konteks individual, negara-negara juga berlomba-lomba mengembangkan ekonomi digital. Sebagai contoh,



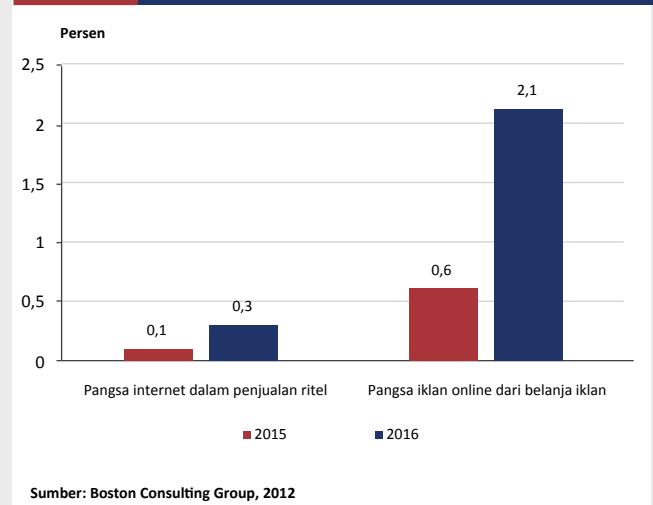
Grafik 3. Indeks Penggunaan ICT 2015



Tiongkok sudah meluncurkan *Five Year Plan for the Development of e-Commerce* pada tahun 2011. Dalam waktu tiga tahun, volume transaksi bisnis *e-commerce* Tiongkok sudah mencapai 10,1% dari total penjualan ritel. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital relatif tertinggal yang diindikasikan oleh relatif rendahnya indeks penggunaan ICT dibandingkan dengan rata-rata dunia dan ASEAN (Grafik 3). Namun demikian, percepatan proyek infrastruktur di bidang ICT diperkirakan mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia menjadi makin pesat sejalan dengan pasar yang cukup luas. Dampak dari penggunaan teknologi digital, khususnya internet diperkirakan meningkat dari 0,1% di 2010 menjadi 0,3% terhadap total penjualan di 2016. Pembelian dengan metode *Research Online Purchase Offline* (ROPO) yang berarti pembeli melakukan pemilihan barang lewat media *online* dan membelinya secara *offline* rata-rata sekitar 16 dollar AS per pengguna *online*. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas belanja *online*, pengeluaran untuk iklan *online* juga diperkirakan meningkat dari sekitar 0,6% dari total belanja iklan di 2010 menjadi 2,1% di 2016 (BCG, 2012).

Perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat ini didorong oleh dampak positif dari penerapannya. OECD (2014) menunjukkan industri yang bergerak di bidang teknologi informasi di negara OECD mempunyai produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan produktivitas keseluruhan perekonomian (Grafik 5). Hal ini menunjukkan penerapan teknologi digital akan meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Data OECD juga menunjukkan resiliensi pendapatan 250 perusahaan ICT *top players* pada saat diterpa krisis keuangan dunia. Pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut memang

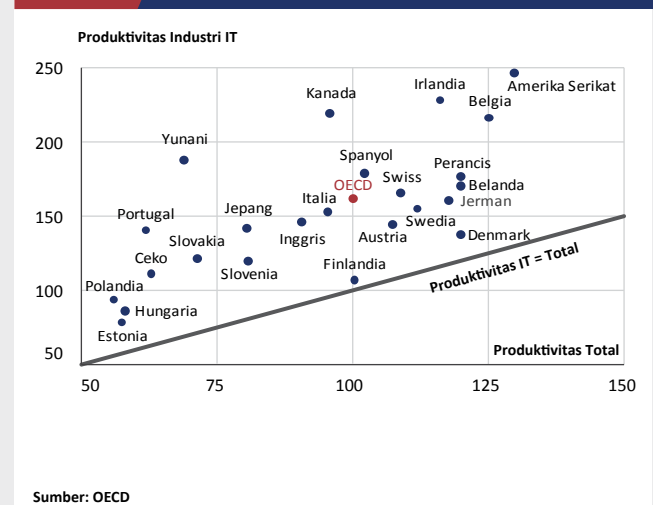
Grafik 4. Dampak e-Commerce di Indonesia



menurun, namun dengan cepat kembali meningkat. Kajian dari World Bank juga menunjukkan setiap penambahan 10 mobile telephone per 100 orang akan meningkatkan PDB sekitar 0,8% di negara-negara berkembang.

Disamping membuat perekonomian lebih efisien, penerapan ekonomi digital memberikan konsekuensi *the process of creative destruction* (Joseph Schumpeter) dimana teknologi berbisnis sebelumnya menjadi usang. Sebagai contoh perkembangan terkini di Indonesia adalah persaingan antara layanan transportasi konvensional dengan layanan yang memanfaatkan teknologi digital, demikian juga persaingan antara toko konvensional dengan toko daring. Dengan berbagai keunggulannya, teknologi digital secara perlahan akan menggantikan cara berbisnis konvensional. Dalam proses transisi ini, terdapat

Grafik 5. Produktivitas Sektor IT OECD



potensi adanya dampak negatif terhadap perekonomian. Di satu sisi, penerapan teknologi digital meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi sehingga pelanggan secara umum akan *better off*. Di sisi lain, cara berbisnis secara konvensional pada umumnya menyerap tenaga kerja lebih banyak. Penerapan teknologi digital berpotensi menggantikan bisnis konvensional sehingga dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini diperlukan kebijakan Pemerintah untuk memastikan perkembangan ekonomi digital berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan.

Dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital, Pemerintah menyiapkan *roadmap e-commerce*. Selain berdampak pada ekonomi, perkembangan ekonomi digital juga melahirkan berbagai tantangan diberbagai aspek seperti masalah keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen. Di tahun 2016, pemerintah akan menyusun peta jalan e-commerce dengan penekanan pada 7 isu strategis yaitu : (i) Logistik; (ii) Pendanaan; (iii) Perlindungan konsumen; (iv) Infrastruktur komunikasi; (v) Pajak; (vi) Pendidikan dan sumber daya manusia; dan (vii) *Cyber security*.

LAMPIRAN

No	Peraturan	Tanggal	Perihal
1	PBI No. 17/1/PBI/2015	30 Januari 2015	Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2014
2	PBI No. 17/2/PBI/2015	26 Maret 2015	Suku Bunga Penawaran Antarbank
3	PBI No. 17/3/PBI/2015	31 Maret 2015	Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4	PBI No. 17/4/PBI/2015	27 April 2015	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
5	PBI No. 17/5/PBI/2015	29 Mei 2015	Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
6	PBI No. 17/6/PBI/2015	29 Mei 2015	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
7	PBI No. 17/7/PBI/2015	29 Mei 2015	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
8	PBI No. 17/8/PBI/2015	29 Mei 2015	Pengaturan dan Pengawasan Moneter
9	PBI No. 17/9/PBI/2015	29 Mei 2015	Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
10	PBI No. 17/10/PBI/2015	18 Juni 2015	Rasio <i>Loan to Value</i> atau Rasio <i>Financing to Value</i> untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
11	PBI No. 17/11/PBI/2015	25 Juni 2015	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
12	PBI No. 17/12/PBI/2016	25 Juni 2015	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
13	PBI No. 17/13/PBI/2015	25 Agustus 2015	Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
14	PBI No. 17/14/PBI/2015	25 Agustus 2015	Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
15	PBI No. 17/15/PBI/2015	2 Oktober 2015	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
16	PBI No. 17/16/PBI/2015	2 Oktober 2015	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
17	PBI No. 17/17/PBI/2015	10 November 2015	Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing
18	PBI No. 17/18/PBI/2015	12 November 2015	Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
19	PBI No. 17/19/PBI/2015	12 November 2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang Dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
20	PBI No. 17/20/PBI/2015	12 November 2015	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter
21	PBI No. 17/21/PBI/2015	26 November 2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional
22	PBI No. 17/22/PBI/2016	23 Desember 2015	Kewajiban Pembentukan <i>Countercyclical Buffer</i>
23	PBI No. 17/23/PBI/2015	23 Desember 2015	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
24	PBI No. 17/24/PBI/2015	30 Desember 2015	Rekening Giro di Bank Indonesia

Berbagai Ketentuan dan Kebijakan Penting di Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2015

Tanggal	Keterangan	Nomor Peraturan
Januari		
6	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	PMK No. 1/PMK.03/2015
Februari		
13	Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	PMK No. 29/PMK.03/2015
19	Ketahanan Pangan dan Gizi	PP 17 Tahun 2015
24	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	PP 41 Tahun 2015
Maret		
6	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	PP 14 Tahun 2015
12	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	PP 15 Tahun 2015
26	Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016	PMK No. 102/PMK.07 Tahun 2015
April		
6	Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/Atau di Daerah-daerah Tertentu	PP 18 Tahun 2015
29	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	PP 22 Tahun 2015
Mei		
25	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.	PMK No. 65/PMK.02 Tahun 2015
25	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ PMK.04/ 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran.	PMK No. 103/PMK.04 Tahun 2015
28	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011	PMK No. 104/PMK.06 Tahun 2015
Juni		
8	Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah	PMK No. 106/PMK.010 Tahun 2015
8	Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain	PMK No. 107/PMK.010 Tahun 2015
23	Pembangunan Sumber Daya Industri	PP 41 Tahun 2015
Juli		
7	Klasifikasi Anggaran	PMK No. 127/PMK.02 Tahun 2015
27	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015	PMK No. 140/PMK.02 Tahun 2015
27	Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	PMK No. 143/PMK.02 Tahun 2015
30	Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat	PMK No. 146/PMK.05 Tahun 2015
Agustus		
4	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka	PP 56 Tahun 2015
4	Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	PP 57 Tahun 2015
September		
4	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha	PP 68 Tahun 2015

Tanggal	Keterangan	Nomor Peraturan
17 Oktober	Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai	PP 69 Tahun 2015
27 November	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02 /2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	PMK No. 196/PMK.02 Tahun 2015
9	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PP 79 Tahun 2015
9	Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	PP 81 Tahun 2015
20 Desember	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	PMK No. 206/PMK.010 Tahun 2015
22	Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>Multi Years Contract</i>) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan	PMK No. 238/PMK.02 Tahun 2015

Nomor	Judul
Tabel 1	Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Penggunaan
Tabel 2	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan)
Tabel 3	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku)
Tabel 4	Perkembangan Upah Minimum Provinsi per Bulan
Tabel 5	Indeks Harga Konsumen Indonesia
Tabel 6	Angka Inflasi di 82 Kota
Tabel 7	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Tabel 8	Neraca Pembayaran Indonesia
Tabel 9	Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 10	Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 11	Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (fob)
Tabel 12	Nilai Impor Menurut Kelompok Barang
Tabel 13	Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif)
Tabel 14	Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 15	Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (cif)
Tabel 16	Nilai Ekspor Minyak dan Gas (fob)
Tabel 17	Uang Beredar
Tabel 18	Perubahan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Tabel 19	Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Kelompok Bank
Tabel 20	Penerbitan, Pelunasan, dan Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Tabel 21	Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank
Tabel 22	Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas Melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
Tabel 23	Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Tabel 24	Inflasi Dunia
Tabel 25	Suku Bunga dan Nilai Tukar

Tabel 1.

Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Penggunaan ¹⁾

Miliar rupiah

Jenis Penggunaan	2011	2012	2013	2014*	2015**				
					I	II	III	IV	TOTAL
Harga Konstan									
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.977.289	4.195.788	4.423.417	4.651.480	1.188.729	1.202.797	1.245.314	1.245.418	4.882.259
a. Makanan dan Minuman selain Restoran	1.489.545	1.545.636	1.612.839	1.684.170	433.448	439.621	452.767	450.448	1.776.284
b. Pakaian	162.350	172.878	182.010	190.255	48.263	48.946	50.365	49.703	197.277
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	543.181	575.044	608.427	636.100	163.022	164.095	169.335	170.364	666.817
d. Kesehatan dan Pendidikan	268.834	284.509	300.791	319.311	81.635	83.627	86.732	86.997	338.991
e. Transportasi dan Komunikasi	953.674	1.018.099	1.085.322	1.148.242	291.433	295.065	307.404	307.267	1.201.170
f. Restoran dan Hotel	355.868	381.367	403.321	430.865	109.279	109.844	115.659	117.248	452.031
g. Lainnya	203.836	218.255	230.706	242.536	61.648	61.598	63.052	63.390	249.688
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	76.790	81.919	88.618	99.420	23.610	24.133	25.177	25.869	98.789
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	652.292	681.819	727.812	736.283	133.868	176.555	192.911	272.591	775.925
a. Konsumsi Kolektif	407.985	420.887	455.890	459.596	81.984	106.696	121.149	167.473	477.302
b. Konsumsi Individu	244.307	260.931	271.922	276.687	51.884	69.859	71.762	105.118	298.623
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.316.359	2.527.729	2.654.375	2.775.734	691.587	712.666	737.706	774.642	2.916.602
a. Bangunan	1.675.389	1.811.558	1.933.672	2.040.387	508.742	526.069	549.802	582.906	2.167.519
b. Mesin dan Perlengkapan	273.416	306.654	307.782	294.160	72.277	71.411	73.786	75.740	293.214
c. Kendaraan	143.012	171.259	161.592	147.968	35.759	35.844	39.098	38.116	148.817
d. Peralatan lainnya	34.348	35.908	37.472	40.294	10.160	10.817	11.522	12.013	44.513
e. <i>Cultivated Biological Resources (CBR)</i>	139.609	146.767	149.080	162.746	43.842	41.550	39.954	45.185	170.532
f. Produk Kekayaan Intelektual	50.585	55.583	64.776	90.179	20.807	26.975	23.544	20.681	92.006
5. a. Perubahan Inventori	118.207	174.183	124.454	156.720	55.061	57.015	58.385	(57.613)	112.848
b. Diskrepansi Statistik ¹⁾	1.252	30.882	57.576	88.875	33.687	31.133	338	(8.240)	56.918
6. Ekspor Barang dan Jasa	1.914.268	1.945.064	2.026.114	2.046.296	498.477	505.674	505.581	496.213	2.005.945
a. Barang	1.746.663	1.761.024	1.828.150	1.842.722	451.246	455.293	451.848	442.572	1.800.958
a.1. Nonmigas	1.442.177	1.479.142	1.584.709	1.607.801	389.863	393.836	384.535	373.726	1.541.959
a.2. Migas	304.486	281.882	243.441	234.921	61.383	61.457	67.314	68.846	258.999
b. Jasa	167.605	184.039	197.964	203.574	47.231	50.381	53.733	53.641	204.987
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.768.822	1.910.300	1.945.867	1.988.537	468.551	472.560	452.719	478.524	1.872.353
a. Barang	1.495.888	1.632.008	1.665.064	1.705.062	403.314	403.524	386.815	407.130	1.600.784
a.1. Nonmigas	1.203.515	1.326.281	1.338.229	1.378.479	326.607	321.856	305.248	326.707	1.280.418
a.2. Migas	292.373	305.727	326.835	326.583	76.707	81.668	81.567	80.423	320.365
b. Jasa	272.934	278.291	280.803	283.475	65.236	69.035	65.904	71.394	271.570
8. Produk Domestik Bruto	7.287.635	7.727.083	8.156.498	8.566.271	2.156.469	2.237.413	2.312.693	2.270.357	8.976.932
Harga Berlaku									
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.260.076	4.768.745	5.321.088	5.915.742	1.547.657	1.582.873	1.654.724	1.667.952	6.453.206
a. Makanan dan Minuman selain Restoran	1.638.644	1.854.629	2.049.782	2.248.519	590.744	606.533	630.764	637.249	2.465.290
b. Pakaian	175.860	187.041	203.088	222.284	57.733	58.987	61.443	60.709	238.872
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	569.629	637.060	705.522	780.828	210.222	212.962	220.872	223.505	867.561
d. Kesehatan dan Pendidikan	290.850	327.738	359.752	395.785	103.803	106.741	113.164	113.883	437.590
e. Transportasi dan Komunikasi	993.369	1.085.926	1.246.467	1.416.823	360.273	370.441	388.904	388.948	1.508.566

Tabel 1.

Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Penggunaan ¹⁾ - Lanjutan

Jenis Penggunaan	2011	2012	2013	2014*	2015**				
					I	II	III	IV	TOTAL
f. Restoran dan Hotel	385.156	443.100	499.346	565.281	147.813	149.359	158.557	161.445	617.173
g. Lainnya	206.569	233.251	257.131	286.222	77.069	77.849	81.021	82.213	318.153
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	80.530	89.586	103.929	124.242	30.673	31.790	33.588	34.885	130.936
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	709.451	796.848	908.574	996.197	180.350	253.906	292.930	398.356	1.125.542
a. Konsumsi Kolektif	444.289	492.963	568.131	622.774	110.529	153.664	183.831	245.283	693.307
b. Konsumsi Individu	265.162	303.885	340.443	373.423	69.821	100.242	109.100	153.073	432.235
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.451.914	2.819.026	3.051.496	3.442.027	896.207	933.377	970.381	1.030.013	3.829.978
a. Bangunan	1.791.932	2.053.896	2.242.780	2.569.122	673.690	699.422	732.171	780.795	2.886.078
b. Mesin dan Perlengkapan	280.002	329.147	343.132	350.149	86.778	89.449	94.004	97.381	367.612
c. Kendaraan	146.580	179.039	172.446	159.332	39.401	39.806	44.372	45.869	169.448
d. Peralatan lainnya	35.531	38.480	41.709	48.786	12.954	14.151	15.352	16.086	58.543
e. <i>Cultivated Biological Resources</i> (CBR)	145.934	159.227	177.280	204.747	57.522	56.328	54.459	63.187	231.497
f. Produk Kekayaan Intelektual	51.934	59.236	74.149	109.891	25.862	34.220	30.023	26.696	116.800
5. a. Perubahan Inventori	131.329	202.638	178.091	210.407	77.779	81.947	86.431	-87.403	158.754
b. Diskrepansi Statistik ¹⁾	4.616	-27.181	58.392	-39.387	-19.093	-22.240	-64.749	-79.963	-186.045
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.061.886	2.118.979	2.283.777	2.497.116	599.343	620.620	620.364	593.854	2.434.181
a. Barang	1.890.412	1.918.040	2.044.358	2.223.342	532.066	546.850	539.218	512.815	2.130.950
a.1. Nonmigas	1.528.932	1.572.451	1.703.499	1.869.262	459.445	491.075	478.483	455.598	1.884.601
a.2. Migas	361.481	345.589	340.859	354.080	72.621	55.775	60.735	57.217	246.349
b. Jasa	171.474	200.939	239.419	273.774	67.276	73.769	81.146	81.039	303.231
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.868.075	2.152.937	2.359.212	2.580.527	584.644	613.405	595.048	612.666	2.405.762
a. Barang	1.596.456	1.850.040	2.012.940	2.177.253	484.873	503.961	486.711	493.826	1.969.371
a.1. Nonmigas	1.230.538	1.439.293	1.523.386	1.652.354	405.478	410.610	398.068	421.036	1.635.191
a.2. Migas	365.918	410.747	489.554	524.899	79.395	93.351	88.643	72.790	334.180
b. Jasa	271.619	302.897	346.272	403.274	99.771	109.444	108.337	118.840	436.391
8. Produk Domestik Bruto	7.831.726	8.615.705	9.546.134	10.565.817	2.728.272	2.868.867	2.998.622	2.945.029	11.540.790

Catatan:

¹⁾ Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100

*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.

Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan) ¹⁾

Miliar rupiah

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**				
					I	II	III	IV	TOTAL
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	993.857	1.039.441	1.083.142	1.129.053	282.703	311.897	328.235	251.622	1.174.457
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	780.581	816.304	847.764	880.390	220.545	245.549	261.700	181.778	909.571
Tanaman pangan	250.787	263.076	268.268	268.427	82.730	78.064	78.027	38.952	277.773
Tanaman hortikultura	120.079	117.425	118.208	124.301	30.185	34.450	34.641	28.125	127.401
Tanaman perkebunan	281.465	301.020	319.533	338.502	69.862	94.734	109.353	76.541	350.490
Peternakan	113.603	119.250	125.302	132.221	33.319	33.695	34.739	34.559	136.313
Jasa pertanian dan perburuan	14.646	15.534	16.453	16.938	4.448	4.606	4.939	3.601	17.594
Kehutanan dan penebangan kayu	58.731	58.872	59.229	59.574	13.390	16.391	15.058	15.127	59.966
Perikanan	154.545	164.264	176.149	189.090	48.768	49.957	51.477	54.717	204.920
Pertambangan dan penggalian	748.956	771.562	791.054	796.712	190.253	186.558	189.930	189.499	756.239
Pertambangan minyak dan gas bumi	335.737	323.632	313.328	306.855	75.058	76.314	77.499	78.389	307.259
Pertambangan batu bara dan lignit	199.244	230.589	247.595	248.475	55.575	46.763	46.736	47.490	196.564
Pertambangan biji logam	95.414	91.615	98.609	98.318	21.471	24.597	24.516	24.507	95.092
Pertambangan dan penggalian lainnya	118.562	125.726	131.523	143.063	38.148	38.885	41.179	39.112	157.324
Industri pengolahan	1.607.452	1.697.787	1.771.962	1.853.688	468.061	484.535	488.892	490.970	1.932.457
Industri batubara dan pengilangan migas	233.052	227.456	221.450	216.182	52.043	52.097	53.761	54.474	212.375
Industri makanan dan minuman	400.004	441.342	459.283	502.856	126.979	138.564	138.510	136.721	540.774
Pengolahan tembakau	67.097	73.011	72.814	78.879	19.429	20.617	21.519	22.389	83.953
Industri tekstil dan pakaian jadi	102.561	108.754	115.913	117.723	28.395	28.335	27.774	27.575	112.079
Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	21.852	20.665	21.746	22.968	5.747	5.986	5.858	6.291	23.882
Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	55.231	54.787	58.181	61.743	15.338	15.263	14.801	15.208	60.609
Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	70.632	68.590	68.229	70.670	17.510	17.658	17.920	17.502	70.589
Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	124.231	140.102	147.249	153.192	41.905	40.579	41.478	40.503	164.464
Industri karet, barang dari karet dan plastik	68.153	73.307	71.946	72.777	18.291	19.750	19.434	18.977	76.452
Industri barang galian bukan logam	54.910	59.252	61.229	62.707	15.831	16.620	16.654	17.477	66.582
Industri logam dasar	61.860	60.889	67.972	72.059	18.687	19.301	19.107	19.633	76.729
Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	142.245	158.804	173.452	178.544	46.208	48.145	48.081	50.090	192.524
Industri mesin dan perlengkapan	25.795	25.437	24.164	26.260	6.417	6.868	7.468	7.474	28.227
Industri alat angkutan	142.815	148.905	171.166	178.023	45.276	44.248	46.138	46.515	182.176
Industri furnitur	22.062	21.589	22.375	23.180	5.947	6.275	6.131	5.985	24.338
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	14.954	14.897	14.794	15.926	4.059	4.230	4.259	4.157	16.705
Pengadaan listrik	76.678	84.393	88.805	93.756	22.721	23.728	23.526	24.920	94.895
Ketenagalistrikan	63.385	70.827	75.051	79.280	19.430	20.440	20.193	21.343	81.407
Pengadaan gas dan produksi es	13.294	13.567	13.754	14.476	3.291	3.288	3.333	3.577	13.488
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6.125	6.330	6.540	6.924	1.788	1.850	1.888	1.893	7.420

Tabel 2.

Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan)¹⁾ - Lanjutan

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**				
					I	II	III	IV	TOTAL
Konstruksi	683.422	728.226	772.720	826.616	206.755	213.247	223.650	237.932	881.584
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor	1.013.200	1.067.912	1.119.272	1.177.049	291.614	302.687	308.128	303.647	1.206.075
Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya	190.878	203.431	218.291	229.229	57.190	56.306	58.055	58.756	230.307
Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda	822.322	864.481	900.981	947.820	234.423	246.381	250.073	244.891	975.768
Transportasi dan pergudangan	265.774	284.663	304.506	326.933	82.907	85.848	89.347	90.674	348.776
Angkutan rel	2.298	2.202	2.337	2.823	683	719	764	784	2.950
Angkutan darat	145.019	155.852	167.560	180.367	46.719	47.304	49.434	49.801	193.257
Angkutan laut	23.542	25.601	27.372	29.474	7.028	7.474	7.691	7.980	30.174
Angkutan sungai, danau dan penyebrangan	8.813	9.057	9.469	10.118	2.462	2.477	2.646	2.637	10.222
Angkutan Udara	43.917	47.030	49.263	52.255	13.216	14.265	14.703	15.005	57.189
Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir	42.185	44.921	48.505	51.896	12.798	13.609	14.110	14.467	54.983
Penyediaan akomodasi dan makan minum	214.022	228.233	243.748	257.816	65.513	66.670	67.741	69.130	269.055
Penyediaan akomodasi	39.785	43.567	47.700	51.427	12.906	13.499	13.837	14.400	54.641
Penyediaan makan minum	174.237	184.665	196.049	206.389	52.608	53.171	53.904	54.731	214.414
Informasi dan komunikasi	281.694	316.279	349.150	384.407	102.000	104.193	107.514	109.357	423.064
Jasa keuangan	256.443	280.896	305.515	319.826	84.212	82.667	88.522	91.695	347.096
Jasa perantara keuangan	158.504	175.168	192.098	197.712	52.308	50.261	55.623	58.439	216.631
Asuransi dan dana pensiun	55.802	60.045	64.661	69.795	18.174	18.454	18.725	19.046	74.398
Jasa keuangan lainnya	35.860	38.868	41.372	44.465	11.683	11.888	12.101	12.130	47.801
Jasa penunjang keuangan	6.277	6.815	7.384	7.854	2.048	2.065	2.073	2.080	8.266
Real estate	213.441	229.254	244.238	256.440	66.142	66.853	67.661	68.155	268.811
Jasa perusahaan	108.239	116.293	125.491	137.795	36.062	36.703	37.491	38.139	148.396
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	276.337	282.235	289.449	296.330	74.361	74.777	76.471	84.785	310.394
Jasa pendidikan	215.029	232.704	250.016	263.890	65.421	69.616	70.901	77.602	283.540
Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	72.592	78.380	84.621	91.357	23.012	23.753	24.644	26.433	97.841
Jasa lainnya	109.372	115.675	123.083	134.070	35.139	35.842	36.597	37.324	144.902
Nilai tambah bruto pada harga dasar	7.142.634	7.560.263	7.953.312	8.352.660	2.098.663	2.171.425	2.231.136	2.193.777	8.695.000
Pajak kurang subsidi pada produk	145.001	166.821	203.186	213.612	57.806	65.988	81.557	76.580	281.931
PRODUK DOMESTIK BRUTO	7.287.635	7.727.083	8.156.498	8.566.271	2.156.469	2.237.413	2.312.693	2.270.357	8.976.932

Catatan:

¹⁾ Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100

*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.

Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku)

Miliar rupiah

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	2011	2012	2013	2014*	2015**
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	1.058.245	1.152.262	1.275.048	1.409.656	1.560.399
Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	832.514	902.126	994.778	1.089.550	1.186.521
Tanaman pangan	270.977	305.671	332.112	343.252	393.372
Tanaman hortikultura	125.286	125.108	137.369	160.569	175.165
Tanaman perkebunan	303.403	323.362	358.172	398.261	411.863
Peternakan	117.257	130.614	147.982	167.008	183.444
Jasa pertanian dan perburuan	15.591	17.372	19.143	20.460	22.677
Kehutanan dan penebangan kayu	62.248	65.882	69.599	74.618	81.743
Perikanan	163.484	184.254	210.671	245.488	292.136
Pertambangan dan penggalian	924.813	1.000.308	1.050.746	1.042.901	879.400
Pertambangan minyak dan gas bumi	444.068	492.894	520.088	508.911	382.681
Pertambangan batu bara dan lignit	253.026	270.519	282.193	257.236	198.882
Pertambangan biji logam	104.284	100.845	98.468	93.898	80.286
Pertambangan dan penggalian lainnya	123.436	136.050	149.996	182.856	217.551
Industri pengolahan	1.704.251	1.848.151	2.007.427	2.219.441	2.405.409
Industri batubara dan pengilangan migas	284.099	298.403	314.216	329.058	307.704
Industri makanan dan minuman	410.387	457.773	491.142	562.017	647.002
Pengolahan tembakau	71.735	79.340	82.684	95.668	108.860
Industri tekstil dan pakaian jadi	108.192	116.558	129.912	139.032	139.394
Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	22.045	21.687	24.810	28.600	31.445
Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	59.501	60.629	66.958	76.072	77.821
Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	75.308	73.665	74.319	84.373	87.801
Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	124.717	143.460	157.042	180.037	209.288
Industri karet, barang dari karet dan plastik	72.006	76.425	76.466	80.263	85.962
Industri barang galian bukan logam	55.606	63.028	69.401	76.852	83.492
Industri logam dasar	62.846	64.557	74.495	82.119	90.389
Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	142.059	162.970	186.195	198.081	226.662
Industri mesin dan perlengkapan	23.376	24.832	25.504	33.079	37.255
Industri alat angkutan	154.864	166.391	192.768	207.401	220.360
Industri furnitur	21.985	22.487	24.931	28.118	31.281
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	15.523	15.947	16.584	18.673	20.693
Pengadaan listrik	91.722	95.638	98.687	114.618	131.264
Ketenagalistrikan	72.816	73.350	74.358	83.842	102.083
Pengadaan gas dan produksi es	18.906	22.288	24.329	30.776	29.181
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6.209	6.604	7.209	7.887	8.606
Konstruksi	712.184	805.208	905.991	1.041.950	1.193.346
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor	1.066.092	1.138.484	1.261.146	1.420.054	1.534.067
Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya	208.944	228.667	258.942	292.839	312.069

Tabel 3.

Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku) - Lanjutan

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	2011	2012	2013	2014*	2015**
Pedagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda	857.148	909.818	1.002.203	1.127.215	1.221.998
Transportasi dan pergudangan	276.122	313.156	375.306	466.969	578.964
Angkutan rel	2.408	2.783	3.143	4.228	6.262
Angkutan darat	148.062	159.226	190.201	225.882	283.222
Angkutan laut	24.083	26.615	30.062	36.075	39.307
Angkutan sungai, danau dan penyebrangan	9.202	9.780	11.165	13.137	14.267
Angkutan udara	47.029	62.201	77.722	108.792	142.536
Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir	45.338	52.552	63.014	78.855	93.370
Penyediaan akomodasi dan makan minum	224.215	252.612	289.498	321.062	341.790
Penyediaan akomodasi	41.102	51.052	63.489	74.255	81.238
Penyediaan makan minum	183.113	201.560	226.009	246.807	260.553
Informasi dan komunikasi	281.778	311.362	341.009	369.415	406.888
Jasa keuangan	270.586	320.534	370.132	408.439	464.735
Jasa perantara keuangan	167.456	204.479	237.170	256.029	291.510
Asuransi dan dana pensiun	58.759	65.882	76.005	87.337	99.041
Jasa keuangan lainnya	37.761	42.688	48.279	55.245	63.180
Jasa penunjang keuangan	6.610	7.485	8.679	9.829	11.003
Real estate	218.797	237.914	264.275	294.573	329.797
Jasa perusahaan	113.975	127.724	144.604	165.991	190.268
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	304.756	340.568	372.195	404.630	450.733
Jasa pendidikan	232.727	270.372	307.862	342.063	388.683
Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	76.405	86.235	96.881	109.147	123.410
Jasa lainnya	113.022	122.566	140.316	163.549	190.580
PRODUK DOMESTIK BRUTO	7.831.726	8.615.705	9.546.134	10.565.817	11.540.790

¹⁾ Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100

*) Data sementara

***) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.

Perkembangan Upah Minimum Propinsi per Bulan

Rupiah

Propinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nangroe Aceh Darussalam	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.550.000	1.750.000
Sumatera Utara	905.000	965.000	1.035.500	1.200.000	1.305.000	1.505.850
Sumatera Barat	880.000	940.000	1.055.000	1.150.000	1.350.000	1.490.000
Riau	901.650	1.016.000	1.120.000	1.238.000	1.400.000	1.700.000
Kepulauan Riau	892.000	925.000	975.000	1.015.000	1.365.087	1.665.000
Jambi	800.000	900.000	1.028.000	1.142.000	1.300.000	1.502.300
Sumatera Selatan	824.730	927.825	1.048.440	1.195.220	1.630.000	1.825.000
Bangka Belitung	850.000	910.000	1.024.000	1.110.000	1.265.000	1.640.000
Bengkulu	727.950	780.000	815.000	930.000	1.200.000	1.350.000
Lampung	691.000	767.500	855.000	975.000	1.150.000	n.a.
Banten	917.500	955.300	1.000.000	1.042.000	1.170.000	1.325.000
DKI Jakarta	1.069.865	1.118.009	1.290.000	1.529.150	2.200.000	2.441.301
Jawa Barat	628.191	671.500	732.000	780.000	850.000 ¹⁾	n.a.
Jawa Tengah	575.000	660.000	675.000	720.000	830.000 ²⁾	n.a.
D.I. Yogyakarta	700.000	745.694	808.000	892.660	947,114 ³⁾	n.a.
Jawa Timur	570.000	630.000	705.000	745,000 ³⁾	866,250 ⁴⁾	n.a.
Bali	760.000	829.316	890.000	967.500	1.181.000	n.a.
Nusa Tenggara Barat	832.500	890.775	950.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
Nusa Tenggara Timur	725.000	800.000	850.000	925.000	1.010.000	n.a.
Kalimantan Barat	705.000	741.000	802.500	900.000	1.060.000	1.380.000
Kalimantan Tengah	873.089	986.500	1.134.580	1.327.459	1.553.127	1.723.970
Kalimantan Selatan	930.000	1.024.500	1.126.000	1.225.000	1.337.500	1.620.000
Kalimantan Timur	955.000	1.002.000	1.084.000	1.177.000	1.752.073	1.886.315
Sulawesi Utara	929.500	1.000.000	1.080.000	1.250.000	1.550.000	1.900.000
Sulawesi Tengah	720.000	777.500	827.500	885.000	995.000	1.250.000
Sulawesi Selatan	905.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.440.000	1.800.000
Sulawesi Tenggara	770.000	860.000	930.000	1.032.300	1.125.207	1.400.000
Sulawesi Barat	909.400	944.200	1.006.000	1.127.000	1.165.000	n.a.
Maluku	775.000	840.000	900.000	975.000	1.275.000	1.415.000
Maluku Utara	770.000	n.a.	889.350	960.498	1.200.622	n.a.
Gorontalo	675.000	710.000	762.500	837.500	1.175.000	1.325.000
Papua	1.216.100	1.316.500	1.403.000	1,515,000 ⁴⁾	1.710.000	1.900.000
Papua Barat	1.180.000	1.210.000	1.410.000	1.450.000	1.720.000	1.870.000

Keterangan:

- Sumber: Kemenakertrans, Direktorat Pengupahan & Jamsostek - Ditjen PHI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER-01/MEN/1999 tahun 1999, setiap awal tahun Upah Minimum Regional Tingkat I atau Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah masing-masing provinsi

¹⁾ Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur no.561/Kep.1405-Bangsos/2012, UMP Provinsi Jawa Barat mengacu kepada UMK Kab.Majalengka sebesar Rp 850.000,-

²⁾ Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah no.561.4/58/2012, UMP Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada UMK Kab.Wonogiri sebesar Rp 830.000,-

³⁾ SK Gubernur DIY No. 370/KEP/2012, UMP DIY Yogyakarta mengacu kepada UMK Kab. Gunungkidul sebesar Rp 974.114,-

⁴⁾ Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur no.72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012, mengacu kepada UMK Kab.Magetan sebesar Rp866.250,-

Tabel 5.

Indeks Harga Konsumen Indonesia

Akhir periode ¹⁾	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan Rekreasi & Olaharaga	Transportasi dan Komunikasi	Umum	Perubahan Indeks Umum
2001	290,74	278,75	208,57	277,90	262,99	224,12	221,47	249,15	12,55
2002	317,29	304,35	235,08	285,38	277,79	248,43	255,85	274,13	10,03
2003	311,84	323,35	256,74	305,60	293,54	277,52	266,34	287,99	5,06
2004 ²⁾	111,10	115,70	124,19	113,36	113,06	126,20	114,25	116,86	6,40
2005	126,55	131,56	141,50	121,21	119,99	136,60	165,38	136,86	17,11
2006	142,92	139,93	148,34	129,50	127,03	147,70	167,06	145,89	6,60
2007	159,01	148,90	155,58	140,41	132,51	160,74	169,15	155,50	6,59
2008 ³⁾	122,70	114,98	113,02	112,27	109,13	109,84	107,26	113,86	11,06
2009	127,46	123,96	115,09	119,01	113,38	114,11	103,32	117,03	0,33
2010	147,39	132,59	119,79	126,76	115,86	117,86	106,10	125,17	0,92
2011									3,79
Januari	150,64	133,24	120,37	126,95	116,41	118,36	106,43	126,29	0,89
Februari	150,14	133,86	120,85	126,85	117,21	118,51	106,59	126,46	0,13
Maret	147,22	134,29	121,20	127,33	117,65	118,71	106,68	126,05	-0,32
April	144,42	134,56	121,46	128,28	118,10	118,80	106,75	125,66	-0,31
Mei	144,01	134,86	121,76	129,10	118,69	118,83	106,90	125,81	0,12
Juni	145,84	135,41	122,13	129,84	119,18	119,04	107,06	126,50	0,55
Juli	148,52	135,98	122,36	130,65	119,50	120,20	107,24	127,35	0,67
Agustus	150,11	136,60	122,76	134,66	119,81	122,77	108,10	128,54	0,93
September	149,97	137,25	123,08	135,96	120,07	123,43	108,29	128,89	0,27
Oktober	149,45	137,61	123,33	134,25	120,38	123,80	107,85	128,74	-0,12
November	150,33	137,88	123,60	136,08	120,58	123,85	107,99	129,18	0,34
Desember	152,76	138,57	123,95	136,35	120,79	123,94	108,14	129,91	0,57
2012									4,30
Januari	155,59	139,47	124,62	136,24	121,40	124,12	108,39	130,90	0,76
Februari	154,45	139,95	124,96	137,90	121,58	124,22	108,46	130,96	0,05
Maret	153,94	140,59	125,21	138,11	121,77	124,31	108,57	131,05	0,07
April	154,13	141,46	125,51	137,48	122,05	124,39	108,80	131,32	0,21
Mei	153,90	142,03	125,74	137,18	122,27	124,41	108,88	131,41	0,07
Juni	156,32	142,71	126,19	137,71	122,53	124,55	108,91	132,23	0,62
Juli	158,94	143,98	126,39	137,96	123,04	125,25	109,25	133,16	0,70
Agustus	161,29	144,94	126,72	139,14	123,34	127,38	110,89	134,43	0,95
September	159,80	145,76	127,16	141,19	123,51	128,74	110,00	134,45	0,01
Oktober	159,12	146,32	127,69	142,52	123,82	129,01	109,98	134,67	0,16
November	158,91	146,61	127,88	142,38	124,08	129,09	110,23	134,76	0,07
Desember	161,44	147,04	128,10	142,72	124,30	129,16	110,52	135,49	0,54
2013									8,38
Januari	166,91	147,71	128,82	143,07	124,66	129,22	110,21	136,88	1,03
Februari	170,39	148,41	129,87	142,23	125,36	129,47	110,30	137,91	0,75
Maret	173,87	149,00	130,14	141,23	125,66	129,62	110,51	138,78	0,63
April	172,48	149,45	130,68	139,63	125,94	129,82	110,62	138,64	-0,10
Mei	171,04	149,98	131,66	137,92	126,23	129,90	110,67	138,60	-0,03
Juni	173,04	150,98	131,93	137,52	126,52	129,95	114,88	140,03	1,03
Juli	182,48	153,32	132,51	137,39	127,02	130,85	125,91	144,63	3,29
Agustus	185,67	154,37	133,39	139,88	127,49	132,63	127,10	146,25	1,12
September	180,32	155,57	134,20	144,06	127,83	133,57	126,09	145,74	-0,35
Oktober	179,20	156,42	134,55	143,26	128,25	133,98	126,76	145,87	0,09
November	178,36	156,85	135,47	143,22	128,69	134,13	126,79	146,04	0,12
Desember	179,77	157,99	136,07	143,46	128,90	134,21	127,50	146,84	0,55
2014 ⁴⁾									8,36
Januari	117,81	110,71	108,72	103,88	105,76	105,98	113,72	110,99	1,07

Tabel 5.

Indeks Harga Konsumen Indonesia - Lanjutan

Akhir periode ¹⁾	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan Rekreasi & Olaharaga	Transportasi dan Komunikasi	Umum	Perubahan Indeks Umum
Februari	118,23	111,19	108,90	104,47	106,06	106,16	113,89	111,28	0,26
Maret	117,71	111,67	109,07	104,55	106,50	106,31	114,16	111,37	0,08
April	116,43	112,17	109,34	104,29	107,15	106,56	114,39	111,35	-0,02
Mei	116,26	112,56	109,59	104,42	107,59	106,63	114,63	111,53	0,16
Juni	117,41	112,92	110,01	104,73	107,98	106,72	114,85	112,01	0,43
Juli	119,69	114,05	110,50	105,62	108,40	107,20	115,86	113,05	0,93
Agustus	120,12	114,64	111,31	105,86	108,76	108,89	115,72	113,58	0,47
September	119,92	115,23	112,17	105,68	109,07	109,63	115,44	113,89	0,27
Oktober	120,22	115,73	113,34	105,90	109,72	109,88	115,62	114,42	0,47
November	122,80	116,55	113,90	105,81	110,19	109,97	120,58	116,14	1,50
Desember	126,76	118,84	115,55	106,49	111,00	110,37	127,27	119,00	2,46
2015									3,35
Januari	127,52	119,61	116,48	107,39	111,73	110,66	122,10	118,71	-0,24
Februari	125,65	120,15	116,96	107,95	112,17	110,81	120,26	118,28	-0,36
Maret	124,73	120,88	117,30	107,86	112,89	110,92	121,19	118,48	0,17
April	123,75	121,48	117,56	108,12	113,32	110,98	123,40	118,91	0,36
Mei	125,47	122,09	117,80	108,37	113,70	111,05	123,60	119,50	0,50
Juni	127,48	122,76	118,07	108,67	114,06	111,13	123,80	120,14	0,54
Juli	130,06	123,39	118,22	109,09	114,47	111,51	125,90	121,26	0,93
Agustus	131,24	124,26	118,41	109,10	115,27	113,43	125,20	121,73	0,39
September	129,83	124,75	118,65	110,01	115,78	114,44	124,67	121,67	-0,05
Oktober	128,46	125,25	118,76	110,29	116,11	114,62	124,70	121,57	-0,08
November	128,89	125,84	118,94	110,04	116,62	114,68	124,80	121,82	0,21
Desember	133,01	126,47	119,41	110,14	116,90	114,75	125,30	122,99	0,96

¹⁾ Angka tahunan/triwulanan adalah angka akhir periode yang bersangkutan

²⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2002 = 100 di 45 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok

³⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2007 = 100 di 66 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok pada Juni 2008

⁴⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2012 = 100 di 82 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok pada Januari 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 6.

Angka Inflasi di 82 Kota ¹⁾

Persen, yoy

Kota	2011	2012	2013	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾
Meulaboh	n.a.	n.a.	n.a.	8,20	0,58
Banda Aceh	3,32	0,06	6,39	7,83	1,27
Lhokseumawe	3,55	0,39	8,27	8,53	2,44
Sibolga	3,71	3,30	10,08	8,36	3,34
Pematang Siantar	4,25	4,73	12,02	7,94	3,36
Medan	3,54	3,79	10,09	8,24	3,32
Padang Sidempuan	4,66	3,54	7,82	7,38	1,66
Padang	5,37	4,16	10,87	11,90	0,85
Bukit Tinggi	n.a.	n.a.	n.a.	9,24	2,79
Tembilahan	n.a.	n.a.	n.a.	10,06	2,06
Pekanbaru	5,09	3,35	8,83	8,53	2,71
Dumai	3,09	3,21	8,60	8,53	2,63
Bungo	n.a.	n.a.	n.a.	8,99	1,29
Jambi	2,76	4,22	8,74	8,72	1,37
Palembang	3,78	2,72	7,04	8,38	3,05
Lubuk Linggau	n.a.	n.a.	n.a.	9,34	3,47
Bengkulu	3,96	4,61	9,94	10,85	3,25
Bandar Lampung	4,24	4,30	7,56	8,36	4,65
Metro	n.a.	n.a.	n.a.	6,50	2,67
Tanjung Pandan	n.a.	n.a.	n.a.	13,15	0,88
Pangkal Pinang	5,00	6,57	8,71	6,81	4,66
Batam	3,76	2,02	7,81	7,61	4,73
Tanjung Pinang	3,32	3,92	10,09	7,49	2,46
Jakarta	3,97	4,52	8,00	8,95	3,30
Bogor	2,85	4,06	8,55	6,83	2,70
Sukabumi	4,26	3,98	8,03	8,38	2,20
Bandung	2,75	4,02	7,97	7,75	3,93
Cirebon	3,20	3,36	7,86	7,08	1,56
Bekasi	3,45	3,46	9,46	7,68	2,22
Depok	2,94	4,11	10,97	7,49	1,87
Tasikmalaya	4,17	3,87	6,89	8,09	3,53
Cilacap	n.a.	n.a.	n.a.	8,18	2,63
Purwokerto	3,40	4,73	8,50	7,09	2,52
Kudus	n.a.	n.a.	n.a.	8,59	3,28
Surakarta	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56
Semarang	2,87	4,85	8,19	8,52	2,56
Tegal	2,58	3,10	5,80	7,40	3,95
Yogyakarta	3,88	4,31	7,32	6,59	3,09
Jember	2,43	4,49	7,21	7,53	2,31
Banyuwangi	n.a.	n.a.	n.a.	6,59	2,15
Sumenep	4,18	5,05	6,62	8,04	2,62
Kediri	3,62	4,63	8,05	7,49	1,71
Malang	4,05	4,60	7,92	8,14	3,32

Kota	2011	2012	2013	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾
Probolinggo	3,78	5,88	7,98	6,79	2,11
Madiun	3,49	3,51	7,52	7,39	2,75
Surabaya	4,72	4,39	7,52	7,90	3,43
Serang	2,78	4,41	9,16	10,07	3,20
Tangerang	3,78	4,44	10,02	9,81	7,64
Cilegon	2,35	3,91	7,98	11,37	2,13
Singaraja	n.a.	n.a.	n.a.	10,32	2,97
Denpasar	3,75	4,71	7,35	8,03	2,70
Mataram	6,38	4,10	9,27	7,18	3,25
Bima	7,19	3,61	10,42	7,37	4,11
Maumere	6,59	6,49	6,24	4,00	3,89
Kupang	4,32	5,10	8,84	8,32	5,07
Pontianak	4,91	6,62	9,48	9,38	6,17
Singkawang	6,72	4,21	6,15	9,65	4,00
Sampit	3,60	4,69	7,25	7,90	5,72
Palangkaraya	5,28	6,73	6,45	6,63	4,20
Tanjung	n.a.	n.a.	n.a.	8,80	6,69
Banjarmasin	3,98	5,96	6,98	7,16	5,03
Balikpapan	6,45	6,41	8,56	7,43	6,26
Samarinda	6,23	4,81	10,37	6,74	4,24
Tarakan	6,43	5,99	10,35	11,91	3,42
Manado	0,67	6,04	8,12	9,67	5,56
Palu	4,47	5,87	7,57	8,85	4,17
Bulukumba	n.a.	n.a.	n.a.	9,45	2,17
Watampone	3,94	3,65	6,86	8,22	0,97
Makassar	2,87	4,57	6,24	8,51	5,18
Pare-pare	1,60	3,49	6,31	9,38	1,58
Palopo	3,35	4,11	5,25	8,95	3,38
Kendari	5,09	5,25	5,92	7,40	1,64
Bau-bau	n.a.	n.a.	n.a.	11,37	3,95
Gorontalo	4,08	5,31	5,84	6,14	4,30
Mamuju	4,91	3,28	5,91	7,88	5,07
Ambon	2,85	6,73	8,81	6,81	5,92
Tual	n.a.	n.a.	n.a.	11,48	8,58
Ternate	4,52	3,29	9,78	9,34	4,52
Manokwari	3,64	4,88	4,63	5,70	2,77
Sorong	0,90	5,12	7,93	6,84	6,17
Merauke	n.a.	n.a.	n.a.	12,31	5,76
Jayapura	3,40	4,52	8,27	7,98	2,79
Inflasi Nasional	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35

Keterangan

¹⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2012 = 100 di 82 kota

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 7.

Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia

Kelompok	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012	2013	2014	2015	Perubahan 2015 thd 2014
Pertanian	231,43	248,78	263,25	264,48	175,05	240,68	37,49
Pertambangan dan penggalian	212,31	221,50	231,20	217,33	117,22	119,87	2,26
Industri	172,01	180,32	187,48	181,29	122,89	128,89	4,88
Impor	160,90	177,37	189,17	188,20	137,37	134,19	-2,32
Ekspor	137,80	154,11	163,15	164,64	138,73	130,47	-5,96
Migas	142,05	173,11	194,28	168,58	168,10	110,65	-34,18
Nonmigas	124,52	148,00	153,16	153,03	129,07	136,98	6,13
Indeks Umum	170,59	183,31	192,69	189,60	132,44	138,26	4,39

¹⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2005 = 100, sejak Januari 2009

²⁾ Data tahun 2011 telah menggunakan tahun dasar 2010 = 100

Pada bulan November-Desember 2013, BPS tidak menerbitkan angka IHPB ekspor Migas

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 8.

Neraca Pembayaran Indonesia

Juta dolar AS

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015				
					I*	II*	III*	IV**	2015
I. Transaksi Berjalan	1.685,08	-24.418,12	-29.114,92	-27.499,21	-4.159,16	-4.296,34	-4.190,40	-5.114,71	-17.760,61
A. Barang	33.825,00	8.679,52	5.833,23	6.982,57	3.062,50	4.124,78	4.140,85	1.952,89	13.281,02
- Ekspor, fob	191.108,71	187.346,48	182.089,23	175.292,79	37.826,76	39.685,42	36.085,57	34.742,87	148.340,62
- Impor, fob	-157.283,71	-178.666,96	-176.255,99	-168.310,22	-34.764,25	-35.560,64	-31.944,72	-32.789,99	-135.059,60
1. Barang Dagangan Umum	32.215,37	6.710,91	4.068,67	5.474,03	2.690,38	3.809,66	4.047,23	2.004,23	12.551,49
- Ekspor	189.432,27	185.337,19	180.293,99	173.759,96	37.450,31	39.366,32	35.727,63	34.396,53	146.940,79
- Impor	-157.216,90	-178.626,28	-176.225,32	-168.285,94	-34.759,94	-35.556,66	-31.680,40	-32.392,30	-134.389,29
a. Nonmigas	32.865,50	11.949,85	13.777,23	17.303,64	3.946,84	5.932,07	6.157,85	2.987,13	19.023,88
- Ekspor	151.365,60	149.765,76	146.705,57	145.007,89	33.068,44	34.721,90	32.037,54	30.698,16	130.526,04
- Impor	-118.500,10	-137.815,90	-132.928,34	-127.704,25	-29.121,60	-28.789,83	-25.879,69	-27.711,04	-111.502,16
b. Migas	-650,13	-5.238,94	-9.708,56	-11.829,61	-1.256,46	-2.122,41	-2.110,62	-982,90	-6.472,39
- Ekspor	38.066,67	35.571,43	33.588,42	28.752,07	4.381,87	4.644,42	3.690,09	3.698,36	16.414,74
- Impor	-38.716,80	-40.810,38	-43.296,98	-40.581,68	-5.638,33	-6.766,83	-5.800,71	-4.681,26	-22.887,14
2. Barang Lainnya	1.609,64	1.968,61	1.764,56	1.508,54	372,13	315,12	93,62	-51,34	729,53
- Ekspor	1.676,44	2.009,29	1.795,23	1.532,83	376,44	319,11	357,94	346,35	1.399,84
- Impor	-66,80	-40,67	-30,67	-24,29	-4,32	-3,98	-264,32	-397,69	-670,30
B. Jasa - jasa	-9.803,27	-10.564,20	-12.071,65	-10.009,69	-1.844,84	-2.651,44	-2.151,16	-1.845,92	-8.493,36
- Ekspor	21.888,15	23.660,23	22.944,08	23.530,93	5.525,70	5.084,62	5.445,70	5.834,83	21.890,86
- Impor	-31.691,42	-34.224,43	-35.015,73	-33.540,62	-7.370,55	-7.736,06	-7.596,86	-7.680,75	-30.384,22
C. Pendapatan Primer	-26.547,17	-26.627,83	-27.054,65	-29.691,96	-6.804,54	-7.195,34	-7.452,26	-6.575,62	-28.027,76
- Penerimaan	2.581,12	2.649,63	2.602,36	2.129,61	467,77	722,47	705,34	930,39	2.825,97
- Pembayaran	-29.128,28	-29.277,45	-29.657,01	-31.821,57	-7.272,32	-7.917,81	-8.157,59	-7.506,01	-30.853,73
D. Pendapatan Sekunder	4.210,51	4.094,38	4.178,15	5.219,87	1.427,72	1.425,66	1.272,17	1.353,94	5.479,48
- Penerimaan	7.635,63	8.066,75	8.508,30	9.373,54	2.521,23	2.645,39	2.538,72	2.627,19	10.332,53
- Pembayaran	-3.425,12	-3.972,37	-4.330,15	-4.153,67	-1.093,50	-1.219,73	-1.266,56	-1.273,25	-4.853,04
II. Transaksi Modal	32,89	50,57	45,29	26,57	0,93	0,29	1,67	13,75	16,63
- Penerimaan	32,89	50,57	45,29	26,57	0,93	0,29	1,67	13,75	16,63
- Pembayaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Transaksi Finansial¹⁾	13.603,33	24.858,06	21.964,42	44.962,07	5.085,92	2.241,05	277,14	9.515,69	17.119,80
- Aset	-16.453,46	-17.971,27	-15.467,05	-10.785,81	-8.302,32	-8.524,29	-3.786,87	340,20	-20.273,27
- Kewajiban	30.056,80	42.829,33	37.431,47	55.747,88	13.388,24	10.765,33	4.064,01	9.175,48	37.393,07
1. Investasi Langsung	11.528,39	13.716,23	12.295,44	14.788,34	1.694,73	3.466,62	1.781,81	2.315,38	9.258,54
a. Aset	-9.036,54	-7.484,55	-11.111,69	-10.387,53	-3.451,13	-3.393,66	-1.344,99	-1.237,43	-9.427,22
b. Kewajiban	20.564,94	21.200,78	23.407,13	25.175,87	5.145,86	6.860,29	3.126,80	3.552,80	18.685,76
2. Investasi Portofolio	3.806,37	9.206,43	10.874,79	26.067,40	8.508,53	5.592,02	-2.218,37	4.824,69	16.706,88
a. Aset	-1.189,45	-5.467,02	-1.272,76	2.586,74	24,32	-737,21	-682,99	393,35	-1.002,53
b. Kewajiban	4.995,82	14.673,45	12.147,55	23.480,66	8.484,21	6.329,23	-1.535,38	4.431,34	17.709,41
- Sektor publik	826,50	9.251,20	10.257,27	15.379,83	6.942,00	3.808,36	890,56	5.727,76	17.368,68
- Sektor swasta	4.169,31	5.422,25	1.890,28	8.100,83	1.542,21	2.520,88	-2.425,94	-1.296,42	340,73
3. Derivatif Finansial	69,35	12,99	-334,36	-155,55	92,88	-2,87	230,87	-300,92	19,96
4. Investasi Lainnya	-1.800,78	1.922,42	-871,45	4.261,88	-5.210,22	-6.814,73	482,83	2.676,54	-8.865,58
a. Aset	-6.754,48	-5.352,99	-3.427,38	-3.426,43	-5.080,38	-4.622,37	-1.954,94	1.147,59	-10.510,09
b. Kewajiban	4.953,69	7.275,42	2.555,93	7.688,31	-129,84	-2.192,36	2.437,77	1.528,95	1.644,52
- Sektor publik	-2.258,17	2.453,31	-1.375,64	-4.208,60	-1.143,89	-1.366,46	1.664,59	376,85	-468,91
- Sektor swasta	7.211,87	4.822,11	3.931,58	11.896,91	1.014,05	-825,90	773,19	1.152,10	2.113,42
IV. Total (I + II + III)	15.321,30	490,50	-7.105,20	17.489,43	927,69	-2.055,00	-3.911,59	4.414,72	-624,18

Tabel 8.

Neraca Pembayaran Indonesia - Lanjutan

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015				
					I*	II*	III*	IV**	2015
V. Selisih Perhitungan Bersih	-3.464,68	-275,38	-219,52	-2.240,84	375,45	-870,18	-653,76	674,62	-473,87
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	11.856,61	215,12	-7.324,73	15.248,59	1.303,14	-2.925,18	-4.565,35	5.089,34	-1.098,05
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait ²⁾	-11.856,61	-215,12	7.324,73	-15.248,59	-1.303,14	2.925,18	4.565,35	-5.089,34	1.098,05
A. Transaksi Cadangan Devisa	-11.856,61	-215,12	7.324,73	-15.248,59	-1.303,14	2.925,18	4.565,35	-5.089,34	1.098,05
B. Kredit dan Pinjaman IMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. <i>Exceptional Financing</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Memorandum:									
- Posisi Cadangan Devisa	110.123,00	112.781,03	99.386,71	111.861,60	111.553,65	108.029,62	101.719,53	105.931,02	105.931,02
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	6,74	6,15	5,47	6,45	6,64	6,78	6,77	7,45	6,45
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0,20	-2,78	-3,19	-3,09	-1,95	-1,97	-1,94	-2,39	-2,06
- Rasio Pembayaran Utang (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.l. Rasio Pembayaran Utang Pemerintah & Otoritas Moneter (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

- ¹⁾ Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait
²⁾ Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Tabel 9.

Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas ¹⁾

Ribuan dolar AS

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	5.077.862	3,32	5.584.278	3,68	5.787.688	3,90	5.927.312	4,04	5.764.008	4,37
Biji coklat	616.202	0,40	388.326	0,26	443.372	0,30	201.407	0,14	118.047	0,09
Udang	1.064.620	0,70	1.111.388	0,73	1.467.208	0,99	1.786.335	1,22	1.331.320	1,01
Biji kopi	1.030.338	0,67	1.241.922	0,82	1.166.406	0,79	1.030.826	0,70	1.210.617	0,92
Ikan dan lain-lain	970.195	0,63	1.106.691	0,73	1.003.940	0,68	987.893	0,67	966.832	0,73
Rempah-rempah	430.320	0,28	631.746	0,42	554.137	0,37	577.627	0,39	780.981	0,59
Teh	136.366	0,09	126.754	0,08	131.112	0,09	108.843	0,07	89.969	0,07
Bahan nabati	159.926	0,10	134.133	0,09	165.132	0,11	228.122	0,16	160.884	0,12
Buah-buahan	172.746	0,11	181.322	0,12	184.506	0,12	299.853	0,20	363.396	0,28
Tembakau	61.037	0,04	60.791	0,04	93.458	0,06	82.397	0,06	58.878	0,04
Sayur-sayuran	57.605	0,04	83.943	0,06	67.687	0,05	82.958	0,06	109.083	0,08
Damar dan getah damar	87.903	0,06	94.134	0,06	105.591	0,07	107.564	0,07	111.456	0,08
Karet alam	28.493	0,02	19.481	0,01	14.178	0,01	11.675	0,01	11.017	0,01
Hasil pertanian lainnya	262.111	0,17	403.647	0,27	390.962	0,26	421.812	0,29	451.528	0,34
Hasil industri	111.461.020	72,83	112.171.467	73,91	109.321.211	73,62	115.437.931	78,78	104.807.597	79,44
Minyak sawit	16.709.854	10,92	17.685.127	11,65	16.518.525	11,12	17.461.545	11,92	15.402.551	11,68
Tekstil dan produk tekstil	13.172.828	8,61	12.510.222	8,24	12.770.966	8,60	12.847.055	8,77	12.338.815	9,35
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	8.592.466	5,61	11.157.423	7,35	10.716.148	7,22	10.108.187	6,90	8.778.287	6,65
Produk logam dasar	10.774.417	7,04	9.303.974	6,13	8.614.179	5,80	9.085.294	6,20	7.610.957	5,77
Karet olahan	14.083.724	9,20	10.368.180	6,83	9.306.376	6,27	7.022.184	4,79	5.843.690	4,43
Kertas dan barang dari kertas	4.144.400	2,71	3.938.382	2,59	3.732.138	2,51	3.779.966	2,58	3.599.155	2,73
Makanan olahan	4.582.987	2,99	5.089.625	3,35	5.369.071	3,62	6.325.797	4,32	6.284.730	4,76
Bahan kimia	4.579.567	2,99	3.634.536	2,39	3.498.625	2,36	3.851.429	2,63	2.805.673	2,13
Produk kayu olahan	3.244.615	2,12	3.338.150	2,20	3.510.392	2,36	3.906.760	2,67	3.815.167	2,89
Alas kaki	3.254.189	2,13	3.518.257	2,32	3.859.520	2,60	4.109.724	2,80	4.507.506	3,42
Damar tiruan, bahan plastik	2.402.329	1,57	2.475.062	1,63	2.608.021	1,76	2.760.476	1,88	2.320.365	1,76
Furnitur	1.722.845	1,13	1.728.879	1,14	1.693.575	1,14	1.728.798	1,18	1.684.510	1,28
Kapal laut dan sejenisnya	328.274	0,21	397.701	0,26	683.239	0,46	746.924	0,51	373.775	0,28
Bahan kertas	1.537.801	1,00	1.540.093	1,01	1.816.694	1,22	1.713.636	1,17	1.725.688	1,31
Suku cadang kendaraan	1.213.935	0,79	1.961.842	1,29	1.814.455	1,22	2.096.510	1,43	2.240.557	1,70
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	1.541.550	1,01	2.491.899	1,64	2.492.773	1,68	2.919.493	1,99	2.668.989	2,02
Suku cadang mesin	457.288	0,30	854.526	0,56	684.059	0,46	763.367	0,52	730.405	0,55
Asam berlemak	1.334.065	0,87	1.878.791	1,24	1.718.603	1,16	2.367.180	1,62	1.835.927	1,39
Komputer dan bagiannya	279.570	0,18	699.832	0,46	575.740	0,39	579.213	0,40	542.119	0,41
Sabun mandi dan cuci	740.114	0,48	866.562	0,57	895.776	0,60	906.194	0,62	801.862	0,61
Minyak atsiri dan lainnya	527.167	0,34	546.023	0,36	566.619	0,38	593.827	0,41	548.931	0,42
Gelas dan barang dari gelas	432.356	0,28	498.666	0,33	452.941	0,31	432.535	0,30	405.962	0,31
Pupuk	415.196	0,27	548.257	0,36	631.035	0,42	508.675	0,35	302.134	0,23
Perlengkapan olahraga	323.236	0,21	453.825	0,30	545.887	0,37	514.885	0,35	468.007	0,35
Produk keramik	375.447	0,25	342.240	0,23	342.339	0,23	365.290	0,25	348.555	0,26
Makanan ternak	510.353	0,33	599.077	0,39	733.112	0,49	775.918	0,53	568.753	0,43
Margarin dan lemak lainnya	922.707	0,60	811.401	0,53	618.983	0,42	777.803	0,53	620.029	0,47
Produk farmasi	428.328	0,28	441.752	0,29	449.277	0,30	519.046	0,35	574.188	0,44
Barang dari logam mulia	1.053.125	0,69	170.300	0,11	183.584	0,12	2.122.861	1,45	3.292.902	2,50
Kulit dan barang dari kulit	223.765	0,15	211.209	0,14	230.055	0,15	218.039	0,15	193.115	0,15
Preparat pembasmi kuman	236.899	0,15	247.671	0,16	318.040	0,21	302.762	0,21	277.200	0,21

Tabel 9.

Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas ¹⁾ - Lanjutan

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Pesawat udara dan bagiannya	160.270	0,10	105.480	0,07	102.608	0,07	97.571	0,07	87.749	0,07
Bahan celup organik sintetik	133.908	0,09	140.127	0,09	164.488	0,11	182.768	0,12	188.510	0,14
Semen	57.724	0,04	20.050	0,01	49.657	0,03	37.365	0,03	62.559	0,05
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	109.138	0,07	197.914	0,13	105.918	0,07	143.786	0,10	406.731	0,31
Barang anyaman	56.680	0,04	85.021	0,06	81.805	0,06	77.596	0,05	76.891	0,06
Rotan olahan	42.098	0,03	1.586	0,00	877	0,00	504	0,00	1.207	0,00
Peti kemas	7.556	0,00	9.865	0,01	12.727	0,01	5.833	0,00	3.430	0,00
Gliserol dan larutan alkali	22.959	0,02	47.161	0,03	75.656	0,05	76.636	0,05	34.465	0,03
Hasil industri lainnya	10.725.291	7,01	11.254.781	7,42	10.776.727	7,26	12.604.496	8,60	10.435.549	7,91
Hasil pertambangan dan sektor lainnya	34.270.797	22,39	31.365.925	20,67	30.946.415	20,84	22.838.643	15,59	19.416.688	14,72
Batubara	26.924.584	17,59	26.248.270	17,29	24.359.167	16,40	20.818.030	14,21	15.955.978	12,09
Biji tembaga	4.706.934	3,08	2.565.990	1,69	2.999.560	2,02	1.673.548	1,14	3.277.196	2,48
Biji nikel	1.333.171	0,87	1.458.409	0,96	1.677.366	1,13	85.913	0,06	0	0,00
Bauksit	767.138	0,50	637.597	0,42	1.318.775	0,89	47.742	0,03	744	0,00
Granit	35.792	0,02	15.598	0,01	131	0,00	0	0,00	1	0,00
Hasil pertambangan lainnya	503.179	0,33	440.061	0,29	591.415	0,40	213.410	0,15	182.769	0,14
Hasil sektor lainnya ²⁾	555.909	0,36	644.161	0,42	650.255	0,44	803.892	0,55	537.751	0,41
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan ³⁾	1.676.441	1,10	2.009.286	1,32	1.795.235	1,21	1.532.832	1,05	1.399.835	1,06
Jumlah, fob	153.042.030	100,00	151.775.118	100,00	148.500.805	100,00	146.540.609	100,00	131.925.879	100,00

Catatan:

¹⁾ Klasifikasi komoditas berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan bersumber dari Bank Indonesia sebagai pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

²⁾ Terdiri dari barang seni, barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik, dan barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut

³⁾ Mencakup emas nonmoneter dan *merchandise*

* Data sementara

Tabel 10.

Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas

Ribu ton

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Hasil pertanian	2695,96	0,52	3.005	0,54	3.103	0,48	3.215	0,63	3.772	0,81
Biji coklat	211	0,04	172	0,03	198	0,03	77	0,02	54	0,01
Udang	119	0,02	133	0,02	145	0,02	160	0,03	148	0,03
Biji kopi	344	0,07	446	0,08	532	0,08	384	0,08	513	0,11
Ikan dan lain-lain	550	0,11	644	0,12	649	0,10	623	0,12	420	0,09
Rempah-rempah	96	0,02	111	0,02	119	0,02	156	0,03	151	0,03
Teh	68	0,01	62	0,01	65	0,01	61	0,01	51	0,01
Bahan nabati	230	0,04	169	0,03	192	0,03	203	0,04	207	0,04
Buah-buahan	209	0,04	243	0,04	245	0,04	300	0,06	352	0,08
Tembakau	20	0,00	16	0,00	20	0,00	17	0,00	12	0,00
Sayur-sayuran	88	0,02	147	0,03	104	0,02	111	0,02	196	0,04
Damar dan getah damar	38	0,01	71	0,01	73	0,01	50	0,01	69	0,01
Karet alam	9	0,00	9	0,00	7	0,00	6	0,00	8	0,00
Hasil pertanian lainnya	713	0,14	780	0,14	755	0,12	1.068	0,21	1.591	0,34
Hasil industri	62.703	12,20	64.782	11,73	70.819	10,88	75.443	14,85	78.323	16,91
Minyak sawit	15.823	3,08	18.967	3,43	21.517	3,31	22.889	4,51	26.496	5,72
Tekstil dan produk tekstil	1.934	0,38	1.951	0,35	2.109	0,32	2.213	0,44	2.264	0,49
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	573	0,11	623	0,11	588	0,09	536	0,11	517	0,11
Produk logam dasar	2.256	0,44	2.361	0,43	2.019	0,31	3.059	0,60	3.672	0,79
Karet olahan	3.080	0,60	3.030	0,55	3.324	0,51	3.248	0,64	3.258	0,70
Kertas dan barang dari kertas	4.216	0,82	4.227	0,77	4.263	0,66	4.343	0,86	4.552	0,98
Makanan olahan	2.499	0,49	2.315	0,42	2.538	0,39	3.351	0,66	2.988	0,65
Bahan kimia	4.843	0,94	4.088	0,74	3.863	0,59	4.185	0,82	3.943	0,85
Produk kayu olahan	3.986	0,78	4.202	0,76	4.900	0,75	5.972	1,18	5.423	1,17
Alas kaki	193	0,04	199	0,04	213	0,03	214	0,04	235	0,05
Damar tiruan, bahan plastik	1.201	0,23	1.279	0,23	1.350	0,21	1.483	0,29	1.417	0,31
Furnitur	588	0,11	599	0,11	551	0,08	552	0,11	505	0,11
Kapal laut dan sejenisnya	128	0,02	165	0,03	107	0,02	134	0,03	159	0,03
Bahan kertas	2.902	0,56	3.185	0,58	3.671	0,56	3.494	0,69	3.400	0,73
Suku cadang kendaraan	156	0,03	231	0,04	230	0,04	259	0,05	286	0,06
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	178	0,03	260	0,05	268	0,04	322	0,06	314	0,07
Asam berlemak	1.200	0,23	1.855	0,34	2.150	0,33	2.589	0,51	2.700	0,58
Komputer dan bagiannya	15	0,00	25	0,00	22	0,00	21	0,00	20	0,00
Sabun mandi dan cuci	621	0,12	745	0,13	839	0,13	863	0,17	839	0,18
Minyak atsiri dan lainnya	106	0,02	100	0,02	101	0,02	100	0,02	90	0,02
Makanan ternak	3.660	0,71	4.236	0,77	4.613	0,71	4.822	0,95	5.144	1,11
Margarin dan lemak lainnya	796	0,15	766	0,14	681	0,10	805	0,16	802	0,17
Produk farmasi	19	0,00	21	0,00	26	0,00	24	0,00	21	0,00
Barang dari logam mulia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00
Kulit dan barang dari kulit	12	0,00	10	0,00	11	0,00	8	0,00	7	0,00
Preparat pembasmi kuman	79	0,02	72	0,01	82	0,01	95	0,02	82	0,02
Pesawat udara dan bagiannya	1	0,00	0	0,00	1	0,00	2	0,00	1	0,00
Bahan celup organik sintetik	25	0,00	30	0,01	34	0,01	34	0,01	32	0,01
Semen	1.318	0,26	275	0,05	946	0,15	571	0,11	1.216	0,26
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	11	0,00	20	0,00	11	0,00	15	0,00	37	0,01

Tabel 10.

Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas - Lanjutan

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Barang anyaman	22	0,00	23	0,00	22	0,00	22	0,00	21	0,00
Rotan olahan	40	0,01	1	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00
Peti kemas	3	0,00	3	0,00	4	0,00	3	0,00	2	0,00
Gliserol dan larutan alkali	96	0,02	164	0,03	248	0,04	318	0,06	168	0,04
Hasil industri lainnya	7.871	1,53	6.219	1,13	6.688	1,03	6.238	1,23	5.548	1,20
Hasil pertambangan dan sektor lainnya	448.449	87,27	484.713	87,73	576.742	88,64	429.253	84,51	380.970	82,27
Batubara	348.056	67,74	385.421	69,76	422.637	64,95	408.345	80,40	366.002	79,04
Biji tembaga	1.480	0,29	1.109	0,20	1.455	0,22	715	0,14	1.712	0,37
Biji nikel	37.474	7,29	46.901	8,49	64.232	9,87	4.284	0,84	-	0,00
Bauksit	39.634	7,71	29.799	5,39	55.557	8,54	2.087	0,41	3	0,00
Granit	4.468	0,87	2.002	0,36	19	0,00	-	0,00	-	0,00
Hasil pertambangan lainnya	17.337	3,37	19.480	3,53	32.842	5,05	13.822	2,72	13.254	2,86
Hasil sektor lainnya ²⁾	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah	513.849	100,00	552.502	100,00	650.666	100,00	507.914	100,00	463.068	100,00

Catatan :

¹⁾ Klasifikasi komoditi berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, barang untuk diperbaiki, dan penyesuaian cakupan ekspor industri Batam. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia.

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

* Data sementara

Tabel 11.

Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (fob) ¹⁾

Ribuan dolar AS

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Amerika	19.749.881	12,90	18.824.693	12,40	19.401.683	13,07	20.327.656	13,87	19.271.765	14,61
Amerika Utara	15.967.415	10,43	15.286.203	10,07	15.795.051	10,64	16.607.330	11,33	16.021.732	12,14
Amerika Serikat	15.019.944	9,81	14.497.394	9,55	15.017.442	10,11	15.851.790	10,82	15.296.049	11,59
Kanada	946.635	0,62	787.624	0,52	775.984	0,52	754.366	0,51	724.445	0,55
Amerika Utara Lainnya	836	0,00	1.185	0,00	1.626	0,00	1.174	0,00	1.238	0,00
Amerika Tengah dan Selatan	3.782.466	2,47	3.538.490	2,33	3.606.631	2,43	3.720.326	2,54	3.250.033	2,46
Argentina	352.449	0,23	310.359	0,20	336.956	0,23	237.166	0,16	238.132	0,18
Brasil	1.665.021	1,09	1.479.334	0,97	1.517.190	1,02	1.503.465	1,03	1.164.516	0,88
Meksiko	597.834	0,39	594.865	0,39	625.022	0,42	814.494	0,56	802.893	0,61
Amerika Tengah dan Selatan lainnya	1.167.162	0,76	1.153.932	0,76	1.127.463	0,76	1.165.201	0,80	1.044.491	0,79
Eropa	22.381.070	14,62	20.827.697	13,72	19.998.354	13,47	20.044.107	13,68	18.474.267	14,00
Uni Eropa	19.204.575	12,55	17.780.102	11,71	16.613.817	11,19	16.846.951	11,50	14.769.293	11,20
Belanda	4.728.965	3,09	4.473.179	2,95	4.009.880	2,70	3.909.794	2,67	3.407.574	2,58
Belgia	1.341.888	0,88	1.293.102	0,85	1.254.708	0,84	1.217.226	0,83	1.103.886	0,84
Inggris	1.627.847	1,06	1.679.815	1,11	1.618.871	1,09	1.659.576	1,13	1.521.994	1,15
Italia	2.995.989	1,96	2.279.791	1,50	2.121.981	1,43	2.287.691	1,56	1.871.943	1,42
Jerman	3.201.299	2,09	3.064.411	2,02	2.860.998	1,93	2.819.491	1,92	2.652.171	2,01
Perancis	1.049.478	0,69	1.116.351	0,74	1.053.698	0,71	1.018.400	0,69	971.332	0,74
Spanyol	2.231.984	1,46	2.059.230	1,36	1.806.692	1,22	1.938.255	1,32	1.476.585	1,12
Uni Eropa lainnya ²⁾	2.027.124	1,32	1.814.223	1,20	1.886.988	1,27	1.996.519	1,36	1.763.807	1,34
Rusia	852.039	0,56	866.396	0,57	934.132	0,63	1.056.775	0,72	993.581	0,75
Turki	1.423.668	0,93	1.361.964	0,90	1.537.295	1,04	1.447.167	0,99	1.159.227	0,88
Eropa lainnya	900.788	0,59	819.235	0,54	913.110	0,61	693.214	0,47	1.552.167	1,18
Asia dan Timur Tengah	103.157.274	67,40	102.731.460	67,69	99.945.259	67,30	95.974.111	65,49	86.415.801	65,50
ASEAN	26.971.924	17,62	30.797.388	20,29	29.359.595	19,77	28.840.547	19,68	27.176.857	20,60
Brunei Darussalam	65.327	0,04	116.854	0,08	88.496	0,06	98.866	0,07	85.588	0,06
Filipina	3.642.588	2,38	3.651.969	2,41	3.757.698	2,53	3.886.987	2,65	3.916.971	2,97
Kamboja	266.448	0,17	290.188	0,19	316.755	0,21	416.539	0,28	429.189	0,33
Laos	10.613	0,01	23.736	0,02	5.087	0,00	6.212	0,00	7.135	0,01
Malaysia	8.779.155	5,74	8.445.424	5,56	7.161.960	4,82	6.400.296	4,37	6.183.373	4,69
Myanmar	321.484	0,21	412.643	0,27	576.497	0,39	587.256	0,40	610.521	0,46
Singapura	7.142.675	4,67	10.136.569	6,68	9.687.013	6,52	10.012.470	6,83	8.639.863	6,55
Thailand	4.547.436	2,97	5.469.613	3,60	5.209.797	3,51	4.990.703	3,41	4.590.229	3,48
Vietnam	2.196.200	1,44	2.250.393	1,48	2.556.292	1,72	2.441.218	1,67	2.713.988	2,06
Hong Kong SAR	3.078.247	2,01	2.644.935	1,74	2.646.008	1,78	2.760.064	1,88	2.040.839	1,55
India	13.158.360	8,60	12.454.827	8,21	12.948.553	8,72	12.220.101	8,34	11.590.643	8,79
Irak	148.874	0,10	44.886	0,03	171.973	0,12	70.480	0,05	94.987	0,07
Jepang	18.135.364	11,85	17.165.696	11,31	16.025.840	10,79	14.636.828	9,99	13.016.824	9,87
Korea Selatan	7.283.875	4,76	6.657.016	4,39	5.999.024	4,04	5.725.271	3,91	5.398.399	4,09
Pakistan	910.807	0,60	1.375.854	0,91	1.412.034	0,95	2.048.083	1,40	1.988.049	1,51
Tiongkok	21.414.082	13,99	20.783.070	13,69	21.156.450	14,25	16.465.326	11,24	13.250.434	10,04
Saudi Arabia	1.372.845	0,90	1.764.557	1,16	1.728.591	1,16	2.155.287	1,47	2.064.769	1,57
Taiwan, Provinsi China	4.154.619	2,71	4.084.297	2,69	3.714.616	2,50	3.891.682	2,66	3.636.068	2,76
Asia dan Timur Tengah lainnya	6.528.277	4,27	4.958.934	3,27	4.782.574	3,22	7.160.441	4,89	6.157.932	4,67
Australia dan Oseania	3.235.990	2,11	4.026.451	2,65	3.922.662	2,64	4.519.496	3,08	3.730.377	2,83
Australia	2.445.147	1,60	3.296.172	2,17	2.989.647	2,01	3.697.363	2,52	2.991.168	2,27
New Zealand	388.844	0,25	356.826	0,24	444.951	0,30	460.164	0,31	396.674	0,30
Australia dan Oseania Lainnya	401.999	0,26	373.454	0,25	488.064	0,33	361.970	0,25	342.536	0,26
Afrika	3.961.906	2,59	4.552.974	3,00	4.400.184	2,96	4.857.604	3,31	3.503.548	2,66

Tabel 11.

Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (fob)¹⁾ - Lanjutan

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Afrika Selatan	1.409.167	0,92	1.642.411	1,08	1.245.443	0,84	1.378.907	0,94	665.661	0,50
Afrika lainnya	2.552.739	1,67	2.910.563	1,92	3.154.740	2,12	3.478.697	2,37	2.837.887	2,15
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan ³⁾	555.909	0,36	811.843	0,53	832.663	0,56	817.635	0,56	530.122	0,40
Jumlah, fob	153.042.030	100,00	151.775.118	100,00	148.500.805	100,00	146.540.609	100,00	131.925.879	100,00

Catatan:

¹⁾ Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

²⁾ Pemekaran menjadi 27 negara sejak Bulgaria dan Romania bergabung dengan Uni Eropa pada Januari 2007

³⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, barang untuk diperbaiki, dan penyesuaian cakupan ekspor industri Batam

* Data sementara

Tabel 12. Nilai Impor Menurut Kelompok Barang ¹⁾

Ribu dolar AS

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Barang konsumsi	22.611.945	14,38	25.532.632	14,29	26.879.699	15,25	25.907.577	15,39	18.460.886	13,67
Makanan dan minuman, baku, untuk rumah tangga	1.832.692	1,17	1.537.179	0,86	1.394.325	0,79	1.541.254	0,92	1.320.174	0,98
Makanan dan minuman, olahan, untuk rumah tangga	3.533.437	2,25	2.759.331	1,54	2.812.575	1,60	2.750.512	1,63	2.332.902	1,73
Mobil penumpang	872.628	0,55	1.498.307	0,84	1.171.510	0,66	784.431	0,47	583.152	0,43
Alat angkutan bukan untuk industri	555.433	0,35	367.729	0,21	383.485	0,22	268.909	0,16	243.875	0,18
Barang konsumsi tahan lama	1.192.777	0,76	1.592.871	0,89	1.624.973	0,92	1.415.739	0,84	1.073.677	0,79
Barang konsumsi semi-tahan lama	1.501.594	0,95	1.921.446	1,08	2.150.785	1,22	1.952.560	1,16	1.965.869	1,46
Barang konsumsi tidak tahan lama	1.490.297	0,95	1.910.634	1,07	2.154.691	1,22	2.158.041	1,28	2.023.313	1,50
Bahan bakar dan pelumas, olahan, produk minyak ²⁾	11.465.941	7,29	13.720.367	7,68	14.736.636	8,36	14.504.300	8,62	8.181.422	6,06
Barang yang tidak dirinci secara spesifik	167.147	0,11	224.769	0,13	450.718	0,26	531.831	0,32	736.501	0,55
Bahan baku dan bahan penolong	113.151.281	71,94	126.732.417	70,93	127.649.765	72,42	121.677.775	72,29	97.933.125	72,51
Makanan dan minuman, baku untuk industri	4.112.931	2,61	4.005.713	2,24	4.348.635	2,47	4.934.923	2,93	4.100.987	3,04
Makanan dan minuman, olahan untuk industri	3.261.887	2,07	3.317.376	1,86	3.294.925	1,87	3.247.084	1,93	2.725.053	2,02
Bahan pasokan, baku untuk industri	6.679.561	4,25	5.480.589	3,07	6.180.739	3,51	5.967.884	3,55	4.616.230	3,42
Bahan pasokan, olahan untuk industri	49.204.480	31,28	58.236.091	32,59	56.624.346	32,13	56.247.051	33,42	49.419.113	36,59
Suku cadang dan perlengkapan untuk barang modal	13.831.250	8,79	18.011.245	10,08	17.191.495	9,75	15.552.758	9,24	14.628.275	10,83
Suku cadang dan perlengkapan untuk alat angkutan	6.617.550	4,21	8.267.873	4,63	8.980.793	5,10	7.128.761	4,24	6.139.476	4,55
Bahan bakar dan pelumas, baku	10.923.734	6,95	11.008.146	6,16	13.322.222	7,56	12.896.531	7,66	8.011.548	5,93
a.l: minyak mentah ²⁾	10.905.440	6,93	10.987.073	6,15	13.236.094	7,51	12.600.220	7,49	7.725.385	5,72
Bahan bakar dan pelumas, olahan	18.519.887	11,77	18.405.384	10,30	17.706.610	10,05	15.702.783	9,33	8.292.444	6,14
a.l: produk minyak ²⁾	16.590.030	10,55	15.540.944	8,70	14.408.358	8,17	12.442.784	7,39	6.057.936	4,49
a.l: gas elpiji ³⁾	1.708.094	1,09	2.626.816	1,47	3.094.502	1,76	3.039.246	1,81	2.061.615	1,53
Barang Modal	30.490.023	19,39	36.086.323	20,20	30.909.621	17,54	29.448.344	17,50	24.842.044	18,39
Barang modal (kecuali alat angkutan)	22.301.038	14,18	26.642.473	14,91	25.541.302	14,49	25.570.739	15,19	22.411.496	16,59
Mobil penumpang	872.628	0,55	1.498.307	0,84	1.171.510	0,66	784.431	0,47	583.152	0,43
Alat angkutan lainnya, untuk industri	7.316.357	4,65	7.945.543	4,45	4.196.809	2,38	3.093.174	1,84	1.847.396	1,37
Barang dagangan lainnya ⁴⁾	724.016	0,46	743.455	0,42	714.679	0,41	753.791	0,45	419.475	0,31
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan ⁵⁾	71.097	0,05	43.071	0,02	32.398	0,02	25.620	0,02	706.232	0,52
Jumlah, cif	167.048.361	106,21	189.137.898	105,86	186.186.162	105,63	177.813.107	105,65	142.361.763	105,41
Asuransi dan ongkos pengangkutan	9.764.655	6,21	10.470.943	5,86	9.930.168	5,63	9.502.882	5,65	7.302.073	5,41
Jumlah, fob	157.283.706	100,00	178.666.955	100,00	176.255.994	100,00	168.310.225	100,00	135.059.690	100,00

Catatan:

¹⁾ Klasifikasi komoditas berdasarkan *Broad Economic Category* (BEC). Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia²⁾ Merupakan komponen impor minyak³⁾ Merupakan komponen impor gas⁴⁾ Terdiri dari barang yang diperolehi di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki⁵⁾ Merupakan emas nonmoneter

* Data sementara

Tabel 13.

Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif) ¹⁾

Ribudolar AS

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Hasil pertanian	9.277.539	7,82	8.129.294	5,90	8.650.023	6,51	9.340.745	7,31	7.683.489	6,85
Biji coklat	62.895	0,05	62.719	0,05	77.422	0,06	342.015	0,27	169.735	0,15
Udang	49.459	0,04	51.709	0,04	63.173	0,05	60.399	0,05	49.054	0,04
Biji kopi	39.092	0,03	109.399	0,08	29.424	0,02	39.856	0,03	27.492	0,02
Ikan dan lain-lain	172.917	0,15	129.259	0,09	139.702	0,11	139.614	0,11	142.605	0,13
Rempah-rempah	396.509	0,33	153.669	0,11	30.082	0,02	71.275	0,06	35.429	0,03
Teh	24.749	0,02	28.732	0,02	24.199	0,02	19.568	0,02	19.914	0,02
Bahan nabati	1.896	0,00	1.748	0,00	1.834	0,00	1.422	0,00	4.129	0,00
Buah-buahan	792.567	0,67	834.467	0,61	653.001	0,49	781.392	0,61	656.088	0,58
Tembakau	134.434	0,11	258.929	0,19	224.698	0,17	205.018	0,16	82.833	0,07
Sayur-sayuran	557.773	0,47	470.697	0,34	612.965	0,46	612.117	0,48	530.410	0,47
Damar dan getah damar	4.131	0,00	2.174	0,00	2.163	0,00	7.671	0,01	4.723	0,00
Karet alam	27.408	0,02	39.576	0,03	36.709	0,03	31.477	0,02	30.798	0,03
Hasil pertanian lainnya	7.013.708	5,92	5.986.217	4,34	6.754.652	5,08	7.028.921	5,50	5.930.280	5,29
Hasil industri	115.099.993	97,08	136.202.320	98,80	129.985.389	97,76	123.554.860	96,73	108.034.613	96,31
Minyak sawit	24.992	0,02	509	0,00	46.251	0,03	489	0,00	4.624	0,00
Tekstil dan produk tekstil	6.529.501	5,51	6.788.245	4,92	7.061.634	5,31	7.178.665	5,62	6.871.579	6,13
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	15.462.441	13,04	19.690.154	14,28	19.581.953	14,73	17.966.458	14,07	16.304.871	14,54
Produk logam dasar	14.687.575	12,39	20.917.890	15,17	19.191.815	14,43	17.403.341	13,63	14.232.799	12,69
Karet olahan	1.260.895	1,06	1.624.157	1,18	1.423.535	1,07	1.303.276	1,02	1.094.345	0,98
Kertas dan barang dari kertas	1.941.297	1,64	1.931.670	1,40	1.914.713	1,44	2.026.246	1,59	1.730.914	1,54
Makanan olahan	5.203.802	4,39	4.572.444	3,32	4.471.081	3,36	4.392.198	3,44	3.937.824	3,51
Bahan kimia	8.642.410	7,29	9.284.444	6,73	9.219.775	6,93	9.169.681	7,18	7.544.441	6,73
Produk kayu olahan	366.068	0,31	378.610	0,27	367.416	0,28	349.575	0,27	316.110	0,28
Alas kaki	314.536	0,27	367.657	0,27	412.326	0,31	389.560	0,30	411.544	0,37
Damar tiruan, bahan plastik	6.270.210	5,29	7.139.882	5,18	7.827.678	5,89	7.913.122	6,20	6.974.388	6,22
Furnitur	261.448	0,22	365.781	0,27	371.420	0,28	340.918	0,27	325.454	0,29
Kapal laut dan sejenisnya	2.134.241	1,80	2.006.036	1,46	1.411.337	1,06	1.452.848	1,14	1.110.284	0,99
Bahan kertas	1.180.856	1,00	1.043.749	0,76	1.259.124	0,95	1.274.317	1,00	961.080	0,86
Suku cadang kendaraan	3.013.552	2,54	3.890.143	2,82	3.995.442	3,01	3.527.161	2,76	2.987.859	2,66
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	5.842.187	4,93	7.580.873	5,50	4.627.083	3,48	3.266.401	2,56	2.202.850	1,96
Emas batangan		n.a.		n.a.		n.a.		0,00		n.a.
Suku cadang mesin	1.630.158	1,37	2.615.726	1,90	2.066.901	1,55	2.167.452	1,70	1.901.927	1,70
Asam berlemak	66.289	0,06	65.820	0,05	68.853	0,05	62.857	0,05	53.913	0,05
Komputer dan bagiannya	2.707.714	2,28	2.641.069	1,92	2.758.276	2,07	2.465.939	1,93	2.312.213	2,06
Sabun mandi dan cuci	263.520	0,22	325.142	0,24	329.083	0,25	348.722	0,27	305.795	0,27
Minyak atsiri dan lainnya	683.025	0,58	849.363	0,62	1.098.519	0,83	1.014.065	0,79	952.312	0,85
Gelas dan barang dari gelas	320.015	0,27	398.987	0,29	395.404	0,30	374.295	0,29	307.386	0,27
Pupuk	2.587.220	2,18	2.617.943	1,90	1.744.110	1,31	1.822.385	1,43	2.014.494	1,80
Perlengkapan olahraga	185.708	0,16	248.572	0,18	233.121	0,18	160.270	0,13	157.148	0,14
Produk keramik	259.801	0,22	425.998	0,31	320.347	0,24	369.382	0,29	326.183	0,29
Makanan ternak	2.208.054	1,86	2.783.272	2,02	3.044.755	2,29	3.274.681	2,56	2.736.151	2,44
Margarin dan lemak lainnya	27.930	0,02	41.562	0,03	39.595	0,03	33.930	0,03	33.816	0,03
Produk farmasi	513.397	0,43	560.115	0,41	612.677	0,46	685.807	0,54	717.287	0,64
Barang dari logam mulia	11.364	0,01	29.145	0,02	22.971	0,02	20.092	0,02	16.350	0,01
Kulit dan barang dari kulit	473.948	0,40	445.709	0,32	460.467	0,35	549.072	0,43	511.157	0,46
Preparat pembasmi kuman	277.063	0,23	289.489	0,21	407.411	0,31	392.330	0,31	380.978	0,34
Pesawat udara dan bagiannya	2.014.855	1,70	2.320.848	1,68	1.495.957	1,13	675.982	0,53	797.216	0,71
Bahan celup organik sintetik	349.173	0,29	378.996	0,27	441.577	0,33	486.373	0,38	432.458	0,39

Tabel 13.

Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (cif)¹⁾ - Lanjutan

Rincian	2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Semen	65.850	0,06	206.954	0,15	240.513	0,18	249.431	0,20	191.235	0,17
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	139.190	0,12	165.928	0,12	207.286	0,16	145.336	0,11	127.339	0,11
Barang anyaman	3.740	0,00	1.751	0,00	1.354	0,00	2.387	0,00	2.804	0,00
Rotan olahan	81	0,00	5	0,00	73	0,00	44	0,00	40	0,00
Peti kemas	16.253	0,01	14.359	0,01	21.626	0,02	21.487	0,02	13.207	0,01
Gliserol dan larutan alkali	2.622	0,00	959	0,00	272	0,00	206	0,00	81	0,00
Hasil industri lainnya	27.157.012	22,90	31.192.368	22,63	30.791.657	23,16	30.278.076	23,71	26.732.157	23,83
Hasil pertambangan dan hasil sektor lainnya	1.197.691	1,01	1.130.859	0,82	1.302.202	0,98	1.521.494	1,19	1.469.492	1,31
Batubara	12.860	0,01	18.699	0,01	82.752	0,06	296.310	0,23	286.080	0,26
Biji tembaga	103.809	0,09	102.762	0,07	148.665	0,11	42.830	0,03	107.472	0,10
Biji nikel	0	0,00	11	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00
Bauksit	421	0,00	716	0,00	811	0,00	280	0,00	734	0,00
Granit	8.853	0,01	9.883	0,01	6.971	0,01	8.205	0,01	6.799	0,01
Hasil pertambangan lainnya	1.071.747	0,90	998.788	0,72	1.062.997	0,80	1.173.870	0,92	1.068.406	0,95
Hasil sektor lainnya ²⁾	458.608	0,39	474.557	0,34	429.382	0,32	457.091	0,36	265.359	0,24
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan ³⁾	71.097	0,06	43.071	0,03	32.398	0,02	25.620	0,02	706.232	0,63
Jumlah, cif	126.104.929	106,36	145.980.103	105,89	140.399.394	105,60	134.899.810	105,61	118.159.185	105,34
Asuransi dan ongkos pengangkutan	7.538.026	6,36	8.123.524	5,89	7.440.379	5,60	7.171.269	5,61	5.986.630	5,34
Jumlah, fob	118.566.903	100,00	137.856.579	100,00	132.959.014	100,00	127.728.541	100,00	112.172.555	100,00

Catatan:

¹⁾ Klasifikasi komoditi berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia.

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik, dan barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut

³⁾ Merupakan emas nonmoneter

* Data sementara

Tabel 14.

Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas ¹⁾

Ribu ton

Rincian	2010		2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Hasil pertanian	11.092	15,77	13.900	16,43	12.787	13,98	14.902	15,54	15.982	16,23	16.054	16,23
Biji coklat	27	0,04	19	0,02	24	0,03	31	0,03	109	0,11	53	0,05
Udang	3	0,00	6	0,01	7	0,01	8	0,01	7	0,01	6	0,01
Biji kopi	18	0,03	14	0,02	51	0,06	13	0,01	18	0,02	12	0,01
Ikan dan lain-lain	178	0,25	213	0,25	141	0,15	138	0,14	127	0,13	122	0,12
Rempah-rempah	25	0,04	72	0,08	57	0,06	31	0,03	32	0,03	29	0,03
Teh	11	0,01	19	0,02	23	0,03	20	0,02	14	0,01	14	0,01
Bahan nabati	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Buah-buahan	650	0,92	781	0,92	781	0,85	505	0,53	548	0,56	434	0,44
Tembakau	15	0,02	36	0,04	63	0,07	56	0,06	39	0,04	22	0,02
Sayur-sayuran	643	0,91	896	1,06	791	0,86	784	0,82	853	0,87	711	0,72
Damar dan getah damar	3	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00
Karet alam	14	0,02	9	0,01	18	0,02	19	0,02	21	0,02	27	0,03
Hasil pertanian lainnya	9.505	13,51	11.830	13,98	10.831	11,84	13.296	13,86	14.213	14,43	14.621	14,78
Hasil industri	52.306	74,37	63.747	75,35	71.648	78,31	72.661	75,76	69.652	70,73	67.625	68,38
Minyak sawit	43	0,06	23	0,03	0	0,00	65	0,07	0	0,00	8	0,01
Tekstil dan produk tekstil	984	1,40	1.075	1,27	1.252	1,37	1.317	1,37	1.358	1,38	1.316	1,33
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	865	1,23	2.380	2,81	1.207	1,32	1.080	1,13	1.022	1,04	1.014	1,03
Produk logam dasar	10.215	14,52	11.551	13,65	17.652	19,29	20.758	21,64	15.476	15,72	14.700	14,86
Karet olahan	241	0,34	329	0,39	304	0,33	426	0,44	290	0,29	274	0,28
Kertas dan barang dari kertas	2.995	4,26	3.143	3,72	3.066	3,35	3.053	3,18	3.016	3,06	2.417	2,44
Makanan olahan	3.743	5,32	5.993	7,08	5.443	5,95	4.894	5,10	4.952	5,03	5.324	5,38
Bahan kimia	7.404	10,53	7.560	8,94	8.770	9,58	8.603	8,97	8.720	8,86	8.469	8,56
Produk kayu olahan	511	0,73	703	0,83	735	0,80	776	0,81	657	0,67	547	0,55
Alas kaki	42	0,06	52	0,06	58	0,06	57	0,06	50	0,05	49	0,05
Damar tiruan, bahan plastik	2.266	3,22	3.455	4,08	3.401	3,72	3.709	3,87	3.718	3,78	3.817	3,86
Furnitur	124	0,18	142	0,17	140	0,15	142	0,15	131	0,13	140	0,14
Kapal laut dan sejenisnya	1.063	1,51	1.380	1,63	1.225	1,34	550	0,57	679	0,69	477	0,48
Bahan kertas	1.250	1,78	1.310	1,55	1.349	1,47	1.629	1,70	1.605	1,63	1.310	1,32
Suku cadang kendaraan	375	0,53	463	0,55	537	0,59	550	0,57	533	0,54	451	0,46
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	453	0,64	532	0,63	663	0,72	458	0,48	337	0,34	247	0,25
Emas batangan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Suku cadang mesin	153	0,22	204	0,24	262	0,29	187	0,20	177	0,18	168	0,17
Asam berlemak	24	0,03	31	0,04	36	0,04	59	0,06	40	0,04	42	0,04
Komputer dan bagiannya	64	0,09	60	0,07	51	0,06	49	0,05	45	0,05	47	0,05
Sabun mandi dan cuci	96	0,14	97	0,12	124	0,14	139	0,14	145	0,15	141	0,14

Tabel 14.

Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas ¹⁾ - Lanjutan

Rincian	2010		2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Minyak atsiri dan lainnya	76	0,11	83	0,10	93	0,10	113	0,12	107	0,11	101	0,10
Gelas dan barang dari gelas	302	0,43	363	0,43	403	0,44	413	0,43	386	0,39	333	0,34
Pupuk	4.936	7,02	6.457	7,63	6.285	6,87	5.483	5,72	6.679	6,78	7.376	7,46
Perlengkapan olahraga	55	0,08	73	0,09	69	0,08	62	0,06	42	0,04	41	0,04
Produk keramik	357	0,51	520	0,61	872	0,95	734	0,76	966	0,98	992	1,00
Makanan ternak	4.082	5,80	4.362	5,16	4.890	5,34	5.017	5,23	5.355	5,44	5.502	5,56
Margarin dan lemak lainnya	4	0,01	7	0,01	10	0,01	12	0,01	13	0,01	14	0,01
Produk farmasi	20	0,03	20	0,02	26	0,03	31	0,03	25	0,03	29	0,03
Barang dari logam mulia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kulit dan barang dari kulit	57	0,08	56	0,07	53	0,06	57	0,06	60	0,06	53	0,05
Preparat pembasmi kuman	55	0,08	53	0,06	53	0,06	69	0,07	71	0,07	72	0,07
Pesawat udara dan bagiannya	8	0,01	8	0,01	37	0,04	2	0,00	2	0,00	1	0,00
Bahan celup organik sintetik	67	0,10	63	0,07	70	0,08	78	0,08	77	0,08	70	0,07
Semen	1.533	2,18	1.391	1,64	3.370	3,68	3.685	3,84	4.066	4,13	3.373	3,41
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	7	0,01	12	0,01	13	0,01	17	0,02	13	0,01	9	0,01
Barang anyaman	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00
Rotan olahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Peti kemas	2	0,00	2	0,00	3	0,00	5	0,01	4	0,00	4	0,00
Gliserol dan larutan alkali	8	0,01	8	0,01	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hasil industri lainnya	7.825	11,13	9.782	11,56	9.125	9,97	8.382	8,74	8.833	8,97	8.694	8,79
Hasil pertambangan dan hasil sektor lainnya	6.930	9,85	6.950	8,22	7.061	7,72	8.342	8,70	12.839	13,04	15.223	15,39
Batubara	56	0,08	48	0,06	65	0,07	496	0,52	2.260	2,30	2.814	2,85
Biji tembaga	0	0,00	33	0,04	39	0,04	73	0,08	23	0,02	63	0,06
Biji nikel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bauksit	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00
Granit	24	0,03	29	0,03	42	0,05	27	0,03	26	0,03	19	0,02
Hasil pertambangan lainnya	6.848	9,74	6.839	8,08	6.914	7,56	7.744	8,07	10.529	10,69	12.326	12,46
Hasil sektor lainnya ²⁾	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00
Jumlah	70.330	100,00	84.598	100,00	91.498	100,00	95.907	100,00	98.474	100,00	98.903	100,00

Catatan:

¹⁾ Klasifikasi komoditi berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

* Data sementara

Tabel 15.

Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (cif) ¹⁾

Ribuan dolar AS

Rincian	2010		2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Amerika	12.047.861	12,21	15.688.248	12,44	16.193.572	11,09	15.874.282	11,31	14.697.090	10,89	13.502.861	11,43
Amerika Utara	8.687.002	8,80	11.068.663	8,78	11.382.731	7,80	10.871.756	7,74	9.982.751	7,40	9.190.892	7,78
Amerika Serikat	7.450.054	7,55	9.064.606	7,19	9.556.941	6,55	8.766.560	6,24	8.073.713	5,98	7.568.469	6,41
Kanada	1.236.948	1,25	1.998.298	1,58	1.809.859	1,24	2.104.103	1,50	1.907.658	1,41	1.620.667	1,37
Amerika Utara Lainnya	0	-	5.759	0,00	15.931	0,01	1.094	0,00	1.380	0,00	1.756	0,00
Amerika Tengah dan Selatan	3.360.859	3,41	4.619.585	3,66	4.810.841	3,30	5.002.526	3,56	4.714.339	3,49	4.311.968	3,65
Argentina	936.672	0,95	1.577.916	1,25	1.749.601	1,20	1.683.663	1,20	1.460.787	1,08	1.298.541	1,10
Brasil	1.682.622	1,71	1.789.636	1,42	1.934.842	1,33	2.205.400	1,57	2.548.100	1,89	2.425.589	2,05
Meksiko	203.240	0,21	394.537	0,31	566.649	0,39	516.890	0,37	186.888	0,14	197.406	0,17
Amerika Tengah dan Selatan lainnya	538.326	0,55	857.496	0,68	559.748	0,38	596.573	0,42	518.563	0,38	390.432	0,33
Eropa	11.463.569	11,62	14.176.998	11,24	17.366.142	11,90	17.387.563	12,38	15.509.072	11,50	13.767.419	11,65
Uni Eropa	8.745.835	8,86	11.045.709	8,76	13.533.662	9,27	13.374.868	9,53	12.665.808	9,39	11.278.442	9,55
Belanda	597.250	0,61	808.102	0,64	843.705	0,58	865.846	0,62	908.390	0,67	792.296	0,67
Belgia	533.788	0,54	570.577	0,45	614.244	0,42	649.753	0,46	581.431	0,43	556.595	0,47
Inggris	809.153	0,82	1.030.182	0,82	1.280.271	0,88	1.063.312	0,76	898.540	0,67	816.292	0,69
Italia	839.860	0,85	1.089.934	0,86	1.506.481	1,03	1.680.403	1,20	1.720.335	1,28	1.417.318	1,20
Jerman	2.654.621	2,69	3.085.809	2,45	4.039.148	2,77	4.377.945	3,12	4.095.067	3,04	3.440.767	2,91
Perancis	1.128.030	1,14	1.544.263	1,22	1.607.593	1,10	1.525.163	1,09	1.292.626	0,96	1.315.149	1,11
Spainyol	305.056	0,31	390.512	0,31	521.227	0,36	573.305	0,41	553.596	0,41	472.661	0,40
Uni Eropa lainnya ²⁾	1.878.076	1,90	2.526.330	2,00	3.120.994	2,14	2.639.142	1,88	2.615.822	1,94	2.467.364	2,09
Rusia	1.051.174	1,07	1.255.824	1,00	1.743.576	1,19	2.038.204	1,45	1.184.540	0,88	904.150	0,77
Turki	286.002	0,29	334.116	0,26	409.520	0,28	257.638	0,18	259.152	0,19	248.968	0,21
Eropa lainnya	1.380.558	1,40	1.541.349	1,22	1.679.384	1,15	1.716.853	1,22	1.399.572	1,04	1.335.859	1,13
Asia dan Timur Tengah	68.553.280	69,47	88.138.518	69,89	104.529.392	71,61	99.498.165	70,87	96.425.276	71,48	84.340.679	71,38
ASEAN	18.551.532	18,80	25.074.815	19,88	31.711.907	21,72	30.210.287	21,52	29.605.452	21,95	25.989.378	22,00
Brunei Darussalam	5.878	0,01	8.941	0,01	14.703	0,01	6.406	0,00	26.161	0,02	26.744	0,02
Filipina	585.439	0,59	751.789	0,60	795.015	0,54	770.294	0,55	693.242	0,51	681.157	0,58
Kamboja	3.995	0,00	7.324	0,01	11.053	0,01	17.752	0,01	18.722	0,01	21.133	0,02
Laos	615	0,00	1.292	0,00	3.278	0,00	7.543	0,01	51.265	0,04	1.027	0,00
Malaysia	4.035.334	4,09	5.218.598	4,14	6.339.805	4,34	5.913.357	4,21	5.752.177	4,26	4.990.782	4,22
Myanmar	31.617	0,03	69.558	0,06	63.359	0,04	72.997	0,05	122.243	0,09	159.685	0,14
Singapura	5.460.689	5,53	6.548.829	5,19	10.745.357	7,36	10.117.172	7,21	10.050.010	7,45	8.952.779	7,58
Thailand	7.325.871	7,42	10.135.104	8,04	11.221.263	7,69	10.624.689	7,57	9.685.779	7,18	8.009.840	6,78
Vietnam	1.102.095	1,12	2.333.380	1,85	2.518.074	1,72	2.680.076	1,91	3.205.853	2,38	3.146.230	2,66
Hong Kong SAR	1.759.224	1,78	2.338.465	1,85	1.897.323	1,30	1.956.494	1,39	1.892.903	1,40	1.807.478	1,53
India	2.690.908	2,73	3.856.988	3,06	3.991.576	2,73	3.756.065	2,68	3.559.370	2,64	2.666.966	2,26
Irak	1.176	0,00	703	0,00	200	0,00	49	0,00	342	0,00	243	0,00
Jepang	15.867.587	16,08	18.461.913	14,64	22.624.472	15,50	18.934.319	13,49	16.805.848	12,46	13.226.019	11,19
Korea Selatan	5.457.507	5,53	7.243.088	5,74	8.276.805	5,67	8.787.367	6,26	7.749.581	5,74	6.277.854	5,31
Pakistan	70.303	0,07	190.042	0,15	271.276	0,19	162.555	0,12	158.655	0,12	173.453	0,15
Tiongkok	19.052.020	19,31	24.222.690	19,21	29.030.885	19,89	29.488.605	21,00	30.473.168	22,59	29.178.518	24,69
Saudi Arabia	742.071	0,75	948.559	0,75	1.021.447	0,70	973.749	0,69	967.809	0,72	673.083	0,57
Taiwan, Provinsi China	2.794.787	2,83	3.681.422	2,92	4.198.366	2,88	4.142.844	2,95	3.628.231	2,69	3.106.748	2,63
Asia dan Timur Tengah lainnya	1.566.165	1,59	2.119.833	1,68	1.505.136	1,03	1.085.831	0,77	1.583.918	1,17	1.240.940	1,05

Tabel 15.

Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (cif)¹⁾ - Lanjutan

Rincian	2010		2011		2012		2013		2014		2015*	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Australia dan Oseania	4.925.665	4,99	5.756.139	4,56	5.767.039	3,95	5.761.917	4,10	6.365.424	4,72	5.333.685	4,51
Australia	4.147.752	4,20	4.985.847	3,95	5.004.988	3,43	4.879.329	3,48	5.485.538	4,07	4.675.877	3,96
New Zealand	722.892	0,73	726.069	0,58	692.249	0,47	796.396	0,57	837.699	0,62	628.441	0,53
Australia dan Oseania Lainnya	55.020	0,06	44.223	0,04	69.803	0,05	86.192	0,06	42.187	0,03	29.367	0,02
Afrika	1.158.485	1,17	1.895.420	1,50	1.663.061	1,14	1.473.965	1,05	1.475.904	1,09	971.285	0,82
Afrika Selatan	520.756	0,53	687.657	0,55	649.171	0,44	622.865	0,44	475.771	0,35	230.613	0,20
Afrika lainnya	637.729	0,65	1.207.764	0,96	1.013.890	0,69	851.101	0,61	1.000.133	0,74	740.672	0,63
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan ³⁾	537.468	0,54	449.606	0,36	460.896	0,32	403.501	0,29	427.043	0,32	243.255	0,21
Jumlah, cif	98.686.329	100,00	126.104.929	100,00	145.980.103	100,00	140.399.394	100,00	134.899.810	100,00	118.159.185	100,00

Catatan:

¹⁾ Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

²⁾ Pemekaran menjadi 27 negara sejak Bulgaria dan Romania bergabung dengan Uni Eropa pada Januari 2007

³⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki

* Data sementara

Tabel 16.

Nilai Ekspor Minyak dan Gas (fob)

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
Nilai Eskpor (juta dolar AS)						
Minyak Bumi dan produknya	11.635	14.821	14.648	17.889	13.806	7.823
Gas	12.840	17.663	17.860	15.700	14.946	8.592
- LNG	11.708	15.204	12.448	10.568	10.294	6.135
- LPG	8	74	9	11	4	7
- Gas Alam	900	2.164	5.402	5.121	4.648	2.444
- Gas Lainnya	224	220	0	0	0	6
Total	24.475	32.484	32.507	33.588	28.752	16.415
Volume Ekspor						
Minyak Bumi dan produknya (juta barel)	156	149	132	170	143	156
Gas	1.896	1.711	1.411	1.253	1.186	1.169
- LNG (juta MMBTU)	1.506	1.264	931	888	834	841
- LPG (ribu MT)	11	81	8	10	4	10
- Gas Alam (juta MMBTU)	123	207	472	355	347	317
- Gas Lainnya	256	158	0	0	0	0
Total	2.051	1.860	1.543	1.422	1.329	1.324

MMBTU: Million British Thermal Unit

MT: Metric Ton

* Data sementara

** Data sangat sementara

Tabel 17.

Uang Beredar

Miliar rupiah

Akhir Periode	M1 ¹⁾		Uang Kuasi ²⁾		M2 ³⁾		
	Posisi	Pangsa (%)	Posisi	Pangsa (%)	Posisi	Perubahan (%)	
						Tahunan	Triwulanan
2009	515.824	24,09	1.622.055	75,75	2.141.384	12,95	6,09
2010	605.411	24,52	1.856.720	75,12	2.471.206	15,32	8,55
2011	722.991	25,13	2.139.840	74,37	2.877.220	16,43	8,85
2012	841.652	25,45	2.455.435	74,24	3.307.508	14,95	5,73
2013	887.084	23,78	2.820.521	75,61	3.730.409	12,79	4,08
Januari	787.860	24,10	2.470.101	75,57	3.268.789	14,41	
Februari	786.549	23,98	2.483.011	75,69	3.280.420	15,02	
Maret	810.055	24,38	2.500.342	75,25	3.322.529	14,01	0,45
April	832.213	24,76	2.515.813	74,85	3.360.928	14,72	
Mei	822.876	24,02	2.588.094	75,54	3.426.305	14,42	
Juni	858.499	25,15	2.543.285	74,51	3.413.379	11,81	2,73
Juli	879.986	25,10	2.608.175	74,38	3.506.574	14,69	
Agustus	855.783	24,43	2.625.946	74,98	3.502.420	13,29	
September	867.715	24,21	2.691.972	75,11	3.584.081	14,57	5,00
Oktober	856.171	23,94	2.697.734	75,42	3.576.869	13,03	
November	870.412	24,07	2.720.945	75,25	3.616.049	12,72	
Desember	887.084	23,78	2.820.521	75,61	3.730.409	12,79	4,08
2014							
Januari	842.678	23,07	2.787.449	76,32	3.652.349	11,73	
Februari	834.532	22,96	2.787.035	76,67	3.635.060	10,81	
Maret	853.502	23,37	2.785.176	76,25	3.652.531	9,93	(2,09)
April	880.470	23,66	2.828.686	76,00	3.721.882	10,74	
Mei	906.727	23,98	2.860.135	75,65	3.780.955	10,35	
Juni	945.718	24,51	2.903.415	75,26	3.857.962	13,02	5,62
Juli	918.566	23,63	2.959.732	76,14	3.887.407	10,86	
Agustus	895.827	23,05	2.982.674	76,74	3.886.520	10,97	
September	949.168	23,67	3.044.842	75,93	4.010.147	11,89	3,94
Oktober	940.349	23,37	3.066.421	76,19	4.024.489	12,51	
November	955.535	23,44	3.099.350	76,03	4.076.670	12,74	
Desember	942.221	22,58	3.209.475	76,90	4.173.327	11,87	4,07
2015							
Januari	918.079	21,99	3.233.881	77,46	4.174.826	14,31	
Februari	927.848	22,00	3.278.945	77,73	4.218.123	16,04	
Maret	957.580	22,55	3.275.499	77,14	4.246.361	16,26	1,75
April	959.376	22,44	3.302.204	77,23	4.275.711	14,88	
Mei	980.915	22,87	3.293.147	76,79	4.288.369	13,42	
Juni	1.039.518	23,85	3.305.641	75,84	4.358.802	12,98	2,65
Juli	1.031.906	23,60	3.325.908	76,05	4.373.208	12,50	
Agustus	1.026.323	23,30	3.362.148	76,34	4.404.085	13,32	
September	1.063.039	23,58	3.426.343	76,00	4.508.603	12,43	3,44
Oktober	1.036.311	23,32	3.391.260	76,33	4.443.078	10,40	
November	1.051.191	23,61	3.386.209	76,05	4.452.325	9,21	
Desember	1.055.440	23,20	3.479.961	76,50	4.548.800	9,00	0,88

¹⁾ Terdiri atas uang kartal dan giro²⁾ Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan, dalam rupiah dan valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk³⁾ Terdiri atas uang beredar dalam arti sempit (M1), uang kuasi, dan surat berharga selain saham dengan sisa jangka waktu s.d 1 tahun

Tabel 18.

Perubahan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Miliar rupiah

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
						I	II	III	IV
Uang Beredar									
M2	2.471.206	2.877.220	3.307.508	3.730.409	4.173.327	4.246.361	4.358.802	4.508.603	4.548.800
M1	605.411	722.991	841.652	887.084	942.221	957.580	1.039.518	1.063.039	1.055.440
Kartal	260.227	307.760	361.897	399.609	419.262	382.005	409.713	428.860	469.534
Giral	345.184	415.231	479.755	487.475	522.960	575.576	629.805	634.178	585.906
Kuasi	1.856.720	2.139.840	2.455.435	2.820.521	3.209.475	3.275.499	3.305.641	3.426.343	3.479.961
Faktor yang Memengaruhi	2.471.206	2.877.220	3.307.508	3.730.409	4.173.327	4.246.361	4.358.802	4.508.603	4.548.800
Aktiva Luar Negeri Bersih	865.121	912.174	965.442	1.011.361	1.105.783	1.189.181	1.190.279	1.232.071	1.176.638
Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat	368.717	351.177	389.827	406.611	416.608	426.449	408.232	482.396	491.127
Tagihan kepada Sektor Lainnya	1.910.022	2.383.823	2.917.452	3.526.612	3.961.583	3.981.351	4.157.396	4.270.057	4.318.126
Tagihan kepada Pemerintah Daerah	1.594	1.410	2.790	4.727	6.635	6.271	5.889	5.999	6.516
Tagihan kepada Sektor Swasta	1.684.207	2.118.376	2.581.327	3.098.305	3.488.677	3.509.105	3.651.282	3.759.846	3.822.128
Aktiva Lainnya Bersih	-121.460	-29.895	17.778	34.146	49.733	32.309	25.783	34.972	57.313

Tabel 19.

Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank¹⁾

Persen

Jangka Waktu	Desember 2010		Desember 2011		Desember 2012		Desember 2013		Desember 2014		Desember 2015	
	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas
Bank Persero												
1 bulan	6,48	2,08	6,04	1,32	5,22	0,95	7,15	1,11	8,12	1,81	7,14	0,73
3 bulan	6,73	2,07	6,62	2,11	5,54	1,11	7,60	1,38	8,73	1,61	7,25	0,73
6 bulan	6,55	2,05	6,54	2,05	5,58	1,98	6,84	1,37	8,83	1,99	7,56	1,21
12 bulan	6,93	2,78	6,94	1,47	5,91	1,66	6,88	1,69	8,80	1,75	7,87	1,43
24 bulan	7,66	2,62	6,40	1,25	5,87	1,23	8,19	0,94	9,34	0,65	9,09	1,85
Bank Swasta Nasional												
1 bulan	6,94	1,91	6,62	1,81	5,96	2,06	8,53	2,48	9,04	2,34	7,89	1,23
3 bulan	7,06	1,85	6,91	2,03	5,81	2,14	7,53	2,51	9,11	2,53	8,36	1,36
6 bulan	7,06	1,81	7,28	2,41	6,18	2,40	7,61	2,64	9,54	2,59	8,84	1,68
12 bulan	6,83	2,24	7,05	1,93	5,82	2,47	6,79	2,39	8,58	2,52	8,36	1,64
24 bulan	9,19	2,28	5,83	0,41	4,23	2,63	7,43	3,28	7,33	2,67	9,09	2,52
Bank Pemerintah Daerah												
1 bulan	8,07	1,98	7,39	2,09	5,92	2,03	7,55	2,60	8,05	2,76	7,81	1,42
3 bulan	8,59	2,00	8,04	6,29	6,69	2,48	8,41	2,82	9,03	2,64	8,26	1,11
6 bulan	9,99	1,49	8,24	1,00	6,60	1,55	7,81	1,45	9,35	1,09	8,42	1,10
12 bulan	12,07	1,30	8,41	1,28	7,08	1,04	7,32	1,80	9,10	1,52	9,21	0,62
24 bulan	7,73	-	7,63	-	6,65	1,20	7,44	1,15	7,70	1,04	7,68	0,53
Bank Asing & Campuran												
1 bulan	7,69	2,64	5,00	1,19	4,61	1,51	7,51	1,67	7,51	1,37	7,36	0,60
3 bulan	7,16	1,79	5,74	1,62	5,54	1,90	7,98	1,52	8,57	1,41	8,11	0,78
6 bulan	6,97	2,59	6,47	1,74	6,04	2,04	8,17	2,02	9,23	1,52	8,71	0,96
12 bulan	6,81	2,19	6,64	1,51	6,19	1,86	6,90	2,42	9,50	2,40	8,86	1,37
24 bulan	4,04	2,50	6,64	1,17	6,20	0,92	9,18	1,46	10,01	1,40	9,62	1,74
Bank Umum												
1 bulan	6,83	2,05	6,35	1,53	5,58	1,48	7,92	1,80	8,58	2,00	7,60	1,00
3 bulan	7,06	1,93	6,81	1,90	5,76	1,86	7,61	2,07	8,94	2,18	7,99	1,13
6 bulan	7,20	2,03	7,19	2,11	6,05	2,20	7,49	2,10	9,30	2,23	8,54	1,38
12 bulan	7,88	2,56	7,06	1,69	6,09	2,09	6,89	2,14	8,79	2,25	8,47	1,54
24 bulan	8,11	2,43	6,33	0,80	5,47	1,63	8,17	2,01	9,26	1,96	9,07	2,22

¹⁾ Rata-rata tertimbang pada akhir periode

Tabel 20.

Penerbitan, Pelunasan, dan Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Miliar rupiah

Akhir Periode	Penerbitan	Pelunasan	Posisi
Januari - Desember 2004	1.194.384	1.197.054	102.732
Januari - Desember 2005	1.119.549	1.100.922	70.047
Januari - Desember 2006	2.145.485	2.010.322	207.800
Januari - Desember 2007	3.204.778	3.163.851	248.727
Januari - Desember 2008	2.113.381	2.181.379	2.348.711
2009			
Januari	156.141	161.903	206.450
Februari	134.384	125.951	235.224
Maret	107.870	109.849	233.754
April	141.864	141.112	230.285
Mei	85.000	94.850	232.073
Juni	97.942	88.814	231.392
Juli	150.318	147.013	235.519
Agustus	113.259	125.519	234.585
September	187.680	177.035	217.287
Oktober	198.801	180.199	240.631
November	184.877	173.205	243.719
Desember	247.555	238.642	253.756
2010			
Januari	232.791	192.349	295.965
Februari	221.447	213.564	303.847
Maret	183.931	189.868	297.910
April	150.270	104.374	343.806
Mei	78.287	123.120	298.973
Juni	91.466	120.781	269.658
Juli	61.048	95.981	234.724
Agustus	73.625	38.100	270.249
September	64.161	82.625	251.785
Oktober	36.449	63.227	225.006
November	59.999	71.445	213.561
Desember	55.000	68.448	200.113
2011			
Januari	25.000	29.799	195.314
Februari	14.000	14.680	194.635
Maret	45.525	10.012	230.148
April	23.422	23.499	230.071
Mei	12.281	44.481	197.871
Juni	15.000	26.925	185.946
Juli	4.000	7.950	181.996
Agustus	7.000	17.768	171.228
September	8.000	30.000	149.228
Oktober	13.841	20.000	143.069
November	8.941	14.000	138.010
Desember	27.292	45.525	119.777
2012			
Januari	10.000	23.422	106.355
Februari	5.000	12.281	99.074
Maret	10.423	15.000	94.497
April	5.000	4.000	95.497
Mei	7.167	7.000	95.664
Juni	2.070	8.000	89.734
Juli	6.285	13.841	82.178
Agustus	8.240	8.941	81.477
September	14.003	27.292	68.188

Akhir Periode	Penerbitan	Pelunasan	Posisi
Oktober	11.372	10.000	69.560
November	11.245	5.000	75.805
Desember	13.491	10.423	78.873
2013			
Januari	10.399	5.000	84.272
Februari	10.965	7.167	88.070
Maret	6.000	2.070	91.999
April	9.665	6.285	95.379
Mei	7.590	8.240	94.729
Juni	1.194	14.003	81.920
Juli	3.553	11.372	74.101
Agustus	3.223	11.245	66.079
September	12.386	13.491	64.974
Oktober	34.685	10.399	89.260
November	11.000	10.965	89.295
Desember	8.097	6.000	91.392
2014			
Januari	9.720	9.665	91.447
Februari	8.000	7.590	91.857
Maret	12.846	1.194	103.510
April	10.609	3.553	110.566
Mei	7.000	3.223	114.342
Juni	8.000	12.386	109.957
Juli	10.000	34.685	85.272
Agustus	8.000	11.000	82.272
September	5.000	8.097	79.175
Oktober	12.275	9.720	81.730
November	8.875	8.000	82.605
Desember	19.140	12.846	88.899
2015			
Januari			88.290
Februari			87.290
Maret			87.290
April			77.290
Mei			69.290
Juni			64.290
Juli			52.015
Agustus			55.155
September			42.631
Oktober			39.016
November			37.510
Desember			32.300

Keterangan:

Penerbitan SBI dimulai pada bulan Februari 1984, dan sejak Juli 1998 penjualan SBI dilakukan melalui lelang dengan sistem SOR (*Stop Out Rate*)

Tabel 21.

Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank ¹⁾

Persen

Akhir Periode	Bank Persero		Bank Pemerintah Daerah		Bank Swasta Nasional		Bank Asing & Campuran		Bank Umum	
	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi
2010	13,06	10,81	13,57	12,44	13,02	13,20	10,23	11,82	12,83	12,28
2011	12,37	10,39	13,52	12,40	12,34	12,64	8,71	14,89	12,16	12,04
2012										
Maret	12,19	10,12	13,62	12,40	12,27	12,42	8,25	9,44	12,01	11,62
Juni	12,00	9,98	13,63	12,33	12,02	12,23	7,98	9,54	11,79	11,46
September	11,91	9,94	13,76	12,29	11,95	12,10	7,96	9,58	11,70	11,36
Desember	11,70	10,08	13,66	12,25	11,68	11,88	7,90	9,47	11,49	11,27
2013										
Januari	11,75	10,13	13,60	12,18	11,68	11,88	8,00	9,55	11,49	11,29
Februari	11,67	10,09	13,71	12,20	11,64	11,87	8,03	9,55	11,45	11,27
Maret	11,72	10,07	13,44	12,20	11,58	11,82	8,04	9,44	11,44	11,24
April	11,75	10,07	13,66	12,25	11,53	11,77	8,05	9,45	11,44	11,21
Mei	11,78	10,04	13,63	12,27	11,55	11,72	8,03	9,43	11,46	11,17
Juni	11,79	10,35	13,60	12,24	11,46	11,67	8,11	9,49	11,41	11,14
Juli	11,89	10,46	13,59	12,23	11,85	11,86	8,46	9,66	11,66	11,29
Agustus	11,69	10,54	13,62	12,26	11,90	11,93	8,74	9,90	11,63	11,37
September	11,71	10,53	13,61	12,27	12,15	12,16	9,23	10,24	11,80	11,50
Oktober	11,86	10,72	13,46	12,23	12,26	12,28	9,47	10,46	11,93	11,65
November	11,94	10,79	13,46	12,20	12,42	12,39	9,69	10,55	12,06	11,73
Desember	11,94	10,84	13,37	12,23	12,55	12,51	9,84	10,71	12,12	11,82
2014										
Januari	12,05	10,91	13,34	12,21	12,68	12,63	9,96	10,87	12,23	11,92
Februari	12,06	10,96	13,34	12,27	12,86	12,69	10,09	11,04	12,33	11,98
Maret	12,09	10,98	13,36	12,23	12,87	12,72	10,20	10,97	12,37	12,00
April	12,23	11,04	13,30	12,34	12,79	12,77	10,19	10,99	12,38	12,06
Mei	12,38	11,13	13,19	12,18	13,19	12,96	10,25	11,04	12,63	12,18
Juni	12,26	11,20	13,24	12,21	13,29	13,02	10,27	11,00	12,63	12,24
Juli	12,34	11,40	13,27	12,22	13,36	13,06	10,41	10,78	12,70	12,32
Agustus	12,42	11,43	13,21	12,22	13,43	13,07	10,44	10,91	12,76	12,34
September	12,44	11,44	13,24	12,23	13,43	13,08	10,44	10,94	12,78	12,34
Oktober	12,52	11,48	13,72	12,51	13,39	13,13	10,49	10,94	12,82	12,39
November	12,53	11,48	13,84	12,40	13,41	13,13	10,41	10,90	12,84	12,38
Desember	12,50	11,47	13,63	12,38	13,36	13,11	10,49	10,93	12,79	12,36
2015										
Januari	12,52	11,47	13,56	12,25	13,31	13,02	10,39	10,59	12,76	12,29
Februari	12,55	11,45	13,38	12,13	13,29	13,03	10,26	10,51	12,74	12,27
Maret	12,65	11,49	13,71	12,37	13,36	13,06	10,26	10,47	12,82	12,32
April	12,64	11,45	13,71	12,36	13,25	13,06	10,23	10,77	12,75	12,32
Mei	12,61	11,45	13,72	12,38	13,20	13,02	10,21	10,75	12,72	12,30
Juni	12,60	11,46	13,74	12,39	13,17	13,02	10,18	10,60	12,70	12,29
Juli	12,54	11,46	13,56	12,18	13,14	12,98	10,28	10,68	12,65	12,26
Agustus	12,59	11,45	13,47	12,45	13,03	12,87	10,30	10,67	12,63	12,21
September	12,48	11,44	13,47	12,52	13,00	12,83	10,51	10,78	12,58	12,19
Oktober	12,43	11,42	13,45	12,25	12,98	12,85	10,72	10,95	12,58	12,19
November	12,36	11,40	13,66	12,44	12,92	12,77	10,79	11,13	12,55	12,14
Desember	12,30	11,35	13,50	12,19	12,82	12,77	10,79	11,25	12,46	12,12

¹⁾ Rata-rata tertimbang

Tabel 22. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia

Miliar rupiah

Satuan Kerja	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Wilayah Sumatera												
Nanggroe Aceh Darussalam	1.163,6	4.569,7	2.308,0	6.338,1	2.619,6	6.378,0	4.035,8	8.242,4	4.567,0	8.632,4	4.709,8	9.636,6
Sumatera Utara	16.598,4	16.370,3	23.237,8	22.176,5	25.980,6	22.494,6	26.674,6	22.284,0	30.499,9	26.389,3	30.253,6	27.877,1
Sumatera Barat	6.896,3	5.458,4	9.384,5	5.299,7	11.192,1	6.434,3	13.151,6	7.204,7	14.102,9	7.060,0	13.308,8	7.470,7
Riau	1.383,3	9.939,0	3.012,5	12.434,1	4.447,3	13.013,8	6.286,8	15.974,0	6.356,3	15.157,5	7.156,5	15.788,6
Kepulauan Riau	650,4	4.789,3	1.426,3	5.818,6	2.236,0	6.965,6	2.295,2	9.257,9	2.563,0	10.231,5	3.217,7	9.802,5
Jambi	874,0	4.686,6	1.867,6	5.216,7	2.138,5	5.013,2	3.864,9	8.018,7	5.169,1	8.379,3	4.978,1	8.324,5
Sumatera Selatan	9.985,9	14.927,9	7.820,3	14.523,6	9.126,0	15.600,1	8.056,5	14.350,6	10.039,8	13.262,9	10.797,2	13.483,7
Bengkulu	672,4	2.241,8	1.153,1	2.560,5	1.201,3	2.959,3	2.642,0	4.262,8	3.261,5	4.561,9	2.791,3	4.851,5
Lampung	5.053,3	4.855,1	7.690,1	5.724,4	6.969,2	6.375,6	7.274,3	8.251,6	9.450,1	8.341,1	8.107,5	9.945,2
Bangka Belitung									13,7	322,1	1.176,6	2.004,8
Wilayah DKI Jakarta	52.064,5	69.187,7	62.958,0	101.604,4	76.664,9	136.466,6	84.525,8	149.240,8	92.103,0	152.275,9	100.424,8	163.749,4
Wilayah Jawa (selain DKI Jakarta)	83.684,9	49.642,1	123.916,7	83.511,4	160.482,3	111.362,6	200.722,0	137.567,4	217.301,9	147.069,0	230.140,4	171.567,5
Jawa Barat	26.044,3	11.352,7	43.774,9	20.781,8	60.629,0	28.894,9	72.420,8	35.821,4	78.660,2	40.856,6	81.302,7	47.062,7
Jawa Tengah	25.451,4	11.256,7	35.136,8	19.975,1	43.298,1	28.492,9	57.317,7	37.673,4	60.475,4	39.110,2	65.198,1	46.840,5
D.I. Yogyakarta	3.374,8	3.775,1	6.489,8	7.537,8	9.172,7	9.486,0	13.984,1	12.072,6	13.890,7	13.171,1	14.831,2	14.079,7
Jawa Timur	28.814,4	23.257,6	38.515,2	35.216,7	47.382,5	44.488,8	56.999,4	52.000,1	64.275,6	53.931,2	68.808,4	63.584,7
Wilayah Kawasan Timur Indonesia												
Bali	3.208,1	5.004,2	6.394,3	8.911,8	8.202,5	10.781,8	10.433,2	13.145,0	11.599,9	13.103,6	13.071,7	14.470,6
Nusa Tenggara Barat	1.160,9	2.491,0	1.802,6	3.818,7	3.675,7	4.379,1	4.516,4	5.179,4	5.694,4	5.619,5	6.285,0	6.727,9
Nusa Tenggara Timur	1.826,0	2.987,9	2.125,2	3.693,1	2.735,0	4.259,6	3.168,8	4.708,7	3.512,4	4.663,1	3.651,2	5.529,6
Kalimantan Barat	1.159,3	4.271,0	2.830,8	5.221,4	3.385,7	5.698,1	4.029,1	6.011,1	5.942,5	6.735,8	6.675,5	8.485,6
Kalimantan Tengah	828,5	5.343,5	778,8	6.849,9	1.134,8	7.740,6	1.896,7	8.031,5	1.887,4	8.309,8	3.546,9	10.190,2
Kalimantan Selatan	4.324,5	3.989,2	5.369,1	5.125,7	7.311,0	5.579,8	8.471,1	6.419,1	9.613,8	6.264,8	9.558,4	6.754,6
Kalimantan Timur	2.127,5	9.392,0	4.293,3	12.337,5	5.743,2	14.425,7	7.542,2	17.550,8	8.935,6	17.425,6	9.646,0	16.514,4
Sulawesi Utara	4.763,2	5.354,5	5.671,0	6.606,3	6.634,6	6.375,0	7.436,4	4.738,8	7.374,5	7.207,1	6.286,3	7.202,2
Sulawesi Tengah	1.149,7	3.384,8	1.562,9	4.017,5	1.884,8	4.457,9	2.585,6	5.045,5	3.000,1	5.731,1	2.593,3	5.309,8
Sulawesi Selatan	4.942,3	4.412,4	10.593,5	8.967,2	13.701,5	11.872,6	16.805,3	14.149,9	19.384,3	15.645,6	19.583,1	16.235,7
Sulawesi Tenggara	603,7	2.132,8	659,4	2.888,8	963,6	2.950,2	1.392,7	3.511,4	2.255,7	3.537,5	2.384,8	4.715,8
Maluku Utara	357,5	1.295,3	586,2	1.631,0	632,6	1.677,2	895,9	2.016,6	1.005,8	1.815,6	1.006,5	2.397,0
Maluku	968,0	1.892,7	1.272,8	2.352,4	1.147,1	2.689,7	1.388,7	2.716,3	1.781,0	2.865,8	1.789,5	3.123,3
Papua	4.561,7	8.699,5	4.710,1	9.986,1	6.046,8	13.600,2	6.785,9	12.128,3	6.793,7	11.298,5	6.099,0	11.623,5
Papua Barat									11,7	170,1	517,5	1.898,6
Jumlah												

Keterangan: KPw Bangka Belitung dan KPw Papua Barat mulai beroperasi pada tahun 2014.

Tabel 23.

Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Persen, yoy

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015e
Dunia	5,4	4,2	3,4	3,3	3,4	3,1
Negara Industri Maju	3,1	1,7	1,2	1,1	1,8	1,9
Amerika Serikat	2,5	1,6	2,2	1,5	2,4	2,4
Kawasan Euro	2,0	1,6	-0,8	-0,3	0,9	1,6
Jerman	3,9	3,7	0,6	0,4	1,6	1,3
Perancis	2,0	2,1	0,2	0,7	0,2	1,4
Italia	1,7	0,6	-2,8	-1,7	-0,4	1,0
Jepang	4,7	-0,5	1,7	1,6	0,0	0,6
Inggris	1,9	1,6	0,7	1,7	2,9	2,2
Kanada	3,4	3,0	1,9	2,0	2,5	1,2
Negara Berkembang dan <i>Emerging Markets</i>	7,5	6,3	5,2	5,0	4,6	4,0
Afrika Sub-Sahara	6,6	5,0	4,3	5,2	5,0	3,5
Amerika Latin dan Karibia	6,1	4,9	3,1	2,9	1,3	-0,3
Negara Berkembang dan <i>Emerging Asia</i>	9,6	7,9	6,8	7,0	6,8	6,6
Tiongkok	10,6	9,5	7,7	7,7	7,3	6,9
Negara Berkembang dan <i>Emerging Eropa</i>	4,8	5,4	1,3	2,9	2,8	3,4
<i>Commonwealth of Independent States</i>	4,6	4,8	3,4	2,2	1,0	-2,8
Rusia	4,5	4,3	3,4	1,3	0,6	-3,7
Timur Tengah dan Afrika Utara	5,2	4,6	5,0	2,1	2,8	2,5

Sumber: IMF-World Economic Outlook Database January 2016 dan Bloomberg.

Perubahan tahunan, persen

Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dunia	6,4	2,8	3,8	5,2	4,2	3,9	3,5	3,3
Negara Maju	3,6	0,4	1,7	2,7	2,1	1,5	1,6	0,4
Amerika Serikat	3,8	-0,3	1,6	3,1	2,1	1,5	1,6	0,1
Kawasan Euro	3,3	0,3	1,6	2,7	2,5	1,4	0,4	0,0
Jerman	2,7	0,2	1,1	2,5	2,1	1,6	0,8	0,1
Perancis	3,2	0,1	1,7	2,3	2,2	1,0	0,6	0,1
Italia	3,5	0,8	1,6	2,9	3,3	1,2	0,2	0,1
Jepang	1,4	-1,3	-0,7	-0,3	0,0	0,3	2,7	0,8
Inggris	3,6	2,2	3,3	4,5	2,8	2,6	1,5	0,0
Kanada	2,4	0,3	1,8	2,9	1,5	2,0	2,4	1,3
<i>Emerging Economies</i>	8,9	4,5	5,7	6,6	4,7	4,9	4,4	4,5
Afrika	10,8	8,8	8,3	7,9	8,5	7,1	6,9	7,2
Amerika Latin	9,1	6,5	6,8	7,8	6,6	7,2	8,2	11,2
Asia (tidak termasuk Jepang)	6,4	1,9	4,7	5,6	3,6	3,7	2,8	2,1
Tiongkok	5,9	-0,7	3,3	5,4	2,7	2,6	2,0	1,4
Malaysia	5,4	0,6	1,7	3,2	1,7	2,1	3,2	2,1
Thailand	5,5	-0,8	3,3	3,8	3,0	2,2	1,9	-0,9
Filipina	8,2	4,3	3,8	4,7	3,2	2,9	4,2	1,4
Vietnam	23,1	6,5	11,8	18,1	6,8	6,0	1,8	0,6
Rusia	14,1	11,7	6,9	8,5	5,1	6,8	7,8	15,6
Timur Tengah	8,7	4,4	3,7	4,0	3,1	3,1	3,2	3,7

Sumber: Bloomberg

Tabel 25.

Suku Bunga dan Nilai Tukar

Akhir periode, persen

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (10 th), %							
AS	3,84	3,29	1,88	1,76	3,03	2,17	2,27
Jepang	1,30	1,13	0,98	0,79	0,74	0,33	0,27
Kawasan Eropa	3,39	2,96	1,83	1,32	1,93	0,54	0,63
Libor 6 bulan, %							
USD	0,43	0,46	0,81	0,51	0,35	0,36	0,85
Yen	0,48	0,35	0,34	0,28	0,21	0,14	0,14
Euro	0,97	1,18	1,57	0,22	0,35	0,15	-0,04
Nilai Tukar							
USD/Yen	93,03	81,12	76,91	86,75	105,31	119,78	120,22
USD/EUR	1,43	1,34	1,30	1,32	1,37	1,21	0,92
USD/GBP	1,62	1,56	1,55	1,63	1,66	1,56	1,47

Sumber: Bloomberg

Istilah	Keterangan
Administered prices	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah
Austerity program	Program kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit atau belanja Pemerintah
Bailout	Injeksi dana talangan bagi pihak yang mengalami kesulitan dana/likuiditas
Barel	Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional
Basel III	Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, stress testing, dan resiko likuiditas pasar. Disepakati oleh anggota Basel Committee on Banking Supervision, dan akan diimplementasikan 2013-2018
BI Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Bid to Cover Ratio	Rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat permintaan terhadap suatu surat berharga selama proses lelang/penawaran dengan membandingkan antara jumlah total penawaran dengan yang dimenangkan
Capital Flows	Aliran modal dapat berupa aliran masuk atau keluar
Capital Reversal	Pembalikan arah pergerakan aliran modal
Clean Money Policy	Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar
Consensus Forecast	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai lembaga/pengamat/ekonom secara terpisah
Cost Push Inflation	Inflasi yang timbul karena adanya tekanan dari sisi suplai
Countercyclical Buffer	Tambahan/pengurangan penyangga modal yang ditujukan untuk menjaga ketahanan bank dalam menghadapi siklus perekonomian
Credit Limit	Batas Kredit
Credit Rating	Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi
Crisis Management Protocol	Prosedur manajemen krisis yang menetapkan protokol pengeluaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim tersebut
Deflasi	Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum
Deleveraging	Penurunan rasio leverage, atau penurunan persentase hutang dalam neraca suatu entitas ekonomi (rumah tangga atau perusahaan)
Dependency Ratio	Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk yang produktif
Deposit Facility	Fasilitas simpanan berjangka overnight dengan bank sentral
Deposit Rate	Tingkat suku bunga simpanan
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
Depresiasi Rupiah	Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Devisa	Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional
Disposable Income	Jumlah pendapatan pribadi individu yang dapat digunakan untuk belanja atau menabung setelah memperhitungkan pajak dan biaya lainnya
Down Payment	Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian
Dropshot	Pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran
Durables	Barang-barang tahan lama
Ekspansi Fiskal	Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah
Emerging Markets	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi
E-Money	Uang elektronik
Euro	Mata uang negara kawasan eropa
Exchange Rate Pass Through	Persentase perubahan dalam mata uang lokal akibat perubahan nilai tukar antara negara-negara pengekspor dan pengimpor yang berdampak pada perubahan harga barang/inflasi
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
Enabling Factor	Faktor Pendukung
External Imbalance	Keseimbangan eksternal yang terjadi ketika transaksi berjalan tidak mengalami surplus atau defisit yang berlebihan
Financial sophistication	Kecanggihan dalam pengelolaan keuangan
Financial Inclusion	Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat
Fiscal Drag	Dampak inflasi dan peningkatan pendapatan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar karena berpindahkannya pembayar pajak ke kelompok pajak yang lebih tinggi, tanpa harus diikuti oleh peningkatan pendapatan secara riil. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap permintaan agregat mengingat beban pajak yang tinggi akan mengurangi kemampuan belanja agen ekonomi
Fiscal Space	Ruang ekspansi kebijakan fiskal

Istilah	Keterangan
Flight to Quality	Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, dimana investor menjual apa yang mereka anggap sebagai investasi berisiko dan membeli investasi yang lebih aman
Fiscal Sustainability	Keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang
Fixed Subsidy	Subsidi yang diberikan dalam bentuk nilai yang tetap tanpa tergantung pada tingkat harga yang berlaku
Foreign Exchange Swap/ FX Swap	Transaksi/kontrak untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada tanggal valuta yang berbeda di masa yang akan datang, dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Kedua transaksi tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan counterparty yang sama
Forward Guidance	Strategi komunikasi yang digunakan oleh bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter untuk memengaruhi ekspektasi pasar tentang pergerakan suku bunga ke depan agar sesuai dengan arah kebijakan bank sentral
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan
Global Value Chain	Mekanisme kerja suatu produksi barang dimana tahapan-tahapan pekerjaan dalam proses produksi tersebut dilaksanakan di beberapa negara yang berbeda
Hedging	Lindung nilai dengan cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan
Idle Money	Uang yang tidak terpakai
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Imported Inflation	Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor
Indeks Kedalaman Kemiskinan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin
Indeks Keparahan Kemiskinan	Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin
Industrial Upgrading	Peningkatan industri produk non komoditas
Inflasi	Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum
Inflasi Inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi
Inflasi Inti Traded	Inflasi inti yang mencerminkan ketahanan eksternal
Interbank Lending	Penempatan dana bank pada bank lain
Intercompany Loans	Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur organisasi
Interoperabilitas	Kapabilitas dari suatu sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain tanpa batasan akses
Intra-regional Trade	Perdagangan internasional negara-negara dalam satu kawasan
Investasi	Suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Investasi Portofolio	Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan
Investment Grade	Peringkat layak investasi
Leading Indicator	indikator penuntun yang menunjukkan arah variabel acuan ke depan
Lending Facility	Penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada bank
Less Cash Society	Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai
Lifting	Volume minyak yang diambil dari tangki penampungan, diangkut dengan tanker atau melalui pipa, dan dijual kepada pembeli. Dengan kata lain, lifting minyak adalah produksi minyak yang siap jual
Long-Term Financing Operation	Skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan eropa dalam rangka mencegah ketetapan likuiditas credit crunch dengan jangka waktu 3 tahun
Low Income Country	Negara berpendapatan rendah
Lower Middle Income Country	Negara berpendapatan menengah rendah
M1	Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)
M2	Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
Margin	Selisih
Medium/High Technology	Kandungan jenis teknologi (menengah/tinggi) dalam produksi barang ekspor
Middle Income	Golongan orang berpendapatan menengah
Middle Income Trap	Jebakan negara berpendapatan menengah
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya
Minimum Holding Period	Jangka waktu minimal sebuah aset keuangan yang dimiliki sebelum dapat dijual kembali
Mismatch	Perbedaan jangka waktu antara aset dengan kewajiban dari suatu institusi keuangan

Istilah	Keterangan
Necara Transaksi Berjalan	Bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara, dari dan ke luar negeri
Negative Interest Rate	Tingkat suku bunga deposito nominal yang negatif
Net Demand	Permintaan bersih
Net Interest Margin	Rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif
Net Supply	Pasokan bersih
Net Worth	Total aset dikurangi total luar kewajiban dari seorang individu atau perusahaan
New Order	Pesanan baru
Nontradables Sector	Sektor yang tidak menghasilkan output yang dapat diperdagangkan ke luar negeri
Nondurables Goods	Barang-barang tidak tahan lama
Offshore	Pasar valas di luar wilayah yang menggunakan mata uang yang ditransaksikan
Online Banking	Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet
Onshore	Pasar valas di dalam wilayah yang menggunakan mata uang yang ditransaksikan
Otoritas Moneter	Suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang
Pasar Obligasi	Tempat diperdagangkannya obligasi
Pelonggaran Moneter	Kebijakan moneter yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perekonomian yang dinilai terlalu lambat. Contoh: menurunkan tingkat suku bunga
Pengetatan Moneter	Kebijakan moneter yang ditujukan untuk menahan kinerja perekonomian yang dinilai terlalu cepat. Contoh: menaikkan tingkat suku bunga
Periphery	Batas luar atau permukaan sesuatu
Push factor	Faktor pendorong
Quantitative Easing	Kebijakan pelonggaran atau penambahan stimulus moneter oleh bank sentral dengan cara membeli aset keuangan dalam jumlah tertentu dari bank komersial atau institusi swasta lainnya
Rasio Gini	Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan
Reinvestment Earning	Bagian laba yang diinvestasikan kembali
Repo	Perjanjian untuk membeli kembali
Repurchase Agreement	Transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati
Retribusi	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan
Return	Salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya
Reverse Repo	Transaksi pembelian surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan
Right Issue	Hak untuk memesan/membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan
Risk Appetite	Limit resiko yang ditetapkan secara menyeluruh
Risk Aversion	Penghindaran akan resiko
Risk Free	Bebas Resiko
Safe Heaven Asset	Aset yang memiliki resiko rendah
Samurai Bonds	Obligasi dalam denominasi mata uang yen yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dari suatu negara di luar Jepang dan diperdagangkan pada pasar Jepang
Second Round Effect	Dampak lanjutan dari suatu perubahan atau kebijakan
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
Smelter	Pabrik pengolahan dan pemurnian mineral
Solvabilitas	Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek
Subsidi	Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Super Cycle	Siklus yang memiliki jangka waktu lebih panjang dari siklus yang normal dalam pergerakan pasar keuangan atau aset
Supervisory Action	Tindakan supervisi dalam upaya memperkuat ketahanan sektor bank
Surveillance	Pengamatan atau pemantauan aktivitas, perilaku, atau perubahan informasi lainnya dari suatu obyek

Istilah	Keterangan
Tenor	Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan, atau tahun
Term Deposit	Sejumlah dana yang disimpan di bank atau subjek lembaga keuangan lainnya untuk jangka waktu minimum, sebelum dapat ditarik tanpa hukuman. Juga disebut deposito berjangka
Terms of trade	Perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap impornya
The Fed	Bank sentral Amerika Serikat yang merupakan itentitas independen di dalam pemerintahan
Unbanked	Individu atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya ditawarkan oleh lembaga keuangan
Upper Middle Income	Golongan orang berpendapatan menengah keatas
Velositas Uang	Kecepatan perputaran uang yang beredar dalam perekonomian
Volatile Food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional
Yield	Imbal hasil

Daftar Singkatan

No.	Singkatan	Kepanjangan
1	ABIF	ASEAN Banking Integration Framework
2	ABS	Asset Backed Securities
3	ABSPP	Asset-Backed Securities Purchase Programme
4	ACI	Association Cambiste Internationale
5	ADB	Asian Development Bank
6	AEC	ASEAN Economic Community
7	AFAS	Framework Agreement on Services
8	AFI	Alliance for Financial Inclusion
9	AFLN	Aset Finansial Luar Negeri
10	AFSBI	Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia
11	AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank
12	AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
13	AP	Administered Prices
14	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
15	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
16	APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
17	APMK	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
18	APSC	ASEAN Political-Security Community
19	ARAM	Angka Ramalan
20	AS	Amerika Serikat
21	ASA	ASEAN Swap Arrangement
22	ASCC	ASEAN Socio-Cultural Community
23	ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
24	ASEAN 5	Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina
25	ASEAN+3	Negara ASEAN + Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan
26	ATIGA	ASEAN Trade in Goods Agreement
27	ATM	Anjungan Tunai Mandiri
28	BA	Bank Asing
29	Bansos	Bantuan Sosial
30	Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
31	Bareskrim	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
32	BBM	Bahan Bakar Minyak
33	BBRT	Bahan Bakar Rumah Tangga
34	BCBS	Basel Committee on Banking Supervision
35	BCM	Business Continuity Management
36	BCSA	Bilateral Currency Swap Arrangement
37	BEI	Bursa Efek Indonesia
38	BI	Bank Indonesia
39	BI-CAC	Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center
40	BIG-eB	Bank Indonesia Government electronic Banking
41	BIS	Bank for International Settlement
42	BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
43	BLU	Badan Layanan Umum
44	BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
45	BoE	Bank of England
46	BoJ	Bank of Japan
47	BoK	Bank of Korea
48	BOP	Barang Operasional Perminyakan
49	BOPO	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
50	BOS	Bantuan Operasional Sekolah
51	Botasupal	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu

No.	Singkatan	Kepanjangan
52	BPD	Bank Pembangunan Daerah
53	BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
54	BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
55	BPM5	Balance of Payments and International Investment Position Manual, 5th edition
56	BPM6	Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition
57	BPN	Badan Pertanahan Nasional
58	BPR	Bank Perkreditan Rakyat
59	BPS	Badan Pusat Statistik
60	BSA	Bilateral Swap Arrangement
61	BSM	Bantuan Siswa Miskin
62	BU	Bank Umum
63	BUK	Bank Umum Konvensional
64	BUKU	Bank Umum Kegiatan Usaha
65	BULOG	Badan Urusan Logistik
66	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
67	BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
68	CAR	Capital Adequacy Ratio
69	CBCA	Cross Border Collateral Arrangement
70	CBP	Cadangan Beras Pemerintah
71	CBPP	Covered Bond Purchase Programme
72	CBR	Central Bank of Russia
73	CBRT	Central Bank of the Republic of Turkey
74	CBU	Completely Build Up
75	CCB	Countercyclical Capital Buffer
76	CCT	Crisis Communication Test
77	CDS	Credit Default Swap
78	CeBM	Central Bank Money
79	CF	Consensus Forecast
80	CGE	Computable General Equilibrium
81	CGS	Comprehensive Growth Strategy
82	CIP	Covered Interest Parity
83	CIV	Cash In Vault
84	CMIM	Chiang-Mai Initiative Multilateralization
85	COB	Currency Outside Bank
86	CPO	Crude Palm Oil
87	DAK	Dana Alokasi Khusus
88	DB	Doing Business
89	DBH	Dana Bagi Hasil
90	DF	Deposit Facility
91	DHE	Devisa Hasil Ekspor
92	DHN	Daftar Hitam Nasional
93	DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
94	DJPL	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
95	DNI	Daftar Negatif Investasi
96	DPAU	Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
97	DPK	Dana Pihak Ketiga
98	DPM	Departemen Pengelolaan Moneter
99	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
100	DSR	Debt Service Ratio
101	ECB	European Central Bank
102	EDC	Electronic Data Capture
103	EM	Emerging Markets

No.	Singkatan	Kepanjangan
104	EMBIG	Emerging Markets Bond Index Global
105	EMEAP	Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks
106	E-payment	Electronic payment
107	ERPD	Economic Review and Policy Dialogue
108	ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
109	FASBIS	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
110	FDI	Foreign Direct Investment
111	FDR	Financing to Deposit Ratio
112	FFR	Fed Fund Rate
113	FIN	Financial Identity Number
114	FIRST	The Financial Sector Reform and Strengthening Initiative
115	FKMM	Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial
116	FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
117	FMI	Financial Market Infrastructures
118	FOMC	Federal Open Market Committee
119	FSAP	Financial Sector Assessment Program
120	FSB	Financial Stability Board
121	FTV	Financing to Value Ratio
122	FX	Foreign Exchange
123	G20	Group of Twenty
124	Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani
125	GBI	Gubernur Bank Indonesia
126	GFSN	Global Financial Safety Net
127	GIH	Global Infrastructure Hub
128	GII	Global Infrastructure Initiative
129	GNNT	Gerakan Nasional Non Tunai
130	GPA	Global Policy Agenda
131	GPFI	Global Partnership on Financial Inclusion
132	GRMA	General Master Repurchase Agreement
133	GSIB	Global Sistemically Important Banks
134	GTCK	Gerakan Tanam Cabai di Musim Kemarau
135	GVCs	Global Value Chains
136	GWM	Giro Wajib Minimum
137	HAM	Hak Asasi Manusia
138	HCS	Hasil Cetak Sempurna
139	HLM	High Level Meeting
140	ICP	Indonesia Crude Price
141	IHK	Indeks Harga Konsumen
142	IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
143	IKNB	Institusi Keuangan Nonbank
144	IMF	International Monetary Fund
145	Inpres	Instruksi Presiden
146	IOSCO	International Organization of Security Commissions
147	IPE	Indeks Penjualan Eceran
148	IPJ	Informasi Pangan Jakarta
149	IPO	Initial Public Offering
150	IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
151	ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
152	ITF	Inflation Targeting Framework
153	Jabodetabek	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
154	JGB	Japanese Government Bond
155	JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate

No.	Singkatan	Kepanjangan
156	JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
157	JKD	Jaringan Komunikasi Data
158	JPKI	Jaring Pengaman Keuangan Internasional
159	JPSK	Jaring Pengaman Sistem Keuangan
160	K/L	Kementerian/Lembaga
161	KA	Kereta Api
162	KAD	Kerja Sama Antar Daerah
163	KADIN	Kamar Dagang dan Industri
164	KCJ	Kereta Commuter Jabodetabek
165	KEA	Komunitas Ekonomi ASEAN
166	Kemeneg	Kementerian Negara
167	Kemenkertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
168	Kemenkeu	Kementerian Keuangan
169	Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
170	KFLN	Kewajiban Finansial Luar Negeri
171	KI	Kredit Investasi
172	KIP	Kartu Indonesia Pintar
173	KIS	Kartu Indonesia Sehat
174	KK	Kredit Konsumsi
175	KKMB	Konsultan Keuangan Mitra Bank
176	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
177	KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
178	K/L	Kementerian/Lembaga
179	KMK	Kredit Modal Kerja
180	KNRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
181	KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
182	KPPK	Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
183	KPR	Kredit Pemilikan Rumah
184	KPwDN-BI	Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
185	KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
186	KSK	Kajian Stabilitas Keuangan
187	KSKS	Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera
188	KSM	Keluarga Sangat Miskin
189	KTI	Kawasan Timur Indonesia
190	KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
191	KUPVA	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
192	KUR	Kredit Usaha Rakyat
193	Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
194	LCR	Liquidity Coverage Ratio
195	LCS	Less Cash Society
196	LDR	Loan to Deposit Ratio
197	LF	Lending Facility
198	LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
199	LKD	Layanan Keuangan Digital
200	LKK	Lembaga Keuangan Konvensional
201	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
202	LKS	Lembaga Keuangan Syariah
203	LLD	Lalu Lintas Devisa
204	LNPRT	Lembaga Nonprofit Rumah Tangga
205	LPG	Liquified Petroleum Gas
206	LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
207	LTRO	Long-Term Refinancing Operation
208	LTV	Loan to Value

Daftar Singkatan - Lanjutan

No.	Singkatan	Kepanjangan
209	LU	Lapangan Usaha
210	MHP	Month Holding Period
211	Migas	Minyak dan Gas
212	Minerba	Mineral dan Batubara
213	MOPS	Mean of Platts Singapore
214	MoU	Memorandum of Understanding
215	MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
216	MRA	Master Repurchase Agreement
217	NAB	Nilai Aktiva Bersih
218	NDA	Net Domestic Assets
219	NDF	Nondeliverable Forward
220	MRA	Mutual Recognition Agreement
221	MTM	Month to Month
222	NFA	Net Foreign Assets
223	NFP	Nonfarm Payroll
224	NIM	Net Interest Margin
225	NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
226	NK	Nota Kesepahaman
227	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
228	Nonmigas	Non Minyak dan Gas
229	NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
230	NPF	Non Performing Financing
231	NPG	National Payment Gateway
232	NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
233	NPL	Non Performing Loan
234	NSFR	Net Stable Funding Ratio
235	NTB	Nusa Tenggara Barat
236	O/N	Overnight
237	OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
238	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
239	OM	Operasi Moneter
240	OP	Orang Pribadi
241	OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
242	OPT	Operasi Pasar Terbuka
243	OTC	Over The Counter
244	P2P	Person to Person
245	PAD	Pendapatan Asli Daerah
246	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
247	PBI	Peraturan Bank Indonesia
248	PBoC	People's Bank of China
249	PDB	Produk Domestik Bruto
250	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
251	PE	Pajak Ekspor
252	Pelni	Pelayaran Nasional Indonesia
253	Pemda	Pemerintah Daerah
254	Pemilu	Pemilihan Umum
255	Pemprov	Pemerintah Provinsi
256	PerMen	Peraturan Menteri
257	Perpres	Peraturan Presiden
258	Perum Peruri	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
259	PFMIs	Principles for Financial Market Infrastructures

No.	Singkatan	Kepanjangan
260	PII	Posisi Investasi Internasional
261	PIN	Personal Identification Number
262	PKH	Program Keluarga Harapan
263	PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
264	PLL	Precautionary and Liquidity Line
265	PLN	Perusahaan Listrik Negara
266	PLRT	Penata Laksana Rumah Tangga
267	PM	Peraturan Menteri
268	PMA	Penanaman Modal Asing
269	PMK	Protokol Manajemen Krisis
270	PMT	Penyelia Mitra Tani
271	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
272	PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
273	PNS	Pegawai Negeri Sipil
274	Pokjanas	Kelompok Kerja Nasional
275	Poktan	Kelompok Tani
276	PP	Perusahaan Pembiayaan
277	PPH	Pajak Penghasilan
278	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
279	PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
280	PPP	Public Private Partnership
281	PSE	Pelayanan Secara Elektronik
282	PSKS	Program Simpanan Keluarga Sejahtera
283	PTK	Pencatatan Transaksi Keuangan
284	PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
285	PTP	Point to Point
286	PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
287	PUAB	Pasar Uang Antar Bank
288	PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
289	QAB	Qualified ASEAN Banks
290	QE	Quantitative Easing
291	Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
292	RBA	Reserve Bank of Australia
293	RBI	Reserve Bank of India
294	RCAP	Regulatory Consistency Assessment Program
295	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership
296	RCU	Rencana Cetak Uang
297	RDG	Rapat Dewan Gubernur
298	REMBI	Regional Macroeconomic Model Bank Indonesia
299	RFA	Regional Financial Arrangement
300	RKP	Rencana Kerja Pemerintah
301	RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
302	RKT	Rencana Keberlangsungan Tugas
303	RMB	Renminbi
304	ROA	Return on Asset
305	ROE	Return on Equity
306	RR	Reverse Repo
307	RT	Rumah Tangga
308	RTGS	Real Time Gross Settlement
309	RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
310	RUU	Rancangan Undang-Undang
311	SAK-ETAP	Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
312	SAP	Strategic Action Plan
313	SARB	South African Reserve Bank

No.	Singkatan	Kepanjangan
314	SBI	Sertifikat Bank Indonesia
315	SBN	Surat Berharga Negara
316	SBS	Surat Berharga Syariah
317	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
318	SDA	Sumber Daya Alam
319	SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
320	SDGs	The 2030 Sustainable Development Goals
321	SDHI	Sukuk Dana Haji Indonesia
322	SDM	Sumber Daya Manusia
323	SDR	Special Drawing Rights
324	SE	Surat Edaran
325	SIB	Systemically Important Banks
326	SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
327	SITC	Standard International Trade Classification
328	SK	Surat Keputusan
329	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
330	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
331	SME	Small Medium Enterprises
332	SNRT	Survei Neraca Rumah Tangga
333	SOP	Standard Operational Procedure
334	SP	Sistem Pembayaran
335	SPN	Surat Perbendaharaan Negara
336	SPPUR	Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
337	SPT	Surat Pemberitahuan
338	SSB	Surat-Surat Berharga
339	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
340	SSSS	Scrpless Securities Settlement System
341	SUN	Surat Utang Negara
342	TA	Technical Assistance
343	TB	Transaksi Berjalan
344	Tabama	Tanaman Bahan Makanan
345	TD	Term Deposit
346	TKI	Tenaga Kerja Indonesia
347	TLAC	Total Loss Absorbing Capacity

No.	Singkatan	Kepanjangan
348	TMF	Transaksi Modal dan Finansial
349	TNI	Tentara Nasional Indonesia
350	TNI-AL	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut
351	TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
352	ToB	Training of Beneficiary
353	ToT	Terms of Trade
354	TPE	Terminal Parkir Elektronik
355	TPI	Tim Pengendalian Inflasi
356	TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
357	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
358	TTL	Tarif Tenaga Listrik
359	TUKAB	Transaksi Uang Kartal Antar Bank
360	UKA	Uang Kertas Asing
361	UKM	Usaha Kecil dan Menengah
362	ULE	Uang Layak Edar
363	ULN	Utang Luar Negeri
364	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
365	UMP	Upah Minimum Provinsi
366	Upsus	Upaya Peningkatan Khusus
367	UTLE	Uang Tidak Layak Edar
368	UU	Undang-Undang
369	UUS	Unit Usaha Syariah
370	CIV	Uang yang Diedarkan
371	Valas	Valuta Asing
372	VCF	Value Chain Financing
373	VF	Volatile Food
374	WCPSS	Working Committee on Payment and Settlement Systems
375	WEO	World Economic Outlook
376	WIIB	World Islamic Investment Bank
377	Wisman	Wisatawan Mancanegara
378	WTO	World Trade Organization
379	YoY	Year on Year
380	ZIS	Zakat, Infak, Sedekah

TIM PENYUSUN

Pengarah

Juda Agung

Penanggung Jawab dan Editor:

Solikin M. Juhro, Arief Hartawan, Yoga Affandi,
T.M. Arief Machmud

Koordinator Penyusun:

Wahyu Agung Nugroho, Nugroho Joko Prastowo,
Donni Fajar Anugrah

Tim Penulis:

Ade Yulianti, Adela Putri Rizkia, Andi Widiyanto,
Anisha W. Cahyaningrum, Archi Hilmardhany,
Arief Rachman, Arnita Rishanty, Ayi Supriyadi,
Darius Tirtosuharto, Diah Indira, Dian Prima Susiandri,
Dyah Maharani Irmasari, Elpiwin Adela, Evy M. D. Siburian,
Fenty Tirtasari E., Ferry Kurniawan, Indra Astrayuda,
Indra Gunawan Sutarto, Irfan Hendrayadi,
Jardine A. Husman, Linda Nurliana, Mira Rahmawaty,
Mualam Noor, Mutiara Sibarani, Nurkholisoh Ibnu Aman,
Primitiva Febriarti, Puput Kurniati, Renold Abdi, Rif'at Pasha,
Risa Fadila, Robbi Nur Rakhman, Rozidyanti, Sulisty, o,
Syachman Perdymer, Tony Noor Tjahjono, Tri Wahyono,
Vidi Adyatama Nugraha, Wishnu Mahraddika, Yanfitri,
Yenny Fridayanti

Tim Pendukung:

Illinia Ayudhia Riyadi, Tri Kurnia Ayu S., Rio Khasananda

Kontributor:

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Departemen Pengelolaan Moneter
Departemen Kebijakan Makroprudensial
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Departemen Statistik
Departemen Internasional
Departemen Pengelolaan Uang
Departemen Pengembangan UMKM
Pusat Program Transformasi Bank Indonesia
Departemen Regional I
Departemen Regional II
Departemen Regional III
Departemen Regional IV



BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350 - INDONESIA
www.bi.go.id